



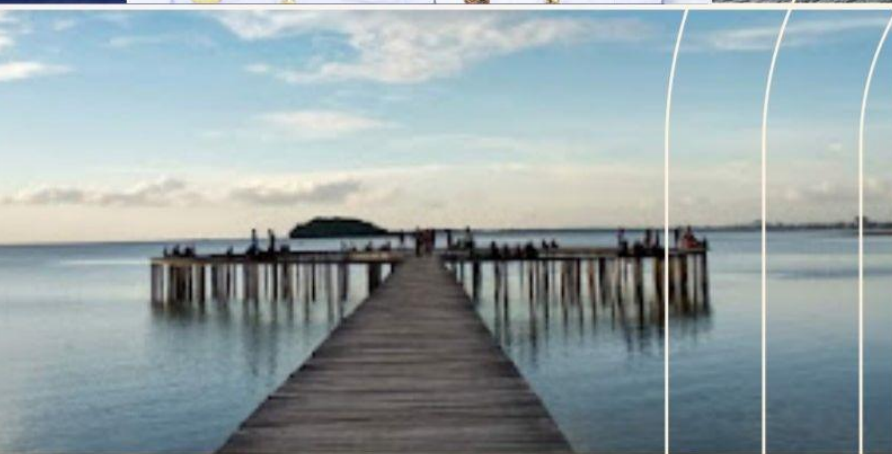
PEMERINTAH
KABUPATEN
BELITUNG

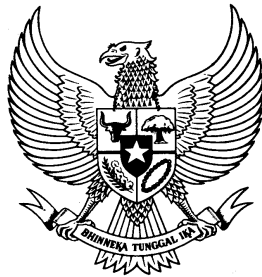
RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN
BELITUNG

2025
2029





BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah;
 - b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan disusun dengan berpedoman pada rencana jangka pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor

10....

- 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Perangkat....

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Visi....

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah.
26. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana lima tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - b. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - c. Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah; dan
 - d. Kinerja....

- d. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;
 - c. Pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
 - d. penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Daerah;
- c. Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan.
- e. Penutup.

Pasal 4

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD dapat diberlakukan sebagai program transisi dan menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.4/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN, Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkrit, spesifik dan operasional menjadi operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi Misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari

Visi...

visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memuat arah kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 99



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG.....	10
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	12
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA	16
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	17
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH.....	20
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	20
2.1.1 <i>Aspek Geografi dan Demografi</i>	20
2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah	20
2.1.1.2 Topografi	21
2.1.1.3 Geologi	22
2.1.1.4 Hidrologi	23
2.1.1.5 Klimatologi	24
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	25
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah	26
2.1.1.8 Potensi Sumber Daya Alam	27
2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung (DDT) Lingkungan Hidup	30
2.1.1.10 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	36
2.1.1.11 Lingkungan Hidup Berkualitas	40
2.1.1.12 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	46
2.1.1.13 Demografi	49
2.1.2 <i>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</i>	54
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	54
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua	73
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	77
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	83
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	83
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	84
2.1.3 <i>Aspek Daya Saing Daerah</i>	87
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	87
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	88
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	94
2.1.3.4 Transformasi Digital	95
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	95
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	97
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	99
2.1.4 <i>Aspek Pelayanan Umum</i>	101
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	101
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	103
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	105
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	106

2.1.4.5	Standar Pelayanan Minimal	174
2.1.4.6	Indikator Kinerja Kunci	182
2.2	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	191
2.2.1	<i>Kinerja Keuangan Masa Lalu</i>	191
2.2.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	192
2.2.1.2	Neraca Daerah	205
2.2.2	<i>Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu</i>	217
2.2.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	217
2.2.2.2	Analisis Pembiayaan	233
2.2.3	<i>Kerangka Pendanaan</i>	242
2.2.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	242
2.2.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	251
2.3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	254
2.3.1	<i>Permasalahan Pembangunan Daerah</i>	254
2.3.2	<i>Isu Nasional dan Telaah Kajian</i>	269
2.3.2.1	Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	269
2.3.2.2	Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi	279
2.3.2.3	Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung	285
2.3.2.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	288
2.3.2.5	Telaah Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis	290
2.3.3	<i>Isu Strategis RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029</i>	293
BAB 3	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH...	306
3.1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	306
3.1.1	<i>Visi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029</i>	306
3.1.2	<i>Misi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029</i>	308
3.1.2.1	Misi 1 - Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	314
3.1.2.2	Misi 2 - Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial	315
3.1.2.3	Misi 3 - Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	317
3.1.2.4	Misi 4 - Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan	318
3.1.3	<i>Tujuan dan Sasaran</i>	319
3.1.3.1	Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	319
3.1.3.2	Tujuan 2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial	322
3.1.3.3	Tujuan 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)	325
3.1.3.4	Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	329
3.2	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	336
3.2.1	<i>Strategi</i>	336
3.2.1.1	Strategi Misi 1- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	336
3.2.1.2	Strategi Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial	337
3.2.1.3	Strategi Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	340
3.2.1.4	Strategi Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan	342
3.2.2	<i>Arah Kebijakan Pembangunan</i>	345
3.2.3	<i>Program Prioritas</i>	369
3.2.4	<i>Kegiatan Prioritas dan Proyek Strategis</i>	396
BAB 4	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	410



4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	410
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	462
4.2.1	<i>Penetapan Indikator Kinerja Daerah</i>	<i>462</i>
4.2.2	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>462</i>
4.2.2.1	Indikator Kinerja Tujuan dan Target	462
4.2.2.2	Indikator Kinerja Sasaran dan Target	465
4.2.3	<i>Indikator Kinerja Daerah.....</i>	<i>468</i>
4.2.4	<i>Indikator Kinerja Kunci</i>	<i>480</i>
4.2.5	<i>Indikator Utama Pembangunan.....</i>	<i>491</i>
BAB 5	PENUTUP.....	497
5.1	KESIMPULAN	497
5.2	KAIDAH PELAKSANAAN	497

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN BELITUNG	23
TABEL 2.2 CURAH HUJAN, JUMLAH HARI HUJAN, DAN LAMA PENYINARAN MATAHARI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024.....	24
TABEL 2.3 SUHU DAN KELEMBABAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024.....	25
TABEL 2.4 PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN BELITUNG	26
TABEL 2.5 PRODUKSI KOMODITAS SEKTOR PERTANIAN	28
TABEL 2.6 PRODUKSI KOMODITAS PERIKANAN BERDASARKAN JENIS TANGKAP DAN BUDIDAYA	29
TABEL 2.7 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN KECAMATAN	50
TABEL 2.8 RASIO JENIS KELAMIN KABUPATEN BELITUNG	51
TABEL 2.9 KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024	52
TABEL 2.10 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN JENIS KELAMIN	54
TABEL 2.11 LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	56
TABEL 2.12 MATRIKS TIPOLOGY KLASSEN SEKTOR PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	58
TABEL 2.13 PERKEMBANGAN TIPOLOGY KLASSEN SEKTOR PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022- 2024	59
TABEL 2.14 HASIL PERHITUNGAN LQ (LOCATION QUOTIENT) SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	61
TABEL 2.15 HASIL PERHITUNGAN SHIFT SHARE SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN BELITUNG.....	63
TABEL 2.16 KLASIFIKASI SEKTOR PDRB KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024 BERDASARKAN HASIL ANALISIS SHIFT SHARE	64
TABEL 2.17 CAPAIAN URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	108
TABEL 2.18 CAPAIAN URUSAN KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	114
TABEL 2.19 CAPAIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	121
TABEL 2.20 CAPAIAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	125
TABEL 2.21 CAPAIAN URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	127
TABEL 2.22 CAPAIAN URUSAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	129
TABEL 2.23 CAPAIAN KINERJA URUSAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	130
TABEL 2.24 CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	132
TABEL 2.25 CAPAIAN KINERJA URUSAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	135
TABEL 2.26 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024... ..	137
TABEL 2.27 CAPAIAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	138
TABEL 2.28 CAPAIAN KINERJA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	140
TABEL 2.29 CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	141
TABEL 2.30 CAPAIAN KINERJA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	143
TABEL 2.31 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	144
TABEL 2.32 CAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	145
TABEL 2.33 CAPAIAN KINERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	146

TABEL 2.34 CAPAIAN KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	148
TABEL 2.35 CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	149
TABEL 2.36 CAPAIAN KINERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	150
TABEL 2.37 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024 ...	151
TABEL 2.38 CAPAIAN KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024 ..	152
TABEL 2.39 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	153
TABEL 2.40 CAPAIAN KINERJA URUSAN KEARSIPAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	155
TABEL 2.41 CAPAIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	156
TABEL 2.42 CAPAIAN URUSAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	158
TABEL 2.43 CAPAIAN URUSAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	159
TABEL 2.44 CAPAIAN URUSAN PETERNAKAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	160
TABEL 2.45 CAPAIAN URUSAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	163
TABEL 2.46 CAPAIAN URUSAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	164
TABEL 2.47 REALISASI CAPAIAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	166
TABEL 2.48 REALISASI CAPAIAN URUSAN KEUANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024...	167
TABEL 2.49 REALISASI CAPAIAN URUSAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	168
TABEL 2.50 REALISASI CAPAIAN URUSAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	169
TABEL 2.51 REALISASI CAPAIAN URUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	169
TABEL 2.52 REALISASI CAPAIAN URUSAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	171
TABEL 2.53 REALISASI CAPAIAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	172
TABEL 2.54 REALISASI CAPAIAN URUSAN PERENCANAAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	172
TABEL 2.55 REALISASI CAPAIAN URUSAN KEWILAYAHAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	173
TABEL 2.56 CAPAIAN INDIKATOR SPM URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	174
TABEL 2.57 CAPAIAN INDIKATOR SPM URUSAN KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	175
TABEL 2.58 CAPAIAN INDIKATOR SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	177
TABEL 2.59 CAPAIAN INDIKATOR SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	178
TABEL 2.60 CAPAIAN INDIKATOR SPM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	179
TABEL 2.61 CAPAIAN INDIKATOR SPM URUSAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	180
TABEL 2.62 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (IKK) RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	182
TABEL 2.63 PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN.....	194
TABEL 2.64 REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 – 2024	197
TABEL 2.65 PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021-2024	200
TABEL 2.66 REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	202
TABEL 2.67 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	204
TABEL 2.68 NERACA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	206
TABEL 2.69 RASIO KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	211
TABEL 2.70 RASIO AKTIVITAS KEUANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	215

TABEL 2.71 PROPORSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	218
TABEL 2.72 KATEGORI KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	221
TABEL 2.73 PROPORSI BELANJA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	227
TABEL 2.74 DEFISIT RILL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	235
TABEL 2.75 PROPORSI TOTAL DEFISIT RILL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024.....	237
TABEL 2.76 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	238
TABEL 2.77 RINCIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	239
TABEL 2.78 HASIL PROYEKSI SISA LEBIH RIIL PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2025-2030.....	241
TABEL 2.79 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026-2030	244
TABEL 2.80 PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026-2030	247
TABEL 2.81 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026-2030.....	250
TABEL 2.82 PROYEKSI KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026-2030	252
TABEL 2.83 RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026-2030	253
TABEL 2.84 DAFTAR PERMASALAHAN	254
TABEL 2.85 TELAAH ISU STRATEGIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	280
TABEL 2.86 TELAAH ISU STRATEGIS RPJPD KABUPATEN BELITUNG 2025-2045	285
TABEL 2.87 TELAAH RTRW KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021-2041	288
TABEL 2.88 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TAHUN 2025-2029 KABUPATEN BELITUNG	290
TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG 2025-2029.....	332
TABEL 3.2 KETERHUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BELITUNG	346
TABEL 3.3 KETERHUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG	361
TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN.....	366
TABEL 3.5 PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD	368
TABEL 3.6 PROGRAM PRIORITAS	369
TABEL 3.7 KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK STRATEGIS.....	396
TABEL 3.8 LINIERITAS PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG	403
TABEL 4.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	411
TABEL 4.2 TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2030	464
TABEL 4.3 TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2030	466
TABEL 4.4 TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2030	469
TABEL 4.5 TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (IKK) RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2030	480
TABEL 4.6 TARGET INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP) RPJMD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2030	491

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	16
GAMBAR 2. 1 PETA KAWASAN KABUPATEN BELITUNG	20
GAMBAR 2. 2 LUAS WILAYAH DARAT KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG (KM ²)	21
GAMBAR 2. 3 PETA GEOLOGI LEMBAR BELITUNG (BAHARUDDIN DAN SIDARTO, 1995)	23
GAMBAR 2. 4 PRODUKSI KOMODITAS SEKTOR PETERNAKAN	27
GAMBAR 2. 5 PETA SEBARAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN BELITUNG	30
GAMBAR 2. 6 INDEKS KETAHANAN PANGAN	37
GAMBAR 2. 7 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN PANGAN	38
GAMBAR 2. 8 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA	39
GAMBAR 2. 9 AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI AIR MINUM	40
GAMBAR 2. 10 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	41
GAMBAR 2. 11 INDEKS KUALITAS AIR	42
GAMBAR 2. 12 INDEKS KUALITAS UDARA	43
GAMBAR 2. 13 INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	44
GAMBAR 2. 14 INDEKS RISIKO BENCANA (IRB)	47
GAMBAR 2. 15 INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	48
GAMBAR 2. 16 PETA KERAWANAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG	49
GAMBAR 2. 17 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	51
GAMBAR 2. 18 PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024	53
GAMBAR 2. 19 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	55
GAMBAR 2. 20 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	55
GAMBAR 2. 21 KLASIFIKASI SEKTOR PDRB KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN TIPOLOGY KLASSEN TAHUN 2020-2024	57
GAMBAR 2. 22 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	66
GAMBAR 2. 23 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	66
GAMBAR 2. 24 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	67
GAMBAR 2. 25 PDRB PER KAPITA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	68
GAMBAR 2. 26 PENGELUARAN PER KAPITA (RIBU RUPIAH/ ORANG/ TAHUN) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	69
GAMBAR 2. 27 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	70
GAMBAR 2. 28 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	70
GAMBAR 2. 29 INDEKS GINI DI KABUPATEN BELITUNG DAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024	71
GAMBAR 2. 30 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	73
GAMBAR 2. 31 USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	74
GAMBAR 2. 32 USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	75
GAMBAR 2. 33 INDEKS KELUARGA SEHAT KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	75
GAMBAR 2. 34 PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	76

GAMBAR 2. 35 RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	78
GAMBAR 2. 36 RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	78
GAMBAR 2. 37 HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	79
GAMBAR 2. 38 HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024	80
GAMBAR 2. 39 KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-2024	80
GAMBAR 2. 40 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BELITUNG	81
GAMBAR 2. 41 INDIKATOR NILAI/TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	82
GAMBAR 2. 42 INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021-2024	85
GAMBAR 2. 43 INDEKS KETIMPANGAN GENDER KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	86
GAMBAR 2. 44 CAPAIAN ANGKA KETERGANTUNGAN	88
GAMBAR 2. 45 CAPAIAN RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN	89
GAMBAR 2. 46 CAPAIAN RASIO PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM	90
GAMBAR 2. 47 CAPAIAN PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF	91
GAMBAR 2. 48 CAPAIAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	92
GAMBAR 2. 49 CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH	93
GAMBAR 2. 50 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI	95
GAMBAR 2. 51 CAPAIAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) (DALAM MILIAR)	96
GAMBAR 2. 52 CAPAIAN EKSPOR BARANG DAN JASA (DALAM MILIAR)	97
GAMBAR 2. 53 CAPAIAN PERSENTASE DESA MANDIRI	99
GAMBAR 2. 54 RASIO PAJAK TERHADAP PDRB	100
GAMBAR 2. 55 CAPAIAN TINGKAT INFLASI	101
GAMBAR 2. 56 CAPAIAN INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	102
GAMBAR 2. 57 CAPAIAN PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	104
GAMBAR 2. 58 CAPAIAN INDEKS DAYA SAING DAERAH	106
GAMBAR 2. 59 ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN BELITUNG 2024-2024	107
GAMBAR 2. 60 AKB, AKI, ANGKA KEMATIAN BALITA DAN NEONATAL	114
GAMBAR 2. 61 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024 <i>SUMBER : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, 2025 (DIOLAH)</i>	194
GAMBAR 2. 62 BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	199
GAMBAR 2. 63 RASIO LIKUIDITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	212
GAMBAR 2. 64 RASIO SOLVABILITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	214
GAMBAR 2. 65 RASIO AKTIVITAS KEUANGAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	216
GAMBAR 2. 66 RATA-RATA PROPORSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	219
GAMBAR 2. 67 RASIO KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	221
GAMBAR 2. 68 RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	222
GAMBAR 2. 69 RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	223
GAMBAR 2. 70 RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	225
GAMBAR 2. 71 RASIO EFEKTIVITAS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	226
GAMBAR 2. 72 RATA-RATA PROPORSI BELANJA KABUPATEN BELITUNG	228
GAMBAR 2. 73 PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA	229
GAMBAR 2. 74 PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020-2024	230
GAMBAR 2. 75 PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP DANA TRANSFER UMUM	231
GAMBAR 2. 76 PROPORSI SILPA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP BELANJA DAERAH	232
GAMBAR 2. 77 VISI DAN MISI PRESIDEN DALAM RPJMN 2025-2029	270



GAMBAR 2. 78 LOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI KABUPATEN BELITUNG	277
GAMBAR 2. 79 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN 2025-2029	278
GAMBAR 2. 80 TEMA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029	283
GAMBAR 2. 81 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS (KSP) PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029	284
GAMBAR 3. 1 VISI RPJMD KABUPATEN BELITUNG 2025-2029.....	306
GAMBAR 3. 2 MISI RPJMD KABUPATEN BELITUNG 2025-2029	309
GAMBAR 3. 3 LINEARISASI MISI RPJMD KABUPATEN BELITUNG 2025-2029 TERHADAP RPJMD PROVINSI DAN RPJMN	310
GAMBAR 3. 4 KONSTRUKSI MISI 1	315
GAMBAR 3. 5 KONSTRUKSI MISI 2	316
GAMBAR 3. 6 KONSTRUKSI MISI 3	317
GAMBAR 3. 7 KONSTRUKSI MISI 4	318
GAMBAR 3. 8 CASCADING MISI 1 – MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	321
GAMBAR 3. 9 CASCADING MISI 2 – MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR UNGGUL DAN POTENSIAL.....	323
GAMBAR 3. 10 CASCADING MISI 3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, BERSIH DAN BERMARTABAT.....	327
GAMBAR 3. 11 CASCADING MISI 4 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN	329

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan yang baik dan keberhasilan pembangunan akan terlihat pada hasil pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menguraikan bahwa, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah, diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah itu sendiri. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan

pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah Kabupaten Belitung terpilih.

Pada Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diuraikan mengenai persiapan dalam penyusunan RPJMD, yang mencakup: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; serta penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RPJMD Kabupaten Belitung akan memuat saran ataupun masukan dari berbagai sektor untuk pembangunan Kabupaten Belitung 5 tahun kedepan melalui forum konsultasi publik dengan berbagai data pendukung yang memadai. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya.

Berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 mengarah kepada arah kebijakan periode 1 yang berisikan mewujudkan masyarakat yang produktif dan memperkuat perekonomian yang berdaya saing berbasis potensi daerah dengan pengembangan kawasan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan periode I RPJPD Kabupaten Belitung berfokus pada penciptaan masyarakat yang produktif dan penguatan perekonomian lokal. Upaya ini memerlukan pengembangan kawasan yang memperhatikan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah dan daya tarik kepariwisataan Kabupaten Belitung. Pengembangan kawasan yang berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menjaga potensi ekonomi yang ada. Untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat, diperlukan peningkatan aksesibilitas ke fasilitas dan infrastruktur yang ada.

Pengembangan kawasan yang berkelanjutan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bijak dan berkesinambungan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi

masyarakat setempat agar dapat berdaya saing. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan dan koordinasi cermat antara berbagai lembaga pemerintah, serta investasi sektor swasta. Selain itu, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong kegiatan perekonomian. Penguatan sumber daya manusia dan perekonomian di Kabupaten Belitung harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai faktor pendukungnya. Pengembangan kawasan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, sementara peningkatan kualitas pelayanan publik dapat memperkuat perekonomian.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
- 12) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
- 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6951);
- 14) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

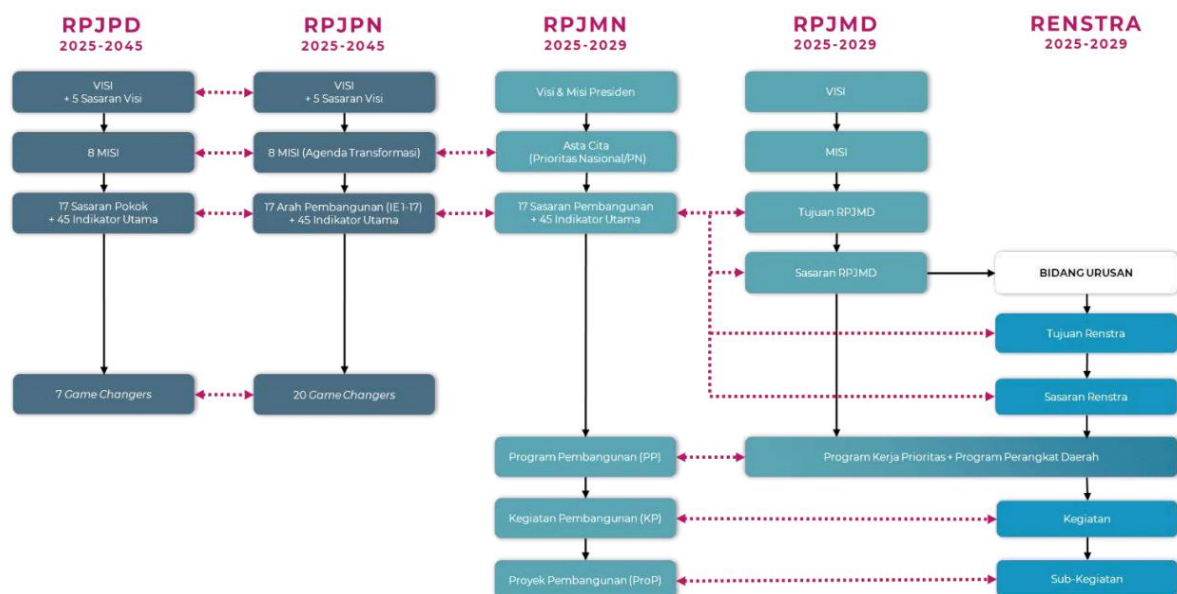
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 26) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 28) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- 30) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);

- 32) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 33) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 41) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 seri E);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 96).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup: penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan arah kebijakan; perumusan program pembangunan daerah; perumusan program Perangkat Daerah; dan KLHS.



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Belitung. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

- 1) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029
- 2) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029
- 3) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025-2029
- 4) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 disusun dengan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, program Kepala Daerah terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung. RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Secara umum tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Serta amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait dengan gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Selain itu, pentingnya bab ini adalah memberikan penekanan terhadap pentingnya analisis yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung, tujuan yang ingin dicapai, dan sistematika penulisan yang merupakan paparan isi dan alur dari laporan hasil analisis yang disusun.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini terdiri dari 3 sub bab, sub bab pertama yakni Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Sub bab kedua gambaran keuangan daerah menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan masa lalu (realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024), dan kerangka keuangan untuk 5 tahun yang akan datang (proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029). Selain gambaran pengelolaan keuangan daerah, pada bab ini juga membahas neraca keuangan daerah Kabupaten Belitung. Sub bab ketiga yakni permasalahan dan isu strategis daerah berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/ kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar sebagai pijakan dalam merumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Belitung. Selain pembahasan mengenai isu-isu strategis, pembahasan juga terfokus terhadap telaah-telaah dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, dan RPJMD daerah sekitar.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memiliki 2 sub bab, pertama sub bab visi dan misi berkaitan dengan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Belitung terpilih, serta tujuan maupun sasaran dari RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Sub bab kedua yakni Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas memuat strategi dan arah kebijakan Kabupaten Belitung dalam mencapai tujuan dan juga sasaran. Selain itu juga berisi beberapa program prioritas Kabupaten Belitung dalam upaya

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi tentang daftar program Perangkat Daerah Kabupaten Belitung di Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Kemudian juga terdapat indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Bab ini juga memuat terkait dengan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan juga memuat target penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan juga rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Pada bab ini berisikan terkait rekomendasi kinerja dan juga rekomendasi kerja yang dapat dilakukan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

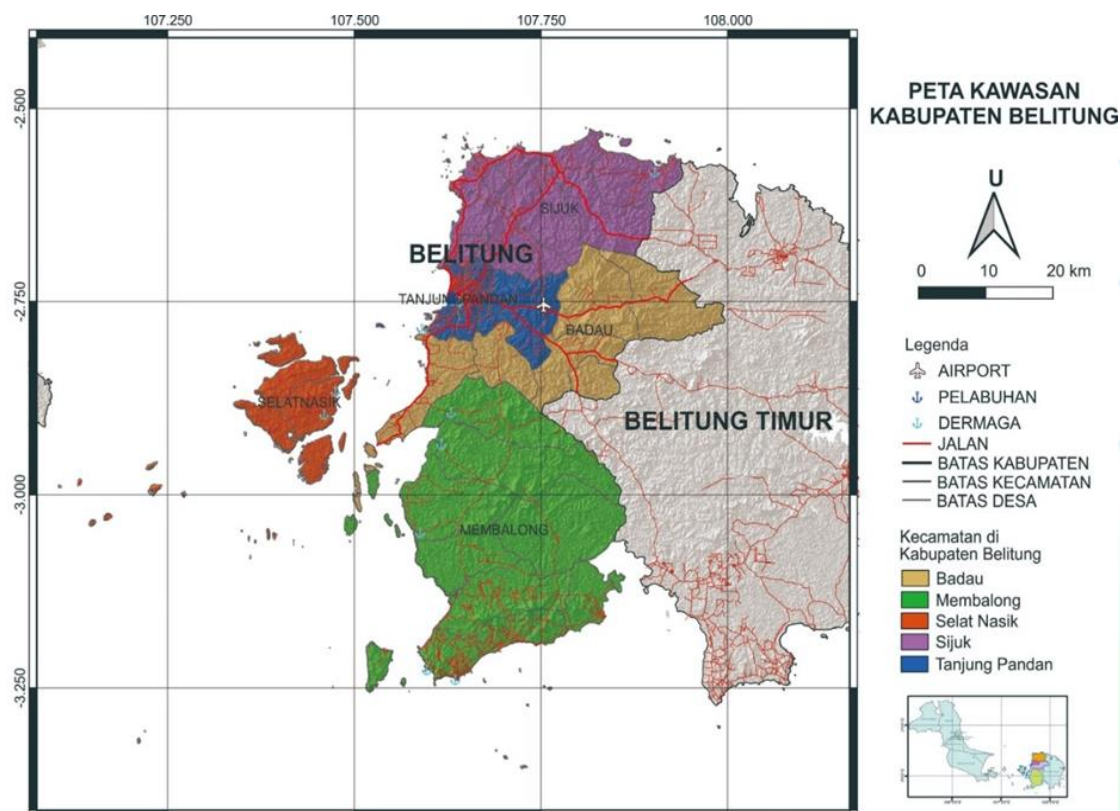
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Belitung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak pada 107°08' BT - 107°58' BT dan 02°30' LS - 03°15' LS, dengan batas wilayah meliputi:

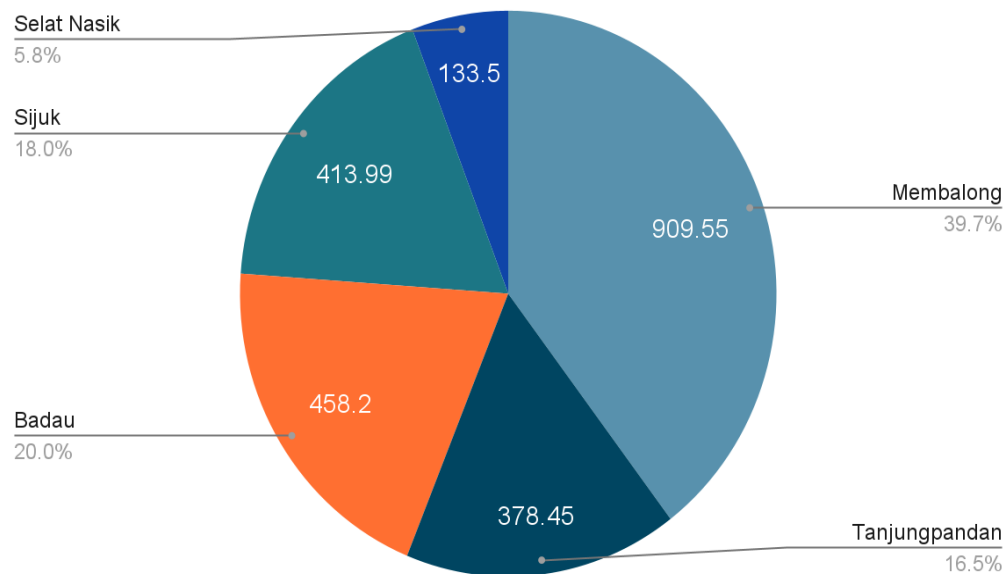
- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Belitung Timur
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Selat Gaspar



Gambar 2. 1 Peta Kawasan Kabupaten Belitung
Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung sendiri juga termasuk kedalam wilayah kepulauan yang terdiri dari total 163 pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, selain itu masih terdapat pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Kabupaten Belitung memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 229.369,13 Ha atau 2.293,69 km². Kabupaten Belitung memiliki 5 kecamatan diantaranya adalah:

Kecamatan Membalong	: 909,55 km ²
Kecamatan Tanjungpandan	: 378,45 km ²
Kecamatan Badau	: 458,2 km ²
Kecamatan Sijuk	: 413,99 km ²
Kecamatan Selat Nasik	: 133,5 km ²



Gambar 2. 2 Luas Wilayah Darat Kecamatan di Kabupaten Belitung (km²)

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Kecamatan Membalong adalah kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Belitung, yang kemudian disusul oleh Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjung pandan, dan Kecamatan Selat Nasik.

Selain soal batas-batas wilayah dan juga pembagian daerah administratif, aspek geografi suatu wilayah juga dapat dilihat dari berbagai hal lainnya seperti topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan pengembangan wilayah.

2.1.1.2 Topografi

Topografi Kabupaten Belitung relatif datar dengan elevasi maksimum 500 meter di atas permukaan laut yang terdapat di Gunung Tajam. Daerah hilir, terutama pantai, dibagi menjadi beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama. Di sebelah utara terdapat DAS Buding, di sebelah selatan terdapat DAS Pala dan Kembiri, serta di sebelah barat terdapat DAS Brang dan Cerucuk. Komposisi batuan utama meliputi kwarsa, pasir, batuan alluvial, dan granit. Kwarsa dan pasir tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan, kecuali di Kecamatan Selat Nasik yang tidak memiliki batuan alluvial.

Wilayah pantai memiliki lereng yang landai dengan kemiringan sekitar 5–10%. Tutupan lahan di wilayah pantai bervariasi, termasuk hutan, perkebunan, rawa, permukiman, dan pantai berpasir. Sebagian besar muara adalah rawa dengan hutan bakau, namun beberapa area pantai berpasir putih atau berbatu juga terdapat di beberapa tempat.

Perairan di Kabupaten Belitung mencakup laut, pantai, dan perairan umum seperti kolong (danau bekas galian timah), rawa-rawa, dan sungai. Perairan pantai umumnya dangkal, dengan kedalaman antara 10–15 meter, meskipun di beberapa tempat bisa mencapai 15–30 meter. Dasar lautnya didominasi oleh pasir, lumpur, dan batu karang. Secara umum, substrat dasar perairan di bagian barat Kabupaten Belitung terdiri dari paparan batu karang dan pasir kerikil, dengan permukaan yang tidak rata dan beberapa area tergenang air dengan kedalaman sekitar 0,55 meter.

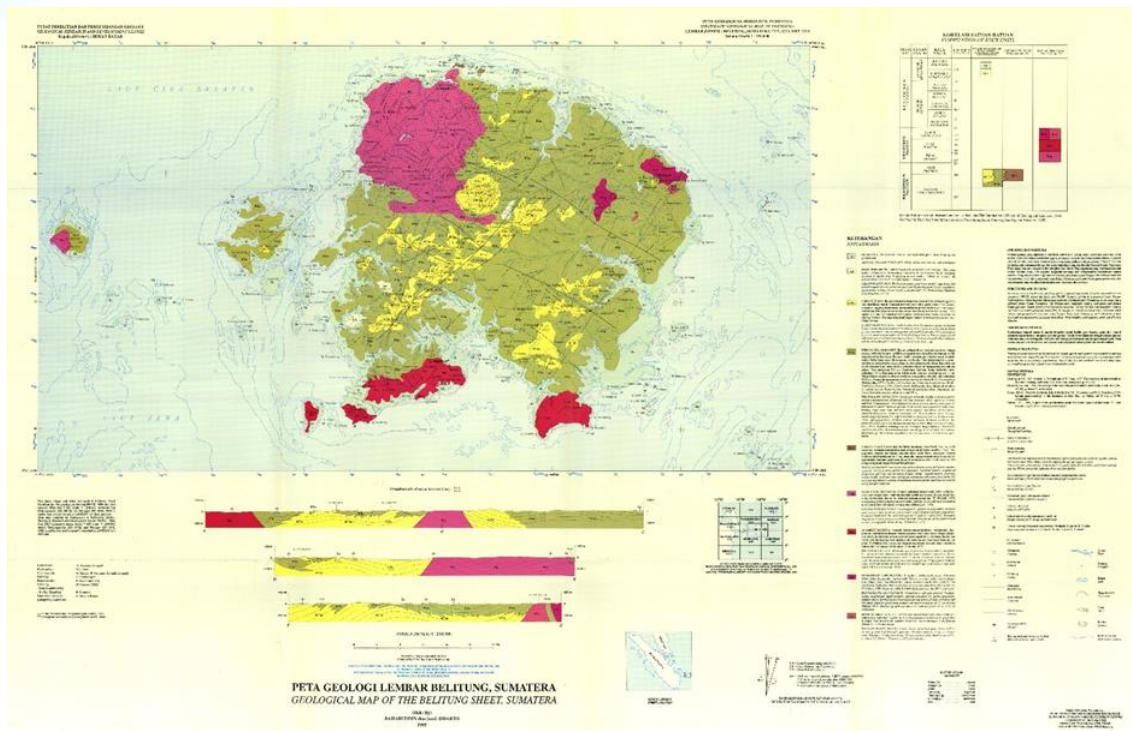
2.1.1.3 Geologi

Pulau Belitung terletak dalam sabuk granit Asia Tenggara yang membentang lebih dari 3000 km dari Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia. Formasi granit ini menghasilkan bijih timah dan mineral-mineral ikutan timah (MIT) yang mengandung unsur Tanah Jarang (REE). Bijih timah dihasilkan dari mineral kasiterit. Mineral ini dapat ditemukan di batuan granit sebagai bijih primer dan pelapukan dari granit menghasilkan timah aluvial sebagai bijih sekunder.

Formasi batuan di Kabupaten Belitung dari tua ke muda terdiri dari Formasi Kelapakampit (PCKs), Formasi Tajam (PCTm), Formasi Siantu (PCK), Formasi Granit Tanjungpandan (TRtg), Formasi Adamelit Baginda (Jma), Formasi Pasir Karbonan (Qpk) dan Endapan Aluvial dan Pantai (Qa) (Baharuddin dan Sidarto, 1995).

Batuan tertua di daerah ini adalah Formasi Kelapa Kampit (PCKs) yang terdiri dari batuan sedimen seperti batupasir, batusabak, dan batulumpur. Selanjutnya, terdapat Formasi Tajam (PCTm) yang terdiri dari batupasir kuarsa dengan sisipan batulanau, yang mengalami lipatan sedang hingga kuat dan sebagian termetamorfosisasi. Kedua formasi ini berasal dari periode Permo-Karbon. Selama pembentukan kedua formasi ini, terjadi juga aktivitas magmatik yang menghasilkan endapan lava basal dan breksi gunungapi, yang dikenal sebagai Formasi Siantu (PScv) yang juga berasal dari periode Perm-Karbon. Selama periode Mesozoikum, tercatat beberapa aktivitas magmatik yang dimulai pada zaman Trias, menghasilkan Granit Tanjungpandan (TRtg), dan pada zaman Jura menghasilkan Granit Adamelit Baginda (JMa), meskipun tidak menghasilkan endapan timah sampai pada zaman Kapur. Sejak akhir zaman Kapur hingga Kuartar, terjadi proses denudasi dan erosi yang menghasilkan endapan pasir karbonat lapangan berusaha serta endapan aluvial.

Batuan granit yang mengalami pelapukan membentuk morfologi khas berbentuk membundar dan bertumpuk yang disebut morfologi Tor Granit. Morfologi unik ini dapat diamati di daerah Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi dan Pulau Lengkuas dan pulau-pulau sekitarnya.



Gambar 2. 3 Peta Geologi Lembar Belitung (Baharuddin dan Sidarto, 1995)

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

2.1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Belitung memiliki sumber daya perairan yang bervariasi mengingat kabupaten ini merupakan daerah kepulauan. Sumber air didapatkan dari sungai, danau, air laut, sumur serta air tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), DAS merupakan suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari sungai dan anak-anak sungainya, yang berperan dalam menampung, menyimpan, serta mengalirkan air yang berasal dari curah hujan secara alami ke danau atau laut. Batas wilayah DAS di daratan ditentukan oleh pemisah topografis (punggung bukit), sementara batas di laut mencakup daerah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Secara hilir, Kabupaten Belitung terdiri atas beberapa daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu DAS Buding di sebelah utara, DAS Pala dan Kembiri di sebelah selatan serta DAS Brang dan Cerucuk di sebelah barat. Sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai, sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungai yang berbentuk seperti pohon. Secara lebih detail nama-nama DAS yang terdapat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Belitung

No	Kode DAS	DAS	Luas (ha)	Persentase (%)
1	DAS110737	DAS Bantan	21.359,73	9,79
2	DAS110699	DAS Batu dinding	797,80	0,37
3	DAS110746	DAS Belian	479,12	0,22
4	DAS110700	DAS Biduk	888,61	0,41
5	DAS120716	DAS Buding	16.170,32	7,42
6	DAS110742	DAS Bulin	1.946,63	0,89

No	Kode DAS	DAS	Luas (ha)	Persentase (%)
7	DAS120759	DAS Cerucuk	51.131,63	23,45
8	DAS110748	DAS Empalak	536,54	0,25
9	DAS110751	DAS Kubing	8.494,40	3,90
10	DAS110760	DAS Kubu	3.360,60	1,54
11	DAS110712	DAS Kumbe	1.142,76	0,52
12	DAS110711	DAS Lengir	9.933,70	4,56
13	DAS110750	DAS Membalong	13.747,72	6,30
14	DAS110705	DAS Mendanau	4.989,12	2,29
15	DAS110749	DAS mensuci	2.524,78	1,16
16	DAS110741	DAS Mentigi	1.840,85	0,84
17	DAS110743	DAS Munun	1.832,83	0,84
18	DAS110706	DAS Naduk	1.202,82	0,55
19	DAS110747	DAS Naga	528,23	0,24
20	DAS110744	DAS Nyuruk	1.181,00	0,54
21	DAS110701	DAS Pemukul	1.901,53	0,87
22	DAS110740	DAS Pendas	1.356,97	0,62
23	DAS110757	DAS Penjilin	1.330,44	0,61
24	DAS110709	DAS Rada	2.896,54	1,33
25	DAS110738	DAS Rusa	642,84	0,29
26	DAS110739	DAS Sabong	961,59	0,44
27	DAS110756	DAS Samak	3.120,61	1,43
28	DAS120754	DAS Sapei	20.065,33	9,20
29	DAS120713	DAS Sekayu	6.248,75	2,87
30	DAS112825	DAS Selu	1.658,04	0,76

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

2.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Iklim di daerah ini cenderung Kering dengan curah hujan pada Bulan Januari s/d Agustus tahun 2025 berkisar antara 11,1 mm hingga 22,0 mm dengan jumlah hari hujan antara 11 hingga 26 hari per bulan. Curah hujan ini relatif merata sepanjang tahun, dengan puncaknya terjadi selama musim hujan. Namun, ada variasi spasial dalam curah hujan, di mana beberapa wilayah mungkin menerima lebih banyak hujan dibandingkan yang lain. Kondisi ini mempengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air, dan risiko banjir. Dengan iklim tropis dan letak kepulauan, suhu di Kabupaten Belitung pada Bulan Januari s/d Agustus tahun 2025 cenderung panas, dengan rata-rata 27,6°C, sedangkan suhu maksimum berada pada 33,2°C, dan suhu minimum pada 23,7°C. Kelembaban udara di daerah ini juga cenderung tinggi, dengan rata-rata 77,2%. Secara detail terkait kondisi iklim yang terdapat di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari di kabupaten Belitung Januari s/d Agustus Tahun 2025

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	21,6	26	2,7
Februari	11,1	8	6,0
Maret	19,5	24	3,7

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
April	19,1	21	4,7
Mei	12,7	19	4,8
Juni	22,0	17	4,2
Juli	14,9	11	5,8
Agustus	13,3	13	5,8

Sumber: <https://dataonline.bmkg.go.id>

Tabel 2.3 Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Belitung Januari s/d Agustus Tahun 2025

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)
	Min	rata-rata	Maks	rata-rata
Januari	24,3	26,2	29,4	90,9
Februari	24,1	26,7	30,7	86,7
Maret	23,9	26,2	30,3	91,4
April	24,2	26,9	32,0	89,1
Mei	24,4	27,6	33,2	84,9
Juni	24,2	27,1	32,1	85,9
Juli	24,1	27,5	32,8	82,6
Agustus	23,7	27,0	32,2	83,1

Sumber: <https://dataonline.bmkg.go.id>

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Belitung secara keseluruhan didominasi oleh lahan untuk pertanian lahan kering campur yang mencakup 54.234,074 ha, atau sekitar 23,96% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Belitung. Selain itu, sektor perkebunan juga memiliki cakupan yang signifikan, dengan luas mencapai 44.499,132 ha, diikuti oleh hutan lahan kering sekunder yang mencakup 35.528,879 ha. Rincian lebih lanjut mengenai luas masing-masing jenis penggunaan lahan di Kabupaten Belitung disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Belitung

Penutup Lahan	Luasan (ha)	Koefisien Lindung	(lg n x αn)	DDL
Hutan Lahan Kering Sekunder	35.528,88	1,00	35.528,88	0,44
Hutan Mangrove Primer	344,176	1,00	344,18	
Belukar	24.182,42	0,21	5.078,31	
Perkebunan	44.499,13	0,54	24.029,53	
Permukiman	8.937,91	0,18	1.608,82	
Tanah Terbuka	2.057,72	0,01	20,58	
Savana/Padang Rumput	5.611,90	0,28	1.571,33	
Badan Air	180,319	0,98	176,71	
Hutan Mangrove Sekunder	12.459,21	0,68	8.472,26	
Hutan Rawa Sekunder	623,392	1,00	623,39	
Belukar Rawa	8.596,46	0,68	5.845,59	
Pertanian Lahan Kering	5.610,64	0,21	1.178,24	
Pertanian Lahan Kering Campur	54.234,07	0,21	11.389,16	
Sawah	142,916	0,46	65,74	
Tambak	22,754	0,98	22,30	
Bandara/Pelabuhan	175,794	0,01	1,76	
Pertambangan	22.319,12	0,18	4.017,44	
Rawa	622,141	1,00	622,14	
Jumlah	226.148,96	~	100.596,36	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan yang holistic dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah potensi pengembangan wilayah. Kabupaten Belitung, dengan karakteristik geografis, geologi, dan topografi yang dimilikinya, memiliki berbagai peluang dalam pengembangan sektor-sektor strategis.

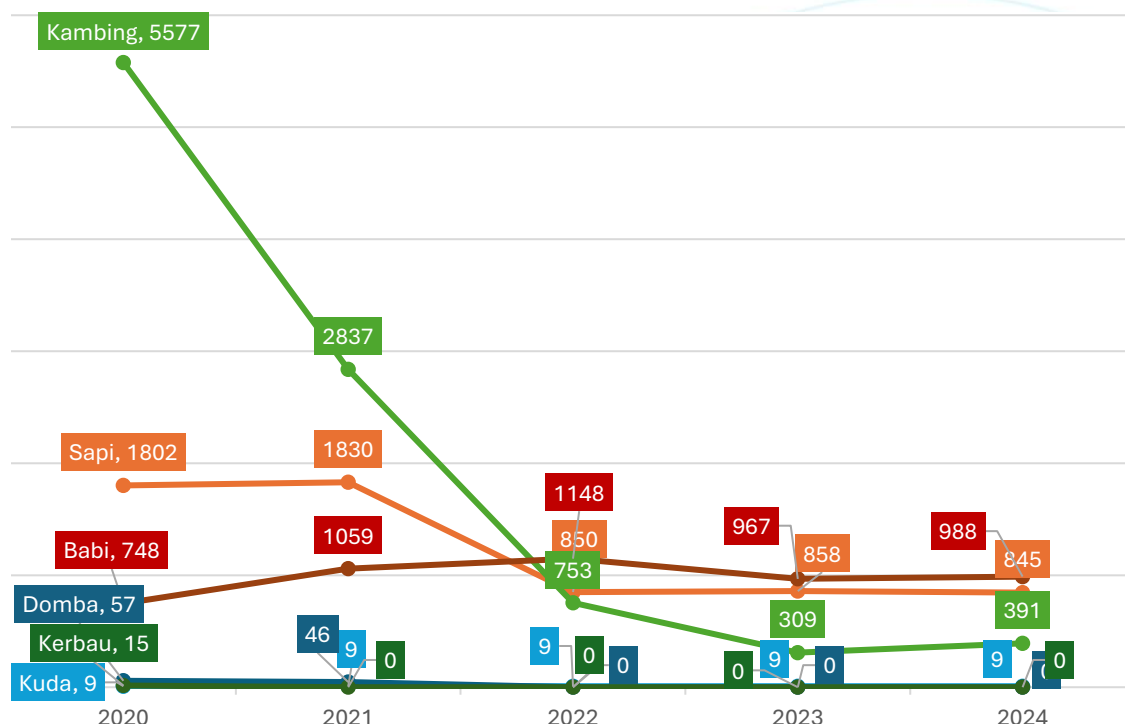
Di sektor pertanian, Kabupaten Belitung memiliki potensi lahan seluas 74.095 Ha yang dimanfaatkan untuk produksi padi, hortikultura, dan palawija. Pada tahun 2024, Kecamatan Membalong menjadi wilayah dengan lahan sawah terluas, mencapai 188,5 Ha dengan luas panen 135,5 Ha dan produksi padi sebanyak 506,78 ton. Komoditas sayur-sayuran pada tahun 2024 meliputi cabai dengan produksi 7.327,45 kuintal dan terong sebanyak 6.057,92 kuintal. Sementara itu, produksi buah-buahan utama seperti manggis dan durian masing-masing mencapai 43.153 kuintal dan 13.428 kuintal. Di sektor perkebunan, lada dan kelapa sawit menjadi komoditas utama dengan luas lahan masing-masing 7.384,79 Ha dan 7.204,70 Ha, serta produksi mencapai 4.321,86 ton untuk lada dan 13.946,37 ton untuk kelapa sawit.

Selain pertanian dan perkebunan, sektor pertambangan juga memiliki potensi pengembangan wilayah yang luas, mencapai 906,69 Ha, dengan komoditas utama berupa tambang timah dan monasit. Wilayah permukiman memiliki potensi pengembangan wilayah sebesar 5.111,67 Ha, dengan sebaran

terbanyak di Kecamatan Tanjungpandan. Sektor pariwisata memiliki potensi pengembangan wilayah pada lahan seluas 9.302,45 Ha, disusul oleh sektor industri dengan 1.546,39 Ha, sektor perikanan seluas 1.614,54 Ha, dan sektor lainnya. Potensi-potensi ini menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.1.8 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam merupakan segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Sumber Daya Alam menjadi salah satu keunggulan komparatif daerah yang dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan dukungan bagi berbagai sektor, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan bahwa manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan strategis, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kondisi geografis Kabupaten Belitung memungkinkan tumbuhnya sektor peternakan dengan kondisi alam yang subur sehingga pasokan pakan ternak tergolong cukup baik. Berikut perkembangan komoditas sektor peternakan, Pertanian dan Perkebunan tahun 2020 sampai dengan 2024:



Gambar 2. 4 Produksi Komoditas Sektor Peternakan

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2021-2025

Tabel 2.5 Produksi Komoditas Sektor Pertanian

Produk Pertanian dan Perkebunan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	Ton GKG	2204,66	1576,37	710,44	679,67	870,20
Jagung	Ton	512,76	467,25	673,13	991,72	925,34
Ubi Kayu	Ton	1.337,05	1.120,05	1.764,05	1.886,19	1.851,88
Ubi Jalar	Ton	19,25	44,1	59,33	103,97	104,28
Kacang Tanah	Ton	55,35	65,73	81,05	114,39	114,73
Karet/Rubber	Ton	2 354,40	2 395,53	2.663,64	2.297,20	1.984,97
Kelapa/Coconut	Ton	999,30	996,58	929,50	685,70	542,50
Kelapa sawit/Oil palm	Ton	7.750,10	8.436,22	11.263,60	13.572,60	13.946,37
Kopi/Coffee	Ton	1,80	1,80	1,18	1,30	1,05
Lada/Pepper	Ton	6.294,04	6.084,81	5.721,48	3.885,00	4.321,86
Aren/Palm	Ton	1.444,30	1.472,00	925,00	707,70	687,20

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2021-2025

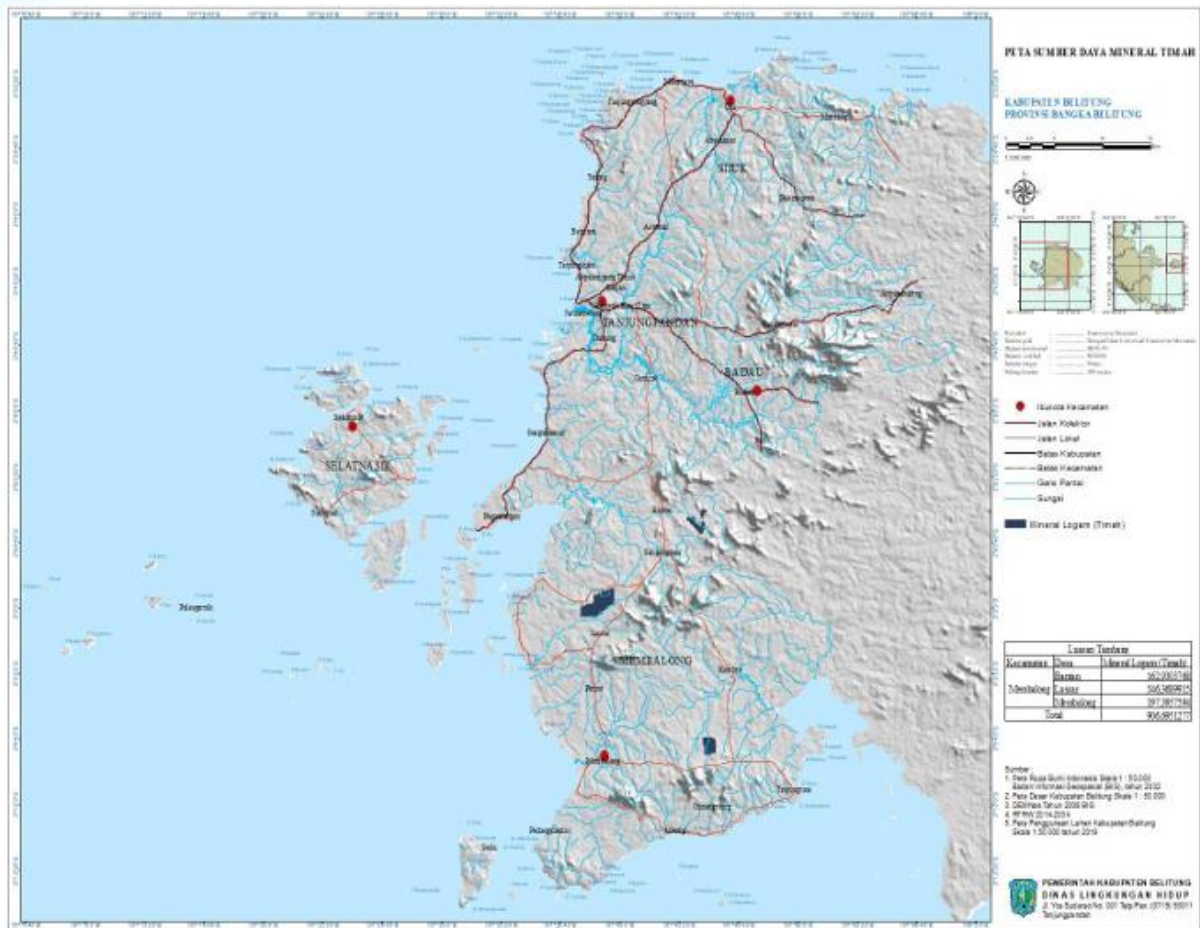
Secara geografis, Kabupaten Belitung yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi strategis untuk pengembangan sektor ekonomi. Lautan Bangka Belitung berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menjadi rute utama perdagangan dan pelayaran internasional. Sebagai wilayah kepulauan dan pesisir, Kabupaten Belitung berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Bangka, sehingga memiliki aksesibilitas tinggi ke Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Singapura. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah perairan Kabupaten Belitung memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Potensi utama meliputi sumber daya perikanan dan kelautan yang memiliki keanekaragaman tinggi baik dari segi diversitas maupun kuantitas, serta sumber daya pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan kawasan perlindungan laut/konservasi berupa hutan bakau (*Mangrove*) dan sempadan pantai. Diperkirakan, sumber daya perikanan laut (MSY) di perairan Bangka dan Belitung mencapai 1.815.500 ton per tahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp247.657,5 triliun per tahun. Potensi ini terdiri dari sumber daya perikanan tangkap (*fishery capture*) sebesar 499.500 ton per tahun dengan nilai ekonomis Rp2.497,5 milyar per tahun dan sumber daya perikanan budidaya (*aquaculture*) sebesar 1.316.000 ton per tahun dengan nilai ekonomis Rp245.160 milyar per tahun. Potensi perikanan budidaya mencakup potensi budidaya air payau dan budidaya laut dengan komoditas unggulan seperti ikan kerapu, teripang, dan kerang mutiara. Berbagai potensi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan dan kelautan berpotensi menjadi *prime over* pembangunan ekonomi di masa depan, terutama dengan meningkatnya permintaan ekspor dan domestik. Berikut merupakan produksi komoditas sektor perikanan di Kabupaten Belitung:

Tabel 2.6 Produksi Komoditas Perikanan Berdasarkan Jenis Tangkap dan Budidaya

Produksi Komoditas Perikanan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penangkapan di Laut	Ton	52 912,48	45.564,32	43.021,47	42.220,25	8.676,89
Jaring Apung Laut	Ton	65,69	71,51	46,12	118,50	65,40
Jaring Tancap Tawar	Ton	17,48	0,61	0	0,15	0,78
Kolam Air Tenang	Ton	46,61	105,19	102,01	89,46	91,75
Tambak	Ton	1,39	2,48	2,13	2,61	265,40

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2021-2025

Selain memiliki potensi kelautan yang melimpah, Kabupaten Belitung juga kaya akan sumber daya alam mineral. Kabupaten Belitung dikenal secara internasional sebagai penghasil timah putih (stanum), dengan area pertambangan bijih timah yang tersebar di Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, dan Badau. Selain timah, Kabupaten Belitung juga memiliki potensi sumber daya mineral lainnya, seperti zircon, ilmenit, rutil, xenotim, monazite, granit, pasir kuarsa, dan kaolin. Kaolin banyak tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, sementara pasir kuarsa tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bangka. Granit banyak dijumpai di Tanjungpandan, Sijuk, dan Badau. Selain itu, tanah liat banyak ditemukan di wilayah Tanjungpandan dan Sijuk, sedangkan tanah puru tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Belitung. Data mengenai kondisi dan sebaran sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Belitung disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 5 Peta Sebaran Sumber Daya Alam Kabupaten Belitung

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung (DDT) Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan indikasi kemampuan lingkungan untuk mendukung Suatu penggunaan atau pemanfaatan secara lestari. Daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya (*supportive capacity*). Dalam identifikasi kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dilakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan untuk mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan dua pendekatan antara lain: Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan; dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Adapun beberapa perhitungan kapasitas daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Belitung antara lain perhitungan daya tampung lingkungan (ketersediaan dan kebutuhan lahan, pangan (beras), air, dan lahan untuk permukiman).

2.1.1.9.1. Daya Dukung Pangan (Beras)

Analisis perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan seperti padi/beras dihitung berdasarkan produksi beras dengan kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung berdasarkan data rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2023 sebesar 1,49%.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan perhitungan geometrik, berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Belitung tahun 2025 hingga 2029 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Standar Kebutuhan Beras biasanya dilansir oleh BPS Nasional yang menunjukkan konsumsi per kapita per tahun menurut kelompok beras (beras lokal, kualitas unggul dan impor). Adapun rata-rata konsumsi per kapita per tahun di Kabupaten Belitung yaitu 73,84 kg/kapita/tahun.

Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras berdasarkan hasil perhitungan di Kabupaten Belitung mengalami defisit beras, yang mana pada tahun 2025 tidak mampu melayani kebutuhan beras dari total jumlah penduduk di Kabupaten Belitung atau defisit bahan pangan beras sebesar 9.901 ton. Adapun diprediksi hingga tahun 2029, Kabupaten Belitung terjadi defisit bahan pangan beras sebesar 10.753 ton. Artinya Kabupaten Belitung belum dapat melakukan swasembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kabupaten Belitung akan mengalami defisit beras dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dalam impor beras maupun peningkatan produktivitas beras di daerah.

2.1.1.9.2. Daya Dukung Fungsi Lindung (Lahan)

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu Ketika nilai mendekati 0 – maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai Kawasan budidaya. daya dukung lindung Kabupaten Belitung sebesar 0,44. Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kabupaten Belitung berada dalam kategori sedang, sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem secara sedang. Tantangan daerah untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung sering kali berkaitan dengan perubahan fungsi lahan, dimana penggunaan lahan alamiah dialihkan untuk menunjang kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, keberlangsungan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung perlu diselaraskan dengan kondisi kependudukan daerah, baik dari sisi jumlah maupun kepadatannya. Dengan daya dukung fungsi lindung kategori sedang, maka Kabupaten Belitung perlu memperhatikan kondisi dan luasan kawasan fungsi lindungnya, sehingga daerah dapat menampung jumlah penduduk yang terus meningkat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan yang baik.

2.1.1.9.3. Daya Dukung Demografi

Daya Dukung Demografi menjadi konsep penting dalam memperhatikan luas wilayah yang menjadi *supply* dengan jumlah penduduk yang menjadi *demand* dibandingkan dengan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang dapat didasarkan pada jumlah populasi yang ada pada suatu wilayah. Kabupaten Belitung sendiri memiliki lima kecamatan, kecamatan dengan luas terbesar yakni Kecamatan Membalong 90.955 ha dan kecamatan dengan luas terkecil yakni

Kecamatan Selat Nasik 13.350 ha. Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2025-2029 di Kabupaten Belitung menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjungpandan menjadi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 107.660 jiwa pada tahun 2025 dan mencapai 114.239 jiwa pada tahun 2029. Sedangkan, Kecamatan Selat Nasik menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk mencapai 133,50 jiwa dan diproyeksikan mencapai 6.609,97 jiwa pada tahun 2029.

Kabupaten Belitung memiliki proyeksi DDT Demografis 2,0242 pada tahun 2025 dan mencapai nilai 1,9077 pada tahun 2029. Kecamatan dengan nilai DDT Demografis tertinggi di Kabupaten Belitung adalah Kecamatan Membalong sebesar 3,3681 pada tahun 2025 dan sebesar 3,1741 pada tahun 2029. Sedangkan, Kecamatan dengan nilai DDT Demografis terendah di Kabupaten Belitung adalah Kecamatan Tanjungpandan sebesar 0,3515 pada tahun 2025 dan sebesar 0,3313 pada tahun 2029. Kecamatan Badau memiliki Dampak dan resiko Terhadap Lingkungan (DTT) Demografis sebesar 2,9445 pada tahun 2025 dan sebesar 2,7751 pada tahun 2029. Kecamatan Sijuk memperoleh DTT Demografis sebesar 1,2724 pada tahun 2025 dan sebesar 1,1991 pada tahun 2029. Kecamatan Selat Nasik memperoleh DTT Demografis sebesar 2,1846 pada tahun 2025 dan sebesar 2,0589 pada tahun 2029. Semakin besar nilai DDT demografis menunjukkan wilayah kecamatan tersebut masih memiliki daya tampung yang lebih besar. Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Belitung memiliki daya dukung demografis yang cukup dan masih mampu memenuhi kebutuhan lahan untuk mendukung proyeksi penduduk hingga tahun 2029.

2.1.1.9.4. Daya Dukung Air

Perhitungan antara ketersediaan air (*supply*) dan kebutuhan air (*demand*) dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung dihitung berdasarkan ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Kebutuhan air di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mempertimbangkan kebutuhan domestik (DAd) dan non domestik (DAnd) adalah 749.647.708 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2020 lebih kecil dari ketersediaan air pada tahun 2030 (1.877.694.831 m³/tahun). Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Belitung tahun 2025 berdasarkan perhitungan di atas adalah 4,68 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kelompok aman atau baik dengan surplus sebesar 3.233.477.465,98 m³/tahun. Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Belitung tahun 2026 berdasarkan perhitungan di atas adalah 5,21 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kelompok aman atau baik dengan surplus sebesar 3.701.800.931,99 m³/tahun. Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Belitung tahun 2027 berdasarkan perhitungan di atas adalah 5,74 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kelompok aman atau baik dengan surplus sebesar 4.170.121.638,25 m³/tahun. Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Belitung tahun 2028 berdasarkan perhitungan di atas adalah 6,27 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kelompok aman atau baik dengan surplus sebesar 4.638.439.534,55 m³/tahun. Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Belitung tahun 2029 berdasarkan perhitungan di atas adalah 6,80 yang berarti

daya dukung airnya termasuk dalam kelompok aman atau baik dengan surplus sebesar 5.106.754.569,73 m³/tahun.

Status daya dukung air yang ada di Kabupaten Belitung tahun 2025 hingga 2029 dalam kondisi surplus karena nilai SA > DA. Dari hasil perhitungan status daya dukung air yang surplus tersebut, masih terdapat beberapa wilayah Kabupaten Belitung yang mengalami bencana kekeringan. Hal ini dikarenakan perhitungan status daya dukung air yang menggunakan pendekatan curah hujan dan koefisien limpasan tertimbang diasumsikan merupakan potensi ketersediaan air maksimal, sedangkan berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi koefisien limpasan menjadi besar seperti berkurangnya area peresapan air tanah, pertambahan lahan terbangun, terdapat lahan dengan tingkat erosi yang tinggi sehingga mengurangi volume air yang tersimpan ke dalam tanah. Penyediaan kebutuhan air secara keseluruhan dilakukan melalui upaya pemanfaatan sumber daya air dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, mempertahankan kontinuitas, meningkatkan potensi ketersediaan air melalui peningkatan areal resapan air seperti ruang terbuka hijau, peningkatan fungsi kawasan lindung, pemanenan air melalui pembuatan sumur resapan, biopori, dan pembuatan embung atau waduk.

2.1.1.9.5. Daya Dukung Permukiman

Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLb) Kabupaten Belitung secara keseluruhan sebesar 47,54 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun baik (>3). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk melakukan rencana pengembangan lahan terbangun di Kabupaten Belitung masih dapat dilakukan. Rencana pengembangan lahan terbangun terutama zona perumahan masih cukup sedikit sehingga terdapat banyak kawasan yang bisa dilakukan pembangunan dan pengembangan. Rencana pengembangan lahan terbangun perlu menjaga kualitas lingkungan dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

2.1.1.9.6. Daya Tampung Lingkungan (Kondisi Udara)

Kabupaten Belitung memiliki suhu rata-rata bulanan yang bervariasi yaitu antara 26,20°C sampai dengan 28,00°C. dan temperatur maksimum bulanan berada pada rentang 32,00 °C hingga 36,10 °C Data besaran suhu di suatu wilayah menjadi informasi yang tidak bisa diabaikan jika berbicara tentang kualitas udara nantinya, karena suhu menjadi salah satu parameter meteorologi yang mempengaruhi kadar pencemar di udara. Kualitas udara pada umumnya dinilai dari konsentrasi parameter pencemaran udara yang terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai Baku Mutu Udara Ambien Nasional terdapat beberapa sumber yang diyakini sebagai penyebab pencemaran udara antara lain dari sektor industri, transportasi dan perumahan. Berdasarkan data dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor transportasi menyumbang polutan 42-43 % (DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021). Bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NO₂) dan sulfur (SO₂) dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Pemantauan kualitas

udara di Kabupaten Belitung menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi udara secara eksisting mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999. Pemantauan menggunakan metode passive sampler dengan lokasi yang mewakili dari permukiman, industri, padat lalu lintas, dan perkantoran. Lokasi pemantauan berada di empat titik yakni Terminal Tanjungpandan yang merupakan lokasi transportasi, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau yang terkenal sebagai desa industri, Kantor Desa Aik Pelempang sebagai lokasi permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung sebagai lokasi Perkantoran.

Adapun parameter yang dijadikan fokus pemantauan untuk mengetahui nilai Indeks Kualitas Udara adalah Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂). Gas Nitrogen Dioksida (NO₂) merupakan polutan udara ambien bersama unsur Nitrogen Monoksida (NO) yang biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar mesin kendaraan, pembakaran sampah, pembakaran batu bara dan industri. Sulfur Dioksida (SO₂) adalah komponen pencemar udara dengan jumlah paling banyak. Kabupaten Belitung Tahun 2023, nilai SO₂ berada pada nilai 7,26 µg/m³ dengan baku mutu 20 µg/m³, sedangkan nilai NO₂ berada pada nilai 7,28 µg/m³ dengan baku mutu 40 µg/m³. Baik kadar SO₂ maupun NO₂ masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

2.1.1.9.7. Daya Tampung Lingkungan (Kondisi Air)

Air merupakan komponen yang penting dalam masyarakat, kebutuhan akan air merupakan kebutuhan yang sangat utama, oleh karena itu untuk memastikan kelestarian air perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya air dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya air di Kabupaten Belitung khususnya air sungai menjadi komponen penting, karena masyarakat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan, selain itu sumber air baku yang dipergunakan oleh PDAM Kabupaten Belitung adalah air Kolong (air permukaan), air yang diambil berasal dari air permukaan seperti Kolong Kubu dan Kolong Pilang. Pemantauan kualitas air sungai dan air danau/waduk/embung di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 berdasarkan pengukuran dan analisis parameter PH, TSS, DO, COD, BOD, Nitrat, Total dan Total Fosfat dilakukan pada sebagian titik pantau. Sampel diambil selama satu tahun penuh setiap tiga bulan yang tersebar di lima kecamatan.

Data mutu air sungai dan badan air lainnya di Kabupaten Belitung selanjutnya diolah untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Hasil nilai Indeks Kualitas Air (IKA) hasil perhitungan yang bersumber pada Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL KLHK Tahun 2023 menunjukkan hasil 59,71 dan jika diklasifikasi termasuk ke dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan nilai IKA pada Tahun 2022 sebesar 59,90 (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024) maka pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,19. Walaupun penurunan nilai IKA cenderung sedikit, namun hal ini menjadi indikasi apa saja potensi yang perlu dimaksimalkan untuk lebih meningkatkan nilai kualitas air di Kabupaten Belitung. Penurunan ini juga

menunjukkan degradasi kualitas air yang disebabkan oleh peningkatan polutan dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik dan industri.

2.1.1.9.8. Daya Tampung Lingkungan (Kondisi Tutupan Lahan)

Adanya perubahan lahan baik dilakukan secara alami atau tidak akan selalu diikuti dengan alih fungsi lahan sejalan dengan tanah yang luasnya semakin terbatas dan jika penutup lahan yang baru tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini terjadi di Kabupaten Belitung di mana pada Tahun 2020 terjadi alih fungsi lahan yang paling signifikan yaitu pengurangan luasan dari Tahun 2019 yaitu pada hutan lahan kering sekunder dan terjadinya kenaikan luasan pada Tahun 2020 pada jenis lahan pertanian. Adapun alasan yang telah diketahui selain adanya keperluan dalam pemenuhan ekonomi juga disebabkan oleh keadaan alam Kabupaten Belitung yang memiliki tipe curah hujan A di mana akan mengubah dengan cepat lahan kering menjadi ditumbuhi dengan vegetasi liar. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Belitung Tahun 2021 berdasarkan perhitungan melalui Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 43,89. Pada tahun 2021 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Belitung mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar 46,19 dan menjadi 43,89 pada Tahun 2021 dan tetap dalam kategori sangat kurang baik berdasarkan predikat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penurunan nilai IKTL di Kabupaten Belitung Tahun 2021 karena adanya tekanan kepada lingkungan khususnya pada kondisi lahan akibat adanya kegiatan-kegiatan dalam bentuk eksploitasi maupun alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang ada. Penurunan terbesar pada penutup lahan jenis lahan terbuka, hutan mangrove primer, dan hutan lahan kering sekunder. Nilai IKTL menjadi 43,83 pada Tahun 2022 dan 44,88 pada tahun 2023 tetap dalam kategori sangat kurang baik berdasarkan predikat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan Hutan di Kabupaten Belitung dapat dibedakan menurut status dan fungsinya. Berdasarkan Fungsi Hutan di Kabupaten Belitung terdapat Hutan Produksi seluas 38.920,18 Ha, Hutan Lindung seluas 41.326,69 Ha, dan Taman Hutan Raya seluas 2.557,57 Ha. Sedangkan Berdasarkan Status Hutan, Kabupaten Belitung hanya memiliki Taman Keanekaragaman Hayati seluas 130,08 Ha.

2.1.1.9.9. Daya Tampung Lingkungan (Kondisi Lingkungan Hidup)

Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung dapat diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH memberikan indikasi suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL), Penghitungan angka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formulasi yang telah diterapkan secara nasional, yang mana nilai IKLH diperoleh dari penjumlahan 30% Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), 30% Indeks Kualitas Udara (IKU), dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTL). Berdasarkan hasil perhitungan dalam Dokumen IKLH Kabupaten Belitung Tahun 2024, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Belitung pada Tahun 2023

sebesar 68,90 berada dalam status Cukup Baik. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

2.1.1.9.10. Daya Tampung Lingkungan (Kondisi Sumberdaya Alam)

Secara geografis letak Kabupaten Belitung yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menguntungkan bagi pengembangan sektor ekonomi. Lautan Bangka Belitung berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), posisi tersebut berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Kabupaten Belitung sebagai daerah kepulauan dan pesisir yang sangat strategis dengan batas wilayah yang berdampingan dengan Laut Natuna, Selat Karimata; Laut Jawa dan Selat Bangka sehingga pulau Belitung memiliki aksesibilitas yang tinggi ke Pulau Jawa, Sumatera, Pulau Kalimantan dan Singapura. Dengan letak geografis seperti ini, wilayah perairan Kabupaten Belitung memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan yang luar biasa. Pertama adalah potensi Sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah, baik dari segi diversitas maupun kuantitas. Kedua, potensi Sumber daya pesisir yang luar biasa seperti terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan kawasan perlindungan laut/konservasi berupa hutan bakau (Mangrove) dan sempadan pantai.

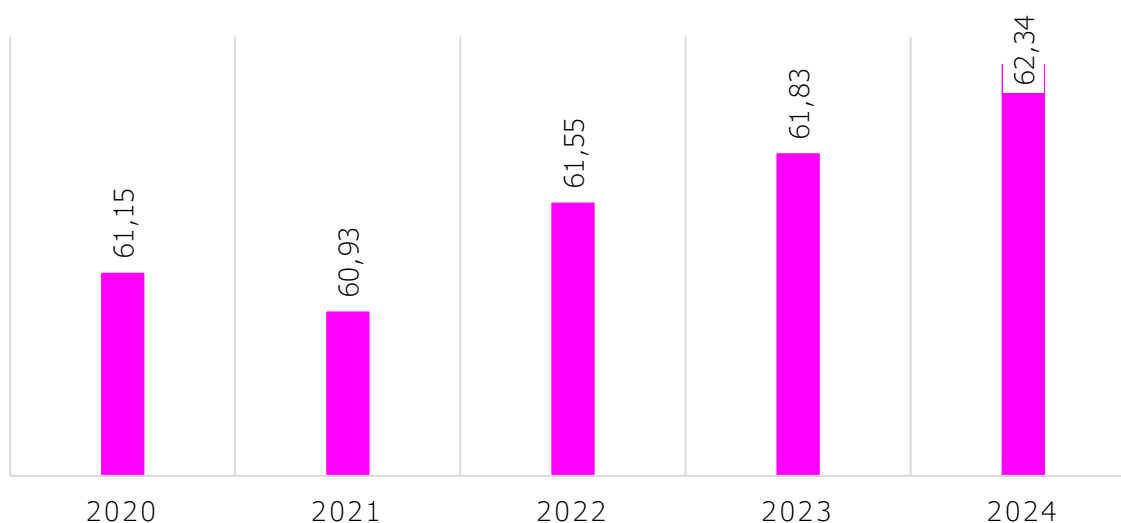
Perkiraan potensi Sumber daya perikanan laut (MSY) di perairan Bangka dan Belitung mencapai 1.815.500 ton per tahun dengan nilai ekonomi Rp247.657,5 triliun per tahun, yang terdiri dari Sumber daya perikanan tangkap (*fishery capture*) 499.500 ton/tahun dengan nilai ekonomis Rp2.497,5 milyar/tahun dan potensi Sumber daya perikanan budidaya (aquaculture) sebesar 1.316.000 ton/tahun dengan nilai ekonomis Rp245.160 milyar/tahun. Potensi perikanan budidaya tersebut terdiri dari potensi budidaya air payau dan budidaya laut dengan komoditas andalan ikan kerapu, rumput laut, teripang dan kerang mutiara. Berbagai potensi di atas sudah cukup untuk menggambarkan bahwa sektor perikanan dan kelautan sangat bisa untuk menjadi *prime mover* pembangunan di masa depan, terutama jika dikaitkan dengan permintaan ekspor dan domestik.

Selain kelimpahan potensi kelautannya, Kabupaten Belitung juga memiliki potensi sumber daya alam mineral yang melimpah. Kabupaten Belitung dikenal luas hingga ke pasar Internasional sebagai penghasil timah putih (*stannum*). Area pertambangan biji timah tersebar di Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk dan Badau. Selain timah, potensi sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Belitung diantaranya adalah mineral seperti zircon, imenit, rutil, xenotim dan monazite, granit, serta pasir kuarsa dan kaolin. Kaolin banyak tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, kemudian Pasir kuarsa penyebarannya hampir di seluruh Kabupaten Bangka. Granit banyak dijumpai di Tanjungpandan, Sijuk dan Badau. Tanah liat dijumpai di wilayah Tanjungpandan dan Sijuk, sedangkan tanah puru banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Belitung.

2.1.1.10 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan berkaitan dengan segala kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling

berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Indikator yang menggambarkan kondisi ini di daerah Kabupaten Belitung diantaranya adalah Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, dan juga dapat menggunakan Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum. Indeks ketahanan pangan diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan beberapa indikator yang terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan. Berikut kondisi capaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Belitung:

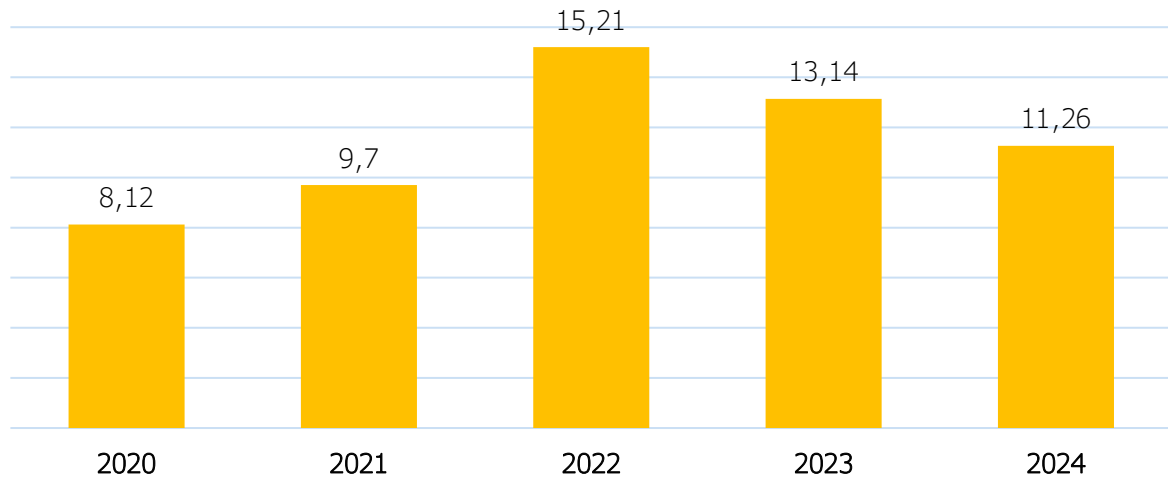


Gambar 2. 6 Indeks Ketahanan Pangan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2025

Grafik diatas menunjukkan kondisi indeks ketahanan pangan di Kabupaten Belitung mengalami kenaikan signifikan, meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan. Capaian terendah terjadi di tahun 2021 sebesar 60,93 yang mengalami penurunan dari 61,15 di tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga berada di angka 62,34 di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan ketahanan pangan di Kabupaten Belitung seiring berjalannya waktu. Kenaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan Kabupaten Belitung dalam memastikan akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan bagi penduduknya. Kenaikan ini didukung dengan adanya produksi pangan yang lebih baik, aksesibilitas pangan lebih meningkat, keamanan pangan, stabilitas pasokan pangan dan juga kebijakan serta infrastruktur yang mendukung pemerataan distribusi pangan di Kabupaten Belitung. Selain indeks ketahanan pangan, juga terdapat prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Indikator ini merupakan alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi, istilah lainnya adalah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin

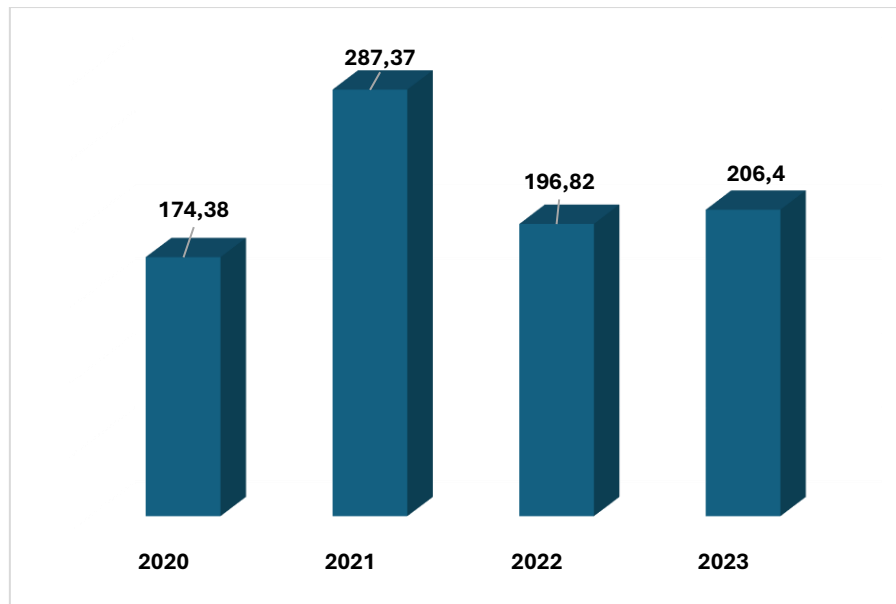
dan tinggi badan. Kondisi ini menggambarkan proporsi penduduk di wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Belitung dalam kondisi yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, berikut capaiannya:



Gambar 2. 7 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2025

Capaian terbaik untuk prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Belitung terjadi tahun 2020 dengan yang berada di angka 8,12%. Kondisi ini menunjukkan hanya 8,12% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kabupaten Belitung yang masih dalam kondisi mengonsumsi standar pangan minimum. Namun capaian ini mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya hingga berada di angka 15,21% pada tahun 2022. Sejak itu, capaian prevalensi ketidakcukupan pangan mengalami penurunan sehingga mencapai 11,26 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, prevalensi ketidakcukupan pangan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut mengartikan semakin bertambahnya penduduk di Kabupaten Belitung yang masih mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Hal ini perlu menjadi permasalahan apa yang menjadi penyebabnya sehingga mengalami kenaikan. Peningkatan pada indikator ini mengartikan kondisi yang negatif dan memerlukan intervensi dari pemerintah untuk upaya perbaikan. Selain kedua indikator diatas, terdapat indikator konsumsi listrik per kapita untuk menggambarkan kondisi berketahanan energi, air dan kemandirian pangan di Kabupaten Belitung.

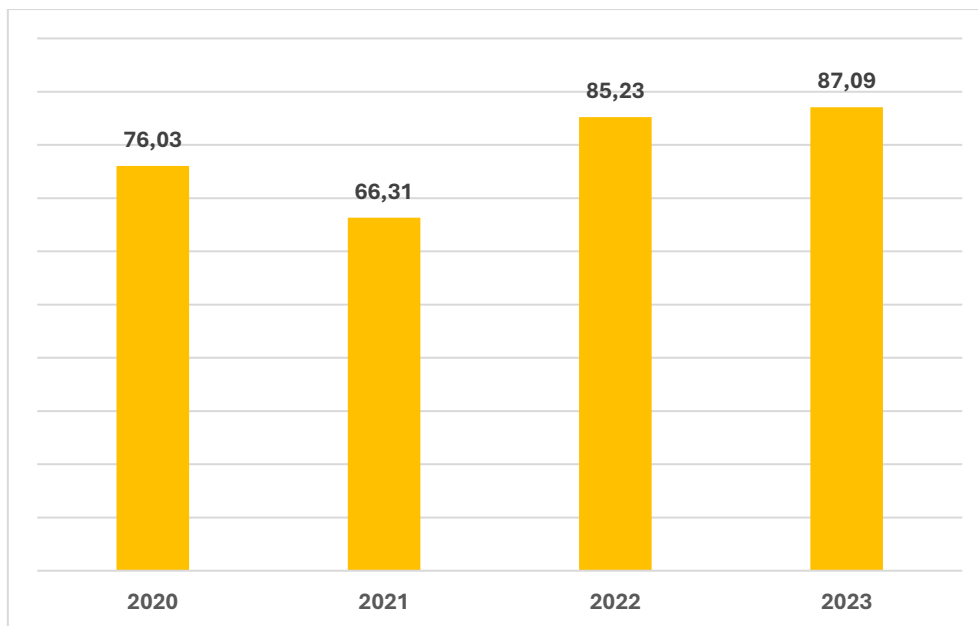


Gambar 2. 8 Konsumsi Listrik Per Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Semakin tinggi konsumsi listrik per kapita, hal ini mengartikan adanya pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan alat-alat berteknologi lebih canggih dengan pemanfaatan listrik yang besar pula. Terlihat dalam grafik bahwa capaian konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 174,38 kWh/kapita. Di tahun 2021 mengalami lonjakan hingga mencapai 287,37 kWh/kapita, kenaikan ini selaras dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung yang terjadi tahun 2021. Namun di 2022 capaian indikator ini mengalami kontraksi menjadi 196,82 kWh/kapita, dan di tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 206,4 kWh/kapita. Pada tahun 2024, konsumsi listrik di Indonesia ditargetkan mencapai 1.408 kWh/kapita. Pemerintah terus mendorong dan menyiapkan pasokan listrik guna mengantisipasi kenaikan konsumsi listrik masyarakat. Begitu halnya jika kenaikan konsumsi listrik per kapita ini terjadi di Kabupaten Belitung di tahun 2024.

Selain berdasarkan pada indikator Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Konsumsi Listrik Per Kapita, kondisi ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum. Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merujuk pada kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh air minum yang bersih, layak, dan aman secara berkelanjutan. Di Indonesia, akses terhadap air minum layak menjadi salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam target 6.1 yang bertujuan memastikan ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, tidak terkecuali untuk Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 9 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

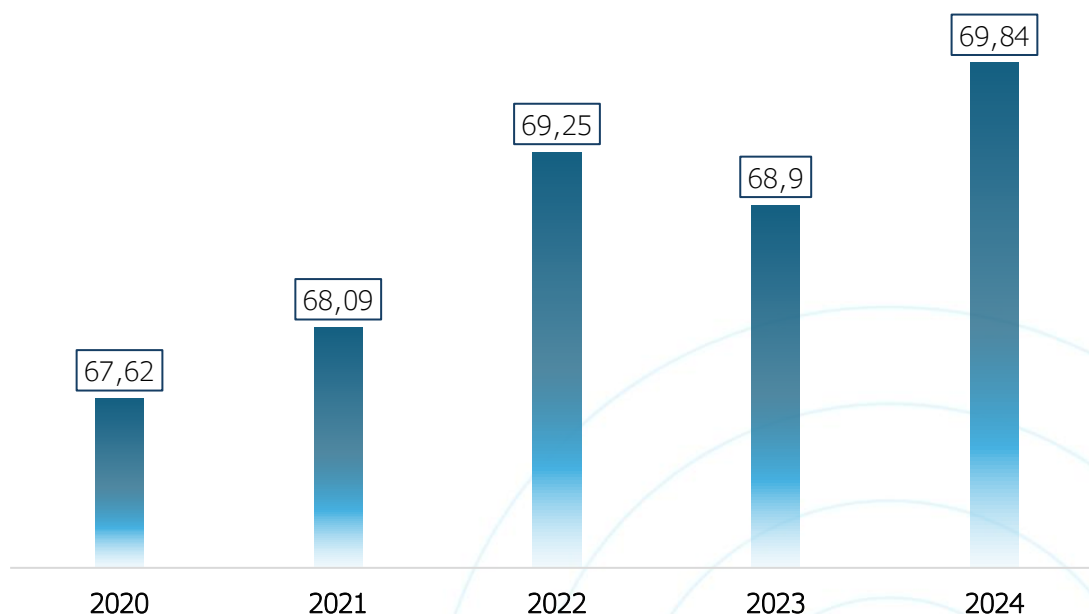
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Di tahun 2020 tercapai sebesar 76,03% dan mengalami peningkatan hingga 87,09% pada tahun 2023. Capaian terendah adalah sebesar 66,31% yang terjadi di tahun 2021. Capaian ini menunjukkan semakin meratanya rumah tangga di Kabupaten Belitung yang memperoleh akses konsumsi air minum. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Belitung ini mengartikan bahwa ketersediaan pasokan air minum di Kabupaten Belitung cenderung stabil dan terjangkau ke seluruh lapisan masyarakatnya. Sehingga capaian peningkatan pada indikator ini dapat membantu mewujudkan pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1.11 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas mencerminkan upaya optimal dalam pengendalian pencemaran dan mitigasi kerusakan lingkungan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung produktivitas sektor ekonomi, serta menjaga daya dukung alam bagi generasi mendatang. Lingkungan yang bersih dan sehat juga berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko bencana ekologis, serta mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis keberlanjutan. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, dan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah. IKLH memberikan indikasi suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah kualitas lingkungan berada dalam kondisi baik, buruk, atau berada di antara keduanya. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Penghitungan angka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formulasi yang telah diterapkan secara nasional, di mana nilai IKLH diperoleh dari penjumlahan 30% Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), 30% Indeks Kualitas Udara (IKU), dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTL). Nilai IKLH digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Belitung disajikan pada grafik sebagai berikut.



Gambar 2. 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

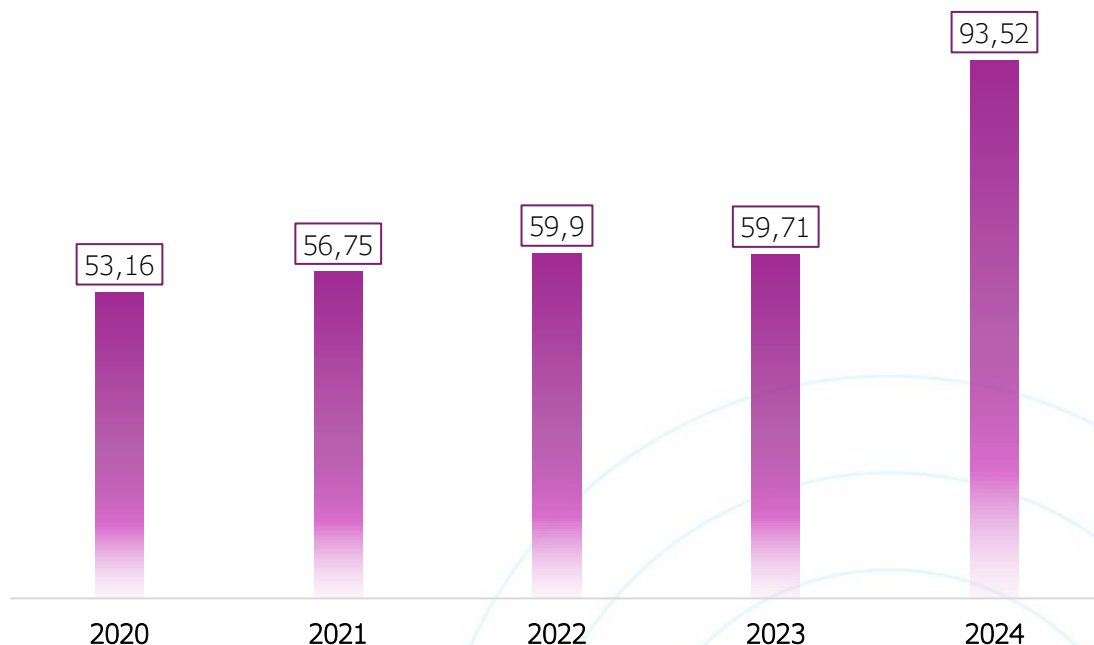
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada dalam kategori sedang. Pada tahun 2020, IKLH menunjukkan angka 67,62 dan meningkat menjadi 68,09 pada tahun 2021. Angka tersebut terus naik menjadi 69,25 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 68,9. Meski demikian, pada tahun 2024, nilai IKLH kembali naik menjadi 69,84 dan berada dalam kategori Cukup Baik. Kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan fokus pada peningkatan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang merupakan komponen utama untuk terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai komposit yang mencakup Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan nilai IKLH Kabupaten Belitung, dapat diberikan gambaran terkait kondisi masing-masing indeks komposit atau faktor pembentuknya.

a. Indeks Kualitas Air

Indikator kualitas air merupakan salah satu komponen pembentuk IKLH yang mengukur tingkat kebersihan dan keamanan air dari sumber-sumber seperti sungai, danau, dan laut. Kualitas air permukaan juga berkaitan erat dengan IKLH. Semakin tinggi IKLH, semakin baik kualitas air permukaan, yang menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber daya air. Berikut merupakan nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 11 Indeks Kualitas Air

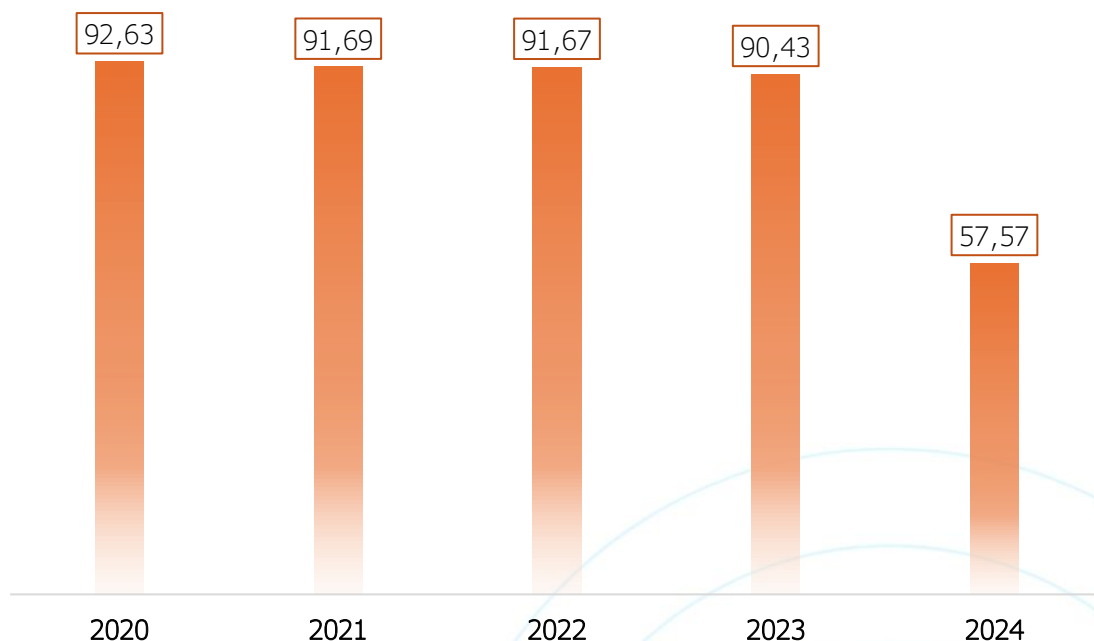
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Belitung menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari 2020 hingga 2023, nilai Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan, mulai dari 53,16 pada tahun 2020 hingga mencapai 59,71 pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air masih berada dalam kategori Sedang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, dan mendekati batas bawah kategori Sedang, yaitu 50,00. Namun, pada tahun 2024, nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan menjadi 93,52. Oleh karena itu, perhatian perlu diberikan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas air agar tetap berada dalam kategori Baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pengelolaan yang lebih baik dalam sektor pertambangan

dan perkebunan untuk mencegah potensi pencemaran, serta pengelolaan limbah domestik cair yang lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan kualitas air.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu wilayah selama periode tertentu. Indeks ini dihitung berdasarkan pengujian kualitas udara dengan menggunakan parameter NO₂ (Nitrogen Oksida) dan SO₂ (Sulfur Oksida). Kualitas udara, yang merupakan salah satu komponen penting dalam IKLH, sangat dipengaruhi oleh tingkat polusi. Ketika IKLH rendah, kualitas udara biasanya buruk, menunjukkan bahwa polusi udara belum terkelola dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Berikut disajikan nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 12 Indeks Kualitas Udara

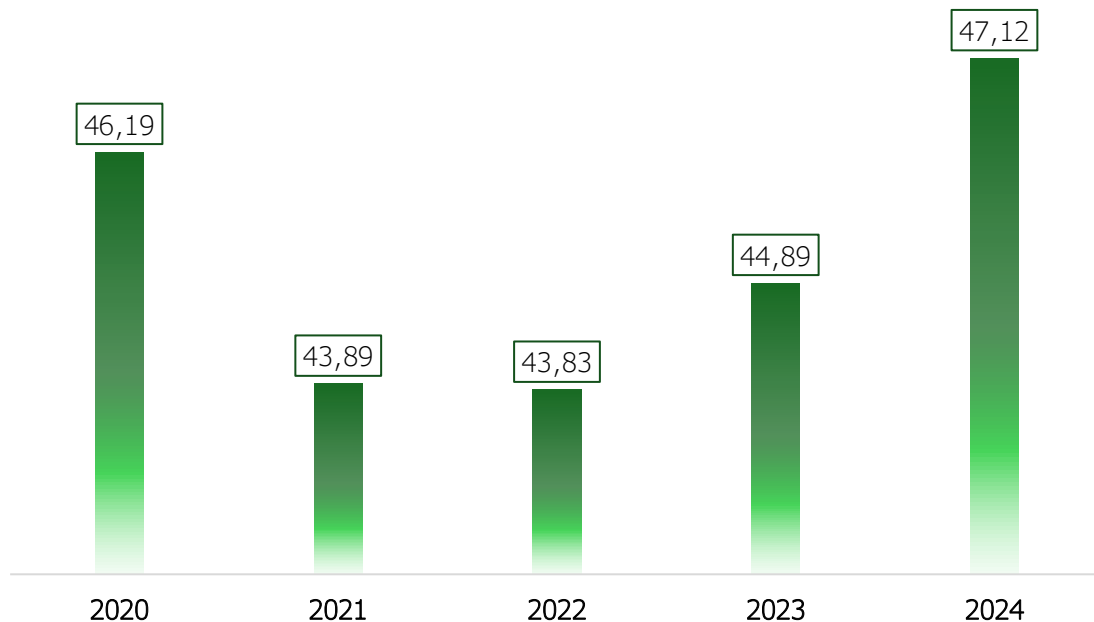
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Kualitas Udara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Udara berada pada angka 92,63, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 57,57, yang masuk dalam kategori sedang. Penurunan ini perlu mendapat perhatian serius agar pembangunan daerah di masa depan tetap memperhatikan kualitas udara, terutama yang berasal dari sektor emisi industri, pertambangan, dan kendaraan pribadi. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan alokasi ruang terbuka hijau dan vegetasi di ruang publik yang dapat membantu mengurangi pencemaran udara.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah suatu nilai yang mencerminkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah. Perhitungan IKTL didasarkan pada kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan, serta dipengaruhi oleh beberapa

faktor lainnya, seperti tipe dan luas tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Kualitas lahan yang baik dapat mencerminkan upaya perlindungan dan pengelolaan yang efektif, termasuk dalam menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan penggunaan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Belitung disajikan pada grafik sebagai berikut.



Gambar 2. 13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Belitung diukur berdasarkan luas tutupan hutan, yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan mencapai 46,19, yang termasuk dalam kategori kurang. Nilai ini terus menurun pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 43,89 dan 43,83, namun sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 44,89. Pada tahun 2024, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan kembali naik menjadi 47,12. Berdasarkan ketiga indeks kontributor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, kualitas tutupan lahan memerlukan perhatian khusus, karena berada pada kategori kurang.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup adalah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Rumah tangga dikategorikan memiliki akses sanitasi yang aman (*safely managed*) jika fasilitas sanitasi yang digunakan hanya diperuntukkan bagi anggota rumah tangga tersebut, dengan standar tertentu yang memastikan kebersihan dan keamanan. Jenis kloset yang digunakan harus berupa leher angsa, sementara limbah tinja dibuang ke dalam tangki septik yang disedot minimal sekali dalam lima tahun terakhir dan diproses di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Alternatif lainnya yaitu limbah tinja terhubung langsung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Belitung mencapai 7,69%. Angka ini mencerminkan adanya kesadaran dan usaha dari masyarakat untuk memperoleh fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Meskipun demikian, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang aman, yang memerlukan perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi. Upaya perlu difokuskan pada penyediaan fasilitas sanitasi untuk setiap rumah tangga. Dengan fasilitas sanitasi yang terkelola dengan baik, kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga.

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan indikator yang mengukur jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Timbulan sampah yang tinggi dapat mencerminkan konsumsi berlebihan dan kebiasaan pembuangan tidak ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dan limbah upaya menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat penting dilakukan yang mencakup pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan, pemisahan sampah di sumbernya, serta peningkatan upaya daur ulang dan pengomposan. Selain itu, penting juga untuk menerapkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, seperti pengolahan air limbah yang efisien dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang aman. Kinerja pengelolaan sampah dan limbah yang baik dapat dilihat melalui capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Belitung mengalami penurunan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, timbulan sampah yang terolah tercatat sebesar 552,25 ton, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 265,9 ton. Penurunan ini perlu mendapatkan perhatian karena tingginya timbulan sampah dapat berkontribusi terhadap penurunan kualitas air permukaan. Hal ini terjadi karena limbah cair dari sampah yang terbuang dapat meresap ke dalam tanah atau mengalir langsung ke sumber air, menyebabkan pencemaran. Selain itu, proses pembakaran sampah juga dapat menghasilkan emisi gas beracun dan partikel halus yang berbahaya bagi kualitas udara. Untuk mengatasi masalah ini, Kabupaten Belitung telah melakukan upaya pengelolaan sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan sampah, serta melakukan perbaikan dan modernisasi infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah, termasuk penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, beberapa upaya yang masih perlu dilakukan adalah peningkatan infrastruktur persampahan yang lebih memadai, termasuk penyediaan tempat sampah, kontainer, pelayanan pengangkutan sampah yang lebih baik, serta pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS3R, rumah pengomposan, dan bank sampah yang masih belum mencukupi kebutuhan.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan juga perlu terus ditingkatkan.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah proses mengumpulkan dan memindahkan sampah dari sumbernya menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau TPS3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, kawasan komersial, industri, area khusus, serta fasilitas sosial, umum, dan lainnya, kecuali tinja dan sampah yang bersifat spesifik. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Belitung mencerminkan seberapa banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah yang memadai, termasuk pengumpulan teratur dan pengangkutan yang efisien. Pada tahun 2024, rumah tangga dengan akses penuh layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Belitung tercatat sebesar 14,9%. Capaian tersebut mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 yang mencapai 14,8%. Meskipun ada sedikit peningkatan, tantangan terkait penyediaan infrastruktur dan kesadaran masyarakat masih perlu perhatian. Dengan perbaikan infrastruktur dan edukasi yang lebih intensif, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung dapat meningkat, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

2.1.1.12 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi merupakan kemampuan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan tantangan yang muncul akibat bencana alam dan perubahan iklim. Hal ini mencakup daya tahan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit Kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Dengan memperkuat resiliensi, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana di masa depan, serta mampu memanfaatkan peluang untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat resiliensi di Kabupaten Belitung meliputi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Risiko Bencana, dan Indeks Ketahanan Daerah.

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi kehidupan dan pembangunan global di mana salah satu pemicunya adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan emisi GRK merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Emisi GRK yang tinggi menyebabkan peningkatan suhu global, yang memicu perubahan iklim dengan berbagai dampak negatif. Perubahan iklim dapat mengakibatkan cuaca ekstrem seperti gelombang panas, badai, dan curah hujan yang tidak teratur, yang pada gilirannya meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim mengganggu ekosistem dan keanekaragaman hayati, menyebabkan pergeseran habitat, kepunahan spesies, dan penurunan kesehatan ekosistem. Dampak lain dari emisi GRK yang tinggi adalah penurunan ketersediaan air. Perubahan pola curah hujan dan peningkatan penguapan akibat suhu yang lebih tinggi mengurangi pasokan air bersih dan memperburuk kekeringan di beberapa daerah. Hal ini berdampak negatif pada pertanian, yang

bergantung pada air untuk irigasi, serta pada kesehatan manusia yang membutuhkan air bersih untuk minum dan sanitasi. Selain itu, emisi GRK yang tinggi berdampak langsung pada kesehatan manusia. Peningkatan suhu dapat memperburuk kualitas udara dengan meningkatkan konsentrasi polutan seperti ozon troposferik, yang menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit kardiovaskular. Gelombang panas juga meningkatkan risiko dehidrasi, stroke panas, dan kematian terkait panas, terutama di kalangan lansia dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang rentan.

Ketahanan Bencana adalah upaya penting untuk mempersiapkan dan melindungi masyarakat serta infrastruktur dari dampak bencana alam atau kejadian yang tidak terduga lainnya, dengan tujuan meminimalkan kerugian dan dampak negatif terhadap kehidupan. Hal ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan perencanaan mitigasi risiko, pembangunan infrastruktur tangguh, serta edukasi dan pelatihan masyarakat tentang tindakan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana. Di Kabupaten Belitung, Ketahanan Bencana dapat dilihat melalui Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan kekeringan. IRB dihitung berdasarkan ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 14 Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Belitung menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IRB tercatat sebesar 168,4, yang termasuk dalam kategori tinggi (160-200). Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022, nilai IRB menurun menjadi 164,44 pada tahun 2021 dan 148,48 pada tahun 2022, masuk ke dalam kategori sedang (130-160). Di tahun 2023, nilai IRB kembali meningkat menjadi 158,53, namun tetap berada dalam kategori sedang. Pada tahun 2024, terjadi penurunan lagi dengan nilai IRB mencapai 143,71, yang masih berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam pengurangan risiko bencana, masih terdapat

faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko, seperti perubahan iklim, peningkatan aktivitas manusia yang tidak terkendali, atau kejadian bencana yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi mitigasi bencana yang efektif, seperti pengelolaan lahan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan kesadaran serta kesiapan masyarakat terhadap bencana. Dengan demikian, risiko bencana dapat dikurangi, kerugian akibat bencana dapat diminimalkan, dan lingkungan hidup dapat dilestarikan untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan manusia.

Salah satu upaya dalam menjaga Ketahanan Bencana di Kabupaten Belitung dilakukan di Tanjung Kelayang. Tanjung Kelayang di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, merupakan destinasi wisata unggulan yang memerlukan kajian risiko bencana untuk menunjang rencana kedaruratan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memfasilitasi diskusi kelompok untuk menyusun kajian risiko ini, dengan fokus pada finalisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Pengembangan destinasi pariwisata prioritas, termasuk Tanjung Kelayang, merupakan proyek utama pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. BNPB juga melakukan survei indeks kesiapsiagaan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata sebagai bagian dari kajian kapasitas. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Semakin tinggi nilai IKD, maka semakin tinggi pula kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. IKD dapat digunakan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Berikut disajikan data Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Belitung.



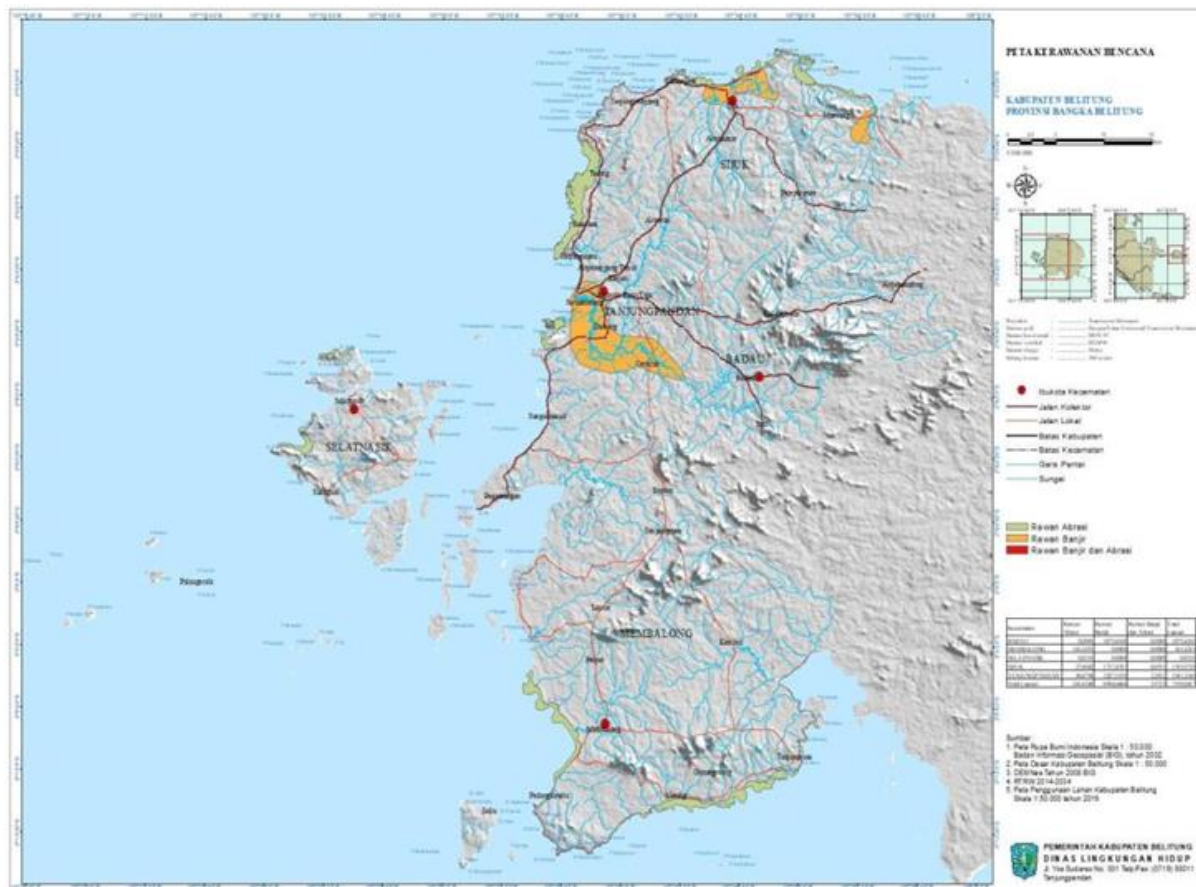
Gambar 2. 15 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Belitung menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 0,5, yang masuk dalam kategori sedang. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 0,49 pada

tahun 2021 dan 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih baik dalam membangun kapasitas penanggulangan bencana, baik dari segi infrastruktur, kesiapsiagaan masyarakat, maupun kebijakan mitigasi yang diterapkan. Meskipun demikian, nilai IKD yang masih berada dalam kategori sedang menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan daerah.

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi atau sering mengalami kejadian bencana alam. Berada di kawasan kepulauan, membuat beberapa kejadian bencana sangat mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Belitung, tercatat beberapa bencana yang pernah terjadi yang disebabkan oleh faktor alam ataupun lainnya seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi, gelombang ekstrem, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan atau lahan. Kerawanan Bencana yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat persebaran spasialnya melalui peta berikut ini dengan klasifikasi rawan bencana abrasi, rawan banjir, dan rawan banjir dan abrasi.



Gambar 2. 16 Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Belitung

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034

2.1.1.13 Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penduduk merujuk pada warga Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia. Penduduk merupakan kelompok individu yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu dan diidentifikasi berdasarkan kriteria administrasi atau statistik tertentu. Melalui analisis jumlah penduduk dan tingkat

pertumbuhannya setiap tahun, suatu wilayah dapat memetakan potensinya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pertumbuhan penduduk, baik positif maupun negatif, mencerminkan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini penting untuk memprediksi jumlah penduduk di masa depan serta memahami kebutuhan dasar dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, pertumbuhan penduduk berdampak langsung pada pemanfaatan sumber daya manusia serta daya dukung dan daya tampung sumber daya alam. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kabupaten Belitung berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Kecamatan

Kabupaten Belitung							
No	Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanjungpandan	Laki-laki	50.944	52.126	53.290	54.541	55.545
		Perempuan	50.072	51.394	52.409	53.462	54.318
2	Membalong	Laki-laki	13.049	13.367	13.568	13.901	14.096
		Perempuan	12.340	12.647	12.913	13.180	13.315
3	Sijuk	Laki-laki	15.597	15.976	16.390	16.850	17.072
		Perempuan	14.980	15.306	15.696	16.153	16.293
4	Badau	Laki-laki	7.488	7.719	7.900	8.039	8.160
		Perempuan	7.029	7.226	7.439	7.576	7.654
5	Selat Nasik	Laki-laki	3.098	3.071	3.077	3.210	3.050
		Perempuan	2.875	2.903	2.909	3.033	2.902
Kabupaten Belitung			177.472	181.735	185.591	189.945	192.405

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Belitung mencapai 192.405 jiwa. Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kelas kota, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori kota sedang, yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 hingga 500.000 jiwa. Sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk. Setiap kecamatan di Kabupaten Belitung memiliki jumlah penduduk yang berbeda, tergantung pada potensi kegiatan di wilayah tersebut. Kecamatan Tanjungpandan memiliki jumlah penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Selat Nasik memiliki jumlah penduduk terendah.

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung masih mendominasi dan lebih tinggi daripada perempuan. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 97.923 jiwa (50,89 persen), sementara penduduk perempuan sebanyak 94.482 jiwa (49,11 persen). Segmentasi ini menunjukkan adanya keseimbangan yang relatif antara jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Belitung, meskipun ada sedikit dominasi oleh penduduk laki-laki. Informasi ini penting untuk perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi, agar kebutuhan seluruh penduduk, baik

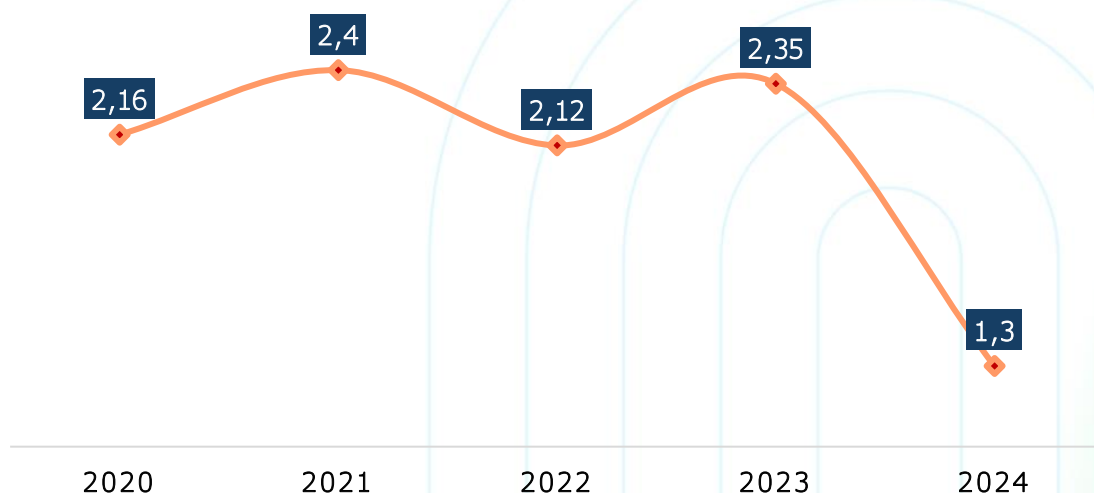
laki-laki maupun perempuan, dapat dipenuhi secara optimal. Segmentasi ini juga terlihat dalam rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada wilayah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin/*sex ratio* di Kabupaten Belitung memiliki nilai lebih dari 100 persen. Artinya terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tersebut dapat lebih jelas dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Belitung

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Komposisi menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-laki	90.176	92.259	94.225	96.541	97.923
	Perempuan	87.296	89.476	91.366	93.404	94.482
2	Sex Ratio (%)	103,3	103,11	103,13	103,36	103,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya tercatat sebesar 2,16%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,40%. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2022 laju pertumbuhannya menurun menjadi 2,12%. Pada tahun 2023, angka pertumbuhan kembali meningkat menjadi 2,35%, menunjukkan adanya sedikit pemulihan. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dengan laju pertumbuhan yang hanya mencapai 1,30%. Penurunan yang cukup tajam ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi demografi. Penurunan ini juga memberikan gambaran tentang perubahan dinamika penduduk yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa depan.



Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

Jumlah desa/kelurahan yang tersebar di berbagai kecamatan menggambarkan tingkat fragmentasi administratif di Kabupaten Belitung. Dengan 49 desa/kelurahan, terdapat potensi untuk mengembangkan program yang lebih spesifik di tingkat lokal, namun juga membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai unit administratif untuk memastikan pelayanan publik yang merata dan efisien. Kecamatan dengan wilayah luas, seperti Membalong (909,55 km²), memerlukan perhatian khusus dalam hal transportasi dan infrastruktur untuk memastikan semua daerah terhubung dengan baik. Pembangunan jalan, transportasi umum, dan akses ke layanan dasar seperti air bersih dan listrik harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, kecamatan dengan luas yang lebih kecil, seperti Selat Nasik (133,5 km²), mungkin lebih mudah dikelola, namun tetap memerlukan perencanaan yang cermat agar penggunaan lahan dan sumber daya dapat dimaksimalkan.

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2024

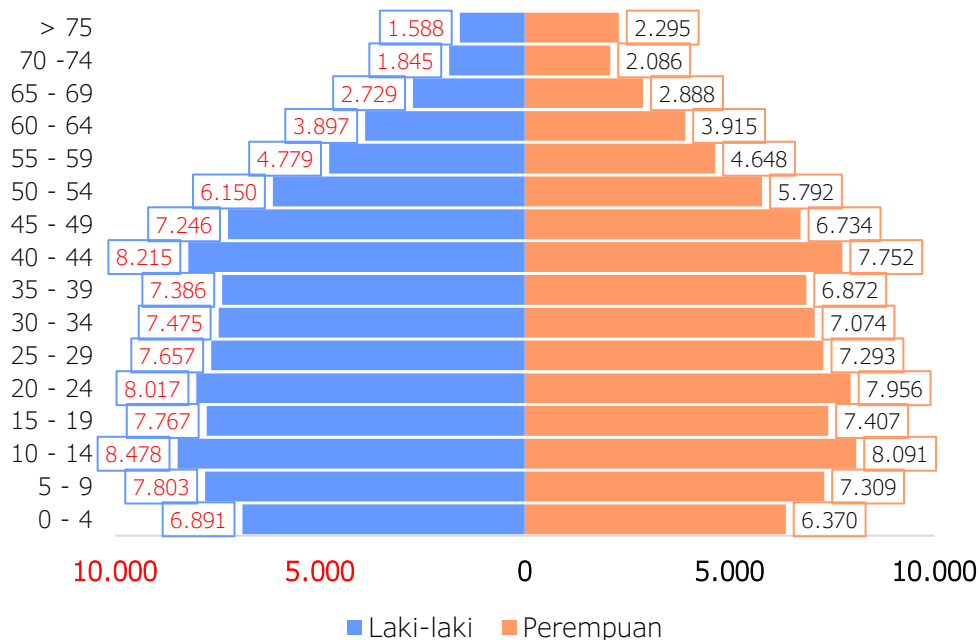
No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Tanjungpandan	16	378,45	290,29
2	Membalong	12	909,55	30,13
3	Selat Nasik	4	133,50	44,58
4	Sijuk	10	413,99	80,59
5	Badau	7	458,20	34,51
Jumlah		49	2293,69	83,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

Membalong, dengan kepadatan penduduk yang rendah (30,13 jiwa/km²), memiliki potensi untuk ekspansi dan pembangunan baru, namun mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan kepada penduduk yang tersebar. Tanjungpandan, dengan kepadatan yang tinggi (290,29 jiwa/km²), menunjukkan bahwa ini adalah area dengan tingkat aktivitas ekonomi dan populasi yang signifikan, sehingga penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan. Sijuk dan Badau, dengan kepadatan yang lebih moderat (80,59 jiwa/km² dan 34,51 jiwa/km²), menunjukkan potensi untuk pengembangan lebih lanjut tanpa memberi tekanan besar pada sumber daya yang ada.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat digunakan untuk menentukan angka ketergantungan (*dependency ratio*) di suatu wilayah. Adapun komposisi penduduk Kabupaten Belitung sebagian besar didominasi oleh kelompok muda, tingkat kelahiran bayi yang tinggi, kelompok balita dan remaja masih sangat besar serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kabupaten Belitung memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor. Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan usia, pada tahun 2024 proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,66 persen, usia muda (0-14 tahun) ada 23,36 persen, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 6,98 persen. Apabila ditinjau dari piramida penduduk tahun 2024, Kabupaten Belitung memiliki bentuk yang

cenderung rata mulai dari kelompok usia 44 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan struktur penduduk kabupaten Belitung di mana tingkat kelahiran mulai menurun walau cenderung melambat. Gambaran dari karakteristik penduduk ini menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sebagaimana disajikan dalam piramida penduduk berikut.



Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

Kelompok usia di Kabupaten Belitung menunjukkan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Kelompok usia 0-14 tahun, sebanyak 44.942 penduduk, memerlukan perhatian pada pendidikan, layanan kesehatan anak, dan fasilitas rekreasi. Kelompok usia 15-24 tahun, dengan 31.147 penduduk, membutuhkan akses ke pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja. Kelompok usia 25-54 tahun, yang terdiri dari 85.646 penduduk, merupakan kelompok produktif dan memerlukan pengembangan infrastruktur ekonomi dan akses ke perumahan serta fasilitas kesehatan. Kelompok usia 55-64 tahun (17.239 penduduk) membutuhkan program kesehatan yang focus pada pencegahan penyakit dan persiapan pensiun, sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas (13.431 penduduk) memerlukan layanan kesehatan untuk lansia dan dukungan sosial. Pembangunan di Kabupaten Belitung harus mencakup kebutuhan seluruh kelompok usia, dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda, infrastruktur untuk kelompok usia produktif, serta layanan kesehatan dan dukungan sosial untuk lansia, demi mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perhitungan proyeksi penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Hasil proyeksi penduduk membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana layanan dasar sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Proyeksi penduduk

Kabupaten Belitung merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga tahun 2029 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2025-2029. Perkembangan kondisi demografi di Kabupaten Belitung diproyeksikan mengalami peningkatan sebanyak 9.385 jiwa, dari 192.405 jiwa pada tahun 2024 menjadi 201.790 jiwa pada tahun 2029. Berikut proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Belitung berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2029.

Tabel 2.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (orang)	Proyeksi Penduduk (orang)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-laki	97.923	95.180	96.340	97.480	98.620	99.720
Perempuan	94.482	98.380	99.340	100.290	101.190	102.070
Jumlah	192.405	193.560	195.680	197.770	199.810	201.790

Sumber: Proyeksi Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2035

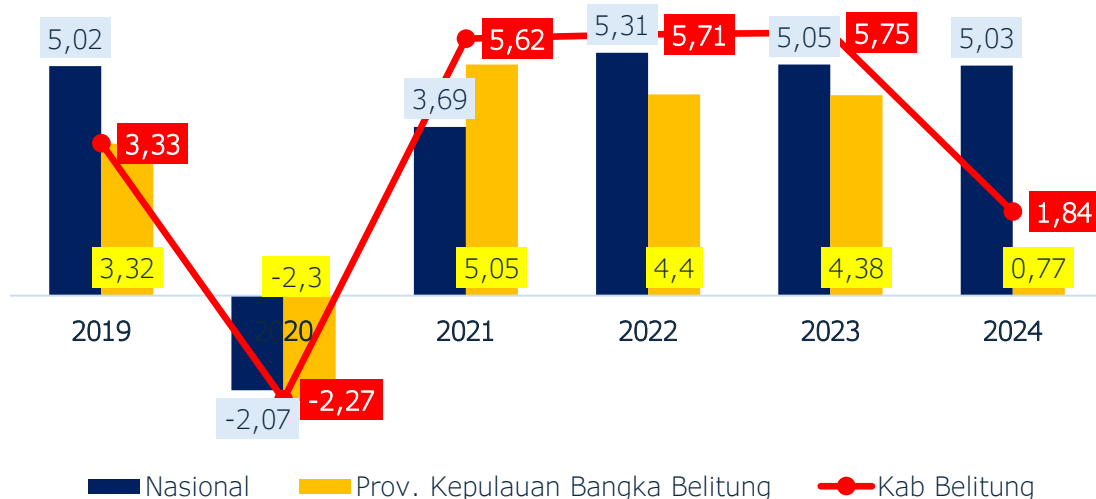
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi pada Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui beberapa indikator yang dapat merepresentasikan kondisi perekonomian masyarakatnya. Indikator tersebut diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB Per Kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini dan juga indeks pembangunan manusia. Berikut rinciannya:

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

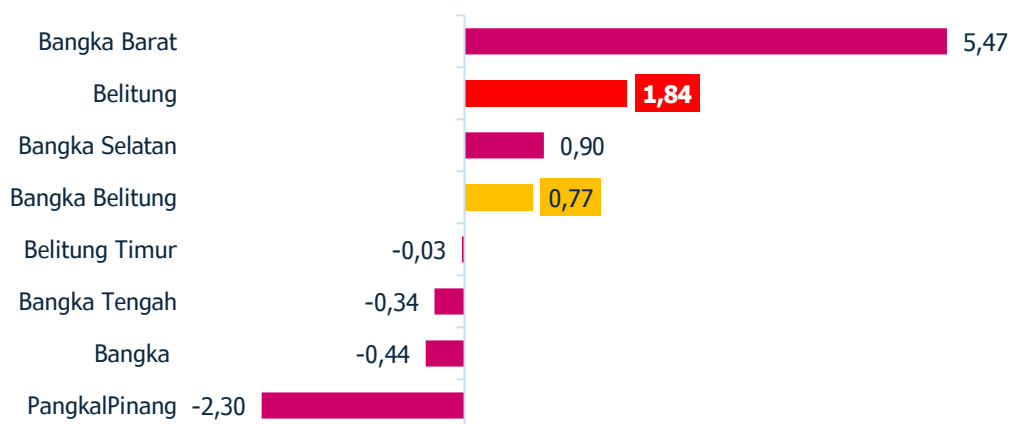
Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah indikator yang menunjukkan peningkatan atau penurunan aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini biasanya diukur dengan persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal. Beberapa hal yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diantaranya tingkat investasi, besaran konsumsi rumah tangga, besaran pengeluaran pemerintah, tingkat impor dan ekspor, dan juga bisa dipengaruhi oleh kondisi stabilitas politik dan hukum yang ada di wilayah itu sendiri. Seperti halnya di Kabupaten Belitung, laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di tahun 2020 saat terjadi pandemi covid-19 dan juga di tahun 2024. Berikut kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung jika disandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional:



Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada grafik diatas terlihat perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional. Kabupaten Belitung memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bahkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya selama periode 2019-2024. Di tahun 2020 kondisi perekonomian mengalami kontraksi, dan hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Belitung dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian di tahun 2021 mengalami pemulihan secara perlahan. Hingga di tahun 2024, laju perekonomian di Kabupaten Belitung mengalami perlambatan menjadi 1,84%, begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 0,77% dan Nasional menjadi 5,03%. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung sebesar 1,84% ini berada di atas Provinsi, namun masih dibawah Nasional. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung di tahun 2024 berada di urutan ke-2 tertinggi dari 7 kabupaten/kota lainnya.



Gambar 2. 20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Kategori	PDRB Lapangan Usaha	Capaian Laju Pertumbuhan				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,48	4,16	0,54	2,77	3,78
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,45	5,06	-0,93	-0,04	-1,68
C	Industri Pengolahan	0,14	4,82	8,17	4,91	-2,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,94	8,48	-4,03	2,52	5,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,63	5,35	4,74	0,77	3,84
F	Konstruksi	-4,09	5,11	-0,88	9,19	-2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,94	5,98	14,26	1,78	-0,67
H	Transportasi dan Pergudangan	-20,66	8,42	36,30	10,51	-0,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,64	10,77	14,16	10,23	4,32
J	Informasi dan Komunikasi	16,63	8,16	10,49	13,97	10,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,66	8,91	6,03	15,28	0,32
L	Real Estate	1,18	5,19	5,48	4,25	4,51
M,N	Jasa Perusahaan	-20,27	5,50	22,31	8,99	9,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-4,85	5,62	-1,44	6,85	7,91
P	Jasa Pendidikan	-3,23	2,49	2,91	11,04	10,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	13,29	2,81	9,19	1,53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-14,43	4,39	12,22	11,35	8,23
Produk Domestik Regional Bruto		-2,27	5,62	5,71	5,74	1,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

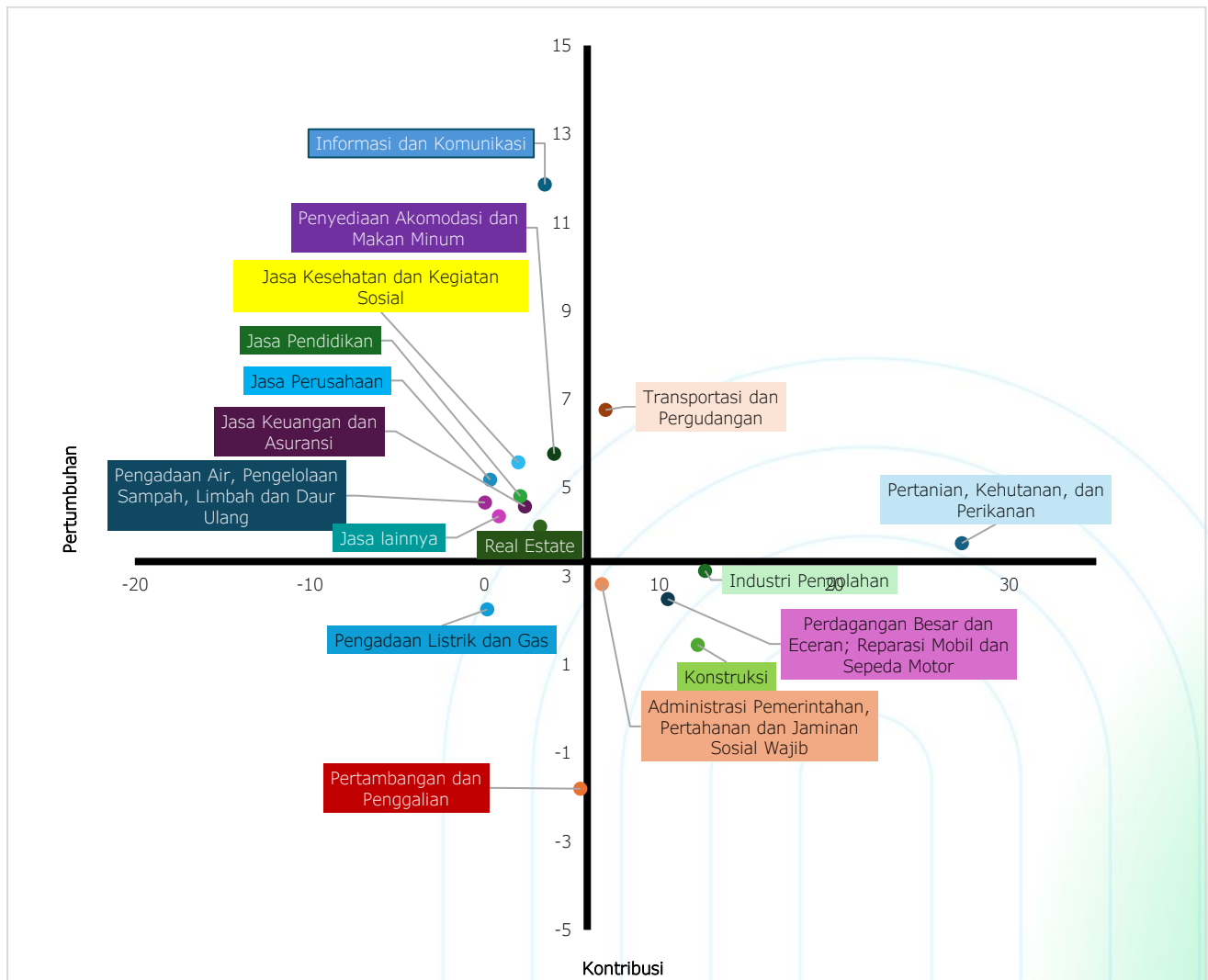
Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung dilihat dari PDRB Menurut lapangan usaha, paling tinggi berada di sektor jasa pendidikan dengan laju pertumbuhan 10,83% di tahun 2024. Sedangkan paling rendah berada di sektor industri pengolahan (-) 2,45%. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung menunjukkan perkembangan yang menurun. Oleh karena itu diperlukan usaha pengembangan pada sektor-sektor potensial yang terdapat di Kabupaten Belitung agar tercipta struktur dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Berdasarkan pada besarnya pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing sektor PDRB, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis *Tipology Klassen* yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rasio antara laju pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Belitung dengan laju pertumbuhan PDRB total Kabupaten Belitung serta menghitung rasio proporsi kontribusi masing-masing sektor di Kabupaten Belitung terhadap pembentukan PDRB dengan proporsi kontribusi rata-rata sektor terhadap total PDRB Kabupaten Belitung. Dengan menggunakan analisis *Tipology Klassen*, sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas

didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut:

- Kuadran Sektor Prima : Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian daerah;
- Kuadran Sektor Potensial : Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi;
- Kuadran Sektor Berkembang : Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah; serta
- Kuadran Sektor Terbelakang : Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah.

Berdasarkan data pertumbuhan dan distribusi/ kontribusi sektor PDRB sebagaimana yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diperoleh hasil klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Belitung berdasarkan *Typology Klassen* secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matriks sebagai berikut:



Gambar 2. 21 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Belitung Berdasarkan Typology Klassen Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 2.12 Matriks Tipology Klassen Sektor PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Kontribusi Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$)
Laju Pertumbuhan Sektoral		
Tumbuh Cepat ($r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$)	<u>Sektor Prima</u> (Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)	<u>Sektor Berkembang</u> (Informasi dan Komunikasi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Lainnya; Real Estate)
Tumbuh Lambat ($r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$)	<u>Sektor Potensial</u> (Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib)	<u>Sektor Terbelakang</u> (Pengadaan Listrik dan Gas; Pertambangan dan Penggalan)

Sumber: Diolah, 2025

Analisis ini mendasarkan pada pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pada pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Belitung berdasarkan rata-rata dalam setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan pada gambar dan matriks yang telah disajikan di atas selanjutnya dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 2 (dua) sektor ekonomi di Kabupaten Belitung yang termasuk kedalam kategori sektor dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Belitung (Sektor Prima), yaitu Transportasi dan Pergudangan; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sektor tersebut memiliki karakteristik sebagai sektor maju dan tumbuh cepat, mengingat pertumbuhan dan distribusinya dalam 5 tahun terakhir rata-rata berada di atas rata-rata PDRB. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Potensial) di Kabupaten Belitung tercatat sebanyak 4 (empat) sektor diantaranya adalah Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Keempat sektor tersebut termasuk sebagai sektor maju namun tertekan,

mengingat pertumbuhannya rata-rata selama 5 tahun terakhir berada dibawah pertumbuhan PDRB.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Berkembang) tercatat sebanyak 9 (sembilan) sektor meliputi: Informasi dan Komunikasi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Lainnya; Real Estate. Sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor berkembang cepat. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) tercatat sebanyak 2 (dua) sektor yang meliputi : Pengadaan Listrik dan Gas; Pertambangan dan Penggalan. Sektor tersebut termasuk dalam kategori relatif tertinggal.

Perkembangan Tipology Klassen Sektor PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2020 - 2024 secara periodik ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.13 Perkembangan Tipology Klassen Sektor PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha	2022			2023			2024		
	Pertumbuhan	Kontribusi	Tipology Klassen	Pertumbuhan	Kontribusi	Tipology Klassen	Pertumbuhan	Kontribusi	Tipology Klassen
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,54	26,9	Potensial	2,77	26,59	Potensial	3,78	27,1	Prima
Pertambangan dan Penggalan	-0,93	5,47	Terbelakang	-0,04	4,91	Terbelakang	-1,68	4,85	Terbelakang
Industri Pengolahan	8,17	13,15	Prima	4,91	13,01	Prima	-2,45	12,67	Potensial
Pengadaan Listrik dan Gas	-4,03	0,15	Terbelakang	2,52	0,14	Terbelakang	5,2	0,14	Berkembang
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	0,03	Berkembang	0,77	0,03	Terbelakang	3,84	0,03	Berkembang
Konstruksi	-0,88	11,72	Potensial	9,19	12,04	Prima	-2,11	11,73	Potensial
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,26	10,93	Prima	1,78	10,61	Potensial	-0,67	10,31	Potensial
Transportasi dan Pergudangan	36,3	7,61	Prima	10,51	8,26	Prima	-0,78	8,11	Potensial
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,16	4,03	Berkembang	10,23	4,13	Berkembang	4,32	4,22	Berkembang

Lapangan Usaha	2022			2023			2024		
	Pertumbuhan	Kontribusi	Tipology Klassen	Pertumbuhan	Kontribusi	Tipology Klassen	Pertumbuhan	Kontribusi	Tipology Klassen
Informasi dan Komunikasi	10,49	3,34	Berkembang	13,97	3,52	Berkembang	10,04	3,7	Berkembang
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,03	2,31	Berkembang	15,28	2,46	Berkembang	0,32	2,38	Terbelakang
Real Estate	5,48	3,13	Berkembang	4,25	3,06	Berkembang	4,51	3,07	Berkembang
Jasa Perusahaan	22,31	0,33	Berkembang	8,99	0,34	Berkembang	9,37	0,35	Berkembang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-1,44	6,30	Potensial	6,85	6,17	Prima	7,91	6,45	Prima
Jasa Pendidikan	2,91	1,92	Terbelakang	11,04	1,98	Berkembang	10,83	2,12	Berkembang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	1,89	Terbelakang	9,19	1,92	Berkembang	1,53	1,89	Terbelakang
Jasa Lainnya	12,22	0,79	Berkembang	11,35	0,83	Berkembang	8,23	0,88	Berkembang

Sumber: Diolah, 2025

Dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Belitung diperlukan pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis, dimana sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui melalui Analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis *Location Quotient* (LQ) dimaksudkan untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Belitung yang masuk dalam kategori sektor basis (unggulan) maupun sektor non basis. Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading* sektor. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading* sektor suatu kegiatan ekonomi. *Location quotient* menghitung perbandingan *share output* sektor i di kota atau kabupaten dan *share output* sektor i di provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Belitung tahun 2020 - 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis dan data PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 - 2024 ADHK sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut selanjutnya diperoleh hasil perhitungan Indeks LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.14 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					Rata-Rata	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,386	1,422	1,398	1,367	1,361	1,387	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	0,666	0,651	0,633	0,633	0,641	0,645	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,541	0,535	0,544	0,553	0,555	0,546	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,459	1,426	1,399	1,383	1,371	1,408	BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,750	1,747	1,744	1,724	1,707	1,734	BASIS
F	Konstruksi	1,411	1,414	1,399	1,384	1,349	1,392	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,758	0,755	0,769	0,755	0,744	0,756	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,523	1,507	1,677	1,671	1,603	1,596	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,341	1,336	1,365	1,351	1,346	1,348	BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,638	1,621	1,610	1,591	1,577	1,607	BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,282	1,315	1,304	1,303	1,283	1,297	BASIS
L	Real Estat	0,969	0,950	0,941	0,930	0,929	0,944	NON BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	1,224	1,214	1,322	1,306	1,322	1,278	BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,110	1,106	1,092	1,080	1,060	1,090	BASIS
P	Jasa Pendidikan	0,756	0,753	0,743	0,735	0,728	0,743	NON BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,546	1,526	1,517	1,503	1,485	1,516	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,976	0,977	1,004	0,994	0,985	0,987	NON BASIS

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil perhitungan analisis LQ memberikan informasi tentang sektor-sektor perekonomian mana saja yang merupakan potensi unggulan daerah (sektor basis) dan sektor mana yang merupakan sektor non basis. Jika hasil perhitungan LQ menunjukkan > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis sedangkan jika hasil perhitungan LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis. Hasil perhitungan analisis LQ dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel diatas diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Belitung secara konsisten pada 5 tahun terakhir (2020 - 2024) terdapat 11 (sebelas)

sektor yang termasuk menjadi sektor basis, dimana sektor tersebut memiliki nilai LQ diatas 1 (> 1). Adapun sektor-sektor tersebut meliputi: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini mengartikan keberadaan sektor-sektor tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan (Kabupaten Belitung) akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah Kabupaten Belitung.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah memiliki beberapa dimensi pengukuran. Salah satu alat untuk mengukur produktivitas daerah ialah metode analisis *shift share*. Analisis *shift share* digunakan untuk membagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah ke dalam tiga komponen dan mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut. *Shift share* merupakan suatu metode alternatif untuk mengukur laju pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Melalui metode ini, suatu sektor ekonomi dapat diukur cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan suatu wilayah, termasuk sektor yang menjadi penyumbang daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lain. Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Analisis *shift share* memiliki tiga komponen yaitu :

- 1) *Regional share*, untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap daerah yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- 2) *Proportional shift*, untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.
- 3) *Differential shift*, untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sektor PDRB Kabupaten Belitung dan membandingkannya dengan nilai PDRB Provinsi Bangka Belitung. Adapun hasil perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi di Kabupaten Belitung

Kategori	Lapangan Usaha	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	273,707	-111,913	46,447
B	Pertambangan dan Penggalian	74,388	-65,220	1,932
C	Industri Pengolahan	112,863	-49,922	54,939
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,493	-0,062	-0,232
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,315	-0,034	0,039
F	Konstruksi	122,683	-28,564	-3,439
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	101,604	27,686	18,990
H	Transportasi dan Pergudangan	48,653	102,488	45,309
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,779	48,999	13,191
J	Informasi dan Komunikasi	43,843	97,002	1,474
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,865	17,969	7,917
L	Real Estat	32,414	11,828	-0,202
M,N	Jasa Perusahaan	2,690	3,715	3,015
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61,182	20,869	-2,301
P	Jasa Pendidikan	19,179	17,465	0,556
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,181	17,908	0,181
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,087	8,726	3,187
Total		975,926	118,940	191,003

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sesuai dengan hasil perhitungan yang telah disajikan diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki *regional share* terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 273,707, sedangkan yang terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,315. Keseluruhan sektor memiliki nilai *regional share* sebesar 975,926 dengan tanda positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Belitung pada masing-masing sektor dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikutnya berkaitan dengan *proportional shift* sektor ekonomi di Kabupaten Belitung terdapat 11 (sebelas) sektor yang bernilai positif, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa lainnya. Kesebelas sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan di daerah Kabupaten Belitung

lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini terjadi karena pengaruh sektor tersebut pada lingkup yang lebih luas (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) terhadap sektor dalam PDRB Kabupaten Belitung. Masih terdapat 6 (enam) sektor di Kabupaten Belitung yang tergolong lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan sektor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memiliki nilai *proportional shift* yang bertanda negatif.

Selanjutnya terdapat nilai *differential shift*, terdapat 13 (tiga belas) sektor ekonomi yang memiliki tanda positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tiga belas sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi/ kuat, dimana sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif regional yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) sektor lainnya memiliki nilai *differential shift* dengan tanda negatif, yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang masih rendah/ lemah mencakup sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Real Estat; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hasil analisis *shift share* digunakan untuk mengklasifikasikan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing. Dengan melihat pada nilai *proportional shift* dan *differential shift* maka dapat dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kabupaten Belitung yang secara lebih jelas disajikan pada gambar berikut:

Tabel 2.16 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024 Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share

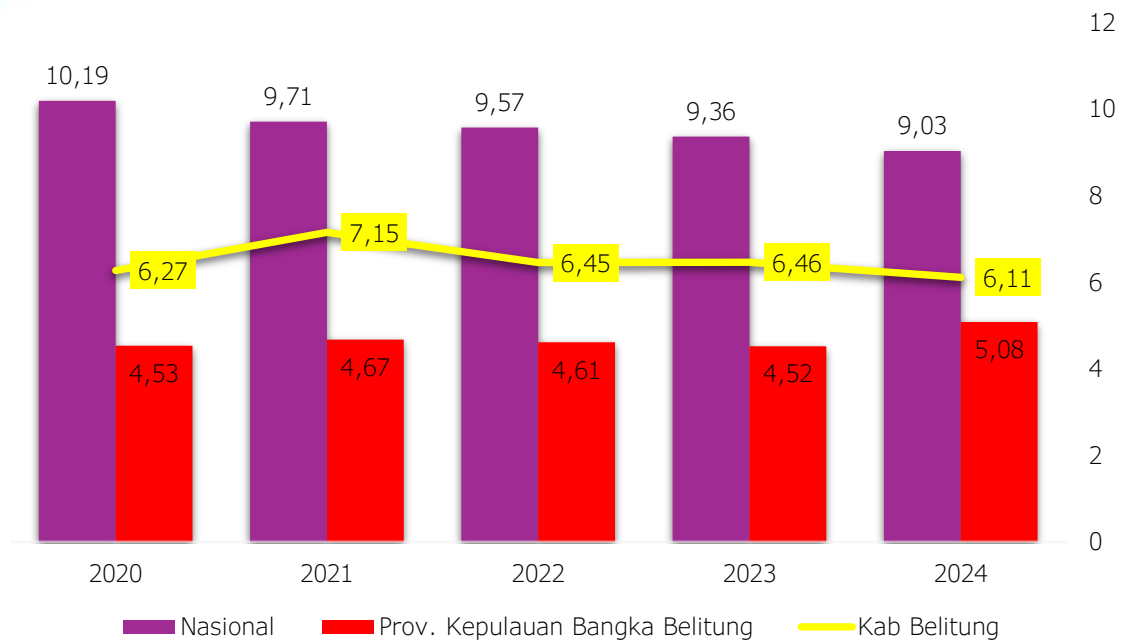
KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	KUADRAN III (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa lainnya	• Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
KUADRAN II (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)	KUADRAN IV (Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)
• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan & Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	• Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi

Sumber: Diolah, 2025

Berdasarkan pengelompokkan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Belitung terdapat 9 (sembilan) sektor yang termasuk dalam kategori pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa lainnya. Lalu terdapat 4 (empat) sektor yang memiliki pertumbuhan lambat dan berdaya saing, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kemudian sektor yang memiliki pertumbuhan cepat namun tidak berdaya saing terdapat 2 (dua) sektor yaitu real estate, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Berikutnya untuk sektor dengan pertumbuhan lambat dan juga tidak berdaya saing terdapat 2 (dua) sektor yaitu pengadaan listrik dan gas serta sektor konstruksi.

2.1.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

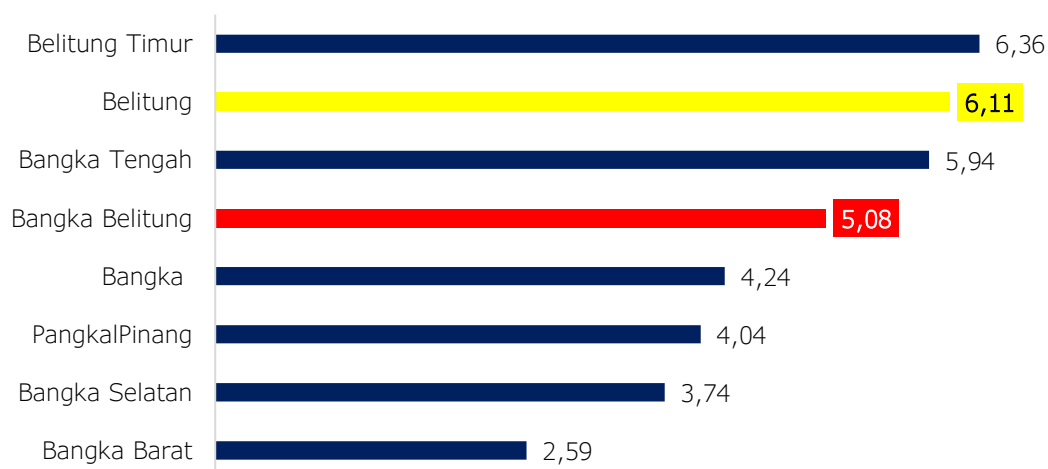
Tingkat Kemiskinan adalah persentase penduduk dalam suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin sendiri diartikan sebagai mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah, dapat disebabkan karena kondisi inflasi, kurangnya lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan masih kurang merata, ataupun pengaruh alam dan juga kualitas sumber daya manusianya sendiri di daerah tersebut. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung selama kurun waktu 5 tahun terakhir berada di posisi fluktuatif sebagai berikut:



Gambar 2. 22 Persentase Penduduk Miskin diKabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

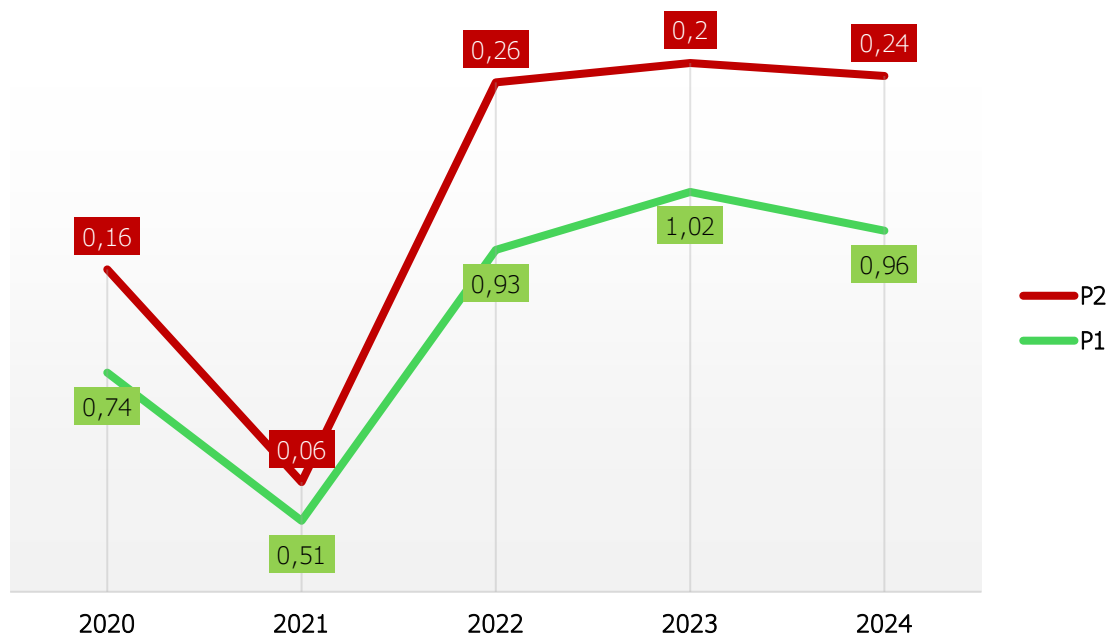
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persentase kemiskinan Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Kondisi jumlah penduduk miskin antara Kabupaten Belitung, Provinsi dan Nasional, tidak lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan di tingkat provinsi maupun nasional. Penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 berkurang 1.190 jiwa menjadi 12.340 jiwa atau 6,45% dari total jumlah penduduk. Angka tersebut mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi 6,46%, lalu turun menjadi 6,11% atau 11.970 jiwa pada tahun 2024. Pada rentang 2020-2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung rata-rata mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung menempati urutan kedua tertinggi Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025



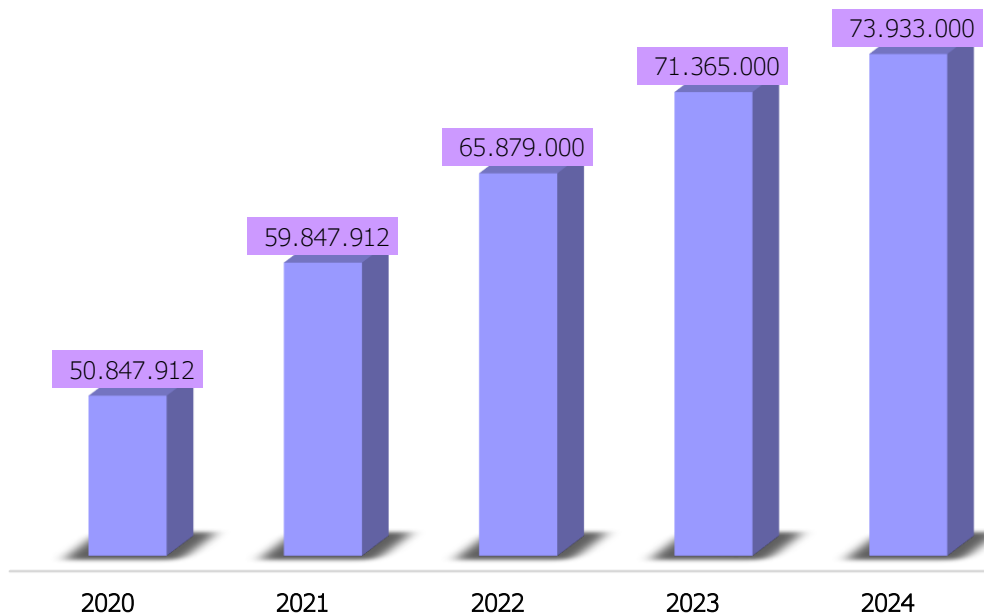
Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung pada tahun 2021 mengalami kontraksi di masa covid-19 menjadi 0,51, begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang berada di angka 0,06. Di tahun 2022 hingga 2024 mengalami pemulihan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) melonjak di angka 0,93 di tahun 2022, lalu meningkat di angka 1,02, dan menurun di tahun 2024 menjadi 0,96. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0,26 dari sebelumnya 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih tinggi. Kemudian, pada tahun 2023, angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini menurun menjadi 0,2 dan kembali bertambah menjadi 0,24 pada tahun 2024. Semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin parah kemiskinannya. Kondisi ini memerlukan strategi yang semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan, agar Kabupaten Belitung dapat keluar dari kemiskinan.

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB per kapita hanya menunjukkan angka rata-rata, namun tidak menggambarkan apakah pendapatan merata atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Data PDRB Per Kapita ini dapat digunakan untuk merancang program pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah. Berikut capaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Belitung:



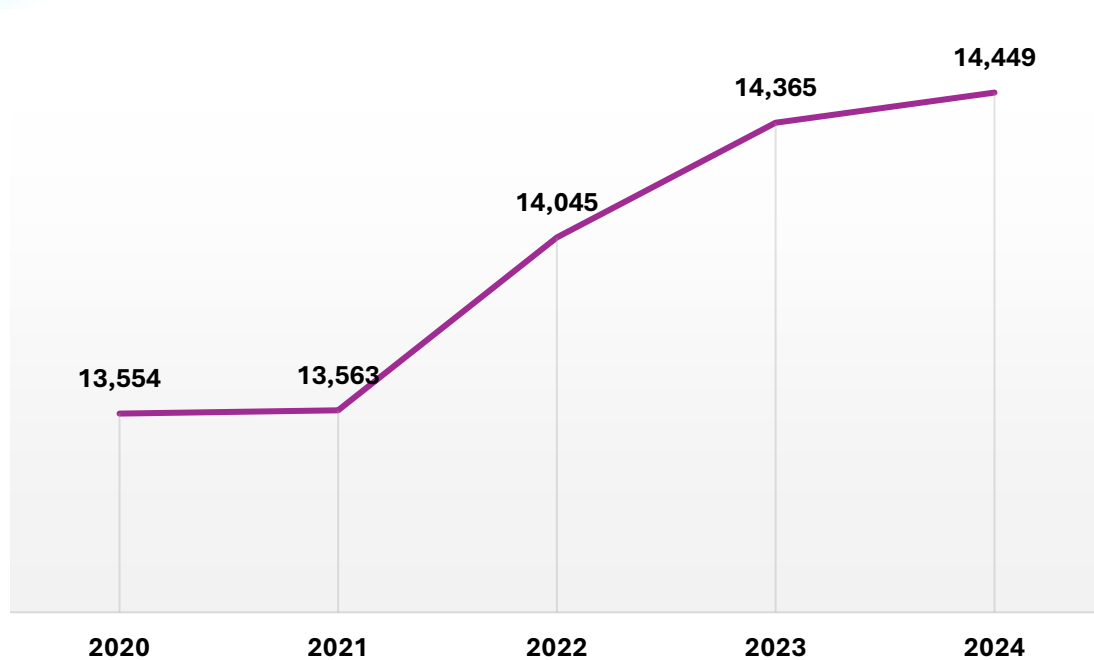
Gambar 2. 25 PDRB Per Kapita Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Secara umum, tren PDRB Per Kapita Kabupaten Belitung mengalami tren positif dari tahun 2020. Dari sebesar Rp. 50.847.912,- pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan hingga berada di angka Rp. 73.933.000 di tahun 2024. Semakin tinggi capaian PDRB Per Kapita daerah, maka semakin besar pula besaran rata-rata pendapatan masyarakat di daerah itu sendiri. Peningkatan capaian di Kabupaten Belitung menandakan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat juga semakin meningkat. Pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung menunjukkan tren yang positif dengan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung yang ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap menunjukkan tren positif pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, karena sektor tersebut merupakan pekerjaan mayoritas yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Belitung dan memiliki permintaan yang cenderung stabil.

2.1.2.1.4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita memberikan gambaran tentang seberapa besar rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu populasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran ini mencakup semua kebutuhan hidup seperti makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Kondisi pengeluaran per kapita di daerah, dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, indikator ini juga bisa digunakan untuk menghitung garis kemiskinan serta profil sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut.



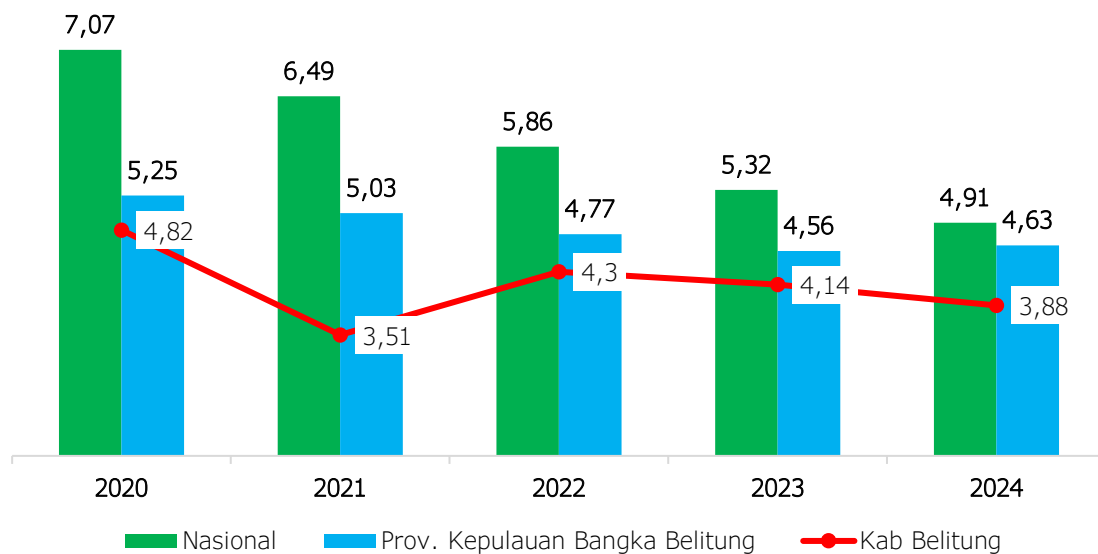
**Gambar 2. 26 Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun)
Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Sesuai dengan grafik diatas, dapat diketahui bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung mengalami kenaikan signifikan hingga berada di angka Rp. 14.449 per tahunnya. Kondisi kenaikan ini mengartikan bahwa rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap masyarakat di Kabupaten Belitung mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat Kabupaten Belitung mampu membeli lebih banyak barang dan jasa, yang bisa mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan. Selain itu, juga mengindikasikan adanya pergeseran konsumsi dari kebutuhan dasar ke kebutuhan sekunder dan tersier yang dipenuhi oleh masyarakat di Kabupaten Belitung. Namun kondisi ini juga perlu diperhatikan lebih lanjut, karena kenaikan pengeluaran per kapita ini juga bisa mengartikan adanya kenaikan harga barang (inflasi) dan jasa, meskipun jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat dalam jumlah yang tetap.

2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

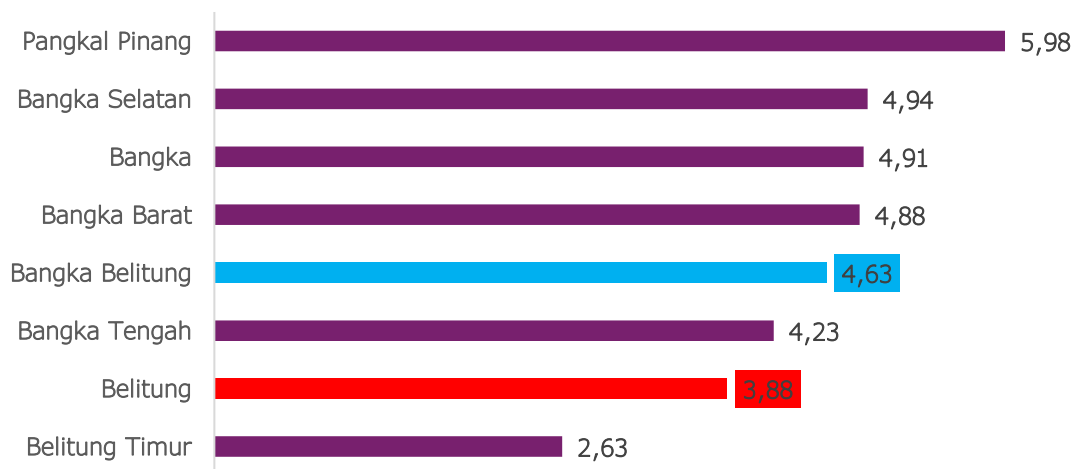
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. TPT umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja. Kondisi TPT di Kabupaten Belitung cenderung menurun seperti dinyatakan dalam gambar berikut:



Gambar 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, cenderung menurun di 2 (dua) tahun terakhir. Dari sebesar 4,82% di tahun 2020, mengalami kontraksi di tahun 2021 menjadi 3,51% pasca pandemi covid-19. Kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,3%, turun menjadi 4,14% dan di tahun 2024 mencapai 3,88%. Capaian TPT Kabupaten Belitung ini cenderung berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Nasional. Capaian menurun ini menunjukkan kondisi yang positif, bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Belitung semakin berkurang. Capaian TPT Kabupaten Belitung sebesar 3,88 ini menempati urutan ke-2 terendah untuk 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



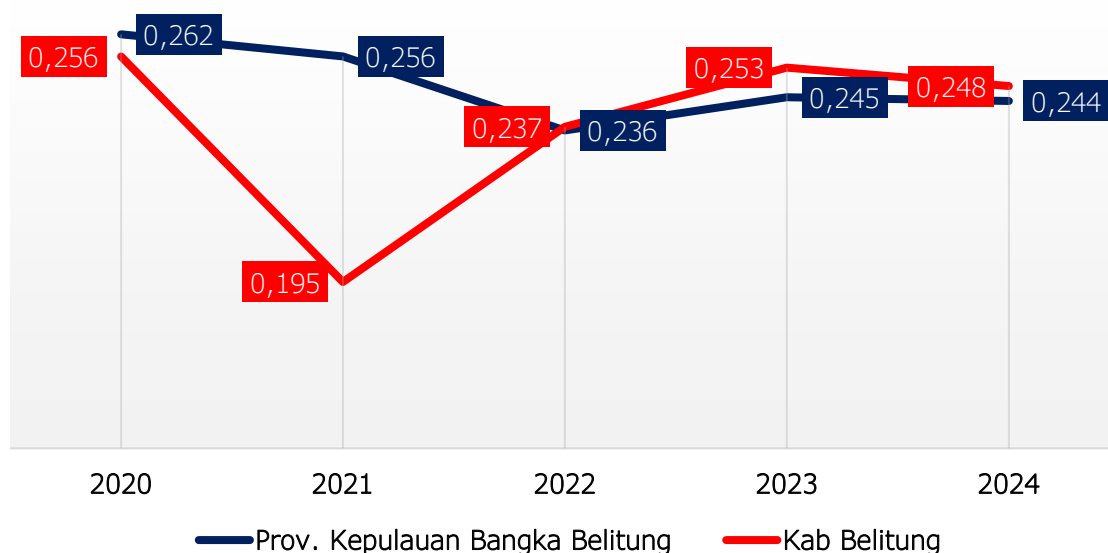
Gambar 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Capaian TPT yang menurun, menandakan bahwa lebih banyak angkatan kerja yang sudah memperoleh pekerjaan. Menurunnya angka indikator ini juga didukung oleh bertambahnya lapangan dan kesempatan kerja bagi para lulusan ataupun angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Selain itu, menurunnya angka TPT Kabupaten Belitung ini juga didukung dengan bertambahnya jumlah pemuda wirausaha yang tentunya dapat menambah lapangan kerja dan juga memberdayakan dirinya sendiri untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian juga didukung dengan kenaikan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Belitung yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran.

2.1.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan relatif antar penduduk yang berada di suatu wilayah. Indeks Gini juga disebut sebagai Koefisien Gini. Indeks gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk. Indeks gini memiliki nilai antara 0 sampai dengan nilai 1. Nilai indeks gini yang mendekati angka 1, dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Sedangkan jika capain indeks gini di daerah tersebut mendekati 0, menunjukkan tingginya tingkat pemerataan pendapatan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga ketimpangan berkurang dan penduduk memiliki pendapatan yang hampir sama atau merata. Berikut kondisi capaian indeks gini di Kabupaten Belitung:



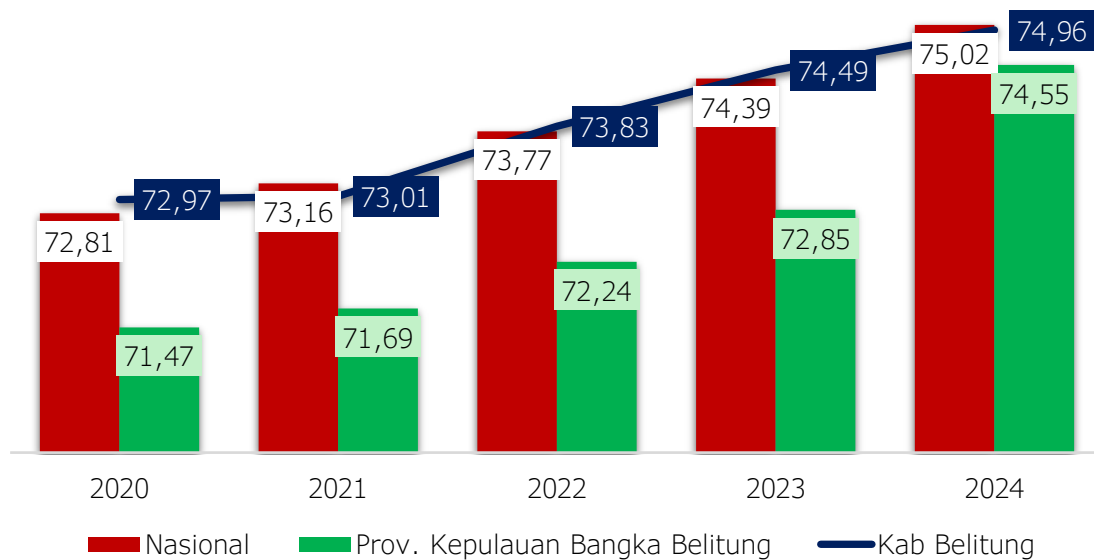
Gambar 2. 29 Indeks Gini di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Berdasarkan data Indeks Gini Kabupaten Belitung untuk tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren fluktuasi ketimpangan pendapatan selama lima tahun berturut-turut. Indeks Gini Kabupaten Belitung pada tahun 2020 berada di angka 0,256 dan mengalami kontraksi di tahun 2021 menjadi 0,195. Kondisi kontraksi ini disebabkan karena tahun 2021 merupakan pasca pandemi covid-19 yang mempengaruhi segala aspek perekonomian di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Kabupaten Belitung. Lalu di tahun 2022 mengalami lonjakan kembali namun dengan capaian dibawah tahun 2020 yaitu di angka 0,237, kemudian di tahun 2023 terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat Kabupaten Belitung dengan angka 0,253. Kemudian di tahun 2024 kesenjangan tersebut mengalami penurunan kembali menjadi 0,248 yang berarti adanya perbaikan tingkat kesenjangan pendapatan tersebut. Capaian ketimpangan pendapatan di Kabupaten Belitung ini terlihat berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2020 hingga 2021. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Belitung berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang mengartikan tingkat kesenjangan pendapatan di Kabupaten Belitung masih berada diatas kesenjangan pendapatan rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berikut capaian IPM di Kabupaten Belitung:



Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

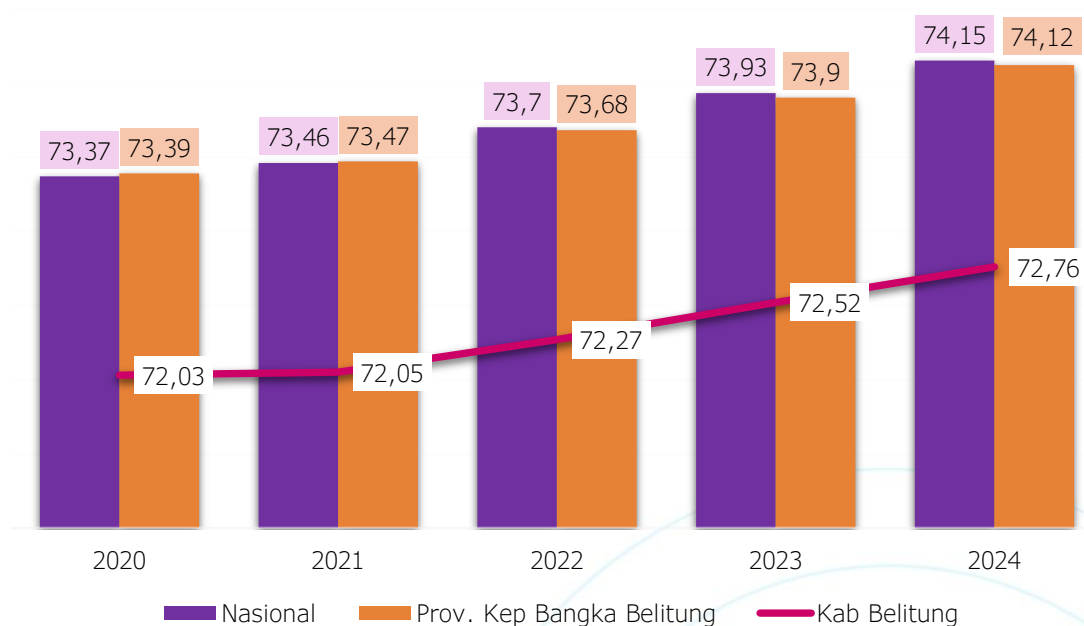
Sesuai dengan grafik diatas, terlihat bahwa capaian IPM Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mencapai 74,96 dan mengalami peningkatan signifikan tiap tahunnya. Capaian di tahun 2024 tersebut tumbuh 0,47% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan IPM tahun 2024 ini terjadi pada semua dimensi yang ada di capaian Kabupaten Belitung. Capaian 74,96 ini membuat IPM Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pembangunan manusia “tinggi”. Klasifikasi ini sesuai dengan kriteria IPM, bahwa nilai ≥ 80 termasuk kategori sangat tinggi, nilai $70 \leq \text{IPM} < 80$ termasuk kategori tinggi, nilai $60 \leq \text{IPM} < 70$ masuk kategori sedang, dan untuk nilai $\text{IPM} < 60$ masuk dalam kategori rendah. Grafik tersebut juga menggambarkan bahwa capaian IPM Kabupaten Belitung di tahun 2024 telah berada diatas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (74,55), namun masih berada dibawah capaian Nasional (75,02).

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua dimaksudkan untuk melihat keadaan kesehatan yang mencakup semua penduduk yang ada di Kabupaten Belitung. Kondisi kesehatan yang dimaksudkan adalah kesehatan pada seluruh siklus hidup baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Untuk melihat kondisi kesehatan untuk semua ini, terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan, diantaranya adalah umur harapan hidup, indeks keluarga sehat, serta prevalensi *stunting* yang terjadi di Kabupaten Belitung. Berikut uraian untuk masing-masing indikatornya:

2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup

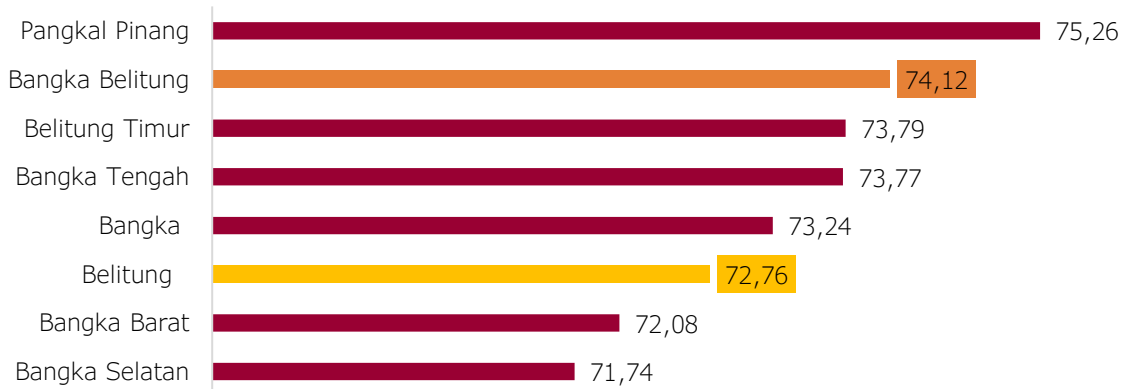
Salah satu indeks komposit penyusun IPM adalah derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah yang salah satunya dapat diukur dengan usia harapan hidup (UHH) dan penurunan balita gizi buruk. Usia harapan hidup diartikan sebagai perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak dia lahir, atau lama hidup seseorang. Semakin tinggi UHH yang dicapai penduduk di suatu wilayah, ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Sehingga capaian UHH yang tinggi merupakan capaian yang positif untuk kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Belitung. Berikut kondisi UHH di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2020 hingga 2024:



Gambar 2. 31 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 72,03 tahun. Capaian ini terus mengalami peningkatan signifikan tiap tahunnya, hingga mencapai di angka 72,76 di tahun 2024. Kondisi peningkatan ini mengartikan semakin membaiknya kualitas kesehatan para penduduk di Kabupaten Belitung seiring berjalannya tahun. Sehingga menambah umur harapan hidup penduduknya semakin tinggi. Capaian sebesar 72,76 di Kabupaten Belitung ini masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (74,12) dan juga Nasional (74,15). Sehingga masih memerlukan upaya peningkatan agar kualitas kesehatan penduduknya semakin membaik, salah satunya dilihat dari peningkatan umur harapan hidup. Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya, capaian UHH Kabupaten Belitung berada di urutan ke-3 terbawah dari 7 kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung.

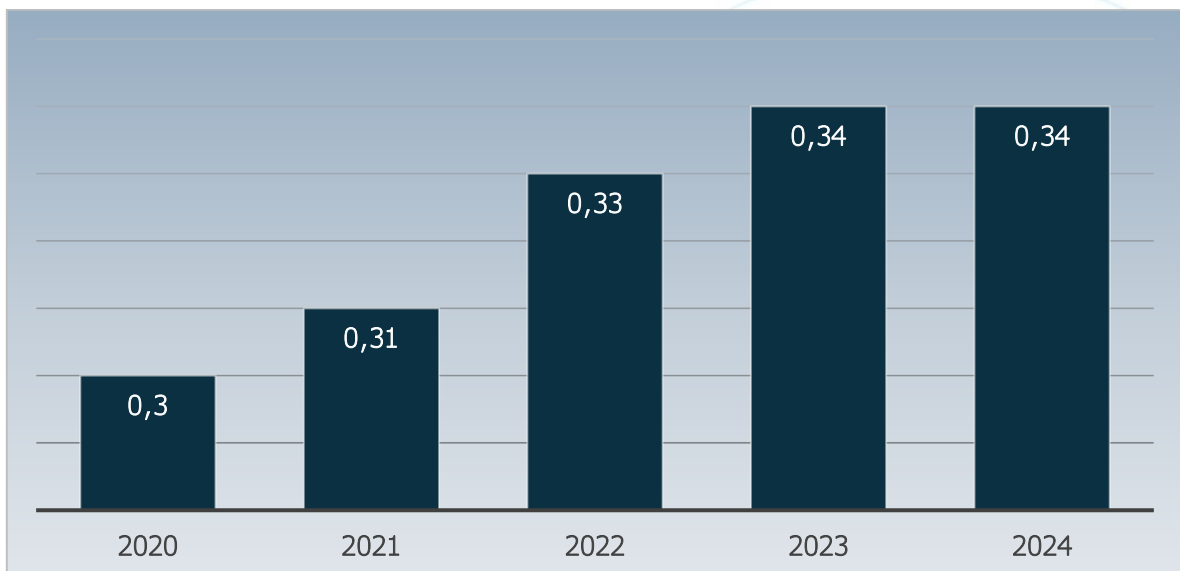


Gambar 2. 32 Usia Harapan Hidup di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

2.1.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat mengukur tingkat kesehatan keluarga di suatu daerah dengan mencakup indikator seperti akses keluarga terhadap layanan kesehatan, kondisi sanitasi dan air bersih, serta status gizi anggota keluarga. Di Kabupaten Belitung, indeks ini penting untuk melihat kondisi kesehatan keluarga, yang dapat memberikan gambaran terkait kesiapan dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anggota-anggotanya. Memantau indeks ini membantu pemerintah dalam menentukan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan keluarga secara keseluruhan. Berikut capaian indeks keluarga sehat di Kabupaten Belitung:



Gambar 2. 33 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

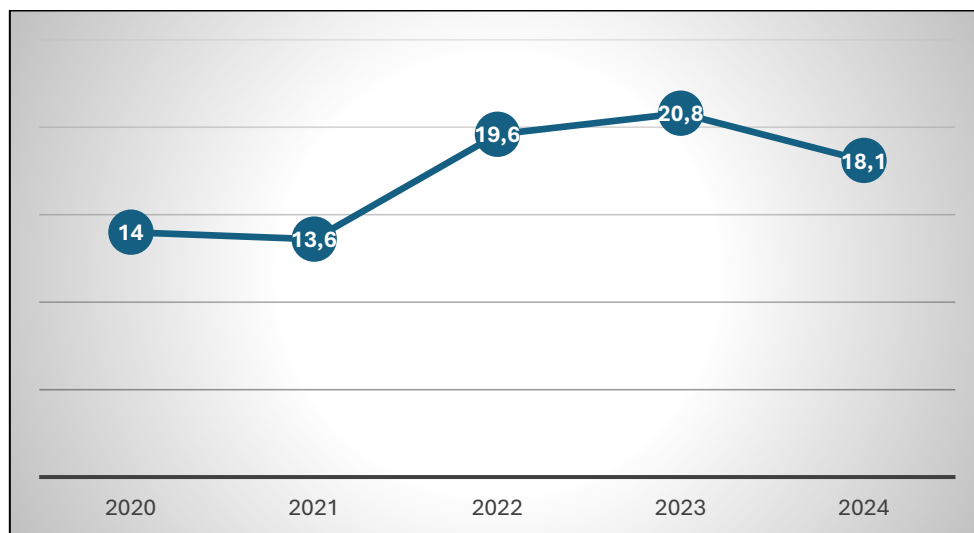
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2025

Grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan signifikan untuk indeks keluarga sehat di Kabupaten Belitung. Meskipun masih stabil berada di kisaran angka 0,3, namun terlihat adanya peningkatan. Dari sebesar 0,3 di tahun 2020, terus mengalami peningkatan hingga mencapai di angka 0,34 pada tahun 2024.

Kondisi peningkatan ini menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesehatan keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Belitung. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) berarti terdapat usaha atau program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan persentase keluarga yang memenuhi kriteria sebagai keluarga sehat. Keluarga dapat dikategorikan sehat jika memenuhi beberapa kriteria seperti perilaku hidup sehat, akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, dan juga kondisi lingkungan sekitar yang sehat. Peningkatan indeks keluarga sehat di Kabupaten Belitung ini mengartikan bahwa semakin banyaknya keluarga yang mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, semakin banyak keluarga yang menerapkan pola hidup sehat, serta semakin banyaknya keluarga yang tinggal di lingkungan bersih dan sehat. Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat dan berdampak pada kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat.

2.1.2.2.3. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah 5 tahun) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau stimulasi yang tidak memadai dalam 1.000 hari pertama kehidupan (periode dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun). Anak yang mengalami *stunting* memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar usianya. Semakin tinggi angka prevalensi *stunting* ini, mengartikan kondisi pencapaian yang negatif bagi pemerintah.



Gambar 2. 34 Prevalensi Stunting di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2025

Grafik diatas menunjukkan semakin meningkatnya prevalensi *stunting* di Kabupaten Belitung. Meningkatnya prevalensi *stunting* ini berarti semakin bertambahnya persentase anak yang mengalami stunting dalam suatu populasi. Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan tahun 2020 sebesar 13,8% dan di tahun 2021 turun menjadi 13,6%, melonjak secara drastis pada tahun 2022 sebesar 19,6% dan kembali mengalami lonjakan pada 2023 menjadi 20,8%. Peningkatan

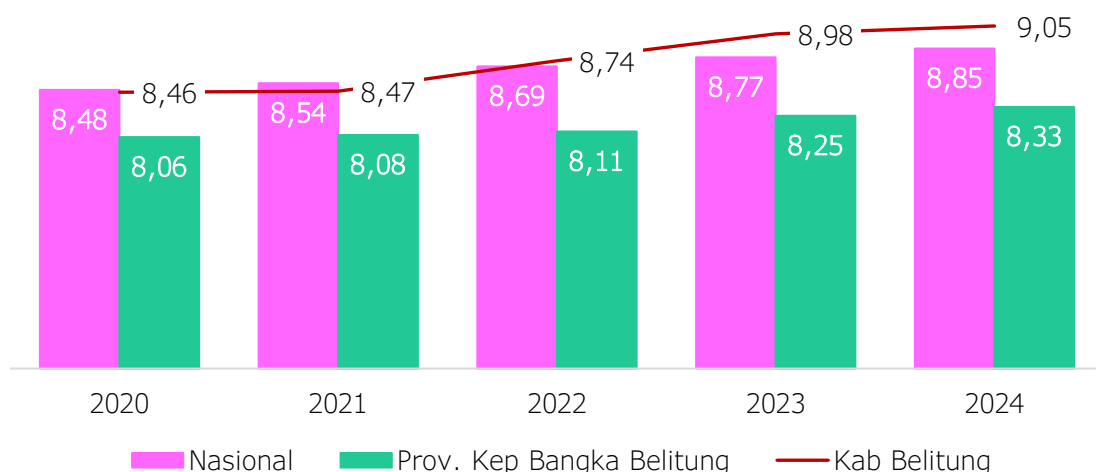
prevalensi *stunting* ini dapat terjadi karena asupan makanan ibu hamil atau anak yang tidak mencukupi kebutuhan gizi, kurang adanya pemantauan kesehatan ibu selama kehamilan, kurangnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak, kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan sekitar yang buruk, serta faktor ekonomi maupun pendidikan yang berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara kualitas maupun kuantitas. Karena jika tidak ada upaya pencegahan dan penurunan pada indikator ini, dapat memberikan dampak buruk pada pertumbuhan fisik anak, sistem imun yang melemah, gangguan perkembangan otak anak, produktivitas rendah di masa dewasa, serta rentan terkena penyakit dan berisiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular seperti diabetes ataupun penyakit jantung.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kondisi pendidikan yang berkualitas dan juga merata, memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan berkualitas yang merata ini, diantaranya adalah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi/numerasi, indeks pembangunan literasi masyarakat, serta indeks literasi digital. Berikut kondisi pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten Belitung:

2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

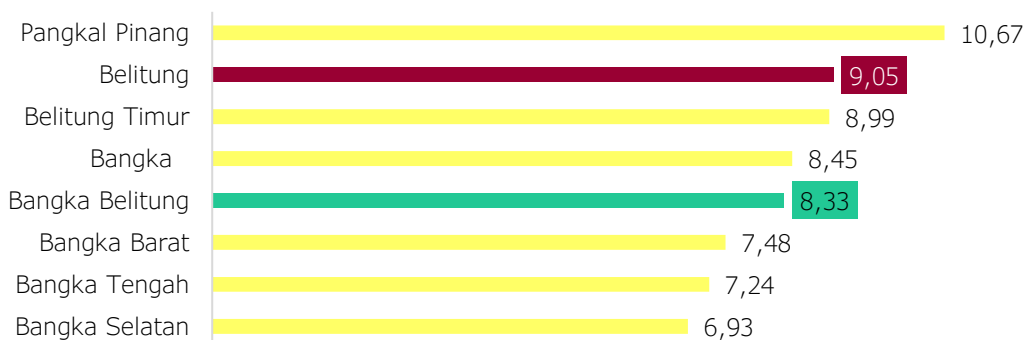
Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan sejauh mana masyarakat mendapatkan akses dan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat dan merupakan salah satu aspek penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses pendidikan, kebijakan pemerintah, peran orangtua dan juga masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Capaian RLS di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024 seperti berikut:



Gambar 2. 35 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam lima tahun terakhir, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Belitung umur 25 tahun ke atas yang telah menempuh lamanya (tahun) masa sekolah mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, RLS di Kabupaten Belitung mencapai angka 8,46 tahun, meningkat menjadi 8,47 tahun pada tahun 2021, dan 8,74 tahun di 2022. Pada tahun 2023, RLS Kabupaten Belitung kembali meningkat di angka 8,98 tahun dan di tahun 2024 menyentuh angka 9 tahun, tepatnya 9,05 tahun. Capaian RLS Kabupaten Belitung di tahun 2024 ini (9,05) berhasil lebih unggul dari capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (8,33 tahun) dan bahkan capaian Nasional (8,85 tahun). Peningkatan RLS ini mencerminkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah yang lebih baik, kualitas guru yang meningkat, dan peningkatan kurikulum. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Belitung yang berada di angka 9,05 ini menempati urutan ke-2 RLS tertinggi dibandingkan 7 kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

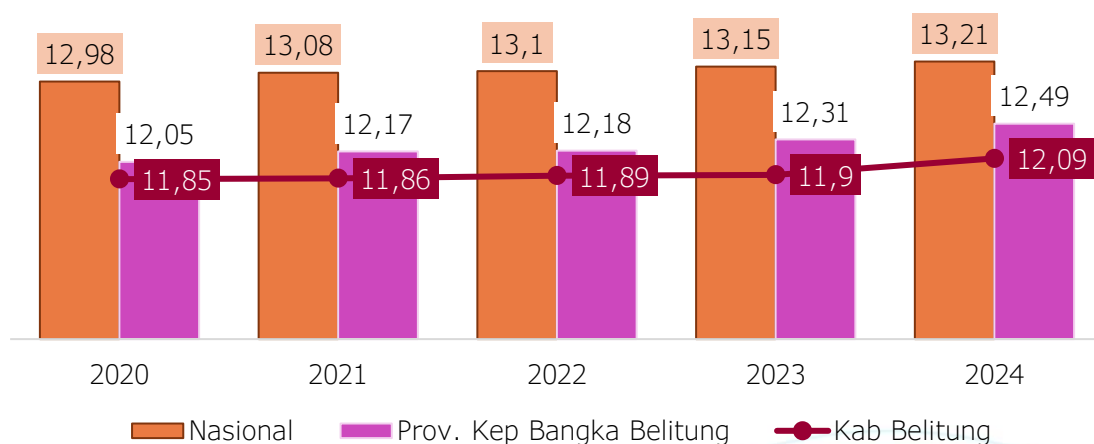


Gambar 2. 36 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

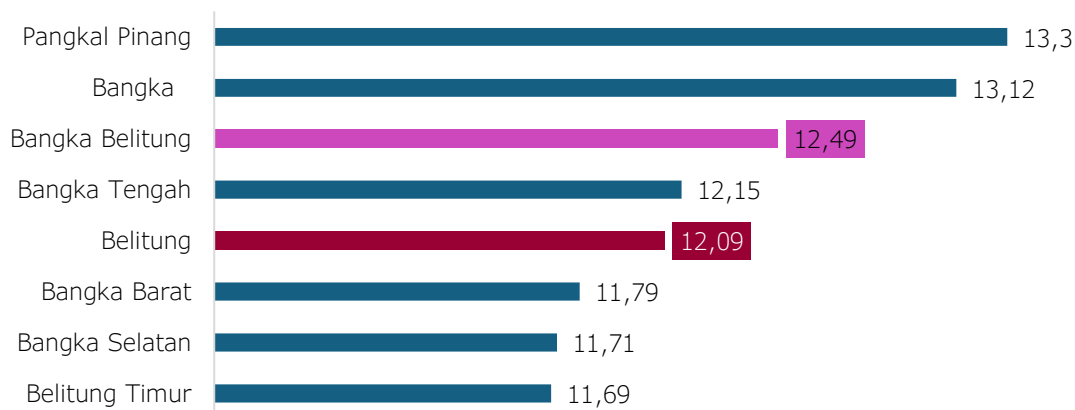
Harapan lama sekolah (HLS) mencerminkan potensi pendidikan yang dapat dicapai oleh generasi muda para masyarakat di masa depan. Peningkatan harapan lama sekolah mengartikan adanya peningkatan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak dalam mengikuti pendidikan formal, berdasarkan sistem pendidikan yang tersedia dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Peningkatan harapan lama sekolah tidak hanya mencerminkan potensi pendidikan yang lebih baik di masa depan, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan manusia secara keseluruhan di Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 37 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Terlihat secara perlahan namun pasti, angka HLS Kabupaten Belitung mengalami kenaikan signifikan. Berawal dari angka 11,85 di tahun 2020, terus meningkat hingga di angka 12,09 di tahun 2024. Masyarakat Kabupaten Belitung terutama anak-anak dan pelajar memiliki harapan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan, yaitu 12 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan SMA/ Sederajat. Meskipun mengalami peningkatan, capaian HLS 12,09 tahun di Kabupaten Belitung ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (12,49) dan bahkan Nasional yang berada di angka 13,21 tahun. Meningkatnya capaian HLS ini dapat memberikan peluang besar bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Selain itu, peningkatan capaian indikator ini juga bisa mengurangi angka putus sekolah dan pernikahan dini yang seringkali menjadi isu di pemerintah daerah. Peningkatan HLS ini juga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta membantu memperbaiki tingkat produktivitas di masyarakat. Capaian HLS sebesar 12,09 tahun di Kabupaten Belitung ini, berada di posisi ke-4 tertinggi dari 7 kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

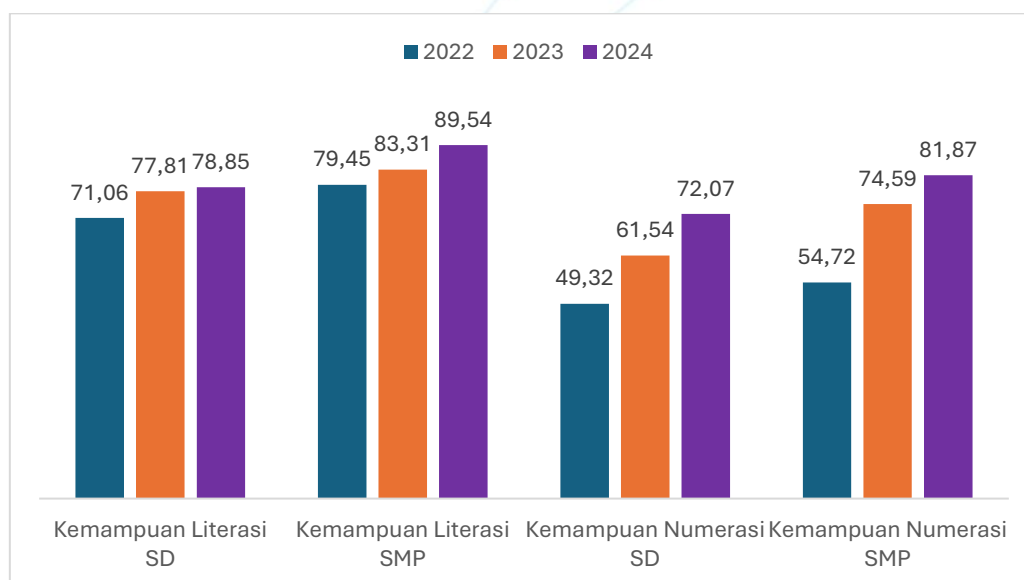


Gambar 2. 38 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

2.1.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan angka numerasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar individu dalam membaca dan menulis (literasi) serta berhitung atau menggunakan angka (numerasi). Keduanya merupakan fondasi penting untuk mendukung kemampuan belajar dan keterampilan hidup. Angka literasi mengacu pada persentase penduduk dalam suatu populasi di atas usia tertentu (misalnya 15 tahun ke atas), yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk angka numerasi, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami konsep matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta kemampuan seseorang menggunakan angka dalam konteks sehari-hari, seperti menghitung uang, mengukur panjang, atau membaca grafik dan tabel.



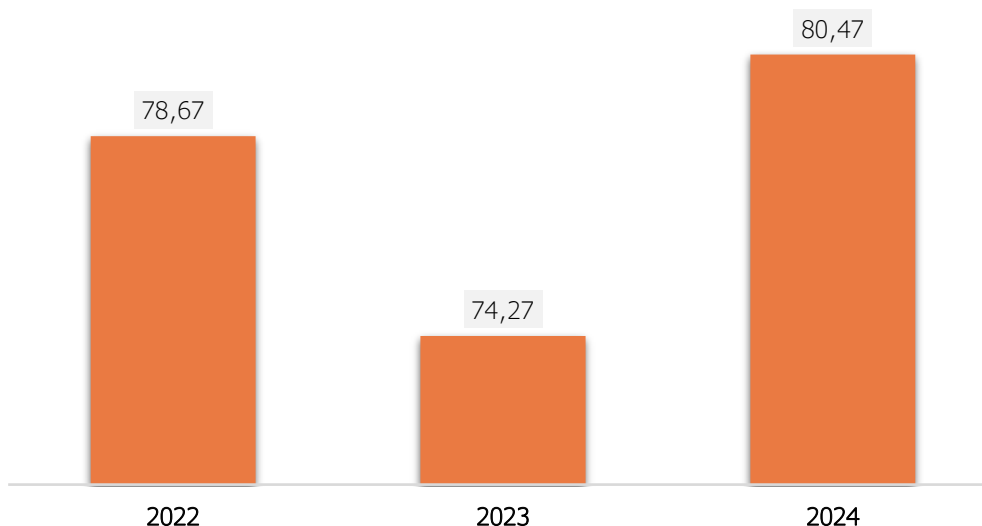
Gambar 2. 39 Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2025

Sesuai data dalam grafik diatas, terlihat bahwa kemampuan literasi dan numerasi penduduk di Kabupaten Belitung pada tingkat SD maupun SMP mengalami peningkatan. Kondisi peningkatan ini menunjukkan semakin bertambahnya masyarakat yang memperoleh akses pendidikan. Selain itu, peningkatan angka ini juga bisa disebabkan semakin meningkatnya kualitas tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan inovatif serta relevan dengan kondisi masyarakat. Peningkatan indikator ini juga bisa disebabkan semakin membaiknya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kemampuan literasi dan numerasi untuk kehidupan sehari-hari. Meningkatnya literasi dan numerasi ini, membantu mempersiapkan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kecakapan literasi yang mencakup aspek dasar hingga literasi tingkat lanjut, seperti literasi digital, literasi media, literasi keuangan, dan sebagainya. Kabupaten Belitung memiliki capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM yang meningkat.



Gambar 2. 40 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Belitung

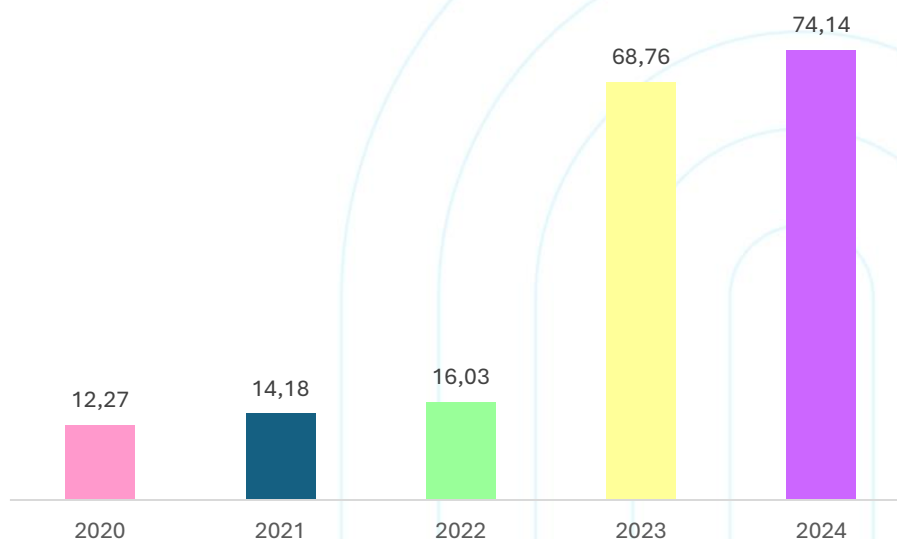
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung dan Perpunas RI, 2025

Capaian IPLM Kabupaten Belitung tahun 2022 berada di angka 78,67, menurun menjadi 74,27 pada tahun 2023 dan di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 80,47 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPLM ini berarti ada perbaikan dalam kemampuan, akses, dan kebiasaan masyarakat dalam membaca, menulis, serta mengakses informasi secara kritis dan produktif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan IPLM pada Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang terjadi kenaikan pada tahun 2023 menjadi 77,5 dari 61,66 pada tahun 2022. Peningkatan IPLM ini membutuhkan kerja sama yang terintegrasi dari berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan produktif. Beberapa upaya yang dapat membantu peningkatan IPLM ini diantaranya melalui penambahan jumlah perpustakaan, taman baca ataupun akses buku digital. Mengingat kondisi sekarang, masyarakat lebih tertarik penggunaan media digital dibandingkan dengan bahan teks bacaan. Menyediakan buku bacaan dengan beragam topik yang menarik untuk berbagai usia, juga bisa menjadi salah satu upaya untuk peningkatan literasi masyarakat.

2.1.2.3.5. Nilai/Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Untuk melihat kegemaran membaca masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung, maka indikator nilai/tingkat kegemaran membaca masyarakat mulai dihitung sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur atau sebagai parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana minat, kebiasaan, dan aktivitas membaca dimiliki oleh individu maupun kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini biasanya digunakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, atau lembaga riset untuk menggambarkan budaya literasi di suatu wilayah. Melihat angka literasi di Negara Indonesia yang cenderung rendah dibandingkan dengan negara lain. Maka Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Belitung perlu untuk meningkatkan kegemaran membaca yang ada di Masyarakat khususnya untuk Masyarakat yang tidak lagi mengemban Pendidikan karena dapat dinilai tidak memiliki kewajiban membaca buku tidak seperti Masyarakat/anak-anak yang masih memiliki kewajiban dalam Pendidikan mengharuskan mereka untuk membaca buku Pelajaran. Berikut merupakan capaian nilai/Tingkat kegemaran membaca Masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 41 Indikator Nilai/Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung dan Perpunas RI, 2025

Berdasarkan grafik di atas, maka nilai/tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Belitung dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan ini dapat terjadi diakibatkan banyak hal salah satunya adalah kemudahan masyarakat untuk mendapatkan literasi buku baik yang ada di perpustakaan maupun *e-book*. Capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 hingga 2022 hanya memiliki capaian sebesar 12,27%, 14,18%, dan 16,03%. Sedangkan tahun 2023 mencapai 68,76% dan tahun 2024 sebesar 74,14%. Nilai yang semakin positif ini merupakan hal yang sangat baik, karena menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk membaca mengalami peningkatan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ini berkaitan dengan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Indikator yang dapat memberikan gambaran perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Belitung ini adalah Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2.1.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja mengacu pada persentase atau jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar dan menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada pekerja terhadap risiko yang mungkin terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan kerja, penyakit, kehilangan pekerjaan, atau pensiun. Program jaminan sosial tenaga kerja ini mencakup beberapa perlindungan diantaranya: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Cakupan kepesertaan yang semakin besar, menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam melindungi tenaga kerjanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung secara menyeluruh.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju disini memiliki artian sebagai suatu kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Indikator yang dapat menggambarkan capaian kondisi ini di Kabupaten Belitung diantaranya adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.1.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi ketika umat beragama saling menerima, menghormati, tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur

untuk menilai kerukunan umat beragama di Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa konflik yang berbasis agama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 74,97 pada tahun 2022 menjadi 75,92 pada tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tiga dimensi penting, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antarumat beragama. Peningkatan pada dimensi toleransi hingga 76,71 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap yang lebih menerima perbedaan agama tanpa konflik yang signifikan. IKUB Kabupaten Belitung tercatat memiliki nilai 73,09 pada tahun 2022 sebagai gambaran kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Belitung. Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keutuhan sosial, terutama di daerah yang masyarakatnya beragam dengan berbagai agama atau keyakinan. Tingginya indeks ini mencerminkan toleransi, persatuan, dan harmoni yang terjaga di tengah perbedaan.

2.1.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan kebudayaan di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kebudayaan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Meningkatnya IPK di daerah mengartikan bahwa tidak hanya melestarikan warisan budayanya, tetapi juga menjadikan kebudayaan sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, harmoni sosial, dan identitas bangsa yang kuat.

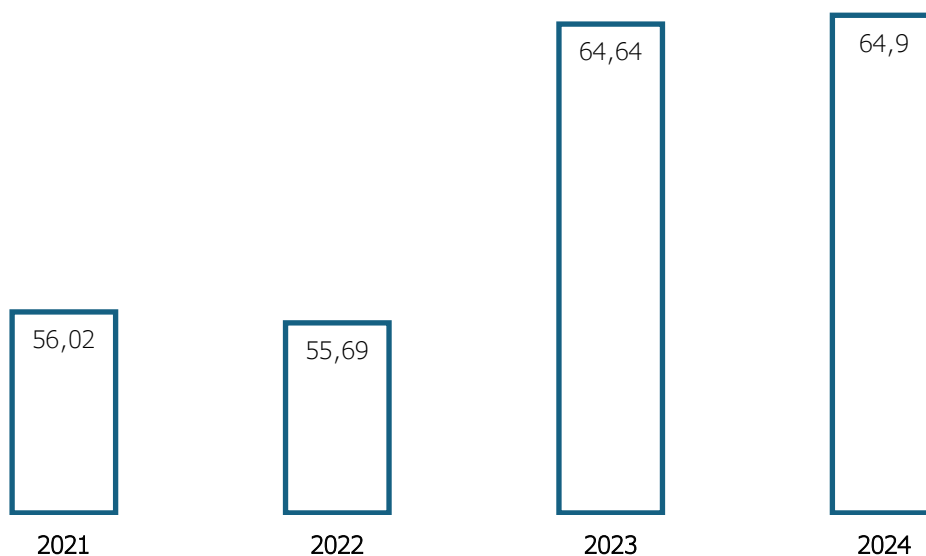
Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Belitung pada tahun 2021 berada pada angka 51,90, yang mengindikasikan kategori pembangunan kebudayaan yang rendah. Nilai ini mencerminkan bahwa potensi budaya lokal belum sepenuhnya dikembangkan dan dipromosikan secara optimal. Pengembangan kebudayaan sangat penting bagi Kabupaten Belitung sebagai bagian dari upaya untuk menjaga identitas budaya daerah dan menjadikannya sebagai daya tarik pariwisata. Hal ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru serta memperkuat warisan budaya yang unik di wilayah tersebut.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif diartikan sebagai kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ini di Kabupaten Belitung adalah Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, dan juga Indeks Pembangunan Pemuda.

2.1.2.6.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga mencerminkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan, yang mencakup aspek-aspek penting seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta kesejahteraan psikologis. Di Kabupaten Belitung, indeks ini digunakan untuk mengevaluasi apakah keluarga-keluarga di wilayah tersebut memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Memahami indeks ini menjadi penting dalam mengidentifikasi area intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang merupakan fondasi dari kualitas hidup masyarakat secara luas.



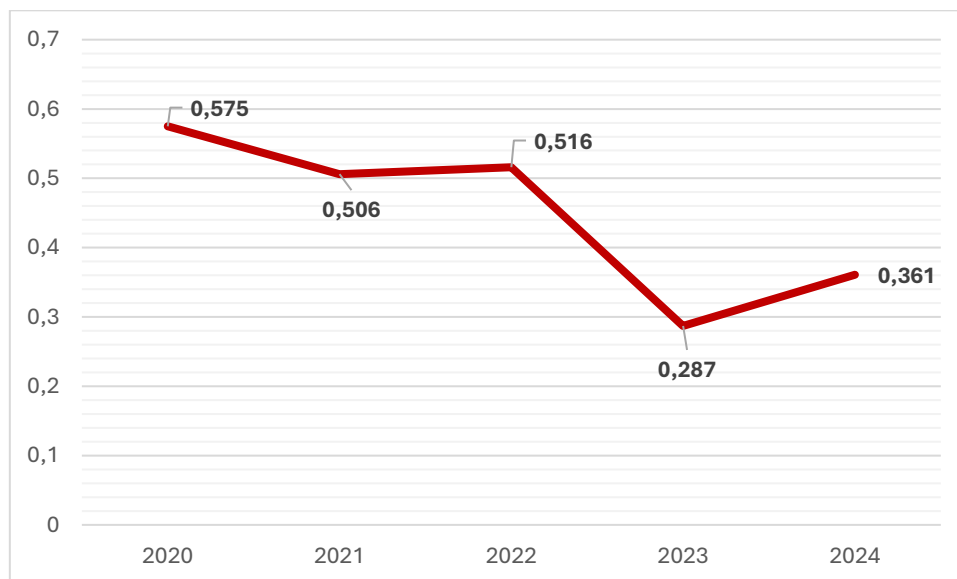
Gambar 2. 42 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Belitung Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2025

Sesuai posisi grafik diatas, menunjukkan bahwa indeks pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Dari capaian 56,02 di tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 55,69 di tahun 2022, melonjak hingga 64,64 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 64,90 di tahun 2024. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang meningkat berarti terdapat perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang mencerminkan kualitas kehidupan keluarga. Indeks ini menunjukkan bahwa keluarga semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan produktif bagi setiap anggotanya. Peningkatan indikator ini juga mengindikasikan kesejahteraan keluarga yang semakin meningkat, kesehatan keluarga juga meningkat, pendidikan yang semakin maju, kondisi perekonomian keluarga yang semakin menguat, serta keluarga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini merupakan fondasi penting untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2.6.2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender atau IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG hanya berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Munculnya IKG ini sebagai bentuk salah satu perwujudan dari kebijakan yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender atau untuk mencapai kesetaraan gender. Berikut capaian indeks ketimpangan gender di Kabupaten Belitung:



Gambar 2. 43 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, 2025

Terlihat dalam grafik bahwa indeks ketimpangan gender di Kabupaten Belitung mengalami penurunan. Dari capaian 0,575 pada tahun 2020, menurun menjadi 0,506 pada tahun 2021, sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,516 di tahun 2022, dan mengalami kontraksi di tahun 2023 menjadi 0,287. Kemudian di tahun 2024 naik 0,084 poin menjadi 0,361. Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*) yang cenderung meningkat ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan partisipasi politik di wilayah pemerintah Kabupaten Belitung.

2.1.2.6.3. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam

kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Kelima domain tersebut adalah domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan, domain lapangan dan kesempatan kerja, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi.

Meskipun tidak ada nilai spesifik untuk Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Belitung, peran pemuda dalam pembangunan masih tergolong minim. Berdasarkan data yang ada, hanya 5,97% pemuda yang terlibat dalam kewirausahaan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi para pemuda dalam sektor ekonomi. Indeks ini penting untuk mendorong akses pemuda terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja yang memadai, guna meningkatkan peran para pemuda dalam pembangunan Kabupaten Belitung.

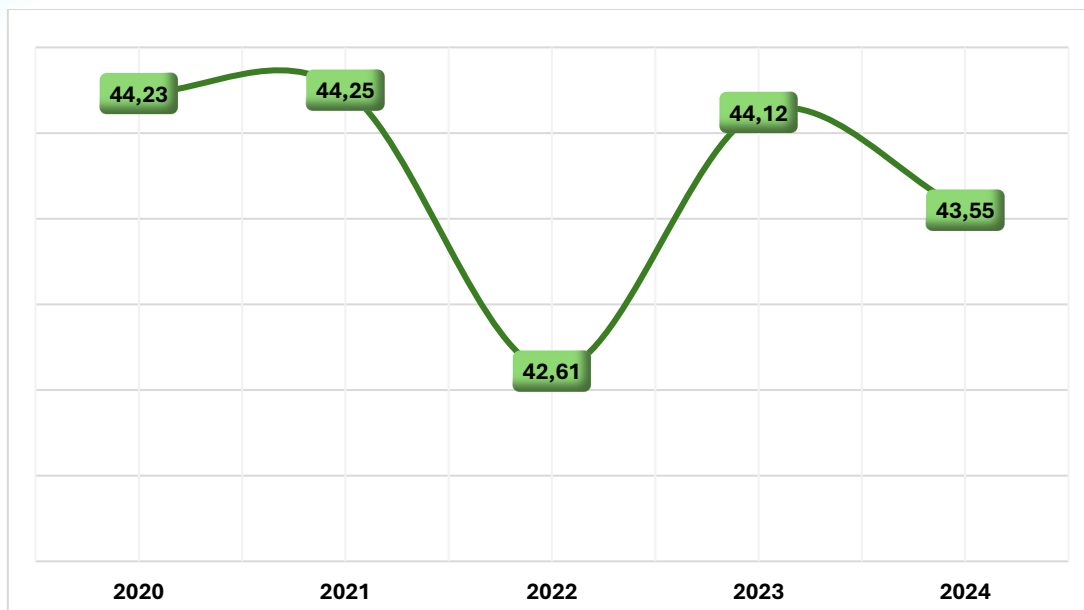
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1. Angka Ketergantungan

Pembangunan sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk mempersiapkan masyarakat yang memiliki kualitas dan kompetensi sehingga memiliki daya saing. Faktor daya saing berperan dalam menentukan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan individu yang kemudian berimplikasi pada bagaimana penduduk usia produktif bisa menanggung penduduk dengan usia tidak produktif dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah sosial baru. Permasalahan tersebut dikenal sebagai isu angka ketergantungan, yaitu kondisi ketika penduduk usia produktif harus menanggung beban penduduk usia tidak produktif. Adapun penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Sementara itu, penduduk yang tidak produktif merupakan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Tingkat angka ketergantungan dapat diukur dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan adalah indikator yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah penduduk yang produktif dengan penduduk yang tidak produktif. Capaian rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif. Lalu, capaian yang rendah menunjukkan bahwa semakin kecil beban yang ditanggung penduduk yang produktif.

Besarnya tanggungan penduduk yang produktif menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk menabung dan investasi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak produktif. Oleh karena itu, rasio ketergantungan juga dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat mengontrol isu angka ketergantungan. Berikut merupakan capaian angka ketergantungan Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 44 Capaian Angka Ketergantungan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

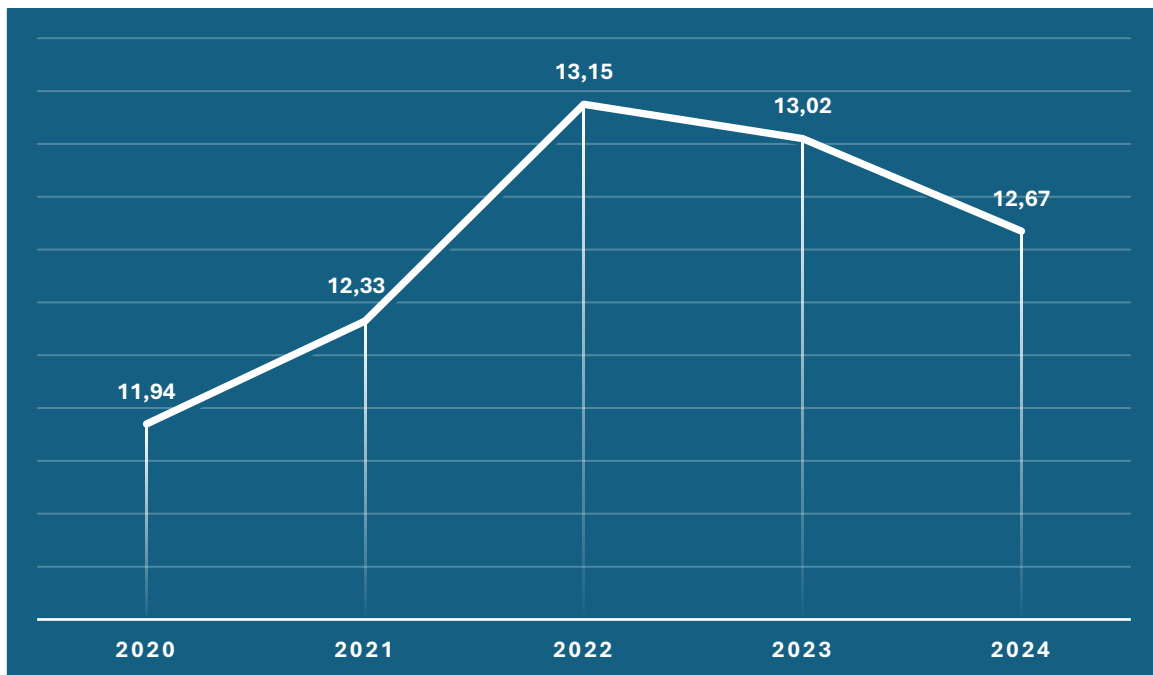
Grafik di atas menyajikan capaian angka ketergantungan di Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara, keseluruhan angka ketergantungan di Kabupaten Belitung mengalami penurunan dengan kondisi yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ketergantungan mencapai 44,23% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 44,25%. Capaian positif terjadi pada tahun 2020 dimana angka ketergantungan menurun sehingga mencapai 42,61%. Namun, satu tahun kemudian, angka ketergantungan kembali meningkat dengan capaian 44,12%. Pada tahun 2024, angka ketergantungan mulai menurun sehingga mencapai 43,55% yang menunjukkan bahwa 100 penduduk produktif menanggung 43 penduduk yang tidak produktif.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk meningkatkan capaian PDRB yang merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri pengolahan menjadi langkah yang tepat karena dapat menjadi penggerak dan pemimpin (*the leading sector*) bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, sektor industri pengolahan juga dapat meningkatkan produksi dan memperluas lapangan kerja. Pada pelaksanaannya, industri pengolahan melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Pada prosesnya, pengolahan tersebut memanfaatkan teknologi, inovasi, spesialisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah. Selain itu, teknologi tersebut juga menghasilkan efisien kerja dan percepatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang relatif maju memiliki industri pengolahan produktif sebagai penopang perekonomiannya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belitung perlu

membangun sektor industri pengolahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan capaian rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 45 Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan

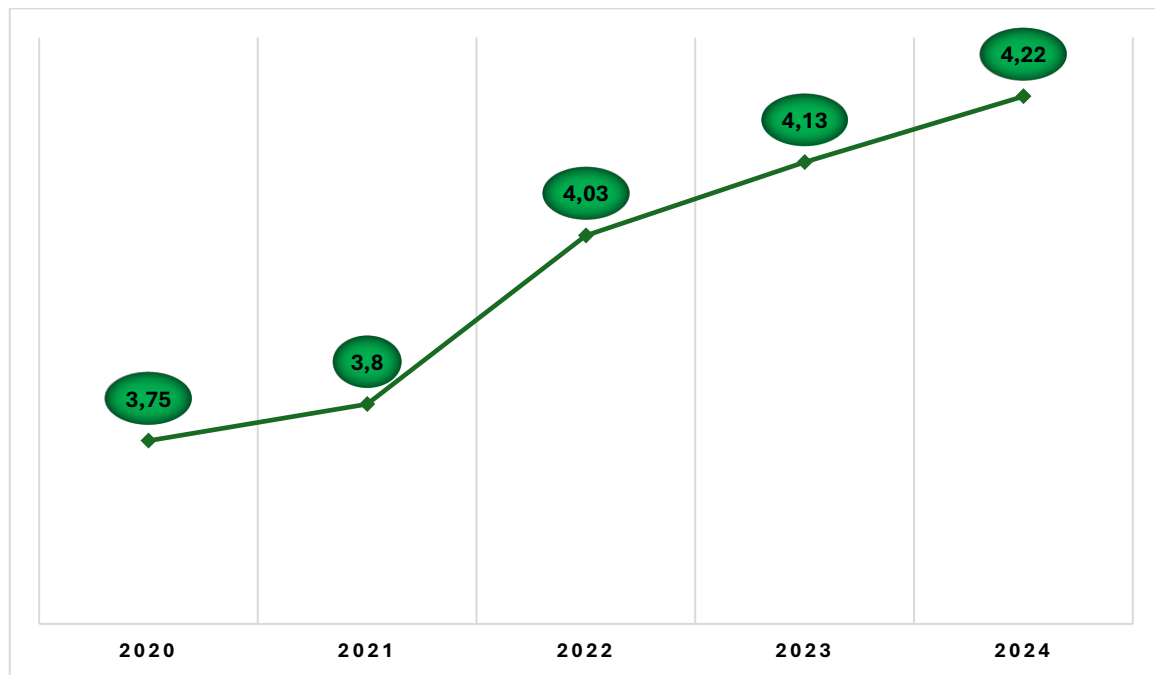
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan rasio PDRB industri pengolahan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Secara keseluruhan, rasio PDRB industri pengolahan meningkat dengan perubahan tren yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 sampai 2022, rasio PDRB industri pengolahan mengalami peningkatan. Namun, dalam dua tahun terakhir, rasio PDRB industri pengolahan mengalami penurunan. Capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 yaitu 13,15%. Sejak itu, penurunan terus terjadi sehingga rasio PDRB industri pengolahan mencapai 12,67% pada tahun 2024.

2.1.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh perolehan nilai tambah bruto sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi pada capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lapangan akomodasi makan dan minum menjadi salah satu sektor perekonomian yang berkontribusi pada capaian PDRB. Sektor akomodasi makan dan minum adalah sektor yang berkaitan dengan bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus bagi setiap orang untuk menginap, makan, dan memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya. Adapun contohnya seperti hunian kamar hotel yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menginap. Ketersediaan kamar hotel akan meningkatkan jumlah wisatawan. Oleh karena itu, sektor tersebut berperan penting dalam mengembangkan pariwisata. Pengeluaran wisatawan pada hotel, rumah makan, dan fasilitas lainnya menjadi sumber penerimaan sektor akomodasi makan dan minum yang dimana perolehan tersebut berimplikasi pada capaian PDRB. Berikut

merupakan capaian rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 46 Capaian Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

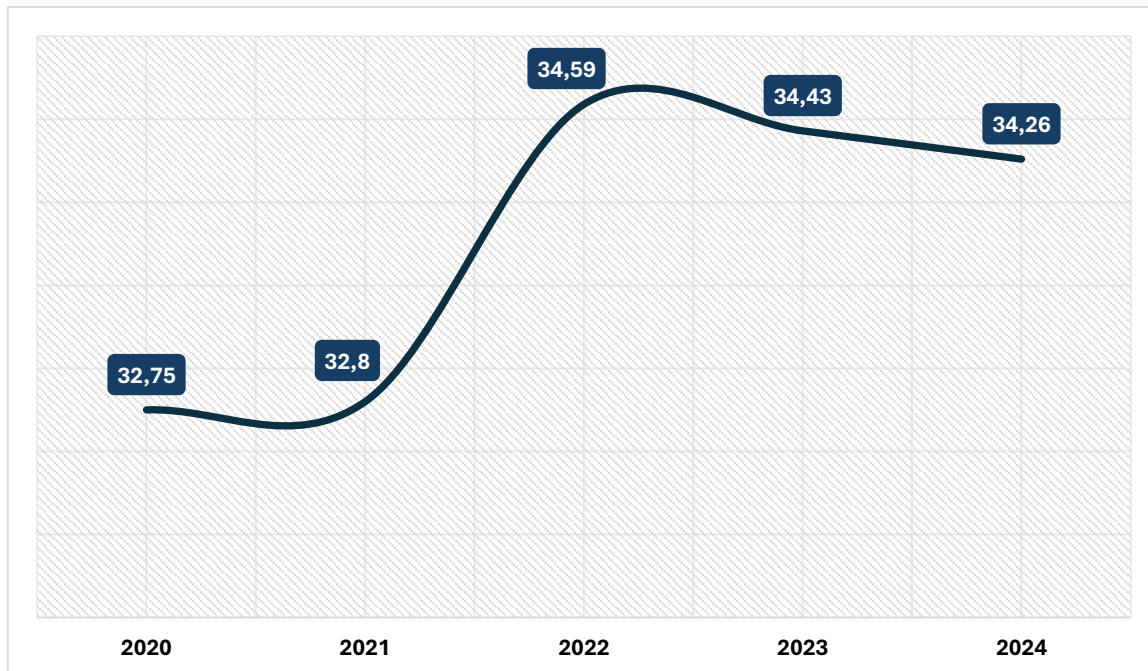
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di menunjukkan peningkatan konsisten rasio PDRB akomodasi makan dan minum di Kabupaten Belitung dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan yang terjadi dalam lima tahun terakhir di bawah 1%. Pada tahun 2020, rasio PDRB akomodasi makan dan minum adalah 3,75%. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 4,22% pada tahun 2024.

2.1.3.2.3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas sehingga ia mengandalkan *stock of knowledge* dan ide dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Produk yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi kreatif umumnya bersifat unik, solusi dari suatu masalah, dan inovatif sehingga memiliki nilai tambah. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan ide dan kreativitas yang notabenenya adalah sumber daya yang tidak bisa habis. Pada implementasinya, industri ekonomi kreatif terdiri dari 16 subsektor, seperti aplikasi dan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; *fashion*; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; serta televisi dan radio. Produktivitas yang dihasilkan oleh berbagai subsektor tersebut berkontribusi pada capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung harus mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merupakan data olahan dari data 7 (tujuh) sektor lapangan usaha PDRB, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor

penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa lainnya. Berikut merupakan capaian proporsi PDRB ekonomi kreatif Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 47 Capaian Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, proporsi PDRB ekonomi kreatif mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Terdapat perubahan tren dari tiga tahun pertama dengan dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi PDRB ekonomi kreatif adalah 32,75% yang kemudian mengalami peningkatan sehingga mencapai 34,59% pada tahun 2022. Capaian tersebut menjadi perolehan tertinggi. Namun, sejak itu, proporsi PDRB ekonomi kreatif mengalami penurunan dalam dua tahun berturut-turut yang dimana pada tahun 2023 memperoleh 34,43% dan tahun 2024 memperoleh 34,26%.

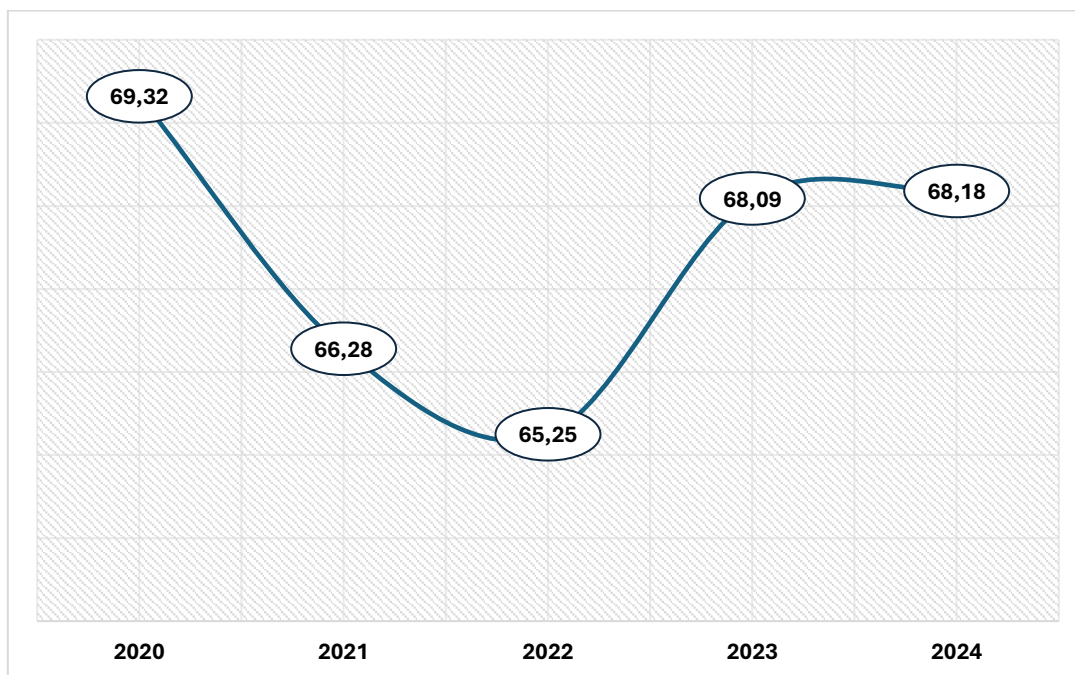
2.1.3.2.4. Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan mesin perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang dihasilkan sektor kewirausahaan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam spektrum yang lebih luas, kewirausahaan dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Pengembangan sektor kewirausahaan menghasilkan sumber daya manusia atau wirausahawan yang kreatif, inventif, percaya diri, tekun, berani mengambil risiko, dan mampu memanfaatkan peluang untuk menghasilkan perusahaan yang unggul. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah wirausahawan di suatu daerah maka semakin tinggi jumlah wirausahawan yang menghasilkan pertukaran barang dan jasa yang dimana kondisi tersebut menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu

mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki jiwa wirausaha sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah. Capaian rasio kewirausahaan Kabupaten Belitung pada tahun 2023 hanya 1,25%. Rendahnya capaian tersebut menandakan perlunya perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelatihan kewirausahaan, dukungan permodalan, dan akses pasar yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal. Selain itu, kewirausahaan juga dapat dikembangkan dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, kuliner dan pariwisata berbasis budaya.

2.1.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Capaian TPAK merepresentasikan sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi daerahnya. Perolehan TPAK yang tinggi menunjukkan lebih banyak penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Lalu, perolehan TPAK yang rendah menunjukkan kesulitan penduduk usia produk produktif dalam mengakses lapangan kerja. Pada perkembangannya, perolehan TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Belitung harus memaksimalkan capaian TPAK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan capaian TPAK di Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 48 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

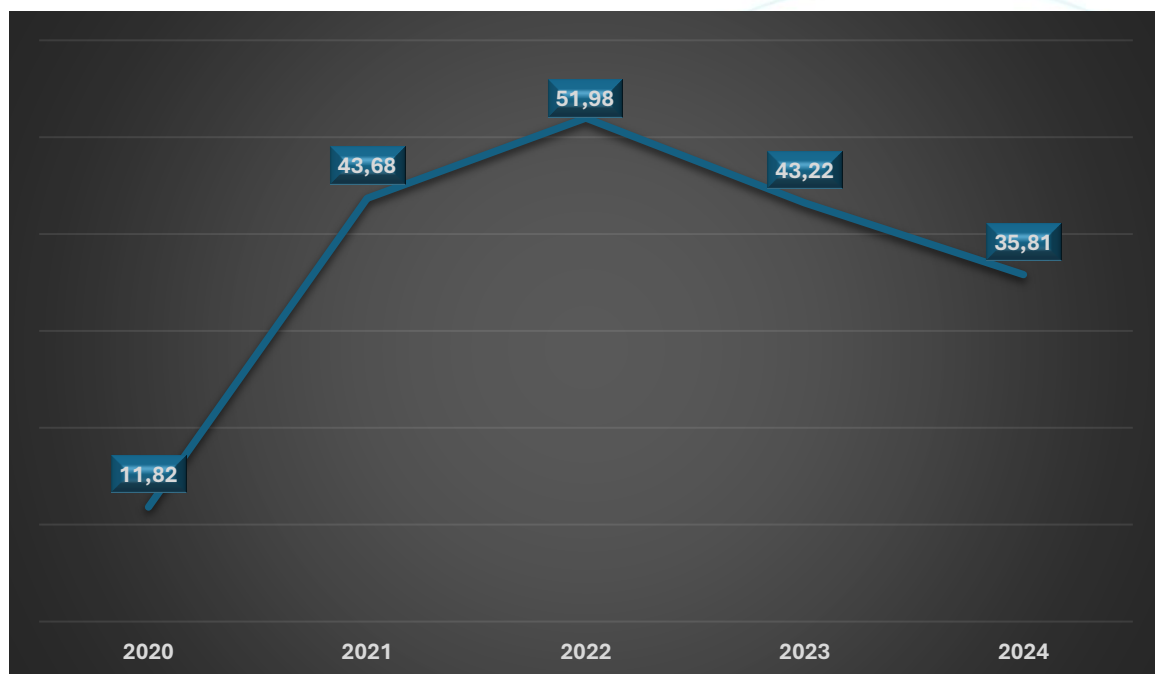
Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menunjukkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Belitung selama lima tahun dari tahun 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, TPAK di Kabupaten Belitung mengalami penurunan dengan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK mencapai 69,32% yang dimana

capaian tersebut merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Satu tahun setelahnya, terjadi penurunan sebanyak 3,04% sehingga mencapai 66,28%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 65,25%. Kemudian, pada 2023, TPAK meningkat sehingga mencapai 68,09%. Namun, TPAK mengalami sedikit peningkatan sehingga mencapai 68,18%.

2.1.3.2.6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian indeks inovasi daerah dijadikan landasan untuk pemberian anugerah atau apresiasi atas usaha inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemberian anugerah tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah agar menghasilkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Penyelenggaraan inovasi memiliki ketergantungan yang besar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama dalam penginputan data yang menjadi salah satu faktor penting penilaian indeks inovasi daerah. Untuk menghasilkan inovasi daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia OPD. Berikut merupakan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 49 Capaian Indeks Inovasi Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menunjukkan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Belitung selama lima tahun. Pada tahun 2020, indeks inovasi daerah adalah

11,82 yang kemudian mengalami peningkatan drastis sebanyak 31,86 sehingga mencapai 43,68 pada tahun 2021. Satu tahun setelahnya, indeks inovasi memperoleh capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 51,98. Namun, dua tahun setelahnya, indeks inovasi daerah mengalami penurunan secara berturut-turut yang masing-masing mencapai 43,22 pada tahun 2023 dan 35,81 pada tahun 2024.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan transformasi ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengukuran tersebut ditujukan untuk mendorong Pemerintah mengimplementasikan ekonomi hijau dalam melaksanakan pembangunan. Adapun ekonomi hijau merupakan konsep yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien sehingga mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi urbanisasi, Pemerintah diharapkan tetap berpegang pada prinsip ekonomi hijau sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dan mengganggu keberlanjutan. Berikut merupakan capaian indeks ekonomi hijau Kabupaten Belitung. Data Indeks Ekonomi Hijau ini belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024.

2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pengimplementasian ekonomi biru suatu pemerintahan. Ekonomi biru merupakan konsep yang mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Dengan demikian, Pemerintah harus bertumpu pada pendekatan ekonomi biru dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan untuk menghindari kerusakan yang mencakup pencemaran air, pemanasan laut, kerusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Pengukuran IBEI menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola kelestarian laut. Data Indeks Ekonomi Biru ini belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024.

2.1.3.3.3. Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer

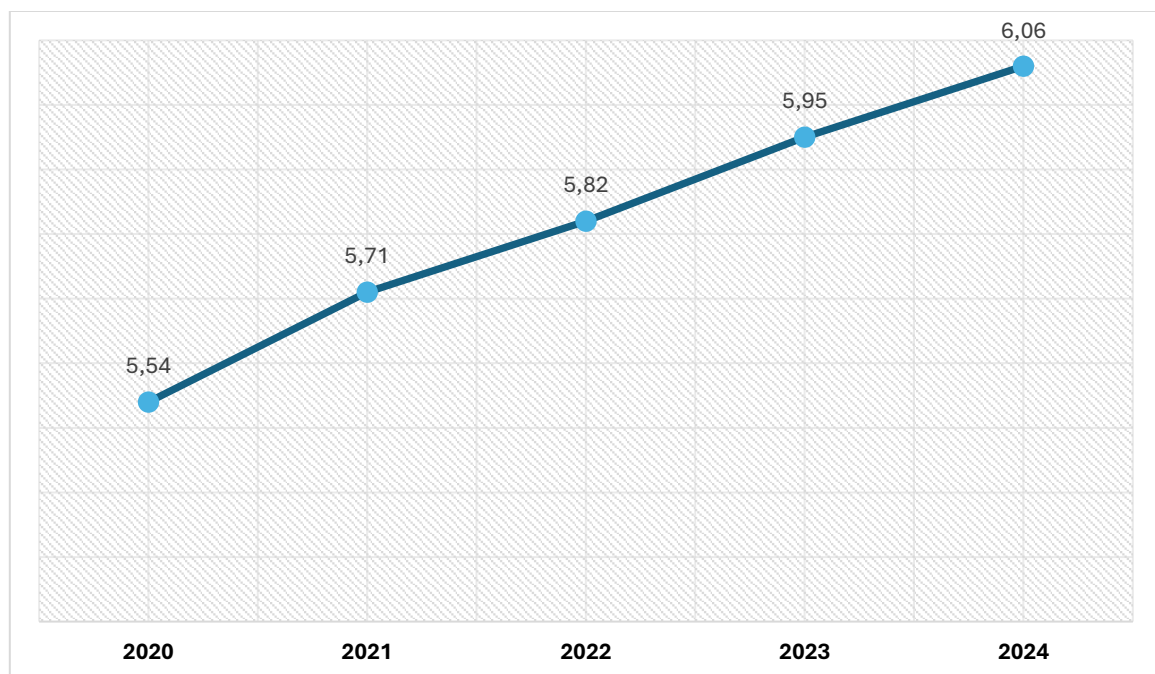
Transformasi energi dari sumber energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan kemandirian energi, menjaga Keberlangsungan Lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengingat Pemerintah Pusat yang berkomitmen untuk mencapai *net-zero emission* dengan beralih ke energi terbarukan maka Pemerintah Daerah harus mendukung tujuan tersebut dengan meningkatkan penggunaan EBT. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu mengembangkan kebijakan yang menekankan penggunaan energi tanpa

batas dan dapat diperbarui secara alami tersebut dengan memanfaatkan energi surya, angin, air, panas bumi, dan lain-lain. Data Porsi EBT dalam bauran energi primer belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024.

2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1. Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah indikator yang mengukur tingkat pembangunan TIK, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan TIK di suatu wilayah. Pengukuran tersebut ditujukan untuk mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan TIK yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, Kesehatan, dan lain-lain. Adapun Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi diukur pada tingkat Provinsi Bangka Belitung. Berikut merupakan capaian IP-TIK Provinsi Bangka Belitung.



Gambar 2. 50 Capaian Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi

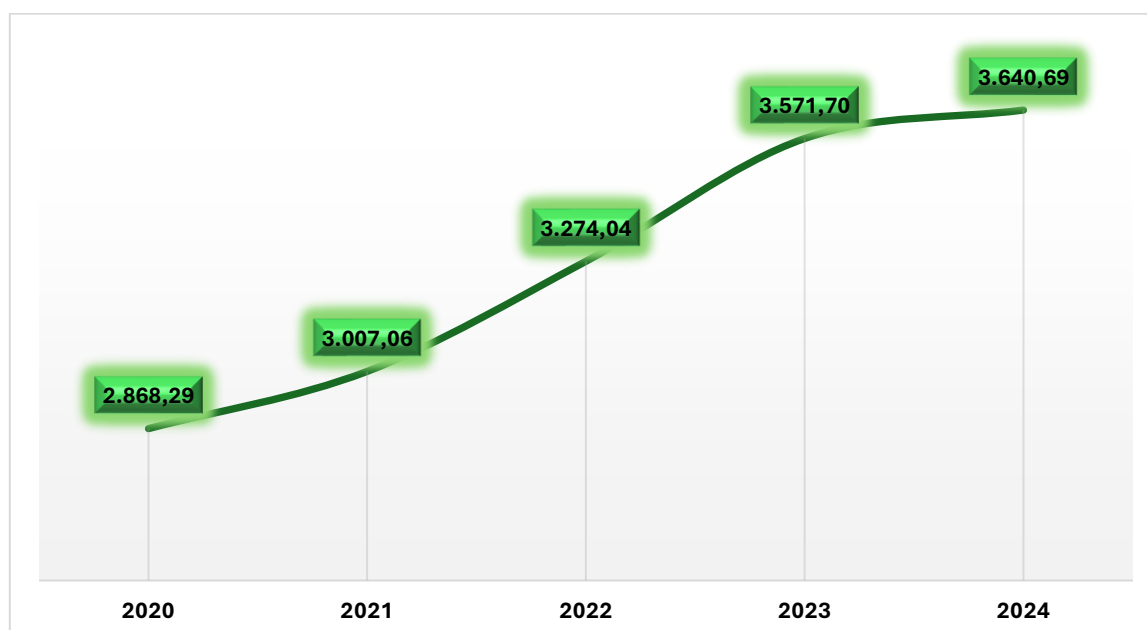
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian IP-TIK Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Secara keseluruhan, IP-TIK mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IP-TIK Provinsi Kabupaten Belitung adalah 5,54. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan secara perlahan sehingga mencapai 6,06 pada tahun 2024. Indikator tersebut secara tidak langsung cukup merepresentasikan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang berada pada wilayah Provinsi Bangka Belitung. Akan tetapi Pengukuran pada Tingkat Kabupaten Belitung belum pernah diukur sehingga tidak memiliki ketersediaan data pada 5 tahun kebelakang. Adapun kinerja terkait dengan penyelenggaraan Teknologi dan Komunikasi di Kabupaten Belitung dapat dinilai dan evaluasi melalui beberapa indikator pada sub bab selanjutnya berkaitan dengan Kinerja setiap urusan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PMTB adalah pengumpulan aset atau peningkatan kekayaan di masa mendatang. Dengan demikian, PMTB merupakan upaya investasi dengan membeli barang modal untuk meningkatkan produksi produk dalam perekonomian. Melalui PMTB, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan nilai produksi yang lebih banyak sehingga meningkatkan pendapatan dan mengembangkan perekonomian. Berikut merupakan capaian PMTB Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 51 Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Dalam Miliar)

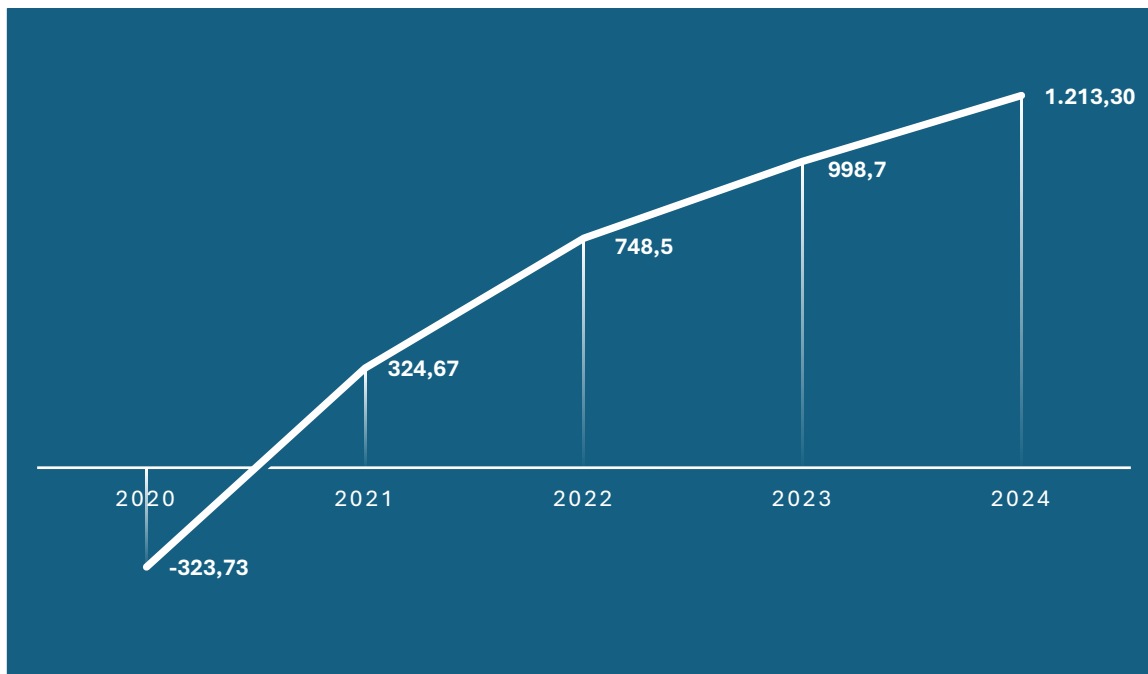
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan perolehan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, PMTB Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PMTB Kabupaten Belitung adalah Rp2.868,29 miliar yang kemudian meningkat sehingga mencapai Rp3.007,06 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai PMTB mencapai Rp3.274,04 miliar. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 3.640,69 pada tahun 2024.

2.1.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor merupakan alat dalam menggerakkan pembangunan ekonomi dengan memperdagangkan hasil produksi potensi unggulan dalam daerah ke pasar yang lebih luas. Perluasan distribusi perdagangan ke pasar yang lebih luas dapat meningkatkan produksi barang dan jasa lokal karena tingginya permintaan. Peningkatan tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu

mengembangkan potensi lokal dengan mengoptimalkan pelayanan pada berbagai sektor, seperti perdagangan, perindustrian, perikanan dan kelautan, serta sektor-sektor lainnya dalam rangka mengembangkan komoditas unggulan yang dapat diekspor ke pasar yang lebih luas. Berikut merupakan capaian ekspor barang dan jasa Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 52 Capaian Ekspor Barang dan Jasa (Dalam Miliar)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian ekspor barang dan jasa Kabupaten Belitung dalam selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, capaian ekspor barang dan jasa Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, capaian ekspor barang dan jasa Kabupaten Belitung adalah -323.73. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan secara konsisten sehingga mencapai 1.213,30.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah upaya atau rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana guna membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Pada pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pengimplementasian pelayanan urusan pemerintahan wajib pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta menciptakan kesejahteraan dengan meningkatkan aksesibilitas untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, Pemerintah dapat membangun kualitas standar kehidupan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu

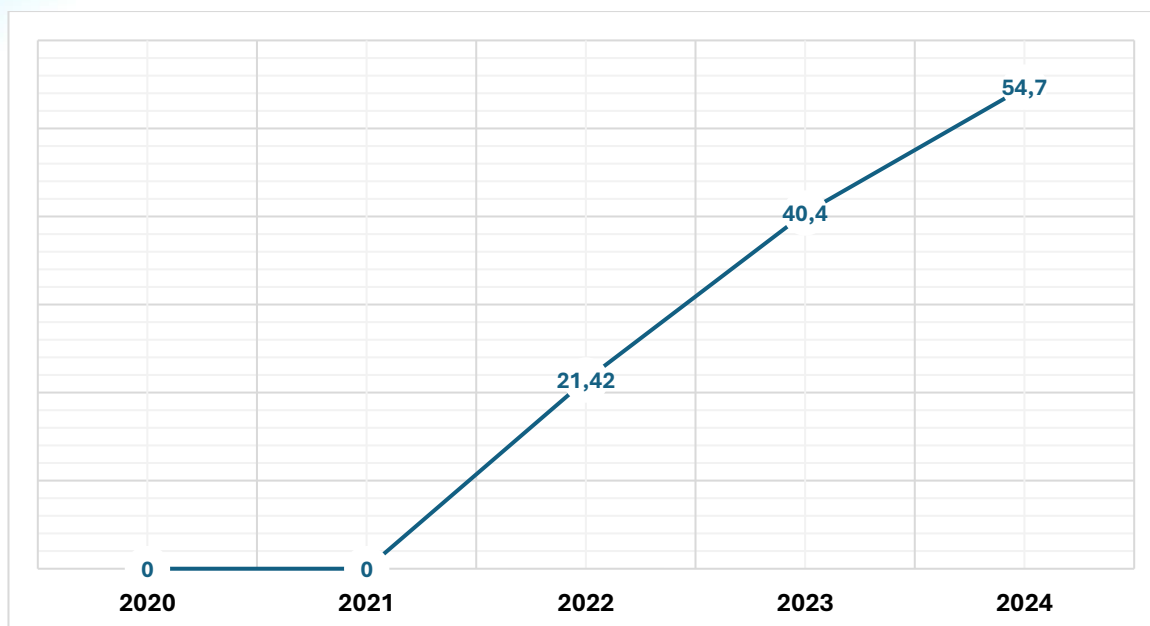
wilayah. Kinerja pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat diukur menggunakan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

2.1.3.6.2. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian yang Layak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar warga negara dengan menyediakan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah layak huni merupakan hunian yang memenuhi standar keamanan guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu melaksanakan program penyediaan, pembangunan, perawatan, dan pengawasan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni sehingga masyarakat dapat terhindar dari gangguan kesehatan dan kenyamanan yang dapat mengganggu kesejahteraan. Data Rumah Tangga Dengan Akses Hunian yang Layak belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

2.1.3.6.3. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal. Perolehan maksimal dari pembangunan desa adalah tercapainya desa mandiri. Desa mandiri merupakan status tertinggi desa yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian serta penurunan kemiskinan. Adapun status desa lainnya mencakup desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Status desa tersebut ditujukan untuk merepresentasikan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mengembangkan desa mandiri dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal, dan memberdayakan masyarakat. Berikut merupakan capaian persentase desa mandiri Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 53 Capaian Persentase Desa Mandiri

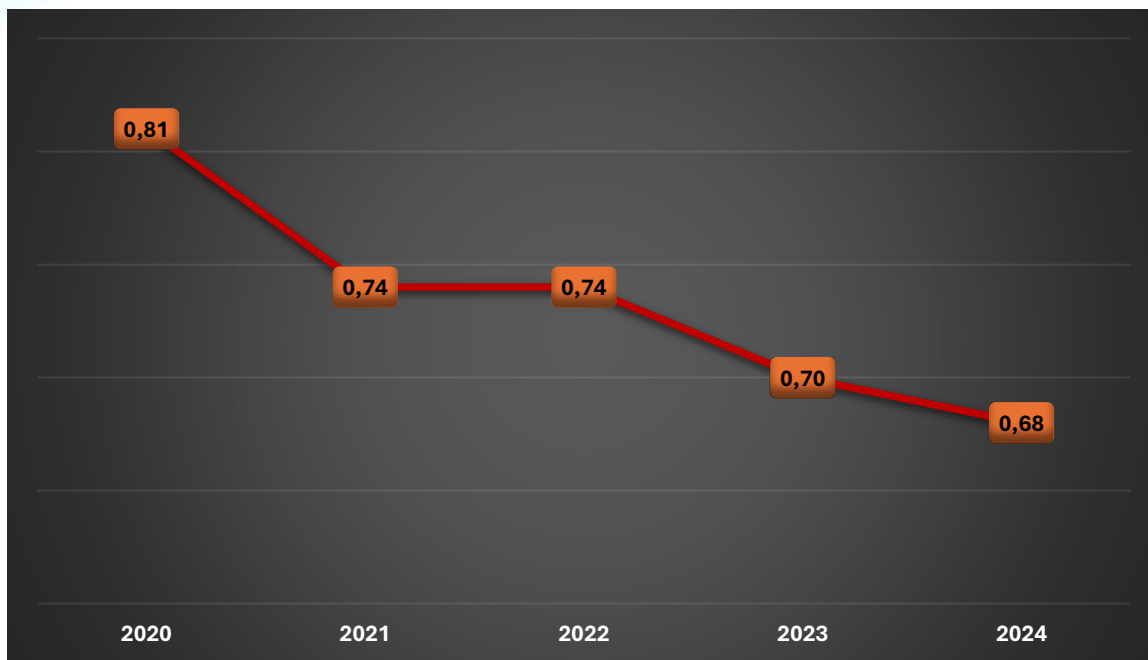
Sumber: Dinas Pemdes dan KB Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Belitung dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Secara keseluruhan, persentase desa mandiri mengalami peningkatan yang pesat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase desa mandiri mencapai 21,42%. Satu tahun kemudian, capaian tersebut meningkat sebanyak 18,98% sehingga mencapai 40,4%. Perkembangan positif terus terjadi sehingga persentase desa mandiri pada tahun 2024 berhasil menembus setengah capaian dengan perolehan 54,7%.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. *Tax Ratio* Daerah adalah perbandingan antara penerimaan nominal pajak daerah dengan PDRB ADHB. Jika rasio pajak makin besar, maka porsi output agregat yang dikenakan pajak akan semakin besar. Apabila rasio pajak meningkat maka pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menunjukkan dua hal, yaitu meningkatnya potensi penerimaan pajak dan atau meningkatnya efisiensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak. Adapun sumber-sumber penerimaan pajak tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut merupakan capaian rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Belitung.



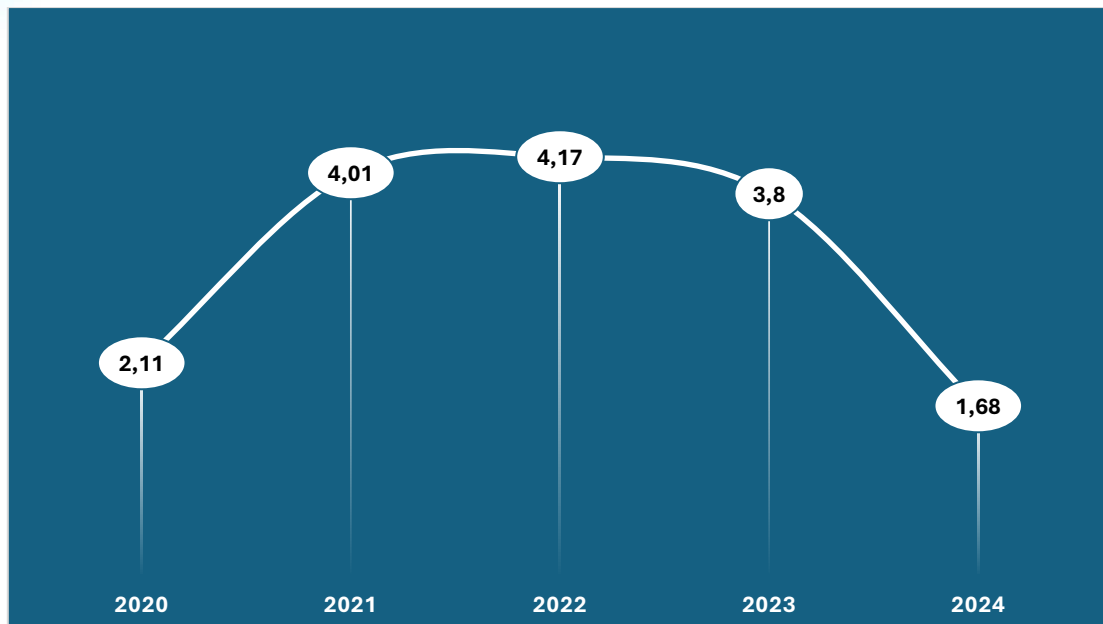
Gambar 2. 54 Rasio Pajak Terhadap PDRB

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Belitung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB adalah 0,81%. Kemudian, rasio pajak terhadap PDRB berada pada kondisi yang stagnan pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 0,74%. Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Belitung terus mengalami penurunan sehingga mencapai 0,68% pada tahun 2024. Capaian tersebut dihitung dengan membagi antara penerimaan pajak daerah dengan PDRB ADHB. Penurunan yang terjadi dalam lima tahun terakhir menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan rasio pajak yang dapat ditempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

2.1.3.7.2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan keadaan ekonomi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum secara terus menerus sehingga berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Pengukuran inflasi dilakukan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat atau rumah tangga. Perubahan IHK dapat merepresentasikan terjadinya inflasi atau deflasi. Berdasarkan klasifikasinya, inflasi terbagi dikategorikan menjadi inflasi ringan yang terjadi saat kenaikan harga berada di bawah 10% dalam setahun, inflasi sedang saat harga barang berada di antara 10% sampai 30% dalam setahun, inflasi berat saat harga barang berada di antara 30% sampai 100% dalam setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali saat harga barang dan jasa berada di atas 100% dalam setahun Berikut merupakan tingkat inflasi di Kabupaten Belitung.

**Gambar 2. 55 Capaian Tingkat Inflasi**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik diatas menyajikan capaian inflasi Kabupaten Belitung dalam selama lima tahun. Apabila dibagi menjadi dua fase, tren inflasi di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan pada tiga tahun pertama dan penurunan pada dua tahun terakhir. Namun, secara keseluruhan, capaian inflasi Kabupaten Belitung menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, inflasi mencapai 2,11%. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebanyak 1,9% sehingga mencapai 4,01%. Satu tahun setelahnya, terjadi sedikit peningkatan dengan capaian 4,17%. Namun, sejak itu, terjadi penurunan yang dimana pada tahun 2023 inflasi mencapai 3,8%. Pada tahun 2024, inflasi berhasil memperoleh capaian terendah dalam lima tahun terakhir yang dimana capaian tersebut bahkan lebih rendah dari peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 yaitu 1,68%. Berdasarkan klasifikasi yang ada, tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir berada pada kategori ringan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

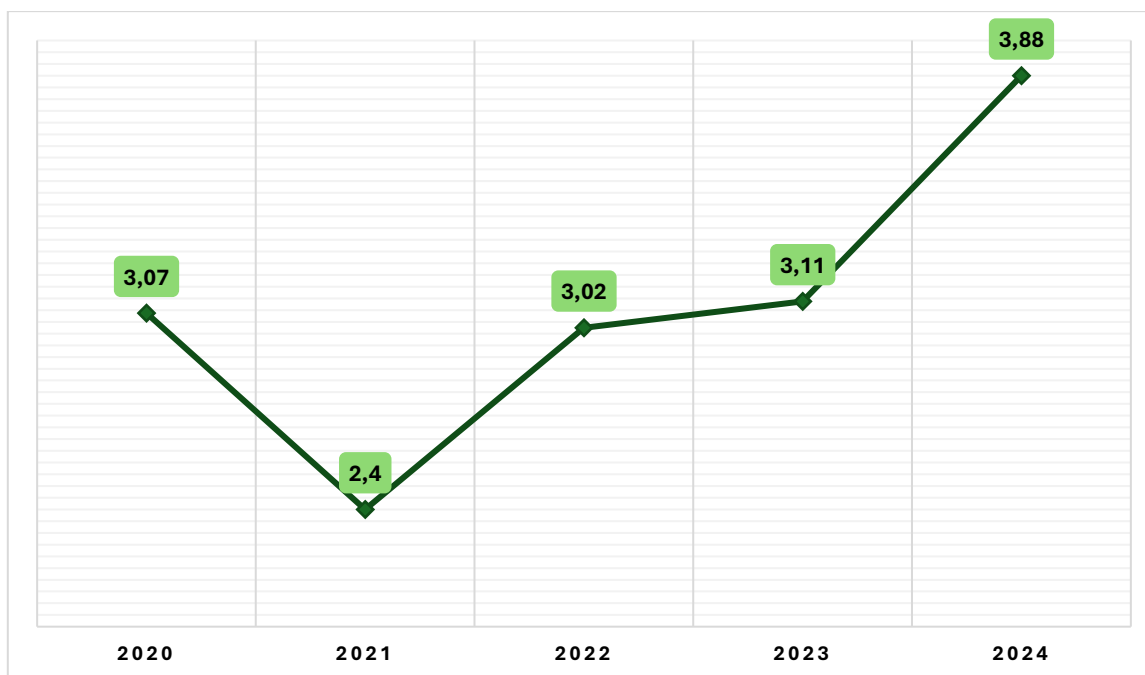
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur reformasi hukum melalui identifikasi atau pemetaan regulasi, regulasi, dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran tersebut ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, melalui IRH, diharapkan setiap regulasi yang dilaksanakan oleh instansi bersifat tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berbenturan dengan regulasi tingkat atas. *Stakeholder* yang bertugas untuk mengukur indeks reformasi hukum adalah Kementerian Hukum. Capaian indeks reformasi hukum Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang signifikan dari 45,61 (C) yaitu kurang pada tahun 2023 menjadi 97,84 (AA) pada tahun 2024 yaitu istimewa.

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan acuan untuk mengukur tingkat kematangan perkembangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE. Pengukuran indeks SPBE ditujukan untuk mendorong pemerintah agar mengoptimalkan pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menghasilkan pelayanan publik yang efektif, transparan, efisien, dan akuntabel. Penilaian capaian pelaksanaan SPBE dilakukan melalui evaluasi secara berkala atau disebut dengan evaluasi SPBE. Berikut merupakan capaian indeks SPBE Kabupaten Belitung



Gambar 2. 56 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian indeks SPBE Kabupaten Belitung dalam selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, indeks SPBE mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, indeks SPBE Kabupaten Belitung ada 3,07. Capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 sehingga mencapai 2,4. Sejak itu, indeks SPBE mengalami peningkatan secara konsisten sehingga mencapai 3,88 pada tahun 2024. Untuk mengoptimalkan penerapan SPBE, Pemerintah Kabupaten menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mendorong perlunya penyelenggaraan SPBE.

2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik (IPP) adalah alat yang mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan enam aspek yang terdiri dari pemenuhan kebijakan pelayanan, peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan, dan penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik. Secara sederhana, indeks

pelayanan publik digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Penilaian tersebut ditujukan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja pelayan publik, seperti memperbaiki prosedur, meningkatkan kompetensi petugas, meningkatkan pengawasan kinerja, dan lain-lain sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang prima. Data Indeks Pelayanan Publik belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

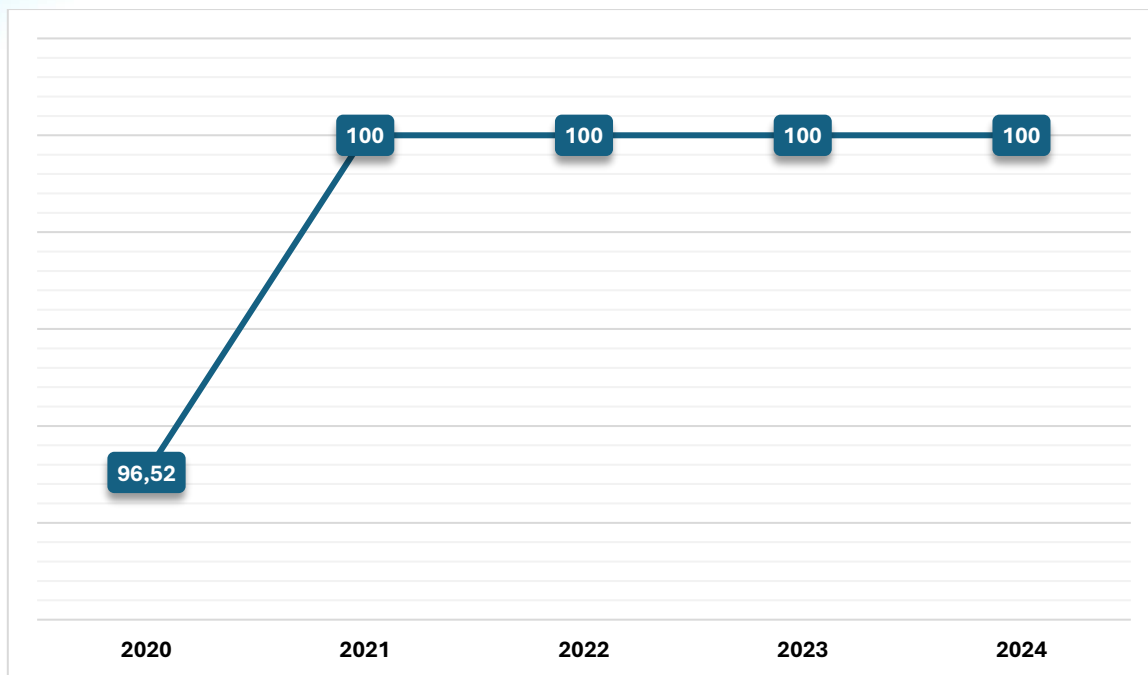
2.1.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Indeks integritas nasional adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat korupsi dan risiko korupsi suatu lembaga. Penilaian tersebut ditujukan untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Pemerintahan yang bersih dan transparan penting untuk menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat. Pelaksana pengukuran indeks integritas nasional adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI). Data Indeks Integritas Nasional belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan peraturan daerah merupakan bentuk penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Melalui penegakan perda, Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, konflik sosial yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dapat berkurang. Pada akhirnya, upaya tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan sosial. Berikut merupakan capaian persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 57 Capaian Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian persentase penegakan peraturan daerah di Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, persentase penegakan peraturan daerah memperoleh hasil yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase penegakan peraturan daerah adalah 96,52%. Sejak itu, persentase penegakan peraturan daerah meningkat dan mencapai hasil yang konsisten dalam empat tahun berturut-turut dengan perolehan 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung secara optimal telah berupaya memberikan rasa aman dan nyaman yang menghasilkan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Kinerja tersebut harus dipertahankan untuk menjaga lingkungan dari gangguan atau ancaman.

2.1.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Penyusunan RANHAM ditujukan untuk memastikan hak-hak dasar dari setiap warga negara agar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Aksi HAM merupakan program yang dirancang untuk melaksanakan RANHAM secara konkret. Data Persentase Capaian Aksi HAM belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

2.1.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur objektif dan empiris yang digunakan untuk menilai kondisi demokrasi politik di suatu wilayah. Terdapat tiga aspek yang dinilai IDI yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Pengukuran tersebut ditujukan untuk memantau kualitas demokrasi sehingga Pemerintah dapat mengevaluasi kinerja dan kebijakan-kebijakannya dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Data Indeks Demokrasi Indonesia belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

2.1.4.2.4. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat di suatu wilayah. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk dapat melakukan aktivitas seperti kegiatan ekonomi. Pemerintah perlu melaksanakan pengamanan dengan optimal melalui berbagai kebijakan untuk menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Data Indeks Rasa Aman belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024. Akan mulai dilakukan perhitungannya pada 5 (lima) tahun kedepan dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN.

2.1.4.2.5. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

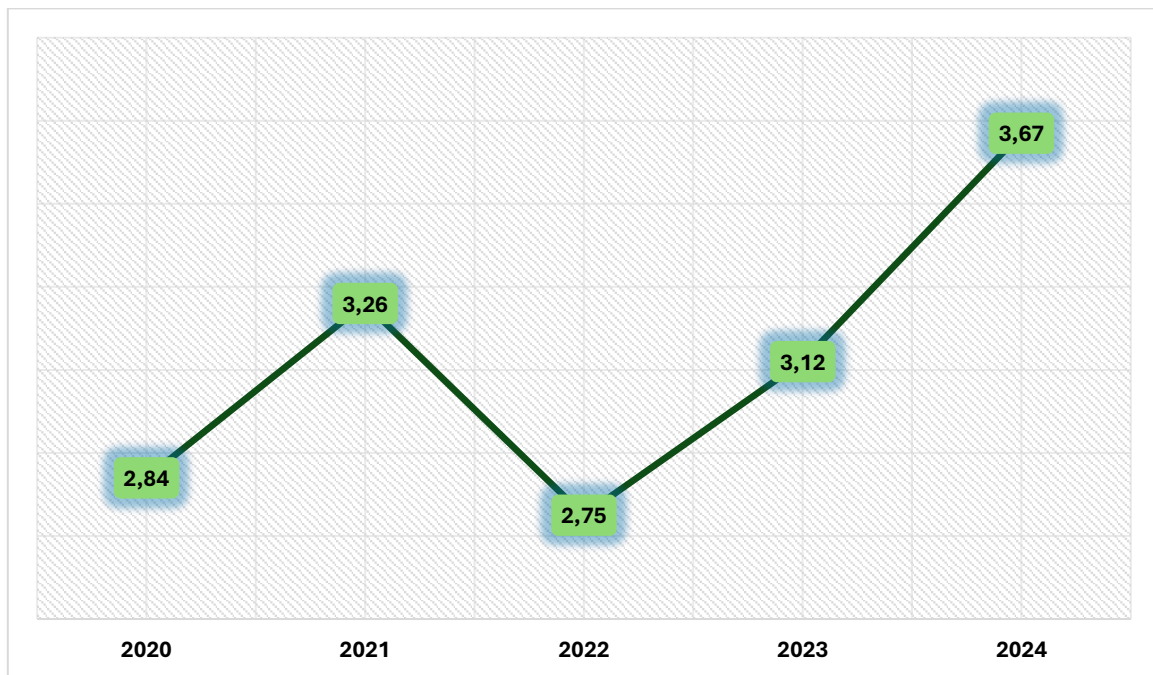
Indeks ketenteraman dan ketertiban adalah indikator yang mengukur kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan undang-undang, ketenteraman adalah sebuah kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis sehingga bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian, ketertiban merupakan keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. Optimalisasi pelayanan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum berimplikasi pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan investasi yang menghasilkan kesejahteraan. Data Indeks Ketenteraman dan Ketertiban belum pernah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga belum ada data capaiannya hingga tahun 2024.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing provinsi dan kabupaten/kota dengan melihat tingkat produktivitas daerah terkait. Indikator tersebut dirancang untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah dengan mempertimbangkan empat faktor yang terdiri dari lingkungan pendukung, pasar, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi. Pengukuran ditujukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sehingga capaian tersebut dapat

dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Berikut merupakan capaian IDSD Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 58 Capaian Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian IDSD Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, IDSD mengalami peningkatan dengan kondisi yang cukup stabil. Pada tahun 2020, IDSD Kabupaten Belitung mencapai 2,84. Capaian tersebut meningkat sehingga mencapai 3,26 pada tahun 2021. Namun, satu tahun kemudian terjadi penurunan dimana IDSD adalah 2,75. Sejak itu, IDSD mulai bertumbuh dan memperoleh perkembangan positif sehingga mengalami peningkatan dalam dua tahun secara berturut-turut. Pada tahun 2024, IDSD berhasil memperoleh 3,67. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung memiliki daya saing yang cukup baik.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

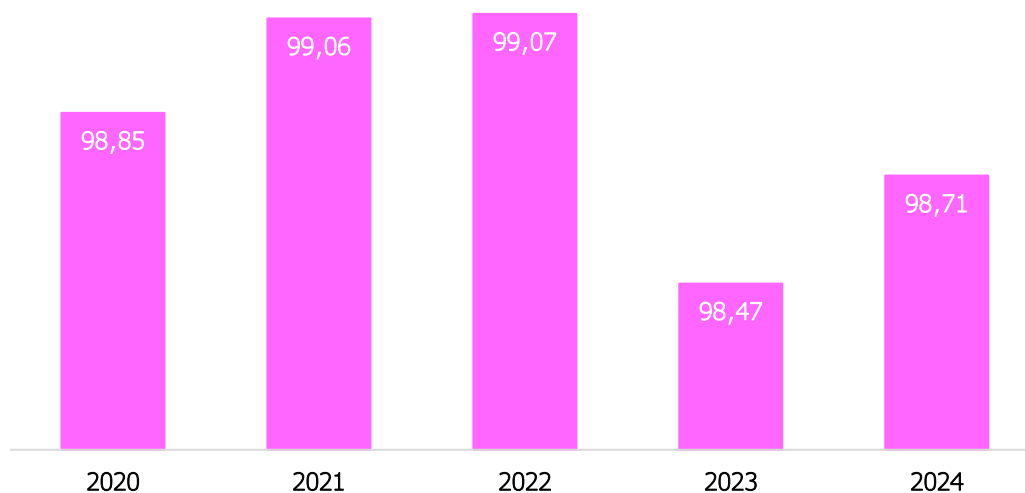
Kinerja menggambarkan hasil capaian yang diperoleh dalam periode waktu tertentu sesuai dengan wewenang masing-masing urusan yang diampu oleh perangkat daerah di setiap pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi lima aspek yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci merupakan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dan relevan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diturunkan pada dokumen Renstra perangkat daerah menjadi indikator kinerja Perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah.

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Belitung diklasifikasikan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan.

2.1.4.4.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.4.4.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan yang ada di urusan wajib pelayanan dasar bagi semua pemerintahan daerah, termasuk salah satunya di Kabupaten Belitung. Pendidikan di Kabupaten Belitung telah menunjukkan peningkatan yang signifikan yang digambarkan melalui peningkatan beberapa indikator yang ada di dalam urusan pendidikan ini.



Gambar 2. 59 Angka Melek Huruf Kabupaten Belitung 2024-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2025

Grafik diatas menunjukkan capaian angka melek huruf di Kabupaten Belitung dari tahun 2020 hingga 2024. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan yang memberikan gambaran terkait kemampuan membaca, hal ini karena membaca adalah titik awal dari proses belajar. Capaian angka melek huruf mencerminkan tingkat kemampuan dasar masyarakat dalam membaca dan menulis. Meningkatkan angka melek huruf sangat penting untuk mendorong pembangunan manusia, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan inklusif. Terlihat bahwa capaian angka melek huruf di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 berada di angka 98,71% yang meningkat 0,24% dari capaian 2023 yaitu 98,47. Namun capaian ini masih berada dibawah capaian tertinggi angka melek huruf Kabupaten Belitung di tahun 2022 yaitu 99,07%. Berikutnya untuk melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Belitung dapat diketahui dari capaian indikator lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.17 Capaian Urusan Pendidikan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	59,88	48,77	64,86	47,13	45,10
	Kecamatan Tanjungpandan	65,78	48,19	74,03	50,32	48,60
	Kecamatan Badau	46,92	47,47	72,61	41,97	36,95
	Kecamatan Sijuk	39,38	42,42	67,5	39,92	33,16
	Kecamatan Membalong	46,70	45,85	66,21	47,19	46,95
	Kecamatan Selat Nasik	99,64	41,75	65,10	41,33	33,09
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,4	98,39	97,92	98,10	96,55
	Kecamatan Tanjungpandan	100,49	99,02	99,50	98,93	97,20
	Kecamatan Badau	107,97	105,15	101,82	104,03	103,93
	Kecamatan Sijuk	95,25	93,26	89,80	89,67	90,62
	Kecamatan Membalong	102,92	97,82	99,66	102,70	94,96
	Kecamatan Selat Nasik	92,17	88,01	87,10	84,79	93,22
3	Angka Partisipasi Kasar SMP	102,23	96,41	97,42	94,53	90,77
	Kecamatan Tanjungpandan	98,79	97,74	95,91	94,24	91,46
	Kecamatan Badau	95,72	95,15	102,65	100,80	94,46
	Kecamatan Sijuk	92,36	93,66	96,07	88,81	84,65
	Kecamatan Membalong	82,26	78,33	79,28	79,59	71,42
	Kecamatan Selat Nasik	82,10	83,06	80,27	77,74	66,97
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,65	84,48	85,01	88,20	83,52
	Kecamatan Tanjungpandan	95,13	86,71	87,22	89,89	82,87
	Kecamatan Badau	96,80	88,05	88,41	89,19	91,62
	Kecamatan Sijuk	85,40	78,57	79,16	80,34	80,87
	Kecamatan Membalong	90,11	82,08	83,82	93,89	85,39
	Kecamatan Selat Nasik	88,34	77,15	71,48	71,28	79,28
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	70,09	66,26	61,83	64,01	65,83
	Kecamatan Tanjungpandan	68,14	62,99	61,06	63,97	65,80
	Kecamatan Badau	69,61	71,76	51,33	73,64	68,64
	Kecamatan Sijuk	81,84	79,15	76,93	74,70	66,80
	Kecamatan Membalong	66,77	57,80	41,69	35,61	48,42
	Kecamatan Selat Nasik	52,78	62,46	51,84	58,71	44,04
6	Indeks Pendidikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	102,82	96,04	99,34	98,63	95,86
	Kecamatan Tanjungpandan	467,47	101,73	n/a	101,81	96,06
	Kecamatan Badau	47,55	98,42	n/a	100,47	105,12
	Kecamatan Sijuk	479,71	84,09	n/a	86,24	90,22
	Kecamatan Membalong	21,82	87,90	n/a	104,19	97,88
	Kecamatan Selat Nasik	43,87	86,87	n/a	78,29	90,21
8	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	89,91	69,26	89,97	79,88	77,20
	Kecamatan Tanjungpandan	93,43	65,72	n/a	85,80	83,19
	Kecamatan Badau	84,88	76,91	n/a	88,15	83,38

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Kecamatan Sijuk	93,24	84,42	n/a	84,35	82,38
	Kecamatan Membalong	80,97	60,79	n/a	47,05	45,04
	Kecamatan Selat Nasik	64,51	68,11	n/a	67,74	64,22
	Rasio Siswa terhadap Guru SD	16,53	16,85	18,29	15,77	14,28
	Rasio Siswa Terhadap Guru SMP	17,79	17,07	19,96	16,89	16,91
10	Rasio sekolah SD/MI	75,93	64,11	56,06	63,04	
11	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	n/a	n/a	n/a	43,14	43,66
12	Rasio sekolah SMP/MTs	56,19	37,07	37,01	33,38	
13	Rasio Rombel SD	23,34	23,17	23,12	22,32	19,37
14	Rasio Rombel SMP	28,01	28,4	28,6	29,14	28,85
15	Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	17.726	19.072	16.566	16.921	15.774
16	Kecamatan Tanjungpandan	10.559	11.187	9.879	10.135	9.248
	Kecamatan Badau	1.422	1.593	1.358	1.329	1.377
	Kecamatan Sijuk	2.879	3.194	2.701	2.644	2.595
	Kecamatan Membalong	2.313	2.555	2.207	2.396	2.133
	Kecamatan Selat Nasik	553	543	421	417	421
17	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	19.132	19.467	19.486	19.193	18.901
18	Kecamatan Tanjungpandan	11.100	11.298	11.316	11.275	11.160
	Kecamatan Badau	1.468	1.515	1.536	1.490	1.503
	Kecamatan Sijuk	3.371	3.425	3.412	3.291	3.209
	Kecamatan Membalong	2.567	2.612	2.633	2.552	2.498
	Kecamatan Selat Nasik	626	617	589	585	531
19	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	6.184	5.942	5.476	5.999	6.258
20	Kecamatan Tanjungpandan	3.390	3.291	3.252	3.545	3.761
	Kecamatan Badau	488	488	348	553	545
	Kecamatan Sijuk	1.307	1.260	1.214	1.255	1.149
	Kecamatan Membalong	828	715	507	464	659
	Kecamatan Selat Nasik	171	188	155	182	144
21	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	8.837	9.035	9.097	9.586	9.918
22	Kecamatan Tanjungpandan	4.975	5.225	5.326	5.542	5.716
	Kecamatan Badau	701	680	678	751	794
	Kecamatan Sijuk	1.597	1.592	1.578	1.680	1.720
	Kecamatan Membalong	1.240	1.237	1.216	1.303	1.361
	Kecamatan Selat Nasik	324	301	299	310	327
23	Angka Putus Sekolah SD	29	37	13	34	25
24	Kecamatan Tanjungpandan	13	22	1	11	13
	Kecamatan Badau	0	0	2	5	3
	Kecamatan Sijuk	8	9	5	8	3
	Kecamatan Membalong	8	6	3	10	4

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
21	Kecamatan Selat Nasik	0	0	2	0	2
	Angka Putus Sekolah SMP	25	28	45	34	95
	Kecamatan Tanjungpandan	12	15	18	11	57
	Kecamatan Badau	4	2	8	4	11
	Kecamatan Sijuk	5	8	14	8	19
	Kecamatan Membalong	3	3	3	9	8
22	Kecamatan Selat Nasik	1	0	2	2	0
	Jumlah Pernikahan Dini	55	92	85	94	56
	Kecamatan Tanjungpandan	n/a	42	39	39	18
	Kecamatan Badau	n/a	1	6	11	8
	Kecamatan Sijuk	n/a	13	15	14	9
	Kecamatan Membalong	n/a	36	24	30	21
23	Kecamatan Selat Nasik	n/a	0	1	0	0
	Jumlah Gedung Sekolah SD (Negeri)	114	114	114	114	114
	Kecamatan Tanjungpandan	38	38	38	38	38
	Kecamatan Badau	17	17	17	17	17
	Kecamatan Sijuk	22	22	22	22	22
	Kecamatan Membalong	30	30	30	30	30
24	Kecamatan Selat Nasik	7	7	7	7	7
	Jumlah Gedung Sekolah SD (Swasta)	6	6	7	7	7
	Kecamatan Tanjungpandan	6	6	7	7	7
	Kecamatan Badau	0	0	0	0	0
	Kecamatan Sijuk	0	0	0	0	0
	Kecamatan Membalong	0	0	0	0	0
25	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	0
	Jumlah Gedung Sekolah SMP (Negeri)	21	21	21	21	21
	Kecamatan Tanjungpandan	7	7	7	7	7
	Kecamatan Badau	3	3	3	3	3
	Kecamatan Sijuk	4	4	4	4	4
	Kecamatan Membalong	5	5	5	5	5
26	Kecamatan Selat Nasik	2	2	2	2	2
	Jumlah Gedung Sekolah SMP (Swasta)	8	8	8	8	8
	Kecamatan Tanjungpandan	8	8	8	8	8
	Kecamatan Badau	0	0	0	0	0
	Kecamatan Sijuk	0	0	0	0	0
	Kecamatan Membalong	0	0	0	0	0
27	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	0
	Jumlah Gedung Sekolah SMA/SMK (Negeri)	10	10	10	9	9
	Kecamatan Tanjungpandan	5	5	5	5	5
	Kecamatan Badau	1	1	1	1	1

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
28	Kecamatan Sijuk	2	2	2	1	1
	Kecamatan Membalong	1	1	1	1	1
	Kecamatan Selat Nasik	1	1	1	1	1
	Jumlah Gedung Sekolah SMA/SMK (Swasta)	5	5	6	6	5
	Kecamatan Tanjungpandan	5	5	6	6	5
	Kecamatan Badau	0	0	0	0	0
	Kecamatan Sijuk	0	0	0	0	0
29	Kecamatan Membalong	0	0	0	0	0
	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	0
	Jumlah Gedung Sekolah SLB Negeri	1	1	1	1	1
	Kecamatan Tanjungpandan	1	1	1	1	1
	Kecamatan Badau	0	0	0	0	0
	Kecamatan Sijuk	0	0	0	0	0
	Kecamatan Membalong	0	0	0	0	0
30	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	0
	Jumlah Gedung Sekolah SLB Swasta	0	0	0	0	0
	Kecamatan Tanjungpandan	0	0	0	0	0
	Kecamatan Badau	0	0	0	0	0
	Kecamatan Sijuk	0	0	0	0	0
	Kecamatan Membalong	0	0	0	0	0
	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	0
31	Jumlah TK/KB/TPA	94	92	90	88	87
	Kecamatan Tanjungpandan	47	46	44	42	40
	Kecamatan Badau	10	10	10	10	10
	Kecamatan Sijuk	16	16	16	16	17
	Kecamatan Membalong	16	15	15	15	15
	Kecamatan Selat Nasik	5	5	5	5	5
	Jumlah PKBM	6	7	6	7	7
32	Kecamatan Tanjungpandan	0	1	1	1	1
	Kecamatan Badau	2	2	1	1	1
	Kecamatan Sijuk	2	2	2	3	3
	Kecamatan Membalong	1	1	1	1	1
	Kecamatan Selat Nasik	1	1	1	1	1
	Jumlah SKB	1	1	1	1	1
	Kecamatan Tanjungpandan	1	1	1	1	1
33	Kecamatan Badau	0	0	0	0	0
	Kecamatan Sijuk	0	0	0	0	0
	Kecamatan Membalong	0	0	0	0	0
	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	0
	Jumlah Guru PAUD	300	306	274	278	304

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
35	Jumlah Guru SD	1.159	1.134	1.040	1.190	1273
36	Jumlah Guru SMP	497	466	427	514	510
37	Rasio Guru SD	16,53	16,85	13,34	15,77	
38	Rasio Guru SMP	17,76	17,97	15,97	16,89	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan capaian dan bahkan penurunan. Beberapa indikator yang mengalami kenaikan capaian di tahun 2024 diantaranya adalah: angka partisipasi murni/ APM SMP (tahun 2024 tercapai 65,83 dibandingkan dari tahun 2023 sebesar 64,01); rasio siswa terhadap guru SMP (tahun 2024 tercapai 16,91 meningkat dari 16,89 di tahun 2023); jumlah guru PAUD (mencapai 304 guru di tahun 2024); jumlah guru SD (mencapai 1.273 guru SD); rasio guru SD (meningkat dari 13,34 pada tahun 2022 menjadi 15,77 di 2023); serta indikator rasio guru SMP (dari 15,97 di tahun 2022 menjadi 16,89 pada tahun 2023). Sedangkan indikator yang mengalami penurunan capaian diantaranya adalah: angka partisipasi kasar/ APK PAUD (dari capaian tertinggi tahun 2022 sebesar 64,86 menurun signifikan hingga menjadi 45,10 di tahun 2024); angka partisipasi kasar/ APK SD/MI (menurun signifikan dari 100,4 pada tahun 2020 menjadi 96,55 di 2024); angka partisipasi kasar/ APK SMP (menurun signifikan dari 102,23 di 2022 menjadi 90,77 pada 2024); angka partisipasi murni/ APM SD/MI (dari 88,2 turun di angka 83,52); angka partisipasi sekolah SD/MI (menurun signifikan dari capaian tertinggi 102,82 di 2020 menjadi 95,86 pada 2024); angka partisipasi sekolah SMP/MTs (capaian tertinggi sebesar 89,97 di 2022 lalu menurun signifikan hingga di angka 77,20 pada tahun 2024); rasio siswa terhadap guru SD (dari capaian tertinggi 2022 sebesar 18,29 terus menurun hingga 14,28); rasio rombel SD (menurun signifikan dalam 5 tahun terakhir hingga di angka 19,37); rasio rombel SMP (menurun dari capaian 2023 sebesar 22,32 menjadi 19,37); serta jumlah guru SMP (menurun dari 514 guru di tahun 2023 menjadi 510 guru di 2024).

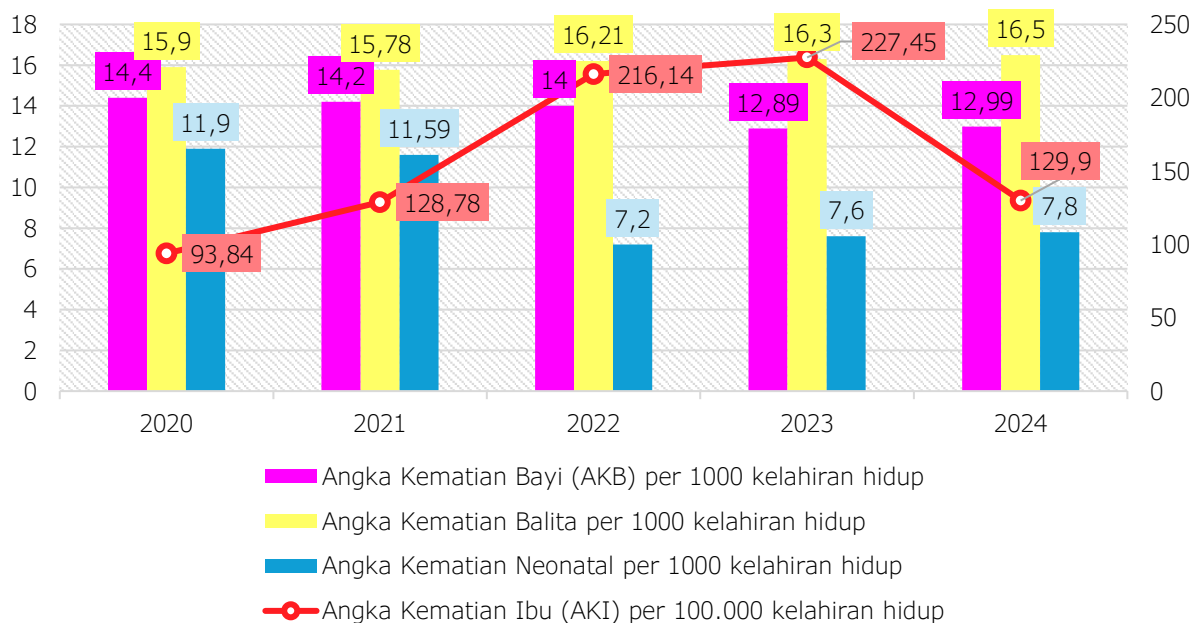
Indikator lainnya seperti angka putus sekolah SD di Kabupaten Belitung mengalami kondisi yang fluktuatif. Dari sebesar 29% pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 37% di tahun 2021, berkontraksi di tahun 2022 menjadi 13%, lalu melonjak hingga di angka 34% pada tahun 2023, dan di tahun 2024 menurun kembali menjadi 25%. Penurunan capaian pada indikator ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah siswa SD yang putus sekolah di Kabupaten Belitung. Sehingga mayoritas siswa SD telah memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/ sederajat. Capaian ini berbanding terbalik dengan angka putus sekolah SMP yang melonjak hingga 95% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas siswa SMP di Kabupaten Belitung tidak melanjutkan pendidikannya. Kondisi sosial ekonomi disekitar dapat memberikan pengaruh untuk hal ini. Meskipun angka putus sekolah SMP ini tinggi, masyarakat Kabupaten Belitung tidak terdorong untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini tercermin dari capaian jumlah pernikahan dini yang berkurang di tahun 2024 menjadi 56 kejadian saja.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Kondisi ini tercermin dari ketersediaan jumlah gedung sekolah SD (Negeri) di Kabupaten Belitung yang stabil di 114 gedung, lalu 7 gedung sekolah SD (Swasta), 21 gedung sekolah SMP (Negeri), 8 gedung sekolah SMP (Swasta), 9 gedung sekolah SMA/SMK (Negeri), 5 gedung sekolah SMA/SMK (Swasta), 1 gedung sekolah SLB Negeri, 87 TK/KB/TPA, 7 PKBM, serta 1 SKB. Meskipun terdapat peningkatan yang positif, masih terdapat tantangan, seperti tingginya angka putus sekolah SMP di beberapa daerah di Kabupaten Belitung. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses pendidikan dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah. Selain itu, perlu juga ditingkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan dengan daerah perkotaan, dengan meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

2.1.4.4.1.2 Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia, salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan juga termasuk kedalam salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang perlu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Semakin baik kualitas dan kuantitas segala hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dapat membantu meningkatkan kualitas dari kesehatan masyarakat itu sendiri dan menunjukkan kinerja yang positif bagi pemerintah daerah. Sama halnya dengan pemerintah Kabupaten Belitung, mengupayakan peningkatan capaian untuk indikator kinerja yang positif dan menekan capaian indikator yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan juga pemerintah.

Grafik rincian dari masing-masing indikator dalam urusan kesehatan di Kabupaten Belitung dibawah ini menunjukkan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Belitung cenderung menurun dari kisaran angka 14 pada tahun 2020 hingga tahun 2022, menjadi 12,89 di tahun 2023 dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2024 menjadi 12,99. Terlihat ada kenaikan peristiwa kematian bayi di wilayah Kabupaten Belitung, yaitu di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Membalong, hanya di Kecamatan Selat Nasik yang tidak ada peristiwa kematian bayi di 2024. Kenaikan ini juga terjadi pada indikator angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Dari capaian 15,9 di 2020, berhasil turun di angka 15,78 pada 2021, namun mengalami lonjakan di angka 16,21 di 2022, meningkat kembali di tahun 2023 mencapai 16,3 dan semakin bertambah menjadi 16,5 di 2024. Kondisi ini menunjukkan semakin bertambahnya kematian balita di Kabupaten Belitung. Sesuai dengan data, kenaikan angka kematian balita ini terjadi di wilayah Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.



Gambar 2. 60 AKB, AKI, Angka Kematian Balita dan Neonatal

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2025

Angka kematian neonatal, merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari capaian 2020 hingga 2024, terjadi penurunan angka, yaitu 11,9 di tahun 2020 dan turun menjadi 11,59 pada 2021, berkontraksi mencapai 7,2 pada tahun 2022, namun mengalami penambahan menjadi 7,6 di 2023 dan menjadi 7,8 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan semakin banyaknya bayi yang meninggal sebelum berusia 28 hari pertama kelahiran. Perlunya diketahui penyebab kenaikan capaian pada indikator ini untuk menekannya kembali di tahun berikutnya agar tidak kembali meningkat. Kemudian untuk indikator angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup cenderung menurun dari 227,45 di 2023 menjadi 129,9 di 2024. Meskipun angka penurunan di 2024 ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan capaian terendahnya dalam kurun waktu 5 tahun yaitu di tahun 2020 sebesar 93,84. Secara lebih rinci untuk indikator kesehatan lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Capaian Urusan Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	14,4	14,2	14,00	12,89	12,99
	Kecamatan Tanjungpandan	7,19	7,08	6,48	4,17	11,97
	Kecamatan Badau	3,13	1,61	3,6	1,9	22,9
	Kecamatan Sijuk	1,56	1,29	2,88	3,03	5,33
	Kecamatan Membalong	1,88	2,9	0,72	3,03	21,27
	Kecamatan Selat Nasik	0,63	1,61	0,36	0,76	0
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	93,84	128,78	216,14	227,45	129,9
	Kecamatan Tanjungpandan	51,89	64,39	108,07	151,63	149,7

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Badau	0	0	36,02	37,91	0
	Kecamatan Sijuk	194,17	0	72,05	0	0
	Kecamatan Membalong	232,56	32,2	0	0	303,95
	Kecamatan Selat Nasik	0	32,2	0	37,91	0
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15,9	15,78	16,21	16,3	16,5
	Kecamatan Tanjungpandan	7,82	7,08	7,2	5,69	2,24
	Kecamatan Badau	1,56	1,61	4,68	1,9	0
	Kecamatan Sijuk	3,13	2,25	2,8	3,79	5,33
	Kecamatan Membalong	2,19	2,9	1,08	3,79	3,03
	Kecamatan Selat Nasik	1,25	1,93	0,36	0,76	39,21
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	11,9	11,59	7,2	7,6	7,8
5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	23,12	20,32	20,38	22,21	22,52
6	Rasio Posyandu per 100 balita	1,4	1,4	1,4	1,6	1,3
7	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,8	0,57	0,87	0,72	0,63
8	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	65,62	67,62	100,15	85,13	75,8
9	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	5,18	5,07	4,95	4,85	4,74
10	Rasio Pustu per 100.000 penduduk	17,85	17,47	17,06	16,7	16,85
11	Rasio Rumah Sakit	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016
12	Cakupan Data/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	83,67	75,51	95,9	100	93,87
	Kecamatan Tanjungpandan	100	93,75	100	100	93,75
	Kecamatan Badau	100	100	100	100	71,4
	Kecamatan Sijuk	60	70	100	100	100
	Kecamatan Membalong	91,67	66,67	91,7	100	100
	Kecamatan Selat Nasik	25	0	75	100	100
13	Jumlah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.711	4.002	3.992	5.163	4.858
	Kecamatan Tanjungpandan	1.053	2.680	2.733	3.636	3.067
	Kecamatan Badau	278	266	308	453	467
	Kecamatan Sijuk	160	441	410	472	696
	Kecamatan Membalong	167	572	472	512	510
	Kecamatan Selat Nasik	53	43	69	90	118
14	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	344,2	82,8	106,96	338,4	240,1
	Kecamatan Tanjungpandan	235,4 4	75,5	76,64	247,3 2	151,1
	Kecamatan Badau	10,94	1,13	4,41	12,93	22,64
	Kecamatan Sijuk	77,14	5,63	22,05	60,89	48,44
	Kecamatan Membalong	17,85	0,56	2,21	15,63	16,85
	Kecamatan Selat Nasik	2,88	0	1,65	1,62	1,05

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Jumlah Kasus HIV AIDS	19	25	33	37	27
	Kecamatan Tanjungpandan			25	37	19
	Kecamatan Badau			4	0	3
	Kecamatan Sijuk			3	0	2
	Kecamatan Membalong			1	0	2
	Kecamatan Selat Nasik			0	0	1
16	Jumlah kasus Diabetes Melitus	2.917	3.108	2.935	2.966	3.025
	Kecamatan Tanjungpandan	1.999	2.056	1.803	1.688	1.749
	Kecamatan Badau	244	230	250	237	233
	Kecamatan Sijuk	360	525	465	567	533
	Kecamatan Membalong	209	235	310	383	405
	Kecamatan Selat Nasik	105	62	107	91	105
17	Jumlah kasus Tuberkulosis	224	195	465	424	451
	Kecamatan Tanjungpandan	161	126	316	327	309
	Kecamatan Badau	15	13	24	25	39
	Kecamatan Sijuk	19	25	63	39	49
	Kecamatan Membalong	22	26	55	30	44
	Kecamatan Selat Nasik	7	5	7	3	10
18	Balita Stunting	9,8	9,4	6,6	6,8	8,28
	Kecamatan Tanjungpandan	3,49	5,62	3,1	4,35	7,51
	Kecamatan Badau	11,72	12,51	9,68	8,27	9,1
	Kecamatan Sijuk	25,78	27,28	15,79	13,4	13,5
	Kecamatan Membalong	6,79	5,84	4,52	5,53	5,71
	Kecamatan Selat Nasik	19,07	20,9	12,36	11,08	17,43
19	Balita Gizi Buruk	3,1	2,6	1,86	2,34	3,39
	Kecamatan Tanjungpandan	2,52	0,81	1,05	1,62	2,69
	Kecamatan Badau	4,71	2,84	3,46	2,8	2,09
	Kecamatan Sijuk	2,12	2,83	2,75	4,33	4,39
	Kecamatan Membalong	3,55	2,71	1,65	2,19	4,77
	Kecamatan Selat Nasik	13,23	5,18	5	2,56	6,22
20	Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3
21	Jumlah Puskesmas	9	9	9	9	9
	Kecamatan Tanjungpandan	3	3	3	3	3
	Kecamatan Badau	1	1	1	1	1
	Kecamatan Sijuk	2	2	2	2	2
	Kecamatan Membalong	2	2	2	2	2
	Kecamatan Selat Nasik	1	1	1	1	1
22	Jumlah Puskesmas Pembantu	31	31	31	32	32
	Kecamatan Tanjungpandan	7	7	7	7	7
	Kecamatan Badau	5	5	5	5	5

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Sijuk	6	6	6	6	6
	Kecamatan Membalong	9	9	9	10	10
	Kecamatan Selat Nasik	4	4	4	4	4
23	Jumlah Pusat Layanan Kesehatan Desa	137	135	130	132	164
24	Jumlah Posyandu	178	180	182	181	175
	Kecamatan Tanjungpandan	70	70	70	70	70
	Kecamatan Badau	22	22	22	22	22
	Kecamatan Sijuk	30	33	34	34	34
	Kecamatan Membalong	48	47	47	46	40
	Kecamatan Selat Nasik	8	8	9	9	9
25	Angka Kelahiran Bayi	3.197	3.106	2.776	2.638	2309
	Kecamatan Tanjungpandan	1.927	1.813	1.610	1.549	1336
	Kecamatan Badau	237	248	243	189	218
	Kecamatan Sijuk	515	520	485	464	375
	Kecamatan Membalong	430	438	366	380	329
	Kecamatan Selat Nasik	88	87	72	56	51
26	Angka melahirkan ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup	3.197	3.106	2.776	2.638	2.314
	Kecamatan Tanjungpandan	1.927	1.813	1.610	1.549	1.343
	Kecamatan Badau	237	248	243	189	219
	Kecamatan Sijuk	515	520	485	464	375
	Kecamatan Membalong	430	438	366	380	326
	Kecamatan Selat Nasik	88	87	72	56	51
27	Jumlah kematian ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup	3	4	6	6	3
	Kecamatan Tanjungpandan	1	2	3	4	2
	Kecamatan Badau	0	0	1	1	0
	Kecamatan Sijuk	1	0	2	0	0
	Kecamatan Membalong	1	1	0	0	1
	Kecamatan Selat Nasik	0	1	0	1	0
28	Gizi Kurang	7,8	6,9	6,38	7,6	9,42
	Kecamatan Tanjungpandan	5,33	4,45	3,76	5,35	8,28
	Kecamatan Badau	7,93	6,78	9	9,6	8,89
	Kecamatan Sijuk	15,99	14,65	11,68	12,49	11,92
	Kecamatan Membalong	4,44	5,02	5,64	7,55	10,98
	Kecamatan Selat Nasik	19,84	15,67	14,6	13,4	13,28
29	Gizi Buruk	2,21	2,6	0,1	0,05	0,07
	Kecamatan Tanjungpandan		1,45	0,03	0,03	0,00
	Kecamatan Badau		2,84	0	0	0,002
	Kecamatan Sijuk		4,25	0,15	0,1	0,000
	Kecamatan Membalong		2,73	0	0	0,001

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Selat Nasik		5,18	0,3	0,3	0,830
30	Angka Kesakitan (Morbiditas)	54,35	46,75	44,1	36,6	27,5
31	Angka Kesakitan Penyakit Menular	2.244	1.319	1.648	3.147	2.947
	Kecamatan Tanjungpandan	1.043	553	707	1.598	
	Kecamatan Badau	167	151	183	303	
	Kecamatan Sijuk	469	241	380	687	
	Kecamatan Membalong	476	327	357	487	
	Kecamatan Selat Nasik	99	44	21	72	
32	Diare	1.486	1.064	1.269	2.288	2.297
	Kecamatan Tanjungpandan	560	381	518	1052	970
	Kecamatan Badau	128	142	129	246	244
	Kecamatan Sijuk	291	217	309	503	627
	Kecamatan Membalong	415	281	295	419	403
	Kecamatan Selat Nasik	92	43	18	68	53
33	Pneumonia	138	79	160	198	156
	Kecamatan Tanjungpandan	69	32	42	71	31
	Kecamatan Badau	17	3	46	31	34
	Kecamatan Sijuk	43	12	31	71	74
	Kecamatan Membalong	18	31	41	25	17
	Kecamatan Selat Nasik	1	1	0	0	0
34	Kusta	5	9	5	17	21
	Kecamatan Tanjungpandan	4	5	3	12	7
	Kecamatan Badau	0	1	0	2	5
	Kecamatan Sijuk	0	2	0	0	4
	Kecamatan Membalong	0	2	2	2	4
	Kecamatan Selat Nasik	1	0	0	1	1
35	Demam Berdarah Dengue (DBD)	598	147	194	628	456
	Kecamatan Tanjungpandan	409	134	139	459	287
	Kecamatan Badau	19	2	8	24	43
	Kecamatan Sijuk	134	10	40	113	92
	Kecamatan Membalong	31	1	4	29	32
	Kecamatan Selat Nasik	5	0	3	3	2
36	Malaria	0	0	0	0	0
37	Filariasis	17	20	20	16	17
	Kecamatan Tanjungpandan	1	1	5	4	
	Kecamatan Badau	3	3	0	0	
	Kecamatan Sijuk	1	0	0	0	
	Kecamatan Membalong	12	12	15	12	
	Kecamatan Selat Nasik	0	0	0	0	
38	Angka Penyakit Tidak Menular	20.428	27.729	34.499	40.499	43.887

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Tanjungpandan	13.409	17.468	22.795	24.682	26.598
	Kecamatan Badau	2.083	2.691	3.406	3.738	4.045
	Kecamatan Sijuk	2.470	4.948	4.512	7.072	8.107
	Kecamatan Membalong	1.338	1.715	2.570	3.698	3.955
	Kecamatan Selat Nasik	1.128	907	1.216	1.309	1.182
39	Hipertensi	17.223	24.325	31.204	37.206	40.500
	Kecamatan Tanjungpandan	11.243	15.250	20.806	22.816	24.636
	Kecamatan Badau	1.809	2.426	3.120	3.465	3.773
	Kecamatan Sijuk	2.071	4.377	3.968	6.449	7.518
	Kecamatan Membalong	1.092	1.441	2.215	3.270	3.506
	Kecamatan Selat Nasik	1.008	831	1.095	1.206	1.067
40	Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	288	296	342	327	362
	Kecamatan Tanjungpandan	167	162	186	178	213
	Kecamatan Badau	30	35	36	36	39
	Kecamatan Sijuk	39	46	61	56	56
	Kecamatan Membalong	37	39	45	45	44
	Kecamatan Selat Nasik	15	14	14	12	10
41	Persentase Perilaku Hidup Sehat Masyarakat (PHBS)	41,05	62,74	65,55	63,86	50,38
42	Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	19	22	26	36	40
	Kecamatan Tanjungpandan	10	11	11	12	12
	Kecamatan Badau	1	1	3	6	6
	Kecamatan Sijuk	2	4	4	6	10
	Kecamatan Membalong	4	4	6	10	10
	Kecamatan Selat Nasik	2	2	2	2	2
43	Angka Stunting	6,89	9,4	6,6	6,8	8,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2025

Dari data diatas, indikator yang mengalami kenaikan menunjukkan kinerja positif yaitu: rasio posyandu per satuan balita; rasio pustu per 100.000 penduduk; Jumlah Pusat Layanan Kesehatan Desa; serta Desa Bebas ODF. Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan namun menunjukkan kinerja negatif diantaranya adalah: Jumlah kasus Diabetes Melitus; Jumlah kasus Tuberkulosis; Balita Stunting; Balita Gizi Buruk; Gizi Kurang; Gizi Buruk; Diare; Kusta; Filariasis; Angka Penyakit Tidak Menular; Hipertensi; Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB); serta angka stunting. Berikutnya indikator yang mengalami penurunan dan menunjukkan kinerja yang positif adalah: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue); Jumlah Kasus HIV AIDS; Jumlah kematian ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup; Angka Kesakitan (Morbiditas); Angka Kesakitan Penyakit Menular; Pneumonia; dan DBD. Selanjutnya beberapa indikator yang mengalami penurunan dan mengindikasikan kinerja yang berkurang adalah: Rasio Posyandu per 100 balita;

Rasio dokter per 1.000 penduduk; Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk; Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk; Cakupan Data/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI); Jumlah Posyandu; Angka Kelahiran Bayi; Angka melahirkan ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup; Persentase Perilaku Hidup Sehat Masyarakat (PHBS). Selain dirinci diatas, beberapa indikator juga mengalami kondisi capaian yang stabil seperti Rasio Rumah Sakit; Jumlah Rumah Sakit; Jumlah Puskesmas; Jumlah Puskesmas Pembantu; dan Malaria.

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Belitung mengalami kenaikan hingga di angka 22,52 pada tahun 2024. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan sumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Meski jumlah Posyandu balita mengalami kenaikan, namun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, yang salah satunya bersumber dari efisiensi jumlah penyelenggaraan Posyandu. Cakupan data/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) turun menjadi 93,87 dibandingkan dengan capaian 2023 yang telah di angka 100%. Penurunan capaian ini disebabkan karena menurunnya cakupan UCI yang ada di Kecamatan Tanjungpandan (93,75%) dan Kecamatan Badau (71,4%). Pada tahun 2020 jumlah posyandu balita mengalami kenaikan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing, dan di 2023 jumlah posyandu balita sebanyak 182 posyandu.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Belitung yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Jika ditinjau dari skala wilayah Kabupaten Belitung dengan data jumlah penduduk Kabupaten Belitung sampai dengan 2023 sejumlah 189.945 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 21.105 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kabupaten Belitung belum mencukupi standar tersebut. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020, jumlah dokter meningkat menjadi 140 orang, dengan rasio 0.80 per 1000 penduduk. Pada tahun 2021, jumlah dokter menjadi 102 orang, dengan rasio 0.57 per 1000 penduduk. Sedangkan tahun 2022, jumlah dokter sebanyak 158 orang, dengan rasio 0.87 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2023 sebesar 183.694 dokter per 100.000 penduduk. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, yang mengamanatkan bahwa setiap puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2020 sampai 2024 terdapat 9 puskesmas telah dilakukan akreditasi.

Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2022 RSUD dr.H.Marsidi Judono telah terakreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah sakit (KARS).

2.1.4.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan kewenangan daerah yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat beberapa indikator untuk menggambarkan capaian pemerintah Kabupaten Belitung dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.19 Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	83,44	84,15	87,10	89,37	88,85
2	Indeks Infrastruktur Irigasi	53,55	53,74	55,85	58,87	58,89
3	Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	n/a	25,57
4	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0.21 m3/dtk	0.21 m3/dtk	0.21 m3/dtk	0.21 m3/dtk	-
5	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	34,55	33,02	33,03	33,40	33,42
6	Area baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	54,01	52,46	55,53	58,59	58,59
7	Persentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	93,55	93,55	93,55	93,55	93,55
8	Jumlah waduk yang menjadi kewenangan Kabupaten (DI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Jumlah waduk yang menjadi kewenangan provinsi (DI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	32,25	33,59	n/a	n/a	32,72
11	Jumlah waduk yang menjadi kewenangan pusat (DI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km)					
	Negara	106,56	106,56	106,56	106,56	105,54
	Provinsi	135,16	135,16	135,16	135,16	135,16
	Kabupaten	666,02	666,02	666,02	666,02	666,02
13	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten)	907,74	907,74	907,74	907,74	906,72

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Belitung Menurut Jenis Kondisi (Km)					
	Baik	580,25	587,84	543,17	552,92	562,39
	Sedang	26,95	26,94	37,5	30,51	29,36
	Rusak	58,82	51,24	74,58	64,63	17,38
	Rusak Berat	0	0	10,78	17,96	56,89
	Jumlah	666,02	666,02	666,02	666,02	666,02
15	Jaringan Irigasi					
	Jaringan Primer (m)	3.563	3.635	3.710	3.710	3.710
	Jaringan Sekunder (m)	80.317	81.956	83.629	83.629	83.629
	Jaringan Tersier (m)	NA	20.923	20.923	20.923	20.923
16	Luas lahan budidaya	84.964,75	84.964,75	84.964,75	84.964,75	84.964,75
17	Presentase ruang terbuka hijau	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha
18	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83,44	84,15	87,1	78,97	88,85
19	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	n/a	70,88	66,95	67,78	88,85
20	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah Ada (%)	52,1	54,02	54,54	55,07	55,20
21	Persentase Pengendalian daya rusak air (%)	40,44	40,46	40,57	40,59	40,62
22	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	n/a	40,57	43,03	48,02	48,44
23	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	80,48	81,85	82,78	83,29	81,52
24	Persentase pengolahan air limbah permukiman	53,88	53,98	54,79	54,79	54,92
25	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	12,73	15,83	20,02	23,04	21,54
26	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	15,87	18,59	21,3	24,02	26,73
27	Persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar	13,06	14,25	14,82	16,21	4,58
28	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60	70	90	90	90
29	Ketaatan terhadap RTRW (%)	97,6	98,03	98,24	97,26	98,26
30	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
31	Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)					
	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya (%)	100	100	100	100	100
32	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan kota (%)	30	30	30	30	30
33	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	97,6	98,03	98,24	97,26	98,26
34	Indeks Kesulitan Geografis	32,25	33,59	n/a	n/a	32,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2025

Indeks Infrastruktur Irigasi mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 58,89 di tahun 2024. Untuk Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada di angka 25,57 yang tentunya masih tergolong sangat rendah sehingga memerlukan upaya peningkatan. Indikator Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik, Area baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase Jalan Mantap Kabupaten, Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah Ada, Persentase Pengendalian daya rusak air, Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik, Persentase pengolahan air limbah permukiman, Persentase jalan lingkungan yang tertangani, Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten, Ketaatan terhadap RTRW, serta Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang mengalami peningkatan capaian di tahun 2024. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengupayakan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat terkait kewilayahan.

Sedangkan indikator Persentase jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi baik, Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik, serta Persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar mengalami penurunan capaian di tahun 2024. Capaian Persentase Luas Area Bebas Genangan Banjir stabil di angka 93,55%, yang artinya tidak ada pengurangan ataupun penambahan untuk luas area bebas genangan banjir di wilayah Kabupaten Belitung. Sama halnya dengan Persentase ruang terbuka hijau yang stabil di angka 0,037% atau 103,36 Ha, selaras dengan indikator Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan kota sebesar 30%.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta mengoptimalkan jalan yang mengalami bottleneck di Kabupaten Belitung yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Pada tahun 2020, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 555,759 km dari panjang jalan 666,024 km, dengan persentase 83,44 %. Pada Tahun 2021, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 580,253 km dari panjang jalan 666,024 km, dengan persentase 87,12 %. Pada Tahun 2022, panjang jalan kondisi baik menurun menjadi 81,55 % dari panjang jalan 666,024 km.

Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kabupaten Belitung telah memiliki RTRW yang berupa Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014-2034 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung. Dengan pesatnya perkembangan kabupaten maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya. Kondisi ini selaras dengan capaian indikator Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital dan indikator Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya yang stabil di angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Selain melihat ketercapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan indikator diatas, capaian urusan ini juga dapat dilihat melalui indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1.4.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh. Permasalahan di kawasan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data tahun 2020 di Kabupaten Belitung ada 5 Kelurahan dengan luas 62,01 Ha yang termasuk kawasan permukiman kumuh. Daerah ini ditargetkan sebagai kawasan yang dijadikan sasaran peningkatan kualitas dan permukiman. Saat ini telah terjadi pengurangan luasan Kawasan kumuh sebesar 66%. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana

prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman. Berikut capaian indikator untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Belitung:

Tabel 2.20 Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Layak Huni	77,29	77,66	81,34	81,38	81,40
2	Rasio Rumah Layak Huni	15,31	15,22	18,79	18,51	18,31
3	Persentase Luas Permukiman Kumuh	15,39	52,6	28,69	28,69	27,15
4	Indeks Permukiman	n/a	n/a	n/a	n/a	65,14
5	Indeks Infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	n/a	n/a	n/a	n/a	65,14
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	n/a	n/a	n/a	7,54	7,69
7	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang Tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	91,12	93,89	90,24	92,13	99,25
9	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak (Tanpa Air Kemasan/Air Isi Ulang)	10,80	66,31	85,23	87,47	79,27
10	Rumah Tidak Layak Huni	8.188	8.054	8.030	8.014	8.006
11	Rumah Layak Huni	27.870	28.004	35.014	35.030	35.038
12	Total Rumah	36.058	36.058	43.044	43.044	43.044
13	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipa	n/a	n/a	17,49	17,8	18,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Belitung, 2025

Secara umum keseluruhan indikator dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Belitung ini mengalami kenaikan, hanya terdapat 1 indikator yang menurun yaitu Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak (Tanpa Air Kemasan/Air Isi Ulang) dari capaian 87,47% menjadi 79,27% di tahun 2024. Sedangkan indikator lainnya mengalami kenaikan yang menunjukkan capaian positif, bahwa pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan strategi dan kebijakan yang tepat untuk penanganan masalah perumahan dan permukiman masyarakatnya. Beberapa indikator yang terlihat memiliki capaian menurun namun mengindikasikan kinerja positif adalah Persentase Luas Permukiman Kumuh, cenderung menurun signifikan hingga 27,15% pada tahun 2024.

Salah satu indikator yang seringkali menjadi sorotan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah kawasan kumuh. Di tahun 2024 persentase luas permukiman kumuh mengalami penurunan. Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kabupaten Belitung, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh.

Kegiatan RSDK Kabupaten Belitung memiliki tujuan untuk: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh; Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya; Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya; serta Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung. RSDK atau Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kabupaten Belitung merupakan kegiatan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat (*community-based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

2.1.4.4.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat (linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial dan kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Berikut indikator yang berkaitan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Belitung:

Tabel 2.21 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penegakan pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terselesaikan	96,52	100	100	100	100
2	Jumlah Polisi Pamong Praja	128	126	142	143	138
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 1000 penduduk	7,21	6,93	7,65	7,53	7,17
4	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	316	296	317	249	165
5	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100
6	Jumlah Linmas	490	490	490	490	490
7	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	27,61	26,96	26,4	25,8	25,5
8	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	5	5	5	5	5
9	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	378.448	378.448	378.448	378.448	378.448
10	Jumlah Kejadian Kebakaran dengan waktu tanggap (RTR) $\leq$ 15 menit	14	21	21	211	60
11	Jumlah Kejadian Kebakaran	27	30	25	279	72
12	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5
13	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	14,44	18,55	17,05	19,58	16,90
14	Kasus Kriminalitas					
	Jumlah Kasus Narkoba	13	19	23	32	32
	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	3	2	1	1
	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	7	8
	Jumlah Kasus Penganiayaan	12	8	12	13	13
	Jumlah Kasus Pencurian	33	27	31	43	31
	Jumlah Kasus Penipuan	9	10	11	13	8
	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	99	100	97	109	93
15	Angka Kriminalitas	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006	0,0005

Sumber: Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD dan Polres Kabupaten Belitung, 2025

Pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparaturnya dalam menegakkan peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2020, sebanyak 316 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100%, dan pada tahun 2021 jumlah pelanggaran menurun menjadi 296 dan semuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran meningkat kembali menjadi 317 dan semuanya telah dapat diselesaikan 100%. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran sebanyak 249 dan semuanya telah dapat diselesaikan 100%. Sama halnya dengan di tahun 2024 yang pelanggaran ini dapat terselesaikan 100% tepatnya sebanyak 165 kasus pelanggaran.

Terjadi penurunan jumlah polisi pamong praja, dari 143 personil di 2023 menjadi 138 personil pada tahun 2024. Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 490 personil Linmas, capaian ini bertahan hingga di tahun 2024. Sehingga menunjukkan adanya upaya konsisten dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas, juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Salah satu indikator pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Belitung. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Tersedia sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran untuk 378.448 warga yang menjadi cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Upaya ini tercermin dari menurunnya kejadian kebakaran di tahun 2024 hanya 72 kejadian kebakaran saja. Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan merespon laporan kejadian kebakaran

hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal.

Pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran yaitu 27 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 14 kejadian. Pada tahun 2021, jumlah kejadian kebakaran yaitu 30 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 21 kejadian. Pada tahun 2022 jumlah kejadian kebakaran yaitu 25 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 21 kejadian. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah kejadian kebakaran yaitu 279 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 211 kejadian. Lalu di tahun 2024 terjadi 72 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 60 kejadian. Kemudian untuk angka kriminalitas di Kabupaten Belitung juga mengalami penurunan menjadi 0,0005 di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2023 tercapai sebesar 0,0006

2.1.4.4.1.6 Sosial

Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang artinya pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial yang ada di lingkup wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Belitung telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 UPTD Dinas Sosial.

Tabel 2.22 Capaian Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	13.631	14.829	14.686	11.986	8.324
2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12.841	14.487	14.509	11.781	8.126
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar/ tertangani	94,20	97,69	98,79	98,29	97,62

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPA) Kabupaten Belitung, 2025

Pada tabel di atas diketahui bahwa Jumlah PMKS sampai dengan tahun 2024 menurun dari 13.631 orang pada tahun 2020 menjadi 8.324 di tahun 2024. Dari 8.324 PMKS tersebut, yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2024 sebanyak 8.126 yang artinya tidak secara keseluruhan. Sehingga capaian Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar/ tertangani di 2024 sebanyak 97,62%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pemberian makan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait. Penanganan PMKS oleh Pemerintah Kabupaten Belitung perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. Tidak ada hambatan dalam verifikasi dan validasi PMKS, akan tetapi memang terdapat tantangan terkait dinamika kondisi sosial di masyarakat yang menyebabkan perubahan pada masing-masing kategori PMKS.

2.1.4.4.2. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

2.1.4.4.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berasal dari sumber daya manusia dan dibedakan berdasarkan sifat serta kemampuannya. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja jasmani dan rohani, sedangkan berdasarkan kemampuannya, terdiri dari tenaga kerja terdidik, terlatih, serta tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengelolaan tenaga kerja yang optimal sangat penting untuk memastikan efisiensi dan produktivitas, baik dalam perusahaan maupun di tingkat daerah. Di Kabupaten Belitung, aspek ketenagakerjaan masih memerlukan perhatian lebih lanjut, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian daerah. Selain tingkat penyerapan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja juga berpengaruh terhadap output produksi dan pertumbuhan ekonomi. Secara lebih rinci, data mengenai capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	TPT Perempuan	4,6	4,3	4,75	5,36	5,22
2	TPT Laki-Laki	4,95	3,1	4,07	3,46	3,16
3	TPT Perdesaan	2,35	1,28	1,42	2,45	3,3
4	TPT Perkotaan	6,4	4,77	5,86	4,92	4,13
5	Jumlah Angkatan Kerja	99.692	96.844	96.818	100.297	101.656
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki	84,94	84,85	84,44	86,13	87,1
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,73	46,62	45,04	49,36	48,6
8	TPAK Berdasarkan Desa	77,26	69,75	68,49	69,27	70,36
9	TPAK Berdasarkan Kota	65,04	64,46	63,62	67,56	67,28

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
10	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja	94.886	93.445	92.658	96.145	97.709
11	Pencari kerja yang ditempatkan	133	58	80	45	64
12	Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek	18.735	21.675	24.712	16.225	18.874
13	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	34	17	7	14	11
14	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	34	17	7	14	0
15	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	13	0	0	320	32
16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	128	0	0	50	0
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35,45%	39,93%	42,04%	46,30%	36,95%
18	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	51,2
19	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi	N/A	N/A	N/A	N/A	32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Belitung, 2025

Berdasarkan data pada tabel, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki di Kabupaten Belitung menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 3,16% pada tahun 2024. Sebaliknya, TPT perempuan justru mengalami peningkatan dari 4,6% pada tahun 2020 menjadi 5,22% pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan perlunya strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pengangguran, seperti penyediaan lebih banyak lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial. Sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menginisiasi berbagai program, termasuk pelatihan keterampilan kerja, program pemagangan, bimbingan *soft skill*, serta penyelenggaraan bursa kerja. Diharapkan, program-program ini tidak hanya membantu menekan angka pengangguran tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki menunjukkan peningkatan hingga mencapai 87,1% pada tahun 2024. Namun, TPAK perempuan mengalami penurunan menjadi 48,6% di tahun yang sama. Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja terus mengalami pertumbuhan, dengan angka mencapai 101.656 orang pada tahun 2024. Jumlah pekerja yang terserap di pasar kerja juga meningkat, dengan 97.709 orang yang telah bekerja pada tahun yang sama. Data ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesempatan kerja, meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung sangat beragam, salah satunya adalah konflik antara pekerja dan pengusaha. Jumlah sengketa tenaga kerja mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan dari 34 kasus pada tahun 2020 menjadi 11 kasus pada tahun 2024. Selain itu, kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian, terutama dalam hal kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Jumlah pekerja yang terdaftar dalam Jamsostek mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir di tahun 2020 sebanyak 18.874 meningkat hingga tahun 2022 sebanyak 24.712 kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 16.225 dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 18.874 sekitar 19,18% dari total jumlah angkatan kerja yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, kemungkinan disebabkan oleh jenis pekerjaan yang tidak memfasilitasi perlindungan tersebut.

Selain jaminan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja juga penting untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan pekerja. Pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan, sementara jumlah tenaga kerja terlatih masih sangat rendah dibandingkan dengan total angkatan kerja. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan akses pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Belitung.

2.1.4.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses bagi perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh. Keberhasilan dalam penerapan pengarusutamaan gender dan hak anak dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah perempuan yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, serta jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, capaian kinerja urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender	53,11	53,02	53,42	53,47	58,82
2	Indeks Pembangunan Gender	88,28	88,29	88,84	89,21	89,70
3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	95,63	100	97,77	100	100
4	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	1	1	1	1	1
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami	12	19	20	11	14

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
	kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir					
6	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	4	8	8	2	16
7	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	2	2	1	4	6
8	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	0	0	0	0	2
9	Prevalensi kekerasan terhadap anak	5	11	10	10	17
10	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	0	0	0	0	0
11	Indeks Perlindungan Anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Indeks Ketimpangan Gender	0,575	0,506	0,516	0,287	0,361
13	Jumlah Pekerja Perempuan	35.086	31.675	30.992	33.750	33.746
14	Jumlah perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kabupaten Belitung	1.819	1.876	1.832	1.769	1.996
15	Persen partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Belitung	0,049	0,056	0,056	0,052	1,039
16	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	36.778	33.098	32.538	35.663	35.606
17	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35.086	31.675	30.992	22.950	35.606
18	Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	52,73	46,62	45,04	49,36	48,6
19	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	10	10	8	13	24
20	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga	28	28	32	51	18
21	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	18	n/a	33	51	44
22	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	18	n/a	33	51	43
23	Persentase Penyelesaian Pengaduan	94,2	97,69	98,79	98,29	97
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin						
24	Laki-laki	8,94	8,95	8,96	9,08	9,10
	Perempuan	8,07	9,08	8,36	8,65	8,80
Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin						
25	Laki-laki	11,83	11,84	11,88	11,89	11,91

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
	Perempuan	12,05	12,06	12,08	12,09	12,1
26	Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Keatas dengan Pendidikan SMA Ke atas Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki	41,96	37,68	43,31	46,51	46,37
	Perempuan	35,95	34,78	41,21	43,38	43,69
27	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dengan Pendidikan SMA Ke atas Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki	40,64	38,18	43,98	46,29	39,29
	Perempuan	38,54	37,11	43,76	43,75	31,04
28	Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki	20.031	20.045	20.771	21.110	21.284
	Perempuan	8.924	8.932	9.235	9.411	9.492
29	Sumbangan Pendapatan Perempuan					
	Laki-laki	n/a	76,51	76,77	76,76	-
	Perempuan	n/a	23,49	23,23	23,24	-
30	Kategori Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya
31	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	-	-	Pratama (501)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, DSPPPA, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Belitung, 2025

Pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung mencapai 1.876 orang, atau sekitar 0,049% dari total angkatan kerja perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.996 pekerja perempuan, atau setara dengan 1,039% dari total angkatan kerja perempuan. Peningkatan ini mencerminkan adanya peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam sektor pemerintahan serta mencerminkan upaya pengarusutamaan gender dalam dunia kerja.

Sementara itu, tindak kekerasan masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Kekerasan dapat berupa penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau tindakan lain yang bertujuan untuk melukai, merusak, atau mengintimidasi seseorang. Bentuk kekerasan yang sering terjadi meliputi kekerasan terhadap pasangan (baik istri maupun suami), kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam keluarga, hingga perdagangan manusia (*human trafficking*). Fenomena kekerasan sering kali menyerupai gunung es, di mana jumlah kasus yang dilaporkan belum tentu mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dan semakin terbukanya akses bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk mencari bantuan, Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memberikan perlindungan melalui berbagai layanan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTP2A), Kelompok Pencegahan KDRT, serta Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Pemerintah juga memfasilitasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai layanan, mulai dari konseling, layanan medis melalui rujukan ke pusat pelayanan terpadu atau rumah sakit, pendampingan hukum ke kepolisian, Pengadilan Agama (PA), dan Pengadilan

Negeri (PN). Selain itu, terdapat pula dukungan psikososial, seperti identifikasi kasus, kunjungan rumah (*home visit*), edukasi, sosialisasi, serta program pelatihan dan pemberdayaan di shelter atau rumah aman bagi para korban. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik serta pemberdayaan bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.

Berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kabupaten Belitung juga mendapatkan kategori "Madya" untuk kabupaten layak anak. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Upaya peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung ini, didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

2.1.4.4.2.3 Pangan

Urusan pangan sebagai pelayanan wajib non dasar berfokus pada upaya pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Faktor produksi, distribusi, serta pola konsumsi bahan pangan menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas pangan di daerah ini. Strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung ketahanan pangan bagi Masyarakat meliputi peningkatan produktivitas pertanian lokal, diversifikasi sumber pangan, serta penguatan sistem distribusi untuk memastikan akses pangan yang merata di seluruh wilayah. Ketahanan pangan juga dapat diukur dengan membandingkan ketersediaan pangan utama, yaitu beras, dengan tingkat konsumsinya. Berikut adalah capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Belitung.

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Ton)	86,9	83,4	84,6	83,5	86,4
2	Kebutuhan Pangan (Ton)	15.346	15.763	15.559	18.428	20.052
3	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (Ton)	1.410,98	1.008,87	454,68	442,00	568,04
4	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Ton)	16.321	18.486	19.824	23.477	26.782
5	Ketersediaan Pangan (Ton)	17.731,98	19.494,87	20.278,68	23.919,00	27.350,04
6	Total pengeluaran RT Pangan	917.281	797.998	870.831	985.795	968.940
7	Total pengeluaran RT non Pangan	1.752.785	1.626.741	1.775.224	1.887.037	1.016.893
8	Rasio	1:2	1:2	1:2	1:2	1:1,05

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
9	Skor Pola Pangan Harapan	81,70	78,90	79,90	82,20	81,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2025

Pada tahun 2024, ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung tercatat sebesar 27.350,04 Ton, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masyarakat di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan baik. Namun, Kabupaten Belitung masih sangat bergantung pada pasokan pangan yang dari luar wilayah Kabupaten Belitung. Hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan selama lima tahun terakhir di mana jumlah ketersediaan pangan dari luar daerah selalu lebih banyak dari jumlah ketersediaan pangan berdasarkan produksi sendiri. Kebutuhan pangan yang masih sangat bergantung terhadap pasokan dari luar daerah ini tergantung dari kondisi cuaca di mana pengiriman bahan pangan sebagian besar dikirim menggunakan transportasi udara ataupun laut. Faktor cuaca dapat membuat Kabupaten Belitung tidak dapat mengontrol harga pangan dengan baik dan berpotensi menimbulkan inflasi yang siklikal bila terjadi kendala pengiriman akibat cuaca ekstrem. Kabupaten Belitung perlu memikirkan strategi dalam meningkatkan ketersediaan bahan pangan dari produksi dalam daerah untuk menghindari kelangkaan pasokan dari luar daerah.

Selain diukur dari aspek ketersediaannya, ketahanan pangan juga dinilai melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menjadi indikator keseimbangan dan keberagaman pola konsumsi pangan berdasarkan kecukupan gizi. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi serta semakin baik kualitas gizinya. Pada tahun 2020, skor PPH masyarakat Kabupaten Belitung mencapai 81,70, dan mengalami peningkatan menjadi 81,90 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat, dari yang sebelumnya lebih berfokus pada sumber energi karbohidrat seperti padi-padian dan umbi-umbian, beralih ke konsumsi pangan yang lebih kaya protein. Konsumsi masyarakat Kabupaten Belitung terhadap non-pangan menunjukkan rasio 1:1,05, yang berarti sebagian besar pengeluaran masyarakat digunakan untuk kebutuhan non-pangan. Namun, pada tahun 2024, angka konsumsi non-pangan mengalami penurunan. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam pola pengeluaran masyarakat, di mana pendapatan lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pangan.

2.1.4.4.2.4 Pertanian

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Belitung, kebutuhan akan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung bagi aktivitas masyarakat akan terus meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun, ketersediaan lahan aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masih sangat terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah berupaya melakukan pengadaan lahan guna merealisasikan rencana pembangunan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sarana dan

prasarana yang terpadu, berfungsi optimal, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Berikut diberikan data capaian kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator			2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase Bersertifikat	Luas Lahan		n/a	n/a	46,01	52,47	53,59
2	Penyelesaian Kasus Negara	Tanah		11	9	11	0	0
3	Persentase Penyelesaian Lokasi	Izin		17,14	9,52	53,33	59,09	85,42
4	Persentase Pemerintah bersertifikat	Tanah Daerah Aset yang		46,3	46,14	46,26	44,9	72

Sumber: Kantor Pertanahan dan Bagian Pemerintahan Setda, BPKAD Kabupaten Belitung, 2025

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki sejumlah aset, terutama aset tak bergerak berupa tanah, yang tersebar di berbagai wilayah. Pemanfaatan aset ini dapat dioptimalkan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung dan rencana rinciannya. Berdasarkan data yang tersedia, hingga tahun 2020, sebanyak 46,3 persen dari total aset tanah Pemerintah Kabupaten telah bersertifikat, sementara sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan resmi. Pada tahun 2021, angka ini sedikit menurun menjadi 46,14 persen, namun kembali meningkat menjadi 46,26 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase tanah aset yang bersertifikat turun menjadi 44,90 persen, tetapi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 72 persen. Untuk meningkatkan pengelolaan aset tanah bagi kepentingan umum, Pemerintah Kabupaten terus melakukan upaya pengamanan administrasi, seperti pencatatan dan sertifikasi, serta pengamanan fisik melalui pemasangan pagar, papan, dan patok. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aset tanah dan bangunan yang belum sepenuhnya diamankan secara administratif maupun fisik. Selain itu, sengketa kepemilikan tanah juga masih menjadi tantangan, dengan beberapa kasus tanah aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang sedang ditangani atau terdaftar di pengadilan.

2.1.4.4.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan daerah, baik sebagai faktor yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhi. Keadaan lingkungan memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan. Pertumbuhan kota dan penduduk di Kabupaten Belitung dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan. Dampak yang ditimbulkan antara lain

meningkatnya produksi sampah perkotaan serta pencemaran udara dan air. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	39,04	44,09	73,23	72,9	61,07
2	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	1 Desa	2 Desa	8 Desa	12 Desa	12 Desa
3	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	n/a	ada	ada	ada	ada
4	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	n/a	112,13 ton	212,8 ton	201,24 ton	385,86 ton
5	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	n/a	3327 ton	4511 ton	3917 ton	4577 ton
6	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	n/a	3 Perusahaan	1 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan
7	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	n/a	1	1	2	2
8	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	39.815 Ha	39.815 Ha	39.744 Ha	39.744 Ha	39.744 Ha
9	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	n/a	17,67	17,67	18,07	21,41
10	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dok
11	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	cemar ringan (1,482)	cemar ringan (1,466)	cemar ringan (1,466)	cemar ringan (3,297)	Cemar ringan (1,701)
12	Rasio Data Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	88,97	88,04	86,94	95,52	95,52
13	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	10.116,90	11.699,76	19.673,74	19.829,21	16546,20
14	Jumlah volume produksi sampah (ton)	25.910,91	26.533,31	26.864,58	27.200,03	39947,66
15	Persentase sampah tidak tertangani	60,96	55,91	26,77	27,10	38,93
16	Persentase sampah yang tertangani	39,04	44,09	73,23	72,90	61,07
17	Jumlah TPS	25	25	25	28	28
18	Jumlah Daya Tampung TPS	16.200	16.200	16.200	18.144	18.144

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
19	Uji pencemaran air	57 Titik	57 Titik	57 Titik	44 Titik	44 Titik
20	Uji pencemaran udara	11 Titik	14 Titik	4 Titik	4 Titik	4 Titik
21	Persentase Timbunan Sampah yang Terangkut dan Terolah	39,04	44,09	73,23	72,90	61,07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Laporan KLHS RPJPD 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, Dokumen SDG's Kabupaten Belitung, 2025

Jumlah volume produksi sampah sisa aktivitas masyarakat di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Adanya peningkatan volume sampah di tahun 2024 harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penanganan sampah dengan menggunakan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi krusial untuk menjaga kebersihan dan mencegah dampak negatif yang timbul di masyarakat dan alam. Melihat data jumlah sampah yang ditangani menunjukkan adanya tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2024. Persentase sampah tertangani tercatat sebesar 39,04% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 44,09% pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 73,23%, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 72,90% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 61,07% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang cukup efektif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan yang lebih optimal.

Uji pencemaran air dan udara merupakan cara untuk memantau dan menjaga kualitas lingkungan di suatu daerah. Proses ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari beberapa titik kemudian diuji untuk mendeteksi potensi yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan dan pencemaran yang muncul dan perlu adanya penanganan. Uji pencemaran air di Kabupaten Belitung dilakukan terhadap 57 titik di tahun 2020 hingga 2022, dan kembali menurun hanya menjadi 44 titik di tahun 2023 dan 2024. Berkurangnya titik yang diuji oleh Pemerintah Kabupaten Belitung disebabkan karena sebagian titik tersebut menjadi kewajiban dari perusahaan untuk melakukan uji pencemaran air. Uji pencemaran air pada sungai cukup hanya 3 (tiga) segmen yaitu pada hulu, tengah dan hilir. Pada uji pencemaran udara di tahun 2020 terdapat 11 titik meningkat pada tahun 2021 menjadi 14 titik. Uji Pencemaran udara mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 hingga 2024 menjadi hanya 4 titik. Hal ini disebabkan karena lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteria lokasi, yaitu Kepadatan transportasi, Kepadatan pemukiman, Lokasi perkantoran, dan Lokasi industri.

2.1.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu pilar dasar dari pemerintahan. Sistem ini mencatat informasi penting tentang penduduk suatu negara atau wilayah, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan identifikasi personal lainnya untuk menjamin hak-hak dasar individu, mendukung kebijakan pemerintah, dan melindungi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, administrasi kependudukan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh populasi. Tingkat keberhasilan pengelolaan ini dapat diukur melalui capaian

kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Belitung, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	98,21	98,47	99,36	97,46	98,99
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	127.147	130.948	136.952	141.416	141.164
3	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	124.866	128.942	134.039	137.820	139.743
4	Rasio penduduk ber KTP	98,21	98,47	99,36	97,46	98,99
5	Rasio bayi berakte kelahiran	96,68	97,33	98,43	99,65	99,71
6	Jumlah Penduduk Usia Anak	50.325	50.482	48.639	51.597	51.241
a	Kecamatan Tanjungpandan	28.980	29.165	28.290	30.014	29.928
	Laki-laki	14.978	15.053	14.665	15.548	15.506
	Perempuan	14.002	14.112	13.625	14.466	14.422
b	Kecamatan Badau	3.977	4.008	3.897	4.102	4.095
	Laki-laki	2.056	2.089	2.020	2.136	2.138
	Perempuan	1.921	1.919	1.877	1.966	1.957
c	Kecamatan Sijuk	8.864	8.807	8.422	8.976	8.896
	Laki-laki	4.495	4.456	4.277	4.558	4.527
	Perempuan	4.369	4.351	4.145	4.418	4.369
d	Kecamatan Membalong	6.817	6.847	6.515	6.878	6.838
	Laki-laki	3.494	3.481	3.313	3.521	3.496
	Perempuan	3.323	3.366	3.202	3.357	3.342
e	Kecamatan Selat Nasik	1.687	1.655	1.515	1.627	1.484
	Laki-laki	882	863	791	853	775
	Perempuan	805	792	724	774	709
7	Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak	25.709	31.084	28.046	30.947	32.325
8	Kecamatan Tanjungpandan	13.052	15.938	14.756	16.491	17.524
9	Kecamatan Badau	2.787	3.234	2.972	3.172	3.236
10	Kecamatan Sijuk	4.908	5.927	5.249	5.767	5.984
11	Kecamatan Membalong	3.791	4.654	4.010	4.367	4.496
12	Kecamatan Selat Nasik	1.171	1.331	1.059	1.150	1.085
13	Rasio pasangan berakte nikah	67,06	76,07	76,51	80,32	82,06
14	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	670	684	697	708	716
15	Persentase Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	100	100	100	100	100
16	Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100
17	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	N/A	N/A	N/A	77,18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2025

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Dari data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Rasio kepemilikan KTP di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi sepanjang 2020-2024, dengan peningkatan pada 2020-2022 hingga mencapai 99,36%, namun kembali menurun menjadi 97,46% pada 2023, dan naik kembali menjadi 98,99% di tahun 2024. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya penduduk, terutama wajib KTP pemula, yang menunda pengurusan KTP. Sementara itu, rasio kepemilikan akta kelahiran bayi (0-1 tahun) mengalami kenaikan dari 99,65% pada tahun 2023 menjadi 99,71% pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan bertahap sejak 2020 hingga 2024 mencapai 82,06%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan, seperti PANTAS (Pelayanan Antar Prioritas), BEKAWAN (Membuat KIA lewat Online), Matang Pohon (Melayani Pindah Datang di tempat tujuan), dan PADUKART (Pelaporan Duka ke Ketua RT). Selain itu, penerapan KTP berbasis NIK telah berjalan, memastikan integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan publik. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas administrasi kependudukan demi kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang terbentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja membangun berkelanjutan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi dan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. IDM dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan, dengan harapan dapat terwujud kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri. IDM mengklasifikasikan desa menjadi 5 (lima) status, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi IDM untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Belitung tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0
2	Desa tertinggal	0	0	0	0	0
3	Desa berkembang	19	13	5	2	1

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
4	Desa maju	23	29	28	23	18
5	Desa mandiri	0	0	9	17	23
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100	100
7	Jumlah LSM	120	129	137	141	155
8	PKK aktif	100	100	97,96	100	100
9	Posyandu aktif	100	85,16	85,16	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2025

Pada tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Belitung berhasil menghapuskan status desa tertinggal dan sangat tertinggal, mencatatkan kemajuan signifikan dalam pembangunan desa. Jumlah desa mandiri pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 23 desa. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa-desa di Kabupaten Belitung.

Capaian pemberdayaan masyarakat Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui sejumlah indikator penting, antara lain jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, serta tingkat keaktifan PKK dan posyandu. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Belitung tetap stabil di angka 100 kelompok, menunjukkan keberlanjutan dan konsistensi dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, jumlah LSM yang ada di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari 120 pada tahun 2020 menjadi 155 pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin banyaknya organisasi non pemerintah yang berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keaktifan PKK dan posyandu juga menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan tingkat keaktifan mencapai 100% pada tahun 2023 hingga 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

2.1.4.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting baik sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan. Apabila dikelola dengan baik, maka penduduk akan menjadi modal pembangunan yang sangat esensial untuk maju dan terus berkembang. Terdapat hubungan yang erat antara penduduk dan pembangunan, yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Artinya di satu sisi, perubahan yang terjadi pada variabel-variabel kependudukan disebabkan oleh pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan variabel variabel kependudukan. Salah satu aspek penting dari proses demografi yang terkena dampak pembangunan adalah fertilitas atau kelahiran. Sementara itu variabel penting dalam menjelaskan fertilitas adalah usia perkawinan. Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Belitung disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	na	56,02	55,69	64,64	64,90
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,42	2,08	2,18	2,12
3	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	2-3	3-3	4-3	5-3	2-3
4	Persentase Akseptor KB	82,07	78,55	78,95	79,54	77,85
5	Jumlah Akseptor KB	24.343	23.596	22.990	25.683	24.500
6	Jumlah Pasangan Usia Subur	29.661	30.038	29.118	32.291	31.470
7	Jumlah Peserta Program KB Aktif	24.343	23.596	22.990	25.683	24.500
8	Cakupan Peserta KB Aktif	82,07	78,55	78,95	79,54	77,85

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2025

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, pengendalian angka kelahiran dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program ini diukur melalui jumlah akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, dan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas. Jumlah akseptor KB pada tahun 2020 mencapai 24.343 atau 82,07% dari Pasangan Usia Subur, yang kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 24.500 atau 77,85% pada tahun 2024. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada 2024 menjadi 31.470 PUS. Cakupan peserta KB aktif juga fluktuatif, dengan angka 77,85% pada tahun 2024. Keberhasilan program KB juga diukur dengan indikator *Total Fertility Rate (TFR)*, yang menunjukkan rata-rata jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang masa reproduksinya. TFR Kabupaten Belitung cenderung menurun dari 2,42 pada tahun 2020 menjadi 2,12 pada tahun 2024. Angka kelahiran total yang menurun dapat disebabkan oleh pola perkawinan yang berubah, efektivitasnya kontrasepsi, maupun adanya kondisi ketidaksuburan pada masa menyusui.

2.1.4.4.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan dalam pelayanan wajib non-dasar mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan transportasi dan mobilitas masyarakat. Urusan ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Capaian kinerja perhubungan Kabupaten Belitung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Indeks Konektivitas Antar Kecamatan (Pulau), Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum), Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Persentase Layanan Angkutan Umum, Tingkat Ketersediaan Rambu, Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan, dan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan	20	20	20	20	20
2	Persentase ruas jalan kabupaten yang terpenuhi alat kelengkapannya	80	80	82	84	85
3	Rasio Konektivitas Antar Kecamatan (Pulau)	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum (semua angkutan umum)	Turun: 8.725 Naik: 6.310	Turun: 12.683 Naik: 9.365	Turun: 9.745 Naik: 12.518	Turun: 6.250 Naik: 12.518	Turun: 15.909 Naik: 20.323
5	Jumlah uji KIR angkutan umum	2.065	1.696	1.342	1.114	992
6	Persentase layanan angkutan umum	65	65	65	65	65
7	Tingkat ketersediaan rambu	69	69	69	70	70,73
8	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29
9	Jumlah Mobil Penumpang	1.107	1.186	1.692	2.331	13.087
10	Jumlah Mobil Bis	49	50	50	51	81
11	Jumlah Mobil Barang	2.050	2.112	2.315	2.604	908
12	Jumlah Sepeda Motor	64.363	65.443	68.281	71.709	93.927
13	Indeks Infrastruktur Urusan Perhubungan	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2025

Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki 163 pulau besar dan kecil, Kabupaten Belitung memiliki daratan dan pulau-pulau kecil. Daratan terbesar ada di Pulau yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil berpenghuni salah satunya pulau Mendanau. Pulau Mendanau terletak di sebelah barat Pulau Belitung dan merupakan bagian dari Kecamatan Selat Nasik. Kecamatan Selat Nasik adalah salah satu dari lima kecamatan di Kabupaten Belitung yang terpisah dari pulau utama. Kondisi geografis ini membutuhkan dukungan infrastruktur untuk menjaga konektivitas antar wilayah, terutama antar pulau atau kecamatan.

Berdasarkan data Indeks konektivitas antar kecamatan (pulau), pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka 52,50%, yang menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan regional, transportasi, ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah belum maksimal. Sementara itu, data layanan angkutan umum menunjukkan kondisi yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu 65%. Tingkat ketersediaan rambu juga mengalami peningkatan, meskipun masih tergolong rendah yaitu 69% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 70,73% di tahun 2024. Pentingnya rambu lalu lintas tidak bisa dikesampingkan karena berdampak langsung pada keselamatan, kelancaran perjalanan, dan pengaturan arus lalu lintas. Kelancaran transportasi diantaranya didukung oleh ketersediaan kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor kabupaten Belitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kendaraan terbanyak di dominasi oleh kendaraan pribadi berupa

sepeda motor. Bertambahnya jumlah kendaraan ini di satu sisi menjadi kekuatan untuk peningkatan arus transportasi, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan kualitas udara.

2.1.4.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dalam pelayanan wajib non dasar berfokus pada pengelolaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Belitung disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Nilai indeks SPBE	3,07	2,4	3,02	3,11	3,88
2	Nilai keterbukaan informasi publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	6	6	6	7	12
4	Persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP	74,89	76,71	78,56	75,73	83,74
5	Persentase rumah tangga dengan akses internet	57,33	67,82	69,43	73,82	75,38
6	Persentase terintegrasinya sistem informasi	90,63	96,87	100	100	98,91
7	Diseminasi informasi	100	100	100	100	100
8	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	n/a	46 Sistem	47 Sistem	47 Sistem	47 Sistem
9	Jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE yang ada	n/a	46 Sistem	47 Sistem	47 Sistem	47 Sistem

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2025

Kinerja komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung menunjukkan kondisi fluktuasi. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun 2024 mencapai 3,88 dengan predikat baik, meningkat 0,77 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat 3,11 dengan predikat baik. SPBE memberikan peluang untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan. Sistem ini juga meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya SPBE dalam mendukung berbagai sektor pembangunan,

dan untuk itu, telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggaraan sistem informasi. Di era digital ini, arus informasi yang deras memerlukan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan baik. Keberhasilan keterbukaan informasi publik bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

2.1.4.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah. Di Kabupaten Belitung, sektor UMK yang meliputi pertanian, barang dan jasa, serta koperasi, berkontribusi signifikan terhadap daya saing ekonomi lokal, inovasi produk, dan pengembangan industri kreatif. UMK juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Belitung melalui peningkatan produktivitas usaha. Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian dari sistem ekonomi kerakyatan yang mendukung pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diharapkan keberadaan koperasi kedepannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gambaran untuk capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase koperasi berkualitas	35,56	31,88	43,17	41,26	35,62
2	Persentase koperasi aktif (%)	71,43	71,88	72,02	72,59	73
3	Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan usaha kecil	3,85	3,79	3,67	3,63	3,78
4	Persentase usaha mikro dan kecil yang naik kelas (%)	0	0	0	0	0
5	Persentase peningkatan jumlah usaha mikro	11,92	-4,06	3,32	1,09	2,28
6	Persentase peningkatan jumlah usaha kecil	21,96	-5,84	0	0	6,59
7	Omset koperasi per aktif (ribu rupiah)	78.302.227	93.098.521	89.098.521	96.586.230	167.801.337

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
8	Jumlah BPR/LKM	3.546	4.282	4.586	n/a	n/a
9	Omset per usaha mikro	n/a	n/a	365.686.000	369.810.000	378.324.000
10	Jumlah koperasi	189	192	193	197	200
11	Jumlah koperasi aktif	135	138	139	143	146
12	Jumlah usaha mikro	20.503	19.671	20.324	20.565	21.013
13	Jumlah usaha kecil	822	774	774	774	825
14	Jumlah usaha menengah	63	7	7	7	9
15	Jumlah seluruh UMKM	21.399	20.452	21.105	21.326	21.847
16	Jumlah usaha mikro dan kecil	18.975	20.445	21.098	21.319	21.838
17	Persentase usaha mikro dan kecil	88,67	99,96	99,96	99,96	100
18	Jumlah Anggota Koperasi	16.254	16.242	16.034	16.058	16.121

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2025

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Belitung menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase koperasi aktif mencapai 73%, yang mengalami peningkatan sebesar 0,41% dari capaian tahun 2023 yaitu 72,59%. Meskipun ada peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa koperasi aktif yang ada di Kabupaten Belitung sudah cukup baik, namun masih ada potensi untuk mengoptimalkan pengembangan lebih lanjut agar jumlahnya dapat terus meningkat. Sementara itu, Jumlah UMKM di Kabupaten Belitung menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kewirausahaan. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah UMKM tercatat sebesar 21.399 Unit, yang kemudian naik menjadi 21.847 Unit pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan yang positif dalam sektor UMKM, yang menjadi pilar utama dalam perekonomian lokal dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, jumlah anggota koperasi mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, jumlah anggota koperasi tercatat sebesar 16.121 orang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam partisipasi masyarakat terhadap koperasi, yang perlu perhatian lebih agar anggota koperasi dapat terus berkembang, meningkatkan keterlibatan, dan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian daerah.

2.1.4.4.2.12 Penanaman Modal

Sektor penanaman modal merupakan salah satu indikator yang menunjukkan gambaran iklim investasi yang ada di Kabupaten Belitung. Iklim investasi yang baik dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang mencakup berbagai sektor. Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat

melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut disajikan capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Belitung.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Nilai realisasi investasi PMDN (dalam juta rupiah)	497.256,80	390.381,20	968.699,30	985.565,20	1.048.722,376
2	Nilai realisasi investasi PMA (dalam US\$)	20.652.000	7.239.700	3.173.800	7.184.700	4.533.649,10
3	Peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA	n/a	-63,92%	-45,71%	97,23%	-31,67%
4	Realisasi Penanaman Modal (Investasi) (dalam ribu) (PMDN dan PMA)	632.609.960	493.807.550	1.014.243.000	1.091.898.000	1.116.727.000
5	Pertumbuhan investasi	7,98	-21,94	105,39	7,66	2,27
6	Jumlah izin usaha yang dikeluarkan	2,331	3,328	3,119	3,694	4,895
7	Jumlah investor PMDN	313	150	126	316	217
8	Jumlah investor PMA	160	60	69	89	76
9	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	1.891	312	872	1.193	1.246
10	Rasio daya serap tenaga kerja	3,99	1,35	4,47	2,94	

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2025

Nilai realisasi investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) mengalami fluktuasi pada tiga tahun pertama kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.390.381.200.000,- meningkat menjadi Rp.968.699.300.000,- di tahun 2022 kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi Rp.985.565.200.000,- dan Rp.1.048.722.376.000,- di tahun 2024. Angka ini menunjukkan minat investor dalam negeri untuk menanamkan modal di Kabupaten Belitung bertambah di tahun 2024. Sementara itu, jumlah investasi yang berasal dari luar negeri (PMA) menurun dua tahun berturut sejak tahun 2021 yang mana sebelumnya di tahun 2020 sebesar US\$ 20.652.000,- menjadi US\$ 7.239.700,- di tahun 2021 kemudian turun kembali di tahun 2022 menjadi sebesar US\$ 3.173.800 setelah itu di tahun 2023 baru ada peningkatan menjadi US\$ 7.184.700 dan Kembali mengalami penurunan menjadi US\$ 4.533.649,10 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung belum sepenuhnya pulih setelah pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pembatasan pergerakan masyarakat dan berimbas pada penurunan jumlah investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

2.1.4.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam definisi tersebut, karakteristik penduduk di Kabupaten Belitung didominasi oleh pemuda yang berada dalam usia angkatan kerja. Kelompok usia angkatan kerja ini seharusnya menjadi aset penting bagi kemajuan Kabupaten Belitung. Namun, upaya yang maksimal untuk pemberdayaan pemuda tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Persentase organisasi pemuda yang aktif menunjukkan peningkatan yang terbatas antara 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angkanya mencapai 87,5%, kemudian sedikit meningkat menjadi 88% pada tahun 2020. Angka ini tetap stagnan dan tidak mengalami perubahan signifikan hingga tahun 2024. Berikut diberikan gambaran capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Belitung.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Indeks pembangunan pemuda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah atlet binaan	-	-	-	40	40
4	Jumlah atlet berprestasi	86	39	347	219	291
5	Jumlah sarana prasarana olahraga	425	425	347	348	348
6	Jumlah cabang olahraga yang terfasilitasi	16	16	16	16	16
7	Jumlah organisasi pemuda	24	24	24	24	24
8	Jumlah pemuda berprestasi	-	-	11	7	3
9	Jumlah pemuda wirausaha	566	566	566	566	1254
10	Persentase organisasi pemuda yang aktif	87,5	88	88	88	88
11	Persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha	0,27	0,4	1,31	1,25	5,97
12	Jumlah organisasi olahraga	26	30	30	30	30
13	Jumlah pemuda berprestasi selain olahraga	86	6	10	8	3
14	Jumlah lapangan olahraga	347	347	347	348	348
15	Rasio lapangan olahraga	0,0019	0,0019	0,0019	0,0018	0,0018
16	Jumlah Grup Kesenian per 1.000 Penduduk	62	62	62	62	62
17	Jumlah Klub Olahraga per 1.000 Penduduk	291	213	213	213	213
18	Jumlah Gedung Olahraga per 1.000 Penduduk	350	232	232	232	232

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2025

Di Kabupaten Belitung, terdapat 30 organisasi olahraga serta 291 atlet berprestasi yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pencapaian ini mencerminkan perkembangan positif dalam sektor

olahraga yang melibatkan pemuda, baik dari sisi jumlah organisasi maupun jumlah atlet yang berhasil meraih prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pemuda Kabupaten Belitung dalam bidang olahraga semakin terfasilitasi dan berkembang, yang dapat berkontribusi tidak hanya dalam meningkatkan prestasi daerah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan membangun karakter pemuda melalui kegiatan yang positif dan produktif.

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Sampai dengan tahun 2020 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun sebanyak 347 lapangan olahraga. Pada tahun 2023 bertambah 1 lapangan lagi sehingga menjadi 348 lapangan olahraga. Penambahan lapangan ini masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah penduduk juga terus bertambah. Sebaran prasarana olahraga di Kabupaten Belitung juga belum merata. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu terus berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kabupaten Belitung dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Pada sektor kewirausahaan, persentase pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mencapai 5,97 persen dari total wirausaha. Meskipun jumlah pemuda wirausaha stagnan antara tahun 2020 hingga 2023, sebanyak 566 pemuda, namun terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 1.254. Di sisi lain, prestasi pemuda di Kabupaten Belitung mengalami penurunan antara tahun 2020 hingga 2024, dengan hanya 3 orang yang meraih prestasi di luar bidang olahraga pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pemuda di Kabupaten Belitung memiliki potensi dan peluang untuk berwirausaha serta mengembangkan diri di berbagai bidang.

2.1.4.4.2.14 Statistik

Kinerja statistik merupakan elemen kunci dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memahami realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar. Statistik adalah alat penting bagi pembuat kebijakan, peneliti, bisnis, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang informatif dan cerdas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem statistik yang mencakup berbagai sektor, seperti demografi, ekonomi, dan sosial, yang berguna sebagai dasar untuk merencanakan dan mengevaluasi berbagai program pembangunan. Kinerja statistik Kabupaten Belitung dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	N/A	N/A	100	100	100
2	Jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan	1	1	1	2	2
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	N/A	100	100	100

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
4	Indeks Pembangunan Statistik	N/A	N/A	N/A	N/A	2,6

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2025

Pada tahun 2020, jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan adalah 1 dokumen, kemudian bertambah menjadi 2 dokumen pada tahun 2023-2024. Pemerintah Belitung harus melakukan peningkatan kinerja statistik karena masih sangat rendah, padahal hal ini sangat penting bagi keterbukaan informasi yang akuntabilitas kepada masyarakat, yang akan berdampak pada kinerja lainnya. Di sisi lain, presentase data statistik sektoral yang dipublikasikan serta perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah selama tiga tahun terakhir telah mencapai 100%, menunjukkan adanya pemanfaatan yang optimal terhadap data yang tersedia.

2.1.4.4.2.15 Persandian

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan persandian. Tujuan lainnya adalah meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan informasi, serta memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola komunikasi sandi antar perangkat daerah. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase pengamanan sistem elektronik dan informasi	83,33%	94,73%	97,36%	97,36%	100%
2	Nilai keterbukaan informasi publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase ketersediaan jaringan intranet dan akses internet publik	N/A	N/A	93,54%	93,54%	93,54%
4	Persentase laporan masyarakat yang ditindaklanjuti	78,6%	78,03%	83,89%	86,95%	86,82%
5	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2025

Dalam tiga tahun terakhir, perangkat daerah di Kabupaten Belitung telah sepenuhnya menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah, dengan mencapai angka 100%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap keamanan data dan informasi yang sangat penting untuk menjaga integritas komunikasi serta mencegah ancaman terhadap data sensitif. Meskipun begitu, langkah-langkah keamanan ini harus terus dijaga dan

ditingkatkan agar tidak menurun di masa depan, seiring dengan berkembangnya teknologi dan tantangan baru dalam dunia digital.

Selain itu, pengamanan sistem elektronik dan informasi di Kabupaten Belitung menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, mencapai 100%. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa sistem informasi yang ada terlindungi dengan baik. Sementara itu, persentase laporan masyarakat yang ditindaklanjuti juga mengalami kenaikan, mencapai 86,82% pada tahun 2024, yang menunjukkan responsivitas pemerintah dalam menangani pengaduan masyarakat. Persentase ketersediaan jaringan intranet dan akses internet publik di Kabupaten Belitung mencapai 93,54%, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kebutuhan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur teknologi agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara merata.

2.1.4.4.2.16 Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menekankan keterkaitan yang erat antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nilai-nilai budaya serta sikap mental, seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ketekunan, dan daya juang, berperan sebagai pendorong produktivitas serta kemajuan suatu bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat identitas nasional, meningkatkan persatuan, mencerdaskan masyarakat, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	n/a	100	100	100	30
2	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	38	38	8	8
3	Indeks pembangunan kebudayaan	n/a	51,9	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah kelompok seni budaya yang dibina	60	60	61	69	71
5	Seni yang berprestasi	3	0	3	4	4
6	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8	9	4	4	4
7	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	n/a	1	3	2	0
8	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	38	38	38	38	38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bakesbangpol Kabupaten Belitung, 2025

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Belitung mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 hingga 2023, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam mempertahankan dan meningkatkan kegiatan budaya sebagai bagian dari pelestarian warisan daerah serta daya tarik wisata. Sementara itu, jumlah cagar budaya yang dikelola tetap stagnan di angka 38 sejak tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan belum adanya penambahan atau pengembangan dalam pengelolaan situs budaya. Di sisi lain, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi mengalami peningkatan, meskipun masih terbatas, dengan jumlah yang bertambah menjadi empat pada tahun 2023, meningkat satu karya dari periode 2021-2022 yang hanya mencatat tiga karya budaya. Namun, upaya pelestarian terhadap benda, situs, dan kawasan cagar budaya mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2024 tingkat pelestarian turun hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Penurunan ini menandakan perlunya perhatian lebih dalam menjaga dan merawat warisan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mendukung perkembangan kesenian, menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi misalnya di Gedung Nasional, Gedung Kesenian Belitung, Balai Budaya Tanjung Pandan, Rumah Adat Belitung, atau di Lapangan Umum/Terbuka seperti Lapangan Merdeka di Tanjungpandan. Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Belitung, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya.

2.1.4.4.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2022, Penyelenggaraan Perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya mengembangkan perpustakaan yang dapat meningkatkan minat dan budaya membaca di kalangan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyediaan Aplikasi Perpustakaan Digital yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan secara online. Selain itu, Kabupaten Belitung juga telah memiliki situs web resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang memudahkan akses terhadap layanan perpustakaan dan informasi kearsipan. Berikut diberikan Gambaran mengenai capaian kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan	-56,6	39,9	43,98	12,89	0,64

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	4.341	7.221	12.889	14.797	14.893
3	Nilai/tingkat kegemaran membaca masyarakat	12,27	14,18	16,03	68,76	74,14
4	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan/ kecamatan	35	35	34	34	34
5	Jumlah perpustakaan yang dibina	50	40	45	29	39
6	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	12	5	7	3	14
7	Persentase koleksi daerah dan naskah kuno yang dilestarikan	18,76	8,41	7,16	6,9	8,45
8	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	13.932	14.934	15.608	16.270	16.453
9	Jumlah pustakawan	3	3	6	11	11
10	Jumlah tenaga teknis	2	5	5	5	5
11	Jumlah penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	6
12	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	100.590	110.340	114.908	117.970	125.580
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	7	78,67	74,27	80,47
14	Indeks Literasi Digital	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung, Perpustakaan RI, 2025

Kondisi pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mencapai 80,47%, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 74,27%. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat guna memperkuat budaya literasi di masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan upaya ini adalah meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dalam lima tahun terakhir, yang pada tahun 2024 mencapai 14.893 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung menunjukkan adanya minat yang semakin besar terhadap akses informasi dan bahan bacaan, yang juga didukung oleh peningkatan koleksi buku di perpustakaan daerah. Pada tahun 2024, jumlah koleksi judul buku bertambah hingga mencapai 16.453 buku, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan bahan bacaan yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat. Dengan perkembangan ini, diharapkan literasi masyarakat terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan sumber daya perpustakaan yang semakin baik.

2.1.4.4.2.18 Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan mencakup berbagai kegiatan, seperti kebijakan, pembinaan, serta pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, serta penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi. Di Kabupaten Belitung, penyelenggaraan kearsipan diatur melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati, yang mencakup berbagai aspek, termasuk Sistem Kearsipan, Pedoman Pemeliharaan Arsip

Dinamis, Pengelolaan Arsip Terjaga, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta Tata Kearsipan. Pengelolaan arsip daerah memiliki peran krusial dalam administrasi pemerintahan karena berkontribusi terhadap efisiensi, akuntabilitas, serta pemeliharaan warisan sejarah daerah. Kinerja pengelolaan arsip yang baik di Kabupaten Belitung menjadi faktor utama dalam memastikan transparansi pemerintahan serta kelestarian informasi penting bagi masa depan.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase PD yang mengelola arsip secara tertib, rapi, dan andal (baku)	36,59	43,85	64,1	79,49	79,49
2	Persentase tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	4,76	23,33	49,30	52,88	66,15
3	Capaian nilai audit kearsipan eksternal Kabupaten	58,21	N/A	63,34	71,48	81,60
4	Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	0	30,09	59,34	72,48	78,67
5	Jumlah PD, unit kerja, BUMD, dan Sekolah Negeri	190	190	194	195	172
6	Jumlah PD, unit kerja, BUMD, dan Sekolah Negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	4	5	6	9	19
7	Jumlah desa yang telah mendapat pembinaan dan pendampingan kearsipan	16	24	34	42	42

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung, 2025

Kinerja pengelolaan arsip daerah di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari semua perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Republik Indonesia mencapai 79,49%. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip daerah, salah satunya dengan mengadopsi sistem arsip berbasis elektronik guna mempercepat proses pencatatan, penyimpanan, dan akses informasi.

Perkembangan positif dalam pengelolaan arsip juga terlihat dari peningkatan jumlah instansi yang menerapkan sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2020, hanya terdapat 4 perangkat daerah (PD), unit kerja, BUMD, dan sekolah negeri yang telah menerapkan sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 19 lembaga. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam memperkuat sistem kearsipan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan dokumen penting bagi kepentingan daerah dan masyarakat.

2.1.4.4.3. Fokus Urusan Pilihan

2.1.4.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan dan kelautan adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut. Untuk meningkatkan nilai produksi sektor perikanan dan kelautan, Pemerintah harus melaksanakan manajemen yang optimal mulai dari tahap pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran yang dimana dalam proses tersebut Selain itu, Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan nelayan selaku aktor penting dalam meningkatkan produktivitas perikanan. Kabupaten Belitung dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah tersebut harus memaksimalkan potensinya. Berikut merupakan capaian Pemerintah Kabupaten Belitung pada urusan perikanan dan kelautan.

Tabel 2.41 Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Indeks Harga Yang Diterima Nelayan/ Pembudidaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	52.912,5	45.564,32	43.021,47	42.220,30	40.774,86
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-6,93%	-13,89%	-5,58%	-1,86%	-3,42%
Jumlah Kapal (Unit)	3,881	3,924	3,956	4,251	4,250
Jumlah Nelayan (Orang)	6,299	6,296	6,302	6,316	6,312
Jumlah Alat Tangkap Ikan di Laut (Unit)	4,909	4,906	4,912	4,924	4,924
Jumlah Pembudidaya (RTP)	273	247	273	249	264
Produksi Garam (Ton)	0	0	0	0	0
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	68	373	366	291	293
Jumlah Ikan yang diolah (Ton)	8.096.195	10.518.881	8968,07	7464,25	9726,83
Pengolah Ikan (Orang)	68	373	366	291	293
Nilai Tukar Nelayan Pemasar (Orang)	110,3	114,4	113,35	112,52	109,83
Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	19,91	21,67	22,07	23,25	22,10
Indikator kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100,4	102,6	104,8	106,02	105,56

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 19,91% pada tahun 2020 menjadi 22,10% pada tahun 2024. Capaian tersebut sudah menunjukkan perolehan yang positif. Namun, capaian tersebut dinilai dapat memperoleh hasil yang lebih baik apabila produksi perikanan tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2020, produksi perikanan mencapai 52.912,5 ton. Produksi perikanan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 40.774,86 ton pada tahun 2024.

Penurunan produksi tersebut perlu menjadi perhatian. Walaupun produksi perikanan mengalami penurunan, sumber daya manusia yaitu nelayan dan pembudidaya serta fasilitas pendukung yang mencakup jumlah kapal, jumlah alat tangkap, dan jumlah unit pengolah ikan mengalami peningkatan. Kemudian, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merepresentasikan kesejahteraan mengalami penurunan dari 110,3 pada tahun 2020 menjadi 109,83 pada tahun 2024. NTN sempat memperoleh capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu 113,35. Capaian dalam lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nelayan masih lebih besar dari pengeluarannya. Tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Belitung adalah pengelolaan sumber daya kelautan yang belum optimal dan sumber daya manusia yang mayoritas adalah nelayan tradisional dengan peralatan yang kurang memadai.

2.1.4.4.3.2 Pariwisata

Pemanfaatan potensi pariwisata merupakan sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan pariwisata berimplikasi pada terciptanya permintaan akan konsumsi dan investasi yang menggerakkan roda perekonomian. Upaya pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menempuh beberapa langkah yang mencakup pembangunan industri pariwisata, promosi pariwisata, destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Cakupan industri pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi wisata, jasa konsultasi, jasa pramuwisata, dan SPA. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu mengembangkan pariwisata dengan optimal untuk menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Upaya tersebut akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan capaian Pemerintah Kabupaten Belitung pada urusan pariwisata.

Tabel 2.42 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan	134.266	184.57	301.906	301.870	286.843
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata (%)	n/a	37	64	-0,01	-5
Perjalanan Wisata / Biro Wisata	16	8	24	27	21
Rumah Minum/Caffe	63	45	95	138	74
Restoran/Rumah Makan	114	183	410	544	994
SPA	3	-	5	4	3
Hotel	53	37	43	42	43
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	8	2	6	5	2
Futsal	37	37	37	37	37
Pramuwisata	5	7	14	5	4
Jumlah destinasi wisata	67	68	74	79	90
Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola obyek wisata	18	20	20	21	21
Spending of money	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Length of stay	4	2,36	2,36	1,66	1,97
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	n/a	n/a	n/a	n/a	13,24

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan perkembangan capaian urusan pariwisata dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung berhasil meningkatkan jumlah destinasi wisata dari 67 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024. Adapun destinasi wisata unggulan mencakup Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang, dan Pulau Lengkuas. Pengembangan destinasi wisata tersebut dilaksanakan secara kolaboratif sehingga jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata juga meningkat dari 18 pada tahun 2020 menjadi 21 pada tahun 2024.

Destinasi wisata yang semakin berkembang berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan pesat tetapi dengan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 134.266 yang kemudian meningkat dengan signifikan sehingga mencapai 310.906 pada tahun 2022 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun. Sejak itu, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dengan capaian 286,843 pada tahun 2024. Lalu, fasilitas pendukung pariwisata yang mencakup café dan rumah makan mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah hotel mengalami penurunan. Sama halnya dengan *length of stay* atau lama tinggal wisatawan yang mengalami penurunan dari 4 hari pada tahun 2020 menjadi 1,6 hari pada tahun 2023. Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pariwisata adalah penyebaran informasi yang belum optimal, kualitas pelayanan yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata yang ada, dan kualitas infrastruktur.

2.1.4.4.3.3 Pertanian

Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditas unggulan. Komoditas unggulan tersebut dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan pelayanan pada sektor pertanian. Sektor pertanian terdiri dari lapangan usaha atau subsektor, seperti perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Nilai bruto dari subsektor tersebut berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan hasil pertanian. Pengembangan sektor pertanian menghasilkan peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan nilai tambahan dan daya saing, pemenuhan bahan baku industri, dan pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal atau ketahanan pangan. Vitalnya peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan Kabupaten Belitung untuk mengembangkan sektor tersebut secara optimal. Berikut merupakan capaian produksi Kabupaten Belitung pada urusan pertanian.

Tabel 2.43 Capaian Urusan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi padi sawah (ton)	2.168,36	1.538,17	694,74	675,57	868,80
Jumlah produksi jagung (ton)	512,76	467,25	673,13	991,72	925,34
Jumlah produksi kedelai (ton)	0	0	0	0	0
Jumlah produksi kacang tanah (ton)	55,35	65,73	81,05	114,39	114,73
Jumlah produksi kacang hijau (ton)	0	0	0	0	0
Ubi kayu (ton)	1.337,05	1.120,05	1.764,05	1.886,18	1.851,88
Ubi jalar (ton)	19,25	44,1	59,33	103,97	104,28
Bawang merah (ku)	40	0	56	246	30
Cabe rawit (ku)	2.047	1.715	2.599	11.092	7.372,45
Cabe besar (ku)	2.515,40	798,85	1.471,80	4.869,75	4.509,86
Tomat (ku)	312	261	852	3.661	1.725,10
Mangga (ku)	1.891	2.109	1.181	4.937	5.654,50
Nangka (ku)	1.105	870	402	1.547	1.451
Pepaya (ku)	432	461	377	64.698	6.422
Pisang (ku)	4.798	1.339	1.126	13.311	2.969,40
Tebu (ton)	0	0	0	0	0
Tembakau (ton)	0	0	0	0	0
Produksi tanaman pangan terhadap PDRB (ton)	2.204,66	1.576,37	710,4	679,66	870,20
Produksi hortikultura (ton)	471,46	328,38	412,62	1.716,95	1.183,73
Luas panen tanaman pangan (Ha)	548	490	223	211	239,30
Luas panen tanaman hortikultura (Ha)	83,7	76,73	109,7	170,28	164,19

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2025

Grafik di atas menyajikan capaian urusan pertanian dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, produksi tanaman pangan mengalami penurunan yang drastis dari 2.204,66 ton pada tahun 2020 menjadi 870,20 ton pada tahun 2024. Penurunan tersebut diikuti penurunan luas tanaman pangan dari 548 ha pada tahun 2020 menjadi 239,30 ha pada tahun 2024. Salah satu tanaman pangan yang mengalami penurunan adalah padi. Sementara itu, produksi tanaman hortikultura mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 471,46 ha pada tahun 2020 menjadi 1.183,73 ha pada tahun 2024. Luas tanaman hortikultura juga mengalami peningkatan dari 83,7 ha pada tahun 2020 menjadi 164,19 ha pada tahun 2024. Mayoritas tanaman hortikultura, seperti cabai, tomat, nangka, mangga, dan lain-lain mengalami peningkatan.

Tantangan yang dihadapi pada sektor di atas adalah keterbatasan lahan, perubahan iklim, minimnya akses terhadap teknologi pertanian, dan rendahnya produktivitas karena teknik budidaya yang masih tradisional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, akses terhadap teknologi dan informasi, dan juga bantuan permodalan bagi petani. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah dapat menghasilkan program peningkatan kualitas pertanian, diversifikasi produk pertanian dan pembangunan pasar pertanian yang terintegrasi. Berikut merupakan capaian urusan peternakan.

Tabel 2.44 Capaian Urusan Peternakan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	1.802	1830	850	858	845
Jumlah Populasi Ternak Kuda (ekor)	9	9	9	9	9
Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	5.577	2837	753	309	391
Jumlah Populasi Ternak Domba (ekor)	57	46	-	-	0
Jumlah Populasi Ternak Babi (ekor)	748	1059	1148	967	988
Jumlah Populasi Ternak Ayam Kampung (ekor)	37.575	67.974	110.69	166.171	201.889

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (ekor)	136.684	214.983	255.161	297.702	258.07
Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (ekor)	3.628.368	4.487.638	3.672.014	3.113.067	2.698.116
Jumlah Populasi Ternak Itik (ekor)	6.710	2.865	2.006	7.237	9.924
Jumlah Produksi Daging Sapi (Kg)	554.680	418.459	432.633	423.931	395.365
Jumlah Produksi Daging Kambing (Kg)	32.062	62.909	49.473	25.300	20.178
Jumlah Produksi Daging Domba (Kg)	-	191	0	-	0
Jumlah Produksi Daging Babi (Kg)	113.171	46.973	47.070	55.86	56.846
Jumlah Produksi Daging Ayam Kampung (Kg)	89.683	79.94	113.516	167.622	202.81
Jumlah Produksi Daging Ayam Petelur (Kg)	281.300	20.754	53.724	100.610	115.639
Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging (Kg)	3.027.878	7.340.433	3.137.249	4.968.558	4.917.860
Jumlah Produksi Daging Itik (Kg)	14.043	8.772	5.772	6.353	12.072
Nilai Produksi Daging Sapi (Rp)	77.461.800.000	82.539.484.952	67.452.700.000	29.407.744.832	60.667.968.520
Nilai Produksi Daging	4.712.610.000	13.366.050.000	7.805.750.000	1.236.977.571	3.228.480.000

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kambing (Rp)					
Nilai Produksi Daging Domba (Rp)	-	6.874.800.000	-	-	-
Nilai Produksi Daging Ayam Pedaging (Rp)	96.435.055.000	401.219.865.000	263.942.462.000	161.924.731.136	195.650.912.775
Nilai Produksi Daging Itik (Rp)	821.560.500	478.125.000	259.740.000	217.981.510	603.600.000
Jumlah Produksi Telur Itik (Kg)	51.6	31.1	20	24.6	54.472
Jumlah Produksi Telur Ayam Kampung (Kg)	23.100	97.200	126.800	200.900	267.176
Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur (Kg)	2.354.900	935.300	1.468.200	1.953.800	1.849.923
Nilai Produksi Telur Ayam (Rp)	60.973.950.000	31.030.050.000	52.975.504.000	75.706.467.000	73.765.497.397
Nilai Produksi Telur Itik (Rp)	2.167.200.000	1.306.200.000	840.000.000	1.033.200.000	2.287.824.000
Produksi daging ternak besar (sapi, kambing, ...) (ton)	586,742	484,58	482,681	505,092	415,54

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan peternakan Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Secara keseluruhan, produksi daging ternak besar mengalami penurunan dari 568,741 ton pada tahun 2020 menjadi 415,54 ton pada tahun 2024. Jumlah populasi ternak sapi, kambing, dan domba mengalami penurunan. Bahkan, jumlah domba mencapai 0 pada tahun 2024 yang dimana terjadi penurunan sebanyak 57 ekor pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah populasi ternak babi mengalami peningkatan dari 748 ekor menjadi 988 ekor pada tahun 2024. Kemudian, jumlah produksi ayam mengalami peningkatan sedangkan itik mengalami penurunan.

Penurunan produksi ternak besar berimplikasi pada penurunan nilai produksinya. Nilai produksi daging sapi pada tahun 2020 adalah Rp77.461.800.000. Capaian tersebut menurun sehingga mencapai Rp 60.667.968.520 pada tahun 2024. Nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun

2021 dengan capaian Rp82.539.484.952 sedangkan nilai produksi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan capaian Rp29.407.744.832. Kemudian, nilai produksi ayam mengalami peningkatan, tetapi itik mengalami penurunan.

2.1.4.4.3.4 Perindustrian

Industri merupakan berbagai jenis perusahaan yang memproduksi barang dari barang belum jadi menjadi barang siap pakai yang memiliki nilai tambah. Berdasarkan kategorinya, industri dibagi menjadi industri besar, industri sedang, dan industri kecil. Pembangunan sektor perindustrian adalah upaya penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Industri yang berkembang dengan baik meningkatkan produksi barang dan jasa yang kemudian berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan investasi. Sebagai *leading sector*, perindustrian juga berkontribusi bagi peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian lainnya, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan transportasi.

Pertumbuhan sektor industri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi regional yang lebih cepat karena memicu perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Peranan sektor industri yang begitu vital menjadi sinyal bagi Pemerintah untuk mengembangkan sektor tersebut. Upaya tersebut akan menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu menghasilkan strategi dan kebijakan yang dapat mengembangkan sektor perindustrian. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada sektor perindustrian.

Tabel 2.45 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,94	12,33	13,27	13,01	12,67
Pertumbuhan sektor industri	0,14	4,82	9,05	4,92	
Pertumbuhan Industri (Unit Usaha)	2.242	2.272	2.312	2.352	2.407
Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20	20	22	23
Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Tambang	1,82	1,2	1,9	n/a	n/a
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,94	12,33	13,15	13,02	12,67

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan perindustrian Kabupaten Belitung yang menunjukkan perkembangan positif selama lima tahun. Secara keseluruhan, indikator-indikator di atas mengalami peningkatan. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 11,94 pada tahun 2020 menjadi 12,67 pada tahun 2024. Kemudian, pertumbuhan sektor industri mengalami peningkatan dari 0,14% pada tahun 2020 menjadi 4,92% pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 9,05%.

Pertumbuhan usaha industri juga meningkat secara konsisten dari 2.242 pada tahun 2020 menjadi 2.407 pada tahun 2024. Selain itu cakupan bina kelompok pengrajin dan pertumbuhan industri pengolahan non tambang juga mengalami peningkatan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor perindustrian adalah kurangnya dukungan untuk permodalan UMKM, rendahnya daya saing produk lokal, dan keterbatasan akses terhadap pasar global. Oleh karena itu Pemerintah perlu menghasilkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri dengan memudahkan perizinan usaha, menyediakan fasilitas, membangun infrastruktur, dan menguatkan akses pasar lokal serta internasional agar produk lokal dapat bersaing. Selain itu Pemerintah dapat berkolaborasi dengan swasta untuk mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.4.3.5 Perdagangan

Sektor perdagangan adalah sektor yang berkontribusi pada peningkatan capaian Produk Domestik Bruto (PDRB). Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup penyediaan dan pendistribusian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri melalui mekanisme pasar atau operasi khusus barang-barang kebutuhan masyarakat baik dalam lingkup domestik maupun negara. Pengembangan sektor perdagangan penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan ekspor terhadap komoditi-komoditi unggulan yang memiliki daya saing dan memenuhi kebutuhan domestik. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan perdagangan.

Tabel 2.46 Capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	10,35	10,22	10,93	10,61	10,31
Pertumbuhan sektor perdagangan	-8,94	5,98	14,26	1,78	-0,67
Jumlah Pedagang	1.325	1.325	1.325	1.325	1.391
Jumlah kelompok pedagang	3	3	3	3	3
Nilai ekspor bersih perdagangan	172.948.745	281.112.658	215.050.586	214.519.007	221.450.793
Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan	-8,94	5,98	14,26	1,78	-0,67

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan perdagangan Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, kontribusi perdagangan terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan dengan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, adalah 10,35% yang kemudian mengalami penurunan

sehingga mencapai 10,22%. Satu tahun kemudian, kontribusi perdagangan terhadap PDRB meningkat dengan capaian 10,93%. Pada dua tahun terakhir, penurunan terjadi secara berturut-turut dimana kontribusi perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2023 mencapai 10,61% dan pada tahun 2024 mencapai 10,31%. Penurunan tersebut disertai pertumbuhan sektor perdagangan tidak berjalan dengan maksimal, Pada tahun 2020, pertumbuhan sektor perdagangan adalah -8,94%. Capaian tersebut mengalami peningkatan yang pesat sehingga mencapai 14,26% pada tahun 2020. Namun, perlambatan yang drastis langsung terjadi sehingga pertumbuhan sektor perdagangan mencapai -0,67% pada tahun 2024. Tantangan utama dalam sektor perdagangan adalah daya saing produk yang masih rendah dan akses pasar yang terbatas.

2.1.4.4.3.6 Transmigrasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan transmigrasi adalah urusan pemerintahan pilihan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Transmigrasi merupakan program yang bertujuan untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk dengan melakukan pemindahan dari wilayah yang padat ke wilayah jarang penduduk sehingga Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Untuk mencapai tujuan transmigrasi, Pemerintah harus menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan atau pembinaan transmigran yang berkualitas dari aspek kompetensi, mental dan daya juang. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belitung harus melaksanakan program-program pengembangan kapasitas transmigran untuk memperoleh pembangunan yang maksimal. Program Transmigrasi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang belum pernah dilaksanakan dikarenakan tidak ada urgensi bahwa perlu adanya penyeimbangan penyebaran penduduk di Kabupaten Belitung.

2.1.4.4.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.1.4.4.4.1 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yaitu pengolahan informasi dan data yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis dan/atau asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang digunakan untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Pemanfaatan penelitian penting untuk menemukan bukti yang akurat untuk dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan sehingga menghasilkan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah yang ingin diatasi. Selanjutnya, pengembangan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang dimiliki atau menghasilkan teknologi baru guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri sehingga berdaya guna bagi masyarakat. Pelaksanaan pengembangan berperan dalam menemukan kebijakan atau solusi yang inovatif sehingga dapat melaksanakan kebijakan yang efektif dan efisien. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.47 Realisasi Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penelitian Daerah yang Diterbitkan	0	0	0	0	0
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	40	33,33	100	100	33,33
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	71,43	68	67,07	72,88	50,00
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	35,29	76,92	38,71	29,03	19,35
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	43,72	93,75	62,5	62,5	62,50
Jumlah Peraturan daerah yang Diselesaikan	0	1	1	1	2

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Mayoritas indikator mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase implementasi kelitbangan mengalami penurunan dari 40% pada tahun 2020 menjadi 33,33% pada tahun 2024. Padahal, pada tahun 2022 dan 2023, persentase implementasi kelitbangan sempat mencapai 100%. Kemudian, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan juga mengalami penurunan dari 71,43% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2024. Terkait inovasi, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah menurun dari 35,29% menjadi 19,35%. Sementara itu, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mengalami peningkatan dari 43,71% pada tahun 2020 menjadi 62,50 pada tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung pada urusan penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan.

2.1.4.4.2 Keuangan

Pelayanan pada urusan keuangan merupakan upaya untuk mengelola sumber dana keuangan daerah secara efektif. Pengelolaan keuangan daerah mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Proses-proses tersebut harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan daerah terhindar dari penyalahgunaan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan pembangunan daerah. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan keuangan.

**Tabel 2.48 Realisasi Capaian Urusan Keuangan Kabupaten Belitung
Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	52,65	48,19	55,95	47,56	48,26
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	44,83	40,02	44,21	36,15	41,36
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	9,74	9,23	8,99	8,27	6,91
Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	0,81	0,74	0,74	0,70	0,68
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	8,59	8,21	8,52	8,49	9,02
Persentase SILPA terhadap APBD	13,22	14,37	16,45	16,75	9,33
Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	21,96	24,25	20,76	20,28	23,67
Rasio Desentralisasi Fiskal	16,94	18,29	16,97	16,70	18,93
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	95,17	132,74	100,88	104,98	109,70
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	111,77 6	124,68	118,41	126,83	119,52
Persentase Peningkatan PAD	-8,75	14,65	1,16	-0,76	-0,851
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB (Rp)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	74,7644

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Belitung adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sehingga sudah bersifat akuntabel. Kemudian, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan dari 16,94 pada tahun 2020 menjadi 18,93 pada tahun 2023 yang menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri semakin meningkat. Lalu, rasio efisiensi keuangan daerah juga mengalami kenaikan dari 95.17 menjadi 109,70 sehingga menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien. Selain itu, rasio efektivitas keuangan daerah juga menunjukkan peningkatan dari 111,776 pada tahun 2020 menjadi 119,52

pada tahun 2024 yang menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai target anggaran semakin maksimal. Terakhir, persentase SILPA terhadap APBD mengalami penurunan dari 13,22% menjadi 9,33% pada tahun 2024. Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Belitung menunjukkan hasil yang cukup positif. Tantangan dalam keuangan daerah sempat terjadi akibat covid-19 yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

2.1.4.4.3 Kepegawaian

Pelayanan pada urusan kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi motor penggerak pemerintahan sehingga dapat menghasilkan kinerja dan pelayanan yang baik. Pada pelaksanaannya, urusan kepegawaian meliputi perekrutan, pengembangan, dan manajemen pegawai. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan kepegawaian.

Tabel 2.49 Realisasi Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	72,86	68,96	71,56	78,63	79,58
Persentase ASN yang mengikuti pelatihan formal	24,34	38,04	40,41	39,57	39,32
Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan struktural	50	44,04	39,49	30,50	39,55
Persentase pelanggaran pegawai	0,28	0,03	0,06	0,03	0,06
Jumlah ASN	3.226	3.386	3.430	3.442	3.293
Indeks Norma, Standar, prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	88,28
Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 jp per Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	48,59

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan kepegawaian Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Mayoritas indikator menunjukkan hasil yang positif. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 mencapai 72,86. Kemudian, perolehan tersebut mengalami penurunan sehingga mencapai 68,96. Sejak itu, indeks profesionalitas ASN terus mengalami peningkatan sehingga memperoleh 78,63 pada tahun 2023. Capaian tersebut diikuti peningkatan persentase ASN yang mengikuti pelatihan formal dari 24,34% pada tahun 2020 menjadi 39,32% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase ASN yang mengikuti pelatihan struktural mengalami penurunan dari 50% pada tahun 2020 menjadi 39,55% pada tahun 2024. Peningkatan kualitas ASN juga ditunjukkan melalui menurunnya persentase pelanggaran pegawai.

Tantangan yang dihadapi dalam urusan kepegawaian adalah masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan, padahal, program pengembangan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi pejabat. Adapun penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan diklat jarang dilakukan.

2.1.4.4.4.4 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD berfungsi untuk mendukung DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya agar lembaga perwakilan rakyat tersebut dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya. Untuk memenuhi fungsinya, sekretariat DPRD memiliki tugas untuk menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli untuk memudahkan pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD ini dipimpin oleh sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan sekretariat DPRD.

Tabel 2.50 Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	28,6	40	81,25	66,67	63,63

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, 2025

2.1.4.4.4.5 Sekretariat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekretariat daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi perumusan, kebijakan, koordinasi pemerintahan, dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan daerah.

Tabel 2.51 Realisasi Capaian Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	n/a	Sedang (2,63)	Sedang (3,1432)	n/a	Masih dalam proses
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (53,94)	CC (54,62)	CC (57,71)	BB (75,14)	BB (78,82)
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	69,09	82,47	64,05	73,43	83,35
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (%)					
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) (%)	n/a	B- (3,10)	B (3,56)	B (3,89)	A- (4,02)
Indeks reformasi hukum	n/a	n/a	n/a	45,61	97,84
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	B (60,03)	B (60,90)	B (60,98)	B (63,52)	B (64,68)
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,394	3,6	3,72	3,531	3,584

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan sekretariat daerah Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Indeks reformasi birokrasi merupakan indikator yang menunjukkan perbaikan tata Kelola pemerintahan dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Secara keseluruhan, perkembangan indeks reformasi birokrasi di atas menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan dari 53,94 pada tahun 2020 menjadi 75,14 pada tahun 2023 merepresentasikan semakin baiknya tata pemerintahan Kabupaten Belitung. Kemudian, indeks kepuasan masyarakat terhadap sekretariat daerah juga mengalami peningkatan dari 3,394 pada tahun 2020 menjadi 3,584 pada tahun 2024. Selain itu, Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan dan Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga mengalami peningkatan.

2.1.4.4.4.6 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pelayanan pada urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk menjamin bahwa kegiatan, prosedur, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek

dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.52 Realisasi Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	60,03	60,9	60,98	63,52	64,68
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	-	86,1	85,53	76,61	76,55
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (53,94)	CC (54,62)	CC (57,71)	BB (75,14)	BB (78,82)
Indeks Survei Penilaian Integritas	n/a	80,72	73,35	76,61	76,55
Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase tindak lanjut temuan	100	80,8	69,2	35,71	31,41
Jumlah temuan BPK	6	11	10	26	24
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	15,13	1,45	0,13	4,17	1,83

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belitung, 2025

Tabel di atas menyajikan capaian urusan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung selama lima tahun dari 2020 sampai 2024. Nilai SAKIP menunjukkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Belitung yang memuat perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. Adapun nilai SAKIP Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir memperoleh predikat "B" atau "Baik". Perolehan nilai SAKIP Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari 60,03 pada tahun 2020 menjadi 64,68 pada tahun 2024. Kemudian, level kapabilitas APIP merupakan indikator yang mengukur kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Capaian level kapabilitas APIP pada tahun 2020 dan 2021 adalah "Level 2" yaitu APIP telah memiliki infrastruktur dan sistem yang memadai untuk mendukung tugas pengawasan. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir, level kapabilitas APIP memperoleh "Level 3" yaitu yang menunjukkan bahwa APIP mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi terhadap suatu kegiatan. Selain itu, APIP juga mampu memberikan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Lalu, penilaian tingkat maturitas SPIP merupakan indikator yang digunakan mengukur kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat maturitas SPIP Kabupaten Belitung berada pada "Level 2" yang menggambarkan

bahwa sistem pengendalian internal mulai terstruktur dengan pengendalian yang lebih terdefinisi. Peningkatan terjadi dalam tiga tahun terakhir, tingkat maturitas SPIP mencapai "Level 3" yaitu sistem pengendalian internal sudah terdefinisi secara baik dengan pengendalian yang terstruktur dan terdokumentasi. Terakhir, persentase tindak lanjut temuan mengalami penurunan yang drastis dari 100% pada tahun 2020 menjadi 31,41% pada tahun 2024.

2.1.4.4.4.7 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik bergerak dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi dan sosial, serta pembinaan kerukunan antar berbagai golongan yang mencakup suku, agama, ras, dan lain-lain. Tujuan pelayanan tersebut untuk menjaga keutuhan bangsa, stabilitas politik, keseimbangan ekonomi, dan kohesi sosial, adapun Lembaga yang berwenang pada bidang tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Berikut merupakan capaian Kabupaten Belitung pada urusan kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 2.53 Realisasi Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Persentase konflik sosial yang ditangani	100	100	100	100	100
Indeks Kerukunan Umat Beragama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung, 2025

2.1.4.4.4.8 Perencanaan

Perencanaan merupakan alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Berdasarkan undang-undang, perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menemukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah dapat melakukan perencanaan strategis untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses tersebut mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, penentuan misi dan tujuan, serta formulasi strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Melalui proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mencapai tujuan pembangunan dengan efektif. Berikut merupakan capaian urusan perencanaan Kabupaten Belitung.

Tabel 2.54 Realisasi Capaian Urusan Perencanaan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	94,3	99,35	91,02	95,2	100
Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, 2025

2.1.4.4.9 Kewilayahan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Pengukuran tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintah agar melakukan perbaikan kinerja sehingga pelayanan yang dihasilkan lebih berkualitas. Aspek-aspek yang diukur umumnya mencakup prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan, kesopanan dan keramahan petugas, serta kewajaran biaya. Berikut merupakan capaian IKM Kabupaten Belitung.

Tabel 2.55 Realisasi Capaian Urusan Kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,84	84,85	86,88	88,28	89,62

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2025

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal

2.1.4.5.1. Pendidikan

Capaian urusan pendidikan di Kabupaten Belitung juga dapat dilihat berdasarkan capaian indikator SPM bidang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.56 Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	126,67 %	100%	103,03 %	100% (5.874 orang)	90,98% (5.344 orang)	100% (5.874 orang)	64,86% (3.810 orang)	100% (6.111 orang)	97,79% (5.976 orang)
2.	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	107,69%	100%	105,56%	100% (28.583 orang)	85,08% (24.320 orang)	100% (28.583 orang)	77,08% (22.033 orang)	100% (28.819 orang)	99,5% (25.715 orang)
3.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	92,27%	100%	92,38%	100% (289 orang)	195,97% (309 orang)	100% (29.830 orang)	0,97% (289 orang)	100% (990 orang)	11,88% (417 orang)

Sumber: Dokumen SPM Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sesuai dalam data capaian SPM pendidikan diatas, diketahui bahwa target masing-masing indikator SPM adalah 100%, namun dari tahun 2020 hingga 2024 belum semua indikator mampu mencapai target tersebut. Indikator Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di tahun 2020 telah tercapai melampaui target yaitu di persentase capaian 126,67%, lalu di tahun 2021 tercapai di persentase 103,03%. Namun di tahun 2022, indikator ini belum mampu mencapai target, hanya tercapai 90,98% atau sebanyak 5.344 orang dari 5.874 target. Sedangkan di tahun 2023, ditargetkan mencakup 5.874 orang, namun masih tercapai di 3.810 orang saja. Kemudian di tahun 2024, dari target sebesar 100%, masih tercapai di 97,79%.

Indikator berikutnya yaitu Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) yang ditargetkan 100%, tercapai 107,69% di tahun 2020 yang artinya telah melampaui target. Begitu juga di tahun 2021 yang telah melampaui sampai 105,56% capaian. Namun capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami

penurunan, dari 28.583 target (100%), hanya tercapai di 24.320 target (85,08%). Begitu juga di tahun 2023 yang belum mencapai target, hanya sebanyak 22.033 orang sedangkan ditargetkan pada 28.583 orang. Untuk di tahun 2024, indikator ini tercapai pada 99,5% yang artinya hampir mencapai 100% yang artinya menyeluruh ke semua target indikator. Indikator ketiga yaitu Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di tahun 2020 baru tercapai 92,27%. Capaian ini meningkat di tahun 2021 menjadi 92,38% dan melonjak di tahun 2022 mencapai 195,97% atau 309 orang dari target sebesar 289 orang. Namun di tahun 2023, capaian indikator ini hanya sebanyak 289 orang dari target sebanyak 29.830 orang. Begitu juga di tahun 2024 yang ditargetkan sampai 100%, hanya mencapai 11,88%.

2.1.4.5.2. Kesehatan

Tabel 2.57 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	100% (3.413 orang)	90,89% (3.102 orang)	100% (3.587 orang)	83,47% (2.994 orang)	100% (3.111 orang)	85,15% (2.649 orang)	100% (3.120 orang)	78,08% (2.436 orang)	100% (2.411 orang)	83,24% (2.007 orang)
2.	Jumlah ibu bersalin yang ada mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (3.257 orang)	85,35% (2.780 orang)	100% (3.426 orang)	91,01% (3.118 orang)	100% (2.696 orang)	93,87% (2.787 orang)	100% (2.978 orang)	88,58% (2.638 orang)	100% (2.411 orang)	95,98% (2.314 orang)
3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (3.197 orang)	99,50% (3.181 orang)	100% (3.262 orang)	93,04% (3.035 orang)	100% (2.828 orang)	99,43% (2.812 orang)	100% (2.836 orang)	91,75% (2.602 orang)	100% (2.241 orang)	101,43% (2.273 orang)
4.	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (10.874 orang)	92,65% (10.075 orang)	100% (13.132 orang)	79,80% (10.479 orang)	100% (13.639 orang)	80,86% (11.029 orang)	100% (13.640 orang)	83,56% (11.397 orang)	100% (10.275 orang)	92,50% (9.504 orang)
5.	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (27.578 orang)	90,25% (24.889 orang)	100% (27.763 orang)	100% (27.763 orang)	100% (27.950 orang)	100% (27.950 orang)	100% (27.184 orang)	98,86% (26.875 orang)	100% (27.892 orang)	96,35% (26.875 orang)
6.	Jumlah warga negara usia produktif (15-59 th)	100% (114.224 orang)	52,20% (59.628 orang)	100% (116.285 orang)	76,29% (89.382 orang)	100% (119.144 orang)	80,20% (95.554 orang)	100% (116.415 orang)	85,42% (99.441 orang)	100% (127.724 orang)	82,63% (105.536 orang)

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
7.	Jumlah warga negara usia lanjut (60 th keatas) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (16.682 orang)	97,59% (16.281 orang)	100% (16.859 orang)	85,52% (14.418 orang)	100% (17.670 orang)	88,46% (15.631 orang)	100% (19.490 orang)	91,91% (17.913 orang)	100% (19.490 orang)	94,50% (18.419 orang)
8.	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (45.699 orang)	37,69% (17.223 orang)	100% (45.462 orang)	53,53% (24.335 orang)	100% (46.730 orang)	66,81% (31.222 orang)	100% (48.883 orang)	76,11% (37.206 orang)	100% (53.221 orang)	76,10% (40.500 orang)
9.	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (2.435 orang)	120% (2.917 orang)	100% (2.422 orang)	128,31% (3.130 orang)	100% (2.490 orang)	117% (2.935 orang)	100% (2.604 orang)	113,90% (2.966 orang)	100% (2.836 orang)	106,67% (3.025 orang)
10.	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (295 orang)	97,63% (288 orang)	100% (302 orang)	97,68% (295 orang)	100% (309 orang)	110% (342 orang)	100% (319 orang)	102,51% (327 orang)	100% (323 orang)	112,69% (364 orang)
11.	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (2.524 orang)	67,67% (1.708 orang)	100% (3.457 orang)	113,54% (3.925 orang)	100% (3.802 orang)	105% (3.992 orang)	100% (4.321 orang)	119,49% (5.163 orang)	100% (3.384 orang)	143,56% (4.858 orang)
12.	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (3.764 orang)	90,32% (3.400 orang)	100% (4.391 orang)	102,57% (4.504 orang)	100% (4.003 orang)	102% (4.103 orang)	100% (3.772 orang)	93,19% (3.515 orang)	100% (3.267 orang)	98,37% (3.214 orang)

Sumber: Dokumen SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sesuai dengan data diatas, target dari keseluruhan indikator SPM Kesehatan ini berada di angka 100%, namun belum keseluruhan indikator dapat mencapai target ini di kurun waktu 5 tahun terakhir. Indikator yang telah berhasil melampaui target 100% sampai di tahun 2023 diantaranya adalah: Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (113,90%); Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (102,51%); serta indikator Jumlah warga negara terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (119,49%). Sedangkan indikator lainnya seperti Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan (78,08%); Jumlah ibu bersalin yang ada mendapatkan pelayanan kesehatan (88,58%); Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (91,75%); Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (83,56%); Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (98,86%); Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (85,42%); Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (91,91%); Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (76,11%); serta Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (93,19%) masih belum mencapai target 100%. Sehingga memerlukan upaya tambahan untuk peningkatan capaian agar pelayanan kesehatan ini menyeluruh ke semua masyarakat Kabupaten Belitung.

2.1.4.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Tabel 2.58 Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100% (2.200 jiwa)	126,72% (2.788 jiwa)	100% (3.342 jiwa)	100% (3.342 jiwa)	100% (2.128 jiwa)	100% (2.128 jiwa)	100% (544 jiwa)	100% (544 jiwa)	100% (1.500 jiwa)	100% (1.500 jiwa)
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100% (600 jiwa)	-	100% (452 jiwa)	100% (452 jiwa)	100% (1.397 jiwa)	100% (1.397 jiwa)	-	-	100% (200 jiwa)	116% (232 jiwa)

Sumber: Dokumen SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Belitung telah berhasil mencapai target 100% untuk keseluruhan indikatornya yang ada dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini dapat dilihat dari tabel capaian indikator SPM diatas, bahwa indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik dari kurun waktu 5 tahun terakhir senantiasa stabil pada capaian 100%. Yang artinya keseluruhan masyarakat Kabupaten Belitung telah mendapatkan layanan untuk kebutuhan air minum dan juga penanganan air limbah.

2.1.4.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.59 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	100% (10 unit)	100%	100%	100%	100% (2 unit)	100%	100%	100%
2.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Terdapat dua indikator SPM untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu dicapai oleh Kabupaten Belitung, yaitu Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Kedua indikator ini memiliki target yang sama yaitu 100%. Dalam ketercapaiannya, kedua indikator SPM ini telah mencapai 100% yang artinya pemerintah Kabupaten Belitung dapat memenuhi capaian indikator ini. Untuk indikator terkait dengan relokasi, tidak ada angka capaian unit karena memang pada dasarnya tidak ada rumah warga yang mengalami relokasi akibat kegiatan pemerintah. Sehingga tidak ada kegiatan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung.

2.1.4.5.5. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.60 Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100% (101 orang)	99,01% (100 orang)	100% (83 orang)	100% (83 orang)	100% (84 orang)	100% (84 orang)	100% (88 orang)	100% (88 orang)	100% (65 orang)	100% (65 orang)
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (23.934 orang)	90,74% (21.717 orang)	100% (181.735 orang)	87,14% (158.369 orang)	100% (181.735 orang)	91,78% (166.790 orang)	100% (179.621 orang)	100% (179.621 orang)	100% (179.621 orang)	100% (179.621 orang)
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (54 orang)	55,56% (30 orang)	100% (181.735 orang)	87,14% (158.369 orang)	100% (181.735 orang)	91,78% (166.790 orang)	100% (179.621 orang)	100% (179.621 orang)	100% (179.621 orang)	100% (179.621 orang)
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% (21.717 orang)	7,49% (1.627 orang)	100% (3.012 orang)	100% (3.012 orang)	100% (850 orang)	100% (850 orang)	100% (3.012 orang)	100% (3.012 orang)	100% (2.377 orang)	100% (2.377 orang)

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (18 orang)	83,33% (15 orang)	100% (38 orang)	76,32% (29 orang)	100% (22 orang)	96,32% (19 orang)	100% (279 orang)	100% (279 orang)	100% (72 orang)	100% (72 orang)

Sumber: Dokumen SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator SPM dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Belitung belum mencapai target 100%. Terlihat seperti indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota tercapai di angka 88,32%. Kemudian indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tercapai sebesar 94,42%. Berikutnya terdapat indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tercapai 78,05%. Lalu indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 88%, serta indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai pada 92,10%. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Belitung untuk menyusun strategi dan kebijakan yang tepat agar indikator tersebut dapat mengalami peningkatan dan mencapai target.

2.1.4.5.6. Sosial

Tabel 2.61 Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	705 orang	134 orang	100% (30 orang)	100% (30 orang)	100% (30 orang)	100% (30 orang)	100% (30 orang)	100% (30 orang)	100% (30 orang)	100% (30 orang)

No.	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	244 orang	129 orang	219 orang	172 orang	100% (86 orang)	100% (86 orang)	100% (15 orang)	100% (15 orang)	100% (15 orang)	100% (15 orang)
3.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.163 orang	1.084 orang	1.163 orang	1.121 orang	100% (1.154 orang)	100% (1.154 orang)	100% (60 orang)	100% (60 orang)	100% (60 orang)	100% (60 orang)
4.	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (39 orang)	100% (39 orang)	100% (25 orang)	100% (25 orang)
5.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100% (32 orang)	100% (32 orang)	100% (41 orang)	100% (41 orang)	100% (18 orang)	100% (18 orang)	100% (24 orang)	100% (24 orang)	100% (48 orang)	100% (48 orang)

Sumber: Dokumen SPM Bidang Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Dari data diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator SPM urusan sosial di mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 telah tercapai 100%. Terjadi peningkatan persentase capaian dari masing-masing indikator SPM yang dilaksanakan oleh urusan sosial di Kabupaten Belitung ini. Capaian ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator yang diutamakan untuk urusan sosial salah satunya di Kabupaten Belitung telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keharusan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Capaian ini perlu dipertahankan hingga di tahun berikutnya agar para penyandang disabilitas, anak terlantar, masyarakat lanjut usia yang terlantar, gelandangan dan pengemis, serta warga korban bencana mendapatkan layanan sosialnya sesuai kebutuhan.

2.1.4.6 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	%	103,89 9	104,0 5	71,587	95,12	97,79	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	102,82 2	96,04	99,446	98,63	95,71	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	89,906	69,26	92,162	79,87	78,86	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	11,765	0,2	0,969	11,53	42,12	
B	Kesehatan							
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		0,071	0,69	1,304	1,274	0,86	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	33,333	33,33	33,333	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,888	83,46	85,149	100	83,24	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85,355	91,01	93,87	100	95,97	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,500	93,04	99,434	100	101,42	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		92,652	79,8	80,864	100	92,49	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,249	100	100	100	96,35	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	52,203	76,29	80,2	100	86,62	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,596	85,53	88,461	100	94,5	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	37,688	53,53	66,81	100	76,09	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	119,795	128,31	117,871	100	106,66	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	97,627	97,68	110,68	100	112,69	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	67,67	113,54	104,997	100	143,55	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	95,723	102,57	102,498	100	98,37	
C	Pekerjaan Umum							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	63,138	63,13	63,647	63,66	63,66	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	10,698	10,7	10,698	10,7	10,69	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		54,024	51,63	51,632	51,86	52,46	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	80,477	76,85	76,796	78,73	79,59	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	83,796	82,79	69,977	69,98	70,11	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	91,168	92,31	87,184	87,6	88,85	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		71,396	88,96	95,27	100	48,88	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0	19,23	
D Perumahan								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	%	0	0	0	0	0	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	14,232	36,67	66,554	66,55	66,55	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	22,708	22,34	18,655	18,618	18,59	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	%	8,658	39,74	42,974	100	100	
E Ketentraman								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,01	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	25	25	28,571	62,5	72,72	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	171516	158,369	0	100%	100%	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	10430	158,369	0	100%	100%	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	orang	222	3,102	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83,333	76,32	86,364	68,89	83,33	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	14,44	18,55	17,05	19,58	16,9	
F	Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	86,473	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	
G	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	6,25	6,25	6,45	5,88	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0	0,32	0,405	0,39	2,49	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,002	0,006 036	7,655	7,801 7474	53,13	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	39,37	65,8	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	4,574	13,24	23,14	39,13	64	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,274	0,35	42,4	48,47	44,11	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,018	0,018	0,015	100	96,15	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0003092	33,529	32,835	52,46	23,28	
I	Pangan							
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	%	0,151	0,26	0,227	0,158	0,083	
J	Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	0	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	0	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100	100	100	100	0	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	0	0	0	0	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	
K	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		67,62	62,09	69,25	68,9	69,84	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	44,76	52,03	73,233	72,9	61,06	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	85,714	62,5	60,714	64,28	56,25	
L	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
1	Perekaman KTP Elektronik	%	98,206	98,46	97,856	97,457	98,99	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	51,086	61,57	53,816	59,978	63,08	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,68	97,33	98,426	98,881	99,18	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	9,677	74,19	19,355	74	74,19	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	100	0	100	100	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	46,15	69,231	51,51	50	
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,42	2,42	2,08	2,18	2,18	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	82,071	78,55	78,955	79,53	77,85	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,363	7,5	8,239	7,404	7,102	
O	Perhubungan							
1	Rasio konektivitas Kabupaten		17,26	52,5	0,65	0,52	0,52	
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	%	80	0,76	80,47	0,29	0,29	
P	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	64,516	83,87	93,548	93,548	93,54	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	71,429	90,48	100	98,076	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	94,71	86,5	85,913	85,426	71,33	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	25,397	50,48	31,088	41,84	35,61	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	11,395	10,46	100	100	45,59	
R	Penanaman Modal							
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	7,98	-22	5,39	7,65	2,27	
S	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,06	0,41	1,307	1,254	2,72	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,004	77,66	77,709	74,671	75,44	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	17	30	263	12	3	
T	Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	
U	Persandian							
	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	45,271	59,53	63,411	64,031	68,68	
V	Budaya							
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	21,05	
W	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		12,27	14,09	60,54	68,77	74,14	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		4,189	7	9,53	74,27	80,47	
X	Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		24,99	25	46,52	52,88	66,15	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		30,83	22,83	23,33	32,54	58,91	
Y	Kelautan dan Perikanan							
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di wilayah Provinsi	Ton	53065,44	45.744.08	87,799	84,487	95,22	
Z	Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	67,015	-74,83	136,829	89,2	49,33	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	%	61,112	43,04	62,939	-1,13	-6,28	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	9,593	14,19	26,228	26,07	24,91	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		2,064	255,74	4,026	4,13	4,2176	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,358	7,17	11,883	12,59	13,24	
AA	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	402,365	3,22	318,565	651,12	661,15	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	0	96,103	37,89	
AB	Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	52,118	100	99,001	83,27	83,27	

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	86,653	52,08	76,28	83,51	81,41	
AC	Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	1,817	1,34	1,761	1,73	2,33	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	100	50	30	0	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	0	6,45	0	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	95	95	95	75	

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah mencakup hak dan tanggung jawab entitas wilayah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Hak dan tanggung jawab ini diukur dalam bentuk uang dan mencakup seluruh aset yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seluruh kegiatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diremehkan. Pengelolaan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Manajemen keuangan daerah harus berfokus pada kepentingan masyarakat, dan untuk itu perlu disajikan secara jelas, efektif, dan efisien. Pendekatan ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi sejarah kinerja pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, perilaku data dan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah, serta proyeksi ketersediaan dana pembangunan di Kabupaten Belitung untuk dua tahun mendatang.

Landasan yuridis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Belitung berpegang pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan panduan komprehensif yang menjadi acuan utama dalam mengelola keuangan daerah. Dengan berpegang pada landasan yuridis ini, Pemerintah Kabupaten Belitung diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penilaian kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Belitung disertai kondisi Neraca Daerah Kabupaten Belitung. Tinjauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Belitung dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sedangkan tinjauan terhadap Neraca Daerah Kabupaten Belitung difokuskan pada perkembangan aset daerah, kewajiban serta ekuitas dana yang didalamnya terdapat analisis Neraca Daerah yang meliputi perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah daerah yang mencakup semua rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. APBD mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan kegiatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

- 1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- 2) APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 5) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;

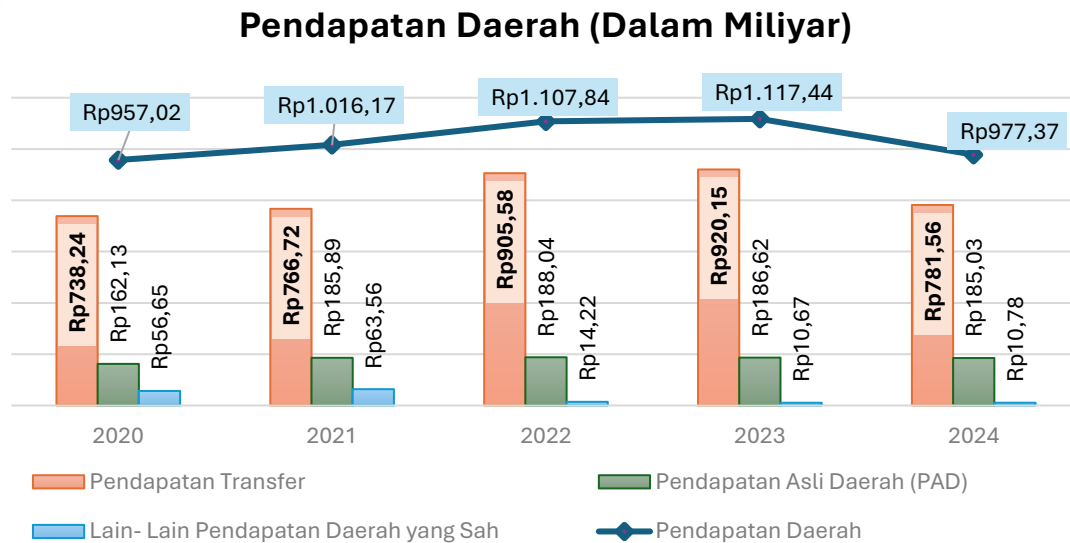
- 6) Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung meliputi perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, didefinisikan sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan ini meliputi semua penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak perlu dikembalikan. Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang mencakup transfer dari pemerintah pusat serta transfer dari provinsi dan daerah lain, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan, mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Pendapatan Transfer juga menunjukkan kontribusi yang stabil dan substansial dari pemerintah pusat serta provinsi. Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memberikan kontribusi penting dalam keseluruhan pendapatan daerah. Berikut ini adalah perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinyatakan dalam milyar rupiah, yang menunjukkan tren positif dalam peningkatan penerimaan daerah. Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah):



Gambar 2. 61 Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Tren peningkatan pendapatan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat perkembangan pendapatan Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2020- 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88%. Sepanjang tahun 2020 – 2024 tercatat hanya terdapat dua kali penurunan pertumbuhan pendapatan yakni pada tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan puncak pertumbuhan tertinggi yakni pada tahun 2022 yang mencapai 3% dari tahun 2021. Tren pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.63 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	6,18%	9,02%	0,87%	-12,53%	0,88%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14,65%	1,16%	-0,76%	-0,85%	3,55%
1.2	Pendapatan Transfer	3,86%	18,11%	1,61%	-15,06%	2,13%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3,92%	17,49%	-0,05%	-14,64%	1,68%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	2,93%	27,10%	23,65%	-19,55%	8,53%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00%	-77,63%	-24,97%	0,00%	-25,65%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan regulasi yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai penerapan prinsip desentralisasi. Sumber-sumber PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Nilai PAD Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.55%. Nilai PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 162.134.305.440,46, mengalami peningkatan mencapai 14,65% menjadi Rp 188.041.448.784,53. Tahun 2023 PAD justru mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 0.87% yang mencapai Rp 186.621.508.495,80. Tahun 2024 mengalami penurunan kembali diangka -0.85% yang mencapai Rp185.033.079.282,33. Penurunan PAD pada tahun 2024 bila memperhatikan komponen PAD bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yang turun cukup drastis sebesar -25,47% dan penurunan yang bersumber dari retribusi sebesar 2,65%. Sedangkan untuk pajak dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai -7,76%. Perlu menjadi perhatian bahwa pada tahun 2024 penurunan Pertumbuhan PAD yang signifikan, mengingat bahwa tren pertumbuhan PAD selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Jika dilihat dari nilai komposisinya, maka hampir keseluruhan komposit PAD menunjukkan rata-rata pertumbuhan dengan nilai positif kecuali pada Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -4.22%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi rata-rata pertumbuhan dari pos Retribusi Daerah yang mencapai 47,37% dan sedangkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan mencapai 9,87%. Merujuk lebih dalam ke komposit pembentuknya Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan merupakan komponen yang secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 merupakan tahun akibat pandemi Covid-19 yang mana menurunkan komponen pajak akibat kebijakan relaksasi dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Sedangkan retribusi dan lain-lain PAD yang sah yang mampu bertahan saat tahun 2021.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Belitung bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan Transfer Antar Daerah Kabupaten Belitung bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,68% yang memiliki tren jauh lebih rendah dibandingkan dana Transfer Antar Daerah yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,53%. Komponen Pendapatan Transfer dengan pertumbuhan tertinggi diperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8.13%. Kemudian disusul oleh Dana Desa dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3.53%. Meskipun terkesan trennya mengalami penurunan, namun Dana Bagi Hasil memperoleh rata-rata pertumbuhan positif mencapai 33,27%. Terakhir yakni dana perimbangan meskipun mengalami fluktuasi namun rata-rata pertumbuhannya masih menunjukkan angka positif mencapai 2,26%.



Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 bersumber dari Hibah, dimana tidak terdapat realisasi pada Dana Darurat dan Lain-lain. Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rata-rata pertumbuhan Dana Hibah sebesar -46,97% yang terealisasi pada periode 2020-2024.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2020 hingga 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.64 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	Rp 957.021.600.971,11	Rp 1.016.168.466.318,45	Rp1.107.840.034.233,53	Rp1.117.439.818.908,80	Rp977.370.141.296,33	0,88%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 162.134.305.440,46	Rp 185.892.692.702,98	Rp188.041.448.784,53	Rp186.621.508.495,80	Rp185.033.079.282,33	3,55%
1.1.1.	Pajak daerah	Rp 79.316.693.695,41	Rp 81.758.425.816,47	Rp91.471.330.006,49	Rp94.099.943.027,70	Rp95.733.329.497,25	4,89%
1.1.2.	Retribusi daerah	Rp 7.399.450.727,00	Rp 7.595.275.799,00	Rp8.933.321.281,00	Rp12.144.612.725,60	Rp28.328.429.252,00	47,37%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	Rp 3.928.156.865,21	Rp 4.281.969.912,36	Rp4.679.197.843,02	Rp6.035.003.956,00	Rp5.566.654.063,95	9,87%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp 71.490.004.152,84	Rp 92.257.021.175,15	Rp82.957.599.654,02	Rp74.341.948.786,50	Rp55.404.666.469,13	-4,22%
1.2	Pendapatan Transfer	Rp 738.241.263.498,65	Rp 766.716.523.438,47	Rp905.578.221.778,00	Rp920.148.463.207,00	Rp781.559.645.246,00	2,13%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	Rp 689.852.874.634,00	Rp 716.912.345.622,00	Rp842.277.520.156,00	Rp841.876.178.892,00	Rp718.586.357.912,00	1,68%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp 617.730.480.634,00	Rp 666.982.986.622,00	Rp766.304.065.556,00	Rp760.379.607.792,00	Rp661.132.445.242,00	2,26%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	Rp 41.443.900.249,00	Rp 84.457.661.765,00	Rp152.569.701.649,00	Rp136.611.970.768,00	Rp80.735.062.654,00	33,27%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	Rp 460.955.998.000,00	Rp 452.942.728.100,00	Rp452.940.056.460,00	Rp469.430.528.687,00	Rp485.393.500.051,00	1,33%
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	Rp 115.330.582.385,00	Rp 129.582.596.757,00	Rp160.794.307.447,00	Rp154.337.108.337,00	Rp95.003.882.537,00	-1,50%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	Rp 24.542.041.000,00	Rp -	Rp37.414.115.000,00	Rp41.029.718.000,00	Rp15.976.321.000,00	0,41%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	Rp 47.580.353.000,00	Rp 49.929.359.000,00	Rp38.559.339.600,00	Rp40.466.853.100,00	Rp41.477.591.670,00	3,53%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	Rp 48.388.388.864,65	Rp 49.804.177.816,47	Rp63.300.701.622,00	Rp78.272.284.315,00	Rp62.973.287.334,00	8,53%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 45.273.388.864,65	Rp 46.131.074.816,47	Rp59.714.901.622,00	Rp71.558.916.815,00	Rp59.001.661.334,00	8,41%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Rp 3.115.000.000,00	Rp 3.673.103.000,00	Rp3.585.800.000,00	Rp6.713.367.500,00	Rp3.971.626.000,00	15,48%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp56.646.032.032,00	Rp 63.559.250.177,00	Rp14.220.363.671,00	Rp10.669.847.206,00	Rp10.777.416.768,00	-25,65%
1.3.1	Hibah	Rp55.031.159.666,00	Rp 39.262.663.106,00	Rp4.763.000.000,00	Rp -	Rp -	-46,97%

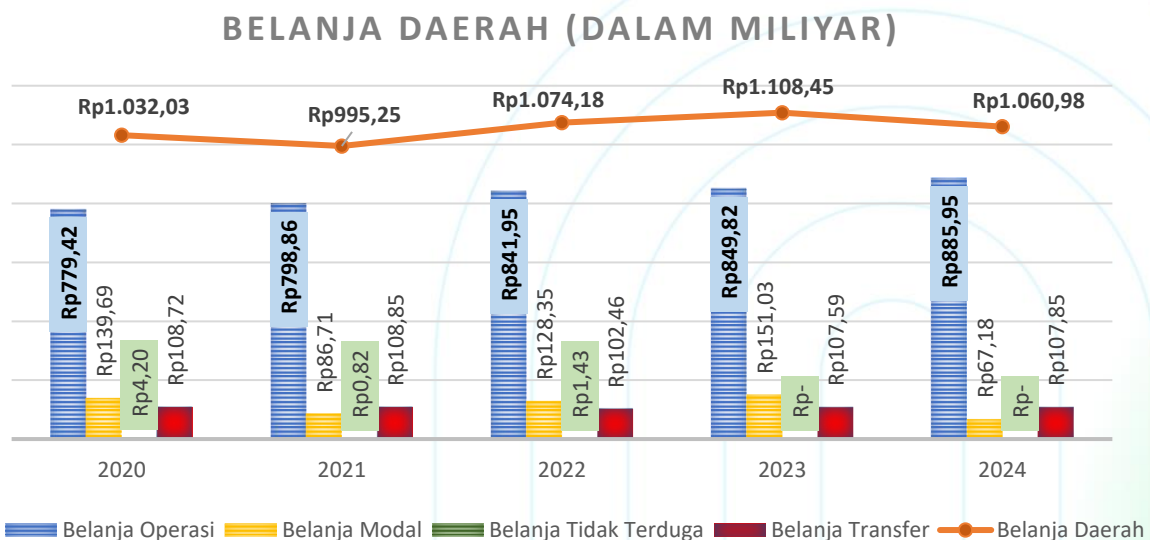
No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp 1.614.872.366,00	Rp 24.296.587.071,00	Rp 9.457.363.671,00	Rp 10.669.847.206,00	Rp 10.777.416.768,00	0,00%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

2.2.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan berbagai Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Urusan Pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, serta urusan penunjang pemerintahan. Dalam alokasi belanja daerah, prioritas utama adalah mendukung urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini harus memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta mengikuti standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pendanaan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan didasarkan pada analisis standar belanja dan harga satuan regional. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan aspek-aspek lain yang mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan. Realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82%. Sepanjang periode 2020-2024 penurunan belanja daerah terjadi pada tahun 2021 mencapai -3.56% dari tahun 2020 akibat banyaknya *refocusing* dan kebijakan lainnya guna penanganan pandemi Covid-19. Komponen belanja secara umum terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 62 Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1.032.032.453.295,43, tahun 2021 belanja mengalami sedikit

penurunan mencapai -3.56% atau mencapai Rp 995.246.173.234,20. Kemudian nilai belanja Kabupaten Belitung mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 7,93% menjadi Rp 1.074.182.835.247,83. Terjadinya peningkatan tersebut masih berhubungan transisi antara pandemi Covid-19 yang melahirkan ekonomi baru (new normal) serta berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung, sehingga pada tahun tersebut peningkatan belanja lebih diakibatkan dengan meningkatnya belanja Hibah yang mencapai 10,30%. Pasca Covid-19 tahun 2022 belanja daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 3.19% menjadi Rp 1.108.448.343.633,00 di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 menjadi Rp 1.060.977.510.829,40 dengan pertumbuhan sebesar -4,28% yang merupakan penurunan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 2021-2024. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan belanja Kabupaten Belitung tahun 2021-2024:

Tabel 2.65 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	3.94%	-1.49%	7.55%	8.72%	4.68%
2.1	Belanja Operasi	0.48%	-5.33%	12.47%	4.71%	3.08%
2.2	Belanja Modal	5.42%	18.43%	2.74%	24.19%	12.70%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0.00%	0.00%	-89.14%	199.82%	27.67%
2.4	Belanja Transfer	-2.35%	5.89%	-1.50%	3.48%	1.38%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Belanja Operasi Kabupaten Belitung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,27% dengan tren realisasi meningkat. Pada tahun 2020 jumlah realisasi Belanja Operasi tercatat sebesar Rp 779.419.940.510,31. Realisasi Belanja Operasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2,49% menjadi Rp 798.857.554.136,20. Nilai belanja kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 5,39% menjadi Rp 841.947.804.625,83 dan pada tahun 2023 terus meningkat mencapai 0,94% menjadi Rp 849.822.871.783,00. Secara umum belanja operasi dibagi menjadi 5 jenis belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial. Tidak terdapat adanya realisasi Belanja Bunga pada Belanja Kabupaten Belitung. Dari lima jenis Belanja Operasi di Kabupaten Belitung, nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi terdapat pada belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan 6,47%. Pencapaian cukup signifikan tersebut lebih kepada fluktuasinya pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut. Untuk Belanja Pegawai pada tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren rata-rata pertumbuhan sebesar 0,23%, Belanja Hibah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -13,23%.

Pada Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya terkecuali pada belanja modal aset lainnya yang hanya terealisasi di tahun 2024 saja. Belanja Modal Aset Lainnya merupakan jenis Belanja Modal yang tidak memiliki rata-rata pertumbuhan, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai 17.59% dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

sebesar 2,00%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Tanah merupakan dua komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan minus sebesar -4,96% untuk belanja modal tanah dan -7,86% untuk belanja modal Gedung dan Bangunan. Tidak jauh berbeda dengan realisasi Belanja Operasi, masing-masing jenis Belanja Modal juga menunjukkan tren fluktuasi yang cukup tinggi. Sedangkan untuk belanja modal aset tetap lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar dalam pos belanja yakni 146,72%.

Hal ini juga berdampak pada fluktuasi nilai total realisasi Belanja Modal, dimana pada tahun 2020 realisasi Belanja Modal menunjukkan angka sebesar Rp139.687.352.160,12. Nilai Belanja Modal mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar -37,92% menjadi Rp 86.713.920.098,00. Selanjutnya untuk tahun 2022 belanja modal meningkat cukup signifikan yang mencapai 48,01% dan mencapai Rp128.347.523.022,00. Meskipun pertumbuhan belanja modal mengalami pelemahan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2023 belanja modal kembali meningkat cukup pesat dengan pertumbuhan mencapai 17,67% atau mencapai Rp 151.031.461.750,00 pada tahun 2023. sedangkan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga pada angka Rp 67.178.834.203,62 berbanding lurus pula dengan penurunan pertumbuhan yang signifikan -55,52%.

Realisasi pada Belanja Tak Terduga hanya memiliki realisasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 saja, untuk tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Tak terduga didalamnya. Pada tahun 2020 realisasi Belanja Tak Terduga tercatat sebesar Rp 4.200.711.625,00. Kemudian belanja tidak terduga justru mengalami penurunan hingga pada angka Rp 824.395.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga yang terakhir yaitu di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 1.430.000.000,00. Tren belanja tidak terduga yang cukup signifikan tersebut namun bertolak belakang dengan rata-rata pertumbuhan yang positif di angka 73,46% tersebut justru menunjukkan, hal tersebut terjadi akibat dari fluktuasi yang cukup tajam.

Belanja Transfer merupakan salah satu jenis Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer di Kabupaten Belitung di tahun 2020 memiliki realisasi sebesar Rp 108.724.449.000,00 dan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 0,12% hingga pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp 108.850.304.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan hingga mencapai Rp 102.457.507.600,00. Hal serupa juga terjadi di tahun 2023 dan tahun 2024 yang terus mengalami peningkatan hingga menunjukkan angka Rp 107.594.010.100,00 di tahun 2023 dan Rp 107.849.220.370,00 pada tahun 2024. Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 hingga 2024 beserta masing-masing komponennya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.66 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	Rp 1.032.032.453.295,43	Rp 995.246.173.234,20	Rp 1.074.182.835.247,83	Rp 1.108.448.343.633,00	Rp 1.060.977.510.829,40	0,82%
2.1	Belanja Operasi	Rp 779.419.940.510,31	Rp 798.857.554.136,20	Rp 841.947.804.625,83	Rp 849.822.871.783,00	Rp 885.949.456.255,78	3,27%
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 474.496.214.179,00	Rp 434.774.956.712,00	Rp 453.049.538.368,00	Rp 445.534.554.743,00	Rp 475.575.756.202,00	0,23%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 285.566.636.934,31	Rp 340.523.373.880,20	Rp 361.277.774.296,35	Rp 363.679.104.935,00	Rp 363.202.835.416,78	6,47%
2.1.3	Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	Rp 1.049.886.038,00	Rp 1.213.110.144,00	Rp 1.196.662.498,00	Rp 644.159.628,00	Rp 638.399.797,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	Rp 18.307.203.359,00	Rp 22.063.125.040,00	Rp 24.335.941.910,48	Rp 39.760.641.477,00	Rp 46.296.492.840,00	-13,23%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp 282.988.360,00	Rp 2.087.887.553,00	Rp 204.411.000,00	Rp 235.972.000,00	32,55%
2.2	Belanja Modal	Rp 139.687.352.160,12	Rp 86.713.920.098,00	Rp 128.347.523.022,00	Rp 151.031.461.750,00	Rp 67.178.834.203,62	-6,94%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	Rp 3.712.808.843,00	Rp 5.005.482.915,00	Rp 2.421.196.500,00	Rp 1.098.020.400,00	Rp 4.135.660.290,00	-4,96%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 62.723.662.214,60	Rp 23.980.510.190,00	Rp 32.210.468.113,00	Rp 62.234.547.745,00	Rp 26.292.995.435,00	2,00%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 43.962.174.801,52	Rp 21.131.077.693,00	Rp 24.135.368.303,00	Rp 38.123.739.705,00	Rp 18.418.277.038,62	-7,86%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 28.872.536.309,00	Rp 33.973.179.700,00	Rp 67.928.699.480,00	Rp 46.774.899.000,00	Rp 14.696.115.290,00	4,47%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 416.169.992,00	Rp 2.623.669.600,00	Rp 1.651.790.626,00	Rp 2.800.254.900,00	Rp 3.470.802.300,00	146,72%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 164.983.850,00	0,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp 4.200.711.625,00	Rp 824.395.000,00	Rp 1.430.000.000,00	Rp -	Rp -	-
2.4	Belanja Transfer	Rp 108.724.449.000,00	Rp 108.850.304.000,00	Rp 102.457.507.600,00	Rp 107.594.010.100,00	Rp 107.849.220.370,00	0,03%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp 9.313.410.000,00	Rp 8.141.833.000,00	Rp 8.995.768.000,00	Rp 9.131.821.000,00	Rp 9.753.057.800,00	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 99.411.039.000,00	Rp 100.708.471.000,00	Rp 93.461.739.600,00	Rp 98.462.189.100,00	Rp 98.096.162.570,00	0,33%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah melibatkan transaksi keuangan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Jika terdapat surplus, pembiayaan mencerminkan penggunaan surplus, sedangkan dalam kondisi defisit anggaran, pembiayaan menunjukkan transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah muncul ketika pengeluaran melebihi penerimaan, sehingga terjadi defisit. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari berbagai sumber., yaitu:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi:

- a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b) Penyertaan modal daerah;
- c) Pembentukan dana cadangan;
- d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan terhadap komponen pembiayaan daerah akan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat atau jumlah keseluruhan suatu objek dalam perekonomian, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Belitung hanya ditopang oleh satu pos pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Serta Penerimaan Pembiayaan memiliki angka pertumbuhan -38,06% ditahun 2021 dan terus meningkat hingga pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,14% dengan nilai setiap tahunnya berkembang secara fluktuatif. Capaian nilai tertinggi terjadi di tahun 2024 yang menyisakan silpa sebesar Rp 185.632.032.036,77 dibandingkan tahun 202 sebagai capaian nilai terendah sebesar Rp122.084.492.006,37. Sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan hanya terealisasi ditahun 2024 yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,00. Dengan demikian Pengeluaran Pembiayaan tidak memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai dikarenakan hanya memiliki brealisasi di tahun 2024 saja.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Belitung tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.67 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 197.095.344.330,69	Rp 122.084.492.006,37	Rp 143.011.194.608,62	Rp 176.640.556.760,97	Rp 185.632.032.036,77	1,92%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 197.095.344.330,69	Rp 122.084.492.006,37	Rp 143.011.194.608,62	Rp 176.640.556.760,97	Rp 185.632.032.036,77	1,92%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000.000,00	0.00%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000.000,00	0.00%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

2.2.1.2.1. Perkembangan dan Rata-Rata Neraca Daerah

Neraca Daerah menjadi sebuah laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi besar bagi manajemen pemerintah daerah, bukan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam upaya mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah, sebagai gambaran posisi keuangan entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu tertentu, mencakup elemen-elemen utama seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban dalam Neraca Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen terakhir yang tercakup dalam Neraca Daerah adalah ekuitas, yang dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Belitung berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Belitung dalam 5 tahun terakhir (2020-2024):

Tabel 2.68 Neraca Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	Rp259.545.033.541,71	Rp216.039.447.607,50	Rp222.524.599.464,13	Rp232.783.252.578,05	Rp159.098.309.770,69	-10,20%
1.1.1.	Kas	Rp124.213.585.649,37	Rp145.300.036.020,62	Rp176.868.596.086,32	Rp185.984.996.523,77	Rp99.203.198.775,70	-0,70%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
1.1.3.	Piutang	Rp35.076.555.358,01	Rp32.209.451.800,00	Rp41.021.284.937,80	Rp37.581.538.349,00	Rp40.018.358.213,00	4,32%
1.1.4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp89.350.000,00	Rp89.350.000,00	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
1.1.5.	Piutang Lainnya	Rp6.102.839.814,80	Rp30.878.742.783,80	Rp19.990.000,00	Rp6.503.953.249,64	Rp12.843.956.013,00	-!
1.1.6.	Penyisihan Piutang	Rp-11.300.569.983,55	-Rp13.444.852.207,30	-Rp14.860.624.504,55	-Rp16.512.186.766,30	-Rp17.596.675.750,00	11,80%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	Rp15.439.817,70	Rp20.049.791,32	Rp17.167.481,88	Rp25.530.913,97	Rp27.885.580,84	18,36%
1.1.8.	Persediaan	Rp105.347.832.885,38	Rp20.986.669.419,06	Rp19.458.185.462,68	Rp19.199.420.307,97	Rp24.601.586.938,15	-15,14%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp57.263.734.710,90	Rp56.572.269.058,29	Rp54.745.473.079,10	Rp55.864.882.529,28	Rp57.289.951.190,03	0,04%
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp57.263.734.710,90	Rp56.572.269.058,29	Rp54.745.473.079,10	Rp55.864.882.529,28	Rp57.289.951.190,03	0,04%
1.3.	ASET TETAP	Rp1.894.994.125.107,15	Rp1.925.672.560.671,16	Rp1.952.309.647.291,89	Rp2.082.865.672.051,83	Rp2.033.077.940.019,65	1,82%
1.3.1.	Tanah	Rp280.520.331.030,00	Rp315.846.019.231,53	Rp318.958.774.922,53	Rp339.197.970.602,53	Rp374.251.593.840,53	7,56%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	Rp560.305.824.030,72	Rp603.453.023.670,23	Rp637.765.821.273,23	Rp697.617.840.076,03	Rp720.332.917.851,82	6,51%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	Rp609.181.200.370,42	Rp642.932.080.517,48	Rp681.556.129.228,73	Rp762.036.878.775,11	Rp785.083.460.367,07	6,60%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp1.782.536.532.897,24	Rp1.906.301.769.619,31	Rp2.015.485.922.005,03	Rp2.147.718.601.043,40	Rp2.175.527.297.933,24	5,13%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp56.625.096.756,55	Rp58.927.172.272,59	Rp61.340.275.451,59	Rp64.008.029.756,38	Rp67.445.072.900,35	4,47%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp24.294.796.732,51	Rp14.585.038.400,68	Rp17.138.639.637,68	Rp18.172.375.120,68	Rp20.050.310.260,68	-1,52%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	Rp-1.418.469.656.710,29	-Rp1.616.372.543.040,66	-Rp1.779.935.915.226,90	-Rp1.945.886.023.322,30	Rp2.109.612.713.134,04	10,45%
1.4.	DANA CADANGAN	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET						
1.4.1.	Dana Cadangan	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
1.5.	ASET LAINNYA	Rp49.981.121.064,82	Rp110.330.791.790,93	Rp108.975.033.937,98	Rp37.909.964.540,73	Rp50.984.240.241,08	22,20%
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp13.035.225.372,75	Rp13.165.666.599,75	Rp9.011.250.276,00	Rp8.861.250.276,00	Rp8.861.250.276,00	-8,05%
1.5.3.	Aset Tak Berwujud	Rp4.665.291.508,00	Rp 4.933.275.908,00	Rp5.388.337.258,00	Rp5.680.168.067,00	Rp5.855.151.917,00	5,87%
1.5.4.	Amortisasi	Rp-3.983.490.152,50	-Rp4.389.325.488,00	-Rp4.856.848.545,50	-Rp5.191.662.710,25	-Rp5.489.127.812,50	1,43%
1.5.5.	Aset Lain-lain	Rp36.264.094.336,57	Rp126.640.839.701,07	Rp99.432.294.949,48	Rp54.916.995.264,58	Rp41.756.965.860,58	39,75%
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp-	-Rp30.019.664.929,89	Rp-	-Rp26.356.786.356,60	-Rp23.614.889.410,60	2,35%
	JUMLAH ASET	Rp2.261.784.014.424,58	Rp2.308.615.069.127,88	Rp2.338.554.753.773,10	Rp2.409.423.771.699,89	Rp2.300.450.441.221,45	0,47%
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp16.050.208.090,21	Rp35.373.604.190,07	Rp9.290.963.850,41	Rp11.718.735.861,75	Rp13.882.707.453,42	22,81%
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp2.949.079.125,00	Rp2.288.841.412,00	Rp178.690.503,00	Rp177.871.265,00	Rp178.536.273,00	-23,16%
2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp424.292.335,41	Rp806.849.552,07	Rp724.223.335,41	Rp1.476.111.398,75	Rp1.088.438.935,42	39,37%
2.1.4.	Utang Belanja	Rp12.414.145.138,80	Rp17.754.662.551,00	Rp8.388.050.012,00	Rp9.890.946.598,00	Rp12.615.732.245,00	8,93%
2.1.5.	Utang Transfer	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
2.1.6.	Utang Lain-lain	Rp262.691.491,00	Rp14.523.250.675,00	Rp-	Rp173.806.600,00	Rp-	-
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0,00%

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET						
	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp16.050.208.090,21	Rp35.373.604.190,07	Rp9.290.963.850,41	Rp11.718.735.861,75	Rp13.882.707.453,42	22,81%
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	Rp2.245.733.805.674,37	Rp2.273.241.464.937,81	Rp329.263.789.922,68	Rp2.397.705.035.838,05	Rp2.262.952.844.357,43	134,57%
3.1.1.	Ekuitas	Rp2.245.733.805.674,37	Rp2.273.241.464.937,81	Rp329.263.789.922,68	Rp2.397.705.035.838,05	Rp2.262.952.844.357,43	134,57%
	JUMLAH EKUITAS	Rp2.245.733.805.674,37	Rp2.273.241.464.937,81	Rp329.263.789.922,68	Rp2.397.705.035.838,05	Rp2.262.952.844.357,43	134,57%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp2.261.784.013.764,58	Rp2.308.615.069.127,88	Rp338.554.753.773,09	Rp2.409.423.771.699,80	Rp2.276.835.551.810,85	130,73%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah disajikan dalam Neraca Daerah selama tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Aset

Aset dalam neraca daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset-aset ini dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan mencerminkan kondisi keuangan daerah tersebut. Pengelolaan aset daerah yang baik penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. Aset harus dicatat dan dilaporkan dengan akurat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, masyarakat, dan investor.

Berdasarkan tabel di atas, aset yang dimiliki Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,47% dan mengalami tren peningkatan yang positif. Jumlah aset di tahun 2020 sebesar Rp 2.261.784.014.424,58 dan tumbuh menjadi Rp 2.409.423.771.699,89 di tahun 2023, namun di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 2.300.450.441.221,45. Aset pemerintah Kabupaten Belitung dalam neraca keuangan daerah terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, serta Aset Lainnya. Komponen aset yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,20%. Sedangkan untuk komponen Dana Cadangan pada Aset Kabupaten Belitung tidak terealisasi selama tahun 2020-2024. Keberadaan Dana Cadangan memang tidak dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut tergantung pada tingkat kebutuhan untuk membiayai pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Komponen aset lancar Kabupaten Belitung memiliki rata-rata pertumbuhan -10,20% dengan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Nilai aset lancar pada tahun 2020 sebesar Rp 259.545.033.541,71 dan mengalami penurunan sebesar -16,76% di tahun 2021 menjadi Rp 216.039.447.607,50. Pada tahun 2023 merupakan nominal aset lancar tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Rp 232.783.252.578,05 dengan rata-rata pertumbuhan 4,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi tren penurunan yang drastis, tahun 2024 turun sebesar -31,65% hingga menjadi Rp 159.098.309.770,69, serta merupakan penurunan yang paling signifikan selama lima tahun terakhir dan merupakan nilai terendah dalam tahun 2020-2024. Pada komponen Aset Lancar tidak terdapat realisasi Investasi Jangka Pendek,, melainkan diperoleh dari 7 komponen lainnya.

Pada komponen Investasi Jangka Panjang terjadi tren peningkatan dalam rentang tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,04%. Terdapat dua komposit Investasi Jangka Panjang yaitu Investasi Jangka Panjang Permanen dan Non Permanen. Tidak ada capaian selama tahun 2020-2024 untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sedangkan untuk Investasi Jangka Panjang Permanen tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 0,04%. Nilai Investasi

Jangka Panjang Permanen Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar Rp 57.263.734.710,90 dan terus meningkat hingga angka Rp 57.289.951.190,03 di tahun 2024.

Komponen aset selanjutnya yakni Aset Tetap yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap Kabupaten Belitung sebesar 1,82% dan mengalami tren yang terus meningkat. Tahun 2020 nilai Aset Tetap Kabupaten Belitung sebesar Rp 1.894.994.125.107,15 dan terus tumbuh hingga angka Rp 2.033.077.940.019,65 pada tahun 2024. Komposit Aset Tetap yang paling berkontribusi adalah Akumulasi Penyusutan, sedangkan untuk komposit yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Peralatan dan Mesin dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,87%.

Selain ketiga jenis aset di atas, komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Belitung terdiri dari Aset Lainnya. Rata-rata pertumbuhan Aset Lainnya sebesar 22,20% dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp 49.981.121.064,82 dan naik sebesar 120,74% menjadi Rp 110.330.791.790,93. Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar -1,23% menjadi Rp 108.975.033.937,98. Kemudian terus menurun drastis hingga tahun 2023 sebesar 65,21% menjadi Rp 37.909.964.540,73. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali sebesar -34,49% menjadi Rp 50.984.240.241,08. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan aset daerah sebesar 0,47% selama lima tahun mencerminkan manajemen yang stabil dan efisien, serta kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun tetap ada tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan di masa mendatang.

2.2.1.2.2. Kewajiban

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat pada tabel di atas terlihat bahwa pada Kabupaten Belitung memiliki Kewajiban Jangka Pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,81% dengan tren perkembangan yang fluktuatif. Hal ini mengartikan bahwa terdapat kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam waktu satu tahun atau kurang, yang nilainya berubah-ubah secara signifikan selama periode lima tahun. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, nilai tukar, atau kondisi keuangan perusahaan.

Selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) nilai kewajiban Kabupaten Belitung menunjukkan tren fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 nilai kewajiban menunjukkan angka Rp 16.050.208.090,21 dan

meningkat 120,39% di tahun 2021 menjadi Rp 35.373.604.190,07. Capaian ini kemudian menurun menjadi Rp 9.290.963.850,41 di tahun 2022 dan kembali meningkat hingga tahun 2023 dan 2024 dimana pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar Rp 13.882.707.453,42 yang didorong adanya peningkatan pada komponen Utang Belanja dan Utang Lain-lain.

2.2.1.2.3. Ekuitas

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 134,57% selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) dengan tren pertumbuhan yang naik. Adapun nilai ekuitas tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar Rp 2.397.705.035.838,05 dengan rata-rata pertumbuhan 628,20% dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai ekuitas terkecil terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 329.263.789.922,68 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -85,52%. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 130,73% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.69 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	16,1708	6,1074	23,9506	19,8642	11,4602
2	Rasio Quick	9,6072	5,5141	21,8563	18,2258	9,6881
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0071	0,0153	0,0040	0,0049	0,0060
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0071	0,0156	0,0282	0,0049	0,0061
C	RASIO AKTIVITAS					
1	Rata-rata Umur Piutang	18,1045	18,7582	17,1685	13,9029	18,2545
2	Rata-rata Umur Persediaan	20,1607	19,4582	21,2599	26,2535	19,9951

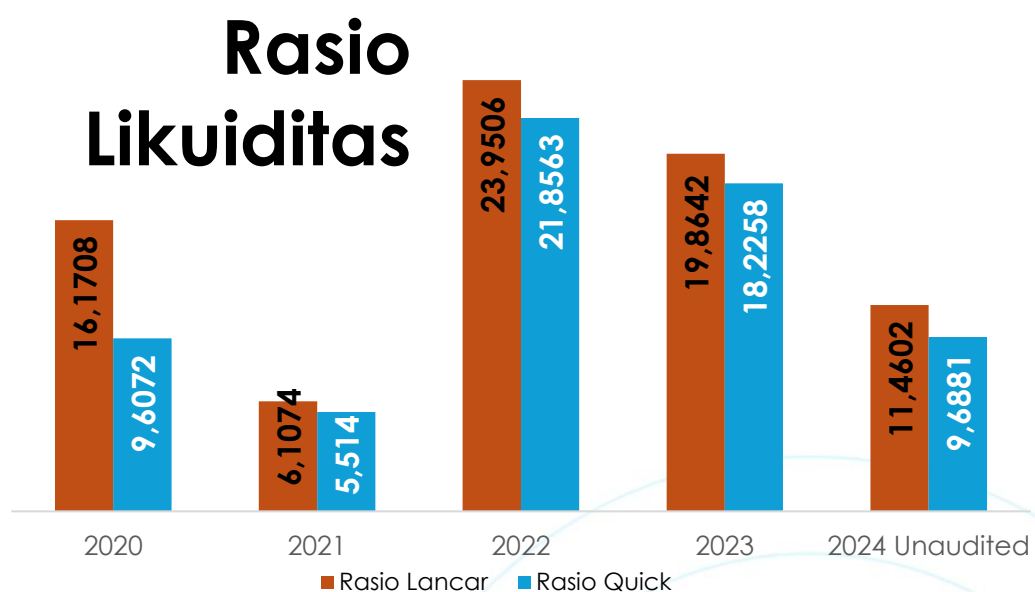
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Secara rinci hasil penghitungan rasio neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1.2.3.1 Rasio Neraca Daerah

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, terdapat dua jenis rasio likuiditas yang relevan, yaitu rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Di sisi lain, rasio quick menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih likuid, yaitu aset lancar dikurangi nilai persediaan.



Gambar 2. 63 Rasio Likuiditas Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

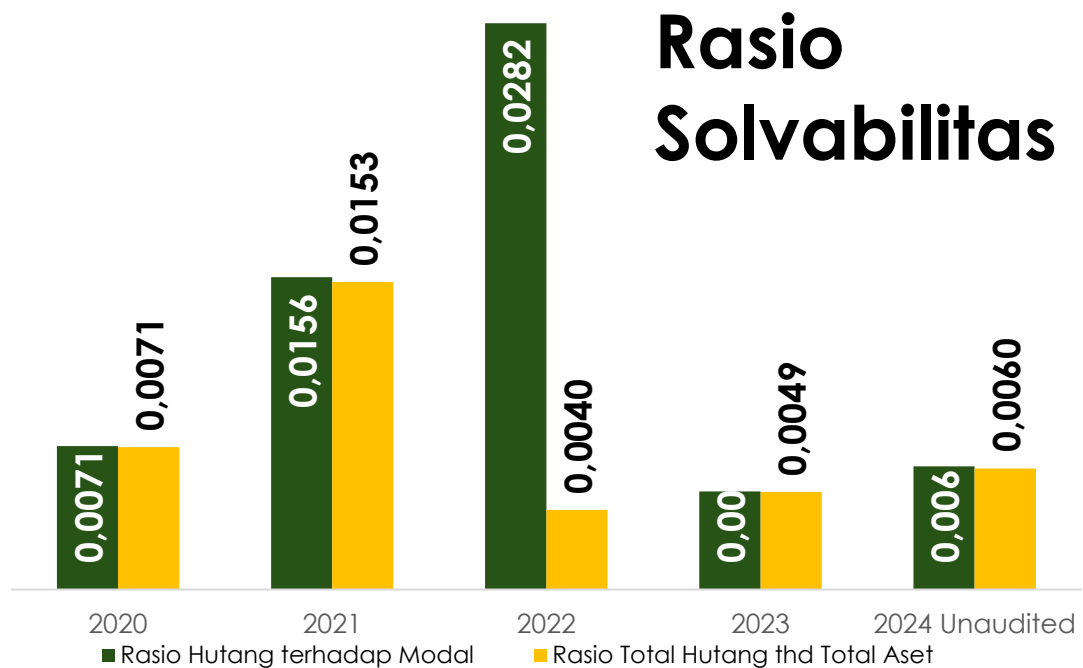
Sebagaimana grafik di atas, Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Belitung dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 16,1708 dan menurun hingga menjadi 6,1074. Meskipun kembali menurun di tahun 2021 menjadi 6,1074, namun nilai rasio lancar kembali meningkat selama tahun 2022-2024 menjadi 23,9506 dan menurun 11,4602 pada tahun 2024. Penurunan terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung mengalami penurunan, sehingga kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek juga semakin menurun. Pada tahun 2020 kemampuan Kabupaten Belitung untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar tercatat sebesar 16,2 kali, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 6.1 kali. Di tahun 2022 kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar meningkat tajam hingga menjadi 23,9 kali namun terus menurun di tahun 2023 dan 2024 menjadi 19,8 kali dan 11,4kali. Semakin

rendah nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami tren fluktuatif yang cenderung menurun.

Seperti halnya dengan rasio lancar, rasio quick Pemerintah Kabupaten Belitung dalam setiap tahunnya juga mengalami perkembangan. Nilai rasio quick pada tahun 2020 sebesar 9,6072, kemudian menurun di tahun 2021 hingga menjadi 5,5141. Meski demikian, nilai rasio quick kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 21,8563, nilai rasio quick Kabupaten Belitung kembali menurun dalam tahun 2023 & 2024 menjadi 18,2258 dan 9,6881. Penurunan di tahun 2021 maupun 2023 & 2024 terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung mengalami penurunan. Nilai rasio quick pada dasarnya sedikit berada dibawah rasio lancarnya, karena aset lancar yang diperhitungkan sebagai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tidak memperhitungkan komponen persediaan. Perbedaan perhitungan rasio lancar dan rasio quick terletak pada adanya persediaan sebagai unsur penghitung besaran nilai rasio. Jika pada rasio lancar melihat pada kemampuan membayar hutang menggunakan aset lancar, maka pada rasio quick melihat kemampuan membayar dengan aset lancar selain persediaan. Sehingga pergerakan besar kecilnya rasio quick selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Pada tahun 2020 kemampuan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar (setelah dikurangi dengan nilai persediaan) tercatat sebesar 9.6 kali, kemudian di tahun 2021 menurun sebanyak 5,5 kali dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 21,8 kali. Penurunan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar Kembali terjadi di tahun 2023 dan 2024 tercatat sebesar 18,2 kali dan 9,6 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Belitung untuk membayar/ melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang telah dikurangi dengan persediaan belum konsisten setiap tahunnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan dua matriks utama. Pertama, Rasio total hutang terhadap total aset menggambarkan sejauh mana hutang berpengaruh terhadap nilai total aset, memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan pada hutang. Kedua, Rasio hutang terhadap modal mengindikasikan sejauh mana penggunaan hutang dibandingkan dengan modal yang dimiliki, memberikan perspektif terhadap tingkat kebutuhan hutang dalam kaitannya dengan modal yang tersedia.



Gambar 2. 64 Rasio Solvabilitas Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0071 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 0,0285, namun sempat mengalami penurunan di tahun 2023 dan tahun 2024. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan nilai kewajiban/ utang Pemerintah Kabupaten Belitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan total asetnya. Seiring adanya penurunan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023, sedangkan nilai total aset yang dimiliki semakin meningkat, maka nilai Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 13,93%. Semakin tinggi angka Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maka hal ini dapat diartikan semakin tinggi pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam keadaan yang Sehat. Persentase dana berasal dari kreditor/ donatur/ pihak ketiga dalam membiayai pembangunan masih kecil (di bawah 2%) sekalipun dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Tren serupa juga terjadi pada capaian Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Belitung, yang dalam lima tahun terakhir juga mengalami tren yang fluktuatif. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0071 dan meningkat signifikan menjadi 0,053 di tahun 2021 meskipun sempat mengalami penurunan kembali di tahun 2022. Tren kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan nilai total hutang di tahun 2023 dan 2024 meskipun

kondisi ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki (Tidak Bergantung pada Hutang). Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren kecenderungan meningkat khususnya pada tahun 2024.

Secara umum, rasio total hutang terhadap modal di Kabupaten Belitung masih cukup rendah, yaitu di bawah 5%. Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung tidak bergantung pada hutang dalam pengelolaan keuangannya. Total hutang Pemerintah Kabupaten Belitung saat ini berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki, dengan kisaran antara 0,75% hingga 5%. Namun, perlu diperhatikan adanya tren peningkatan rasio hutang terhadap modal dari tahun ke tahun.

3. Rasio Aktivitas Keuangan

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai tingkat aktivitas tertentu dalam kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dua jenis rasio aktivitas yang sering digunakan adalah Rata-Rata Umur Piutang dan Rata-Rata Umur Persediaan. Rata-rata umur piutang mengindikasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan piutang, menunjukkan seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Sementara itu, rata-rata umur persediaan memberikan informasi tentang berapa lama dana diinvestasikan dalam bentuk persediaan, menunjukkan seberapa efisien persediaan tersebut digunakan dalam penyediaan pelayanan publik.

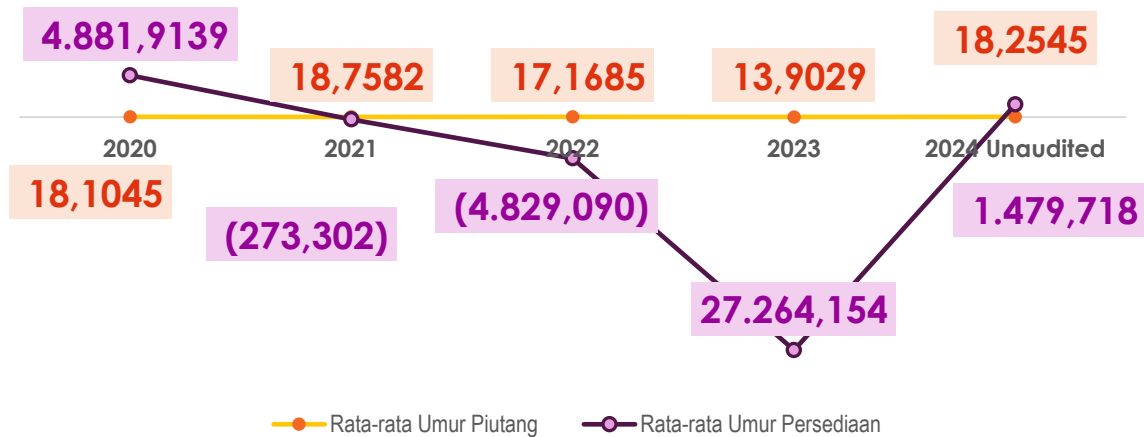
Tabel 2.70 Rasio Aktivitas Keuangan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Rasio Aktivitas Keuangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Rata-rata Umur Piutang	18,1045	18,7582	17,1685	13,9029	18,2545
	Perputaran piutang	20,1607	19,4582	21,2599	26,2535	19,9951
	Pendapatan Daerah	957.021.600.971,11	1.016.168.466.318,45	1.107.840.034.233,53	1.117.439.818.908,80	977.370.141.296,33
	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	47.469.712.768,90	52.223.144.878,31	52.109.409.760,80	42.563.383.268,22	48.880.479.613,22
	Saldo Awal Piutang	53.670.680.364,99	41.268.745.172,81	63.177.544.583,80	41.041.274.937,80	44.085.491.598,64
	Saldo Akhir Piutang	41.268.745.172,81	63.177.544.583,80	41.041.274.937,80	44.085.491.598,64	53.675.467.627,80
B	Rata-rata Umur Persediaan	4.881,9139	(273,302)	(4.829,090)	(27.264,154)	1.479,718
	Perputaran persediaan	0,0748	(1,3355)	(0,0756)	(0,0134)	0,2467
	Nilai Persediaan yang Digunakan dalam Satu Tahun	7.592.578.180,50	-84.361.162.806,32	-1.528.483.956,38	-258.765.154,80	5.402.166.630,27
	Rata-rata Nilai Persediaan	101.551.543.135	63.167.250.822	20.222.427.441	19.328.802.885	21.900.503.623
	Saldo Awal Persediaan	97.755.254.044,88	105.347.832.225,38	20.986.669.419,06	19.458.185.462,68	19.199.420.307,88
	Saldo Akhir Persediaan	105.347.832.225,38	20.986.669.419,06	19.458.185.462,68	19.199.420.307,88	24.601.586.938,15
	Rata-rata Umur Persediaan	4.881,9139	(273,302)	(4.829,090)	(27.264,154)	1.479,718

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Dengan Berdasarkan pada data tabel diatas, maka dapat diketahui nilai rata- rata piutang dan juga nilai rata- rata umur persediaan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini:

Rasio Aktivitas



Gambar 2. 65 Rasio Aktivitas Keuangan Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas Kabupaten Belitung pada tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi pada nilai Rata-rata Umur Piutang, yakni sebanyak 18,10 hari pada tahun 2020 dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2021 menjadi 18,75 hari. Capaian ini merupakan capaian rata-rata umur piutang tertinggi Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Capaian ini kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 17,16 hari di tahun 2022 dan terus menurun hingga 13,90 di tahun 2023 serta naik kembali menjadi 18,25 hari di tahun 2024. Nilai Rata-rata Umur Piutang secara keseluruhan menunjukkan angka yang masih baik, dimana umur piutangnya kurang dari 1 bulan, bahkan pada tahun 2021-2023 tren umur piutang menurun. Dimana artinya, dengan semakin pendek jangka waktu pelunasannya, maka semakin kecil pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Melihat hasil perhitungan Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Belitung pada tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Belitung tercatat selama 4.881,9 hari, kemudian menurun menjadi 273,3 hari atau 9 bulan 3 hari di tahun 2021. Di tahun 2021-2023 terjadi penurunan yang menjadikan nilai Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Belitung tercatat selama 27.264,15 hari, kemudian menjadi 1.479,71 hari pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan di tahun 2021-2023, efektivitas dan manajemen pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sedikit meningkat. Meskipun demikian, tren yang terjadi di tahun 2020 perlu diperhatikan dikarenakan terjadi peningkatan nilai Rata-rata Umur Persediaan, hal ini perlu diwaspadai dikarenakan semakin tinggi rasio ini, semakin tidak efisien pengelolaan persediaan, karena dana diinvestasikan dalam persediaan

dapat lebih lambat dikembalikan atau diubah menjadi layanan atau produk yang dibutuhkan.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam tata kelola pemerintahan daerah terdapat kebijakan yang dikhususkan tentang pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan biasanya bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah. Kebijakan ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan fiskal guna menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, kebijakan pengelolaan keuangan biasanya disusun berdasarkan regulasi yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan negara, serta pengawasan fiskal. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal melalui instrumen seperti pajak, subsidi, pinjaman, dan transfer ke daerah guna mencapai tujuan pembangunan. Pengalokasian anggaran didasarkan pada skala prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dalam konteks desentralisasi, pengelolaan keuangan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menyusun kebijakan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, hal ini juga menuntut adanya tata kelola yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan dana transfer dari pusat, pendapatan asli daerah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan pengelolaan yang baik, daerah dapat lebih mandiri dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk menetapkan dan membuat kebijakan pengelolaan keuangan masa mendatang, maka perlu melihat realisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada masa lalu. Oleh karena itu hal ini dapat dilihat dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Berikut merupakan penjabaran pada masing-masing sub bab.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran merupakan gambaran alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan. Proporsi penggunaan anggaran dapat dibagi menjadi dua yakni dari sudut pandang pendapatan daerah dan sudut pandang

belanja daerah. Proporsi penggunaan anggaran biasanya ditentukan berdasarkan kebutuhan serta target pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan dalam proporsi penggunaan anggaran juga mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat menjalankan prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola keuangan public. Berikut merupakan penjelasan pada masing-masing proporsi anggaran.

2.2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama dalam pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Dari sudut pandang proporsi anggaran, pendapatan daerah mencerminkan kapasitas keuangan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja serta kemandiriannya dalam mengelola keuangan. Secara umum, pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi dari masing-masing komponen ini menentukan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dan sejauh mana daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri.

Kabupaten Belitung merupakan daerah otonom yang memiliki kebijakan dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk melihat sejauh mana proporsi pendapatan daerah Kabupaten Belitung yang didapatkan dalam lima tahun terakhir maka di bawah ini telah diuraikan berupa tabel proporsi pendapatan daerah yang terdiri dari tiga pendapatan utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

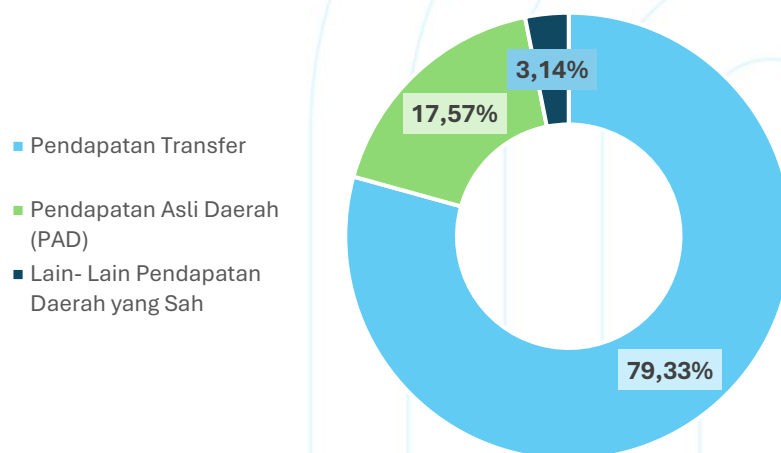
Tabel 2.71 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Proporsi (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	100,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,03%
11	Pendapatan Asli Daerah	16,94%	18,29%	16,97%	16,70%	18,93%	17,57%
111	Pajak daerah	8,29%	8,05%	8,26%	8,42%	9,79%	8,56%
112	Retribusi daerah	0,77%	0,75%	0,81%	1,09%	2,90%	1,26%
113	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,41%	0,42%	0,42%	0,54%	0,57%	0,47%
114	Lain-lain PAD yang sah	7,47%	9,08%	7,49%	6,65%	5,67%	7,27%
12	Pendapatan Transfer	77,14%	75,45%	81,74%	82,34%	79,97%	79,33%
121	Transfer Pemerintah Pusat	72,08%	70,55%	76,03%	75,34%	73,52%	73,50%
1.211	Dana Perimbangan	64,55%	65,64%	69,17%	68,05%	67,64%	67,01%
12.11 1	Dana Bagi Hasil	4,33%	8,31%	13,77%	12,23%	8,26%	9,38%
12.11 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	48,17%	44,57%	40,88%	42,01%	49,66%	45,06%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Proporsi (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
12.11 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	12,05%	12,75%	14,51%	13,81%	9,72%	12,57%
1.212	Dana Insentif Daerah	2,56%	0,00%	3,38%	3,67%	1,63%	2,25%
1.213	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.214	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.215	Dana Desa	4,97%	4,91%	3,48%	3,62%	4,24%	4,25%
122	Transfer Antar-Daerah	5,06%	4,90%	5,71%	7,00%	6,44%	5,82%
1.221	Pendapatan Bagi Hasil	4,73%	4,54%	5,39%	6,40%	6,04%	5,42%
1.222	Bantuan Keuangan	0,33%	0,36%	0,32%	0,60%	0,41%	0,40%
13	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,09%	6,25%	1,28%	0,95%	1,10%	3,14%
131	Hibah	5,92%	3,86%	0,43%	0,00%	0,00%	2,04%
132	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
133	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,17%	2,39%	0,85%	0,95%	1,10%	1,09%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, pendapatan transfer Kabupaten Belitung memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lainnya yakni rata-rata mencapai 79,33%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat langsung dari pendapatan daerahnya hanya mencapai rata-rata 17,57% dan pendapatan lainnya yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki rata-rata proporsi sebesar 3,14%. Berikut dibawah ini merupakan grafik proporsi pendapatan daerah Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 66 Rata-Rata Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

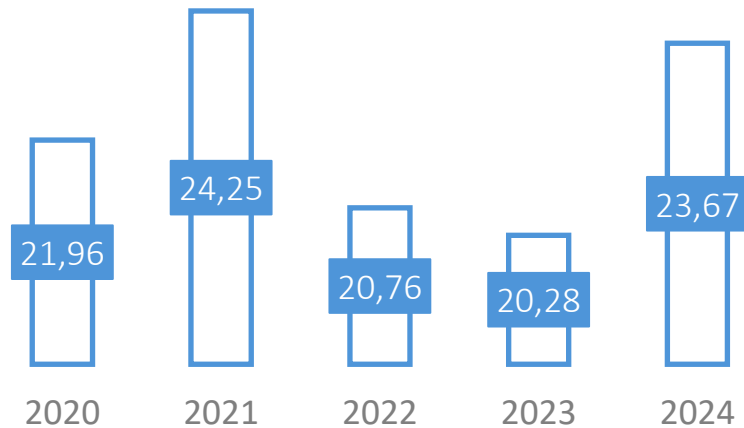
Dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2020 hingga 2024, PAD yang dihasilkan oleh Kabupaten Belitung mencapai 16,94% di tahun 2020, 18,29% di tahun 2021, 16,97% di tahun 2022, 16,70% di tahun 2023 dan 18,93% di tahun 2024. Meskipun PAD Kabupaten Belitung masih di bawah 20%, akan tetapi dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan. Kenaikan proporsi tertinggi untuk PAD ada pada pajak daerah yakni sebesar 9,79%. proporsi ini merupakan proporsi tertinggi setelah tahun 2023 mencapai 8,42%. Untuk pendapatan transfer, terbagi dalam dua sumber pendapatan yakni transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dengan proporsi masing-masing pada tahun 2024 sebesar 73,52% dan 6,44%. Pada pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan terbesar ada pada dana perimbangan dengan proporsi 67,64% sedangkan untuk transfer antar daerah proporsi tertinggi ada pada pendapatan bagi hasil dengan proporsi 6,04%.

Melihat dari susunan proporsi pada masing-masing komponen pendapatan, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Belitung memperoleh pendapatan tertinggi dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Perimbangan sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk mendukung pemerataan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan pada komponen pendapatan transfer antar daerah, proporsi tertinggi ada pada pendapatan bagi hasil. Pendapatan Bagi Hasil adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pembagian penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun dari pengelolaan sumber daya alam, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan proporsi tertentu. Tujuan dari pendapatan bagi hasil adalah untuk memberikan hak keuangan kepada daerah atas pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi di wilayahnya serta untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dengan kondisi tersebut, maka dibutuhkan analisis terkait rasio-rasio pendapatan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara berbagai komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan yang diperoleh dalam satu periode anggaran. Berikut penjabaran pada masing-masing rasio yang telah dihitung.

1. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal merupakan alat pengukur, untuk mengukur seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sehingga semakin tinggi nilai rasio, semakin mandiri suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dalam rasio kemandirian fiskalnya, mencerminkan dinamika ekonomi daerah serta efektivitas kebijakan pengelolaan pendapatan

daerah yang diterapkan. Berikut merupakan rasio kemandirian fiskal Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir:



Gambar 2. 67 Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan data rasio kemandirian fiskal Kabupaten Belitung, terlihat adanya tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio kemandirian fiskal sebesar 21,96%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 24,25%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam perolehan PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2022, rasio ini kembali menurun menjadi 20,76%, dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi 20,28%, hal ini yang mencerminkan adanya peningkatan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Pada tahun 2024, rasio ini kembali mengalami kenaikan menjadi 23,67%, menandakan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Peningkatan rasio pada tahun 2021 dan 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam kinerja PAD, sementara penurunan pada 2022 dan 2023 menunjukkan tantangan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan rasio kemandirian fiskal yang masih berada di kisaran 20-25%, Kabupaten Belitung masih tergolong memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD agar kemandirian fiskal daerah dapat terus ditingkatkan.

Tabel 2.72 Kategori Kemandirian Fiskal Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
21,96	24,25	20,76	20,28	23,67
INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF	INSTRUKTIF

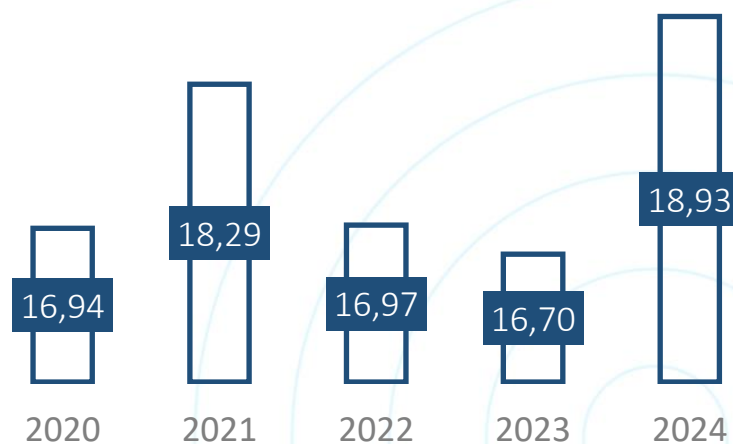
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, nilai kemandirian fiskal di bawah 25 bersifat instruktif, lebih atau sama dengan 50 bersifat konsultatif, lebih atau sama dengan

75 bersifat partisipatif dan lebih atau sama dengan 100 bersifat delegatif. Dalam lima tahun terakhir, kemandirian fiskal Kabupaten Belitung bersifat instruktif, atau biasa disebut *top-down*. Hal ini memiliki arti yakni di mana pemerintah pusat atau kepala daerah memberikan arahan langsung kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, atau berdasarkan instruksi langsung dari Pemerintah pusat. Dengan sifat kemandirian fiskal seperti itu, maka Kabupaten Belitung tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan akan tetapi harus mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi dikarenakan pemerintah Kabupaten Belitung tidak dapat memaksimalkan PAD nya sehingga kemandirian daerah bergantung kepada pemerintah pusat.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan belanja daerahnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar peran daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dalam rasio derajat desentralisasi fiskal, yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan pendapatan daerah serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berikut grafik rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 68 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

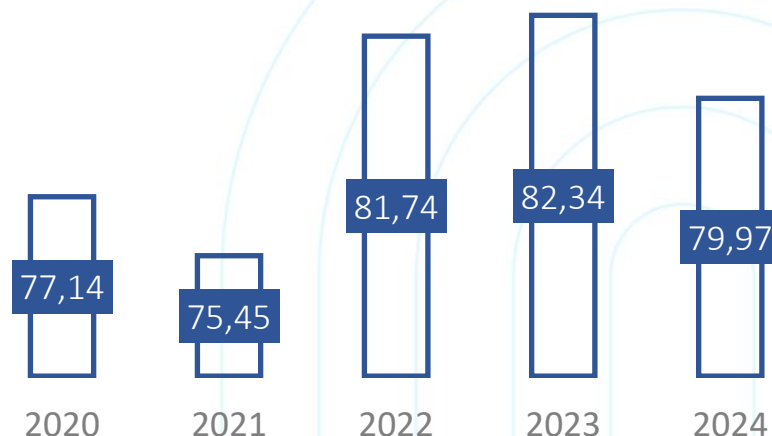
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 16,94%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 18,29%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kontribusi PAD terhadap

total pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, rasio ini kembali turun menjadi 16,97% dan 16,70%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD tidak cukup untuk mengimbangi total pendapatan daerah yang sebagian besar masih berasal dari dana transfer pusat. Pada tahun 2024, rasio ini mengalami kenaikan kembali menjadi 18,93%, yang bisa menjadi indikasi adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dan pemungutan PAD. Rasio derajat desentralisasi fiskal yang masih berada di bawah 20%, Kabupaten Belitung masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Untuk meningkatkan desentralisasi fiskal, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah dana transfer terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat, yang berarti tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah. Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dalam rasio ketergantungan keuangan daerah, yang mencerminkan perubahan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kebijakan alokasi dana transfer dari pusat. Berikut grafik rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 69 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

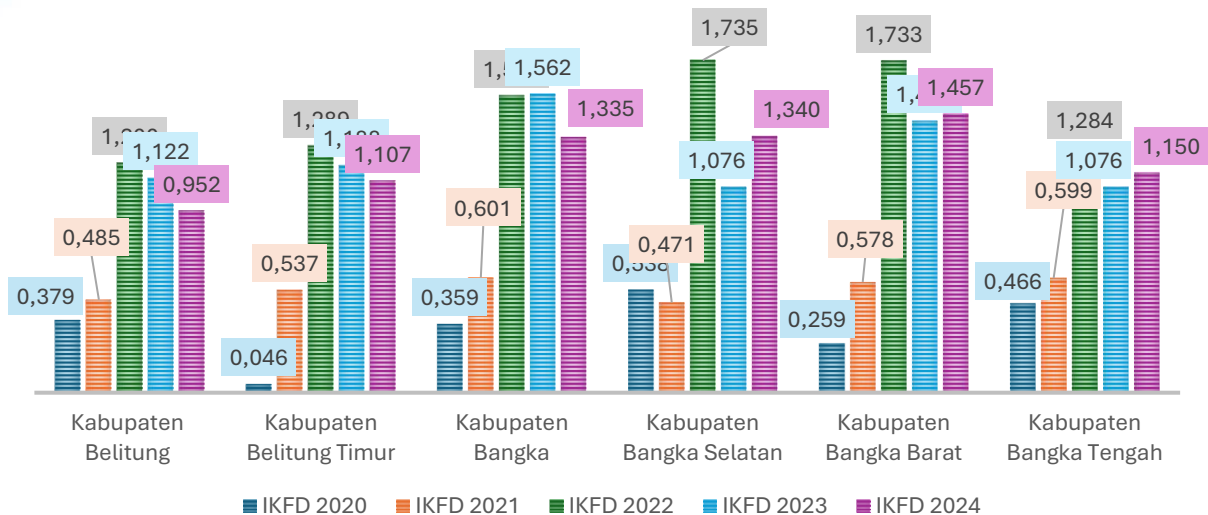
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Belitung cenderung berada pada angka yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan keuangan berada di angka 77,14%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 75,45%, yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, rasio ini kembali meningkat tajam menjadi 81,74% dan 82,34%, yang menandakan peningkatan ketergantungan terhadap dana pusat akibat kemungkinan menurunnya PAD atau meningkatnya alokasi dana transfer. Pada tahun 2024, rasio ini mengalami sedikit penurunan menjadi 79,97%, hal ini dapat mengindikasikan adanya upaya daerah dalam meningkatkan pendapatan sendiri.

Rasio ketergantungan yang masih berada di atas 75%, Kabupaten Belitung masih tergolong memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana pusat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya mandiri dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi PAD, diversifikasi sumber pendapatan daerah, dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal agar mampu menghasilkan pendapatan yang lebih berkelanjutan.

4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) adalah indikator yang mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai RKFD, semakin besar kapasitas keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan layanan publik menggunakan sumber daya keuangan sendiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai pembanding nilai RKFD Kabupaten Belitung maka dibutuhkan juga wilayah/daerah lain yang memiliki luas dan kondisi daerah yang sama dengan daerah yang dimaksud. Oleh karena itu, dipilihlah daerah dengan kondisi yang sama dengan Kabupaten Belitung sebagai bahan pembanding. Berikut di bawah ini RKFD Kabupaten Belitung dan daerah disekitarnya dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 70 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

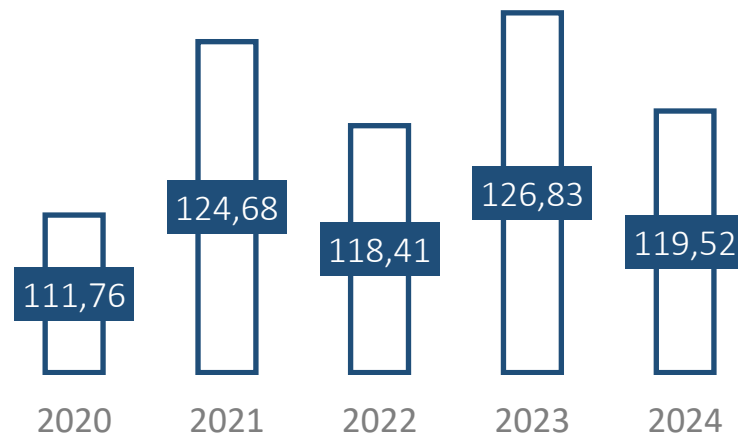
Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi nilai RKFD selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, RKFD Kabupaten Belitung berada pada angka 0,379, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,485. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 1,200, pada tahun tersebut RKFD Kabupaten Belitung menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas fiskal daerah. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai RKFD mengalami penurunan masing-masing menjadi 1,122 dan 0,952, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kemandirian fiskal.

Apabila dibandingkan dengan kondisi daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung memiliki RKFD yang relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, yang pada beberapa tahun terakhir memiliki nilai di atas 1,5. Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur memiliki RKFD yang sangat rendah pada tahun 2020 dan 2021, tetapi menunjukkan pertumbuhan signifikan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan sumber PAD secara berkelanjutan. Untuk memperbaiki kapasitas fiskalnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sektor-sektor yang dinilai potensial dan memperbaiki efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

5. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pendapatan daerah adalah indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah terhadap target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika rasio ini melebihi 100%, berarti pemerintah daerah berhasil melampaui target pendapatannya, sedangkan jika di bawah 100%, berarti realisasi pendapatan masih belum memenuhi target.

Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dalam rasio efektivitasnya, yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan pendapatan daerah dan tingkat akurasi perencanaan fiskal.



Gambar 2. 71 Rasio Efektivitas Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan lebih dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 111,76% dan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 124,68%, kenaikan ini mencerminkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pada tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 118,41%, akan tetapi masih berada dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2023, rasio ini kembali meningkat menjadi 126,83%, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 119,52%, yang masih menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam pencapaian target pendapatan daerah. Secara keseluruhan, Kabupaten Belitung menunjukkan tren positif dalam efektivitas pendapatan daerahnya, yang menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki strategi yang cukup baik dalam perencanaan dan optimalisasi sumber pendapatan.

2.2.2.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Proporsi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Belitung menunjukkan bagaimana prioritas anggaran digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan

masyarakat serta pembangunan daerah. Untuk mengetahui kondisi penggunaan belanja di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir, maka berikut di bawah ini telah disajikan data penggunaan belanja daerah Kabupaten Belitung lima tahun terakhir yang dikeluarkan.

Tabel 2.73 Proporsi Belanja Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Proporsi (%)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
2	BELANJA	100,10 %	100,00 %	108,70 %	110,14 %	100,00%	103,79%
21	Belanja Operasi	75,62%	80,27%	78,38%	86,81%	83,50%	80,92%
21 1	Belanja Pegawai	45,98%	43,69%	42,18%	40,19%	44,82%	43,37%
21 2	Belanja Barang dan Jasa	27,67%	34,21%	33,63%	32,81%	34,23%	32,51%
21 3	Belanja Bunga	0,10%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,03%
21 4	Belanja Subsidi	0,10%	0,12%	0,11%	0,02%	0,06%	0,08%
21 5	Belanja Hibah	1,77%	2,22%	2,27%	13,63%	4,36%	4,85%
21 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,03%	0,19%	0,10%	0,02%	0,07%
22	Belanja Modal	13,54%	8,71%	11,95%	13,63%	6,33%	10,83%
22 1	Belanja Modal Tanah	0,36%	0,50%	0,23%	0,10%	0,39%	0,32%
22 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,08%	2,41%	3,00%	5,61%	2,48%	3,92%
22 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,26%	2,12%	2,25%	3,44%	1,74%	2,76%
22 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,80%	3,41%	6,32%	4,22%	1,39%	3,63%
22 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,04%	0,26%	0,15%	0,25%	0,33%	0,21%
22 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
23	Belanja Tidak Terduga	0,407%	0,08%	0,13%	0,00%	0,00%	0,12%
24	Belanja Transfer	10,53%	10,94%	18,24%	9,71%	10,17%	11,92%
24 1	Belanja Bagi Hasil	0,90%	0,82%	9,54%	0,82%	0,92%	2,60%
24 2	Belanja Bantuan Keuangan	9,63%	10,12%	8,70%	8,88%	9,25%	9,32%

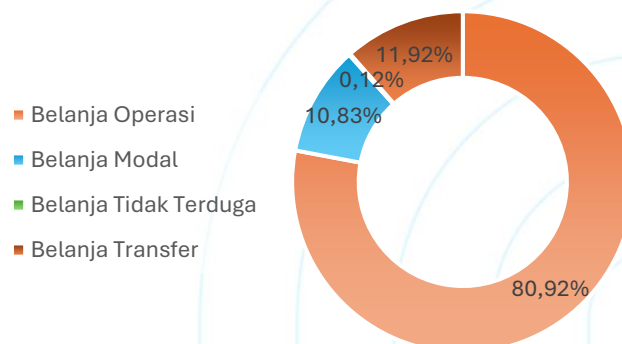
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Dalam beberapa tahun terakhir, belanja daerah Kabupaten Belitung didominasi oleh belanja operasional yang mencakup belanja pegawai, barang dan

jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja pegawai masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur pengeluaran daerah, yang mencerminkan tingginya biaya untuk membiayai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional pemerintahan. Di sisi lain, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi daerah terus diupayakan agar tetap proporsional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari tabel di atas rata-rata Belanja Operasi Kabupaten Belitung berada diangka 80,92% yang artinya sebagian besar penggunaan pendapatan terfokus pada belanja operasi. Dari rata-rata proporsi tersebut, aspek dalam belanja operasi yang mendominasi ada di Belanja Pegawai dengan rata-rata proporsi sebesar 43,37% dan Belanja barang dan jasa memiliki rata-rata proporsi sebesar 32,51%. Selain kedua belanja yang mendominasi dalam komponen belanja operasi terdapat juga belanja hibah dengan rata-rata proporsi 4,85% dan belanja subsidi sebesar 0,08%, belanja bantuan sosial 0,07% dan belanja bunga 0,03%.

Selain belanja operasi, komponen lain dalam belanja daerah yakni belanja transfer dengan rata-rata proporsi 11,92% terdiri dari belanja bantuan keuangan sebesar 9,32% dan belanja bagi hasil sebesar 2,60%. Selanjutnya pada belanja modal memiliki rata-rata proporsi sebesar 10,83% dengan rincian komponen di dalamnya yakni belanja modal peralatan dan mesin sebesar 3,92% belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 3,63%, belanja modal gedung dan bangunan 3,92%, belanja modal tanah sebesar 0,32% dan belanja modal aset tetap lainnya 0,21%. Apabila melihat dari proporsi penggunaan belanja yang ada maka saat ini Kabupaten Belitung masih menggunakan pendapatannya untuk melakukan belanja wajib dan sedikit mengeluarkan dana untuk belanja modal. Berikut di bawah ini grafik proporsi belanja daerah Kabupaten Belitung.



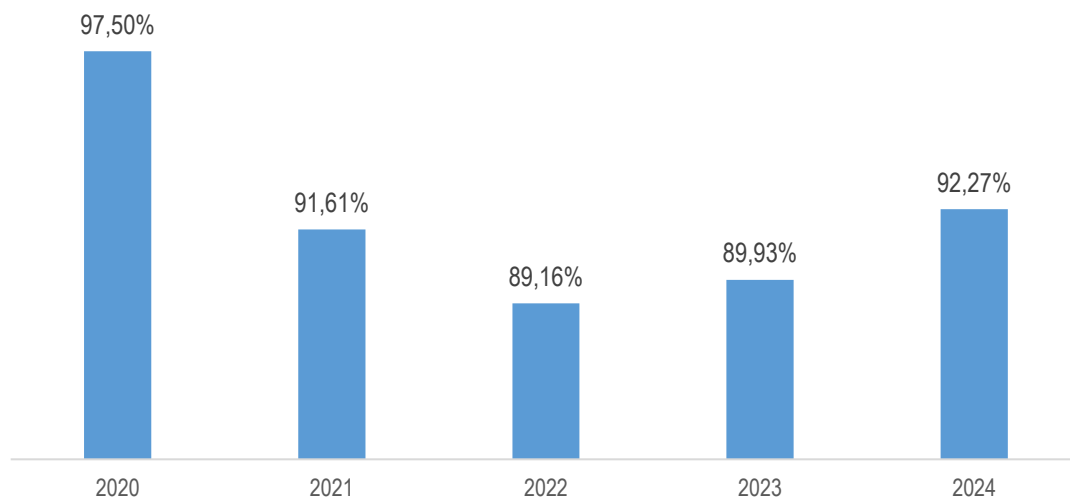
Gambar 2. 72 Rata-Rata Proporsi Belanja Kabupaten Belitung

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dapat direalisasikan dalam bentuk belanja yang efektif. Persentase ini mencerminkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan

anggarannya untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Apabila proporsi realisasi belanja mendekati 100%, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana. Sebaliknya, jika persentasenya rendah, hal ini bisa mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran, seperti permasalahan administrasi, keterlambatan proyek, atau efisiensi yang perlu ditingkatkan.



Gambar 2. 73 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

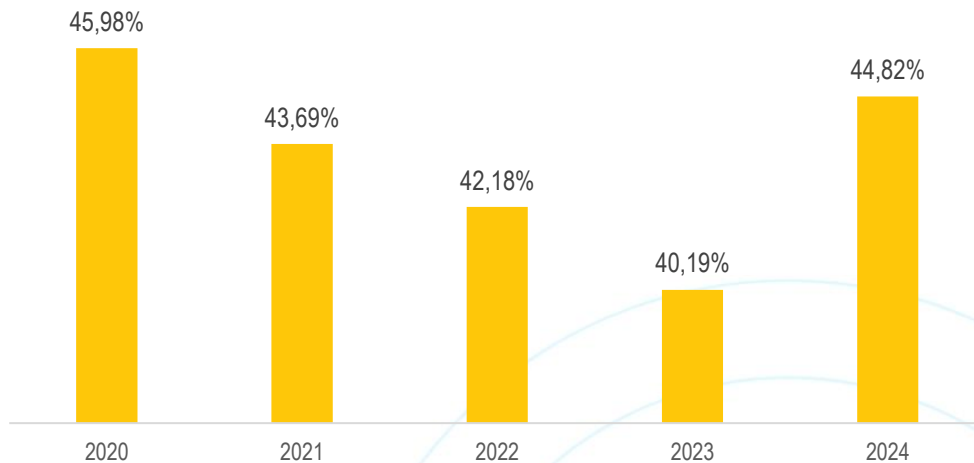
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan data yang ditampilkan, realisasi belanja Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat realisasi belanja mencapai 97,50%, menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi dan hampir sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Namun, pada tahun 2021, angka ini mengalami penurunan menjadi 91,61%, yang kemungkinan disebabkan oleh dinamika dalam pengelolaan anggaran, termasuk dampak pandemi yang mempengaruhi berbagai sektor belanja.

Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022, di mana realisasi belanja hanya mencapai 89,16%, yang menjadi angka terendah dalam periode ini. Meski begitu, pada tahun 2023 terdapat sedikit perbaikan dengan realisasi 89,93%, dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan lebih lanjut menjadi 92,27%. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat realisasi tahun 2020. Melihat dari proporsi realisasi belanja Kabupaten Belitung di atas dapat dikategorikan cukup baik, meskipun adanya fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan perencanaan anggaran yang lebih realistis, mempercepat pelaksanaan program, serta mengurangi hambatan birokrasi agar belanja daerah dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam struktur belanja daerah yang mencerminkan alokasi anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur pemerintah, serta berbagai pengeluaran lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah menjadi indikator penting dalam menilai keseimbangan pengeluaran pemerintah antara kebutuhan operasional dan belanja pembangunan. Jika proporsi belanja pegawai terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal dan program pembangunan yang lebih produktif. Sebaliknya, jika terlalu rendah, dapat mengindikasikan efisiensi atau keterbatasan dalam alokasi anggaran untuk aparatur pemerintahan. Berikut di bawah ini merupakan grafik proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah di Kabupaten Belitung.



Gambar 2. 74 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan dengan grafik di atas, menunjukkan dalam lima tahun terakhir proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Kabupaten Belitung mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun hingga 2023, sebelum meningkat kembali pada 2024. Pada tahun 2020, belanja pegawai mencapai 48,98% dari total belanja daerah, yang menunjukkan bahwa hampir separuh dari anggaran digunakan untuk kebutuhan aparatur pemerintahan. Namun, pada tahun 2021 proporsi ini menurun menjadi 43,69%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 42,18% dan 40,19%.

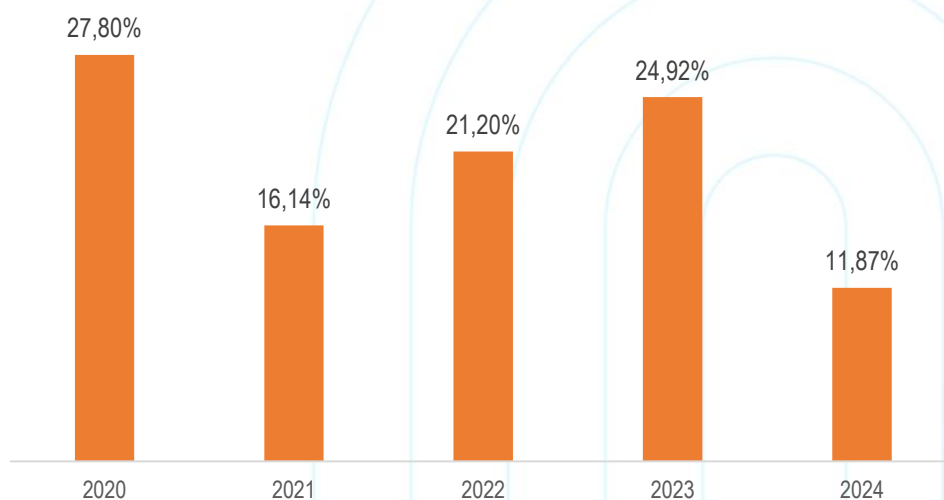
Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyeimbangkan alokasi anggaran agar lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk belanja modal dan program pembangunan. Namun, pada tahun 2024, proporsi belanja pegawai kembali meningkat menjadi 44,82%, Hal

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni peningkatan jumlah pegawai, kenaikan gaji atau tunjangan, serta penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Meskipun terdapat penurunan proporsi belanja pegawai dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi proporsi belanja pegawai Kabupaten Belitung masih dapat dikategorikan cukup besar dibandingkan dengan total belanja daerah. Berdasarkan dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah di atur alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Oleh karena itu daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal UU diundangkan. Apabila melihat isi dari UU tersebut maka Kabupaten Belitung memiliki waktu hingga 2027 untuk menyesuaikan penggunaan anggaran belanja pegawainya hingga tidak melebihi 30% dari total keseluruhan belanja daerah.

3. Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum

Belanja modal merupakan komponen penting dalam anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan aset, serta investasi yang dapat meningkatkan layanan publik dan perekonomian daerah. Salah satu cara mengukur efektivitas belanja modal adalah dengan membandingkannya terhadap Dana Transfer Umum (DTU), yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Proporsi belanja modal terhadap DTU mencerminkan seberapa besar dana transfer dari pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk belanja produktif, dibandingkan dengan belanja operasional atau rutin. Semakin tinggi proporsi ini, semakin besar investasi daerah dalam pengembangan infrastruktur dan aset yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



Gambar 2. 75 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan dengan grafik di atas, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi belanja modal cukup tinggi, yakni 27,80%, menunjukkan alokasi yang cukup besar untuk pembangunan dan investasi daerah. Namun, pada tahun 2021, angka ini turun drastis menjadi 16,14%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebutuhan prioritas belanja lain, seperti penanganan dampak pandemi dan pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan proporsi belanja modal menjadi 21,20%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam alokasi anggaran untuk belanja produktif. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan peningkatan lebih lanjut menjadi 24,92%, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur. Namun, pada tahun 2024, proporsi belanja modal terhadap DTU kembali mengalami penurunan drastis hingga 11,87%, yang dapat disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal, peningkatan belanja operasional, atau keterbatasan ruang fiskal akibat beban belanja pegawai yang meningkat.

4. Proporsi SILPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi perencanaan anggaran dan realisasi belanja pemerintah daerah. Proporsi yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan program, ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, atau perencanaan anggaran yang kurang optimal. Sebaliknya, proporsi yang terlalu rendah menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran telah terserap, namun tetap perlu diimbangi dengan efektivitas dalam penggunaannya. Berikut di bawah ini grafik proporsi SiLPA terhadap belanja daerah Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. 76 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, proporsi SiLPA terhadap belanja daerah di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi SiLPA cukup tinggi, yakni 19,10%, yang mengindikasikan adanya sisa anggaran yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian belanja akibat pandemi, efisiensi anggaran, atau program yang tertunda. Pada tahun 2021, terjadi penurunan cukup signifikan hingga menjadi 12,27%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai lebih optimal dalam merealisasikan belanja daerahnya. Pada tahun 2022, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 13,31%, dan semakin meningkat pada tahun 2023 hingga 15,94%. Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya dana yang belum terserap secara maksimal, baik karena perencanaan yang lebih hati-hati atau kendala dalam pelaksanaan program dan proyek daerah. Pada tahun 2024, proporsi SiLPA terhadap belanja daerah kembali meningkat menjadi 17,50%, mendekati proporsi di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar yang dibawa dari tahun sebelumnya, yang mungkin disebabkan oleh program yang tertunda, efisiensi anggaran, atau realisasi belanja yang belum optimal.

Secara keseluruhan, meskipun proporsi SiLPA terhadap belanja daerah Kabupaten Belitung menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi akumulasi SiLPA yang terlalu tinggi di tahun berikutnya.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Tujuan dari Analisis Pembiayaan Daerah adalah untuk memahami dampak kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit anggaran belanja daerah. Hal ini menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pembiayaan ke depan guna menilai kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah sendiri mencakup transaksi keuangan daerah yang bertujuan menutupi selisih antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Analisis pembiayaan dalam penyusunan RPJMD memuat Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, Pembiayaan Pembangunan diluar APBD, serta Pembiayaan Pembangunan diluar APBD.

2.2.2.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan anggaran yang digunakan dalam menutup defisit riil Pemerintah Kabupaten Belitung pada periode sebelumnya. Defisit Riil dihitung berdasarkan selisih antara realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah, ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila belanja daerah melebihi pendapatan, maka



terjadi defisit yang perlu ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar dari belanja, maka akan muncul surplus. Data lengkap mengenai penutupan defisit melalui Penerimaan Pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel Defisit Riil Anggaran, sementara komposisi sumber penutupannya diuraikan dalam Tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran. Untuk melihat rincian perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung selama periode tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74 Defisit Rill Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	957.021.600.971,110	1.016.168.466.318,450	1.107.840.034.233,530	1.117.439.818.908,800	977.370.141.296,330
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.032.032.453.295,430	995.246.173.234,200	1.074.182.835.247,830	1.108.448.343.633,000	1.060.977.510.829,400
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	3.000.000.000,000
A	Defisit riil	(75.010.852.324,320)	20.922.293.084,250	33.657.198.985,700	8.991.475.275,800	(86.607.369.533,070)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	197.095.344.330,690	122.084.492.006,370	143.011.194.608,620	176.640.556.760,970	185.632.032.036,770
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	197.095.344.330,690	122.084.492.006,370	143.011.194.608,620	176.640.556.760,970	185.632.032.036,770
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	122.084.492.006,370	143.006.785.090,620	176.668.393.594,320	185.632.032.036,770	99.024.662.503,700

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun terakhir (2020–2024 *Unaudited*), kondisi keuangan Kabupaten Belitung cenderung surplus daripada defisit. Surplus terjadi pada tahun 2021–2023, sedangkan defisit anggaran hanya terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2024. Defisit anggaran cukup besar terjadi pada tahun 2024 lebih dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang turun signifikan yakni sebesar 13%. Di sisi lain, realisasi belanja juga berkurang sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dalam rangka menjaga proses pembangunan supaya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup defisit anggaran dengan menggunakan penerimaan pembiayaan mengingat pemerintah Kabupaten Belitung masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran.

Jika dilihat lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa defisit anggaran yang paling besar adalah pada tahun 2024. Defisit anggaran pada tahun tersebut mencapai Rp86.607.369.533,070. Faktor terbesar yang mempengaruhi defisit anggaran tersebut adalah karena berkurangnya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 14% dari yang sebelumnya Rp841.876.178.892,00 di tahun 2023 menjadi Rp718.586.357.912,00 pada tahun 2024. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Belitung telah berusaha melaksanakan efisiensi dan penghematan belanja merespons terhadap pengurangan alokasi dana transfer tersebut. Efisiensi dan penghematan terlihat dari total belanja pada tahun 2024 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan total belanja pada tahun 2023 dari yang awalnya Rp1.108.448.343.633,000 di tahun 2023 menjadi Rp1.060.977.510.829,400.

Menyikapi defisit anggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Belitung mengambil kebijakan sebagai jalan tengah selain melaksanakan efisiensi anggaran, pemerintah juga menggunakan menutup sisa defisit riil anggaran dengan menggunakan penerimaan pembiayaan. Pada tahun 2024, pemerintah masih memiliki SiLPA sebesar Rp185.632.032.036,770. Dengan jumlah SiLPA tersebut, pemerintah masih memiliki kemampuan yang cukup dalam menutup defisit anggaran. Dari segi proporsi anggaran, SiLPA pada tahun 2024 adalah sebesar 262,76% jika dibandingkan dengan jumlah defisit anggaran. Artinya pemerintah memiliki kemampuan lebih dari dua kali lipat untuk menutup defisit tahun 2024 hanya dengan mengandalkan SiLPA dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan gambaran secara lebih rinci mengenai proporsi atau komposisi penutup defisit riil anggaran pemerintah Kabupaten Belitung. Jika angka di dalam tabel tersebut menunjukkan angka negatif, maka pada tahun tersebut terdapat defisit riil anggaran, sebaliknya jika angkanya positif maka pada tahun tersebut terjadi surplus pada pembiayaan daerah.

Tabel 2.75 Proporsi Total Defisit Rill Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari total defisit rill				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-262,76%	583,51%	424,91%	1964,53%	-214,34%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

2.2.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa lebih perhitungan anggaran umumnya diperoleh dari beberapa sumber meliputi Pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan, Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan. Mengacu pada riwayat penganggaran dalam rentang waktu lima tahun terakhir, maka dapat dilihat bahwasannya dari 6 sumber SILPA tersebut hanya 4 sumber yang berkontribusi pada SILPA di Kabupaten Belitung yaitu:

1. Pelampauan penerimaan PAD
2. Pelampauan penerimaan dana perimbangan
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

Dari 4 sumber SILPA tersebut, hanya satu sumber yang secara konsisten memiliki rata-rata pertumbuhan positif yaitu pelampauan penerimaan PAD. Sedangkan jika dilihat dari proporsi, maka kontribusi terbesar pada SILPA adalah bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya secara konsisten pada 5 tahun terakhir berkontribusi lebih dari 60% dalam pembentukan SILPA meskipun memiliki kecenderungan untuk turun setiap tahunnya. Jika dilihat lebih lanjut, dari komponen pembentuk SILPA terlihat bahwa target PAD selalu tercapai yang ditunjukkan dengan nilai positif pada komponen SILPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD.

Tabel 2.76 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	122.084.492.006,3700	100%	143.006.785.090,6200	100,00%	173.663.984.075,7000	100,00%	185.659.868.869,8000	100,00%	99.023.375.881,9300	100,00%	-0,03
1	Pelampauan penerimaan PAD	17.058.944.640,4600	0,14	36.801.909.550,9800	0,26	29.238.083.334,5300	0,17	39.481.900.145,8000	0,21	30.220.486.993,3300	0,31	1,06
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(27.009.845.646,3500)	-0,22	16.944.163.190,4700	0,12	15.558.521.778,0000	0,09	22.659.062.240,0000	0,12	(19.799.370.754,0000)	-0,20	-3,89
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(3.173.784.382,0000)	-0,03	(1.929.719.823,0000)	-0,01	(1.788.922.472,0000)	-0,01	(551.689.242,0000)	-0,00	(219.735.476,0000)	-0,00	-1,48
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	135.209.177.394,2600	1,11	91.190.432.172,1700	0,64	130.656.301.435,1700	0,75	124.070.595.726,0000	0,67	88.821.995.118,6000	0,90	-0,22
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6	Kegiatan lanjutan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

2.2.2.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan dalam pembahasan ini menjelaskan tentang sisa lebih pembiayaan anggaran yang riil dan dapat digunakan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran yang riil diperoleh dari Saldo Kas neraca daerah setelah dikurangi Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun serta Kegiatan lanjutan (jika masih ada).

Sisa lebih (Riil) Pembiayaan anggaran pemerintah Kabupaten Belitung dari tahun 2020-2024 secara umum memiliki kecenderungan berkurang. Jumlah Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran pada tahun 2024 turun signifikan hampir setengah dari tahun 2023. Kenaikan dari tahun 2020 – 2023 konsisten naik meskipun dengan pertumbuhan yang variatif. Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan 2020 naik sebesar 16,98% menjadi Rp145.300.036.020,62, pada tahun 2022 naik 21,73% menjadi Rp176.868.596.086,32 dan pada tahun 2023 naik 5,15% menjadi Rp185.984.996.523,77. sedangkan pada tahun 2024 turun signifikan sebesar -46,66% menjadi Rp99.203.198.775,70. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan dari tahun 2020-2024 adalah -0,70%. Berikut merupakan rincian sisa lebih riil pembiayaan anggaran pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.77 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	124.213.585.649,37	145.300.036.020,62	176.868.596.086,32	185.984.996.523,77	99.203.198.775,70
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
3	Kegiatan lanjutan					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	124.213.585.649,37	145.300.036.020,62	176.868.596.086,32	185.984.996.523,77	99.203.198.775,70

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2025 (diolah)

Berdasarkan data historis tersebut, maka dapat diketahui bahwa sisa lebih riil pembiayaan anggaran pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun pada baseline tahun 2020. Realisasi Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran pada tahun 2020 ialah sebesar Rp. 124.213.585.649,37, sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga pada angka Rp. 99.203.198.775,70. Perlu diingat bahwa belanja modal berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Apabila semakin kecil sisa belanja modal dari pemerintah yang direncanakan dengan baik, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran akan semakin kecil dan sebaliknya. Hal tersebut



membuktikan bahwa tingkat perencanaan daerahnya sudah baik sehingga menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggarannya semakin kecil.

Hasil proyeksi sisa lebih riil pembiayaan anggaran tahun 2025-2030 secara lebih detail adalah sebagai berikut.

Tabel 2.78 Hasil proyeksi sisa lebih riil pembiayaan anggaran tahun 2025-2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	99.203.198.775,70	-5,76%	99.023.375.881,70	64.343.658.260,96	60.637.463.500,00	57.144.745.600,00	53.853.208.300,00	50.751.263.500,00
	Dikurangi:								
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	99.203.198.775,70	-5,76%	99.023.375.881,70	64.343.658.260,96	60.637.463.500,00	57.144.745.600,00	53.853.208.300,00	50.751.263.500,00

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Pada data tabel proyeksi diatas diketahui bahwa proyeksi sisa lebih riil pembiayaan anggaran untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Sisa lebih riil pembiayaan anggaran diproyeksikan akan turun 4,22% setiap tahunnya. Sisa lebih riil pembiayaan anggaran pada tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi Rp73.526.674.986,04 dan akan terus berkurang menjadi Rp54.944.165.517,74 pada tahun 2030.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendanaan pemerintah daerah untuk beberapa tahun ke depan tidak dapat dipisahkan dari data historis, yaitu perkembangan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menganalisis proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di masa mendatang, diperlukan analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama lima tahun terakhir. Analisis ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode tersebut serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk dukungan terhadap pencapaian target prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi peramalan (*forecast*), yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan nilai berdasarkan data historis selama lima tahun terakhir, ditambah dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada masa Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Belitung, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam beberapa tahun mendatang. Secara umum, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga jenis: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah yang Sah lainnya. Sedangkan belanja daerah terbagi menjadi empat jenis: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung selama tahun 2026 hingga 2030 dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi dan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta belanja yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima serta kebijakan-kebijakan terkait dengan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah dan kondisi peningkatan pendapatan daerah, serta pertimbangan/ kebijakan lainnya.

2.2.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,07%,

Melihat pada hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mencapai sebesar 7,52%, dimana pada tahun 2026 telah ditetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp197.193.996.662. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi pada tahun 2026 antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 mengandung harapan tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagai antisipasi adanya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Pada pendapatan transfer diproyeksikan memiliki pertumbuhan 17,27% dengan rincian transfer pemerintah pusat sebesar 15,38% dan transfer antar daerah 64,10%. Pada tahun 2026 transfer pemerintah pusat sebesar Rp 798.501.798.569,00 dan mengalami pertumbuhan sebesar Rp1.257.765.298.100,00 pada tahun 2030. Pada transfer antar daerah di tahun 2026 sebesar Rp41.843.788.756,00 dan mengalami pertumbuhan di tahun 2030 sebesar Rp111.331.437.300,00.

Tabel 2.79 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026-2030

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1.037.539.583.987,00	1.714.565.495.500,00	1.721.934.358.400,00	1.562.841.219.700,00	1.630.584.647.500,00	15,19%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	197.193.996.662,00	235.307.998.700,00	243.369.238.100,00	251.835.383.000,00	261.487.912.100,00	7,52%
1.1.1.	Pajak daerah	109.897.121.493,00	120.886.833.700,00	126.931.175.400,00	133.277.734.200,00	139.941.621.000,00	6,25%
1.1.2.	Retribusi daerah	78.451.867.249,00	104.743.042.000,00	106.301.821.400,00	107.940.357.200,00	110.423.872.400,00	9,71%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	5.775.000.000,00	6.063.750.000,00	6.366.937.500,00	6,25%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	3.845.007.920,00	4.178.123.000,00	4.361.241.300,00	4.553.541.600,00	4.755.481.200,00	5,47%
1.2	Pendapatan Transfer	840.345.587.325,00	1.479.257.496.800,00	1.478.565.120.300,00	1.311.005.836.700,00	1.369.096.735.400,00	17,27%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	798.501.798.569,00	1.336.286.883.200,00	1.323.295.367.300,00	1.242.195.166.800,00	1.257.765.298.100,00	15,38%
1.2.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	41.845.021.000,00	177.754.030.700,00	148.945.811.500,00	106.696.439.700,00	71.507.705.000,00	61,81%
1.2.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	481.618.167.262,00	621.641.399.400,00	652.175.337.800,00	660.472.417.100,00	686.015.966.100,00	9,78%
1.2.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	127.958.227.670,00	351.388.664.200,00	344.629.953.300,00	284.801.439.900,00	322.718.602.800,00	42,16%
1.2.1.4	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	94.827.488.052,00	104.310.236.900,00	109.525.748.700,00	115.002.036.100,00	118.452.097.200,00	5,75%
1.2.1.5	Dana Insentif Daerah	10.638.258.585,00	39.319.912.000,00	26.145.876.000,00	33.350.194.000,00	17.198.287.000,00	53,81%
1.2.1.6	Dana Desa	41.614.636.000,00	41.872.640.000,00	41.872.640.000,00	41.872.640.000,00	41.872.640.000,00	0,15%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	41.843.788.756,00	142.970.613.600,00	155.269.753.000,00	68.810.669.900,00	111.331.437.300,00	64,10%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.720.188.756,00	40.392.207.600,00	42.411.818.000,00	44.532.408.900,00	46.759.029.300,00	6,25%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.123.600.000,00	102.578.406.000,00	112.857.935.000,00	24.278.261.000,00	64.572.408.000,00	499,89%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	Hibah	Rp-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	Dana Darurat	Rp-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2026-2030 berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
- 2) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi *Online*, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan
- 3) Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
 - Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment*;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - Melakukan *review* dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;
- 4) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 5) Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat;
- 6) Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
- 7) Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
- 8) Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;
- 9) Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
- 10) Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya;

- 11) Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

2.2.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Pada pos belanja daerah Kabupaten Belitung secara keseluruhan pada rentang waktu tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 14,05%, dimana untuk belanja operasi rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4,04%, untuk belanja modal rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 79,84%. Untuk belanja tidak terduga dalam kurung waktu tahun 2026-2030 diproyeksikan tidak akan meningkat. Untuk belanja transfer rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 6,38%.

Bila melihat pada jenis belanja operasi, untuk belanja pegawai di Kabupaten Belitung pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 3,50%, disisi lain peningkatan belanja pegawai diperlukan dalam rangka melakukan antisipasi terhadap penerimaan pegawai baru.

Untuk belanja barang dan jasa di Kabupaten Belitung pada tahun 2026 hingga 2030 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 6,00% yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Belitung melalui belanja infrastruktur, sehingga belanja modal selama tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan positif sebesar 79,84% dan memiliki proporsi yang semakin meningkat dengan rata-rata proporsi sebesar 32%-36% dari total belanja daerah. Proyeksi belanja daerah dilakukan diantaranya dengan memperhatikan asumsi-asumsi seperti: Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung tahun 2020 hingga 2024 dan analisis logis terhadap kebutuhan peningkatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung, terutama yang mendukung program prioritas; serta adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Tabel 2.80 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026-2030

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1.101.883.242.247,96	1.775.202.959.000,00	1.779.079.104.000,00	1.616.694.428.000,00	1.681.335.911.000,00	14,05%
2.1	Belanja Operasi	844.225.657.584,96	996.089.422.400,00	1.019.508.610.200,00	950.337.342.700,00	975.123.679.400,00	4,04%
2.1.1	Belanja Pegawai	518.089.896.290,22	543.994.391.100,00	560.314.222.800,00	577.123.649.500,00	594.437.359.000,00	3,50%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	302.943.379.103,04	424.120.730.700,00	432.603.145.300,00	346.082.516.200,00	353.004.166.500,00	6,00%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	75.000.000,00	82.500.000,00	84.975.000,00	87.524.300,00	90.150.000,00	4,75%
2.1.5	Belanja Hibah	22.614.242.191,70	27.137.090.600,00	25.780.236.100,00	26.295.840.800,00	26.821.757.600,00	4,75%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	503.140.000,00	754.710.000,00	726.031.000,00	747.811.900,00	770.246.300,00	13,05%
2.2	Belanja Modal	149.513.929.180,00	642.230.937.520,00	621.861.801.990,00	531.357.425.880,00	571.456.584.050,00	79,84%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.303.276.468,00	50.758.191.200,00	30.454.914.700,00	31.368.562.100,00	32.309.619.000,00	29,00%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.558.882.500,00	314.992.298.900,00	312.532.830.800,00	255.200.038.400,00	276.368.542.600,00	87,15%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.082.537.982,00	270.354.291.920,00	272.625.377.890,00	238.415.173.280,00	256.277.297.350,00	96,65%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.533.232.230,00	6.086.555.500,00	6.208.286.600,00	6.332.452.300,00	6.459.101.300,00	4,00%
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	36.000.000,00	39.600.000,00	40.392.000,00	41.199.800,00	42.023.800,00	4,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00%
2.4	Belanja Transfer	106.143.655.483,00	134.882.599.080,00	135.708.691.810,00	132.999.659.420,00	132.755.647.550,00	6,38%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.924.695.671,80	13.070.416.070,00	13.723.936.880,00	14.410.133.740,00	15.130.640.440,00	6,15%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	94.218.959.811,20	121.812.183.010,00	121.984.754.930,00	118.589.525.680,00	117.625.007.110,00	6,46%

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan seperti yang tertera sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah Kabupaten Belitung diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan daerah;
- 2) Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
- 3) Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
- 4) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
- 5) Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga mendekati 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
- 6) Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belitung, maka disesuaikan dengan kebijakan kedepannya agar disesuaikan dengan Dana Transfer, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
- 7) Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- 8) Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 9) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;
- 10) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di RSUD;
- 11) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan dalam kisaran persentase yang ditetapkan oleh pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
- 12) Pengalokasian anggaran *mandatory* lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 13) Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.



2.2.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada proyeksi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan pada tahun 2026 hingga 2030 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan pada tahun 2026 hingga 2030 mengalami penurunan, dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dioptimalkan untuk membiayai belanja. Pada pos penerimaan pembiayaan Kabupaten Belitung diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -5,76%, dan sebesar 0,00% untuk pengeluaran pembiayaan dikarenakan tidak memiliki realisasi dari tahun 2020- 2024.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2026 hingga 2030 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026-2030

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	64.343.658.260,96	60.637.463.500,00	57.144.745.600,00	53.853.208.300,00	50.751.263.500,00	-5,76%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	64.343.658.260,96	60.637.463.500,00	57.144.745.600,00	53.853.208.300,00	50.751.263.500,00	-5,76%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Pembiayaan daerah merupakan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam RPD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- 1) SiLPA yang terpasang pada tahun 2026 - 2030 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA dalam 4 tahun terakhir. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan memerlukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya, sehingga diperlukan perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- 2) Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
- 3) Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ *Non-Governmental Organization* melalui *Publik Private Partnership*, seperti : KPBU atau optimalisasi CSR. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan. KPBU juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Selain itu, skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

2.2.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

2.2.3.2.1. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas riil keuangan daerah guna menilai kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dengan mengurangi total penerimaan daerah yang mencakup Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (berdasarkan Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Kapasitas riil keuangan daerah di Kabupaten Belitung diproyeksikan naik setiap tahunnya. Mengacu pada pola penganggaran pada periode sebelumnya, maka pendapatan di Kabupaten Belitung diproyeksikan naik dari

Rp1.101.883.242.247,96,00 pada tahun 2026 menjadi Rp1.681.335.911.000,00 pada tahun 2030. Kenaikan proyeksi pendapatan diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah dari sisi penyerapan anggaran belanja pemerintah yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya sisa lebih riil perhitungan anggaran pada tahun 2030. Sisa lebih riil perhitungan anggaran diproyeksikan semakin berkurang hingga menjadi Rp 50.751.263.500,00 pada tahun 2030.

Tabel 2.82 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.037.539.583.987,00	1.714.565.495.500,00	1.721.934.358.400,00	1.562.841.219.700,00	1.630.584.647.500,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	64.343.658.260,96	60.637.463.500,00	57.144.745.600,00	53.853.208.300,00	50.751.263.500,00
	Total Penerimaan	1.101.883.242.247,96	1.775.202.959.000,00	1.779.079.104.000,00	1.616.694.428.000,00	1.681.335.911.000,00
	Dikurangi:					
1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.101.883.242.247,96	1.775.202.959.000,00	1.779.079.104.000,00	1.616.694.428.000,00	1.681.335.911.000,00

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

2.2.3.2.2. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk mengevaluasi kapasitas keuangan riil daerah guna menilai kemampuannya dalam membiayai program prioritas pembangunan. Dalam perhitungan ini, kapasitas keuangan riil daerah diperoleh melalui pengurangan total penerimaan daerah (termasuk Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan sesuai Perda, dan Sisa Lebih Riil Anggaran) terhadap belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, telah dilakukan perhitungan yang menghasilkan gambaran kapasitas riil keuangan Kabupaten Belitung untuk periode 2026 hingga

2030. Berikut merupakan hasil proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitung selama lima tahun kedepan:

Tabel 2.83 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.101.883.242.247,96	1.775.202.959.000,00	1.779.079.104.000,00	1.616.694.428.000,00	1.681.335.911.000,00
2	Prioritas 1	258.089.593.578,16	416.282.514.234,11	417.651.970.679,33	379.928.779.939,18	395.513.535.866,35
3	Prioritas 2	437.322.553.922,09	707.849.761.283,35	709.760.544.962,29	644.752.373.763,34	658.841.495.082,22
4	Prioritas 3	406.471.094.747,71	651.070.683.482,54	651.666.588.358,38	592.013.274.297,48	626.980.880.051,42

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan menjadi salah satu pilar utama dalam memulai sebuah perencanaan pembangunan guna membuat perencanaan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Belitung sebelumnya telah dipetakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung 2025 – 2045. Permasalahan tersebut belum dapat langsung dijadikan sebagai pilar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung karena perlu dikontekstualkan sebagai permasalahan yang dapat diatasi dalam kurun waktu kurang dan/atau sama dengan 5 tahun. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bappeda melakukan pembahasan kembali dan telah merumuskan kembali masalah-masalah pembangunan untuk RPJMD Kabupaten Belitung 2025 – 2029, berikut ini daftar permasalahan yang telah dipetakan pada setiap urusan pembangunan.

Tabel 2.84 Daftar Permasalahan

Urusan	Daftar Permasalahan
Pendidikan	- Akses pendidikan masih terbatas. Jumlah sekolah negeri masih separuhnya dari sekolah swasta. Jumlah sekolah terutama untuk anak-anak di wilayah yang jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan masih perlu ditambah. - Jumlah guru belum merata di tiap-tiap kecamatan - Jumlah guru di sekolah negeri hanya separuh dari jumlah guru di sekolah swasta - Jumlah murid di sekolah negeri kurang dari separuh jumlah murid di sekolah swasta - Jumlah sekolah, guru dan murid Raudhatul Athfal belum merata di tiap-tiap kecamatan, Sebagian besar terkonsentrasi di ibukota kabupaten - Masih sangat sedikit jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Belitung - Jumlah guru di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Belitung menurun, namun jumlah murid meningkat - Hanya ada 1 Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Belitung, yaitu di Ibukota Kabupaten - Masih belum merata jumlah guru dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di tiap kecamatan , bahkan masih ada 2 kecamatan yang belum ada SMA nya - Jumlah guru dan murid SMK belum tersebar secara merata, masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten - Masih terdapat 1 kecamatan yang belum memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). - Hanya ada 1 Madrasah Aliyah di Kabupaten Belitung yaitu di Ibukota Kabupaten - Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana lembaga PAUD, yaitu PAUD di daerah yang jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan, PAUD Swadaya Masyarakat (Kelompok Belajar), PAUD dengan jumlah anak didik banyak, dan PAUD yang baru didirikan atau SPS (Satuan PAUD Sejenis) yaitu layanan PAUD

Urusan	Daftar Permasalahan
	non formal seperti Pos PAUD , PAUD berbasis Masjid, atau PAUD berbasis komunitas - Pelayanan pendidikan memiliki beberapa permasalahan yang penting untuk ditanggapi mulai dari kepemimpinan, SDM, dan anggaran. Berikut adalah daftar permasalahan dalam pendidikan: - Kurangnya Komitmen Pimpinan: Kurangnya komitmen dari pimpinan yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan. - SDM yang Tidak Memadai: Sumber daya manusia yang tidak memadai dan kurangnya keahlian di antara staf. - Data yang Tidak Valid: Data yang tidak akurat atau tidak lengkap menghambat pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif. - Anggaran Terbatas: Keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan inisiatif pendidikan yang komprehensif. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara Dinas Pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Kesehatan	- Belum ada rumah sakit bersalin di Kabupaten Belitung - Masih ada kecamatan yang belum mempunyai poliklinik - Hanya ada 1 kecamatan yang mempunyai apotek - Jumlah tenaga Kesehatan, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kefarmasian belum merata di tiap kecamatan, masih sangat terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten - Masih ada 2 kecamatan yang belum mempunyai puskesmas rawat inap - Masih ada 1 kecamatan yang belum mempunyai puskesmas baik rawat inap maupun non rawat inap - Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit Umum, puskesmas rawat inap, puskesmas non rawat inap, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya sesuai standar - Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain HIV/AIDS, TB, dll., dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll. - Untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, berbagai aspek harus diperhatikan dan ditingkatkan. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang kerap menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan: ▪ Kekurangan Tenaga Medis: Kurangnya tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. ▪ Fasilitas Kesehatan Terbatas: Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan. ▪ Kurangnya Pelatihan: Pelatihan dan pengembangan yang tidak memadai untuk profesional kesehatan. ▪ Pendanaan yang Tidak Memadai: Pendanaan yang tidak mencukupi untuk layanan dan program kesehatan. ▪ Koordinasi Antar Lembaga Kesehatan: Kurangnya koordinasi antara lembaga kesehatan.

Urusan	Daftar Permasalahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Belum optimalnya penyelenggaraan serta informasi terkait kebijakan, pengendalian, serta pemanfaatan tata ruang. - Belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan standar jalan kabupaten maupun jalan non status yang mengakibatkan terdapatnya jalan yang belum diaspal, rusak, hingga rusak berat di kabupaten Belitung. - Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air - Masih terdapat genangan di beberapa titik di Belitung karena curah hujan tinggi dan adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal - Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung pemerintah dan swasta. - Masih diperlukan penambahan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum baik di jalan nasional, provinsi maupun kabupaten - Masih tingginya biaya operasional PJU, sehingga perlunya pemanfaatan energi alternatif secara masif untuk mengurangi beban biaya listrik pada PJU - Permasalahan dalam pekerjaan umum dan penataan ruang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang efektif menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, berbagai tantangan seringkali menghambat upaya ini seperti: - Infrastruktur yang Kurang baik: Kualitas infrastruktur yang kurang baik mempengaruhi layanan publik dan pembangunan. - Perencanaan yang Lemah: Lambatnya perencanaan penyusunan serta pengawasan dan pengendalian tata ruang yang lemah. - Pendanaan Terbatas: Keterbatasan dana untuk proyek pekerjaan umum dan infrastruktur. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara berbagai departemen pekerjaan umum dan lembaga. - Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan umum yang komprehensif.
Perumahan Dan Kawasan Permukiman	- Tidak tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran; - Tidak ada sistem pengolahan sampah yang sesuai standar; - Pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis; - Kurangnya kualitas, kuantitas, serta akses air minum dan sanitasi yang aman di Kabupaten Belitung secara keseluruhan; - Masih ada akses jalan yang tidak sesuai dengan standar teknis; - Perlunya penataan Kawasan kumuh seperti gang-gang yang sempit dan tidak teratur; - Masih diperlukannya revitalisasi Sungai; - Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman; - Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni; - Kurang atau terbatasnya lahan untuk pembangunan infrastruktur yang menghambat pembangunan serta konsekuensi mahal biaya pembiayaan infrastruktur akibat faktor pembiayaan lahan.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Perumahan dan kawasan permukiman yang layak adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, banyak hambatan yang dihadapi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau dan lingkungan permukiman yang sehat. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan: ▪ Kekurangan Perumahan: Kurangnya perumahan untuk memenuhi kebutuhan populasi. ▪ Kualitas Permukiman yang Kurang baik: Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang kurang baik. ▪ Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan perumahan. ▪ Keterbatasan Lahan: Keterbatasan lahan untuk proyek perumahan baru. ▪ Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara badan pengembangan perumahan dan pemangku kepentingan.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	- Masih adanya temuan pelanggaran peraturan. - Masih terdapat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum - Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. - Masih kurangnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. - Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah fondasi bagi kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Namun, menjaga ketertiban dan keamanan publik seringkali menghadapi berbagai kendala yang kompleks seperti: ▪ Kurangnya SDM: Kurangnya sumber daya manusia untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. ▪ Peralatan yang Kurang: Kekurangan peralatan dan sumber daya yang memadai untuk penegakan hukum. ▪ Pelatihan yang Tidak Memadai: Pelatihan yang tidak memadai untuk personel keamanan dan penegakan hukum. ▪ Pendanaan Terbatas: Keterbatasan dana untuk program keamanan publik. ▪ Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara berbagai badan keamanan dan penegakan hukum.
Sosial	- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung mengalami kenaikan - Perlunya update pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi - Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. PSKS dimaksud terdiri dari: ▪ Individu atau keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi, sosial dan budaya yang baik ▪ Lembaga sosial kemasyarakatan (sosial, keagamaan, organisasi profesi) - Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum

Urusan	Daftar Permasalahan
	berproduksi. Beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori PMKS antara lain: ▪ Anak terlantar ▪ Anak jalanan ▪ Gelandangan dan pengemis ▪ Orang dengan kecacatan ▪ Lanjut usia terlantar ▪ Korban tindak kekerasan ▪ Pekerja migran bermasalah sosial ▪ Korban penyalahgunaan NAPZA ▪ Orang dengan HIV/AIDS - Komunitas di wilayah yang jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan - Isu-isu sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus. - Ketidaksetaraan, kemiskinan, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya seringkali menjadi tantangan besar yang harus diatasi: - Kemiskinan yang Tinggi: Tingginya tingkat kemiskinan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. - Kurangnya Bantuan Sosial: Kurangnya bantuan sosial dan program dukungan. - Pendanaan Terbatas: Keterbatasan dana untuk program sosial dan inisiatif. - Kesenjangan Sosial: Ketidaksetaraan sosial yang signifikan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara layanan sosial dan organisasi masyarakat.
Tenaga Kerja	- Masih banyak pengangguran di kelompok Angkatan Kerja (<i>economically active</i>), terutama di kelompok usia 20-29 tahun. - Masih tinggi angka penduduk yang mengurus rumah tangga (<i>not economically active</i>) terutama di kelompok usia 20-34 tahun. - Masih terdapat pengangguran terbuka di kelompok Angkatan kerja dan dominasi oleh laki-laki. - Masih ada lulusan SMA dan perguruan tinggi yang masih menganggur. - Masih banyak pekerja keluarga (<i>family worker</i>) tak dibayar (<i>unpaid worker</i>), terutama penduduk perempuan, dengan jumlah terbanyak dari kelompok lulusan SD/MI. - Masih ada kecamatan yang tidak membuka lowongan kerja terdaftar baik untuk laki-laki maupun perempuan - Tenaga kerja adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, berbagai masalah seperti pengangguran, keterampilan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja yang belum optimal masih menjadi tantangan utama. - Pengangguran yang Tinggi: Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. - Keterampilan yang Tidak Memadai: Kurangnya keterampilan dan pelatihan di antara tenaga kerja. - Pendanaan Terbatas: Keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan tenaga kerja. - Koordinasi yang Lemah: Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Rendahnya daya saing tenaga kerja: Rendahnya kompetensi tenaga kerja serta terbatasnya akses dan jangkauan informasi lowongan pekerjaan. - Perlindungan Tenaga Kerja: Rendahnya pemahaman dan tingkat kepatuhan pekerja dan pemberi kerja terhadap undang – undang bidang ketenagakerjaan.
Penanaman Modal	- Belum optimalnya promosi investasi daerah. - Belum optimalnya perencanaan penanaman modal. - Belum optimalnya pertumbuhan realisasi investasi. - Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK, yang terintegrasi secara nasional. - Penanaman modal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, berbagai hambatan dalam proses investasi seringkali menghalangi masuknya modal ke suatu wilayah. - Kurangnya Insentif: Belum optimalnya pemberian fasilitasi pemberian kemudahan insentif investasi. - Regulasi yang Rumit: Regulasi dan birokrasi yang rumit menghambat investasi. - Penyediaan yang Tidak Memadai: Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi serta sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal. - Pelaksanaan kemitraan yang belum optimal: Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara badan promosi investasi. - Infrastruktur yang Tidak Memadai: Infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung investasi.
Kepemudaan Dan Olahraga	- Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat dan waktu pengkaderan yang sering berbenturan dengan jadwal kegiatan pribadi (sekolah, kuliah, dll). - Kurang meratanya sarana prasarana olahraga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk. - Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional. - Pengembangan kepemudaan dan olahraga sangat penting untuk membentuk generasi muda yang sehat dan berprestasi. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. - Kurangnya Fasilitas: Kekurangan fasilitas olahraga dan rekreasi untuk pemuda. - Pendanaan Terbatas: Keterbatasan dana untuk program kepemudaan dan olahraga. - Kurangnya Pelatihan: Kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk pemuda. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara organisasi kepemudaan dan olahraga.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Partisipasi yang Rendah: Rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kebudayaan	- Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal. - Masih diperlukannya kegiatan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya serta mendorong penetapan cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Belitung. - Masih perlu dukungan pemerintah kepada Maestro Budaya untuk terus berkarya dan menjaga nilai budayanya di bidang seni dan budaya. - Masih diperlukan kajian atau riset tentang warisan budaya. - Masih adanya hotel, restoran dan ruang publik yang belum menampilkan budaya lokal. - Kebudayaan adalah identitas dan kekayaan suatu bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat berbagai masalah yang menghambat pelestarian dan pengembangan budaya. - Pestaarian yang Kurang: Kurangnya upaya pelestarian warisan budaya. - Pendanaan Terbatas: Keterbatasan dana untuk program dan inisiatif budaya. - Kurangnya Promosi: Kurangnya promosi kegiatan dan acara budaya. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga budaya dan pemangku kepentingan. - Infrastruktur yang Tidak Memadai: Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas budaya yang memadai.
Perpustakaan	- Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat. - Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal. - Perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat. Namun, berbagai kendala seringkali menghambat optimalisasi fungsi perpustakaan di berbagai daerah. - Kurangnya Fasilitas: Fasilitas perpustakaan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. - Keterbatasan Koleksi: Koleksi buku dan bahan bacaan yang terbatas. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan anggaran untuk pengembangan perpustakaan. - Kurangnya SDM: Kurangnya staf perpustakaan yang kompeten. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara perpustakaan dan instansi terkait.

Urusan	Daftar Permasalahan
Kearsipan	- Belum adanya keseragaman standar. Belum adanya Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai acuan penentuan arsip berkategori permanen. - Masih ada kekeliruan dalam pengaturan dan deskripsi arsip yaitu: ▪ Penataan dan deskripsi arsip statis. ▪ <i>Arrangement & archives description</i> yaitu penataan fisik dan informasi arsip statis. ▪ Pembuatan sarana bantu temu Kembali (<i>finding aid</i>). - Masih ada kesulitan dalam akses , yaitu belum adanya <i>finding aid</i> berupa daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. - Kearsipan yang baik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Meskipun demikian, banyak permasalahan yang sering kali menghambat upaya peningkatan sistem kearsipan. - Sistem kearsipan yang tidak efisien: Sistem penyimpanan arsip yang tidak efisien dan rentan terhadap kehilangan data. - Kurangnya Pelatihan: Pelatihan yang tidak memadai untuk petugas kearsipan. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan arsip. - Kurangnya SDM: Kekurangan tenaga ahli dalam bidang kearsipan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga terkait dalam pengelolaan arsip.
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Masih belum meratanya jumlah koperasi di tiap tiap kecamatan, saat ini terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten. - Banyak koperasi yang tidak aktif kepengurusannya. - Produk UMKM, sebagian belum memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional. - Masih rendahnya kompetensi pelaku usaha mikro memanfaatkan teknologi Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sarana pemasaran produk usaha. - Belum optimalnya peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil. - Perlu dukungan pemerintah untuk menjembatani pelaku UMKM dengan penanam modal. - Koperasi dan UKM adalah tulang punggung perekonomian rakyat. Namun, berbagai tantangan masih harus dihadapi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi dan UMKM. - Kurangnya akses pendanaan kepada UMKM: Belum terjangkaunya bantuan modal usaha dari KUR kepada UMKM yang ada. - Kurangnya minat masyarakat: Minat masyarakat yang kurang dalam berwirausaha. - Rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro: Kurangnya pelatihan untuk pengusaha, koperasi, serta UKM. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan anggaran untuk urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Regulasi yang Rumit: Peraturan yang kompleks dan memberatkan usaha kecil dan menengah. - Kurangnya Dukungan Pemerintah: Pengembangan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan KUKM yang belum menyebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung serta masih terpusat hanya di Tanjung Pandan.
Statistik	- Belum semua bidang mempunyai data data time series 5 tahunan. - Belum semua bidang ada data nya di Publikasi "Belitung Dalam Angka". - Perlu diprioritaskan publikasi data yang ada kaitannya dengan fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar , layanan urusan wajib Non-Pelayanan Dasar, dan Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan. - Data statistik yang akurat dan terpercaya sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun, seringkali terdapat berbagai hambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik. - Data yang Tidak Akurat: Kualitas data statistik yang tidak akurat dan tidak lengkap. - Kurangnya Pelatihan: Pelatihan yang tidak memadai untuk petugas statistik. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan anggaran untuk pengumpulan dan analisis data statistik. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga statistik dan instansi terkait. - Kurangnya Teknologi: Teknologi yang tidak memadai untuk pengelolaan data statistik.
Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak	- Masih sangat tinggi angka perempuan yang tidak bekerja (hanya mengurus rumah tangga) terutama di kategori bukan angkatan kerja. - Masih cukup tinggi angka perempuan dengan pengangguran terbuka bahkan di kategori angkatan kerja. - Masih sangat tinggi perempuan yang menjadi pekerja keluarga (<i>family worker</i>) /tak dibayar. - Masih sangat tinggi perempuan pencari kerja terdaftar. - Masih rendah lowongan kerja terdaftar untuk perempuan. - Masih rendah penempatan/pemenuhan tenaga kerja Perempuan. - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. - Tingginya Kekerasan: Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. - Kurangnya Layanan Dukungan: Layanan dukungan yang tidak memadai bagi korban kekerasan.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Kurangnya Pelatihan: Pelatihan yang tidak memadai untuk petugas pemberdayaan dan perlindungan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga terkait dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pangan	- Masih ditemukannya bahan pangan segar beredar dinyatakan tidak aman karena rendahnya kesadaran masyarakat. - Masih adanya sampel makanan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan. - Kurang optimalnya ketahanan pangan masyarakat, terutama ketika menghadapi pandemi covid-19. - Masyarakat Kabupaten Belitung banyak yang beralih mengkonsumsi beras Bulog sehingga untuk mengantisipasi lonjakan Kantor Perum BULOG Kantor Cabang Pembantu (KCP) Belitung harus selalu melakukan <i>revolving stock</i> untuk menjaga ketersediaan sampai 3-6 bulan ke depan. - Ketersediaan dan keamanan pangan merupakan hal krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai tantangan sering kali muncul dalam upaya memastikan pangan yang cukup dan aman bagi semua orang. - Ketersediaan Pangan yang Tidak Merata: Distribusi pangan yang tidak merata di berbagai daerah. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program ketahanan pangan. - Kurangnya Teknologi: Teknologi pertanian yang tidak memadai untuk meningkatkan produksi pangan. - Kurangnya Pelatihan: Pelatihan yang tidak memadai untuk petani dan pelaku usaha pangan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga terkait dalam pengelolaan pangan.
Pertanahan	- Penyediaan tanah dan / atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain (Pemerintah Provinsi, BPN, dll) terkait proses pengumpulan dan verifikasi data. - Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya. - Pengelolaan pertanahan yang baik sangat penting untuk mencegah konflik dan mendukung pembangunan. Namun, banyak masalah yang sering kali muncul dalam urusan pertanahan. - Konflik Agraria: Tingginya tingkat konflik agraria dan sengketa tanah. - Pendataan yang Tidak Akurat: Pendataan tanah yang tidak akurat dan tidak lengkap. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program pengelolaan tanah. - Kurangnya SDM: Kekurangan tenaga ahli dalam bidang pertanahan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pertanahan dan instansi terkait.

Urusan	Daftar Permasalahan
Lingkungan Hidup	- Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau. - Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R (<i>Reduce-Reuse-Recycle</i>). - Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. - Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan, mengingat masih adanya tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan (air, udara, tanah) dan menurunkan kualitas lingkungan hidup - Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. - Masih adanya kegiatan /usaha yang belum menerapkan konservasi energi. - Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi. - Menurunnya kualitas air baku Belitung tercemar limbah tambang dari aktivitas penambangan biji timah ilegal yang berada di hulu sumber air baku, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air bersih karena kondisi air baku menjadi keruh dan berlumpur. Aktivitas tambang biji timah ilegal tersebut berada di hulu lokasi sumber air baku , namun “tailing” atau limbah pembuangannya mengalir ke sumber air baku terutama jika kondisinya sedang musim hujan. Selain itu juga terjadi penurunan kualitas jaringan pipa distribusi air bersih sehingga rawan kebocoran air. - Pelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan keberlanjutan planet kita. Namun, berbagai permasalahan lingkungan sering kali menjadi hambatan dalam upaya pelestarian. - Kerusakan Lingkungan: Tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan pencemaran. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program pelestarian lingkungan. - Kurangnya Edukasi: Edukasi yang tidak memadai tentang pentingnya menjaga lingkungan. - Kurangnya SDM: Kekurangan tenaga ahli dalam bidang lingkungan hidup. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga lingkungan dan instansi terkait.
Admininistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Masih adanya penduduk yang belum mempunyai KTP elektronik. - Masih ada penduduk lansia dan berkebutuhan khusus yang belum memiliki KTP Elektronik. - Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Kuantitas dan kualitas SDM di bidang pelayanan kependudukan belum optimal. - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik sangat penting untuk pelayanan publik yang efisien. Namun, banyak masalah yang masih harus diatasi dalam bidang ini. - Pendataan yang Tidak Akurat: Pendataan kependudukan yang tidak akurat dan tidak lengkap.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program administrasi kependudukan. - Kurangnya Teknologi: Teknologi yang tidak memadai untuk pengelolaan data kependudukan. - Kurangnya SDM: Kekurangan tenaga ahli dalam bidang administrasi kependudukan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga administrasi kependudukan dan instansi terkait.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi. - Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (<i>unmeet need</i>). - Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun. - Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih menghambat upaya ini. - Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih menghambat upaya ini. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. - Kurangnya Edukasi: Edukasi yang tidak memadai tentang pentingnya keluarga berencana. - Kurangnya Layanan: Layanan keluarga berencana yang tidak memadai di berbagai daerah. - Kurangnya SDM: Kekurangan tenaga ahli dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta instansi terkait.
Perhubungan	- Transportasi massal di Kabupaten Belitung masih sangat minim. Terlihat dari banyaknya kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat pribadi yang melenggang di jalan raya sedangkan angkutan umum jarang tampak. - Sistem Jaringan Transportasi Jalan (JTJ). - Sektor perhubungan adalah tulang punggung mobilitas dan perekonomian. Namun, banyak masalah yang masih menghambat kelancaran dan keselamatan transportasi. - Infrastruktur yang Kurang baik: Infrastruktur transportasi yang kurang baik dan tidak memadai. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. - Kurangnya SDM: Kekurangan tenaga ahli dalam bidang perhubungan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga perhubungan dan instansi terkait. - Regulasi yang Rumit: Peraturan yang kompleks dan memberatkan sektor perhubungan.

Urusan	Daftar Permasalahan
Komunikasi dan Informatika, serta Persandian	- Data tidak saling terhubung. Disintegrasi data menyebabkan data antar OPD berjalan sendiri-sendiri, data hanya dimiliki oleh OPD yang menginput data. Akibatnya kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan publik belum tercapai - Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan. Misalnya pengadaan <i>card reader</i> untuk membaca KTP elektronik oleh OPD Layanan Publik di Belitung, sehingga masyarakat tidak perlu memfotokopi KTP elektronik mereka setiap kali mengurus administrasi bahkan tidak perlu mengisi formulir pendaftaran - Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta. - Portal Belitung Satu Data belum memiliki data yang lengkap, proses pemutakhiran data juga belum optimal. - Komunikasi dan informatika serta persandian merupakan aspek penting dalam era digital saat ini. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk memaksimalkan potensinya. - Kurangnya Infrastruktur IT: Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai. - Keamanan Data yang Lemah: Sistem keamanan data dan informasi yang rentan. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk pengembangan teknologi komunikasi dan informatika. - Kurangnya SDM: Kurangnya tenaga ahli dalam bidang komunikasi dan informatika. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga komunikasi dan informatika serta instansi terkait.
Perencanaan serta Peneilitian dan Pengembangan	- Ketidaksesuaian Rencana dengan Kebutuhan Aktual. Terkadang rencana pembangunan atau pengembangan yang dibuat tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau prioritas aktual masyarakat dan sektor-sektor terkait di Kabupaten Belitung. - Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam proses perencanaan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan mereka. - Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai sering kali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan yang sudah direncanakan.
Pengawasan	- Kecocokan Antara Wewenang dan Tanggung Jawab: Kadang-kadang terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam wewenang dan tanggung jawab antar lembaga atau unit pengawasan di dalam pemerintah daerah. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan. - Kurangnya Penerapan Teknologi Informasi: Penerapan teknologi informasi yang masih terbatas dalam sistem pengawasan dapat mengakibatkan proses yang lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan. - Kesulitan dalam Mendeteksi Penyalahgunaan atau Kecurangan: Tantangan dalam mendeteksi praktik penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan yang mungkin terjadi di berbagai

Urusan	Daftar Permasalahan
	level pemerintahan daerah, terutama jika sistem pengawasan tidak cukup ketat atau transparan.
Pariwisata	- Pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan memperkenalkan budaya. Namun, berbagai permasalahan sering kali menghambat perkembangan sektor ini. - Kurangnya Promosi: Promosi pariwisata yang tidak memadai baik di dalam maupun luar negeri. - Fasilitas yang Tidak Memadai: Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata belum maksimal - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata. - Jumlah penerbangan yang masih sangat terbatas: menyebabkan harga tiket penerbangan menjadi tinggi dan juga menjadi hambatan bagi calon wisatawan. - Pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan memperkenalkan budaya, namun kurangnya promosi, fasilitas pendukung, pendanaan, pelatihan tenaga kerja, dan koordinasi yang baik antara lembaga pariwisata dan pemangku kepentingan menghambat perkembangannya.
Perdagangan	- Perdagangan yang efisien dan adil adalah pilar utama perekonomian. Namun, banyak tantangan yang sering kali menghambat kelancaran aktivitas perdagangan - Regulasi yang Rumit: Peraturan yang kompleks dan memberatkan bagi pelaku usaha. - Belum optimalnya sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kemetrollogian serta sarana dan prasarana pasar yang belum memadai. - Pendanaan yang belum Memadai: Keterbatasan dana untuk mendukung sektor perdagangan. - Kurangnya SDM: Kurangnya kompetensi dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang perdagangan. - Koordinasi yang Lemah: Belum optimalnya koordinasi antar lembaga perdagangan dengan instansi terkait.
Kelautan Dan Perikanan	- Sektor kelautan dan perikanan adalah sumber daya yang penting bagi perekonomian dan ketahanan pangan. Namun, banyak masalah yang sering kali menghambat optimalisasi sektor ini. - Implementasi Regulasi Terbatas: Masih kurangnya implementasi penerapan regulasi sektor perikanan. - Sarana dan Prasarana yang Terbatas: Masih terbatasnya sarana dan prasarana maupun teknologi yang digunakan. - Keterbatasan Kewenangan: Masih banyak terdapat pelabuhan nelayan atau tambat perahu yang kondisinya rusak, sedangkan untuk memperbaikinya merupakan kewenangan provinsi karena masuk kedalam wilayah lepas pesisir pantai. - Kurangnya pemanfaatan wilayah: Belum optimalnya pemanfaatan wilayah dan usaha serta investasi sektor perikanan. - Kewenangan yang Terbatas: Berkurangnya kewenangan kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya sektor kelautan dan perikanan.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Sektor kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya penting bagi perekonomian dan ketahanan pangan. Kerusakan lingkungan laut, keterbatasan dana, teknologi penangkapan ikan yang tidak memadai, pelatihan yang kurang, dan koordinasi yang lemah menghambat optimalisasi bidang ini.
Pertanian	- Pertanian adalah sektor yang krusial untuk ketahanan pangan dan perekonomian. Namun, berbagai tantangan masih harus dihadapi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. - Kurangnya Teknologi: Teknologi pertanian yang tidak memadai untuk meningkatkan produksi. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program pengembangan pertanian. - Kurangnya Pelatihan: Pelatihan yang tidak memadai untuk petani. - Kerusakan Lingkungan: Kerusakan lingkungan yang mempengaruhi hasil pertanian. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pertanian dan instansi terkait.
Perindustrian	- Perindustrian adalah suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dalam sektor ini terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam meningkatkan nilai perekonomian yang dihasilkan oleh sektor perindustrian. - Kurangnya pengembangan kawasan industri: Belum optimalnya pengembangan kawasan industri serta kurangnya inovasi pengembangan produk IKM maupun sentra IKM - Kurangnya promosi dan SDM: Belum optimalnya promosi serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan pelaku usaha IKM - Kemitraan yang lemah: Belum optimalnya kemitraan dalam pengembangan IKM dan sentra IKM. - Penunjang Urusan Fungsi Manajemen Non-Pelayanan Dasar
Keuangan	- Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk kestabilan ekonomi dan pembangunan. Namun, berbagai masalah sering kali muncul dalam pengelolaan keuangan. - Pengelolaan yang Kurang baik: Pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan efektif. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program keuangan. - Kurangnya Transparansi: Transparansi dalam pengelolaan anggaran yang kurang. - Kurangnya SDM: Kurangnya tenaga ahli dalam bidang keuangan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga keuangan dan instansi terkait.
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	- Manajemen kepegawaian yang baik sangat penting untuk kinerja organisasi yang efektif. Namun, berbagai permasalahan sering kali muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Urusan	Daftar Permasalahan
	- Kurangnya Pelatihan: Pelatihan dan pengembangan yang tidak memadai untuk pegawai. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk program pendidikan dan pelatihan. - Kurangnya SDM: Kurangnya tenaga ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pendidikan dan pelatihan serta instansi terkait. - Kurangnya Sistem Evaluasi: Sistem evaluasi kinerja pegawai yang tidak efektif. - Kekurangan tenaga kerja terampil dalam bidang tertentu seperti, teknis, administratif, dan manajerial. Hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan pelayanan publik. - Rotasi atau mobilitas pegawai yang tidak terencana atau tidak terkoordinasi dapat menyebabkan gangguan dalam kontinuitas layanan dan pengelolaan program di tingkat lokal. - Kurangnya peningkatan kualitas kinerja, Kualitas kinerja bisa menjadi permasalahan jika tidak ada sistem evaluasi kinerja yang jelas atau jika dukungan pengembangan keterampilan tidak memadai.
Sarana Dan Prasarana Perkantoran	- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat. Namun, banyak masalah yang sering kali menghambat pengembangan sarana dan prasarana. - Fasilitas yang Kurang baik: Kualitas fasilitas perkantoran yang tidak memadai. - Pendanaan yang Tidak Memadai: Keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana perkantoran. - Kurangnya SDM: Kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan sarana perkantoran. - Koordinasi yang Lemah: Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pengelola sarana perkantoran dan instansi terkait. - Kurangnya Perencanaan: Perencanaan yang tidak memadai untuk pengembangan sarana perkantoran.

Sumber: data diolah

2.3.2 Isu Nasional dan Telaah Kajian

2.3.2.1 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional penjabaran atas Visi, Misi dan Program Presiden serta berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029. Untuk mencapai keselarasan dalam perencanaan daerah maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belitung perlu diselaraskan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berikut merupakan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029:



Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029



**Visi**

**Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

ASTA CITA 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	ASTA CITA 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
ASTA CITA 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	ASTA CITA 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
ASTA CITA 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ASTA CITA 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
ASTA CITA 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ASTA CITA 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 2. 77 Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029

Sumber: RPJMN 2025-2029

Mengacu pada dokumen ringkasan RPJMN, pemerintah telah menyusun 8 prioritas nasional yang dapat dilihat sebagai representasi isu strategis untuk pembangunan dalam kurun waktu 2025 – 2029. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap program prioritas:

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus ditopang oleh nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Dalam konteks tersebut, penguatan ideologi Pancasila menjadi pilar utama dalam menjaga kesatuan dan integritas bangsa. Dinamika global dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong lahirnya berbagai tantangan terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan penguatan nilai kebangsaan sebagai agenda prioritas nasional.

Demokrasi yang sehat juga menjadi pondasi penting dalam pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pemilihan umum yang adil dan berintegritas merupakan unsur penting dalam memperkuat demokrasi. Pemerintah mendorong penguatan kelembagaan demokrasi yang mampu menjamin hak-hak warga negara serta mencegah berbagai bentuk disinformasi dan polarisasi sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Dalam upaya memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, penting untuk mengarusutamakan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan. Pemajuan HAM harus mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaan nasional dalam perlindungan HAM, termasuk penguatan regulasi dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM secara transparan.

Pendidikan kewarganegaraan, kampanye nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan literasi ideologi menjadi bagian integral dari strategi ini. Pemerintah mendorong sinergi antara lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menyemai semangat Pancasila di tengah masyarakat. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang toleran, gotong royong, dan berintegritas.

Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan, serta Mendorong Kemandirian Bangsa

Ketahanan nasional merupakan elemen penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks ini, sistem pertahanan dan keamanan negara harus terus dimantapkan, tidak hanya dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya. Tantangan global seperti konflik geopolitik, ancaman siber, penyebaran radikalisme, dan ketidakpastian ekonomi global mendorong Indonesia untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang adaptif, modern, dan tangguh menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Pemerintah memandang bahwa kemandirian bangsa tidak dapat dipisahkan dari kekuatan pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan tidak hanya untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertahanan dan keamanan. Penguatan sinergi antara TNI, Polri, dan komponen cadangan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertahanan semesta yang responsif terhadap ancaman multidimensional.

Di sisi lain, ketahanan nasional juga harus diperkuat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketahanan pangan, energi, dan air. Ketiga sektor ini menjadi prioritas penting untuk menghindari kerentanan nasional terhadap tekanan eksternal. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperluas bauran energi terbarukan, serta memperkuat sistem pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan guna menjamin akses yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Transformasi ekonomi juga menjadi bagian dari upaya kemandirian bangsa. Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan. Ekonomi syariah didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan, sementara ekonomi digital diarahkan untuk mempercepat adopsi teknologi di sektor produktif. Ekonomi hijau dan biru bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan dalam jangka panjang.

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur merupakan pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah terus melanjutkan agenda pengembangan infrastruktur secara menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga infrastruktur pendukung ekonomi digital, energi, dan air bersih. Ketersediaan dan keterhubungan infrastruktur menjadi kunci utama dalam memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia sekaligus menciptakan konektivitas yang inklusif di seluruh penjuru negeri.

Pengembangan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta kawasan berbasis potensi lokal dan sektor unggulan. Investasi pada infrastruktur tidak hanya menciptakan akses dan pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas bagi swasta, baik dalam skala nasional maupun lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan menjadi komitmen penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi agenda strategis yang saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya mengejar angka serapan tenaga kerja semata, tetapi juga mendorong kualitas pekerjaan yang layak, produktif, dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor padat karya, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta penguatan program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Dalam konteks perubahan dunia kerja yang semakin digital dan fleksibel, pemerintah juga mendorong kewirausahaan serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai alternatif sumber lapangan kerja baru. Dukungan terhadap UMKM, penguatan ekosistem startup, serta peningkatan keterampilan digital masyarakat menjadi langkah penting untuk menghadapi disrupsi dunia kerja sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi produktif.

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam menciptakan bangsa yang berdaya saing tinggi dan berkemajuan. Dalam menghadapi era globalisasi dan disrupsi teknologi, kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan penguatan sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, agar mampu mencetak generasi yang cerdas, berakarakter, dan kompeten. Akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu strategi utama dalam menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain aspek pendidikan, pembangunan kesehatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan SDM. Pemerintah berkomitmen

meningkatkan layanan kesehatan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu. Upaya pencegahan penyakit, peningkatan gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi fokus dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Penguatan sistem jaminan kesehatan nasional juga diarahkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjawab tuntutan zaman, pembangunan SDM juga harus sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pemerintah mendorong riset dan inovasi sebagai penggerak utama transformasi ekonomi nasional. Kolaborasi antara lembaga penelitian, dunia usaha, dan dunia pendidikan menjadi kunci untuk menghasilkan teknologi yang relevan, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional ditujukan untuk mempercepat adopsi teknologi dalam berbagai sektor pembangunan.

Kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta pemberdayaan pemuda dan penyandang disabilitas juga menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan SDM yang inklusif. Pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, prestasi di bidang olahraga juga terus didorong sebagai salah satu bentuk pembinaan karakter dan kebanggaan nasional yang dapat memacu semangat juang generasi muda.

Pembangunan SDM yang holistik akan menjadi pendorong utama bagi terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat, berkarakter, dan inovatif. Dengan SDM yang unggul, Indonesia akan lebih siap bersaing di tingkat global, memperkuat kemandirian bangsa, serta menjawab berbagai tantangan masa depan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi pada manusia merupakan investasi terbaik bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Transformasi ekonomi Indonesia diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui proses hilirisasi sumber daya alam (SDA). Selama ini, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan rendahnya nilai ekonomi yang diperoleh bangsa dari kekayaan alamnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan industri pengolahan yang mampu memproses komoditas lokal menjadi produk bernilai tinggi dan berdaya saing global. Hilirisasi menjadi strategi utama untuk memperkuat struktur industri nasional dan mendorong pendapatan negara secara berkelanjutan.

Pengembangan industri berbasis SDA tidak hanya bertujuan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Melalui penguatan rantai pasok industri di daerah-daerah penghasil SDA, diharapkan akan terbentuk kawasan industri terpadu yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem industri sebagai bagian dari strategi inklusivitas ekonomi.

Namun, pengembangan industri tidak boleh mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah mengarahkan agar hilirisasi dilakukan secara ramah lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ekosistem. Untuk itu, penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi menjadi prioritas. Selain itu, transformasi digital industri atau industri 4.0 juga menjadi agenda penting dalam memperkuat produktivitas dan efisiensi sektor industri nasional.

Konektivitas antara sektor industri dengan pusat-pusat riset, pendidikan vokasi, dan lembaga keuangan perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan inovasi. Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mampu bersaing dalam rantai pasok global. Reformasi regulasi, insentif fiskal, dan penyederhanaan perizinan juga terus diupayakan untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing industri nasional.

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari akar rumput, yaitu desa dan komunitas lokal yang selama ini sering kali menjadi wilayah yang tertinggal dari arus utama pembangunan. Pemerintah menempatkan pembangunan dari bawah sebagai strategi utama dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Upaya ini mencerminkan semangat membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Penguatan kapasitas desa dilakukan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar yang layak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat desa yang lebih sejahtera dan mandiri. Program Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal, membuka lapangan kerja di desa, serta mendorong inovasi lokal berbasis potensi wilayah.

Dalam upaya pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial menjadi jaring pengaman yang sangat krusial. Pemerintah memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan situasi masyarakat. Strategi ini tidak hanya menyasar rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat terdampak bencana atau krisis ekonomi.

Upaya pembangunan desa juga harus terhubung dengan pengembangan kawasan perdesaan dan keterkaitan desa-kota. Pemerintah mendorong integrasi ekonomi desa dengan pasar kota melalui penguatan akses pasar, logistik, serta dukungan terhadap ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri rumah tangga. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat

desa sekaligus menciptakan sinergi pertumbuhan wilayah yang saling menguntungkan.

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi merupakan pondasi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan membangun birokrasi yang adaptif. Reformasi ini tidak hanya menasar aspek struktural, tetapi juga menyentuh aspek kultural, yaitu mentalitas aparatur dan budaya kerja pemerintahan.

Dalam bidang politik, penguatan sistem demokrasi diarahkan pada terciptanya iklim politik yang stabil, inklusif, dan partisipatif. Pemerintah mendorong transparansi dalam proses politik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta penguatan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Penataan sistem pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas menjadi prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional.

Di bidang hukum, supremasi hukum menjadi dasar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem hukum nasional melalui pembenahan regulasi, penataan sistem peradilan, dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Reformasi hukum juga mencakup upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang terus menjadi prioritas nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Reformasi birokrasi menjadi pilar penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang responsif dan efisien. Pemerintah menargetkan birokrasi yang ramping, digital, dan berorientasi hasil. Digitalisasi sistem pelayanan publik dan perencanaan berbasis data menjadi strategi utama dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur sipil negara dilakukan secara sistematis melalui peningkatan kompetensi, integritas, serta sistem merit yang adil dan akuntabel.

Penguatan pengawasan intern melalui peningkatan kapabilitas APIP, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta kolaborasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi secara keseluruhan bertujuan menciptakan negara yang kuat, mampu melindungi hak-hak warganya, serta menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya intensitas bencana alam. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman ekosistem dan kekayaan sumber daya alam menghadapi risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pembangunan nasional ke depan harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, penguatan ketahanan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, mulai dari energi, transportasi, industri, hingga tata ruang dan penggunaan lahan. Transisi menuju energi bersih dan terbarukan menjadi prioritas dalam menurunkan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, penguatan sistem pengelolaan sampah, pelestarian hutan, dan restorasi lahan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berwawasan lingkungan.

Ketahanan bencana juga menjadi perhatian penting dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara terintegrasi melalui pengembangan sistem peringatan dini (EWS), peningkatan kapasitas lembaga kebencanaan, serta pelibatan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi. Pendekatan pengurangan risiko bencana secara holistik mencakup aspek struktural maupun non-struktural, termasuk edukasi kebencanaan di lingkungan pendidikan dan komunitas.

Tantangan pembangunan lingkungan juga menyentuh aspek tata kelola dan regulasi. Pemerintah mendorong harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan, pengawasan izin usaha berbasis lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam pelestarian lingkungan menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Kolaborasi multipihak juga ditekankan, melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional.

Kabupaten Belitung sebagai Lokus Prioritas Pembangunan Nasional

Kabupaten Belitung ditetapkan sebagai salah satu lokus prioritas pembangunan nasional, dalam kerangka pencapaian visi Presiden untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penetapan ini menempatkan Belitung dalam strategi pembangunan kawasan Sumatera, dengan fokus pada transformasi ekonomi berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Dalam konteks karakteristik wilayah, Kabupaten Belitung termasuk dalam kawasan dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi hijau, dengan fokus pada klaster konservasi dan kawasan rawan bencana. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Program prioritas yang

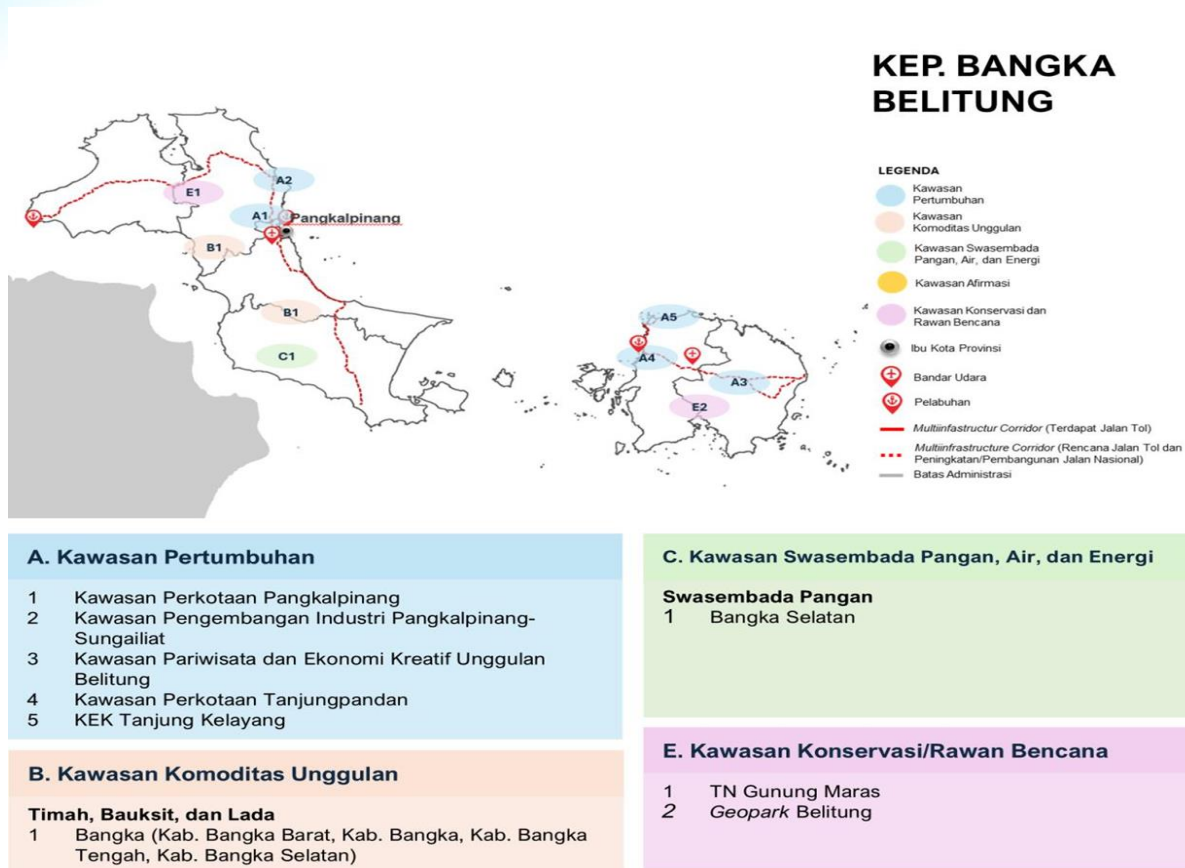
ditetapkan untuk mendukung strategi ini adalah pengembangan ekonomi hijau pada kawasan konservasi dan rawan bencana. Melalui pengembangan sektor berbasis lingkungan seperti pariwisata berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berdaya saing.

Lokus utama implementasi program di Kabupaten Belitung berada pada kawasan Geopark Belitung. Geopark ini, sebagai bagian dari UNESCO *Global Geopark Network*, merupakan aset penting yang mengintegrasikan nilai geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati. Pengembangan Geopark Belitung diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata konservasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam ekonomi hijau. Dengan pendekatan terintegrasi antara penguatan ekonomi lokal, konservasi sumber daya, dan pengelolaan risiko bencana, Kabupaten Belitung diharapkan mampu menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan rawan bencana. Langkah ini tidak hanya mendukung agenda nasional, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah.



Gambar 2. 78 Lokus Prioritas Pembangunan Nasional di Kabupaten Belitung
Sumber: RPJMN 2025-2029

Atas dasar tersebut maka dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 pada lampiran IV menetapkan arah pembangunan kewilayahan RPJMN 2025-2029 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:



Gambar 2. 79 Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 (Lampiran IV)

Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Belitung berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki 3 Kawasan yang menjadi Proyek Strategis Nasional, antara lain:

- A. Kawasan Pertumbuhan
 - 3. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan
 - 4. Kawasan Perkotaan Tanjungpandan
 - 5. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
- E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana
 - 2. *Geopark* Belitung

Terdapat beberapa arah kebijakan dalam menindaklanjuti arah pembangunan wilayah tersebut Pembangunan meliputi Peningkatan 6A Pariwisata dan urban renewal utamanya di Tanjung Kelayang, Preservasi Ruang Jalan Lingkar Belitung, Penatan pemukiman kumuh, Pengembangan SPAM dan lain sebagainya. Selain itu pada kawasan E2. diarahkan pada pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman geologi, Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area keanekaragaman hayati tinggi dan lain sebagainya.

Hasil telaah keselarasan serta amanah pembangunan nasional yang telah dijelaskan diatas perlu dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Arah Kebijakan serta strategi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun

2025-2029 sehingga antara RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Belitung dalam berjalan selaras serta saling mendukung dalam perwujudan tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah.

2.3.2.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Pembangunan Kabupaten Belitung tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan isu strategis yang berkembang di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya memastikan sinergi antara perencanaan pembangunan kabupaten dengan tingkat provinsi, diperlukan telaah terhadap isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029. Telaah ini bertujuan untuk mengidentifikasi benang merah antara isu pembangunan provinsi dengan kebutuhan pembangunan di tingkat kabupaten, sekaligus sebagai dasar penajaman arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung visi pembangunan “Babel Berdaya 2029”, yang diarahkan untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing, berbudaya, mandiri dan sejahtera. Visi tersebut kemudian dijabarkan melalui delapan isu strategis utama, antara lain: peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi biru dan hijau, ketahanan sosial budaya dan ekologi, peningkatan daya saing ekonomi, keamanan daerah dan stabilitas makroekonomi, pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta kesinambungan pembangunan. Keseluruhan isu ini merupakan refleksi atas tantangan pembangunan daerah dan sekaligus arah pembenahan yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Dalam konteks Kabupaten Belitung, beberapa isu strategis provinsi memiliki relevansi yang tinggi. Misalnya, isu rendahnya daya saing sumber daya manusia dan belum optimalnya perlindungan sosial, sangat selaras dengan tantangan SDM di Kabupaten Belitung yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan tinggi, rendahnya keterampilan kerja, serta ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan. Demikian pula, isu transformasi ekonomi dari pertambangan ke sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan juga menjadi penting bagi Belitung yang merupakan salah satu kawasan unggulan pariwisata provinsi.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah belum optimalnya hilirisasi komoditas lokal, belum meratanya konektivitas infrastruktur, dan perlunya penguatan ekosistem investasi berbasis ekonomi hijau dan biru. Kabupaten Belitung, sebagai bagian dari kawasan strategis KEK Tanjung Kelayang dan *Geopark* UNESCO, memiliki potensi besar untuk mendukung arah pembangunan provinsi tersebut. Namun, tantangan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta keterbatasan kapasitas fiskal menjadi hambatan yang perlu dicariikan solusinya secara integratif dalam RPJMD kabupaten.

Dengan demikian, telaah terhadap isu strategis pembangunan provinsi menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di tingkat kabupaten. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sinkronisasi vertikal antara dokumen perencanaan daerah, tetapi juga mendorong efektivitas pencapaian target pembangunan yang holistik,

inklusif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah telaah setiap isu strategis RPJMD Provinsi Bangka Belitung 2025 – 2029

Tabel 2.85 Telaah Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rekomendasi Kebijakan

Isu Strategis Provinsi	Implikasi untuk Kabupaten Belitung	Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Rendahnya rata-rata lama sekolah, keterbatasan akses pendidikan vokasi, perlindungan sosial kelompok rentan masih lemah.	Perluasan akses pendidikan vokasi, pelatihan kerja, penguatan perlindungan sosial dan pengarusutamaan kelompok rentan.
Penguatan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau	Pemanfaatan potensi laut, agrowisata, dan desa wisata belum optimal; nilai tambah produk lokal masih rendah.	Pengembangan ekonomi biru, hilirisasi produk lokal, penguatan UMKM dan pariwisata berkelanjutan.
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi	Kualitas pelayanan publik belum optimal, digitalisasi pemerintahan belum merata, kapasitas birokrasi perlu diperkuat.	Reformasi birokrasi berbasis digital, penguatan SDM aparatur, dan sistem merit dalam manajemen ASN.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Kesadaran lingkungan rendah, pengelolaan sampah belum optimal, budaya lokal belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.	Pengarusutamaan kebudayaan dan kearifan lokal, edukasi lingkungan, peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan rendah, ekonomi kreatif belum berkembang, infrastruktur ekonomi belum memadai.	Penguatan ekosistem industri pengolahan dan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas UMKM dan akses pasar.
Pemerataan dan Keadilan Pembangunan Wilayah	Kesenjangan layanan dasar antar wilayah desa dan kelurahan, perencanaan tata ruang belum selaras dengan sektor unggulan.	Integrasi tata ruang dengan pembangunan sektoral, pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.
Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	Aksesibilitas transportasi dan infrastruktur antarwilayah masih terbatas, konektivitas pelabuhan dan jalan desa perlu diperbaiki.	Pengembangan infrastruktur transportasi dan layanan dasar secara merata dan terintegrasi.
Transformasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Terintegrasi	Perlu sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan alternatif pembiayaan pembangunan (KPBU), penguatan kapasitas kelembagaan dan riset inovatif.	Penguatan kelembagaan perencanaan, pemanfaatan skema pembiayaan inovatif, pengembangan riset dan data pembangunan.

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029, data diolah

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan dalam peningkatan daya saing SDM, yang ditunjukkan oleh masih rendahnya capaian pendidikan, kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja, serta belum optimalnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Masalah ini diperkuat oleh ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi.

Di Kabupaten Belitung, isu ini juga menjadi perhatian utama. Rata-rata lama sekolah masih relatif rendah, dan sebagian besar tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah. Akses terhadap

pendidikan vokasi dan pelatihan kerja masih terbatas, padahal sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian membutuhkan SDM yang terampil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak perlu diperkuat melalui kebijakan yang inklusif.

Penguatan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Transformasi ekonomi dari sektor primer menuju ekonomi biru dan hijau menjadi arah penting pembangunan provinsi. Namun, tantangan masih dirasakan dalam bentuk belum optimalnya hilirisasi produk komoditas daerah, rendahnya daya saing pariwisata, serta belum meratanya investasi sektor produktif.

Kabupaten Belitung sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata dan bagian dari KEK Tanjung Kelayang, memiliki peluang besar dalam mendorong ekonomi biru dan hijau. Namun, pemanfaatan potensi laut dan perikanan berkelanjutan, agrowisata, serta pengembangan desa wisata belum sepenuhnya optimal. Selain itu, nilai tambah dari produk lokal seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan belum berkembang secara maksimal karena terbatasnya kapasitas UMKM, infrastruktur produksi, serta akses pasar dan teknologi yang masih lemah.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi

Provinsi menetapkan bahwa birokrasi yang responsif dan adaptif menjadi kunci penguatan tata kelola pemerintahan. Namun, transformasi birokrasi yang belum optimal, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, dan terbatasnya integrasi sistem digital menjadi kendala utama.

Kabupaten Belitung juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam hal kapasitas kelembagaan, efisiensi belanja publik, dan keterbukaan informasi. Proses digitalisasi layanan masih belum merata, dan pelayanan publik belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berbasis merit system serta penguatan kualitas SDM aparatur masih menjadi pekerjaan rumah penting untuk mendukung pelayanan yang efisien dan transparan.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Isu ketahanan sosial dan budaya di provinsi mencakup belum optimalnya pemajuan kebudayaan berbasis lokal, ancaman terhadap kohesi sosial, serta kerentanan terhadap bencana dan kerusakan lingkungan. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan serta energi.

Kabupaten Belitung memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang tinggi, termasuk status Geopark UNESCO yang menjadi simbol penting pelestarian ekologi dan budaya. Namun, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan potensi ancaman bencana ekologis menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, budaya lokal belum sepenuhnya harus utamakan dalam kebijakan pembangunan, sehingga memerlukan pendekatan terpadu antara pembangunan fisik dan penguatan nilai-nilai sosial budaya.

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Provinsi menekankan pentingnya hilirisasi industri pengolahan, perluasan ekonomi kreatif dan digital, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan sebagai kunci daya saing ekonomi. Namun, infrastruktur ekonomi dan investasi belum merata. Di Kabupaten Belitung, meskipun sektor pariwisata menjadi andalan, kontribusi sektor industri pengolahan masih rendah. Sektor ekonomi kreatif belum berkembang optimal karena keterbatasan akses pelatihan, pembiayaan, dan pasar. Hal ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan produksi, dan jaringan logistik yang menyebabkan biaya distribusi tinggi dan daya saing produk lokal rendah. Penguatan UMKM dan integrasi kawasan ekonomi menjadi strategi penting yang perlu segera diakselerasi.

Pemerataan dan Keadilan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan wilayah masih menjadi tantangan di tingkat provinsi, terutama dalam integrasi perencanaan tata ruang dan pembangunan sektoral serta penyediaan infrastruktur dasar. Kabupaten Belitung menghadapi tantangan kesenjangan layanan dasar antar desa dan kelurahan, terutama di wilayah pinggiran. Aksesibilitas infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, dan jaringan internet belum merata, sehingga memperkuat disparitas pembangunan. Penyelarasan perencanaan tata ruang dengan potensi wilayah sangat penting untuk memastikan efektivitas pengembangan wilayah yang inklusif.

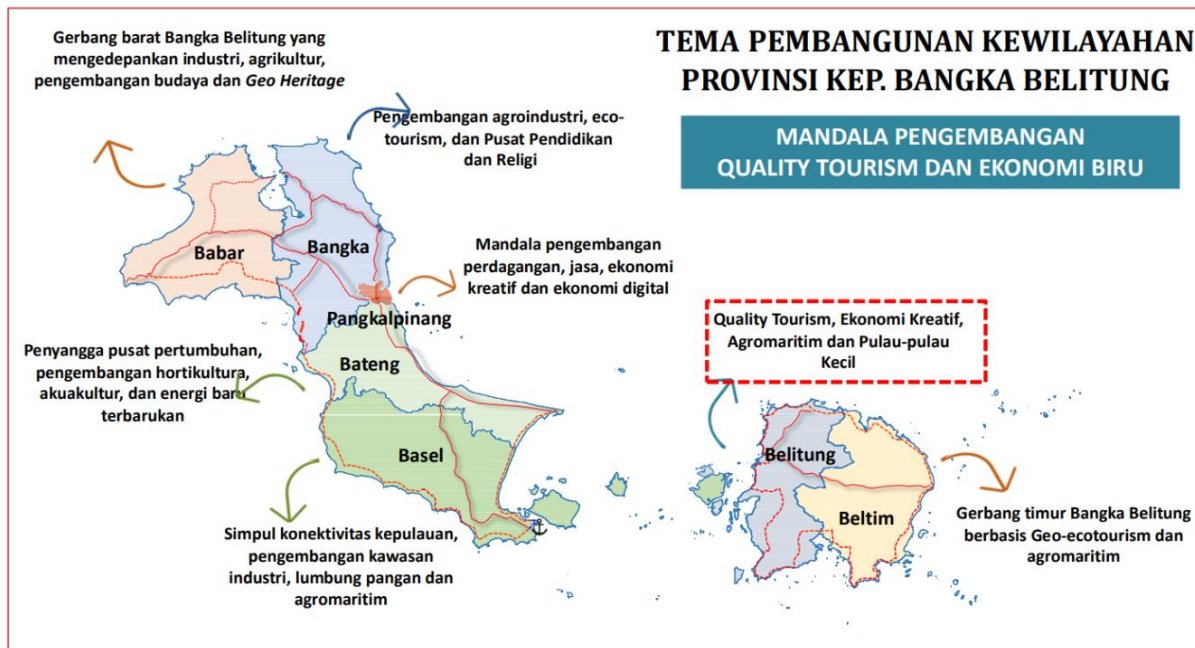
Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas

Belum optimalnya kualitas dan jangkauan infrastruktur perkotaan dan transportasi menjadi hambatan bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Kabupaten Belitung juga masih menghadapi hambatan dalam hal konektivitas antar wilayah, termasuk keterbatasan angkutan umum, infrastruktur jalan desa, dan konektivitas pelabuhan. Hal ini berdampak pada akses pelayanan dasar serta mobilitas barang dan orang yang kurang efisien. Oleh karena itu, penguatan konektivitas darat dan laut menjadi prioritas strategis.

Transformasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Terintegrasi

Isu terakhir yang menjadi perhatian adalah transformasi pembangunan yang menjamin keberlanjutan melalui sinkronisasi dokumen perencanaan pusat-

daerah, peningkatan akuntabilitas, serta pemanfaatan skema pembiayaan inovatif. Kabupaten Belitung harus memperkuat sinergi perencanaan pembangunan lintas sektor dan skala pemerintahan, serta membuka peluang pendanaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usah (KPBU) untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang efisien dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan integrasi riset inovatif juga penting untuk mendorong kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi hasil.



Gambar 2. 80 Tema Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Sumber: Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2025

Peta dalam gambar menampilkan strategi pembangunan yang dibagi menurut wilayah administratif kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diarahkan dalam bingkai utama **"Mandala Pengembangan Quality Tourism dan Ekonomi Biru"**. Tema ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah diarahkan pada optimalisasi potensi maritim, pariwisata berkualitas, serta sektor-sektor ekonomi unggulan lokal yang berkelanjutan.

Pada peta bagian kanan, terdapat kotak garis merah yang menyoroti Kabupaten Belitung sebagai salah satu titik sentral pengembangan wilayah. Fokus pengembangannya mencakup:

1. *Quality Tourism* (Pariwisata Berkualitas)
Kabupaten Belitung diarahkan menjadi kawasan pariwisata yang tidak hanya berskala internasional (seperti Geopark Belitung UNESCO), tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengalaman wisata berbasis budaya dan alam.
2. Ekonomi Kreatif

Daerah ini didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya lokal, seni, kuliner, kriya, serta kegiatan masyarakat yang bernilai ekonomi tinggi.

3. Agromaritim

Merujuk pada pemanfaatan potensi perikanan, kelautan, dan pertanian berbasis kawasan pesisir dan laut secara terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Agromaritim juga mencakup pengolahan hasil laut, pariwisata bahari, dan pertanian pesisir.

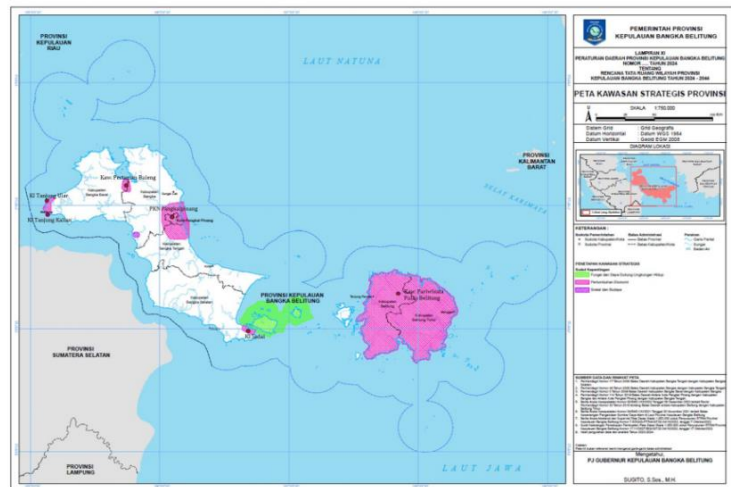
4. Pengembangan Pulau-pulau Kecil

Kabupaten Belitung memiliki banyak pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara selektif dan terkendali sebagai kawasan konservasi, pariwisata, atau budidaya laut dengan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi ekonomi biru dan perlindungan ekosistem laut.

Secara lebih spesifik, Kabupaten Belitung menjadi bagian dari KSP Provinsi Bangka Belitung bersama dengan Kabupaten Belitung Timur sebagai Kawasan Pariwisata Pulau Belitung yang masuk dalam KSP kepentingan pertumbuhan ekonomi (lihat nomor 4 pada gambar 2.81).

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS (KSP) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- KSP dari Sudut Kepentingan **Pertumbuhan Ekonomi**, yaitu:
 - 1) Kawasan Industri Tanjung Ular dan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) Kawasan Industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - 3) Kawasan Pertanian Buleng di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
 - 4) Kawasan Pariwisata Pulau Belitung di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur; dan
 - 5) Kawasan Perkotaan Pangkal Pinang, Merawang, dan Pangkalan Baru di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkal Pinang.
- KSP Dari Sudut Kepentingan **Sosial Budaya** terdapat pada Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
- KSP Dari Sudut Kepentingan **Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** terdapat pada Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove Pulau Lepar dan Pulau Pongok di Kabupaten Bangka Selatan.



Sumber: Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 81 Pengembangan Kawasan Strategis (KSP) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Sumber: Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2025

Secara eksplisit Kabupaten Belitung diprioritaskan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini dinilai memiliki daya tarik tinggi, baik dari sisi sumber daya alam, daya dukung lingkungan, maupun aksesibilitas. Adapun implikasinya terhadap Kabupaten Belitung:

- Kawasan ini akan menerima prioritas pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, pelabuhan, layanan transportasi, dan utilitas publik.

- Penguatan *branding* destinasi wisata, baik nasional maupun internasional (misalnya melalui Geopark Belitung UNESCO), akan menjadi bagian penting dari strategi pengembangan wilayah.
- Sinergi lintas sektor diperlukan, khususnya antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, kelautan-perikanan, dan industri kreatif.
- Penataan ruang dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan yang tetap menjaga keberlanjutan.

2.3.2.3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung telah disusun sebagai acuan dalam pembangunan 20 tahun kedepan. Pada periode 2025 – 2029 menjadi periode pertama implementasinya sehingga perlu diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Berikut ini tabel ringkasan yang menunjukkan kontekstualisasi isu pembangunan jangka panjang dalam RPJMD Kabupaten Belitung.

Tabel 2.86 Telaah Isu Strategis RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Isu Strategis RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045	Kontekstualisasi dalam RPJMD Kabupaten Belitung	Keterangan
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial kelompok rentan.	Isu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi dasar penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Akses pendidikan yang merata, peningkatan keterampilan kerja, serta perlindungan sosial harus menjadi prioritas RPJMD agar SDM Kabupaten Belitung mampu bersaing secara global.
Penguatan struktur dan daya saing ekonomi daerah	Penekanan pada penguatan unggulan sektor seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian berbasis ekonomi hijau.	Struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor primer perlu diperkuat melalui diversifikasi dan hilirisasi. Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal harus dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing usaha lokal.
Transformasi tata kelola pemerintahan daerah	Transformasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kapasitas ASN untuk pelayanan prima.	Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan birokrasi yang responsif dan adaptif. Digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas aparatur, dan reformasi sistem merit menjadi agenda utama RPJMD.
Penguatan pembangunan	Percepatan konektivitas antar	Konektivitas wilayah menjadi prasyarat utama pemerataan

Isu Strategis RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045	Kontekstualisasi dalam RPJMD Kabupaten Belitung	Keterangan
wilayah dan konektivitas	wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan, dan infrastruktur pendukung ekonomi.	pembangunan. RPJMD harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, penguatan pusat pertumbuhan, dan sinergi antar wilayah pembangunan.
Peningkatan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup	Pemberdayaan nilai budaya lokal, konservasi lingkungan, mitigasi bencana, dan penguatan masyarakat adat.	Identitas budaya dan kelestarian lingkungan merupakan kekuatan Kabupaten Belitung. RPJMD perlu mengarusutamakan nilai budaya lokal dan ekologi sebagai basis pembangunan sosial yang tangguh dan berkelanjutan.
Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur	Pemenuhan standar pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi) dan infrastruktur transportasi.	Kualitas layanan dasar menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD harus memastikan pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan dan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
Pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan	Penguatan integrasi pembangunan kawasan, pemerataan akses layanan, dan penyelarasan program lintas sektor.	Kesenjangan antarwilayah perlu ditekan dengan pendekatan pembangunan inklusif dan integratif. RPJMD harus mendorong pemerataan akses layanan, pembangunan pedesaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal.
Pengembangan ekonomi biru, hijau dan digital	Inovasi ekonomi digital, penguatan ekonomi kelautan dan pertanian berkelanjutan, serta hilirisasi produk lokal.	Transformasi menuju ekonomi biru, hijau, dan digital menjadi masa depan pembangunan daerah. RPJMD harus mendukung pengembangan inovasi digital, pemanfaatan potensi kelautan dan pertanian berkelanjutan, serta mendorong industrialisasi produk lokal.

Sumber: RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045, data diolah

Isu strategis pertama yang menjadi perhatian dalam RPJPD Kabupaten Belitung adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Permasalahan rendahnya rata-rata lama sekolah, terbatasnya akses pendidikan vokasi, serta masih kurangnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan menjadi tantangan mendasar. Dalam konteks RPJMD, kebijakan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja berbasis potensi lokal, serta penguatan program perlindungan sosial secara inklusif. Hal ini penting

untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja yang dinamis.

Isu strategis kedua adalah penguatan struktur dan daya saing ekonomi daerah. Struktur ekonomi Kabupaten Belitung yang masih didominasi oleh sektor primer memerlukan transformasi melalui diversifikasi sektor unggulan. Dalam RPJMD, fokus diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, penguatan sektor perikanan dan pertanian, serta hilirisasi produk lokal. Selain itu, perluasan lapangan kerja produktif, penguatan UMKM, dan peningkatan akses pembiayaan menjadi strategi untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dalam mendorong efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Kabupaten Belitung masih menghadapi tantangan birokrasi yang belum adaptif serta digitalisasi layanan yang belum merata. Dalam konteks RPJMD, reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, penguatan sistem merit, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian, pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel.

Penguatan pembangunan wilayah dan konektivitas menjadi prasyarat utama dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ketimpangan antar wilayah desa dan kota, serta keterbatasan infrastruktur dasar menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, RPJMD akan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pinggiran. Sinergi antar sektor dan tata ruang akan diperkuat untuk memastikan konektivitas yang efektif dan efisien.

Isu ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup menjadi hal yang semakin penting dalam menghadapi tantangan global. Kabupaten Belitung memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang harus dijaga keberlanjutannya. RPJMD diarahkan untuk memperkuat pelestarian nilai budaya lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengarusutamaan budaya dan ekologi akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan sosial daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus ditangani. RPJMD akan memastikan pemenuhan standar layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Disamping itu, pembangunan infrastruktur transportasi, irigasi, serta jaringan teknologi informasi menjadi prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan merupakan fondasi utama untuk mencapai keadilan sosial. RPJMD akan memfokuskan diri pada integrasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah, penguatan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan menjadi strategi utama dalam memperkecil kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Terakhir, pengembangan ekonomi biru, hijau dan digital menjadi arah pembangunan masa depan Kabupaten Belitung. RPJMD akan mendorong pemanfaatan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta inovasi berbasis digital. Dukungan terhadap industri kreatif, digitalisasi UMKM, dan pembangunan ekosistem ekonomi hijau akan menjadi pengungkit utama dalam mewujudkan ekonomi modern yang tangguh dan berkelanjutan.

2.3.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), diperlukan telaah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2021–2041. Telaah ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan dan dukungan RTRW terhadap target dan prioritas pembangunan daerah dalam periode RPJMD 2025–2029. Hal ini menjadi penting untuk memastikan arah pembangunan spasial mendukung pencapaian sasaran sektoral yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan memahami keterhubungan tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun program dan kegiatan pembangunan yang tidak hanya efektif dari sisi sektoral, tetapi juga efisien dari sisi pemanfaatan ruang dan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.87 Telaah RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2021-2041

Aspek RTRW	Isi/Substansi RTRW	Relevansi terhadap RPJMD 2025 – 2029
Struktur Ruang	PKW: Tanjungpandan; PKL: Badau, Selat Nasik, Sijuk, Membalong; Pengembangan jaringan jalan kolektor dan konektivitas transportasi darat, laut, udara	Pengembangan wilayah berbasis potensi lokal; peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan
Pola Ruang	Kawasan lindung (hutan, sempadan pantai/sungai, RTH); Kawasan budidaya (pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman)	Pengendalian alih fungsi lahan; konservasi lingkungan; penguatan sektor ekonomi hijau dan biru
Kawasan Strategis	Kawasan strategis ekonomi (agrowisata, industri); Kawasan strategis sosial budaya (kawasan bersejarah, pendidikan); Kawasan strategis lingkungan (konservasi)	Penajaman prioritas pembangunan wilayah; arah investasi berbasis potensi lokal dan sosial budaya
Infrastruktur Spasial	Pelabuhan (Tanjung Batu, Tanjungpandan, Tanjung Kelayang), Bandara H.A.S Hanandjoeddin; Jaringan jalan, SPAM, SPAL, irigasi, energi, TIK	Pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan konektivitas wilayah; mendukung daya saing daerah

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung 2014-2034, data diolah

Arah Pengembangan Struktur Ruang

Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Belitung diarahkan untuk mendukung efisiensi penggunaan ruang, konektivitas antar wilayah, serta pelayanan infrastruktur yang merata. Hal ini tercermin dalam penetapan Tanjungpandan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan wilayah Badau, Selat Nasik, Sijuk, serta Membalong sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Penguatan struktur ruang juga ditopang oleh rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer dan sekunder, jalan lokal, serta jembatan penghubung antarwilayah. Selain itu, peningkatan sistem transportasi darat, laut, dan udara menjadi bagian dari strategi struktur ruang yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Arah ini sangat relevan dengan RPJMD yang mendorong pembangunan wilayah berbasis potensi lokal dan peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan efisiensi logistik daerah.

Arah Pengembangan Pola Ruang

Pola ruang dalam RTRW mengatur alokasi ruang untuk fungsi lindung dan budidaya guna menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kawasan lindung diarahkan pada pelestarian hutan lindung, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan resapan air, dan kawasan kearifan lokal. Kawasan budidaya difokuskan pada pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, dan permukiman yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRW juga menetapkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) harus minimal 30% dari luas wilayah perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Arah pola ruang ini mendukung kebijakan RPJMD dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pengendalian alih fungsi lahan, konservasi lingkungan, dan penguatan ekonomi sektor primer yang berwawasan lingkungan.

Kawasan Strategis dan Pengembangan Wilayah

RTRW menetapkan kawasan strategis berdasarkan fungsi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kawasan strategis ekonomi mencakup wilayah dengan potensi pengembangan agrowisata, perikanan, pertanian unggulan, dan kawasan industri yang memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan strategis sosial budaya diarahkan pada pengembangan kawasan bersejarah, budaya lokal, serta kawasan pendidikan yang dapat memperkuat identitas lokal dan menjadi daya tarik pariwisata. Hal ini mendorong sinergi antara pembangunan fisik dan penguatan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, kawasan strategis lingkungan mencakup wilayah konservasi dan ekosistem penting. Penguatan kawasan strategis ini sangat relevan dalam kerangka RPJMD sebagai acuan dalam prioritas program pembangunan wilayah dan arah penentuan investasi daerah yang lebih terarah.

Dukungan Infrastruktur Spasial

Pengembangan infrastruktur spasial dalam RTRW menjadi tulang punggung pendukung struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Infrastruktur ini meliputi jaringan jalan kolektor, sistem transportasi laut dan udara, serta sarana pendukung lainnya. Pembangunan pelabuhan seperti Tanjung Batu, Tanjung

Kelayang, dan Tanjungpandan serta Bandara H.A.S Hanandjoeddin menjadi bagian penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat peran Belitung sebagai bagian dari jaringan logistik regional. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, SPAM, SPAL, pengelolaan sampah, dan energi menjadi elemen penting untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat serta mendukung sasaran RPJMD dalam penyediaan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hasil telaah menunjukkan bahwa arah pembangunan dalam RTRW Kabupaten Belitung mendukung secara langsung sasaran dan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Kesesuaian antara aspek spasial dan sektoral ini menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang sinergis, efektif, dan efisien di tingkat daerah. Diperlukan komitmen kuat dalam integrasi dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan yang dirancang benar-benar berjalan sesuai dengan daya dukung wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.3.2.5 Telaah Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam menjamin bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029, KLHS berperan sebagai alat bantu analisis untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang dirumuskan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Telaah ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara isu-isu keberlanjutan yang diangkat dalam KLHS dengan arah pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD. Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan, serta bagaimana indikator keberlanjutan digunakan sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan daerah.

Lebih jauh, hasil telaah ini juga menyoroti rekomendasi strategis dari KLHS yang perlu diakomodasi dalam perumusan program prioritas RPJMD. Dengan demikian, sinergi antara perencanaan sektoral dan tata kelola lingkungan diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Belitung.

**Tabel 2.88 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahun 2025-2029
Kabupaten Belitung**

Aspek Telaah	Rincian dalam KLHS	Keterkaitan dengan RPJMD 2025 - 2029
Isu Keberlanjutan dalam KLHS	Isu strategis meliputi kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, ketimpangan sosial-ekonomi, kerentanan bencana, rendahnya kualitas lingkungan hidup.	Selaras dengan prioritas RPJMD terkait lingkungan, inklusi sosial, pembangunan ekonomi hijau dan biru, serta ketahanan bencana.

Aspek Telaah	Rincian dalam KLHS	Keterkaitan dengan RPJMD 2025 - 2029
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam KRP	Enam muatan KLHS diintegrasikan dalam RPJMD: daya dukung lingkungan, risiko lingkungan, jasa ekosistem, efisiensi sumber daya, kerentanan iklim, dan kualitas lingkungan.	Program RPJMD diarahkan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengendalian dampak lingkungan.
Indikator Keberlanjutan	Indikator TPB/SDGs digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah: kualitas air, IKLH, akses sanitasi, kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, dan ketahanan iklim.	RPJMD mengadopsi indikator keberlanjutan sebagai tolok ukur capaian program prioritas daerah.
Rekomendasi Kebijakan dari KLHS	KLHS merekomendasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas layanan dasar, penguatan ketahanan pangan, serta pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan.	Rekomendasi KLHS menjadi dasar perumusan program/kegiatan strategis daerah untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: KLHS Kabupaten Belitung tahun 2025-2029, data diolah

Isu Keberlanjutan dalam KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029 mengidentifikasi sejumlah isu keberlanjutan yang sangat relevan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Isu-isu tersebut antara lain mencakup kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, degradasi kualitas air dan tanah, serta penurunan fungsi ekosistem. Selain itu, KLHS juga menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah serta kerentanan masyarakat terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar untuk mendorong pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan inklusif.

Rendahnya kualitas lingkungan hidup juga menjadi tantangan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam penyusunan RPJMD menjadi suatu keharusan untuk menjawab isu-isu strategis tersebut. KLHS memberikan dasar pemikiran penting bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi semu yang tidak berkelanjutan.

Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam KRP

KLHS mendorong integrasi enam muatan utama pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) daerah. Muatan tersebut mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan terhadap perubahan iklim, dan kualitas lingkungan hidup. Keenam muatan tersebut menjadi indikator penting yang harus dianalisis dalam setiap perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, agar arah pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologi dan sosial.

RPJMD Kabupaten Belitung perlu mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan hasil analisis KLHS. Hal ini akan memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan dan memastikan bahwa potensi dampak negatif dapat diminimalkan sejak perencanaan awal. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi slogan, tetapi terimplementasi nyata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program daerah secara sistematis dan terukur.

Indikator Keberlanjutan

Indikator keberlanjutan menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas dan dampak pembangunan daerah terhadap lingkungan dan masyarakat. KLHS telah mengadopsi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai bagian dari instrumen pengukuran capaian RPJMD. Indikator tersebut meliputi kualitas air, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), akses air minum dan sanitasi, tingkat kemiskinan, partisipasi pendidikan, ketahanan pangan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Penggunaan indikator keberlanjutan dalam RPJMD membantu pemerintah daerah dalam memantau secara berkala capaian pembangunan dan mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu segera diperbaiki. Hal ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan. Integrasi indikator keberlanjutan secara sistematis juga dapat menjadi basis dalam pengambilan keputusan berbasis bukti dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berorientasi jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan dari KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam RPJMD agar pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Rekomendasi utama mencakup strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pemulihan daya dukung lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif. KLHS juga mendorong optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan sebagai alternatif pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Pemerintah daerah diharapkan menjadikan hasil rekomendasi KLHS sebagai rujukan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan. Integrasi rekomendasi kebijakan KLHS ke dalam RPJMD bukan hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2.3.3 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029

Kualitas Pendidikan Masyarakat masih Rendah

Penguatan harmoni sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai masalah sosial dan pembangunan, termasuk kualitas pendidikan, kesehatan, literasi digital, stunting, dan kemiskinan. Masalah-masalah ini saling mempengaruhi dan menciptakan siklus yang menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang rendah cenderung sulit berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Mereka lebih rentan terhadap misinformasi, yang bisa memicu konflik dan perpecahan, sehingga merusak harmoni sosial. Ketika masyarakat hidup dalam harmoni, lingkungan belajar menjadi lebih kondusif. Kerja sama dan toleransi antar individu dari berbagai latar belakang bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua orang. Sebaliknya, konflik sosial dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan menghambat akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Belitung. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, akses pendidikan tinggi, serta penguatan kapasitas literasi dan numerasi dasar masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pendidikan merupakan fondasi peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya sangat menentukan keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah.

Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, penguatan kualitas pendidikan menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia Indonesia unggul, yang salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi, pendidikan karakter, dan kesetaraan akses. Hal ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang juga menempatkan isu rendahnya capaian pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu tantangan utama di daerah. Provinsi menggarisbawahi perlunya pengembangan pendidikan vokasional, literasi digital, dan perluasan akses pendidikan tinggi yang berbasis kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menetapkan peningkatan kualitas dan daya saing SDM sebagai prioritas jangka panjang. Strategi ini mencakup pembangunan pendidikan sepanjang hayat, penguatan pendidikan vokasional, serta peningkatan partisipasi pendidikan yang inklusif. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada sistem pendidikan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamis terhadap kebutuhan wilayah maritim dan sektor unggulan Belitung.

Dari sudut pandang lingkungan dan sosial, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pilar sosial pembangunan berkelanjutan. Isu pendidikan dikaitkan dengan ketimpangan akses, rendahnya literasi dasar, dan keterbatasan fasilitas pendidikan yang berwawasan lingkungan. KLHS juga mendorong integrasi prinsip inklusivitas,

kesetaraan gender, dan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal dalam sistem pembelajaran, agar pembangunan SDM berjalan adil dan berkelanjutan.

Secara spasial, RTRW Kabupaten Belitung 2021–2041 mengarahkan pengembangan sistem pelayanan pendidikan melalui penyediaan ruang dan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. RTRW mendorong perwujudan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh fasilitas layanan dasar termasuk sekolah, pelatihan vokasi, dan pusat pembelajaran masyarakat, terutama di kawasan pinggiran dan pedesaan.

Dengan demikian, isu kualitas pendidikan yang masih rendah memiliki keterkaitan kuat dan lintas dimensi terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Integrasi strategi lintas dokumen menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029, dengan penekanan pada pendidikan yang merata, responsif terhadap kebutuhan sektor unggulan, dan mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang berdaya saing, adaptif, dan inklusif.

Derajat Kesehatan Masyarakat masih Rendah

Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah merupakan tantangan krusial dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung. Masalah-masalah kesehatan seperti tingginya prevalensi stunting, keterbatasan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta beban ganda penyakit (menular dan tidak menular) menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas, kualitas hidup, dan kapasitas pembangunan manusia secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi prioritas nasional dalam rangka memperkuat ketahanan sosial dan membangun manusia Indonesia yang sehat. RPJMN menargetkan penguatan layanan primer, percepatan penurunan stunting, peningkatan cakupan JKN, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara terpadu. Arah ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045, pembangunan kesehatan diarahkan pada penguatan sistem layanan dasar yang merata dan berkelanjutan. Strategi jangka panjang mencakup perluasan cakupan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembangunan sistem kesehatan daerah yang adaptif terhadap perubahan demografi dan lingkungan. Arah ini berpadu dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan penanganan penyakit kronis.

Sementara itu, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung mengidentifikasi isu kesehatan dalam pilar sosial dan lingkungan. Derajat kesehatan rendah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan medis, tetapi juga oleh kondisi lingkungan hidup yang buruk seperti sanitasi tidak layak, pencemaran air, dan

ketahanan pangan yang lemah. KLHS menekankan pentingnya intervensi lintas sektor yang mengintegrasikan kesehatan lingkungan, ketersediaan air bersih, pengendalian limbah, serta edukasi kesehatan masyarakat untuk mendukung derajat kesehatan yang lebih baik.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi bagian integral dalam pengembangan sistem pelayanan dasar wilayah di dalam dokumen RTRW. Pembangunan diarahkan juga untuk fasilitas kesehatan secara merata di pusat-pusat pelayanan lokal dan wilayah, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan terpadu. Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan ini mendukung terwujudnya pelayanan yang mudah dijangkau, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan spasial masyarakat.

Telaah tersebut menunjukkan bahwa isu rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah tantangan multidimensi yang perlu ditangani secara komprehensif melalui RPJMD 2025–2029. Pendekatan yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dasar, integrasi kesehatan lingkungan, penguatan sistem pembiayaan dan manajemen kesehatan, serta peran aktif masyarakat dalam mendorong gaya hidup sehat. Dengan integrasi lintas dokumen perencanaan, pembangunan kesehatan dapat diarahkan untuk mencapai masyarakat Belitung yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Tingkat Literasi Digital Masyarakat masih Rendah

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Belitung menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong percepatan transformasi digital daerah. Literasi digital yang lemah berdampak langsung terhadap keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan publik digital, peluang kerja berbasis teknologi, serta penguatan partisipasi dalam era masyarakat informasi. Rendahnya literasi digital juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memperlambat adaptasi masyarakat terhadap inovasi pembangunan berbasis digital.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu prioritas strategis nasional, dengan menekankan perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penguatan literasi digital masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan agenda transformasi ekonomi dan birokrasi. Literasi digital dianggap penting tidak hanya sebagai sarana meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengangkat pentingnya peningkatan kapasitas SDM, termasuk dalam aspek penguasaan teknologi dan digitalisasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "literasi digital," namun arah kebijakan provinsi menunjukkan perlunya adaptasi teknologi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan sektor ekonomi kreatif.

Adapun dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 secara lebih eksplisit menekankan pengembangan SDM unggul dan adaptif terhadap perkembangan

teknologi informasi dan digital. Tantangan rendahnya literasi digital diidentifikasi sebagai salah satu hambatan dalam memanfaatkan peluang ekonomi baru, khususnya dalam sektor pariwisata digital, UMKM berbasis daring, serta pendidikan berbasis teknologi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Belitung dalam jangka panjang.

Isu rendahnya literasi digital masyarakat di Kabupaten Belitung memiliki relevansi yang tinggi dengan arah pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam aspek SDM, transformasi ekonomi, dan tata kelola digital. Namun, pengarusutamaan literasi digital sebagai prioritas daerah masih perlu diperkuat secara eksplisit dalam RPJMD agar mampu menjembatani kesenjangan digital dan mendorong peningkatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat.

Prevalensi Stunting Masih Tinggi dan Menjadi Tantangan Pembangunan Kesehatan

Stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitung. Prevalensi stunting yang tinggi mencerminkan tidak hanya masalah gizi kronis, tetapi juga akumulasi dari berbagai persoalan sistemik, seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, pola asuh yang kurang tepat, dan akses layanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama, yang artinya anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Ini adalah masa 1000 Hari Pertama Kehidupan yang sangat krusial, Keterkaitan utamanya adalah ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup, bergizi, dan beragam. Ketika sebuah rumah tangga mengalami kerawanan pangan, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan menjadi terganggu. Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan nutrisi esensial seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal, Bahkan jika ketersediaan pangan secara kuantitas cukup, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola asuh yang salah bisa menyebabkan anak tetap kekurangan gizi. Misalnya, pola makan yang didominasi karbohidrat tanpa protein dan sayuran yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan strategis karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat di masa depan.

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas nasional, dengan target penurunan yang signifikan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, mulai dari intervensi spesifik (kesehatan dan gizi) hingga intervensi sensitif (air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan keluarga). Stunting tidak hanya dilihat sebagai masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang kompleks.

Arah yang sejalan juga ditemukan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menempatkan penurunan angka stunting sebagai salah satu indikator utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Provinsi mendorong penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan keluarga

melalui edukasi gizi, serta perbaikan sanitasi lingkungan sebagai bagian dari strategi penurunan stunting yang komprehensif.

Dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045, pembangunan manusia menjadi salah satu pilar utama. Penurunan stunting secara eksplisit menjadi salah satu arah kebijakan dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, dan memastikan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Pendekatan jangka panjang diarahkan pada penguatan intervensi sejak 1.000 hari pertama kehidupan, edukasi gizi keluarga, serta integrasi layanan kesehatan dan sosial di tingkat desa.

KLHS RPJMD Kabupaten Belitung menyoroti stunting dalam pilar sosial sebagai salah satu indikator ketimpangan kesejahteraan. KLHS menekankan pentingnya integrasi pendekatan lingkungan dan sosial, karena banyak faktor penyebab stunting yang bersumber dari buruknya lingkungan hidup, seperti keterbatasan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memadai, dan kerentanan terhadap bencana. Oleh karena itu, intervensi yang berkelanjutan harus menggabungkan perbaikan layanan dasar, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan pelibatan masyarakat secara aktif.

Stunting merupakan isu yang secara konsisten muncul dan diperkuat dalam hampir seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029 perlu menempatkan isu ini sebagai prioritas strategis yang ditangani secara lintas sektor, berorientasi keluarga dan komunitas, serta berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala. Penurunan stunting bukan sekadar indikator keberhasilan sektor kesehatan, tetapi juga cermin dari efektivitas tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh.

Masih Banyak Penduduk yang Berpenghasilan di Bawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Belitung yang berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Ketimpangan pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta akses terbatas terhadap layanan dasar turut memperkuat struktur kemiskinan yang ada.

Pengurangan kemiskinan merupakan agenda utama dalam pembangunan manusia dan penguatan perlindungan sosial nasional. Pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada akhir periode perencanaan. Strategi nasional mencakup perluasan program bantuan sosial berbasis data terpadu, integrasi layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan akses pembiayaan dan kewirausahaan.

Pada perencanaan pembangunan di provinsi juga mengidentifikasi kemiskinan sebagai isu prioritas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan. Program-program provinsi diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan

UMKM, dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan kelompok rentan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan.

Selaras dengan itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menekankan pembangunan inklusif dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Kemiskinan diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi jangka panjang meliputi peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, dan transformasi program bantuan menjadi intervensi berbasis pemberdayaan.

Dalam perspektif keberlanjutan, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung memasukkan isu kemiskinan sebagai bagian dari pilar sosial. KLHS menyoroti bahwa kerentanan ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan ketimpangan akses layanan dasar. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan harus melalui peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, lansia miskin, dan penyandang disabilitas.

Secara spasial, RTRW Kabupaten Belitung 2014–2034 tidak menyebut kemiskinan secara langsung, namun arah pengembangan wilayah ke pusat-pusat kegiatan lokal dan penguatan konektivitas antarwilayah mendukung terbukanya akses terhadap layanan dan peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar rakyat, dan pusat layanan publik menjadi pondasi penting dalam menciptakan ruang tumbuh ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin.

Upaya pengurangan jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan harus menjadi prioritas utama RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Intervensi yang dilakukan perlu bersifat lintas sektor, menyasar akar penyebab struktural kemiskinan, serta diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan ekosistem kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Nilai Investasi Daerah Masih Rendah dan Belum Optimal Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Rendahnya nilai investasi daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung. Kondisi ini ditandai oleh terbatasnya realisasi penanaman modal, minimnya diversifikasi sektor investasi, serta belum optimalnya kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan ekosistem investasi yang kompetitif. Padahal, investasi merupakan pendorong penting bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Kabupaten Belitung, pemerintah provinsi mendorong penguatan infrastruktur pendukung investasi, promosi potensi unggulan daerah (termasuk tambang, pariwisata, dan perikanan), serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Di samping itu, penguatan kapasitas daerah dalam

pelayanan perizinan dan pemberian insentif menjadi bagian penting dari strategi peningkatan investasi.

RTRW Kabupaten Belitung memberikan landasan spasial penting bagi peningkatan investasi daerah. Dokumen RTRW menetapkan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang layak dikembangkan sebagai lokasi investasi, seperti kawasan agrowisata, kawasan pariwisata Tanjung Kelayang, kawasan pelabuhan, serta kawasan budidaya perikanan dan pertanian. RTRW juga mengarahkan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, serta jaringan energi dan TIK yang mendukung kegiatan investasi. Dengan demikian, isu rendahnya investasi daerah memiliki relevansi tinggi terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029 harus merespons isu ini dengan kebijakan dan program strategis yang memperkuat iklim investasi, mendorong kepastian berusaha, meningkatkan promosi potensi unggulan daerah, dan memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kurangnya Diversifikasi Sektor Ekonomi yang Berbasis Potensi Lokal

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Belitung pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, pertambangan, dan perikanan tangkap menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi pasar, krisis global, dan tekanan lingkungan. Diversifikasi ekonomi yang belum berkembang optimal menjadi hambatan dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, dan menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan inklusif. Sementara potensi lokal seperti pertanian organik, ekonomi kreatif, pengolahan hasil laut, dan produk berbasis kearifan lokal belum tergarap secara maksimal.

Pemerintah daerah telah memberikan dukungan spasial yang sangat relevan dengan agenda diversifikasi ekonomi yang tertuang di dalam RTRW. Beberapa kawasan budidaya telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan pertanian, perikanan, agrowisata, dan industri rumah tangga. Pengembangan kawasan wisata terpadu, pelabuhan perikanan, dan sentra produksi pangan menjadi bagian dari strategi struktur ruang yang mendukung transformasi ekonomi daerah.

Dengan demikian, kurangnya diversifikasi sektor ekonomi menjadi isu strategis yang perlu segera dijawab oleh RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada sektor unggulan lama, tetapi perlu mendorong tumbuhnya sektor-sektor baru berbasis potensi lokal, teknologi, dan keberlanjutan. Langkah ini penting untuk meningkatkan resiliensi ekonomi daerah, memperluas basis penerimaan daerah, serta menciptakan peluang kerja yang merata dan berkeadilan.

Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung yang telah diakui secara nasional, bahkan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Tanjung Kelayang dan masuk dalam jaringan geopark UNESCO. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas SDM pariwisata, kurangnya promosi terpadu, serta belum optimalnya integrasi dengan sektor lain seperti UMKM, pertanian, dan budaya lokal. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata yang besar belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan inklusif bagi masyarakat.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pembangunan destinasi pariwisata unggulan, penguatan konektivitas antar destinasi, serta pengembangan pariwisata berkualitas tinggi berbasis alam, budaya, dan digital. Selaras dengan itu, **RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai pengganti sektor pertambangan, dengan strategi peningkatan kualitas destinasi, promosi, dan ekosistem usaha pariwisata.

RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menempatkan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi jangka panjang, dengan visi mewujudkan Belitung sebagai pusat maritim barat yang berdaya saing. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Di sisi lain, KLHS RPJMD menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan budaya, dengan menghindari kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak terkendali. KLHS juga mendorong agar pariwisata dirancang untuk memperkuat nilai-nilai lokal dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelompok rentan.

Dari perspektif spasial, RTRW Kabupaten Belitung mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk KEK Tanjung Kelayang, kawasan pantai, geopark, dan kawasan perdesaan wisata. Dokumen RTRW juga mengarahkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan pariwisata dengan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, bandara, jalan kolektor, dan kawasan permukiman. Integrasi spasial ini menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan destinasi dan kenyamanan pengunjung.

Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Belitung merupakan akibat dari belum kuatnya koordinasi lintas sektor dan dokumen perencanaan yang ada. RPJMD 2025–2029 perlu merespons isu ini dengan menyusun strategi penguatan tata kelola destinasi, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pariwisata dengan sektor ekonomi lokal, serta pendekatan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan dan kearifan budaya. Dengan langkah tersebut, pariwisata dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Pelaksanaan SPBE Belum Berjalan Secara Ideal

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan pilar

penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Belitung, pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terintegrasinya sistem informasi lintas perangkat daerah, rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam memanfaatkan teknologi, serta infrastruktur TIK yang belum merata. Hal ini menyebabkan proses layanan publik masih belum sepenuhnya digital dan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Penguatan transformasi digital birokrasi menjadi salah satu agenda strategis nasional. Pemerintah pusat mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh melalui integrasi data, interoperabilitas sistem, serta penyederhanaan layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya adalah mendorong layanan publik yang adaptif, akuntabel, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan seperti Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai prasyarat peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja birokrasi. Namun, pelaksanaan SPBE di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM TIK, serta sinkronisasi platform digital untuk mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi digital di seluruh wilayah provinsi.

Dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045, transformasi tata kelola pemerintahan digital termasuk dalam agenda pembaruan birokrasi daerah. Visi jangka panjang menekankan pelayanan publik yang adaptif terhadap teknologi, dengan dukungan infrastruktur digital, manajemen data daerah yang terintegrasi, dan penguatan pengawasan berbasis sistem informasi. Namun tantangan di lapangan adalah bagaimana memastikan implementasi SPBE berjalan merata di seluruh OPD dan menjangkau masyarakat secara luas.

Kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Belitung menunjukkan masih perlunya integrasi antara infrastruktur, SDM, sistem informasi, dan tata kelola kelembagaan. RPJMD 2025–2029 perlu merespons isu ini melalui strategi penguatan kapasitas birokrasi digital, penyediaan infrastruktur TIK yang merata, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung perencanaan dan pelayanan publik. Dengan SPBE yang terintegrasi dan inklusif, Kabupaten Belitung dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Manajemen SDM Aparatur Belum Sepenuhnya Menciptakan ASN yang Profesional

Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan birokrasi yang melayani, adaptif, dan berdaya saing. Namun, manajemen SDM aparatur di Kabupaten Belitung masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari belum optimalnya perencanaan kebutuhan pegawai, rendahnya penguasaan teknologi dan literasi digital, hingga kelemahan dalam penerapan sistem merit dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kondisi

ini berpengaruh pada rendahnya efektivitas pelayanan publik serta lambatnya respons birokrasi terhadap dinamika perubahan sosial dan teknologi.

Dalam RPJMN 2025–2029, reformasi manajemen ASN menjadi bagian penting dari agenda transformasi birokrasi nasional. Pemerintah pusat mendorong sistem merit yang kuat, manajemen talenta, dan penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan. Ditekankan pula pentingnya pelatihan berbasis kompetensi, transformasi digital ASN, serta promosi berdasarkan kinerja dan integritas. Dengan demikian, SDM aparatur tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah.

Kekurangan dalam manajemen ASN perlu dijawab secara strategis dalam RPJMD 2025–2029 melalui transformasi sistem kepegawaian yang modern dan berbasis kompetensi. Langkah-langkah seperti pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit menjadi keharusan untuk mewujudkan birokrasi Kabupaten Belitung yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tata Kelola Pendapatan Daerah Belum Optimal

Optimalisasi pendapatan daerah merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Belitung. Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan basis penerimaan daerah, lemahnya sistem intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta belum optimalnya digitalisasi layanan perpajakan dan pengelolaan aset daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, arah kebijakan fiskal nasional mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui inovasi pendapatan dan penguatan tata kelola pendapatan daerah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi landasan utama dalam reformasi pendapatan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan rasio PAD terhadap total APBD melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi sistem pelayanan pajak daerah, serta sinergi antar sektor dalam pengelolaan potensi fiskal.

Dalam konteks Kabupaten Belitung, RPJPD 2025–2045 menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal yang kuat sebagai basis pertumbuhan PAD. Pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif diharapkan dapat membuka peluang peningkatan PAD yang berkelanjutan. Di sisi lain, dokumen KLHS mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak mengorbankan kelestarian lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara itu, RTRW mendukung upaya ini dengan mengarahkan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 perlu memuat strategi penguatan kelembagaan pajak daerah, reformasi sistem

informasi fiskal, serta integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan fiskal untuk meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Infrastruktur Kewilayahan Masih Belum Memadai untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Ketersediaan infrastruktur kewilayahan yang memadai merupakan prasyarat penting dalam pemerataan pembangunan, konektivitas antarwilayah, serta penguatan pelayanan dasar dan ekonomi lokal. Namun di Kabupaten Belitung, masih terdapat ketimpangan kualitas dan jangkauan infrastruktur antarwilayah, terutama di wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan mencakup keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, minimnya sarana transportasi publik, serta keterbatasan infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.

Penguatan infrastruktur wilayah menjadi prioritas nasional dalam mendorong transformasi ekonomi dan penurunan kesenjangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menjamin konektivitas nasional, integrasi kawasan pertumbuhan baru, serta mendukung pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berbasis potensi lokal, termasuk peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara untuk mendukung pariwisata, perikanan, dan pertanian.

Selaras dengan itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 memuat agenda pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan kawasan, pemerataan layanan dasar, serta mitigasi risiko bencana. Dalam dokumen tata ruang Kabupaten Belitung diarahkan pada pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer dan sekunder, penguatan simpul transportasi (pelabuhan, bandara), serta infrastruktur air bersih, sanitasi, dan energi. Sementara KLHS mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, integrasi spasial, serta inklusi sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Dengan demikian, RPJMD perlu memastikan pembangunan infrastruktur kewilayahan dilakukan secara adil, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Belitung.

Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah Masih Rendah

Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Belitung menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pembangunan, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Banyak wilayah perdesaan dan kawasan pesisir yang masih sulit dijangkau, baik karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak maupun belum tersambungunya jalur transportasi yang layak. Akibatnya, keterisolasian wilayah-wilayah tertentu masih tinggi dan berdampak pada rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.

Konektivitas yang rendah juga berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor-sektor berbasis potensi wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Wilayah yang memiliki keunggulan komparatif belum mampu mengakses rantai pasok dan pasar secara efisien, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keterbatasan sarana transportasi publik, minimnya integrasi antar moda, serta kurangnya dukungan logistik menjadi faktor penghambat utama.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat konektivitas fisik antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, konektivitas digital juga perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan, agar wilayah-wilayah terpencil tidak tertinggal dalam era transformasi informasi dan ekonomi digital. Akses yang merata akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memperkuat kohesi sosial antarwilayah dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Rendahnya Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan secara Berkelanjutan

Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup masih tergolong rendah di Kabupaten Belitung. Masih banyak aktivitas yang tidak memperhatikan dampak ekologis jangka panjang, seperti pembuangan sampah sembarangan, alih fungsi lahan tanpa pengendalian, penangkapan ikan yang merusak, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Kurangnya edukasi lingkungan dan minimnya penerapan nilai-nilai kelestarian dalam keseharian menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran tersebut.

Selain kesadaran, aspek kelembagaan dan tata kelola lingkungan juga masih belum optimal. Koordinasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan lindung, konservasi sumber daya, dan pengendalian pencemaran seringkali lemah. Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan belum dilakukan secara konsisten, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih rendah. Hal ini berisiko mempercepat degradasi lingkungan, menurunkan daya dukung wilayah, dan mengancam keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Meningkatkan kesadaran dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi publik, kampanye perilaku ramah lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan, serta insentif bagi praktik ekonomi hijau dan biru. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pengelola lingkungan, dan pemanfaatan teknologi pemantauan juga menjadi langkah penting. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan yang menjadi pondasinya.



Rendahnya kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan buruknya pengelolaan sampah dan limbah, yang pada gilirannya menurunkan ketahanan terhadap bencana. Ketiga isu ini saling terkait dalam sebuah siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar seperti memilah, mendaur ulang, dan mengurangi limbah mengakibatkan tumpukan sampah di lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik ini menyumbat saluran air, mencemari sungai dan laut, serta menjadi sumber penyakit. Buruknya pengelolaan sampah dan limbah secara langsung menurunkan ketahanan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Penguatan kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan adalah kunci untuk memutus siklus negatif ini. Ketika masyarakat sadar bahwa tindakan mereka berdampak besar pada lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengurangi limbah dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi. Memilah sampah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya untuk memudahkan daur ulang. Mendukung kebijakan lingkungan dengan Berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau komunitas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

BAB 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029

Visi merupakan penjabaran atas keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan untuk dapat terwujud sebagai hasil dari proses pembangunan dalam suatu tahapan perencanaan. Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun berdasarkan Visi kepala daerah terpilih serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berikut merupakan Visi RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029:



**“Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai
Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern
untuk Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Gambar 3. 1 Visi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029

Sumber : Data diolah

Visi tersebut memiliki beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam mengkonstruksi cita-cita pembangunan Kabupaten Belitung 2029. Adapun penjabaran kata kunci dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Maju : Belitung berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, peningkatan kualitas hidup serta standar pelayanan publik yang tinggi. Menurut bahasa “Maju” dalam kata kerja artinya bergerak menjadi lebih baik sedangkan dalam kata sifat memiliki arti mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi, arti lain menjelaskan bahwa maju berarti cerdas dan memiliki pikiran yang berkembang. Sehingga penekanan Kata “Maju” dalam Visi tersebut adalah dimana Kondisi yang diinginkan kedepan Kabupaten Belitung dapat mencapai kondisi atau tingkatan yang lebih tinggi, baik pada aspek Sumber Daya Manusia, Sosial, Ekonomi, Tata Kelola pemerintahan, Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Inovatif : Mendorong kreativitas dan inovasi dalam berbagai sektor termasuk Pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kata “Inovatif” menurut bahasa merupakan kata sifat yang memiliki arti pembaruan sehingga melekatnya kata ini dalam kalimat visi Kabupaten Belitung 2029 menekankan bahwa kemajuan Kabupaten Belitung diwujudkan melalui upaya-upaya kebaruan yang dapat memberikan perubahan signifikan dengan mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengakselerasi pembangunan daerah.

Berkelanjutan : Mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, ekologi, agar generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Kata “berkelanjutan” merupakan kata kerja yang memiliki arti berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan saja akan tetapi bagaimana suatu pembangunan dilaksanakan secara runtut atau terencana, pada setiap periodenya saling terhubung dan tidak berhenti pada satu titik dan dimulai dengan titik lainnya atau disebut dengan kesinambungan pembangunan.

Maritim Kawasan Barat : Kata kunci ini berfokus pada bentuk serta lokasi wilayah yang menjadi cakupan administratif Kabupaten Belitung dimana Kabupaten Belitung terletak di sebuah pulau yang berada di Laut Jawa dekat Selat Karimata, Pulau Belitung merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Jawa dengan Laut China Selatan dan Samudra Pasifik. Dengan posisi Kabupaten Belitung yang sangat strategis menjadikan wilayah ini sebagai daerah yang penting dalam rute perdagangan maritim nasional dan internasional. Sehingga dengan adanya potensi tersebut maka perencanaan jangka menengah daerah harus dapat menghasilkan suatu perencanaan yang ideal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur Modern : Perkembangan teknologi yang pesat dan tuntutan masyarakat yang tinggi merupakan tantangan yang besar dalam rangka mencapai

kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur Modern menekankan bahwa fungsi dari berdirinya suatu pemerintahan daerah harus mampu untuk menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus bersikap dinamis dengan membaca serta memenuhi sarana dan prasarana publik yang dapat meningkatkan daya saing daerah baik dari sisi sumber daya manusia, sosial, maupun ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang berteknologi serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat maka akan dapat mengakselerasi pembangunan, mendukung aksesibilitas wilayah, mobilitas orang dan barang. Disisi lain infrastruktur yang modern juga perlu memperhatikan kearifan lokal dengan menghargai dan mempertahankan budaya, tradisi, nilai-nilai dan identitas daerah.

Masyarakat Sejahtera : Kata kunci ini merupakan tujuan tertinggi dari visi yang tertuang dimana Kemajuan daerah dengan mendorong kreativitas dan inovasi serta mempertahankan nilai budaya dan kelestarian lingkungan dilaksanakan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pembangunan dilaksanakan atas dasar kepentingan publik melalui kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan budaya dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan seperti halnya kemiskinan dan ketimpangan serta pemenuhan hak dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2 Misi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029

Cita-cita pembangunan daerah yang telah tertuang di dalam Visi Pembangunan tidak akan dapat tercapai tanpa adanya rangkaian upaya yang terstruktur. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya tersebut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut merupakan Misi yang tersusun atas Visi Kabupaten Belitung "Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera":

Misi RPJMD

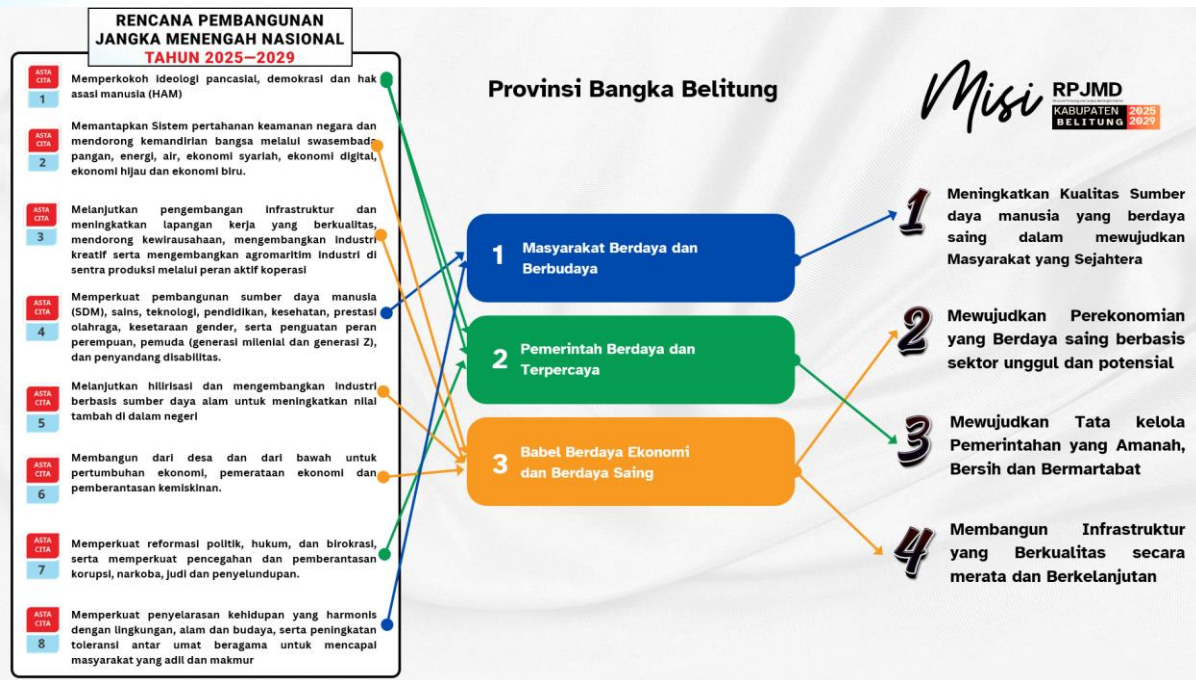
KABUPATEN BELITUNG 2025 2029

- 1** Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
- 2** Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial
- 3** Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat
- 4** Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan

Gambar 3. 2 Misi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029

Sumber : Data diolah

Misi pembangunan Kabupaten Belitung di tahun 2025-2029 ada 4 (empat) poin dimana empat poin ini merupakan bentuk penajaman atas Misi politik kepala daerah dan wakilnya. Bentuk misi yang telah dipertajam memiliki substansi dan kata kunci yang diperoleh atas rumusan misi politik kepala daerah serta mempertimbangkan kondisi dan isu daerah. Hasil penajaman misi tersebut telah disetujui oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk selanjutnya menjadi Misi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Dengan adanya hasil penajaman misi tersebut maka perlu adanya konstruksi untuk melinearisasi misi RPJMD Kabupaten Belitung dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN tahun 2025-2029. Berikut adalah linearisasi misi pembangunan Kabupaten Belitung:



Gambar 3. 3 Linearisasi Misi RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029 terhadap RPJMD Provinsi dan RPJMN

Sumber : Data diolah

Gambar diatas menunjukkan bahwa konstruksi misi dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 telah memperhatikan keterhubungannya terhadap misi RPJMD Provinsi dan misi RPJMN. Meskipun jumlah misi yang tertuang berbeda akan tetapi secara substansi yang tertuang sudah diturunkan kedalam Misi RPJMD Kabupaten Belitung. Adapun penekanan baik dari Nasional, Provinsi dan Daerah memiliki perbedaan baik dari cakupan wilayah pemerintahan maupun dari sisi kewenangan. Pemerintah pusat memiliki cakupan yang luas sehingga isu dan permasalahan yang perlu dituntaskan sangat beragam pada masing-masing wilayah di dalamnya, begitu juga Belitung yang perlu menekankan penuntasan berbagai isu dan permasalahan yang tersebar di Kabupaten/Kota yang berada pada wilayahnya. Sedangkan Kabupaten Belitung memiliki isu dan permasalahan yang lebih spesifik sehingga misi yang tersusun akan lebih fokus terhadap permasalahan daerah. Dari sisi kewenangan baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota telah memiliki batasan yang tertuang di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Berikut merupakan penjabaran atas hubungan masing-masing poin misi yang tersusun dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029:

Misi 1 – Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam misi ini menekankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat sejahtera. Sehingga memiliki hubungan terhadap Misi 1 –

Masyarakat Berdaya dan Berbudaya pada RPJMD Provinsi Bangka Belitung.

Poin ini dilebur atas dasar bahwa berdasarkan isu dan permasalahan di Kabupaten Belitung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten berkaitan erat dengan upaya peningkatan SDM

dimana kualitas pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan terlebih pada kemudahan akses dan pelayanan yang inklusif, dari sisi lain masih adanya kemiskinan di Kabupaten Belitung dilatar belakangi oleh kualitas SDM serta aksesnya terhadap aspek ketenagakerjaan. Oleh karena itu aspek ketenagakerjaan akan diperkuat pada misi ini dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM sehingga usia kerja di Kabupaten Belitung dapat memiliki daya saing yang tinggi. Dampaknya maka masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung terhadap program bantuan.

Meskipun penekanan yang diberikan berorientasi terhadap upaya peningkatan layanan dasar pendidikan dan Kesehatan sehingga SDM kedepan berdaya saing dan mandiri akan tetapi program pemberian bantuan akan tetap menjadi prioritas, utamanya program bantuan bersyarat serta program bantuan yang bersifat pemberdayaan. Sedangkan untuk program perlindungan akan lebih ditekankan pada kelompok PPKS yang tidak dapat produktif seperti lansia dan beberapa jenis disabilitas.

Misi 2 – Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial. Berfokus terhadap upaya-upaya peningkatan faktor-faktor perekonomian dimulai dari Peningkatan daya tarik investasi, peningkatan diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan sektor unggul dan potensial, peningkatan potensi dan daya saing pariwisata. Misi ini linier terhadap misi 3 Bangka Belitung Berdaya Ekonomi dan

Berdaya Saing pada Misi RPJMD Provinsi Bangka Belitung.

Berkaitan dengan linearitas misi ini terhadap misi ke 3 provinsi jika dilihat dari sisi *regional share* terdapat beberapa sektor ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan sektor perekonomian ke provinsi diantaranya adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul dengan sektor konstruksi, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan skala yang cukup besar yakni berada di skala 100-270 an, artinya sektor ini memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan untuk analisis LQ terdapat 11 dari 17 sektor yang memiliki produktivitas melebihi kebutuhan daerah dan berpotensi untuk ekspor daerah lainnya.

Misi 3 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan bermartabat. Misi ini menekankan pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik sebagai penggerak dalam memastikan perencanaan daerah berjalan sebagaimana mestinya serta meningkatkan pelayanan publik yang prima. Misi ini berkaitan dengan Misi 2 dalam RPJMD Provinsi Bangka Belitung, yakni Pemerintah Berdaya dan Terpercaya.

Harmonisasi antara pemerintah Nasional, Provinsi dan Daerah menjadi modal yang sangat penting mengingat bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan yang beririsan yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah Kabupaten

Belitung sebagai penyelenggara pemerintahan kabupaten memiliki batasan wewenang dalam menghadapi permasalahan daerah sehingga membutuhkan fungsi koordinasi dan harmonisasi yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitung. Secara horizontal koordinasi juga perlu diperkuat terhadap daerah sekitar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sinergis utamanya pada wilayah perbatasan. Seringkali akses pendidikan dan kesehatan pada wilayah ini memberikan dukungan terhadap kemudahan akses masyarakat.

Isu Kabupaten Belitung berkaitan dengan misi ini meliputi peningkatan pendapatan daerah, Manajemen Aparatur menuju ASN yang Profesional serta Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik yang belum optimal. Periode awal pemerintahan Presiden Prabowo menekankan adanya upaya efisiensi anggaran semaksimal mungkin sehingga hal ini berpengaruh terhadap penurunan besaran dana transfer pemerintahan pusat maupun provinsi. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pemerintahan untuk lebih meningkatkan upaya kemandirian daerah. Selain itu dalam memberikan pelayanan publik yang prima maka terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian yakni berkaitan dengan Kapasitas SDM yang profesional dan Pemerintahan berbasis elektronik. Pendekatan ini didasarkan pada perdebatan teori terkait administrasi publik yakni penekanan terhadap perbaikan sistem atau sumberdaya manusia. Selaras dengan isu yang ada maka keduanya menjadi fokus dalam misi

ini. Memperbaiki kualitas SDM dan menyediakan sistem yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi berbasis elektronik.

Misi 4 – Membangun Infrastruktur yang berkualitas secara merata dan Berkelanjutan.

Misi ini menekankan pada 3 (tiga) hal yakni, Pembangunan infrastruktur, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan bencana. Sehingga misi ini memiliki linearitas terhadap misi RPJMD Provinsi Bangka Belitung pada seluruh misi.

Pembangunan infrastruktur pada Misi RPJMD Provinsi Bangka Belitung melekat pada misi 3, sedangkan pada RPJMD Kabupaten Belitung berdiri sendiri pada misi ke 4. Hal ini ditujukan pada fokus pemerataan pembangunan dikarenakan masih menjadi isu yang cukup strategis dalam pembangunan daerah. Adapun infrastruktur yang ditekankan pada Misi ini lebih kepada infrastruktur dasar meliputi infrastruktur Kebinamargaan, Infrastruktur Keciaptakaryaan, Infrastruktur Sumber Daya Air, Infrastruktur Perhubungan, Infrastruktur Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kebencanaan. Sedangkan infrastruktur Sosial dan Ekonomi tetap melekat pada masing-masing misi.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belitung menekankan pada upaya pemerataan pembangunan, bentuk infrastruktur yang paling mendasar adalah infrastruktur kebinamargaan dimana dengan peningkatan kualitas dan akses jalan dan jembatan dalam rangka mencapai daerah-daerah ekonomi potensial perlu

dioptimalkan. Aksesibilitas pergeseran orang dan barang yang optimal akan berdampak terhadap tumbuhnya perekonomian wilayah tersebut serta memastikan masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan dasar pendidikan dan kesehatan, selain itu aktivitas perekonomian juga dapat meningkat dengan menurunnya biaya distribusi perdagangan hasil pertanian dan perikanan. Mempermudah akses bagi tenaga kerja yang berada pada wilayah terpencil menuju wilayah ekonomi produktif.

Aspek lingkungan hidup menjadi fokus yang kedua untuk dapat ditingkatkan seiring dengan pesatnya pembangunan wilayah. Menjamin bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat bertahan dan ditingkatkan sehingga dapat mendukung aktivitas kehidupan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang. Upaya yang dilakukan adalah melalui pengendalian terhadap kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan, mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati sebagai utamanya pada hewan dan tumbuhan endemik yang menjadi ciri khas ekologi di Kabupaten Belitung. Meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan melalui pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse and recycle*) selain itu terdapat fokus terhadap ketahanan bencana sehingga resiko bencana mengalami penurunan diiringi dengan ketahanan daerah yang meningkat agar resiliensi atas terjadinya bencana dapat dilakukan secara cepat .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan yang bersifat turunan serta didasarkan atas janji politis kepala daerah terpilih sehingga perlu dijelaskan bagaimana konstruksi penajaman yang telah disepakati. Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses tersebut sehingga misi Pembangunan daerah dapat memberikan langkah teknokratis untuk dapat mengimplementasikan janji politik kepala daerah sebagai perwujudan atas harapan masyarakat.

3.1.2.1 Misi 1 - Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi pertama pembangunan Kabupaten Belitung untuk 5 (lima) tahun kedepan berfokus pada aspek kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan tersebut dirumuskan berdasarkan kondisi empiris yang menunjukkan masih adanya permasalahan kualitas SDM di Kabupaten Belitung dengan isu strategis di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah. Isu strategis di bidang pendidikan berkaitan dengan kualitas pendidikan yang masih relatif rendah, masih kurangnya kemampuan literasi dan numerasi masyarakat, termasuk didalamnya adalah literasi digital masyarakat. Isu di bidang kesehatan berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang umur harapan hidup dan prevalensi stunting.

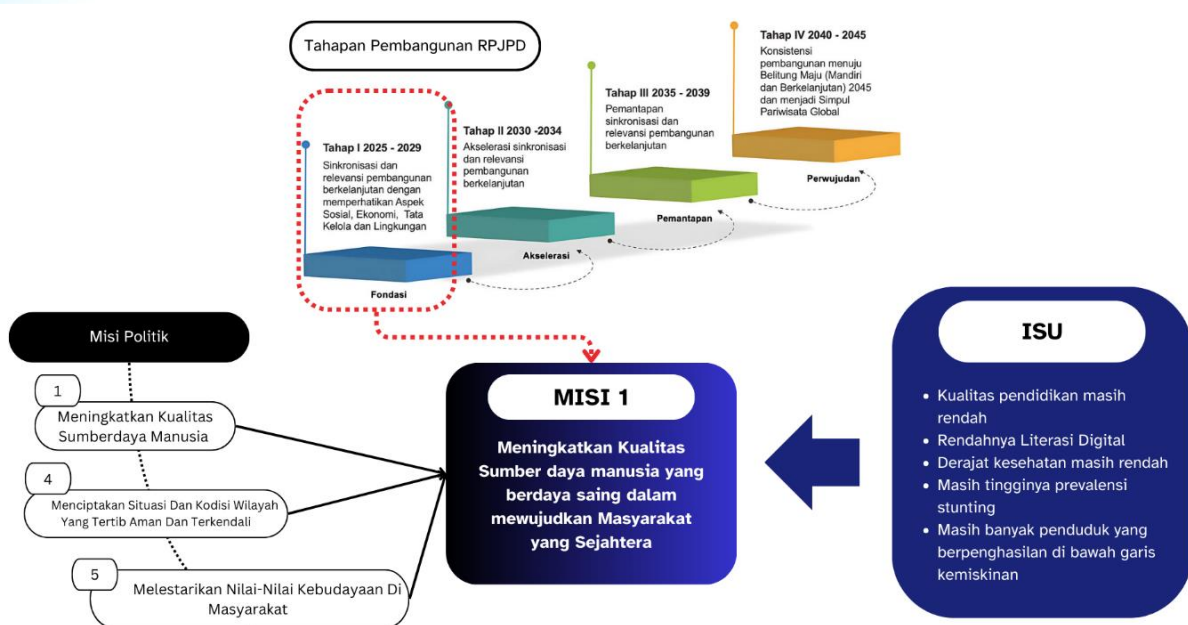
Selain berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, perumusan misi juga harus memperhatikan aspek mandatoris dari pembangunan jangka panjang daerah serta *platform* politik kepala daerah terpilih. Dari perspektif mandatoris, pada tahapan pembangunan RPJPD tahun 2025-2029 terdapat fokus pembangunan untuk menyelenggarakan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial. Sedangkan dari perspektif *platform* politik yang disampaikan oleh Kepala daerah terpilih kepada KPU, terdapat beberapa misi yang relevan. Misi yang relevan dengan isu strategis dan mandat pembangunan jangka panjang di bidang sosial adalah misi:

Misi 1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Misi 4: Menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang aman dan terkendali

Misi 5: Melestarikan nilai-nilai kebudayaan di Masyarakat.

Mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan yang pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".



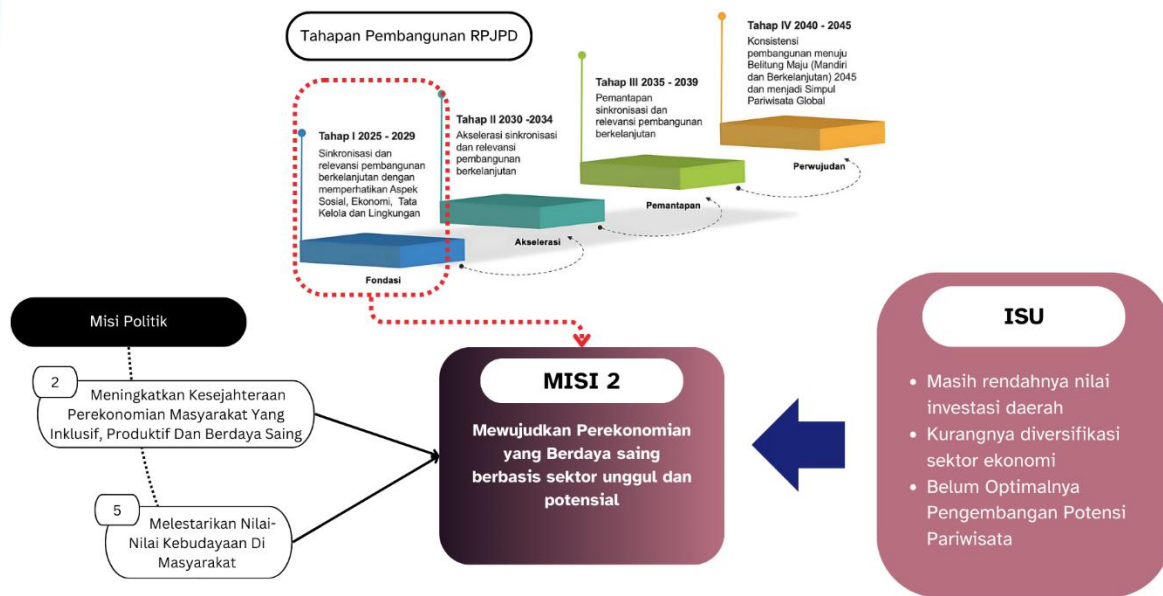
Gambar 3. 4 Konstruksi Misi 1

Sumber : Data diolah

Misi pertama RPJMD Kabupaten Belitung menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Implementasi misi pertama diharapkan dapat membawa masyarakat mendapat kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan fondasi sosial ekonomi yang baik.

3.1.2.2 Misi 2 - Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial

Misi kedua mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial merupakan cita-cita yang diusung dari beberapa isu yakni masih rendahnya nilai investasi daerah, kurangnya diversifikasi sektor ekonomi dan belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata. Selain itu dengan mengkolaborasikan misi politik kepala daerah terpilih didalamnya yang berbunyi Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat yang inklusif, produktif dan berdaya saing serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan di Masyarakat maka tersusunlah misi RPJMD yang mempertimbangkan isu dan misi politik yakni **Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing berbasis Sektor Unggul dan Potensial**. Berikut dibawah ini merupakan gambaran tahapan dalam penyusunan misi RPJMD.

**Gambar 3. 5 Konstruksi Misi 2***Sumber : Data diolah*

Berdasarkan dengan gambaran tahapan diatas, misi 2 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang terintegrasi dengan Misi Politik, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang inklusif, produktif, dan berdaya saing, serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan di masyarakat. Pada misi kedua memiliki orientasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang dimiliki. Dalam implementasinya, misi ini menitikberatkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mendorong daya saing daerah di tingkat nasional dan global. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat isu strategis yang menjadi tantangan utama yakni:

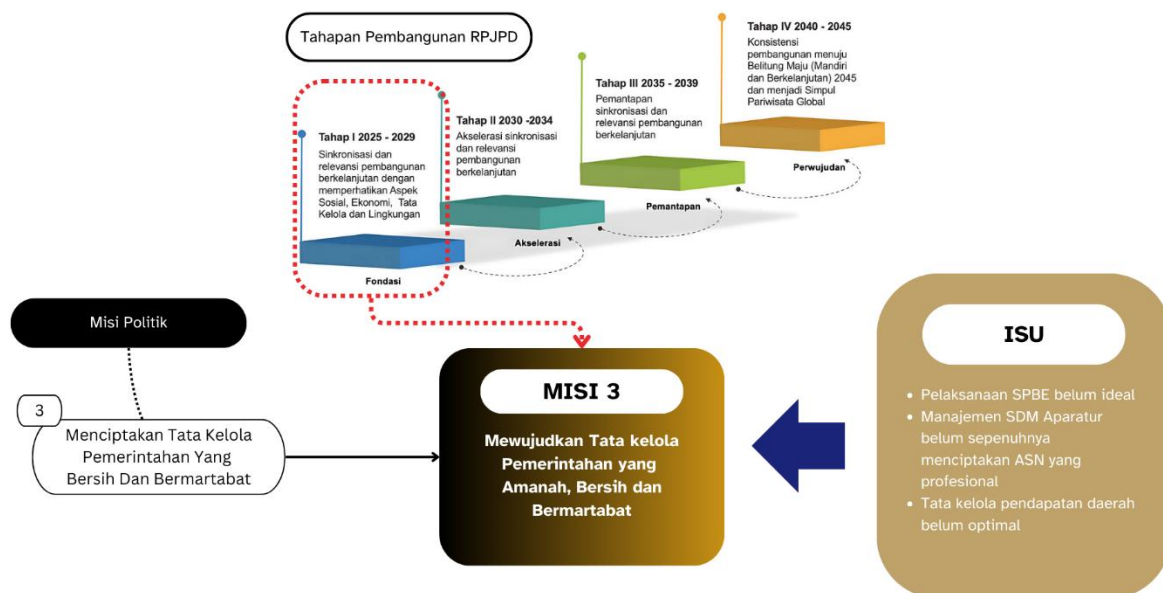
1. **Masih rendahnya nilai investasi daerah**, yang menunjukkan bahwa daya tarik daerah bagi investor perlu ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur, kemudahan berusaha, maupun kepastian regulasi.
2. **Kurangnya diversifikasi sektor ekonomi**, yang membuat perekonomian daerah masih bergantung pada sektor-sektor tertentu dan rentan terhadap fluktuasi.
3. **Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata**, melihat potensi Kabupaten Belitung yang kaya akan wisata alamnya akan tetapi belum dapat memaksimalkan potensinya sehingga keunggulan dan peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah masih belum maksimal.

Misi kedua juga beriringan dengan tahapan RPJPD, di mana pada fase awal (2025-2029) dilakukan fondasi berupa sinkronisasi dan relevansi pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan. Misi ini kemudian diakselerasi di fase 2030-2034, diperkokoh pada 2035-2039, dan diwujudkan secara penuh pada tahap akhir 2040-2045 untuk mendorong daerah menjadi mandiri, berkelanjutan, dan berperan sebagai simpul pariwisata global.

Misi ini juga menjadi langkah nyata untuk merespons isu-isu strategis yang masih dihadapi daerah, seperti rendahnya nilai investasi, minimnya diversifikasi ekonomi, dan belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata.

3.1.2.3 Misi 3 - Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat

Pada aspek tata kelola pemerintahan, berdasarkan penjabaran dari dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 diketahui terdapat beberapa isu strategis. Pertama yaitu pelaksanaan SPBE yang belum optimal, kedua yaitu manajemen SDM aparatur belum sepenuhnya menciptakan ASN yang profesional, dan ketiga yaitu tata kelola pendapatan daerah belum optimal. Berangkat dari isu strategis tersebut, maka misi politik dari Kepala Daerah terpilih berupaya untuk menjawab isu strategis tersebut, yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat. Agar misi politik tersebut dapat diterjemahkan ke dalam arsitektur kinerja, maka misi politik tersebut ditransformasikan ke dalam misi pembangunan, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, dan Bermartabat".



Gambar 3. 6 Konstruksi Misi 3

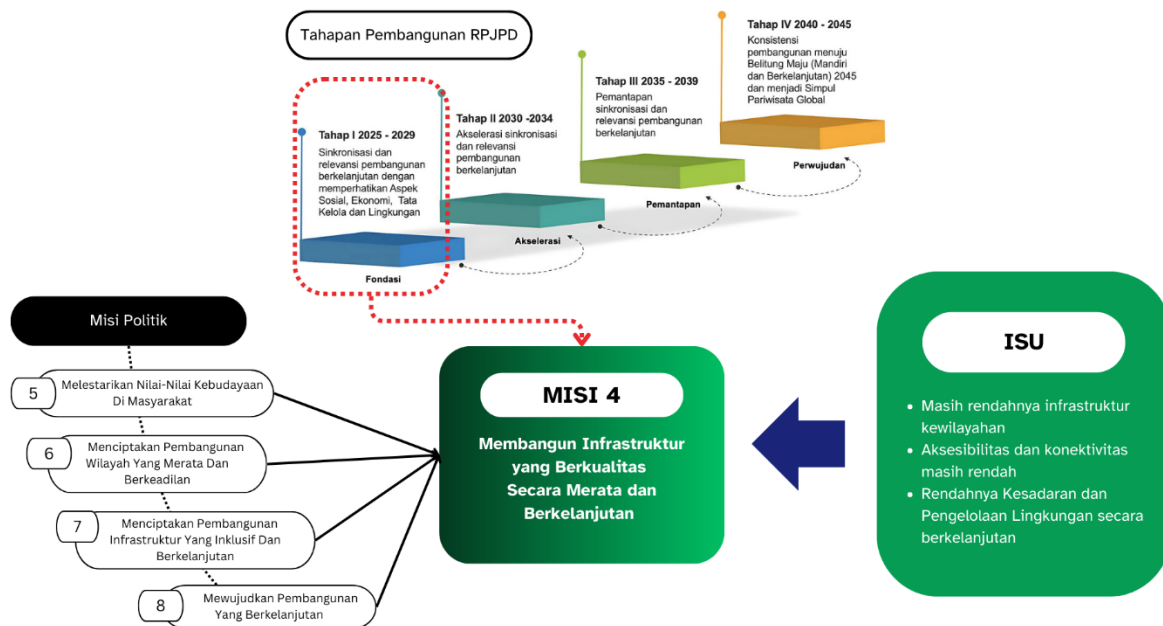
Sumber : Data diolah

Penyusunan misi pembangunan tersebut tentunya telah memperhatikan tahapan pembangunan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045. Tahapan pembangunan pada RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 tahap pertama yaitu "sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan". Pada tahapan pembangunan pertama

RPJPD disampaikan bahwa salah satu fokus pembangunan adalah sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan di bidang tata kelola. Sinkronisasi dan relevansi pembangunan di bidang tata kelola menunjukkan bahwa pembangunan tata kelola pada tahapan pembangunan pertama ini dapat selaras dan sinkron satu sama lain, sehingga *outcome* pada akhir periode pembangunan tahap pertama ini menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang kuat untuk menyongsong pembangunan jangka panjang periode kedua.

3.1.2.4 Misi 4 - Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan

Misi keempat Membangun Infrastruktur yang berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan merupakan hasil penajaman atas Misi Politik, Isu Serta Arah Pentahapan Pembangunan yang tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Belitung. Misi membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan berfokus terhadap Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup. Berikut kerangka penajaman Misi keempat Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan berkelanjutan:



Gambar 3. 7 Konstruksi Misi 4

Sumber : Data diolah

Pentahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 di Tahap I tahun 2025-2029 diarahkan pada Sinkronisasi dan Relevansi Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Sosial, Ekonomi, Tata Kelola dan Lingkungan. Penekanan pada "Pembangunan Berkelanjutan" dan "Lingkungan" menjadi kata kunci yang perlu diperhatikan, Pembangunan Daerah sangat bergantung pada ketersediaan Infrastruktur dasar dalam memberikan

pelayanan publik. Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memperhatikan aspek lingkungan. Fokus pada arah pentahapan tersebut didukung oleh beberapa isu yakni Masih Rendahnya Infrastruktur Kewilayahan, Aksesibilitas dan Konektivitas yang masih rendah serta rendahnya kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Berikut penjabaran atas isu berkaitan dengan Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan;

1. **Masih Rendahnya Infrastruktur Kewilayahan.** Pemenuhan infrastruktur menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan menjadi titik penting dalam rangka menyediakan berbagai pelayanan dasar sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan hidup baik seperti halnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya
2. **Aksesibilitas dan Konektivitas masih rendah.** Kemudahan pergerakan atau mobilitas orang dan barang masih belum dapat berjalan optimal sehingga peningkatan akses dan konektivitas perlu dilakukan seperti halnya pembangunan jalan dan jembatan serta perlengkapan jalan, drainase juga menjadi titik tekan dalam hal ini karena dengan kondisi drainase yang baik maka akan mendukung daya tahan kualitas jalan. Masih adanya genangan air akan berpotensi terhadap jalan yang cepat rusak serta menghambat laju kendaraan.
3. **Rendahnya Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan secara berkelanjutan.** Penekanan terhadap isu ini berkaitan dengan pemanfaatan dan pendayagunaan daya tampung serta daya dukung lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat cepat terjadi akan tetapi upaya untuk meningkatkannya memerlukan tahap dan waktu yang cukup lama sehingga upaya yang paling mendasar adalah bagaimana kesadaran masyarakat, pelaku usaha bagaimana Daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dimanfaatkan secara optimal akan tetapi dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkannya.

Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat Kebijakan serta program politik kepala daerah terpilih, maka Penajaman Misi dilakukan atas penjabaran Visi dan Misi Kepala daerah terpilih. Terdapat 4 Misi kepala daerah terpilih yang dipertajam kedalam Misi 4 yakni Melestarikan Nilai-nilai kebudayaan di Masyarakat (penekanan terhadap kesadaran menjaga lingkungan), menciptakan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, Menciptakan Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkeadilan serta Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

3.1.3.1 Tujuan 1

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan pembangunan yang pertama adalah meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari misi pembangunan yang pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia

yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimaksud dilihat dari perspektif pembangunan manusia dari segi pemenuhan pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitasnya di masa mendatang. Sehingga diharapkan setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung dapat mencapai puncak produktivitasnya di masa mendatang. Dengan gambaran kondisi yang diharapkan tersebut maka ditetapkan dua indikator kinerja yang representatif yaitu Indeks Modal Manusia dan Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, perlu kiranya dilaksanakan penguraian menjadi kondisi yang lebih operasional yang dalam hal ini diuraikan kedalam 4 (empat) sasaran pembangunan meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran pembangunan yang pertama untuk mendukung tujuan pembangunan Kualitas dan daya saing SDM adalah peningkatan pada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dimaksud adalah kualitas dari aspek tata kelola pelayanan pendidikan termasuk didalamnya adalah manajemen secara makro dan mikro pelayanan pendidikan dan dari aspek lingkungan untuk memungkinkan siswa tetap mau dan mampu untuk mengakses layanan pendidikan. Manajemen secara makro lebih menitik beratkan pada pengelolaan secara umum seperti kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam kewenangan kabupaten, pemenuhan kebutuhan unit sekolah dan distribusi tenaga pengajar berkualitas sehingga pemerataan infrastruktur pendidikan dapat segera tercapai. Sedangkan pengelolaan secara mikro lebih mengarah pada tata kelola setiap unit sekolah dalam menyampaikan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pada aspek lingkungan diharapkan mampu membentuk lingkungan yang mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengakses pendidikan formal. Dengan kondisi demikian, maka indikator yang representatif sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Sasaran yang kedua melihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Faktor kesehatan menjadi salah satu kunci utama yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sosial ekonominya. Dengan tingkat kesehatan yang baik, produktivitas masyarakat dapat optimal sehingga masyarakat dapat memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan kapasitasnya. Dalam lima tahun kedepan, diharapkan risiko terhadap gangguan kesehatan masyarakat dapat ditekan, dan risiko kematian yang disebabkan karena kemampuan penanganan medis dapat diminimalisir. Dengan demikian maka umur harapan hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Merujuk pada kondisi yang diharapkan tersebut, maka indikator kinerja yang relevan untuk menggambarkan ketercapaian sasaran ini adalah Usia Harapan Hidup.

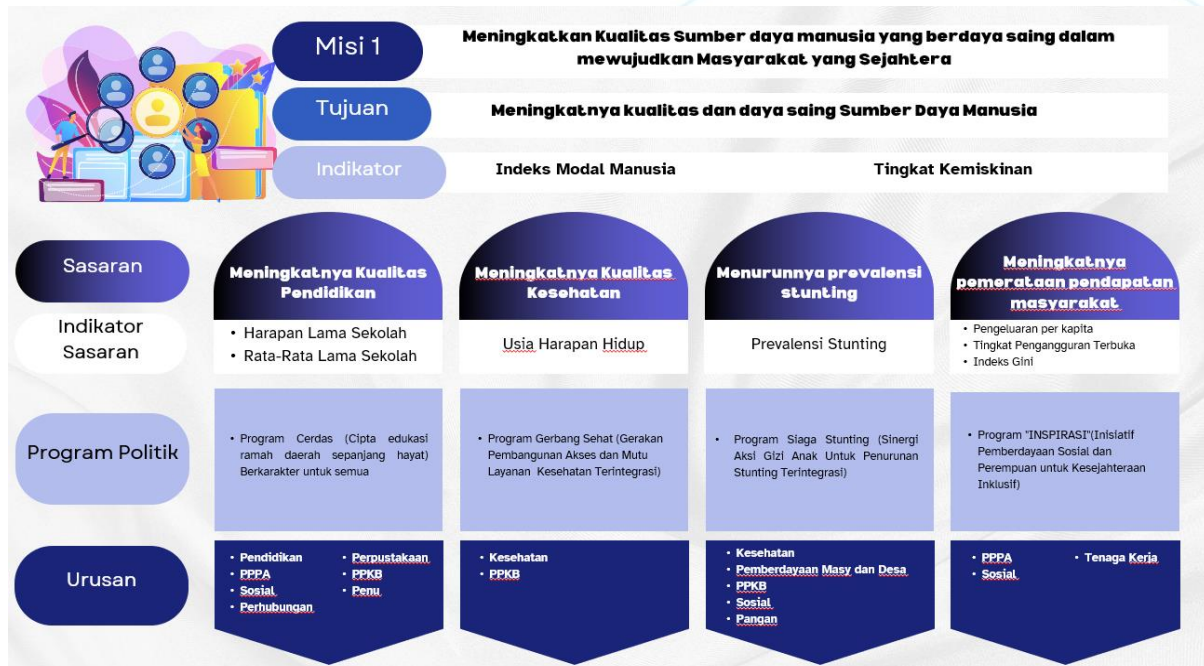
3. Menurunnya prevalensi stunting

Sasaran yang ketiga melihat dari perspektif yang hampir sama dengan sasaran pembangunan sebelumnya yakni dari perspektif kesehatan, namun dengan fokus yang lebih spesifik yaitu pada tumbuh

kembang anak. Fokus terhadap tumbuh kembang anak menjadi prioritas mengingat masih adanya isu strategis daerah. Tumbuh kembang anak menjadi prioritas kedepan karena merupakan investasi yang sangat penting di bidang Sumber daya manusia sebagai generasi penerus pembangunan di Kabupaten Belitung. Di sisi lain, isu stunting juga merupakan salah satu fokus pemerintah pusat dalam lima tahun kedepan. Dengan komitmen pemerintah untuk mengentaskan stunting di Kabupaten Belitung, diharapkan tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses berbagai peluang pembangunan. Dengan kondisi tersebut, maka indikator yang relevan untuk sasaran pembangunan ini adalah prevalensi stunting.

4. Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat

Sasaran yang keempat melihat dari sudut pandang ekonomi masyarakat, khususnya dari sisi pengeluaran dan kemampuan masyarakat untuk mengakses lapangan pekerjaan yang layak. Sasaran keempat juga sebagai bentuk konfirmasi atas ketiga sasaran sebelumnya, dimana pembangunan manusia yang baik harus mampu diaktualisasikan kedalam bentuk yang lebih konkret dalam hal ini adalah partisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang ditunjukkan dengan keterserapan sumber daya manusia pada lapangan pekerjaan yang layak. Dengan diperolehnya lapangan pekerjaan yang layak, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat yang merupakan representasi dari daya saing masyarakat secara ekonomi. Dengan demikian, maka indikator yang relevan untuk merepresentasikan terwujudnya sasaran ini adalah Pengeluaran per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini.



Gambar 3. 8 Cascading Misi 1 – Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Sumber : Data diolah

Pada misi ke-1 terdapat beberapa program politik yang merepresentasikan terhadap program prioritas dengan rincian sebagai berikut

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - Program Pendidikan dan Kesehatan
 - Program Program Pendidikan Untuk Anak Putus Sekolah
 - Program Penguatan Karakter dan Pendidikan Moral
 - Program Pendidikan Sepanjang Hayat
 - Program Beasiswa
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Menurunnya Prevalensi Stunting
 - Program Keluarga Harapan
4. Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat
 - Program Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan
 - Program Pemberdayaan Perempuan

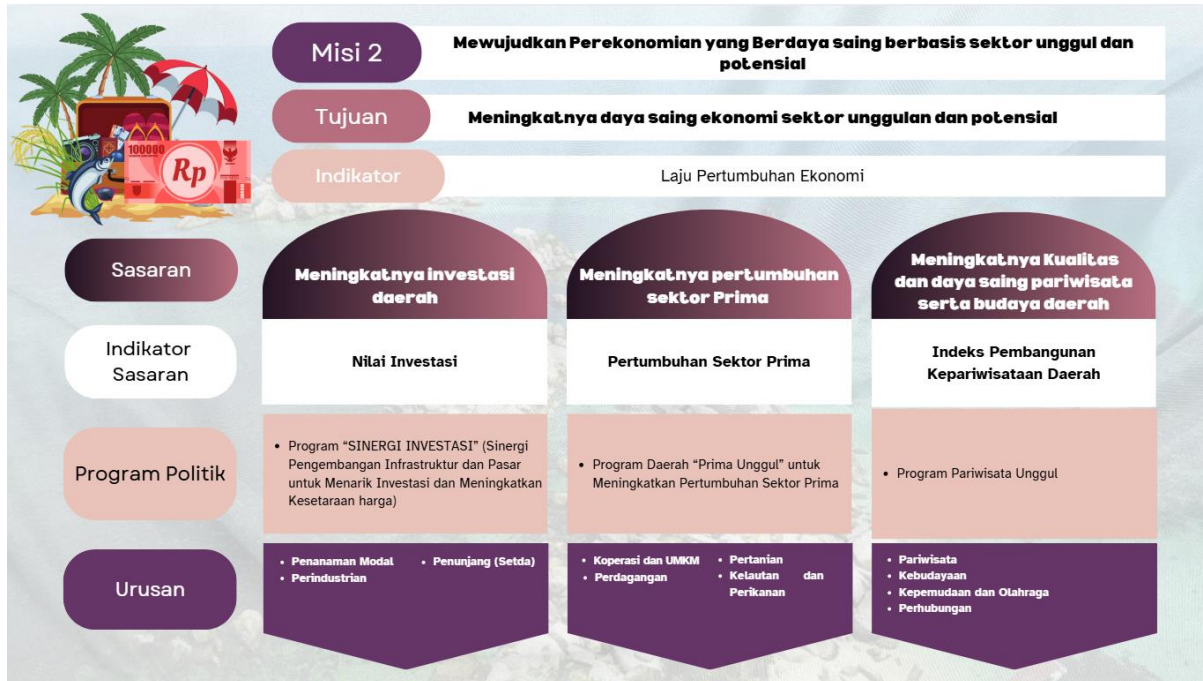
Urusan kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan pelaksanaan program prioritas tersebut adalah Pendidikan, Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Perhubungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penunjang (Sekretariat Daerah), Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pangan, dan Tenaga Kerja.

3.1.3.2 Tujuan 2

Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial

Misi kedua Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal. Melihat kondisi Kabupaten Belitung yang memiliki potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai wilayah yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan pertambangan, Kabupaten Belitung memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing ekonominya di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Perlunya komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang menjadi pilar utama perekonomian daerah. Penguatan sektor pariwisata, misalnya, menjadi fokus utama mengingat Belitung telah dikenal sebagai destinasi wisata bahari yang menarik dengan keindahan pantai, pulau-pulau kecil, dan keunikan budaya lokal. Pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi penggerak utama ekonomi, tetapi juga mendorong sektor lain seperti ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa untuk tumbuh secara sinergis. Misi ini juga diarahkan untuk memperkuat investasi daerah dengan membuka ruang yang lebih luas bagi masuknya investor di sektor-sektor strategis. Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemberian insentif bagi investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Atas dasar

tersebut maka pada Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial ditetapkan Tujuan **"Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial"** Berikut merupakan gambaran cascading pada Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing berbasis Sektor Unggul dan Potensial:



Gambar 3. 9 Cascading Misi 2 – Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial

Sumber : Data diolah

Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggulan dan potensial tersusun atas 2 kata kunci yakni unggul dan potensial. Sektor **"unggul"** menekankan bahwa perekonomian di Kabupaten Belitung harus memiliki daya saing yang tinggi dengan berbasis pada sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sedangkan sektor **"Potensial"** merupakan sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki potensi sumber daya, peluang pasar, atau dukungan strategis yang kuat, namun masih memerlukan intervensi seperti investasi, penguatan kapasitas, inovasi teknologi, atau perbaikan infrastruktur agar dapat menjadi sektor unggulan. Dari kedua kata kunci di atas maka disusunlah tiga sasaran yakni meningkatnya investasi daerah, meningkatnya pertumbuhan sektor prima dan meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah.

Pada sasaran pertama yakni **meningkatnya investasi daerah** berfokus pada nilai investasi yang masuk ke dalam daerah. Hal ini dapat memberikan banyak peluang dalam sektor ekonomi yakni meningkatkan potensi perkembangan ke dalam sektor industri, menciptakan lapangan pekerjaan baru karena perkembangan bisnis sehingga dapat membantu masyarakat dalam menciptakan peluang lapangan kerja yang tinggi. Untuk mengukur sasaran tersebut maka dibutuhkan indikator yang dapat melihat peningkatan investasi

yang masuk di Kabupaten Belitung, oleh karena itu indikator yang digunakan adalah nilai investasi. Indikator nilai investasi sendiri merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan besaran total dana yang ditanamkan oleh pelaku usaha, baik domestik maupun asing, dalam suatu wilayah atau sektor ekonomi tertentu dalam periode waktu tertentu. Penggunaan indikator ini dirasa penting karena nilai investasi sering dijadikan tolok ukur untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu indikator ini dinilai dapat mengukur seberapa meningkatnya investasi yang masuk di Kabupaten Belitung.

Pada sasaran kedua yakni **meningkatnya pertumbuhan sektor prima**, sasaran ini berfokus pada pertumbuhan-pertumbuhan sektor lapangan usaha yang dinilai prima baik yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi maupun sektor yang dinilai potensial yang memiliki pertumbuhan rendah tetapi kontribusi tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut maka Pemerintah Kabupaten Belitung perlu melakukan usaha lebih yang berfokus pada pertumbuhan sektor yang masuk dalam kategori sektor prima. Untuk mengukur hal tersebut maka digunakan indikator pertumbuhan sektor prima sebagai parameter dalam menilai perkembangan sektor-sektor utama dalam perekonomian. Indikator yang dapat melihat pertumbuhan sektor prima terbagi dalam beberapa indikator yakni:

1. Laju pertumbuhan produksi, indikator ini mengukur peningkatan jumlah produksi dari sektor-sektor prima yang memiliki produk bukan sektor jasa.
2. Kontribusi sektor terhadap PDRB, melihat seberapa besar peran sektor prima dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Belitung.
3. Nilai Tambah Sektor Prima, menghitung selisih antara nilai output (hasil produksi) dengan biaya input (bahan baku dan biaya produksi lainnya). Nilai tambah yang tinggi menandakan sektor tersebut efisien dan produktif.
4. Laju Penyerapan Tenaga Kerja, melihat sejauh mana sektor prima mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

Pada sasaran ketiga yakni **meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah**, berfokus pada pariwisata dan budaya daerah. Kabupaten Belitung merupakan daerah yang memiliki nilai wisata tinggi yang didalamnya terdapat unsur budaya serta sejarah. Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang menjadi pusat wisata seperti Bali, Sumbawa maupun Raja Ampat wisata di Kabupaten Belitung masih dapat bersaing dengan potensi sumber daya alam serta kawasan ekologis yang unik mengingat bahwa terdapat 3 (tiga) Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Belitung yang berkaitan erat pada sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan dari sisi potensi Kabupaten Belitung memiliki potensi yang cukup tinggi apabila ingin dijadikan sebagai daerah destinasi wisata. Untuk mewujudkan hal itu maka kualitas pariwisata yang ada perlu untuk dikembangkan bahkan ditingkatkan sehingga potensi yang ada tidak terbuang sia-sia. Untuk mengukur hal tersebut maka indikator yang memadai dan bisa mengukur Tingkat kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya yakni indeks pembangunan kepariwisataan kabupaten kota. Indeks tersebut digunakan untuk

menilai tingkat kemajuan, kesiapan, dan keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu wilayah mampu mengembangkan potensi pariwisatanya secara optimal, baik dari aspek infrastruktur, daya tarik, pelayanan, maupun dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.

Pada misi ke-2 terdapat beberapa program politik yang merepresentasikan terhadap program prioritas dengan rincian sebagai berikut

1. Meningkatnya Investasi Daerah
 - Program Pengembangan Infrastruktur dan Akses Pasar
 - Program Pengembangan Wilayah Tertentu
 - Program Kesenjangan Harga
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima
 - Program Inkubasi Startup
 - Program Kredit Mikro
 - Program Diversifikasi Tanaman Perkebunan
 - Program Pengolahan dan Diversifikasi Produk Perikanan
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - Program Pertanian berkelanjutan
 - Pembangunan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan
3. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata Serta Budaya Daerah
 - Program Pusat Pengembangan Produk Lokal
 - Program Harmonisasi Sosial
 - Program Festival dan Pameran Budaya Lokal
 - Program Pembangunan Sosial dan Budaya yang Inklusif
 - Program Pengembangan Desa Wisata
 - Program Pariwisata Berkelanjutan

Urusan kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan pelaksanaan program prioritas tersebut adalah Penanaman Modal, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, kebudayaan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pertanahan serta urusan penunjang.

3.1.3.3 Tujuan 3

*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang BERAHLAK
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif dan Kolaboratif)*

Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, dan Bermartabat. Untuk mencapai misi tersebut, maka disusunlah tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Tujuan ini mengandung makna yang holistik dari wujud tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah. Peningkatan tata

kelola pemerintahan yang BERAKHLAK di Kabupaten Belitung merupakan fondasi utama Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan merupakan bentuk dari Pemerintah Kabupaten Belitung yang berorientasi pada pelayanan publik yang diselenggarakan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diselenggarakan mencakup berbagai aspek dan tentunya berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel merujuk pada pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah daerah dilakukan dengan pengawasan yang tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan keuangan daerah dan sumber daya yang lain. Tata kelola pemerintahan yang kompeten merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan keterampilan, pengetahuan, serta keahlian yang tepat untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pemerintah daerah yang kompeten adalah pemerintah daerah yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta program dengan efektif, efisien, dan profesional, dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Tata kelola pemerintahan yang harmonis menunjukkan hubungan yang baik dan saling mendukung antara berbagai elemen pemerintahan, seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah yang harmonis menciptakan suasana yang kondusif untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah secara bersama-sama, serta menjaga stabilitas sosial dan politik. Hal ini juga mencakup menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan organisasi masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang loyal mengarah pada integritas penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah yang loyal bekerja dengan penuh dedikasi untuk kepentingan umum, mematuhi hukum dan peraturan yang ada, serta menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat. Loyalitas ini juga tercermin dalam komitmen untuk menjalankan program-program pemerintahan dengan jujur dan transparan, serta tidak berpihak kepada kepentingan tertentu. Tata kelola pemerintahan yang adaptif berarti kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan baru, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang adaptif mampu merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi dengan cara yang inovatif. Mereka tidak terpaku pada metode lama, tetapi siap untuk mengubah kebijakan atau pendekatan yang lebih relevan dan efektif sesuai dengan kondisi yang ada. Adaptasi juga mencakup kesiapan untuk menghadapi krisis atau situasi darurat dengan langkah yang cepat dan tepat.

Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif mengacu pada prinsip kerja sama antara berbagai pihak, baik di dalam pemerintah maupun dengan masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah yang kolaboratif memahami bahwa penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui sinergi

antara berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mempercepat pencapaian tujuan bersama.



Gambar 3. 10 Cascading Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat

Sumber : Data diolah

Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah tiga sasaran pembangunan yang menjadi dasar pencapaian tujuan pembangunan. Tiga sasaran pembangunan tersebut adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, terwujudnya profesionalitas ASN, dan meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Sasaran pembangunan yang pertama memiliki substansi pemerintahan yang akuntabel dengan menjadikan adopsi teknologi informasi menjadi fondasi dasar penciptaan kondisi tersebut. Pemerintahan yang akuntabel mencakup berbagai macam aspek, meliputi manajemen kepegawaian, perencanaan, pengawasan, pelaporan, evaluasi, manajemen keuangan, dan pelayanan publik. Pengaplikasian teknologi informasi tersebut bertujuan agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang didukung oleh pengaplikasian teknologi informasi sebagai fondasi mengharuskan teknologi yang diaplikasikan dapat saling terhubung antar perangkat daerah sehingga tercipta sebuah interkoneksi antar perangkat daerah yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Sasaran yang kedua berkaitan dengan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Sipil Negara merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat beberapa fungsi utama ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan program pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara berperan dalam pelaksana dan memastikan kebijakan dan program tersebut tersampaikan dan

terlaksana dengan baik, termasuk dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan. Kedua, sebagai ujung tombak penyelenggara pelayanan publik, untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas maka ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik. Ketiga, membangun sinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, ASN dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Pada sasaran ketiga, upaya mencapai kemandirian fiskal daerah menjadi sasaran utama. Kemandirian fiskal daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, kemandirian fiskal adalah sejauh mana suatu daerah mampu mengelola sumber daya keuangan dan pendapatan daerahnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik di daerah tersebut. Untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, efektif dan efisien berarti pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan keuangan yang tepat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, mampu mengalokasikan anggaran dengan tepat, dan mampu melakukan kontrol dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sumber-sumber yang telah ditentukan oleh undang-undang dan berinovasi seperti melakukan skema kerjasama antara *government to government*, *government to business*, dan *business to business*.

Untuk dapat mencapai seluruh sasaran pada tujuan ini, terdapat beberapa program prioritas. Program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital
 - Sistem Informasi Pemerintahan Terbuka
 - Laporan Kinerja Pemerintahan Secara Terbuka
 - Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
 - Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat Daerah
 - Program Pemberdayaan Masyarakat
 - Program Kemitraan dengan LSM Anti-Korupsi
 - Program Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan
 - Program Standar Pelayanan Publik
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Program Layanan Pengaduan Publik
2. Terwujudnya Profesionalitas ASN
 - Program Pelatihan Integritas dan Etika
 - Program Penyederhanaan Prosedur Birokrasi
 - Seleksi ASN Berbasis Meritokrasi
3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
 - Program Audit Keuangan Berkala
 - Program Kerjasama dengan sektor swasta

Sedangkan urusan kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut adalah Komunikasi dan Informatika, Perencanaan,

Pengawasan, Kearsipan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Persandian, Statistik, Keamanan dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Penunjang (sektretariat daerah – Organisasi dan Sekretariat DPRD) dan Kewilayahan.

3.1.3.4 Tujuan 4

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi keempat Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara merata dan Berkelanjutan berfokus terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, Pemerataan pembangunan wilayah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Secara geografis Kabupaten Belitung memiliki wilayah yang berupa kepulauan dimana pulau utama merupakan Pulau Belitung, kondisi tersebut memungkinkan pertumbuhan pembangunan cenderung berfokus pada beberapa pusat pertumbuhan wilayah sehingga dalam rangka mencapai pemerataan pembangunan maka infrastruktur dasar seperti Jalan dan Jembatan perlu dioptimalkan dalam memberikan akses bagi pertumbuhan pada wilayah-wilayah yang belum tumbuh serta menghubungkan satu pusat pertumbuhan dengan pusat pertumbuhan lainnya untuk mengakselerasi pembangunan wilayah. Atas dasar tersebut maka pada Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan ditetapkan Tujuan **"Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan"** Berikut merupakan gambaran cascading pada Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan:



Gambar 3. 11 Cascading Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan

Sumber : Data diolah

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan tersusun atas 2 Kata Kunci yakni Inklusif dan Berkelanjutan. **"Inklusif"** menekankan bahwa Pembangunan Infrastruktur harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah keatas maupun masyarakat miskin, baik masyarakat yang berada pada pusat pertumbuhan maupun masyarakat yang berada pada wilayah terbelakang, sedangkan **"Berkelanjutan"** menekankan bahwa ditengah pertumbuhan pembangunan yang semakin pesat, Kabupaten Belitung harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh generasi mendatang melalui terjaganya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, selain itu berkelanjutan juga menekankan bahwa tantangan perubahan iklim serta potensi terjadinya bencana dapat datang tanpa dapat diprediksi secara tepat sehingga berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya potensi bencana alam serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Tujuan pada misi keempat ini adalah Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan memiliki dua indikator Tujuan yakni Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Adapun sasaran dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut ada tiga yakni, Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas dengan Indikator sasaran Indeks Pembangunan Infrastruktur. Sasaran Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan antar wilayah dengan indikator Indeks Kesulitan Geografis dan Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan dengan dua indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana. Terdapat beberapa program prioritas dalam mendukung ketiga sasaran tersebut. Berikut adalah program Politik Misi 4 Membangun infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan berkelanjutan:

- Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas
 1. Program Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur
 2. Program Pembangunan Infrastruktur yang aksesibel
 3. Program Infrastruktur Hijau dan Berkelanjutan
 4. Revitalisasi Kawasan Perkotaan
- Berkurangnya Kesenjangan Antar Wilayah
 1. Program Penataan Ruang Publik
 2. Program Desentralisasi dan Pemberdayaan Desa
 3. Program Padat Karya Tunai
- Meningkatnya Kelestarian Lingkungan
 1. Program Penyuluhan Lingkungan bagi Masyarakat
 2. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah
 3. Program Gerakan Menanam Pohon
 4. Program Edukasi Lingkungan di Sekolah
 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
 6. Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Energi Terbarukan
 7. Program Penerapan CSR untuk Infrastruktur Inklusif
 8. Program Kemitraan dengan LSM Lingkungan dan Budaya
 9. Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Adapun Program Politik pada sasaran Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan melekat oleh Perangkat daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan. Sasaran Berkurangnya kesenjangan Antar Wilayah melekat pada perangkat daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan program pada Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan melekat pada perangkat daerah pengampu urusan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2029

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera										
Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Modal Manusia	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	
			Tingkat Kemiskinan (%)	5,20	4,91	4,62	3,75	3,06	2,59	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,16	9,27	9,37	9,48	9,59	9,70	
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,58	12,74	12,90	13,06	13,22	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,15	74,49	74,83	75,16	75,5	75,84	
		Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi Stunting (%)	16,94	15,85	14,76	13,27	12,55	11,78	
		Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	Pengeluaran per kapita (rupiah)	14.651.000	14.854.000	15.057.000	15.259.000	15.462.000	15.664.605	

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,74	3,51	3,34	3,16	2,95	2,82	
			Indeks Gini	0,241	0,237	0,224	0,220	0,215	0,210	
Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,11	2,93	3,72	4,23	5,8	6,46	
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	1.200.000	1.300.000	1.450.000	1.650.000	1.900.000	2.200.000	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima	Pertumbuhan Sektor Prima (%)	3,80	3,97	4,11	4,26	4,35	4,41	
		Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kota (nilai)	3,80	4,19	4,58	4,81	5,03	5,39	
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)		Indeks reformasi birokrasi	80,00 (BB)	81,00 (A)	82,00 (A)	83,00 (A)	84,00 (A)	85,00 (A)	

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital (nilai)	1,80	1,90	1,90	2,00	2,00	2,20	
			Nilai SAKIP (nilai)	65,84 (B)	67,00 (B)	68,16 (B)	69,32 (B)	70,48 (BB)	71,64 (BB)	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	76,8121	77,213	78,9114	80,2365	81,1197	82,5071	
			Indeks Pelayanan Publik (nilai)	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,541)	Level 3 (3,542)	Level 3 (3,543)	Level 3 (3,544)	Level 3 (3,545)	Level 3 (3,546)	
		Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN (nilai)	79,80	80,15	80,93	81,20	81,87	82,65	
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal (%)	23,94	24,21	24,83	25,14	25,72	26,10	
Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik (85,35)	Sangat Baik (89,25)	Sangat Baik (90,96)	Sangat Baik (91,12)	Sangat Baik (92,25)	Sangat Baik (93,63)	
			Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	54,55	56,75	58,95	61,14	63,34	65,54	
		Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur (nilai)	67,28	77,56	85,09	92,06	100	107,97	

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis (nilai)	32,52	32,43	32,35	32,26	32,18	32,09	
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	76,81	76,98	77,15	77,32	77,49	77,66	
			Indeks Resiko Bencana (nilai)	117,14	116,05	114,96	113,87	112,80	111,71	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi

3.2.1.1 Strategi Misi 1- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Strategi 1.1. Penguatan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan

Menindaklanjuti sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada sub bab sebelumnya, maka perlu dirumuskan strategi yang dirasa efisien untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut. Dengan mempertimbangkan isu strategis yang telah diidentifikasi di bidang pendidikan, maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas pemerintah Kabupaten Belitung akan memfokuskan intervensi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang dimaksud adalah upaya-upaya yang mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas yang dimaksud adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan dunia usaha dan adaptif yang memungkinkan peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Strategi pembangunan tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif
2. Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak
3. Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan

Strategi 1.2. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat

Strategi pembangunan peningkatan pelayanan dasar dan perilaku hidup sehat masyarakat dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan meningkatnya kualitas kesehatan. Strategi pembangunan tersebut dipilih mengingat masih adanya isu pembangunan di bidang kesehatan yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan yang relatif rendah. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan yang dimaksud adalah perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik yang diwujudkan dalam bentuk kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan maupun upaya lainnya untuk mencegah meningkatnya kerentanan kesehatan pada masyarakat seperti paparan penyakit menular dan tidak menular yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Strategi tersebut kemudian diuraikan dalam arah kebijakan pembangunan meliputi:

1. Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat

Strategi 1.3. Meningkatkan layanan intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif dalam penanganan stunting

Strategi yang selanjutnya masih berkaitan dengan kesehatan masyarakat, namun dirumuskan dengan lebih spesifik untuk percepatan penanganan stunting di Kabupaten Belitung. Mengingat stunting merupakan permasalahan yang cukup kompleks sehingga diperlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan baik yang berfokus terhadap aspek pembangunan ekonomi maupun sosial. Maka upaya dalam mewujudkan percepatan penanganan stunting dilakukan dengan meningkatkan layanan intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif dalam penanganan stunting. Strategi tersebut diwujudkan melalui arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0 - 23 bulan; anak usia 24 - 59 bulan; Remaja Putri dan Catin; Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)

Strategi 1.4. Memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat

Strategi yang terakhir dalam upaya mewujudkan misi pertama adalah dengan memperluas kesempatan kerja melalui skema pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut dirumuskan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Strategi tersebut juga dirumuskan sebagai respons atas isu strategis bahwa Tingkat pendapatan masyarakat masih relatif rendah. Perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat melalui berbagai upaya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian peluang untuk mampu mengakses lapangan kerja formal yang layak dapat semakin besar. Strategi tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif
2. Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

3.2.1.2 Strategi Misi 2

Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial

Strategi 2.1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Belitung menghadapi permasalahan investasi, saat ini nilai investasi di Kabupaten Belitung dinilai cukup rendah apabila dibandingkan dengan target yang diberikan oleh nasional. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal di Belitung menyebabkan pertumbuhan

ekonomi yang belum optimal dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru. Kondisi ini juga berdampak pada lambatnya perkembangan sektor-sektor potensial, yang seharusnya bisa menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Salah satu penyebab rendahnya investasi ini adalah kurangnya infrastruktur pendukung serta terbatasnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis di Belitung. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu melakukan **penguatan investasi daerah** secara komprehensif. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, menarik minat investor baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam usaha untuk menguatkan investasi daerah, maka langkah awal yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Belitung yakni meningkatkan daya saing Belitung dengan memperhatikan kebutuhan para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi daerah akan terus bertambah dan berkembang apabila kebutuhan investor dapat terpenuhi dan peluang untuk meningkatkan nilai investasi yang diberikan oleh investor cukup tinggi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan strategis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Belitung perlu untuk menyusun arah kebijakan setiap tahunnya yang berfokus untuk mensukseskan strategi yang telah disusun. Berikut merupakan arah kebijakan yang disusun untuk mewujudkan strategi penguatan investasi daerah:

1. Peningkatan infrastruktur untuk investasi
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan
3. Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan promosi investasi

Strategi 2.2. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan pelaku sektor unggulan

Kondisi Kabupaten Belitung yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan merupakan salah satu bentuk dalam memanfaatkan potensi alam yang ada. Akan tetapi kondisi tersebut memberikan permasalahan tersendiri, pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung melambat apabila dibandingkan dengan potensi sektor-sektor yang dapat menumbuhkan perekonomian Kabupaten Belitung. Hal ini dikarenakan **kurangnya diversifikasi sektor ekonomi**, permasalahan ini merupakan isu strategis yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi pada satu atau dua sektor ekonomi utama membuat struktur perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi eksternal, seperti perubahan harga komoditas global, bencana alam, atau gangguan pasar lainnya. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Belitung, yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata dan pertambangan, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi apabila sektor-sektor tersebut mengalami penurunan kinerja. Minimnya diversifikasi juga menyebabkan terbatasnya lapangan kerja di sektor-sektor alternatif, sehingga lapangan pekerjaan cenderung terbatas bagi sebagian besar masyarakat dan bergantung pada sektor

yang dominan. Hal ini mengakibatkan apabila terjadi guncangan pada sektor utama, seperti penurunan jumlah wisatawan atau penurunan harga komoditas tambang, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat meningkat secara signifikan.

Kurangnya variasi dalam struktur ekonomi juga menghambat pertumbuhan sektor-sektor baru yang memiliki potensi. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi penting agar Kabupaten Belitung dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh terhadap dinamika pasar global. Melalui penguatan berbagai sektor baru yang memiliki potensi unggulan, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Berdasarkan dengan cita-cita tersebut maka disusunlah beberapa arah kebijakan sebagai pendukung dalam strategi penguatan sektor unggulan di Kabupaten Belitung sebagai berikut:

1. Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan
3. Perluasan akses pasar dan pemasaran
4. Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor unggulan

Strategi 2.3. Pengembangan destinasi, promosi, pelestarian budaya, penguatan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat potensial untuk menjadi destinasi wisata unggulan. Kabupaten Belitung juga memiliki keindahan pantai-pantai berpasir putih, keunikan batu granit raksasa, ekowisata laut, serta kekayaan budaya lokal seperti warisan kuliner dan tradisi masyarakat setempat yang masih belum sepenuhnya dikembangkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan infrastruktur penunjang pariwisata, minimnya fasilitas akomodasi dan transportasi yang nyaman dan terjangkau, serta belum meratanya pengembangan kawasan wisata di seluruh wilayah. Selain itu, promosi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung juga masih cenderung kurang agresif dan belum sepenuhnya mampu menjangkau pasar wisatawan mancanegara maupun domestik secara lebih luas. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pelayanan, pengelolaan destinasi, serta pengembangan atraksi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

Guna meningkatkan daya tarik pariwisata dan budaya lokal di Kabupaten Belitung maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat, hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan latar belakang kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Belitung maka isu yang mendasar terkait pariwisata yakni **belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata**. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka disusunlah beberapa arah kebijakan yang berfokus pada pengembangan potensi pariwisata dengan melihat

dan mempertimbangkan sektor-sektor yang bersifat *supporting*. Berikut di bawah ini merupakan arah kebijakan yang disusun sebagai upaya strategi dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Belitung:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan
2. Peningkatan dimensi pengembangan 8A (*Attraction, Amenity, Aksesibility, Activity, Accommodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi*) pariwisata

3.2.1.3 Strategi Misi 3

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat

Strategi 3.1. Penguatan implementasi teknologi informasi digital dalam pengelolaan pemerintahan

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan sebuah hal yang jamak ditemukan dalam tata kelola pemerintahan di seluruh pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif. Kendala yang jamak ditemui adalah implementasi teknologi informasi ke dalam tata kelola pemerintahan yang tidak terintegrasi dan tidak berorientasi pada kebutuhan.

Oleh karena itu, penguatan implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan harus dilakukan. Penguatan tersebut fokus pada upaya integrasi seluruh teknologi informasi yang ada dan digunakan oleh perangkat daerah, sehingga tercipta interkoneksi di seluruh perangkat daerah dalam berbagai aspek pemerintahan. Arah kebijakan dari strategi ini adalah:

1. Penguatan tata kelola Pemerintah Digital
2. Penguatan teknologi Pemerintah Digital
3. Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data

Strategi 3.2. Meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan baik dari sisi perencanaan maupun keuangan memiliki peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis terhadap kinerja. Strategi meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan menekankan bagaimana tata kelola pemerintahan dapat diselenggarakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, berbagai akses dan kemudahan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dapat terbuka dengan lebar. Sehingga upaya-upaya penyalahgunaan wewenang dalam lingkup pemerintahan tidak dapat dilakukan. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan maka masyarakat akan semakin percaya terhadap pemerintah dan dapat meningkatkan stabilitas wilayah. Berikut adalah arah kebijakan dalam strategi meningkatkan

integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan.

1. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah dan perangkat daerah.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Transformasi layanan publik secara digital.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.
5. Peningkatan kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Strategi 3.3. Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) manajemen ASN perangkat daerah

ASN memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, ASN merupakan aktor dalam pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah daerah dan aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Namun dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan kualitas ASN secara komprehensif sering kali tidak mendapatkan perhatian utama termasuk upaya manajemen ASN tersebut. Perekrutan ASN yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya, sehingga ASN yang dimiliki menjadi tidak berperan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melihat hal tersebut, strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan penguatan manajemen ASN. Penguatan manajemen ASN tersebut tidak hanya fokus pada penguatan implementasi sistem merit, namun juga mencakup keseluruhan aspek manajerial ASN mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, mutasi, penerapan *reward and punishment*, jenjang karir, hingga pensiun. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah dengan mengintegrasikan pengelolaan manajemen ASN dengan teknologi informasi.

Strategi 3.4 Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah

Dewasa ini upaya efisiensi anggaran terus digulirkan oleh Pemerintah Pusat, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak hanya berdampak pada jumlah dana transfer yang diterima oleh daerah, namun juga berdampak pada kemampuan/kemandirian fiskal daerah tersebut terutama bagi daerah dengan rasio kemandirian fiskal daerah yang rendah. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui berbagai macam upaya. Pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah maupun dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Oleh karena itu strategi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah adalah dengan penguatan tata kelola pendapatan daerah. Penguatan tata kelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem informasi, sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalisir. Selain itu dengan adanya penguatan tata kelola pendapatan daerah, diharapkan adanya peningkatan pendapatan dari sumber-sumber yang baru dan inovatif. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mengimplementasikan strategi tersebut adalah dengan meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3.2.1.4 Strategi Misi 4

Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan

Strategi 4.1. Peningkatan pelayanan infrastruktur inklusif

Wujud pembangunan yang paling mudah diperhatikan secara langsung adalah bagaimana kualitas infrastruktur meningkat, jalan semakin lebar dan mantap, rumah sakit semakin besar dengan jumlah kamar yang meningkat diiringi oleh lengkapnya peralatan kesehatan, sekolah-sekolah menjadi lebih indah dan nyaman dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut merupakan sebuah alat dalam mencapai berbagai tujuan yang berada di tingkat lebih puncak yakni kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur maka akses masyarakat dalam memperoleh aspek-aspek dasar kehidupan akan lebih mudah sehingga infrastruktur menjadi tulang punggung dalam menyediakan pelayanan dasar yang dapat meningkatkan derajat sosial dan ekonomi masyarakat. Isu yang terjadi saat ini di Kabupaten Belitung adalah masih rendahnya infrastruktur kewilayahan dan rendahnya aksesibilitas dan konektivitas sehingga perlu adanya penekanan bagaimana infrastruktur dapat ditingkatkan secara inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar tanpa memandang latar belakang, kemampuan dan status.

Peningkatan pelayanan infrastruktur inklusif merupakan strategi yang ditetapkan dengan berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dilakukan secara merata serta memperhatikan spesifikasi sarana dan prasarana umum yang dapat diakses berbagai golongan masyarakat utamanya kelompok disabilitas. Peningkatan pelayanan infrastruktur inklusif juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya berorientasi terhadap wilayah-wilayah ekonomi maju akan tetapi juga menyentuh wilayah-wilayah ekonomi tumbuh dan ekonomi berkembang sehingga dapat meningkatkan kelas perekonomiannya. Oleh karena itu terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan strategi peningkatan pelayanan infrastruktur yang inklusif. Berikut arah kebijakan yang dimaksud:

1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar.
2. Peningkatan infrastruktur konektivitas.
3. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan.

4. Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak.

Strategi 4.2. Pemerataan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan kawasan strategis

Perkembangan teknologi yang sangat dinamis menjadi tantangan yang cukup berat dimana aspek ini sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Apabila suatu wilayah terlambat dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi maka kualitas sumberdaya manusianya akan cukup dipertimbangkan bagaimana SDM tersebut dapat mengoperasikan bahkan mengembangkan berbagai teknologi yang diperlukan. Kebutuhan dasar dalam beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi adalah infrastrukturnya. Dengan infrastruktur yang mampu menyediakan spesifikasi kebutuhan yang tepat maka seluruh informasi terutama berkaitan dengan pengembangan teknologi akan mudah di akses dan diimplementasikan. Di beberapa daerah di Kabupaten Belitung belum cukup memperoleh akses koneksi yang cepat. selain itu permasalahan yang saat ini terjadi adalah berkaitan dengan akses dan koneksi jalur laut dan sungai, terjadi pendangkalan yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir sehingga hal ini dapat mengganggu jalur pergeseran orang dan barang pada wilayah-wilayah strategi daerah. Selain itu terdapat berbagai permasalahan yang terjadi pada wilayah-wilayah tertentu utamanya berkaitan dengan akses dan konektivitas wilayah baik antar wilayah di dalam Kabupaten Belitung maupun penghubung Kabupaten Belitung dengan daerah lain yang turut mendukung perekonomian masing-masing daerah.

Strategi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan diatas adalah melalui pembangunan infrastruktur yang merata yang berorientasikan terhadap pembangunan wilayah dan kawasan strategis dengan menitikberatkan pada pusat-pusat pertumbuhan atau simpul perekonomian yang secara tidak langsung dapat memberikan stimulus bagi wilayah-wilayah di sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang. Pemerataan pembangunan tidak dapat dilakukan secara simultan, keterbatasan anggaran menjadi permasalahan yang mendasar jika pembangunan merata diartikan bahwa seluruh wilayah di Kabupaten Belitung memiliki infrastruktur dasar per kecamatan. Oleh karena itu pembangunan dengan menitik beratkan pada wilayah pusat pertumbuhan dan simpul perekonomian menjadi salah satu upaya yang tepat sebagai langkah untuk menyediakan pelayanan publik yang merata serta meningkatkan perekonomian wilayah berbasis kawasan strategis. Berikut adalah arah kebijakan yang dilakukan Kabupaten Belitung dalam rangka mengimplementasikan strategi pemerataan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan kawasan strategis:

1. Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah.
2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah melalui tata ruang.
3. Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis.

Strategi 4.3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Kabupaten Belitung memiliki 3 (tiga) wilayah yang menjadi Proyek Strategis Nasional yang berorientasi pada aspek pariwisata, daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Belitung bertumpu pada potensi alam sehingga perhatian terhadap lingkungan merupakan fokus utama dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga potensi tersebut tetap terjaga dengan baik. Faktanya kesadaran masyarakat serta pelaku ekonomi dalam memanfaatkan potensi perekonomian di Kabupaten Belitung belum optimal sehingga masih terdapat praktik-praktik pelanggaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan limbah yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan budaya sehingga bentuk upaya yang dilakukan tidak dapat serta merta diubah dalam tempo yang singkat sedangkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan memerlukan sistem jaringan persampahan, teknologi serta sarana prasarana yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga memerlukan modal yang cukup tinggi. Dari berbagai kondisi ini maka strategi terhadap upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan sejak awal dan berkesinambungan.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat ditumbuhkan dengan menganalisa aspek apa yang menjadi faktor kuat agar dapat melekat dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek mendasar yang dapat merubah cara berpikir masyarakat. Menciptakan iklim kerja yang produktif dengan menekankan bahwa sumber produktif yang diperoleh berasal dari kondisi lingkungan yang mendukung. Kesadaran tersebut selanjutnya dikonversikan melalui aksi yang dijalankan dengan adanya program pengelolaan sampah 3R (*reduce, reuse and recycle*) bentuk pemilahan diharapkan dapat terlaksana sejak dari sumber sampah baik industri maupun rumah tangga. Hasil pemilahan tersebut perlu didukung oleh sarana pengangkut sampah yang dapat mengangkut hasil pemilahan menuju TPS 3R hingga Tempat pembuangan akhir. Berbagai inovasi perlu diperkuat bagaimana mengolah sampah yang telah terpilah untuk dapat dimanfaatkan kembali bahkan pada sampah yang paling sulit untuk diolah dengan biaya yang rendah akan tetapi hasil olahan dapat bernilai ekonomis. Dalam mencapai strategi tersebut terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu.
2. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Strategi 4.4 Penguatan kapasitas masyarakat, serta tata kelola kebencanaan yang adaptif dan berbasis data

Tantangan perubahan iklim yang terjadi seiring berjalannya waktu menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, dengan adanya perubahan iklim yang dinamis maka akan berpotensi terhadap banyaknya risiko kebencanaan. Oleh karenanya dalam mempersiapkan ketangguhan daerah guna menghadapi berbagai ancaman dan tantangan kebencanaan yang tidak dapat diperhitungkan

dengan tepat kapan dan dimana akan terjadi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Belitung maka perlu adanya strategi dalam mengurangi potensi terjadinya bencana serta meminimalisir dampak kerugian atas terjadinya bencana. Adapun arah kebijakan dari strategi penguatan kapasitas masyarakat, serta tata kelola kebencanaan yang adaptif dan berbasis data adalah dengan meningkatkan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang menjabarkan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tersusun atas strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan pembahasan sub bab sebelumnya maka arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif
2. Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak
Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan
3. Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0 - 23 bulan; anak usia 24 - 59 bulan; Remaja Putri dan Catin; Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif
6. Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
7. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan akses pusat kesehatan masyarakat serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
8. Peningkatan infrastruktur untuk investasi
9. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan. Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel
10. Meningkatkan promosi investasi
11. Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan
Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan
12. Perluasan akses pasar dan pemasaran
13. Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor unggulan
14. Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan
15. Peningkatan dimensi pengembangan 8A (*Attraction, Amenity, Aksesibility, Activity, Accomodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi*) pariwisata
16. Penguatan tata kelola Pemerintah Digital
17. Penguatan teknologi Pemerintah Digital

18. Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah dan perangkat daerah
19. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan
20. Transformasi layanan publik secara digital
21. Penguatan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan
22. Mengintegrasikan pengelolaan manajemen ASN dengan teknologi informasi
23. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi
24. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar
25. Peningkatan infrastruktur konektivitas. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan
26. Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak
27. Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah
28. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah melalui tata ruang
29. Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis
30. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
31. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
32. Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Nasional dan Bangka Belitung perlu dilinearitaskan untuk dapat melihat keterhubungan antara Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung, keterhubungan dapat memiliki arti bahwa arah kebijakan Kabupaten Belitung mendukung terhadap implementasi arah kebijakan Provinsi dan Nasional selain itu dapat memiliki arti kesamaan intervensi dan lain sebagainya, berikut adalah Keterhubungan Arah Kebijakan Kabupaten Belitung terhadap arah kebijakan Nasional dan Provinsi Bangka Belitung:

Tabel 3.2 Keterhubungan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Kabupaten Belitung

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Pendidikan Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial diutamakan melalui Pendidikan dengan dukungan program prioritas "Program Penguatan Karakter dan Pendidikan Moral"
Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Penguatan tata kelola Pemerintah Digital	Meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah



Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Kelembagaan Demokrasi dalam konteks pemerintahan daerah memiliki orientasi untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan kebijakan yang dapat mendukung pembangunan daerah utamanya dalam meningkatkan sektor unggulan daerah
Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	merujuk pada organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok masyarakat, serikat pekerja, organisasi berbasis agama, asosiasi profesi, dan yayasan sehingga dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan serta diperdayakan dalam rangka meningkatkan potensi daerah serta secara sinergis bersama pemerintah dalam mengatasi isu dan permasalahan daerah
	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	
Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Memastikan pemenuhan hak dasar (pendidikan, kesehatan, Tempat Tinggal yang layak).
	Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	
	Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat	
	Peningkatan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0 - 23 bulan; anak usia 24 - 59 bulan; Remaja Putri dan Catin; Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)	
	Peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan akses pusat kesehatan masyarakat serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak	
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar	
	Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	
	Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan	
	Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana	
	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	
Pembangunan Postur Pertahanan	-	Memiliki Batasan Kewenangan
Pembangunan Industri Pertahanan	-	Memiliki Batasan Kewenangan

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Komponen cadangan dapat dipenuhi dengan adanya akses pendidikan bagi masyarakat utamanya akses pendidikan dasar, menengah sampai dengan akses pendidikan dasar militer sedangkan komponen pendukung merupakan sumber daya manusia dengan keahlian tertentu serta kekayaan alam atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan	
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan	
	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	
Intelijen dan Keamanan dalam Negeri	-	Memiliki Batasan Kewenangan
Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Penguatan teknologi Pemerintah Digital	Pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan publik yang menghimpun data layanan dan kependudukan perlu untuk memperkuat keamanan informasi
Keamanan Laut dan Hidro-oseanografi	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	Potensi Laut dan Garis Pantai Kabupaten Belitung sangat besar utamanya berkaitan dengan Sektor Pariwisata sehingga perlu adanya kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi tindakan hukum dan upaya perusakan lingkungan
	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	
	Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian resiko bencana	Dinamika Pasang Surut air laut, gelombang dan arus perlu diidentifikasi dan dipetakan dalam rangka menjaga resiko bencana laut
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	Terdapat program prioritas bupati "Harmonisasi Sosial" yang salah satunya diwujudkan melalui Keseimbangan Sosial dengan harapan mampu Menjaga Harmonisasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban
Profesionalisme Pelayanan Kepolisian		Memiliki Batasan Kewenangan
Diplomasi Astra Cita dan Diplomasi Ekonomi	Meningkatkan promosi investasi	Penguatan diplomasi utamanya berkaitan dengan investasi pada lingkup nasional maupun internasional
Swasembada Pangan	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Didukung oleh program prioritas antara lain; Program Diversifikasi Tanaman Perkebunan; Program Pengolahan dan diversifikasi produk perikanan; dan Program Pertanian Berkelanjutan"
Swasembada Energi	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan infrastruktur, seperti penerangan jalan umum dengan panel surya, dan mendukung pembangunan fasilitas energi bersih seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin dll
Swasembada Air	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Mendorong serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan menjaga dan melestarikan sumber mata air serta menghemat penggunaan air berlebihan

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Ekonomi Syariah	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Ekonomi syariah merupakan wadah yang tepat dalam rangka meningkatkan perekonomian yang bercondong pada pemenuhan hak ekonomi bagi masyarakat miskin karena didasarkan pada keadilan, praktik non riba(eksploitatif), dorongan untuk infak, sedekah dan berbagi utamanya bagi kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan
Ekonomi Digital	Perluasan akses pasar dan pemasaran	Perluasan akses pasar dan pemasaran dapat diakselerasi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sehingga akses pasar dapat diperoleh lebih mudah dan tanpa adanya batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun
Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	ekonomi biru bertumpu pada daya dukung dan daya tampung sumber daya laut sehingga praktik-praktik perekonomian diharapkan memiliki orientasi inklusif dan berkelanjutan sehingga sumber daya laut tidak hanya dimanfaatkan akan tetapi juga dipelihara dan dikelola dengan baik
	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	
Ekosistem Ekonomi Sirkular	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	ekonomi sirkular sangat bergantung terhadap tingkat inovasi dan modernisasi, hal ini tentunya diprioritaskan pada sektor unggulan dimana limbah yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Dengan adanya inovasi, modernisasi produksi dan hilirisasi ekonomi sirkular dapat dijalankan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Kerjasama masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies dan genetik di Kabupaten Belitung sehingga ekosistem yang ada dapat terlindungi dengan baik
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah melalui tata ruang	Panduan dan rencana pengembangan daerah melalui tata ruang merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan tata ruang serta peruntukannya yang diharapkan mampu untuk menyediakan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian akan tetapi juga menetapkan tata ruang yang harus dilindungi dalam rangka menjaga lingkungan hidup
Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Terdapat "Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup" yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular sehingga dapat melaksanakan pencegahan sekaligus penanganan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Terdapat "Program Pengelolaan Persampahan" yang menjadi landasan dalam menyediakan infrastruktur untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat seperti penyuluhan untuk menggunakan barang ramah lingkungan, penyediaan sarana prasarana pada TP3SR untuk melakukan daur ulang, dan pembuangan sampah pada TPA yang berbasis sanitary landfill
Pembangunan Rendah Karbon	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Optimalisasi peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui "Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup" dan "Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat" yang mendorong penerapan ekonomi hijau
Pekerjaan Hijau/Green Jobs	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Pelaksanaan "Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat", "Program Pengelolaan Persampahan", dan "Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup" dapat ditujukan untuk mengarahkan sektor ekonomi yang dikelola oleh masyarakat untuk menggunakan teknologi, pendekatan, dan cara produksi yang ramah lingkungan
Pengelolaan Hutan Lestari	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Terdapat "Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup" yang mengadakan gerakan penanaman pohon secara massal, terutama di area yang rawan bencana seperti longsor atau banjir, serta di lahan yang gundul dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan hutan
Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	Peningkatan infrastruktur konektivitas, Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	Terdapat "Program Penyelenggaraan Jalan", Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)", dan "Program Pengelolaan Pelayaran" yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas melalui peningkatan pelayanan perhubungan atau transportasi dan penyediaan infrastruktur
Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	Penguatan teknologi Pemerintah Digital	Pemerintah Kabupaten Belitung mengoptimalkan pengelolaan e-government dengan memperluas cakupan layanan digital yang didukung dengan penyediaan infrastruktur TIK yang memadai
	Transformasi layanan publik secara digital	Upaya transformasi pelayanan publik ke digital dilaksanakan melalui "Program Pengelolaan Aplikasi Informatika" dan "Pengelolaan Informasi dan Komunikasi" yang berperan untuk menghasilkan aplikasi, sarana dan prasarana pendukung TIK, dan layanan SPBE yang dapat meningkatkan konektivitas digital

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Pendalaman Sektor Keuangan	Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel	Pembangunan lingkungan atau ekosistem investasi yang kondusif membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel yang diwujudkan melalui pengoptimalan pelayanan penanaman modal terintegrasi, efisien, dan berbasis digital
	Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan	Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan "Program Pengelolaan Pendapatan Daerah" dan "Program Pengelolaan Aplikasi Informatika" untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang didukung pemanfaatan kemajuan TIK sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan standar pengelolaan sektor keuangan daerah
Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Salah satu sektor unggulan di Kabupaten Belitung adalah sektor pariwisata, untuk mendukung peningkatan sektor pariwisata maka sektor UMKM juga harus tumbuh. UMKM berperan sebagai pendukung kegiatan pariwisata melalui produksi produk unggulan dan jasa. selain itu koperasi juga dapat berperan penting dalam mendukung pengembangan desa wisata. Hal tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro
	Perluasan akses pasar dan pemasaran	Untuk mendukung peningkatan kontribusi salah satu sektor unggulan, yaitu sektor pariwisata. Penguatan UMKM dan koperasi menjadi salah satu hal yang penting, oleh karena itu perluasan akses pasar dan peningkatan pemasaran sangat penting. tidak hanya peningkatan akses pasar dan pemasaran di tingkat lokal, namun harus diperluas hingga luar daerah. Hal tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro
Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan	Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, maka segala aspek yang berkaitan dengan penguatan pariwisata harus diperkuat. Pertama, sebagai dasar adalah kebijakan daerah yang mendukung sektor pariwisata seperti kemudahan perizinan, kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata, dan lain-lain. Kedua kelembagaan pariwisata yang harus diperkuat, Kabupaten Belitung telah memiliki modal awal yang penting dalam pariwisata, kelembagaan pariwisata yang sudah ada perlu diakselerasi untuk berkembang lebih jauh melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Ketiga pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata yang ada tidak hanya menyuguhkan pariwisata alam namun juga dapat dalam bentuk pariwisata kebudayaan, atraksi, seni, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ekonomi kreatif berperan sebagai elemen penguat dan pelengkap dalam sektor pariwisata, selain itu ekonomi kreatif juga dapat
	Peningkatan dimensi pengembangan 8A (Attraction, Amenity, Aksesibility, Activity, Accommodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi) pariwisata	

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
		mendorong pertumbuhan umkm dan koperasi sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Keempat adalah kebudayaan lokal yang juga dapat menjadi salah satu faktor penarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Belitung. Kebudayaan yang dapat menjadi salah satu faktor penarik dapat berupa kebudayaan yang bersifat benda dan tak benda. Salah satu manfaat dari hal ini adalah selain menjadi faktor penarik wisatawan, secara tidak langsung juga dapat menjadi penguat kebudayaan lokal.
Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan	Ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung pariwisata di Kabupaten Belitung harus mendapatkan dukungan dan upaya penguatan. Selain penguatan kelembagaan dan pemasaran, upaya perlindungan dari hasil kreativitas yang muncul dari sektor ekonomi kreatif harus mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Hasil cipta tersebut dapat berupa benda maupun non benda, Pemerintah Kabupaten Belitung akan memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dari pelaku ekonomi kreatif
	Peningkatan dimensi pengembangan 8A (Attraction, Amenity, Aksesibility, Activity, Accommodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi) pariwisata	
Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penguatan sistem tata kelola pendidikan, seluruhnya merupakan aspek-aspek penting yang menjadi dasar peningkatan kualitas pendidikan. Arah Kebijakan Kabupaten Belitung yang mendukung hal tersebut adalah peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif. Peningkatan mutu layanan pendidikan mencakup peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM Kependidikan (guru dan tenaga kependidikan), selain itu hal lain seperti sarana prasarana pendukung (gedung, laboratorium, dan sarana prasarana pendukung pendidikan yang lain) juga ditingkatkan, kurikulum dan sistem manajemen pendidikan juga menjadi hal yang akan ditingkatkan kualitasnya. sehingga seluruh upaya tersebut dapat mengakselerasi tercapainya percepatan wajib belajar 13 tahun.
Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	
Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	
Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	



Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Meskipun pendidikan pesantren dan keagamaan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung, namun Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mendukung pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk mengakses pendidikan pesantren dan keagamaan. peningkatan aksesibilitas tersebut dapat berupa peningkatan kualitas jalan yang menuju pesantren atau sekolah keagamaan, peningkatan jalur transportasi, kemudahan perizinan, dll.
Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan STEAM	Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan	Upaya dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk penguatan pendidikan tinggi dan pengemban STEAM adalah dengan mempermudah fasilitasi dan perizinan pendirian perguruan tinggi, dan pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa untuk kuliah di PT lokal maupun non lokal. Dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan STEAM adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan STEAM pada pendidikan dasar (sesuai dengan kewenangan) seperti laboratorium dan pemenuhan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi untuk pengembangan STEAM
Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Peningkatan kualitas pendidikan didukung oleh peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi oleh penduduk usia sekolah, dan seluruh masyarakat secara umum. Peningkatan budaya literasi diwujudkan dengan peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap bahan bacaan baik bersifat fisik maupun digital. Peningkatan kemudahan akses tersebut diwujudkan dalam peningkatan koleksi dan layanan perpustakaan baik onsite maupun online. Selain itu, peran keluarga dalam penguatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi juga menjadi salah satu faktor penting. Melalui keluarga yang melek literasi, dapat mendorong siswa untuk gemar membaca sejak dini, sehingga wawasan, kreativitas, dan inovasi dapat berkembang sejak dini
	Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	



Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat;	Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga salah satunya diwujudkan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Oleh karena seluruh lapisan masyarakat harus mampu mengakses layanan kesehatan yang bersifat primer maupun sekunder. Peningkatan layanan dasar primer (Puskesmas, Posyandu, Puskesmas) dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara dasar. Peningkatan layanan dasar sekunder (Rumah Sakit) memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut ketika layanan kesehatan lanjutan dibutuhkan. selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu, peran posyandu semakin penting dalam memberikan dukungan pelayanan kesehatan dan dukungan layanan lainnya. Pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya peningkatan gizi masyarakat yang berperan penting dalam penanggulangan stunting di usia balita, ibu hamil, anak-anak, dan usia remaja.
	Peningkatan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran (ibu hamil, anak, remaja, dll.)	
Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, selain intervensi yang dilakukan terhadap sarana prasarana dan aksesibilitas, pemenuhan gizi bagi siswa juga menjadi upaya penting. Pemenuhan gizi yang dibutuhkan oleh siswa melalui makan bergizi gratis bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung. pemberian makan gizi gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas SDM, namun juga terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui UMKM/koperasi yang terlibat dalam pemberian makan bergizi gratis ini.
	Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	Dengan berpedoman dengan program Pendidikan untuk Anak Putus Sekolah yang berfokus pada Menyediakan program pendidikan alternatif atau remedial untuk anak-anak dan remaja yang putus sekolah, agar mereka bisa kembali ke jalur pendidikan formal atau mendapatkan keterampilan kerja yang relevan. Maka dimungkinkan pendidikan anak akan meningkat
Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Kehidupan Sehat	Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat	Program Keluarga Harapan dapat merealisasikan peningkatan kesehatan masyarakat dikarenakan program tersebut Memberikan bantuan sosial bersyarat yang fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak-anak dari keluarga miskin syarat : harus menyekolahkan anak hingga pendidikan dasar 9 th
Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik	

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat	Mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan kesehatan tanpa hambatan yang signifikan, baik dari sisi jarak, biaya, informasi, maupun waktu. Serta dengan memperhatikan tingkat keamanan, efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan. Program yang tersedia untuk memenuhi dua hal tersebut ialah Program Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur dan Program Keluarga Harapan
Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	Keluarga adalah tempat anak pertama kali belajar nilai, sikap, kebiasaan, dan keterampilan dasar, sehingga Memberikan Dukungan Emosional dengan Memotivasi anak untuk semangat belajar. Hal tersebutlah yang menjadi kata kunci dari keberhasilan pendidikan anak
Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	
Peningkatan Kualitas Pemuda	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Melalui Program Pelatihan Integritas dan Etika dengan berfokus pada Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai negeri sipil (PNS) tentang etika pemerintahan, anti-korupsi, dan tanggung jawab moral. Pelatihan ini bisa menjadi bagian dari pengembangan kapasitas dan penilaian kinerja. Sehingga melalui program tersebut akan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang inklusif adalah proses pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja dengan memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, disabilitas, latar belakang ekonomi, atau lokasi. Salah satu program yang dapat mewujudkannya ialah Pelatihan Integritas dan Etika
Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan, serta membuka peluang agar masyarakat dapat hidup layak dan mandiri. Melalui Program pengembangan ekonomi dan kesejahteraan diharapkan dapat Mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah dan perangkat daerah	Upaya memastikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi dilakukan secara terintegrasi, konsisten, dan sesuai standar, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Salah satu program yang mampu memprakarsainya yaitu Penyederhanaan Prosedur Birokrasi karena akan Mengurangi birokrasi yang berbelit-belit melalui digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan proses perizinan serta administrasi. Ini mengurangi peluang terjadinya pungli dan mempercepat layanan publik
Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan keterampilan inklusif; Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan	Penguatan terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi yang inklusif mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing kualitas SDM Kabupaten Belitung
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional	Penguatan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Di Kabupaten Belitung, pengembangan manajemen talenta nasional menjadi dasar dalam melakukan identifikasi dan membina SDM yang potensial, yang kemudian diperkuat dengan pelatihan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani
Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Peningkatan pembinaan prestasi yang berbasis pelatihan dan keterampilan inklusif yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Belitung tidak hanya dapat membentuk SDM yang sehat, disiplin, dan berdaya saing, namun juga dapat menghasilkan atlet berprestasi daerah
Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang inklusif di Kabupaten Belitung, salah satunya dalam bidang olahraga merupakan salah satu kunci dalam membangun pembudayaan olahraga yang merata, sehingga terbentuk masyarakat yang sehat, terampil, dan berdaya saing
Percepatan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan	Modernisasi produksi, hilirisasi, dan diversifikasi produk unggulan	Modernisasi produksi, hilirisasi, dan diversifikasi produk unggulan, merupakan fondasi percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan, yang mendorong peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan
Aglomerasi Industri melalui Peningkatan Investasi di Kawasan Industri/Ekonomi Khusus	Penguatan SDM dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Penguatan SDM dan kelembagaan pendukung sektor unggulan adalah pondasi internal dari terbentuknya aglomerasi industri yang berdaya saing, sehingga kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus semakin menarik bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah dapat memperkuat konektivitas nasional yang menjadi poin penting dalam integrasi ekonomi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem logistik nasional

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan infrastruktur untuk investasi; Meningkatkan promosi investasi	Infrastruktur dapat memberi kemudahan fisik dan teknis bagi kegiatan usaha, sedangkan promosi investasi akan menambah daya tarik informasi dan reputasi secara terarah, hal ini dapat mendorong investasi, memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global, sekaligus meningkatkan daya saing daerah
Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor	Perluasan akses pasar dan pemasaran	Perdagangan tidak bisa tumbuh tanpa akses pasar yang luas dan pemasaran yang tepat, sehingga memerlukan perluasan jalur distribusi dan target konsumen, serta mengoptimalkan promosi untuk menjadi pendorong utama dalam peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor, melalui terbukanya peluang penjualan dan distribusi yang lebih luas dan efisien
Optimalisasi Investasi Strategis Negara	Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel	Tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel menjadi landasan utama untuk mengoptimalkan investasi strategis pemerintahan, melalui peningkatan kepercayaan investor dan pengelolaan modal yang tepat sasaran sehingga menghasilkan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data	Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendataan perlu memastikan ketersediaan dan pemanfaatan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses
Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Perlindungan dan jaminan sosial merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah sehingga kebutuhan dasar, peranan sosial serta keberdayaan masyarakat miskin dapat terpenuhi, selain itu Program prioritas bupati "Pemberdayaan Perempuan" yang dilaksanakan dengan mendorong peran aktif perempuan dalam perekonomian melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan keterampilan, dan dukungan permodalan, sejalan dengan upaya mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Kapasitas Sumber Daya Manusia yang lebih unggul di Kabupaten Belitung akan memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan
	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan melalui penyediaan kredit mikro bagi UMKM disertai pelatihan literasi keuangan dan manajemen bisnis dapat memperluas akses lapangan kerja serta menumbuhkan usaha yang berkelanjutan dan inovatif
Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	Terdapat program prioritas bupati "Revitalisasi Kawasan Perkotaan" melalui peremajaan bangunan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ruang publik diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang inklusif di Kabupaten Belitung mendukung terciptanya masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan sosial bagi kelompok rentan
Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Belitung didukung melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan	Arah kebijakan ini tidak bersifat saling mendukung akan tetapi memiliki orientasi yang sama yakni pada pembangunan wilayah perkotaan
Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	-	Memiliki Batasan Kewenangan
Reformasi Hukum	-	Memiliki Batasan Kewenangan
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta TPPU	Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan	Arah kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi serta TPPU sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Belitung yang menekankan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang bersih, kredibel, dan bebas dari praktik korupsi, yang diwujudkan melalui program prioritas seperti Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Opini WTP, PAD KUAT, Menara Integritas Belitung, dan SINAR PELAYANAN.
Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum	-	Memiliki Batasan Kewenangan
Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General	-	Memiliki Batasan Kewenangan
Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Penguatan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan; Mengintegrasikan pengelolaan manajemen ASN dengan teknologi informasi	Selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Belitung yang fokus pada penguatan kapasitas SDM serta integrasi manajemen ASN berbasis teknologi informasi, guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, keselarasan ini diwujudkan melalui program prioritas seperti SAKIP Smart, Menara Integritas Belitung, dan SPBE Unggul.
Pemerintahan Digital	Penguatan tata kelola Pemerintah Digital; Transformasi layanan publik secara digital	Arah kebijakan nasional tentang transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Belitung yang mengutamakan transformasi layanan publik secara digital, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang diwujudkan melalui program prioritas seperti SPBE Unggul, SINAR PELAYANAN, Menara Integritas Belitung, dan SAKIP Smart.

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Transformasi layanan publik secara digital	Arah kebijakan nasional tentang transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Belitung yang mengutamakan transformasi layanan publik secara digital, yang diimplementasikan melalui program prioritas seperti SPBE Unggul, SINAR PELAYANAN, dan Menara Integritas Belitung untuk menghadirkan layanan yang cepat, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah dan perangkat daerah	Keselarasannya diwujudkan melalui program prioritas seperti SAKIP Smart yang memastikan perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja, Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Opini WTP yang menjamin kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan, serta Menara Integritas Belitung yang mendorong budaya birokrasi bersih dan berintegritas. Program-program ini menjadi instrumen nyata dalam mengimplementasikan prinsip desentralisasi yang efektif dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan	Upaya mempersiapkan calon tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan kompetensi yang memadai, sehingga mereka mampu bersaing secara global dan bekerja di luar negeri dengan kondisi yang aman, terlindungi, dan sesuai standar. Dengan peningkatan kualitas SDM, risiko eksploitasi dan kerentanan pekerja migran dapat ditekan, sejalan dengan tujuan nasional untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi WNI di luar negeri.
Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	Keselarasannya ini dapat dilihat pada upaya bersama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, di mana penguatan infrastruktur di titik-titik strategis dapat mendukung pengawasan, deteksi dini, dan pelayanan publik yang mencegah peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, pembangunan sarana prasarana tidak hanya berfungsi untuk konektivitas dan pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai agenda P4GN.
Peningkatan Produktivitas BUMN	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Pengelolaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi dapat memungkinkan BUMD mengelola sumber daya lebih efektif, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha
Optimalisasi Pendapatan Negara	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi, sehingga tidak hanya memperkuat PAD tetapi juga mendukung penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Optimalisasi Belanja Negara	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan BUMD dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Ketika daerah mampu mandiri secara finansial, beban fiskal pemerintah pusat berkurang
Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan	Penyediaan pembiayaan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tentunya perlu pengembangan inovasi pembiayaan dengan harapan tidak bergantung pada anggaran belanja daerah melainkan dari sumber pendanaan lainnya yang lebih terjamin sehingga dapat berkelanjutan, akan tetapi sasaran penerima menjadi kewenangan daerah berdasarkan data kesejahteraan, prestasi dan lain sebagainya sehingga dapat adil dan tepat sasaran
Pengendalian Inflasi	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Peningkatan produktivitas sektor unggulan (seperti pangan dan energi) mengurangi ketergantungan impor, sehingga menekan inflasi
	Perluasan akses pasar dan pemasaran	Perluasan akses pasar dan pemasaran utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok dapat meminimalisir adanya kelangkaan barang pada sejumlah titik sehingga penyebaran bahan pokok dapat stabil
Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	berdasarkan program prioritas "Program Penguatan Karakter dan Pendidikan Moral" upaya pendidikan dasar dilakukan melalui Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. salah satunya berkaitan dengan keberagaman baik budaya, ras dan agama
Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	Kabupaten Belitung sebagai daerah yang memiliki potensi wisata tentu perlu menekankan pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagai pemenuhan aspek Attraction dalam pariwisata
Pembangunan Berketahanan Iklim	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Membangun ketahanan berbasis komunitas pada masyarakat yang sadar akan perubahan global sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam beradaptasi terhadap iklim dengan mengelola lingkungan secara berkelanjutan
	Penyediaan Infrastruktur Terpadu Antar Wilayah	penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang dapat meminimalisir terjadinya bencana hidrometeorologi
	Peningkatan Kualitas Pemetaan dan Penilaian Risiko Bencana	Pemetaan terhadap wilayah rentan iklim seperti rawan kekeringan, rawan banjir dan lain sebagainya
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Terpadu	Pengurangan emisi metana dari TPA dan sanitasi berkelanjutan mengurangi dampak perubahan iklim
Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana	Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana sebagai dasar dalam memitigasi dan mengelola risiko bencana

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 3.3 Keterhubungan Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung

Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Pemenuhan akses layanan pendidikan untuk wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Peningkatan akses pendidikan dasar meliputi layanan pendidikan usia 5-6 tahun, 7-12 Tahun dan 13-15 tahun sesuai dengan pembanggaan kewenangan yang dilimpahkan pada Kabupaten
Pemenuhan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)	Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan	Skema Pembiayaan meliputi Penyediaan beasiswa pada Siswa berprestasi untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, untuk meningkatkan kualifikasi profesional individu
Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	Peningkatan Mutu layanan salah satunya meliputi penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, green skills dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)		Memiliki Keterbatasan Kewenangan
Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi, eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), fasilitas komunal pendukung kesehatan, dan ruang terbuka hijau	Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat	Berfokus pada peningkatan mutu layanan dan kemudahan akses layanan, penguatan upaya promotif, preventif dan budaya hidup sehat telah masuk ke dalam mutu layanan yang tidak hanya bersifat layanan langsung tetapi juga layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga pola hidup sehat. akses layanan kesehatan juga meliputi akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi
Pemerataan akses pelayanan kesehatan universal		
Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	Meningkatkan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0 - 23 bulan; anak usia 24 - 59 bulan; Remaja Putri dan Catin; Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)	Arah kebijakan berorientasi dalam upaya percepatan penuntasan stunting

Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	peningkatan nilai budaya dilakukan melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan
Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat PPKS
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada penduduk usia kerja
	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Diperkuat melalui program prioritas bupati "Program INSPIRASI (Inisiatif Pemberdayaan Sosial dan Perempuan untuk Kesejahteraan Inklusif)"
Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Diperkuat melalui program prioritas bupati "Program INSPIRASI (Inisiatif Pemberdayaan Sosial dan Perempuan untuk Kesejahteraan Inklusif)"
Penguatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mengoptimalkan pemanfaatan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	Diperkuat melalui program prioritas "Program pengembangan ekonomi dan kesejahteraan" Mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan
Penerapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dalam rangka menciptakan kerukunan antara etnis, agama dan golongan
Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Penguatan Kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi mikro, kecil dan menengah
	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan pada sektor ekonomi kreatif
	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif	Pelatihan kompetensi SDM yang inklusif sebagai upaya dalam mendukung graduasi kemiskinan dan menumbuhkan usaha baru

Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	Penyediaan permukiman yang layak dan terjangkau
	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	Peningkatan akses di kawasan strategis dalam mendukung tumbuhnya perekonomian serta penyediaan permukiman layak
Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Modernisasi sektor perkebunan, pertanian dan kelautan dalam mendukung ketahanan pangan
Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi pesisir dan pulau-pulau kecil guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah afirmasi, pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan dimensi pengembangan 8A (<i>Attraction, Amenity, Aksesibility, Activity, Accommodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi</i>) pariwisata	Optimalisasi berbagai aspek dalam mendukung potensi pariwisata di Kabupaten Belitung
	Meningkatkan promosi investasi	
	Peningkatan infrastruktur untuk investasi	
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan	
	Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel	
	Peningkatan infrastruktur konektivitas	
	Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	
	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	
Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Penguatan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Kualitas ASN pemerintah daerah
	Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan profesional
Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Penguatan tata kelola Pemerintah Digital	Peningkatan implementasi Pemerintahan digital
	Penguatan teknologi Pemerintah Digital	
	Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data	

Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
	Transformasi layanan publik secara digital	
	Mengintegrasikan pengelolaan manajemen ASN dengan teknologi informasi	
	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	
Penguatan pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (Smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca dan lainnya)	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Modernisasi sektor pertanian serta program pertanian berkelanjutan
	Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor unggulan	Peningkatan infrastruktur sektor pertanian serta teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian
Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya perikanan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi perikanan terapan kontemporer	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Modernisasi sektor Perikanan
	Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor unggulan	Peningkatan infrastruktur sektor perikanan serta teknologi Perikanan dan pengolahan hasil Perikanan
Penguatan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan yang didukung pada penguatan industrialisasi
	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Penguatan Kelembagaan pendukung sektor unggulan, salah satunya berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi dan inovasi
Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan dimensi pengembangan 8A (<i>Attraction, Amenity, Aksesibility, Activity, Accommodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi</i>) pariwisata	Optimalisasi berbagai aspek dalam mendukung potensi pariwisata di Kabupaten Belitung
	Peningkatan infrastruktur konektivitas	
	Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	
	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	

Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Meningkatkan promosi investasi	Meningkatkan promosi melalui kemudahan deregulasi dan perizinan serta tata kelola investasi utamanya dalam mendukung sektor pariwisata dan sektor unggulan lainnya
	Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel	
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan	Peningkatan Kualitas Tenaga kerja dalam mendukung peningkatan ekosistem perekonomian yang berorientasi terhadap peningkatan daya tarik investasi
Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> untuk menginterkoneksi antar kawasan strategis terutama kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan infrastruktur konektivitas	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Belitung
	Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	
	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	
Penyediaan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDIKA nasional yang berdaya saing di tataran global	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Menciptakan ekosistem Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja melalui upaya peningkatan riset dan inovasi daerah
	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	
Penataan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Pemberdayaan dan Kerjasama masyarakat peduli lingkungan dalam menjaga kelestarian ekosistem alami darat dan laut
Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lahan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir dan laut	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah melalui tata ruang	Percepatan penyusunan rencana detail tata ruang dalam rangka optimalisasi perencanaan tata ruang sebagai acuan dalam mendukung upaya untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan idup
Penyiapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat
Peningkatan ketahanan energi	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	Peningkatan infrastruktur kota dan kawasan strategis modern yang ramah lingkungan (pembangkit listrik tenaga surya, angin dsb)
	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan	

Arah Kebijakan Provinsi Bangka Belitung	Arah Kebijakan Kabupaten Belitung	Keterhubungan
Pengurangan risiko bencana	Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana	Kualitas pemetaan dan penilaian resiko yang ditindaklanjuti melalui upaya dalam rangka melakukan mitigasi dan upaya mengurangi dampak kerugian akibat bencana

Sumber: Data diolah, 2025

Arah kebijakan merupakan penekanan atas kebijakan yang menjadi prioritas dalam melaksanakan strategi. Sehingga pentahapan yang ditetapkan tidak menjabarkan bahwa uraian arah kebijakan dilaksanakan atau tidak akan tetapi menjabarkan bahwa pada tahapan perencanaan di tahun tertentu diprioritaskan atau tidak. Adapun diantara arah kebijakan pembangunan seringkali memiliki relevansi atas arah kebijakan yang lainnya. Keterhubungan tersebut dapat bersifat prasyarat bagi arah kebijakan lainnya ataupun menjadi runtutan atas pelaksanaan strategi. Disisi lain terdapat arah kebijakan yang menjadi penekanan atas isu utama pembangunan daerah yang tidak dapat diselesaikan melalui pentahapan satu tahun sampai dengan lima tahun sehingga arah kebijakan tersebut dilaksanakan diseluruh tahapan pembangunan dalam RPJMD.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan

Kode			Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
Misi	Strategi	No		2026	2027	2028	2029	2030
1	1	1	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif	✓	✓	✓		
1	1	2	Peningkatan peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak	✓	✓	✓		
1	1	3	Penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
1	2	1	Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓		
1	3	1	Meningkatkan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0 - 23 bulan; anak usia 24 - 59 bulan; Remaja Putri dan Catin; Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)	✓	✓			
1	4	1	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan ketrampilan yang inklusif			✓	✓	✓
1	4	2	Meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	1	Peningkatan infrastruktur untuk investasi	✓	✓	✓		
2	1	2	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan		✓	✓	✓	✓
2	1	3	Peningkatan tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel	✓	✓			
2	1	4	Meningkatkan promosi investasi			✓	✓	✓
2	2	1	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan			✓	✓	✓
2	2	2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	✓	✓	✓		

Kode			Arah Kebijakan	Tahap Pembangunan				
Misi	Strategi	No		2026	2027	2028	2029	2030
2	2	3	Perluasan akses pasar dan pemasaran				✓	✓
2	2	4	Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor unggulan	✓	✓	✓		
2	3	1	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan	✓	✓			
2	3	2	Peningkatan dimensi pengembangan 8A (<i>Attraction, Amenity, Aksesibiity, Activity, Accomodation, Ancillary/layanan tambahan, Agency/travel agency, Asuransi</i>) pariwisata			✓	✓	✓
3	1	1	Penguatan tata kelola Pemerintah Digital			✓	✓	✓
3	1	2	Penguatan teknologi Pemerintah Digital			✓	✓	
3	1	3	Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data	✓	✓	✓		
3	2	1	Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah dan perangkat daerah	✓	✓	✓	✓	✓
3	2	2	Peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓
3	2	3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓
3	2	4	Transformasi layanan publik secara digital			✓	✓	✓
3	2	5	Penguatan kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓
3	2	6	Peningkatan kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	✓	✓	✓	✓	✓
3	3	1	Mengintegrasikan pengelolaan manajemen ASN dengan teknologi informasi	✓	✓	✓		
3	4	1	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	1	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar	✓	✓	✓		
4	1	2	Peningkatan infrastruktur konektivitas	✓	✓	✓		
4	1	3	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan			✓	✓	✓
4	1	4	Peningkatan infrastruktur permukiman yang layak			✓	✓	✓
4	2	1	Penyediaan infrastruktur terpadu antar wilayah	✓	✓	✓		
4	2	2	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah melalui tata ruang	✓	✓	✓	✓	
4	2	3	Peningkatan akses dan/atau sarana prasarana di kawasan strategis	✓	✓	✓		
4	3	1	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu			✓	✓	✓
4	3	2	Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan			✓	✓	✓
4	4	1	Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana	✓	✓	✓		

Berdasarkan arah kebijakan yang di jabarkan di atas, maka disusunlah penahapan pembangunan tiap tahunnya selama 1 periode kepemimpinan Bupati terpilih. Penahapan pembangunan sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan Sektor Unggulan Daerah melalui Inovasi dan Hilirisasi Industri secara Berkelanjutan	Penguatan Perekonomian dan Pariwisata dengan Pemanfaatan Potensi Lokal dan Ekonomi Kreatif Berbasis Inovasi	Integrasi Daya Saing SDM, Transformasi Ekonomi Digital, dan Inovasi Layanan Publik untuk Kesejahteraan	Akselerasi Pembangunan Menuju Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan	Konsolidasi Pembangunan Menuju Perekonomian yang kuat dan Masyarakat yang Sejahtera
Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dipacu dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, termasuk penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup serta penyediaan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan wilayah terpencil.	Pemda mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, pertanian modern, dan ekonomi kreatif. Hilirisasi sumber daya alam akan diperkuat untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal dan kewirausahaan masyarakat.	Pembangunan difokuskan pada integrasi antara peningkatan kualitas SDM, pemantapan ekonomi lokal, dan pengembangan inovasi berbasis digital. Digitalisasi layanan publik dan ekosistem ekonomi digital akan ditingkatkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mendorong produktivitas daerah. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.	Percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang sudah ada dan berkembang serta menggali potensi baru dengan memperkuat penelitian dan pengembangan, memberdayakan inovasi masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi. Memperkuat jejaring pembangunan berbasis <i>pentahelix</i> (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media). Serta memperluas rantai perdagangan secara nasional dan global.	Melakukan konsolidasi seluruh capaian pembangunan selama lima tahun terakhir dengan memperkuat kelembagaan, memastikan keberlanjutan program prioritas, serta meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahun ini juga menjadi momentum untuk mendorong kemandirian daerah sebagai Kabupaten Belitung yang maju, inovatif, dan berkelanjutan.

3.2.3 Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program strategis yang perlu dilaksanakan oleh pengampu suatu urusan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Sehingga program prioritas yang ditentukan diharapkan dapat mampu memberikan daya ungkit untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut merupakan Program Prioritas Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung:

Tabel 3.6 Program Prioritas

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program														
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator																					
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera																									
1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1.1.a Indeks Modal Manusia	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1.1.1.a Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	1. Program Cerdas (Cipta edukasi ramah daerah sepanjang hayat) Berkarakter untuk semua	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pendidikan melalui optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan Paud, SD, SMP, dan Kesetaraan (Pusat kegiatan belajar masyarakat)	Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun	1. Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 2. Persentase murid SD tidak mampu yang menerima bantuan biaya personil sesuai data DTSEN														
																Pendidikan	Dinas Pendidikan								

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
							dan Kebudayaan n	Pemerataan Tenaga Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	distribusi pendidikan dan tenaga kependidikan	2. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
						Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak	Dinas Sosial dan Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak	Pemenuhan Hak anak, Kasus Bullying dll, mengupaya kan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tetap mendapatkan pendidikan	1. Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak secara bertahap dan merata di seluruh wilayah	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) (5 kluster)
									2. Perlindungan Khusus Anak		
						Sosial	Dinas Sosial dan Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak	PMKS yang belum terdata di DTKS yang semestinya mendapatkan akses layanan pendidikan/ Bantuan Akses sekolah (PKH)	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabioitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
											Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
						Perhubung an	Dinas Perhubung an	Layanan Bus Sekolah	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas kelengkapan jalan	Persentase tersedianya kelengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
											Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik
											Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik
											Persentase layanan angkutan yang terpenuhi

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
				1.1.1.b Harapan Lama Sekolah (tahun)		Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Membangun budaya baca masyarakat dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. Persentase (%) Pengelolaan Perpustakaan sesuai standar
						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat	Penguatan pemahaman keluarga terhadap pentingnya pendidikan dengan pembangunan keluarga (8 fungsi keluarga) yang salah satunya pendidikan	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Pemahaman Keluarga terhadap Pentingnya Pendidikan	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspagar) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar)						
Sekretariat Daerah (Kesejahteraan Rakyat)	Sekretariat Daerah	Koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan	1. Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti						
										2. Persentase rekomendasi kebijakan bagian	

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program	
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator								
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera												
			1.1.2 Meningkatny a Kualitas Kesehatan	1.1.2.a Usia Harapan Hidup (tahun)	2. Program Gerbang Sehat (Gerakan Pembangunan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Terintegrasi)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas layanan Kesehatan	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	kesejahteraan rakyat	kesejahteraan yang ditindaklanjuti	
										3. Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Hukum yang ditetapkan		
										Berkurangnya intensitas kejadian penyakit menular dan tidak menular	1. Persentase penyakit menular	
										Berkurangnya Angka Kesakitan dan Kematian Ibu dan Anak	2. Persentase penyakit tidak menular	
										Meningkatnya efektivitas sistem pelayanan rujukan	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB)	
										2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kasus rujukan yang. Benar dan tepat waktu	
										3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sesuai kompetensi
										4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tercatat dan terdaftar secara resmi
										5. Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat pada perilaku hidup kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat
										Meningkatnya fasilitas kesehatan terakreditasi	Persentase Puskesmas, Laboratorium KEsehatan Daerah dan Rumah Sakit Kelas B terakreditasi Paripurna	

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberday aan Desa dan Masyarakat	Kesehatan Reproduksi	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 2. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
						1.1.3 Menurunnya prevalensi stunting	1.1.3.a Prevalen si Stunting	3. Program Siaga Stunting (Sinergi Aksi Gizi Anak Untuk Penurunan Stunting Terintegrasi)	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Menjaga stok pangan
			Mengurangi kerawanan pangan di tingkat desa	Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya daerah rawan pangan						Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Persentase Daerah Rawan Pangan yang diintervensi
			Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatkan layanan stunting dengan mendorong peran ibu hamil untuk memeriksa kesehatan				1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Berkurangnya intensitas kejadian penyakit menular dan tidak menular	1. Persentase penyakit menular 2. Persentase penyakit tidak menular
										Berkurangnya Angka Kesakitan dan Kematian Ibu dan Anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB)
										Meningkatnya efektivitas sistem pelayanan rujukan	Persentase kasus rujukan yang. Benar dan tepat waktu
										2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Pemberda yaan masyaraka t dan desa	Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberday aan Desa dan Masyarakat	Pemberdayaa n masyarakat kelompok rentan terhadap stunting	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)
						Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberday aan Desa dan Masyarakat	Penyediaan Informasi dan Data Catin untuk Pengendalian Stunting	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 2. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
						Sosial	Dinas Sosial dan Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak	Penguatan PKH (stunting)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar 2. Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 3. Persentase pengelolaan pendataan fakir miskin 4. Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan
		1.1.b Tingkat	1.1.4 Meningkatny	1.1.4a Pengelu	4. Program "INSPIRASI"	Sosial	Dinas Sosial dan	Pemberdayaa n Masyarakat	Perlindungan dan Jaminan Sosial		1. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program						
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator													
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera																	
		Kemiskinan (%)	a pemerataan dan pendapatan masyarakat	aran per kapita	(Inisiatif Pemberdayaan Sosial dan Perempuan untuk Kesejahteraan Inklusif)		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dalam pengembangan ekonomi		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	2. Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi						
									3. Persentase pengelolaan pendataan fakir miskin								
				1.1.4.b Tingkat Pengangguran Terbuka		Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga kerja	Menyelenggarakan pelatihan kompetensi, dengan fokus pada sektor pariwisata	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi						
												Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
												1.1.4.c Indeks Gini					

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial	2.1 Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	2.1.a Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.1.1 Meningkatnya investasi daerah	2.1.1.a Nilai investasi (tahun berkeadilan) (dalam juta) (PMDN dan PMA)	5. Program "SINERGI INVESTASI" (Sinergi Pengembangan Infrastruktur dan Pasar untuk Menarik Investasi dan Meningkatkan Kesetaraan Harga)	Penanaman modal	DPMPTSP	Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha Rencana induk penanaman modal Fasilitasi penyediaan data potensi dan peluang investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya iklim penanaman modal	Realisasi total terhadap target investasi
								Peningkatan promosi investasi	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
						Perindustrian	DPMPTSP	Melaksanakan hilirisasi untuk komoditas unggulan kabupaten	Perencanaan danPembangunan Industri	Meningkatnya hilirisasi sumber daya alam	Persentase realisasi investasi sektor industri (hilirisasi)
						Sekretariat Daerah (ekonomi)	Sekretariat Daerah	Koordinasi dan rekomendasi perizinan investasi	Perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	1. Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Perekonomian SDA yang ditindaklanjuti
											2. Persentase kebijakan Program Pembangunan Daerah yang dievaluasi
											3. Indeks tata kelola Pengadaan Barang Jasa

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
			2.1.2 Meningkatny a pertumbuha n sektor Prima	2.1.2.a Pertumb uhan Sektor Prima (pertania n, perikana n dan perkebu nan)	6. Program Daerah "Prima Unggul" untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Prima	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Menjaga ketersediaan sarana pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (padi dan cabai)
										Meningkatnya produksi perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan (lada dan sawit)
										Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi komoditas peternakan (sapi dan ayam)
										Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian	Persentase pendampingan kelompok tani yang menerima sarana pertanian
						Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Pemenuhan prasarana perkebunan dan peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian yang memadai	Persentase luas lahan pertanian yang dikelola Persentase prasarana peternakan yang tekelola Luas areal perkebunan yang mendapatkan pendampingan
										Meningkatnya kemampuan penangkapan ikan oleh nelayan	Jumlah produksi perikanan tangkap
										Meningkatnya keterserapan produk olahan perikanan	Angka konsumsi ikan

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
								pada keluarga nelayan			
								Pemberdayaa n pembudidaya ikan khususnya perikanan budidaya laut dan air payau	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya laut dan air payau	Jumlah produksi perikanan budidaya
										Meningkatnya produksi benih ikan	Jumlah produksi benih ikan
						Koperasi UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga kerja	Pemberdayaa n melalui PLUT	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro
								Memfasilitasi expo/bazar	Pengembangan UMKM	Terjalinnya kerja sama antar pelaku UMKM	Persentase Pengembangan usaha mikro
								Memberikan pelatihan tatakelola administrasi perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu
								Mendorong koperasi untuk aktif melaksanakan RAT	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya ketepatan waktu koperasi dalam penyelenggaraan RAT	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu
						Perdagang an	Dinas Koperasi dan UMKM,	Melaksanakan tera dan tera ulang	Standarisasi dan perlindungan konsumen	Terjaganya hak konsumen	Cakupan pengawasan pada alat tera

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program	
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator								
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera												
							Perdagangan dan Tenaga kerja	Rehabilitasi pasar/sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi yang memadai	Pasar Representatif	
								Operasi pasar dan pengawasan bahan pokok dan barang penting lainnya	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Laporan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	
			2.1.3 Meningkatkan Kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	2.1.3.a Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kota	7. Program Pariwisata Unggul,	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Kolaborasi dengan konten kreator Meningkatkan skala promosi pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	
								Standarisasi destinasi pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	
								Industri kreatif diarahkan pada kuliner, konten creator, fotografi	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata yang aktif dan tervalidasi	
							Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi					
											Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian cagar	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan			

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program	
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator								
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera												
										budaya dan warisan budaya		
										Meningkatnya prestasi Olahraga		1. Persentase kualitas pembinaan atlet berprestasi
												2. Persentase kualitas pembinaan pelatih bersertifikasi
						Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan event olahraga dengan mengembangkan olahraga rekreasi, Pengembangan olahraga wisata tantangan dan petualangan (belitung geopark marathon, beach run, dan golf), Permassalan olahraga (meningkatkan minat olahraga untuk mendukung gernas, belitung bugar dan segar) dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan olahraga	Persentase kualitas pembinaan penggiat olahraga rekreasi	

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Perhubung an	Dinas Perhubung an	Meningkatnya Aksesibilitas Wisatawan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Perhubungan Darat	1. Persentase tersedianya kelengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota 2. Persentase Sarana dan Prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik 3. Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik 4. Persentase layanan angkutan yang terpenuhi
3. Mewujudkan Tata kelola Pemerintaha n yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	3.1 Meningkatny a tata kelola pemerintaha n yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	3.1.a Indeks reformasi birokrasi	3.1.1 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	3.1.1.a Indeks Pemerint ah Digital	8. Program SPBE Unggul	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Aplikasi dan SDM Teknologi Informasi.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya layanan aplikasi dan informatika	Persentase layanan penyelenggaraan aplikasi informatika yang dikelola dengan baik Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
						Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Kualitas Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks KAMI (Kematangan Keamanan Informasi) Persentase layanan persandian untuk pengamanan informasi
						Kearsipan	Dinas Perpustak aan dan Kearsipan	Pengoptimala n arsip dan surat menyurat secara digital	Pengelolaan Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip
					3.1.1.b Nilai SAKIP	9. Program Prioritas Daerah:	Perencana an	Bapperida	Kualitas perencanaan,	1. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya kualitas perencanaan

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
				"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berkbasis Kinerja dan Akuntabilitas (SAKIP Smart)"				pengendalian dan pelaporan	Pembangunan Daerah	pembangunan daerah	
									2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan Reenstra Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
										Meningkatnya kualitas perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan Reenstra Perangkat Daerah pada bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
										Meningkatnya kualitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan Reenstra Perangkat Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan
					Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Harmonisasi tugas fungsi dan kelembagaan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah)	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	
									Meningkatnya kematangan organisasi pemerintah daerah	Persentase pelaksana kebijakan penataan organisasi	
				3.1.1.c Indeks Pengelol	10. Program Prioritas Daerah:	Kuangan	Badan Pengelolaa n Keuangan	1. Perencanaan anggaran	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
			aan Keuanga n Daerah	"Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Opini WTP"		dan Aset Daerah	penata usaha belanja serta akuntansi 2. Peningkatan pengelolaa aset milik daerah			ketentuan yang berlaku	
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesui dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	
			3.1.1.d Indeks Pelayana n Publik	11. Program "SINAR PELAYANAN" (Sinergi Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi untuk Pelayanan Prima)	Ketentram an dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Penegakan Perda dan Perkada	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		1. Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu serta perlindungan masyarakat
											2. Persentase Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan
										Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase penegakan pelanggaran Perda dan Perkada
			Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan cakupan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase capaian pendaftaran penduduk			
						2. Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase capaian pencatatan sipil			
						3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan			
						4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan			

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Pendukung Urusan Pemerintah an	Sekretariat DPRD	Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N
										Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
						Penanama n modal	DPMPTSP	Mempermuda h akses perizinan	Pelayanan penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
						Penunjang Fungsi Kewilayah an	Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
									Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi urusan pemerintahan umumsecara efektif dan efisien	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
									Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi
								3.1.1.e Tingkat Maturita s SPIP		Pengawas an	Inspektorat

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
								manajemen risiko			pengawasan/pemeriksaan pada wilayah Irban II 3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan pada wilayah Irban III 4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan pada wilayah Irban pencegahan dan investigasi
								Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		1. Persentase jumlah pelayanan consulting yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban I
											2. Persentase jumlah pelayanan consulting yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban II
											3. Persentase jumlah pelayanan consulting yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban III
											4. Persentase jumlah pelayanan consulting yang diberikan di bidang pengawasan pada wilayah Irban pencegahan dan investigasi
								Peningkatan implementasi sistem merit	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian	1. Persentase pengisian berdasarkan forasi kebutuhan (PMDI)
			3.1.2 Terwujudnya Profesionalitas ASN	3.1.2.a Indeks profesionalitas ASN	12. Program "Menara Integritas Belitung"	Kepegawaian	BKPSDM				2. Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (PK)
											3. Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja baik
										Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	Peningkatan kualifikasi ASN melalui diklat teknis dan diklat kepemimpinan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional.
						Penunjang	Sekretariat Daerah	Penyesuaian beban kerja dan tunjangan kinerja	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai kematangan organisasi pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan kebijakan penataan organisasi
			3.1.3 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	3.1.3.a Rasio kemandirian fiskal	13. PAD KUAT (Program Penguatan Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah)	Kuangan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)	Optimalisasi peningkatan PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Penunjang	Sekretariat Daerah	Koordinator Kebijakan pengelolaan aset dan potensi daerah yang menunjang peningkatan PAD	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti			
4. Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara	4.1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	4.1.a Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	4.1.1 Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	4.1.1.a Indeks Pembangunan Infrastruktur	14. Program "KOTAKITA" (Kota Tertata, Inklusif, dan Tangguh)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten
					2. Optimalisasi Green Infrastruktur						

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
merata dan Berkelanjutan								3. Infrastruktur Jalan Ramah Disabilitas			
								4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Berbasis pada Tata Ruang			
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1. Peningkatan dan pemeliharaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
								2. Optimalisasi Green Infrastruktur			
								3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Berbasis pada Tata Ruang			
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Layanan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
								2. Optimalisasi Green Infrastruktur			
Pekerjaan Umum dan	1. Peningkatan dan pemeliharaan	Program Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Sanitasi	Persentase rumah tangga dengan sistem pengolahan							

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program	
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator								
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera												
						Penataan Ruang		infrastruktur air Limbah			limbah domestik yang aman	
								2. Optimalisasi Green Infrastruktur				
						Perumahan dan Permukiman		1. Peningkatan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase PSU dalam Kondisi Baik	
								2. Optimalisasi Green Infrastruktur				
						Perhubungan		Dinas Perhubungan	1. Peningkatan kualitas dan penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kualitas kelengkapan jalan	1. Persentase tersedianya kelengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
									2. Angkutan dan Sarana prasarana Perhubungan Darat Inklusif			2. Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik
												3. Persentase sarana da prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik
												4. Persentase layanan angkutan yang terpenuhi
									1. Peningkatan kualitas dan penataan Perhubungan Laut	Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Perhubungan Laut	1.Persentase tersedianya Sarana dan prasarana Perhubungan Laut
									2. Angkutan dan Sarana prasarana			2. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam Kondisi baik

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program				
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator											
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera															
					15. Program "RUPAKOTA" (Revitalisasi dan Penataan Ruang Kota Terpadu)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perhubungan Laut Inklusif	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang				
								2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Tata Ruang			Persentase kesesuaian tata ruang				
								Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Pembangunan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas (Inklusif)	Penataan Bangunan dan Gedung	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Standar
												2. Meningkatnya Ketangguhan Bangunan/Infrastruktur (Tangguh)			
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi				
								2. Meningkatnya Ketangguhan Bangunan/Infrastruktur (Tangguh)			Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten				

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menurunkan Kawasan Kumuh	Kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
						Perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni
			4.1.2 Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	4.1.2.a Indeks Kesulitan geografis	16. Program "BANGUN LESTARI" (Pembangunan Infrastruktur Aksesibel dan Ramah Lingkungan Berkelanjutan)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Infrastruktur jalan pada wilayah sulit geografis	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Infrastruktur Drainase pada wilayah sulit geografis	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Drainase	Persentase Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Infrastruktur air minum pada wilayah sulit geografis	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Layanan Air Minum	Persentase rumahtangga yang mendapatkan akses Air Minum Aman
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Infrastruktur air limbah pada wilayah sulit geografis	Program Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan TPA dan TPS 3R	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya keberfungsian tempat pengelolaan sampah regional	Persentase TPST, TPS, dan TPS 3R yang layak fungsi
						Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada wilayah sulit geografis	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase PSU dalam Kondisi Baik
						Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peningkatan kualitas aksesibilitas Transportasi Darat pada wilayah sulit geografis	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kualitas kelengkapan jalan	1. Persentase tersedianya Kelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
											2. Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik
											3. Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik
											4. Persentase layanan angkutan yang terpenuhi
							Peningkatan kualitas aksesibilitas Transportasi Laut pada wilayah sulit geografis	Program Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Perhubungan Laut	1. Persentase tersedianya Sarana dan prasarana Perhubungan Laut	
			2. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam Kondisi baik								
17. Program "INFRASEJAHTERA" (Infrastruktur Sejahtera)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Optimalisasi dana desa dalam pembangunan	Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang baik,	Persentase aparat desa dan anggota BPD ditingkatkan kapasitasnya					

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
					untuk Masyarakat Desa Berdaya)		Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	infrastruktur desa		transparan, dan akuntabel	
		4.1.b Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	4.1.3 Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	4.1.3.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	18. Program "Belitung Lestari Aksi Sadar Lingkungan"	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
						Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam Mengelola lingkungan	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Penghargaan terhadap masyarakat peduli lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pebhargaan lingkungan hidup
						Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan pengendalian Kerusakan Lingkungan	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Belitung
						Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
					19. Program "Sinergi Hijau Belitung: Masyarakat Garda Terdepan Lingkungan" (SIHITUNG)	Lingkungan n Hidup	Dinas Lingkunga n Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya
					20. Program "SIRAM" (Sumber Daya Air yang Ramah dan Berkelanjutan)	Lingkunga n Hidup	Dinas Lingkunga n Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga sumber daya air	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola dengan baik
					21. Program "BERSIH" (Bangun Infrastruktur dengan Energi Ramah, Sehat, Inovatif, dan Hijau)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya bangunan dan gedung laik fungsi	Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Standar
						Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase PSU dalam Kondisi Baik
						Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
				4.1.3.b Indeks Resiko Bencana	22. Program "TANGGUH BENCANA" (Tumbuh Tanggap, Unggul dalam Mitigasi Bencana)	Perhubung an	Dinas Perhubung an	Meningkatnya infrastruktur ramah lingkungan, sehat dan inovatif	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan	Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik
						Ketentram an dan Ketertiban umum Serta Perlindung an Masyarakat	BPBD	Meningkatnya Kesadaran, Kewaspadaan dan kesiapsiagaan Masyarakat dan Seluruh Stakeholder dalam Menghadapi Bencana	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan keasipsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
										Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana
										Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana
						Ketentram an dan Ketertiban umum Serta Perlindung an Masyaraka t	BPBD	Meningkatnya Ketercapaian SPM Kebencanaan dan Pemberdayaa n Masyarakat, Tersusunnya Dokumen Kebencanaan.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan nonkebakaran
										Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM BUPATI	Urusan	Perangkat Daerah	Fokus Program	Program	Outcome	Indikator Program
	Narasi	Indikator	Narasi	Indikator							
Visi : Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat Dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera											
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kesesuaian bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan konsep tata ruang	Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Standar
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rumah, Bangunan dan Gedung sesuai tata ruang dan tidak berada pada daerah rawan bencana	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang
											Persentase kesesuaian tata ruang
						Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi pada wilayah rawan bencana	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya layanan penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana Persentase penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah

3.2.4 Kegiatan Prioritas dan Proyek Strategis

Mengacu pada program prioritas bupati sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka perlu kiranya dirumuskan rincian atas tejemahan janji politik tersebut. Uraian dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang fokus intervensi beserta indikasi Lokasi yang menjadi prioritas Pembangunan. Berikut merupakan kegiatan prioritas dan proyek strategis mengacu pada Program prioritas bupati Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7 Kegiatan Prioritas dan Proyek Strategis

PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Program Cerdas (Cipta edukasi ramah daerah sepanjang hayat) Berkarakter untuk semua	1. Peningkatan akses layanan pendidikan	1.1 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SD	Membalong		6 unit	6 unit	8 unit	9 unit	9 unit
			Tanjungpandan		18 unit	20 unit	21 unit	21 unit	21 unit
			Badau		3 unit	3 unit	5 unit	6 unit	6 unit
			Selat Nasik		3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	-
			Sijuk		3 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit
		1.2 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SMP	Membalong		3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
			Tanjungpandan		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
			Badau		2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
			Selat Nasik		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
			Sijuk		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
		1.3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Tanjungpandan		3 unit	9 unit	10 unit	10 unit	10 unit
		1.4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Membalong		-	1 unit	1 unit	1 unit	-
			Tanjungpandan		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit
		1.5 Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang SD	TanjungPandan		260 orang	275 orang	285 orang	295 orang	305 orang
			membalong		75 orang	85 orang	95 orang	105 orang	115 orng
			Sijuk		80 orang	85 orang	95 orang	105 orang	115 orang
			Badau		60 orang	70 orang	80 orang	90 orang	100 orng
			Selat Nasik		25 orang	35 orang	45 orang	55 orang	65 orang
		1.6 Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang SMP	Membalong		50 orang	60 orang	70 orang	80 orang	90 orang
			Tanjungpandan		300 orang	310 orang	320 orang	330 orang	340 orang
			Sijuk		90 orang	100 orang	110 orang	120 orang	130 orang
			Badau		40 orang	50 orang	60 orang	70 orang	80 orang
			Selat Nasik		20 orang	30 orang	40 orang	50 orang	60 orang
		1.7 Beasiswa S1 Penuh Perguruan Tinggi	Luar Kabupaten Belitung	22 orang	22 orang	22 orang	2 orang	2 orang	-
			Luar Kabupaten Belitung	-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
2. Program Gerbang Sehat (Gerakan Pembangunan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Terintegrasi)	1. Peningkatan akses layanan kesehatan	1.1 Pembangunan Puskesmas	Kec. Selat Nasik	✓		✓			
			Kec. Badau				✓		
		1.2 Peningkatan akses layanan kesehatan	Semua kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Semua kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.3 Peningkatan tipe RSUD H. Marsidi Djudono	Tanjungpandan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Program Siaga Stunting (Sinergi Aksi Gizi Anak Untuk Penurunan Stunting Terintegrasi)	1. Penurunan Prevalensi Stunting 15,1 tahun 2029	1.1 Upaya peningkatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat (dinas Kesehatan)	Semua desa di semua kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.2 Peningkatan Pendampingan Keluarga berisiko Stunting (Program Genteng "Gerakan orang tua asuh cegah stunting")	Total keluarga Desil 1 risiko stunting dan miskin ekstrem		535 orang	535 orang	535 orang	535 orang	535 orang
			Tanjungpandan		208 orang	208 orang	208 orang	208 orang	208 orang
			Membalong		84 orang	84 orang	84 orang	84 orang	84 orang
			Sijuk		93 orang	93 orang	93 orang	93 orang	93 orang
			Badau		64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang
			Selat Nasik		86 orang	86 orang	86 orang	86 orang	86 orang
4. Program "INSPIRASI" (Inisiatif Pemberdayaan Sosial dan Perempuan untuk Kesejahteraan Inklusif)	1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja	1.1 Pelatihan tenaga kerja	Semua kecamatan	42 orang	32 orang	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang
		2.1 Bantuan sosial kepada kelompok rentan	Semua kecamatan	10 keluar ga	10 keluar ga	10 keluar ga	10 keluar ga	10 keluar ga	10 keluar ga
		2.2 Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat	Semua kecamatan	5 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
		2.3 Peningkatan produktivitas perempuan	Semua kecamatan	21 lemb a ga	21 lemb a ga	21 lemb a ga	21 lemb a ga	21 lemb a ga	21 lemb a ga
		2.4 Bantuan kepada anak yatim piatu	Semua kecamatan		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
5. Program "SINERGI INVESTASI" (Sinergi Pengembangan Infrastruktur dan Pasar untuk Menarik dan Meningkatkan Kesetaraan Harga)	1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	1.1 Revitalisasi Pasar Ikan Tanjungpandan	Tanjungpandan	✓	✓	✓			
		1.2 Revitalisasi Pasar Berehun	Tanjungpandan			✓			
	2. Pengendalian harga bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya	2.1 Pengawasan peredaran bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya	Semua Kecamatan		✓	✓	✓	✓	
		3.1 Penyusunan rencana umum penanaman modal kabupaten (RUPMK Kab 2025-2045)	Tanjungpandan		✓				
		3.2 Penyusunan Peta potensi investasi daerah	Tanjungpandan			✓			
	3. Peningkatan perencanaan dan iklim investasi daerah	3.3 Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan investasi	Seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	
		4.1 Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Belitung dan di luar daerah	✓	✓	✓	✓	✓	
		4.2 Penyusunan strategi Penanaman Modal	Tanjungpandan				✓		
	5. Percepatan Pengembangan	5.1 Penyusunan Dokumen RIPIK	Tanjungpandan	✓	✓				



PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kawasan Industri SUGE								
		5.2 Pembentukan pengelola kawasan industri	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong		✓				
		5.3 Penetapan kawasan industri SUGE	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong		✓	✓			
6. Program Daerah "Prima Unggul" untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Prima	1. Peningkatan Produksi Sektor Perikanan	1.1 Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Tambat Labuh	Kec. Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Selat Nasik			✓	✓	✓	✓
		1.2 Pembangunan Pabrik Es di Selat Nasik	Ds. Selat Nasik			✓			
		1.3 Budidaya Ikan Kerapu	Pegantungan, Lassar, Tg. Rusa, Selat Nasik		✓	✓	✓	✓	
		1.4 Budidaya udang vaname	Seliu, Membalong, Padang Kandis, Lassar			✓	✓	✓	
	2. Swasembada pangan	2.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	Badau, Tanjungpandan, Sijuk, Membalong		✓	✓	✓	✓	
		2.2 Optimalisasi lahan sawah yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Badau, Tanjungpandan, Sijuk, Membalong		✓	✓	✓	✓	
		2.3 Pembangunan dan Peningkatan sumber benih pertanian	Badau, Ds. Cerucuk, Ds. Aik Seru			✓	✓	✓	
		2.4 Peningkatan Produksi Peternakan	Seluruh kecamatan		✓	✓	✓	✓	
		2.5 Peningkatan Produksi Pertanian	Seluruh kecamatan			✓	✓	✓	
	3. Peningkatan Koperasi dan UMKM	3.1 Pembentukan dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih	Seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.2 Peningkatan Pertumbuhan Usaha Mikro	Seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.3 Peningkatan pengembangan usaha mikro	Seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	
7. Program Pariwisata Unggul	1. Pembangunan destinasi wisata terpadu	1.1 Pengembangan Destinasi wisata Kawasan Pantai Tanjungpandan	Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	✓
		1.2 Wisata alam: Batu Mentas, Pantai Merida	Kec. Badau, sijuk dan Membalong			✓	✓	✓	✓
		1.3 Wisata bahari: Kawasan sekitar KEK Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Tinggi,	Kec. Sijuk, Membalong, Selat Nasik		✓	✓	✓	✓	✓



PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pulau Lengkuas dan sekitarnya, Pantai Pasir Panjang, Pulau Batu Dinding, Tanjung Lancor							
		1.4 Agrowisata: Festival Durian, Agrowisata Desa Mentigi (Buah Naga dan Jambu Kristal)	Kec. Membalong, Sijuk dan Selat Nasik			✓	✓	✓	✓
		1.5 Wisata budaya: Pertunjukan seni dan budaya Belitung yang terjadwal dan rutin, Museum Tanjungpandan, Museum Maritim, Museum Badau, Rumah Adat Belitung	Kec Sijuk, Badau, Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	✓
		1.6 Wisata minat khusus: Paralayang Gunung Tajam, melihat tarsius, ziarah makam keramat, ekspedisi laut (live on boat), melihat Lutung putih di Gunung Kubing, <i>stand up paddle</i>	Kec. Badau, Membalong dan Sijuk		✓	✓	✓	✓	✓
		1.7 Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	Semua kecamatan		✓	✓	✓	✓	✓
		1.8 Peningkatan dan pengembangan Geosite di Kabupaten Belitung	Kec. Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Selat Nasik			✓	✓	✓	✓
		1.9 Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih	Ds. Sungai Padang, Kec. Sijuk dan Desa Pulau Seliu Kec. Membalong	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.10 Pemasangan hot spot di lokasi destinasi wisata	Batu bedil, peramun, Tg. Kelayang, Gusong Bugis, Tg. Tinggi, pulau Lengkuas			✓	✓	✓	✓
		1.11 Pesona Belitung Beach Festival	Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.12 Lomba Mancing	Kabupaten Belitung		✓	✓	✓	✓	✓
		1.13 Belitung Run	Kabupaten Belitung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1.14 Belitung Golf series	Desa Tg.Tinggi Kecamatan Sijuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Program SPBE Unggul	1. Pengembangan digitalisasi pemerintah daerah	1.1 Pembangunan Command center	Tanjungpandan			✓	✓	✓	
		1.2 Pembangunan Jaringan intra pemerintah	Tanjungpandan dan Selat Nasik		✓	✓	✓		
		1.3 Pengembangan Internet of Things (IoT)	Tanjungpandan			✓	✓	✓	
		1.4 Peningkatan keamanan informasi	Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
9. Program Prioritas Daerah: "Penguatan									



PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas (SAKIP Smart)"									
10. Program Prioritas Daerah: "Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Opini WTP"		-							
11. Program "SINAR PELAYANAN" (Sinergi Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi untuk Pelayanan Prima)	1. Pengoptimalan PTSP dan Mal Pelayanan Publik	1.1 Penguatan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
		1.2 Peningkatan Implementasi OSS, Mal Pelayanan publik digital, SimBG	Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
		1.3 Peningkatan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik	Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	✓
12. Program "Menara Integritas Belitung"									
13. PAD KUAT (Program Penguatan Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah)		1. Peningkatan Program Aplikasi Pendapatan (Pajak dan Retribusi)		E- Paymen t PBB (QRIS, Virtual Account , e- wallet)	E-SPPT PBB dan Perluas an Canal Pemba yaran	E- STPTD dan e- Payme nt PBJT	E- BPHTB dan e- payme n BPHTB	E- Retribu si dan e Dana Transfe r	E- Pelapor an Pendap atan (Pajak dan Retribu si)
14. Program "BANGUN LESTARI" (Pembangunan Infrastruktur Aksesibel dan Ramah Lingkungan Berkelanjutan)	1. Pembangunan pelabuhan	1.1 Pembangunan Pelabuhan Tanjung Paku	Ds Padang Kandis, Kec. Membalong			✓			
		1.2 Pembangunan Dermaga Pulau Kelayang, Pulau Lengkuas	Ds. Keciput, Kec. Sijuk			✓	✓		
		1.3 Revitalisasi Dermaga Teluk Gembira	Ds Padang Kandis, Kec. Membalong				✓		
		1.4 Pembangunan Pelabuhan Suak Gual	Ds. Suak Gual, Selat Nasik				✓		
		1.5 Pembangunan Dermaga Desa Pulau Gersik	Ds. Pulau Gersik, Kec. Selat Nasik					✓	
	2. Pembangunan jalan di kawasan strategis	2.1 Pembangunan jalan akses Pelabuhan Tanjung Paku	Ds Padang Kandis, Kec. Membalong			✓			
		2.2 Pembangunan jalan akses TPA Gunung Sadai	Ds. Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan			✓			
		2.3 Pembangunan jalan akses Geosite Batu Bedil	Ds. Sungai Padang, Kec. Sijuk				✓		
		2.4 Pembangunan jalan kabupaten akses bandara	Ds. Buluh Tumbang, Kec. Tanjungpandan			✓			
		2.5 Pembangunan jalan akses Tanjung tinggi	Ds. Tanjung Tinggi, Kec. Sijuk			✓			



PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2.6 Pembangunan jalan Suak Kemang	Ds. Petaling, Kec. Selat Nasik			✓			
		2.7 Pembangunan jalan SPAM Mempadin	Ds. Air Selumar Kec. Sijuk			✓			
		2.8 Pembangunan Jalan Bukit Tebalu	Ds. Terong Kec. Sijuk		✓	✓			
	3. Pengembangan kawasan energi, pelabuhan dan migas	3.1 Penyiapan lahan untuk ketenagalistrikan, Pelabuhan dan Depo migas	Kec. Badau dan Membalong		✓				
	4. Pengembangan air minum perkotaan dan perdesaan	4.1 Pengembangan jaringan perpipaan SPAM	Seluruh Kecamatan		✓	✓	✓	✓	
	5. Pembangunan infrastruktur kawasan industri SUGE	5.1 Pembangunan akses jalan kawasan	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong				✓	✓	✓
		5.2 Penyediaan air minum kawasan	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong				✓	✓	✓
		5.3 Pengelolaan drainase kawasan	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong				✓	✓	✓
		5.4 Pengelolaan air limbah kawasan	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong				✓	✓	✓
		5.5 Pengelolaan persampahan kawasan	Ds. Sungai Samak, Ds. Pegantungan, Ds. Bantan Kec. Badau dan Membalong				✓	✓	✓
	6. Pengembangan Pengelolaan Persampahan	6.1 Pengembangan TPA Gunung Sadai	Ds. Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
		6.2 Pembangunan TPS	Kec. Tanjungpandan dan Sijuk			✓	✓	✓	
		6.3 Pembangunan TPS Terpadu	Ds. Juru Seberang Kec. Tanjungpandan			✓	✓	✓	
15. Program "KOTAKITA" (Kota Tertata, Inklusif, dan Tangguh)	1. Penataan Kawasan Kota Tanjungpandan	1.1 Sarana utilitas umum	Kel. Kota, Kec. Tanjungpandan	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.2 Revitalisasi kawasan Pujasena	Kec. Tanjungpandan			✓			
	2. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan perkotaan	2.1 Pembangunan PJU, rambu lalu lintas, APILL dan zoss di perkotaan	Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
	3. Pembangunan sanitasi lingkungan di perkotaan	3.1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD)	Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
		3.2 Pembangunan sistem drainase perkotaan	Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	



PROGRAM PRIORITAS BUPATI	Fokus Intervensi	Proyek Strategis	Lokasi	Target per Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Penanganan banjir perkotaan	4.1 Penyediaan lahan penanganan banjir kampung Amau	Kel. Parit, Kp. Damai, Paal Satu, Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
		4.2 Penanganan Banjir Kawasan Sungai Siburik	Kec. Tanjungpandan			✓	✓	✓	
16. Program "RUPAKOTA" (Revitalisasi dan Penataan Ruang Kota Terpadu)	1. Peningkatan penataan ruang	1.1 Penyusunan RDTR dan RTBL	Kec. Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Selat Nasik RTBL kawasan Kota Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
		1.2 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di perkotaan	Kec. Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
17. Program "INFRASEJAHTERA" (Infrastruktur Sejahtera untuk Masyarakat Desa Berdaya)	1. Pembangunan jalan di perdesaan	1.1 Pembangunan jalan geosite Gunung Kubing	Ds Perpat, Kec. Membalong			✓	✓		
		1.2 Peningkatan jalan Terong-Air Seruk	Ds. Terong dan Ds Air Seruk			✓	✓	✓	
		1.3 Pembangunan Jalan SMK 1 Sijuk	Ds. Tg. Binga dan Terong Kec. Sijuk			✓			
		1.4 Pembangunan Jalan Lingkungan	Seluruh kecamatan		✓	✓	✓	✓	✓
	2. Pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan	2.1 Pembangunan sanitasi lingkungan di perdesaan	Desa di seluruh Kecamatan		✓	✓	✓	✓	
		2.2 Pembangunan PJU di perdesaan	Desa di seluruh kecamatan		✓	✓	✓	✓	
		2.3 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di perdesaan	Desa di seluruh kecamatan kecuali Tanjungpandan		✓	✓	✓	✓	
18. Program "Belitung Lestari Aksi Sadar Lingkungan"	1. Pengelolaan persampahan	1.1 Pengadaan sarana prasarana persampahan	Kec. Tanjungpandan			✓	✓	✓	
19. Program "SIRAM" (Sumber Daya Air yang Ramah dan Berkelanjutan)	1. Pengelolaan sumber daya air	1.1 Pengamanan sumber air baku	Seluruh kecamatan			✓	✓	✓	
		1.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi	Kec. Membalong, Sijuk, Badau, Tanjungpandan			✓	✓	✓	
20. Program "BERSIH" (Bangun Infrastruktur dengan Energi Ramah, Sehat, Inovatif, dan Hijau)	1. Penyediaan Energi Baru Terbarukan	1.1 Pengadaan Listrik Tenaga Surya untuk perkantoran dan PJUTS	Pulau Sumedang-Membalong, Pulau Kuil-Selat Nasik, Pulau Selui-Membalong, Pulau Gersik-Selat Nasik			✓	✓	✓	
21. Program "Sinergi Hijau Belitung: Masyarakat Garda Terdepan Lingkungan" (SIHITUNG)	1. Pengelolaan persampahan perdesaan	1.1 Program TPS 3R dan Bank Sampah	Desa di seluruh kecamatan			✓	✓	✓	
22. Program "TANGGUH BENCANA" (Tumbuh Tanggap, Unggul dalam Mitigasi Bencana)	1. Penanggulangan Bencana	1.1 Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Tanjungpandan			✓			
		1.2 Mitigasi bencana	Seluruh kecamatan	150 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang
		1.3 Penyediaan lahan relokasi bencana, dan akibat pelaksanaan project pemerintah	Kab. Belitung			✓	✓	✓	

Dalam rangka memastikan keselarasan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, perlu kiranya memastikan keterkaitan atau dukungan program Pembangunan di Kabupaten Belitung terhadap prioritas Pembangunan Provinsi dan Pemerintah pusat. Berikut merupakan gambaran linieritas proyek strategis Kabupaten Belitung terhadap prioritas Pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 3.8 Linieritas Proyek Strategis Kabupaten Belitung

Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SD	1. Inklusif, inovatif, dan selaras dengan perkembangan DUDIKA. Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan merata, Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, beasiswa pendidikan, pemajuan pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SMP		
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD		
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP		
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang SD		
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang SMP		
Beasiswa S1 Penuh Perguruan Tinggi		
Pembangunan Puskesmas	2. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dan non rujukan termasuk penyediaan balai kesehatan santri di pesantren. akses Layanan kesehatan dasar berkualitas dengan BPJS GRATIS termasuk insentif bagi ibu pasca melahirkan.	
Peningkatan akses layanan kesehatan	3. Pendayagunaan dan dukungan bagi SDM kesehatan serta Pemberdayaan masyarakat dalam menggalakkan hidup bersih dan sehat untuk penurunan stunting dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	
Peningkatan tipe RSUD H. Marsidi Djudono		
Upaya peningkatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat (dinas Kesehatan)		
Peningkatan Pendampingan Keluarga berisiko Stunting (Program Genting "Gerakan orang tua asuh cegah stunting)	5. Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak.	
Pelatihan tenaga kerja		

Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
Bantuan sosial kepada kelompok rentan	4. Bantuan sosial yang inklusif untuk mengentaskan kemiskinan dan kelompok rentan serta penguatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	
Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat	22. Mendorong terciptanya usaha baru di sektor industri kreatif dan ekonomi digital, khususnya di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan pariwisata digital untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.	
Peningkatan produktivitas perempuan	5. Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak.	
Bantuan kepada anak yatim piatu		
Revitalisasi Pasar Ikan Tanjungpandan	22. Mendorong terciptanya usaha baru di sektor industri kreatif dan ekonomi digital, khususnya di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan pariwisata digital untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.	
Revitalisasi Pasar Berehun		
Pengawasan peredaran bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya		
Penyusunan rencana umum penanaman modal kabupaten (RUPMK Kab 2025-2045)		
Penyusunan Peta potensi investasi daerah		
Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan investasi		
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	23. Menciptakan Wirausaha Baru di sektor industri kreatif dan ekonomi digital, dengan prioritas pada generasi muda dan masyarakat pedesaan.	
Penyusunan strategi Penanaman Modal	22. Mendorong terciptanya usaha baru di sektor industri kreatif dan ekonomi digital, khususnya di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan pariwisata digital untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
Penyusunan Dokumen RIPIK		
Pembentukan pengelola kawasan industri		
Penetapan kawasan industri SUGE		Melanjutkan Pengembangan

Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
Pembangunan Dermaga Tambat Labuh	27. Peningkatan produktivitas dan perlindungan (asuransi nelayan) terhadap nelayan perikanan tangkap dan budidaya serta penguatan pada peningkatan kapasitas dan kualitas nelayan serta bantuan dan modernisasi alat tangkap.	Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas
Pembangunan Pabrik Es di Selat Nasik		Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
Budidaya Ikan Kerapu		
Budidaya udang vaname	26. Peningkatan produktivitas sektor perkebunan dan pertanian melalui hilirisasi komoditas unggulan, modernisasi dan digitalisasi pertanian, bantuan bibit dan benih serta alsintan gratis untuk menciptakan pertanian berkelanjutan.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas
Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi	24. Diversifikasi pangan lokal dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah.	
Optimalisasi lahan sawah yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	26. Peningkatan produktivitas sektor perkebunan dan pertanian melalui hilirisasi komoditas unggulan, modernisasi dan digitalisasi pertanian, bantuan bibit dan benih serta alsintan gratis untuk menciptakan pertanian berkelanjutan.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
Pembangunan dan Peningkatan sumber benih pertanian	25. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi yang dilaksanakan melalui peningkatan akses UMKM dan koperasi pada sumber daya produktif, termasuk inovasi pembiayaan dan akses permodalan (tanpa bunga tanpa agunan) serta diversifikasi pasar, peningkatan kapasitas usaha, serta	
Peningkatan Produksi Peternakan		
Peningkatan Produksi Pertanian		
Pengembangan Destinasi wisata Kawasan Pantai Tanjungpendam		
Wisata alam: Mentas, Pantai Merida		
Wisata bahari: Kawasan sekitar KEK Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas dan sekitarnya, Pantai Pasir Panjang, Pulau Batu Dinding, Tanjung Lancor		



Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
	pemanfaatan riset dan adopsi teknologi.	
Agrowisata: Fesival Durian, Agrowisata Desa Mentigi (Buah Naga dan Jambu Kristal)	26. Peningkatan produktivitas sektor perkebunan dan pertanian melalui hilirisasi komoditas unggulan, modernisasi dan digitalisasi pertanian, bantuan bibit dan benih serta alsintan gratis untuk menciptakan pertanian berkelanjutan.	
Wisata budaya: Pertunjukan seni dan budaya Belitung yang terjadwal dan rutin, Museum Tanjungpandan, Museum Maritim, Museum Badau, Rumah Adat Belitung	28. Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkualitas, dan berkelanjutan termasuk pengembangan desa wisata baru untuk 29. meningkatkan kunjungan wisata.	
Wisata minat khusus: Paralayang Gunung Tajam, melihat tarsius, ziarah makam keramat, ekspedisi laut (<i>live on boat</i>), melihat Lutung putih di Gunung Kubing, <i>stand up paddle</i>		
Peningkatan daya saing ekonomi kreatif		
Peningkatan dan pengembangan Geosite di Kabupaten Belitung		
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih		
Pemasangan hot spot di lokasi destinasi wisata		
Pesona <i>Belitung Beach Festival</i>		
Lomba Mancing		
<i>Belitung Run</i>		
<i>Belitung Golf series</i>		
Pembangunan <i>Command center</i>	17. Peningkatan Kualitas Layanan dengan membuka call center aduan masyarakat terhadap layanan public.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
Pembangunan Jaringan intra pemerintah	16. Integrasi Teknologi dalam Pelayanan Publik: Semua layanan	



Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
Pengembangan <i>Internet of Things (IoT)</i>	publik terintegrasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.	
Peningkatan keamanan informasi		
Penguatan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16. Integrasi Teknologi dalam Pelayanan Publik: Semua layanan publik terintegrasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.	
Peningkatan Implementasi OSS, Mal Pelayanan publik digital, SimBG,		
Peningkatan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik		
Peningkatan Program Aplikasi Pendapatan (Pajak dan Retribusi)		
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Paku		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas
Pembangunan Dermaga Pulau Kelayang, Pulau Lengkuas		
Revitalisasi Dermaga Teluk Gembira		
Pembangunan Pelabuhan Suak Gual		
Pembangunan Dermaga Desa Pulau Gersik		
Pembangunan jalan akses Pelabuhan Tanjung Paku		
Pembangunan jalan akses TPA Gunung Sadai		
Pembangunan jalan akses Geosite Batu Bedil		
Pembangunan jalan kabupaten akses bandara		
Pembangunan jalan akses Tanjung tinggi		
Pembangunan jalan Suak Kemang		
Pembangunan jalan SPAM Mempadin		



Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
Pembangunan Jalan Bukit Tebalu		
Penyiapan lahan untuk ketenagalistrikan, Pelabuhan dan Depo migas		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas
Pengembangan jaringan perpipaan SPAM		
Pembangunan akses jalan kawasan		
Penyediaan air minum kawasan		
Pengelolaan drainase kawasan		
Pengelolaan air limbah kawasan		
Pengelolaan persampahan kawasan		Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
Sarana utilitas umum		
Revitalisasi kawasan Pujasena		
Pembangunan PJU, rambu lalu lintas, APILL dan zoss di perkotaan		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD)		
Pembangunan sistem drainase perkotaan		
Penyediaan lahan penanganan banjir kampung Amau		
Penanganan Banjir Kawasan Sungai Siburik		
Penyusunan RDTR dan RTBL		
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di perkotaan		
Pembanguhan jalan geosite Gunung Kubing		
Peningkatan jalan Terong-Air Seruk		
Pembangunan Jalan SMK 1 Sijuk		
Pembangunan Jalan Lingkungan		



Proyek Prioritas	Program Prioritas Gubernur	Prioritas Nasional
Pembangunan sanitasi lingkungan di perdesaan		Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan dan Pemberantasan Kemiskinan
Pembangunan PJU di perdesaan		
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di perdesaan		
Pengembangan TPA Gunung Sadai		
Pembangunan TPS		
Pengadaan sarana prasarana persampahan		
Pengamanan sumber air baku		
Pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi		
Pengadaan Listrik Tenaga Surya untuk perkantoran dan PJUTS		
Program TPS 3R dan Bank Sampah		
Pembangunan TPS Terpadu		
Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah		
Mitigasi bencana		
Penyediaan lahan relokasi bencana, dan akibat pelaksanaan <i>project</i> pemerintah		

BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif serta perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					273.576.722 .700,200		284.688. 600.000, 000		293.689. 800.000, 000		303.007. 100.000, 000		312.660.200 .000,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					191.528.182 .380,200		207.378. 100.000, 000		213.681. 600.000, 000		220.177. 800.000, 000		226.873.500 .000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	63,79	85	80,15	191.528.182 .380,200	80,93	207.378. 100.000, 000	81,20	213.681. 600.000, 000	81,87	220.177. 800.000, 000	82,56	226.873.500 .000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	72	72,75		73,50		74,25		75		75,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	72	72,75		73,50		74,25		75		75,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					81.550.476. 320,000		76.960.5 00.000,0 00		79.640.7 00.000,0 00		82.443.5 00.000,0 00		85.381.700. 000,000	
Meningkatnya partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun	Persentase anak usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	95,72	100	100	40.847.286. 420,000	100	42.875.7 00.000,0 00	100	43.967.2 00.000,0 00	100	45.111.0 00.000,0 00	100	46.310.400. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase murid SD tidak mampu yang menerima bantuan biaya personil sesuai data DTSN (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun	Persentase anak usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam	76,86	100	100	31.990.781. 450,000	100	23.108.6 00.000,0 00	100	24.253.4 00.000,0 00	100	25.447.3 00.000,0 00	100	26.698.000. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pendidikan dasar (APS) (%)													
	Persentase murid SMP tidak mampu yang menerima bantuan biaya personil yang sesuai data DTSN (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) (%)	75,69	100	100	6.272.296.7 50,000	100	8.497.10 0.000,00 0	100	8.827.00 0.000,00 0	100	9.172.60 0.000,00 0	100	9.535.300.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	14,75	100	100	2.440.111.7 00,000	100	2.479.10 0.000,00 0	100	2.593.10 0.000,00 0	100	2.712.60 0.000,00 0	100	2.838.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					498.064.000 ,000		350.000. 000,000		367.500. 000,000		385.800. 000,000		405.000.000 ,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (%)	-	89,1	91,06	498.064.000 ,000	92,89	350.000. 000,000	94,85	367.500. 000,000	96,68	385.800. 000,000	98,63	405.000.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 (%)	90,38	91	91,50		92		92,50		93		93,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (%)	43,66	55,53	57,53		59,53		61,53		63,53		65,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					298.657.622 .203,550		333.410. 336.000, 000		340.813. 012.000, 000		348.097. 146.000, 000		354.643.938 .000,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					187.738.778 .471,550		227.227. 296.000, 000		234.066. 450.000, 000		241.223. 572.000, 000		246.671.382 .000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	77,21	75	78	187.738.778 .471,550	80	227.227. 296.000, 000	82	234.066. 450.000, 000	84	241.223. 572.000, 000	84	246.671.382 .000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		82,5		85		85,75		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase pelayanan BLUD (%)	-	-	100		100		100		100				
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					110.133.568.552,000		103.601.220.000,000		104.135.703.000,000		104.268.174.000,000		105.335.679.000,000	
Berkurangnya intensitas kejadian penyakit menular dan tidak menular	Persentase penyakit menular (%)	1,69	-	1,57	5.546.567.540,000	1,32	7.113.290.000,000	1,04	7.171.726.000,000	0,75	7.171.726.000,000	0,45	7.247.498.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penyakit tidak menular (%)	22,82	-	22,7		22,45		22,17		21,88		21,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Berkurangnya Angka Kesakitan dan Kematian Ibu dan Anak	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (Per 1.000 Kelahiran)	13	12,62	11,63	1.468.784.710,000	10,97	2.835.407.000,000	10,46	2.884.252.000,000	9,96	2.884.252.000,000	9,96	2.932.128.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	129,93	122	109		97		86		77		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Efektivitas Sistem Pelayanan Rujukan	Persentase Kasus Rujukan yang Benar dan Tepat Waktu (%)	-	-	85	103.118.216.302,000	85	93.652.523.000,000	85	94.079.725.000,000	85	94.212.196.000,000	85	95.156.053.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					283.936.200,000		1.839.995.000,000		1.860.695.000,000		1.892.552.000,000		1.909.772.000,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Sesuai Kompetensi (%)	100	100	100	283.936.200,000	100	1.839.995.000,000	100	1.860.695.000,000	100	1.892.552.000,000	100	1.909.772.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN					206.255.480,000		313.851.000,000		317.380.000,000		275.138.000,000		280.641.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Tercatat dan Terdaftar Secara Resmi (%)	100	100	100	206.255.480 ,000	100	313.851. 000,000	100	317.380. 000,000	100	275.138. 000,000	100	280.641.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					295.083.500 ,000		427.974. 000,000		432.784. 000,000		437.710. 000,000		446.464.000 ,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat	Persentase Rumah Tangga Sehat (%)	50,38	-	66,1	295.083.500 ,000	67,9	427.974. 000,000	69,7	432.784. 000,000	80	437.710. 000,000	80,5	446.464.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					80.838.555. 850,000		363.198. 009.000, 000		279.993. 569.000, 000		194.007. 092.000, 000		219.977.773 ,000,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.058.783. 535,000		11.353.6 91.000,0 00		11.574.4 91.000,0 00		12.074.3 12.000,0 00		12.129.285. 000,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	78,21	79,80	80,15	10.058.783. 535,000	80,93	11.353.6 91.000,0 00	81,20	11.574.4 91.000,0 00	81,87	12.074.3 12.000,0 00	82,56	12.129.285. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.179.222.4 40,000		5.941.22 7.000,00 0		5.871.28 8.000,00 0		6.562.52 3.000,00 0		6.746.812.0 00,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase sumber daya air yang dikelola dengan baik (%)	-	22,15	22,58	2.179.222.4 40,000	23,00	5.941.22 7.000,00 0	23,43	5.871.28 8.000,00 0	23,86	6.562.52 3.000,00 0	24,29	6.746.812.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					7.863.064.3 74,000		15.095.5 00.000,0 00		16.077.2 50.000,0 00		16.758.0 00.000,0 00		17.566.000. 000,000	
Meningkatnya Akses Layanan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman (%)	18,07	16,56	17,81	7.863.064.3 74,000	20,84	15.095.5 00.000,0 00	23,87	16.077.2 50.000,0 00	26,90	16.758.0 00.000,0 00	29,94	17.566.000. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,000		17.850.0 00.000,0 00		5.100.00 0.000,00 0		300.000. 000,000		0,000	
Meningkatnya Keberfungsian Tempat Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPST, TPS dan TPS3R yang layak fungsi (%)	-	-	42,86	0,000	57,14	17.850.0 00.000,0 00	71,43	5.100.00 0.000,00 0	85,71	300.000. 000,000	100,00	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.850.700.0 00,000		19.441.8 75.000,0 00		20.573.1 30.000,0 00		20.915.0 00.000,0 00		21.167.500. 000,000	
Meningkatnya Ketersediaan Layanan Sanitasi	Persentase rumah tangga dengan sistem pengolahan limbah domestik yang aman (%)	-	2,36	2,51	1.850.700.0 00,000	5,71	19.441.8 75.000,0 00	8,91	20.573.1 30.000,0 00	12,11	20.915.0 00.000,0 00	15,31	21.167.500. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					899.040.000 ,000		614.800. 000,000		609.960. 000,000		614.800. 000,000		614.800.000 ,000	
Meningkatnya kualitas drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik (%)	21,54	29,59	29,89	899.040.000 ,000	30,13	614.800. 000,000	30,37	609.960. 000,000	30,62	614.800. 000,000	30,86	614.800.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5.410.472.8 10,000		2.900.00 0.000,00 0		6.100.00 0.000,00 0		6.265.00 0.000,00 0		1.400.000.0 00,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar (%)	4,58	4,00	4,28	5.410.472.810,000	4,56	2.900.000.000,000	4,84	6.100.000.000,000	5,12	6.265.000.000,000	5,40	1.400.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					100.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan (%)	15,00	-	60,00	100.000.000,000	75,14	700.000.000,000	89,91	700.000.000,000	100,00	700.000.000,000	100,00	700.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					51.961.911.891,000		286.044.890.000,000		210.091.424.000,000		126.423.931.000,000		156.186.725.000,000	
Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	-	86,66	86,94	51.961.911.891,000	87,23	286.044.890.000,000	87,52	210.091.424.000,000	87,80	126.423.931.000,000	88,09	156.186.725.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					306.120.800,000		1.301.026.000,000		1.353.026.000,000		1.407.526.000,000		1.465.651.000,000	
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	306.120.800,000	100,00	1.301.026.000,000	100,00	1.353.026.000,000	100,00	1.407.526.000,000	100,00	1.465.651.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi (%)	-	16,67	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					209.240.000,000		1.955.000.000,000		1.943.000.000,000		1.986.000.000,000		2.001.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang (%)	-	100,00	100,00	209.240.000,000	100,00	1.955.000.000,000	100,00	1.943.000.000,000	100,00	1.986.000.000,000	100,00	2.001.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	-	51,82	67,24		69,28		70,12		77,79		81,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.133.498.900,000		18.081.789.000,000		19.371.989.000,000		20.762.997.000,000		23.990.493.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					93.472.500, 000		972.000. 000,000		972.000. 000,000		972.000. 000,000		972.000.000 ,000	
Meningkatnya Layanan Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Penyediaan Rumah layak Huni Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program pemerintah (%)	-	-	-	93.472.500, 000	25,00	972.000. 000,000	50,00	972.000. 000,000	75,00	972.000. 000,000	100,00	972.000.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana (%)	-	-	11,11		33,33		55,56		77,78		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					492.000,000		1.420.00 0.000,00 0		1.300.60 0.000,00 0		1.169.86 0.000,00 0		2.701.846.0 00,000	
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh (%)	-	2,55	7,64	492.000,000	11,77	1.420.00 0.000,00 0	21,96	1.300.60 0.000,00 0	32,14	1.169.86 0.000,00 0	41,72	2.701.846.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					484.110.200 ,000		1.968.00 0.000,00 0		2.016.00 0.000,00 0		2.040.00 0.000,00 0		2.088.000.0 00,000	
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	-	3,85	7,69	484.110.200 ,000	30,77	1.968.00 0.000,00 0	53,85	2.016.00 0.000,00 0	76,92	2.040.00 0.000,00 0	100,00	2.088.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.555.424.2 00,000		13.721.7 89.000,0 00		15.083.3 89.000,0 00		16.581.1 37.000,0 00		18.228.647. 000,000	
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase PSU dalam Kondisi Baik (%)	48,42	-	42,31	3.555.424.2 00,000	47,52	13.721.7 89.000,0 00	52,73	15.083.3 89.000,0 00	57,94	16.581.1 37.000,0 00	63,14	18.228.647. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.829.347. 942,760		33.536.4 34.000,0 00		32.763.1 78.000,0 00		33.194.2 34.000,0 00		32.694.484. 000,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					11.513.619. 242,760		18.743.7 12.000,0 00		18.146.4 12.000,0 00		18.291.5 12.000,0 00		17.791.762. 000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	67	69	80,15	7.213.159.7 46,760	80,93	10.333.8 50.000,0 00	81,2	11.363.2 50.000,0 00	81,87	11.508.3 50.000,0 00	82,56	11.008.600. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	75	75		77,5		80		82,5		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	75	77,5		80		82,5		85		87,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	71,43	75	80,15	4.300.459.4 96,000	80,93	8.409.86 2.000,00 0	81,20	6.783.16 2.000,00 0	81,87	6.783.16 2.000,00 0	82,56	6.783.162.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		83		85		87		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.190.804.100,000		7.060.956.000,000		6.885.000.000,000		7.170.956.000,000		7.170.956.000,000	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	3.147.604.100,000	100	6.585.956.000,000	100	6.410.000.000,000	100	6.685.956.000,000	100	6.685.956.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan (%)	30	30	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada (%)	100	100	100	43.200.000,000	100	475.000.000,000	100	475.000.000,000	100	485.000.000,000	100	485.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					491.304.600,000		4.235.651.000,000		4.235.651.000,000		4.235.651.000,000		4.235.651.000,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	100	-	100	43.459.000,000	100	1.750.000.000,000	100	1.750.000.000,000	100	1.750.000.000,000	100	1.750.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	-	100	447.845.600,000	100	2.110.651.000,000	100	2.110.651.000,000	100	2.110.651.000,000	100	2.110.651.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana (%)	-	-	70	0,000	75	375.000.000,000	85	375.000.000,000	90	375.000.000,000	95	375.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					633.620.000,000		3.496.115.000,000		3.496.115.000,000		3.496.115.000,000		3.496.115.000,000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran (%)	-	30	45	0,000	60	319.000.000,000	75	319.000.000,000	85	319.000.000,000	90	319.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (%)	100	100	100	633.620.000,000	100	3.177.115.000,000	100	3.177.115.000,000	100	3.177.115.000,000	100	3.177.115.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.714.844.878,160		15.421.452.000,000		16.638.081.000,000		17.665.703.000,000		19.279.308.000,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.171.214.605,160		9.287.922.000,000		9.918.659.000,000		10.290.327.000,000		11.183.367.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	78,93	78,82	80,15	6.171.214.605,160	80,93	9.287.922.000,000	81,2	9.918.659.000,000	81,87	10.290.327.000,000	82,56	11.183.367.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80.00 (B)		80.01 (B)		80.02 (B)		80.03 (B)		80.04 (B)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80.00 (B		80.02 (B		80.02 (B		80.03 (B		80.04 (B		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					133.674.100,000		887.217.000,000		975.940.000,000		1.073.536.000,000		1.180.901.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam kesejahteraan sosial (%)	36,36	-	54,54	133.674.100,000	63,63	887.217.000,000	72,72	975.940.000,000	81,81	1.073.536.000,000	100	1.180.901.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	38,85	-	60		70		75		80		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					12.267.000,000		93.500.000,000		102.850.000,000		113.135.000,000		124.449.000,000	
Meningkatnya layanan penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara korban tindak kekerasan yang tertangani (%)	100	-	100	12.267.000,000	100	93.500.000,000	100	102.850.000,000	100	113.135.000,000	100	124.449.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					262.760.500,000		1.711.480.000,000		1.882.635.000,000		2.070.906.000,000		2.278.008.000,000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	-	100	262.760.500,000	100	1.711.480.000,000	100	1.882.635.000,000	100	2.070.906.000,000	100	2.278.008.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya di luar hiv/aids dan napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	-	-	-		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					748.112.973 ,000		1.914.36 0.000,00 0		2.078.32 5.000,00 0		2.270.15 8.000,00 0		2.480.175.0 00,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	-	-	7,70	748.112.973 ,000	11,15	1.914.36 0.000,00 0	15,40	2.078.32 5.000,00 0	19,26	2.270.15 8.000,00 0	23,11	2.480.175.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)	-	-	15,79		36,84		57,98		78,95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	100	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase pengelolaan pendataan fakir miskin (%)	-	-	98,75		98,80		98,85		98,90		98,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					379.395.700 ,000		1.203.06 0.000,00 0		1.323.36 7.000,00 0		1.455.70 5.000,00 0		1.601.278.0 00,000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentasae korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	-	100	379.395.700 ,000	100	1.203.06 0.000,00 0	100	1.323.36 7.000,00 0	100	1.455.70 5.000,00 0	100	1.601.278.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					7.420.000,0 00		323.913. 000,000		356.305. 000,000		391.936. 000,000		431.130.000 ,000	
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan kabupaten yang terkelola dengan baik (%)	100	-	100	7.420.000,0 00	100	323.913. 000,000	100	356.305. 000,000	100	391.936. 000,000	100	431.130.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					294.783.714 ,000		789.000. 000,000		845.000. 000,000		890.000. 000,000		940.000.000 ,000	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					74.848.704, 000		420.000. 000,000		450.000. 000,000		475.000. 000,000		500.000.000 ,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (%)	20	22	24	74.848.704,000	27	420.000.000,000	30	450.000.000,000	33	475.000.000,000	36	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					0,000		164.000.000,000		170.000.000,000		175.000.000,000		185.000.000,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	-	-	-	0,000	25	164.000.000,000	30	170.000.000,000	35	175.000.000,000	40	185.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					219.935.010,000		205.000.000,000		225.000.000,000		240.000.000,000		255.000.000,000	
Berkurangnya perselisihan antara tenaga kerja dengan pemberi kerja	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) (%)	-	-	10	219.935.010,000	12	205.000.000,000	14	225.000.000,000	16	240.000.000,000	18	255.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					816.744.000,000		2.139.658.000,000		2.331.791.000,000		2.543.138.000,000		2.775.629.000,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					187.643.600,000		746.029.000,000		820.635.000,000		902.701.000,000		992.976.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	44,11	36,25	46,31	187.643.600,000	47,58	746.029.000,000	48,96	820.635.000,000	49,67	902.701.000,000	50,19	992.976.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					287.645.000,000		398.970.000,000		438.869.000,000		482.758.000,000		531.036.000,000	
Meningkatnya cakupan layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	-	100	287.645.000,000	100	398.970.000,000	100	438.869.000,000	100	482.758.000,000	100	531.036.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					8.003.000,000		55.050.000,000		60.555.000,000		66.611.000,000		73.280.000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan di Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	100	-	100	8.003.000,000	100	55.050.000,000	100	60.555.000,000	100	66.611.000,000	100	73.280.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					21.184.900, 000		64.737.0 00,000		71.211.0 00,000		78.333.0 00,000		86.167.000, 000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak serta implementasi pemanfaatan kebijakan gender dan anak	Persentase pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan kebijakan (%)	-	-	50	21.184.900, 000	67	64.737.0 00,000	83	71.211.0 00,000	92	78.333.0 00,000	100	86.167.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					93.887.500, 000		581.647. 000,000		639.813. 000,000		703.796. 000,000		774.177.000 ,000	
Meningkatnya pemenuhan hak anak secara bertahap dan merata diseluruh wilayah	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) (5 kluster) (%)	61	-	63	93.887.500, 000	64	581.647. 000,000	65	639.813. 000,000	66	703.796. 000,000	67	774.177.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					218.380.000 ,000		293.225. 000,000		300.708. 000,000		308.939. 000,000		317.993.000 ,000	
Meningkatnya anak yang mendapatkan perlindungan khusus secara komperhensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif (%)	95,55	-	100	218.380.000 ,000	100	293.225. 000,000	100	300.708. 000,000	100	308.939. 000,000	100	317.993.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					390.865.000 ,000		468.637. 000,000		445.814. 000,000		475.307. 000,000		489.951.000 ,000	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					282.619.000 ,000		280.162. 000,000		247.915. 000,000		267.511. 000,000		271.768.000 ,000	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi) (Skor)	81,9	-	87,2	282.619.000 ,000	87,70	280.162. 000,000	88,2	247.915. 000,000	88,7	267.511. 000,000	89,2	271.768.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	86,50	-	87,40		87,90		88,40		88,90		89,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					23.549.000, 000		72.975.0 00,000		76.624.0 00,000		80.456.0 00,000		84.478.000, 000	
Berkurangnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang diintervensi (%)	100	-	100	23.549.000, 000	100	72.975.0 00,000	100	76.624.0 00,000	100	80.456.0 00,000	100	84.478.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,24	-	2,2		1,9		1,7		1,5		1,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					84.697.000, 000		115.500. 000,000		121.275. 000,000		127.340. 000,000		133.705.000 ,000	
Meningkatnya kualitas mutu dan keamanan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	-	100	84.697.000, 000	100	115.500. 000,000	100	121.275. 000,000	100	127.340. 000,000	100	133.705.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					9.450.300,0 00		11.000.0 00,000		13.000.0 00,000		15.000.0 00,000		16.500.000, 000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					9.450.300,0 00		11.000.0 00,000		13.000.0 00,000		15.000.0 00,000		16.500.000, 000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	-	-	100	9.450.300,0 00	100	11.000.0 00,000	100	13.000.0 00,000	100	15.000.0 00,000	100	16.500.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.935.563. 000,000		57.319.0 78.000,0 00		69.138.0 26.000,0 00		48.552.5 61.000,0 00		40.000.167. 000,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.754.548.0 00,000		10.849.7 75.000,0 00		18.437.7 51.000,0 00		11.434.0 30.000,0 00		12.552.431. 000,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	71,09	79,8	80,15	6.754.548.0 00,000	80,93	10.849.7 75.000,0 00	81,2	18.437.7 51.000,0 00	81,87	11.434.0 30.000,0 00	82,56	12.552.431. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	75		75,50		76		76,50		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	75		75,50		76		76,50		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					86.900.000, 000		815.000. 000,000		420.000. 000,000		970.000. 000,000		800.000.000 ,000	
Meningkatnya Efektifitas Kajian Lingkungan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	86.900.000, 000	100	815.000. 000,000	100	420.000. 000,000	100	970.000. 000,000	100	800.000.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					510.390.000 ,000		10.072.0 00.000,0 00		8.948.00 0.000,00 0		8.720.10 0.000,00 0		9.227.360.0 00,000	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	28,57	27	29	510.390.000 ,000	29,5	10.072.0 00.000,0 00	30	8.948.00 0.000,00 0	30,5	8.720.10 0.000,00 0	31	9.227.360.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					124.995.000 ,000		810.000. 000,000		800.000. 000,000		560.000. 000,000		500.000.000 ,000	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	26,14	100	100	124.995.000 ,000	100	810.000. 000,000	100	800.000. 000,000	100	560.000. 000,000	100	500.000.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					10.002.000, 000		951.757. 000,000		361.933. 000,000		423.127. 000,000		385.440.000 ,000	
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan (%)	64	65	65	10.002.000, 000	66	951.757. 000,000	70	361.933. 000,000	75	423.127. 000,000	80	385.440.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					40.997.000, 000		195.000. 000,000		200.000. 000,000		215.000. 000,000		220.000.000 ,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha (%)	43,75	-	47,5	40.997.000, 000	41,07	195.000. 000,000	42,86	200.000. 000,000	44,64	215.000. 000,000	46,43	220.000.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase perizinan lingkungan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0,000		314.412.000,000		318.273.000,000		322.205.000,000		322.205.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	40	-	-	0,000	20	314.412.000,000	20	318.273.000,000	20	322.205.000,000	20	322.205.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,000		365.000.000,000		365.000.000,000		370.000.000,000		370.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	-	-	-	0,000	20	365.000.000,000	40	365.000.000,000	60	370.000.000,000	80	370.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					70.000.000,000		170.000.000,000		175.000.000,000		180.000.000,000		185.000.000,000	
Meningkatnya Penghargaan terhadap masyarakat peduli lingkungan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup (Kelompok)	40	-	46	70.000.000,000	49	170.000.000,000	52	175.000.000,000	55	180.000.000,000	58	185.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					7.999.000,000		135.000.000,000		145.000.000,000		155.000.000,000		160.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7.999.000,000	100	135.000.000,000	100	145.000.000,000	100	155.000.000,000	100	160.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.329.732,000,000		32.641.134.000,000		38.967.069.000,000		25.203.099.000,000		15.277.731.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indeks)	40	-	50	6.329.732.000,000	53	32.641.134.000,00	55	38.967.069.000,00	57	25.203.099.000,00	60	15.277.731.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.082.986.540,000		11.014.157.000,00		9.332.407.000,00		9.105.657.000,00		9.220.407.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.839.846.300,000		8.379.835.000,00		6.698.085.000,00		6.471.335.000,00		6.586.085.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	85,25	85,50	85,75	4.839.846.300,000	86	8.379.835.000,00	86,25	6.698.085.000,00	86,50	6.471.335.000,00	86,75	6.586.085.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	68	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					184.746.160,000		1.333.707.000,00		1.333.707.000,00		1.333.707.000,00		1.333.707.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk (%)	87,24	78	86,58	184.746.160,000	86,97	1.333.707.000,00	87,35	1.333.707.000,00	87,73	1.333.707.000,00	88,11	1.333.707.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					22.000.000, 000		1.159.54 0.000,00 0		1.159.54 0.000,00 0		1.159.54 0.000,00 0		1.159.540.0 00,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase capaian pencatatan sipil (%)	94,31	99,25	99,38	22.000.000, 000	99,50	1.159.54 0.000,00 0	99,63	1.159.54 0.000,00 0	99,88	1.159.54 0.000,00 0	99,88	1.159.540.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.730.000,0 00		61.075.0 00,000		61.075.0 00,000		61.075.0 00,000		61.075.000, 000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (%)	50	100	100	2.730.000,0 00	100	61.075.0 00,000	100	61.075.0 00,000	100	61.075.0 00,000	100	61.075.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					33.664.080, 000		80.000.0 00,000		80.000.0 00,000		80.000.0 00,000		80.000.000, 000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100	33.664.080, 000	100	80.000.0 00,000	100	80.000.0 00,000	100	80.000.0 00,000	100	80.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.789.685,4 49,900		9.793.11 9.000,00 0		9.600.80 7.000,00 0		10.490.6 34.000,0 00		11.910.451. 000,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.950.084,7 83,900		6.656.30 1.000,00 0		6.746.80 2.000,00 0		6.924.80 1.000,00 0		7.004.801.0 00,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	80	-	80	5.950.084,7 83,900	80,25	6.656.30 1.000,00 0	80,50	6.746.80 2.000,00 0	80,75	6.924.80 1.000,00 0	81	7.004.801.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					18.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya tata ruang desa yang teratur dan efisien	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	-	-	40	18.000.000,000	60	120.000.000,000	80	120.000.000,000	80	120.000.000,000	100	120.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.287.005.666,000		2.120.868.000,000		1.821.545.000,000		2.496.500.000,000		3.835.650.000,000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	40	-	60	2.287.005.666,000	70	2.120.868.000,000	80	1.821.545.000,000	90	2.496.500.000,000	100	3.835.650.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					534.595.000,000		895.950.000,000		912.460.000,000		949.333.000,000		950.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitas pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kabupaten (%)	35,71	-	54,76	534.595.000,000	64,29	895.950.000,000	73,81	912.460.000,000	83,33	949.333.000,000	95,24	950.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) LKD = PKK, Posyandu, RT, RW, Karano Taruna. LPM (%)	33	-	58,33		66,67		75		83,33		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.717.335.400,000		3.512.960.000,000		3.612.909.000,000		3.711.249.000,000		3.776.474.000,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					31.440.000,000		126.500.000,000		132.000.000,000		137.500.000,000		143.000.000,000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun {Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Angka)	33,8	-	33,3	31.440.000,000	33,1	126.500.000,000	32,90	132.000.000,000	32,80	137.500.000,000	32,60	143.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					126.887.000,000		524.570.000,000		542.580.000,000		558.345.000,000		566.395.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,85	77,90	78	126.887.000,000	78,10	524.570.000,000	78,20	542.580.000,000	78,29	558.345.000,000	78,35	566.395.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	7,10	7,08	7,06		7,04		7,02		7,01		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.559.008.400,000		2.861.890.000,000		2.938.329.000,000		3.015.404.000,000		3.067.079.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	14,58	-	15,5	2.559.008.400,000	16	2.861.890.000,000	16,5	2.938.329.000,000	17	3.015.404.000,000	17,5	3.067.079.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					16.119.256.019,250		70.659.392.000,000		98.564.563.000,000		77.449.837.000,000		71.445.837.000,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.119.565.119,250		14.281.253.000,000		14.781.253.000,000		15.281.253.000,000		15.781.253.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75	85	0	8.119.565.1 19,250	85	14.281.2 53.000,0 00	85	14.781.2 53.000,0 00	85	15.281.2 53.000,0 00	85	15.781.253. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	71	71		73		75		77		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	70	70	71		73		75		77		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					7.758.323.4 00,000		27.783.1 39.000,0 00		29.873.3 10.000,0 00		32.743.5 84.000,0 00		33.959.584. 000,000	
Meningkatnya Kualitas Kelengkapan Jalan	Persentase sarana dan prasarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik (%)	85	87	88	6.521.603.4 00,000	91	22.955.4 68.000,0 00	94	25.142.4 03.000,0 00	97	27.616.7 97.000,0 00	100	28.617.148. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase tersedianya kelengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota (%)	50	55	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Jalan	Persentase layanan angkutan yang terpenuhi (%)	37	-	50	1.236.720.0 00,000	63	4.827.67 1.000,00 0	76	4.730.90 7.000,00 0	89	5.126.78 7.000,00 0	100	5.342.436.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase sarana dan prasarana layanan angkutan dalam kondisi baik (%)	74	-	79		84	89	94	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan				
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					241.367.500 ,000		28.595.0 00.000,0 00		53.910.0 00.000,0 00		29.425.0 00.000,0 00		21.705.000. 000,000	
Meningkatnya Kualitas Perhubungan Laut	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik (%)	55	58	60	241.367.500 ,000	70	28.595.0 00.000,0 00	80	53.910.0 00.000,0 00	90	29.425.0 00.000,0 00	100	21.705.000. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut (%)	45	55	60		70	80	90	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.010.189.6 16,000		13.215.0 79.000,0 00		13.551.0 79.000,0 00		12.964.0 79.000,0 00		13.138.079. 000,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.072.198.0 54,000		7.509.07 9.000,00 0		6.734.07 9.000,00 0		6.881.07 9.000,00 0		6.894.079.0 00,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	71	75,44	80,15	6.072.198.0 54,000	80,93	7.509.07 9.000,00 0	81,20	6.734.07 9.000,00 0	81,87	6.881.07 9.000,00 0	82,56	6.894.079.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	72		74		76		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.165.964.4 22,000		1.095.00 0.000,00 0		1.135.00 0.000,00 0		1.175.00 0.000,00 0		1.215.000.0 00,000	
Meningkatnya Kualitas Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang menerima penyebaran informasi publik (%)	71,33	-	73,33	2.165.964.4 22,000	74,33	1.095.00 0.000,00 0	75,33	1.135.00 0.000,00 0	76,33	1.175.00 0.000,00 0	77,33	1.215.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					772.027.140 ,000		4.611.00 0.000,00 0		5.682.00 0.000,00 0		4.908.00 0.000,00 0		5.029.000.0 00,000	
Meningkatnya Layanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100	772.027.140 ,000	100	4.611.00 0.000,00 0	100	5.682.00 0.000,00 0	100	4.908.00 0.000,00 0	100	5.029.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Informatika yang dikelola dengan baik (%)	-	-	87,5		87,5		90		92,5		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.407.444.151,450		12.712.227.000,000		11.880.200.000,000		11.615.700.000,000		11.806.300.000,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.465.470.726,450		10.587.227.000,000		10.287.200.000,000		10.015.700.000,000		10.200.300.000,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	69	79,8	80,15	7.465.470.726,450	80,93	10.587.227.000,000	81,2	10.287.200.000,000	81,87	10.015.700.000,000	82,56	10.200.300.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	70		71		72		73		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	70		71		72		73		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					58.147.525,000		145.000.000,000		153.000.000,000		160.000.000,000		166.000.000,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib (%)	35,37	43	37	58.147.525,000	38	145.000.000,000	39	153.000.000,000	40	160.000.000,000	41	166.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					140.367.800,000		330.000.000,000		330.000.000,000		330.000.000,000		330.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketepatan waktu Koperasi dalam penyelenggaraan RAT	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu (%)	19,05	57	20,41	140.367.800,000	20,51	330.000.000,000	21,54	330.000.000,000	23,08	330.000.000,000	24	330.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					283.168.100,000		1.100.000.000,000		510.000.000,000		510.000.000,000		510.000.000,000	
Meningkatnya keberdayaan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro (%)	46,01	6,7	46,61	283.168.100,000	47,10	1.100.000.000,000	47,59	510.000.000,000	48,06	510.000.000,000	48,53	510.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					460.290.000,000		550.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000		600.000.000,000	
Terjalinnnya kerja sama antar pelaku UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro (%)	1,69	1,92	1,69	460.290.000,000	1,77	550.000.000,000	1,82	600.000.000,000	1,88	600.000.000,000	1,93	600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.374.757.465,000		8.862.125.000,000		9.477.915.000,000		9.888.087.000,000		10.222.880.000,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.768.604.613,000		7.812.125.000,000		8.360.915.000,000		8.697.007.000,000		8.947.639.000,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	72,00	79,80	80,15	5.768.604.613,000	80,93	7.812.125.000,000	81,20	8.360.915.000,000	81,87	8.697.007.000,000	82,56	8.947.639.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	72		73		74		75		76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	71		72		73		74		75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					95.507.572,000		395.000.000,000		375.000.000,000		240.000.000,000		265.000.000,000	
Meningkatnya iklim penanaman modal	Realisasi total terhadap target investasi (%)	20,14	-	60	95.507.572,000	65	395.000.000,000	70	375.000.000,000	75	240.000.000,000	80	265.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					313.891.900,000		300.000.000,000		360.000.000,000		540.000.000,000		570.000.000,000	
Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	26,43	-	28	313.891.900,000	29	300.000.000,000	30	360.000.000,000	31	540.000.000,000	32	570.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					177.519.491,000		300.000.000,000		324.000.000,000		348.080.000,000		372.241.000,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	80	-	80	177.519.491,000	81	300.000.000,000	82	324.000.000,000	83	348.080.000,000	84	372.241.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					19.233.889,000		55.000.000,000		58.000.000,000		63.000.000,000		68.000.000,000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal (%)	100	100	100	19.233.889,000	100	55.000.000,000	100	58.000.000,000	100	63.000.000,000	100	68.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					13.104.826.288,000		71.358.351.000,000		74.337.180.000,000		13.961.163.000,000		28.488.641.000,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.170.918.510,000		4.986.232.000,000		4.666.453.000,000		4.880.401.000,000		5.104.043.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	72,43	79,80	80,15	4.170.918.510,000	80,93	4.986.232.000,000	81,20	4.666.453.000,000	81,87	4.880.401.000,000	82,56	5.104.043.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	-	-	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)													
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					730.572.900,000		767.691.000,000		806.076.000,000		846.379.000,000		888.698.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	75,45	75,50	76	730.572.900,000	76,25	767.691.000,000	76,65	806.076.000,000	77	846.379.000,000	77	888.698.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					7.803.334.878,000		65.184.428.000,000		68.423.651.000,000		7.771.333.000,000		22.009.900.000,000	
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase kualitas pembinaan atlet berprestasi (%)	-	71	71,5	6.551.334.878,000	72	63.703.735.000,000	72,5	66.868.923.000,000	73	6.139.269.000,000	74	20.296.233.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase kualitas pembinaan pelatih bersertifikasi (%)	-	77,06	77,08		77,10		77,20		77,30		77,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Pembudayaan Olahraga	Persentase kualitas pembinaan penggiat olahraga rekreasi (%)	-	12,9	15,6	1.252.000.000,000	18,2	1.480.693.000,000	20,8	1.554.728.000,000	23,4	1.632.064.000,000	25,9	1.713.667.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					400.000.000,000		420.000.000,000		441.000.000,000		463.050.000,000		486.000.000,000	
Meningkatnya Partisipasi Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (%)	22,54	22,60	22,80	400.000.000,000	23,00	420.000.000,000	23,00	441.000.000,000	23,50	463.050.000,000	23,50	486.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					65.341.075.000		386.500.000,000		414.000.000,000		415.500.000,000		443.000.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					65.341.075.000		386.500.000,000		414.000.000,000		415.500.000,000		443.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas (%)	-	-	60	65.341.075.000	70	386.500.000,000	80	414.000.000,000	90	415.500.000,000	100	443.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					40.160.000.000		460.000.000,000		495.000.000,000		505.000.000,000		490.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					40.160.000.000		460.000.000,000		495.000.000,000		505.000.000,000		490.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Indeks KAMI (Angka)	443	-	462	40.160.000.000	472	460.000.000,000	482	495.000.000,000	492	505.000.000,000	500	490.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Persentase Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)	-	-	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.471.365.450,000		5.235.000.000,000		5.496.500.000,000		5.770.800.000,000		6.058.700.000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					887.455.600,000		1.175.000.000,000		1.233.600.000,000		1.295.100.000,000		1.359.600.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan (%)	27,27	28	30	887.455.600,000	32	1.175.000.000,000	34	1.233.600.000,000	36	1.295.100.000,000	38	1.359.600.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0,000		200.000.000,000		210.000.000,000		220.400.000,000		231.300.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	0	0	0	0,000	27,78	200.000.000,000	33,33	210.000.000,000	38,89	220.400.000,000	44,44	231.300.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					139.682.000,000		380.000.000,000		399.000.000,000		418.900.000,000		439.800.000,000	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap informasi sejarah	Hasil survey pemahaman sejarah daerah (Nilai)	0	0	72	139.682.000,000	74	380.000.000,000	76	399.000.000,000	78	418.900.000,000	80	439.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN					321.291.574,000		375.000.000,000		393.700.000,000		413.300.000,000		433.900.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	28,95	28,95	31,58	321.291.574 ,000	34,21	375.000. 000,000	34,21	393.700. 000,000	36,84	413.300. 000,000	36,84	433.900.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGLOLAAN PERMUSEUMAN					2.122.936.2 76,000		3.105.00 0.000,00 0		3.260.20 0.000,00 0		3.423.10 0.000,00 0		3.594.100.0 00,000	
Meningkatnya kepuasan pengunjung museum	Hasil survey kepuasan pengunjung museum (Nilai)	-	75	77	2.122.936.2 76,000	79	3.105.00 0.000,00 0	81	3.260.20 0.000,00 0	83	3.423.10 0.000,00 0	85	3.594.100.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.387.254.1 34,550		8.395.96 9.000,00 0		9.094.75 9.000,00 0		9.747.87 2.000,00 0		10.474.077. 000,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.535.684.7 74,550		6.991.71 9.000,00 0		7.690.50 9.000,00 0		8.343.62 2.000,00 0		9.069.827.0 00,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	72,11	73,61	74,61	5.535.684.7 74,550	77,11	6.991.71 9.000,00 0	79,61	7.690.50 9.000,00 0	82,11	8.343.62 2.000,00 0	84,61	9.069.827.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	73,45	77,14		80,14		83,14		86,14		89,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	72,05	75,05		78,05		81,05		84,05		87,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					851.569.360 ,000		1.404.25 0.000,00 0		1.404.25 0.000,00 0		1.404.25 0.000,00 0		1.404.250.0 00,000	
Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase (%) Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar (%)	18	20	30	851.569.360 ,000	40	1.404.25 0.000,00 0	50	1.404.25 0.000,00 0	60	1.404.25 0.000,00 0	70	1.404.250.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Pemustaka yang terlayani (%)	1,8	1,96	2,38		2,76		3,4		4,19		5,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					75.975.500,000		377.080.000,000		377.080.000,000		377.080.000,000		377.080.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					75.975.500,000		377.080.000,000		377.080.000,000		377.080.000,000		377.080.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Arsip sesuai dengan kaidah kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	66,15	69,65	73,15	75.975.500,000	76,65	377.080.000,000	80,15	377.080.000,000	83,65	377.080.000,000	87,15	377.080.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.333.375.971,880		27.785.400.000,000		26.273.900.000,000		25.855.900.000,000		26.671.000.000,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.320.975.771,880		9.225.400.000,000		9.125.900.000,000		9.468.900.000,000		9.871.000.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	87,71	87,80	87,80	7.320.975.771,880	87,80	9.225.400.000,000	87,80	9.125.900.000,000	88,00	9.468.900.000,000	88,00	9.871.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	80,18	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	72,30	73	74		76		78		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					6.459.781.100,000		13.485.000.000,000		12.718.000.000,000		12.752.000.000,000		12.775.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kemampuan Penangkapan Ikan Oleh Nelayan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	40.775	40.900	41.000	6.459.781.100,000	41.100	13.485.000.000,00	41.200	12.718.000.000,00	41.300	12.752.000.000,00	41.400	12.775.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					543.453.700,000		2.500.000.000,00		1.855.000.000,00		1.810.000.000,00		2.200.000.000,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Laut dan Air Payau	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	427,37	452	477	78.912.000,000	502	1.600.000.000,00	527	955.000.000,000	553	910.000.000,000	578	1.300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya produksi benih ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan (Ekor)	2.422.651	2.450.000	2.500.000	464.541.700,000	2.510.000	900.000.000,000	2.520.000	900.000.000,000	2.530.000	900.000.000,000	2.540.000	900.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					220.672.000,000		530.000.000,000		530.000.000,000		530.000.000,000		530.000.000,000	
Terjaganya luas kawasan konservasi	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	391.820,2	391.820,2	391.820,2	220.672.000,000	391.820,2	530.000.000,000	391.820,2	530.000.000,000	391.820,2	530.000.000,000	391.820,2	530.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					788.493.400,000		2.045.000.000,00		2.045.000.000,00		1.295.000.000,00		1.295.000.000,000	
Meningkatnya Keterserapan Produk Olahan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	71,44	71,84	72,24	788.493.400,000	72,64	2.045.000.000,00	73,04	2.045.000.000,00	73,44	1.295.000.000,00	73,88	1.295.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					23.502.915.835,000		32.870.686.000,00		33.987.231.000,00		35.137.328.000,00		36.328.684.000,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.694.166.851,000		8.577.684.000,00		8.843.971.000,00		9.114.053.000,00		9.394.602.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75	87,71	87,80	6.694.166.851,000	87,80	8.577.684.000,00	87,80	8.843.971.000,00	88,00	9.114.053.000,00	88,00	9.394.602.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	80	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	80	81	81		82		83		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					16.125.381.484,000		18.208.835.000,000		18.846.144.000,000		19.505.760.000,000		20.188.461.000,000	
Meningkatnya destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik (%)	77,65	80	82,35	16.125.381.484,000	84,71	18.208.835.000,000	87,05	18.846.144.000,000	89,41	19.505.760.000,000	90,58	20.188.461.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					451.761.300,000		3.654.216.000,000		3.782.115.000,000		3.914.488.000,000		4.051.493.000,000	
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	286.843	-	310.000	451.761.300,000	312.000	3.654.216.000,000	314.000	3.782.115.000,000	316.000	3.914.488.000,000	318.000	4.051.493.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					0,000		44.478.000,000		46.035.000,000		47.646.000,000		49.313.000,000	
Meningkatnya perlindungan terhadap pelaku ekraf melalui HAKI	Persentase pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan HAKI (%)	0	0	1	0,000	1	44.478.000,000	1	46.035.000,000	1	47.646.000,000	1	49.313.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					231.606.200,000		2.385.473.000,000		2.468.966.000,000		2.555.381.000,000		2.644.815.000,000	
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	84,8	90	95	231.606.200,000	95	2.385.473.000,000	95	2.468.966.000,000	95	2.555.381.000,000	95	2.644.815.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.008.888.000,000		31.272.865.000,000		33.742.566.000,000		36.427.168.000,000		39.346.683.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.365.682. 000,000		20.984.0 30.000,0 00		22.948.3 22.000,0 00		25.102.3 37.000,0 00		27.464.733. 000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	90	90	90	15.365.682. 000,000	90	20.984.0 30.000,0 00	90	22.948.3 22.000,0 00	90	25.102.3 37.000,0 00	90	27.464.733. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	0	75		75,50		76		76,50		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					869.001.000 ,000		2.818.70 0.000,00 0		2.959.63 6.000,00 0		3.107.61 8.000,00 0		3.262.997.0 00,000	
Meningkatnya produksi perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Lada) (Kg)	4.321.862	-	4.764.852,86	18.048.600, 000	5.003.095	350.700. 000,000	5.253.250	368.235. 600,000	5.515.913	386.646. 800,000	5.791.708	405.979.200 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Sawit (TBS)) (Kg)	59.969.391	-	66.116.253,58		69.422.066		72.893.170		76.537.828		80.364.719		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Ayam (Kg)	4.917.860	-	5.421.941	778.758.000 ,000	5.693.038	1.707.30 0.000,00 0	5.977.690	1.792.66 5.000,00 0	6.276.574	1.882.29 9.000,00 0	6.590.403	1.976.413.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Sapi (Kg)	70.686	-	75.174		79.662		84.150		88.638		93.126		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pendampingan kelompok tani yang menerima sarana pertanian (%)	100	-	100	0,000	100	10.500.0 00,000	100	11.025.0 00,000	100	11.577.0 00,000	100	12.155.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Cabai (Kg)	1.183.000	-	1.290.000	72.194.400, 000	1.345.000	750.200. 000,000	1.401.000	787.710. 400,000	1.458.000	827.095. 200,000	1.516.000	868.449.800 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi (Kg)	870.200	-	1.691.120		2.358.050		3.039.830		3.736.720		4.448.970		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.287.983.000,00		6.147.750.000,00		6.455.138.000,00		6.777.894.000,00		7.116.784.000,00	
Tersedianya prasarana pertanian yang memadai	Luas Areal Perkebunan yang mendapatkan Pendampingan (Ha)	743	-	850	4.287.983.000,00	950	6.147.750.000,00	1.050	6.455.138.000,00	1.150	6.777.894.000,00	1.250	7.116.784.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikelola (%)	18,91	-	20,88		21,86		22,85		23,83		24,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Prasarana Peternakan yang Terkelola (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					206.069.000,00		362.880.000,00		381.025.000,00		400.075.000,00		420.079.000,00	
Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100	206.069.000,00	100	362.880.000,00	100	381.025.000,00	100	400.075.000,00	100	420.079.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					33.750.000,00		81.900.000,00		85.995.000,00		90.295.000,00		94.809.000,00	
Terkendalinya hama penyakit tanaman	Persentase Penanganan Bencana Pertanian pada Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100	-	100	33.750.000,00	100	81.900.000,00	100	85.995.000,00	100	90.295.000,00	100	94.809.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian pada Tanaman Perkebunan (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					9.840.000,00		119.280.000,00		125.245.000,00		131.506.000,00		138.084.000,00	
Meningkatnya kepemilikan legalitas usaha di bidang perkebunan	Persentase fasilitasi penerbitan legalitas usaha di bidang perkebunan (%)	81,67	-	84	9.840.000,00	85	119.280.000,00	86	125.245.000,00	87	131.506.000,00	88	138.084.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase fasilitasi penerbitan legalitas usaha di bidang peternakan (%)	100	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					236.563.000,00		758.325.000,00		787.205.000,00		817.443.000,00		849.197.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Persentase peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani (%)	4,21	-	4,47	236.563.000,000	4,74	758.325.000,000	5	787.205.000,000	5,26	817.443.000,000	5,53	849.197.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					5.000.000,000		506.000.000,000		635.000.000,000		536.000.000,000		766.000.000,000	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					5.000.000,000		506.000.000,000		635.000.000,000		536.000.000,000		766.000.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Taman Hutan Raya	Persentase pengelolaan Tahura (%)	16,67	26,67	20,00	5.000.000,000	33,33	506.000.000,000	40,00	635.000.000,000	46,67	536.000.000,000	53,33	766.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					169.100.000,000		1.236.000.000,000		1.341.000.000,000		2.980.000.000,000		2.968.000.000,000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					36.100.000,000		590.000.000,000		590.000.000,000		590.000.000,000		590.000.000,000	
Tersedianya sarana distribusi yang memadai	Pasar Representatif (Pasar)	2	2	2	36.100.000,000	2	590.000.000,000	2	590.000.000,000	2	590.000.000,000	2	590.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					26.450.000,000		84.000.000,000		90.000.000,000		95.000.000,000		100.000.000,000	
Terjaganya stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya (Laporan)	12	12	12	26.450.000,000	12	84.000.000,000	12	90.000.000,000	12	95.000.000,000	12	100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					106.550.000,000		412.000.000,000		486.000.000,000		2.095.000.000,000		2.028.000.000,000	
Terjaganya hak konsumen	Cakupan pengawasan pada alat tera (%)	80	82	80	106.550.000,000	81	412.000.000,000	82	486.000.000,000	83	2.095.000.000,000	84	2.028.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0,000		150.000.000,000		175.000.000,000		200.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan (%)	-	-	-	0,000	1	150.000.000,000	2	175.000.000,000	3	200.000.000,000	4	250.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN					317.527.862,000		420.200.000,000		442.000.000,000		457.000.000,000		481.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG PERINDUSTRIAN														
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					317.527.862 ,000		335.200. 000,000		347.000. 000,000		355.000. 000,000		371.000.000 ,000	
Meningkatnya hilirisasi sumber daya alam	Persentase realisasi investasi sektor industri (hilirisasi) (%)	-	-	12	317.527.862 ,000	13	335.200. 000,000	14	347.000. 000,000	15	355.000. 000,000	16	371.000.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0,000		30.000.0 00,000		35.000.0 00,000		37.000.0 00,000		40.000.000, 000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase rekomendasi teknis izin industri yang diterbitkan (%)	-	-	0	0,000	100	30.000.0 00,000	100	35.000.0 00,000	100	37.000.0 00,000	100	40.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0,000		55.000.0 00,000		60.000.0 00,000		65.000.0 00,000		70.000.000, 000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap akurat dan terkini (Dokumen)	-	-	0	0,000	2	55.000.0 00,000	2	60.000.0 00,000	2	65.000.0 00,000	2	70.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					40.924.366. 957,250		51.340.6 08.000,0 00		56.918.5 55.000,0 00		64.098.9 77.000,0 00		67.829.604. 000,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.229.587. 195,550		40.611.1 03.000,0 00		45.118.9 55.000,0 00		51.121.3 67.000,0 00		53.555.783. 000,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	78,94	79,80	80,15	31.068.433. 195,550	80,93	39.338.3 86.000,0 00	81,20	43.716.6 55.000,0 00	81,87	49.578.8 37.000,0 00	82,56	51.859.000. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	85		87		88		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	85		87		88		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
Meningkatnya nilai kematangan organisasi pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan kebijakan penataan organisasi (%)	-	-	100	178.463.000,000	100	199.717.000,000	100	222.000.000,000	100	244.200.000,000	100	268.620.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (%)	-	-	100	982.691.000,000	100	1.073.000.000,000	100	1.180.300.000,000	100	1.298.330.000,000	100	1.428.163.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.327.614.261,700		10.314.005.000,000		11.344.400.000,000		12.478.840.000,000		13.726.724.000,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Hukum yang ditetapkan (%)	-	-	100	8.327.614.261,700	100	10.314.005.000,000	100	11.344.400.000,000	100	12.478.840.000,000	100	13.726.724.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti (%)	-	-	90		91		91		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					367.165.500,000		415.500.000,000		455.200.000,000		498.770.000,000		547.097.000,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola PBJ (Nilai)	-	-	80	367.165.500,000	85	415.500.000,000	90	455.200.000,000	95	498.770.000,000	100	547.097.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan Program Pembangunan Daerah yang dievaluasi (%)	-	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
	Persentase rekomendasi kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti (%)	-	-	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					31.429.130.300,000		46.337.850.000,000		46.703.100.000,000		48.552.850.000,000		48.525.550.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.158.822. 040,000		26.848.8 50.000,0 00		26.924.1 00.000,0 00		26.723.8 50.000,0 00		27.496.550. 000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	85,76	85,76	85,80	21.158.822. 040,000	85,85	26.848.8 50.000,0 00	85,90	26.924.1 00.000,0 00	85,95	26.723.8 50.000,0 00	86	27.496.550. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai survei kepuasan DPRD terhadap pelayanan keuangan, kesejahteraan dan administrasi DPRD (Nilai)	-	78	80		81		83		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	78	80		81		83		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	78	80		81		83		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					10.270.308. 260,000		19.489.0 00.000,0 00		19.779.0 00.000,0 00		21.829.0 00.000,0 00		21.029.000. 000,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase penetapan rancangan Peraturan Daerah tahun N (%)	63,63	67	70	2.873.958.2 60,000	70	6.546.00 0.000,00 0	80	6.836.00 0.000,00 0	80	7.886.00 0.000,00 0	80	7.086.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	-	100	100	7.396.350.0 00,000	100	12.943.0 00.000,0 00	100	12.943.0 00.000,0 00	100	13.943.0 00.000,0 00	100	13.943.000. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.717.199.2 69,000		11.022.2 38.000,0 00		25.031.5 16.000,0 00		12.709.3 74.000,0 00		13.213.269. 000,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.361.367.8 50,000		10.004.0 05.000,0 00		23.504.8 46.000,0 00		11.030.0 94.000,0 00		11.581.601. 000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	71	71,5	72	8.361.367.850,000	73	10.004.005.000,000	74	23.504.846.000,000	75	11.030.094.000,000	76	11.581.601.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							257.803.300,000				661.044.000,000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	257.803.300,000	100	661.044.000,000	100	1.138.772.000,000	100	1.260.138.000,000	100	1.181.723.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					98.028.119,000		357.189.000,000		387.898.000,000		419.142.000,000		449.945.000,000	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program dalam RENJA Perangkat Daerah dengan RENSTRA Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilavahan (%)	100	100	100	16.348.800,000	100	106.403.000,000	100	111.723.000,000	100	117.309.000,000	100	123.171.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program dalam RENJA Perangkat Daerah dengan RENSTRA Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	100	100	44.880.000,000	100	143.000.000,000	100	163.000.000,000	100	183.000.000,000	100	202.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Bidang Perkonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program dalam RENJA Perangkat Daerah dengan RENSTRA Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)	100	100	100	36.799.319,000	100	107.786.000,000	100	113.175.000,000	100	118.833.000,000	100	124.774.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					127.644.077.060,000		144.598.161.000,000		150.338.515.000,000		155.978.355.000,000		157.533.979.000,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.793.451.777,000		20.295.223.000,000		21.099.917.000,000		22.731.144.000,000		23.942.550.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75	75	87,80	10.117.061.798,000	87,90	11.040.971.000,000	88,00	11.396.867.000,000	88,10	12.089.295.000,000	88,20	13.078.238.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	74		75		76		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100
Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	66,37	79,8	80,15	7.676.389.979,000	80,93	9.254.252.000,000	81,2	9.703.050.000,000	81,87	10.641.849.000,000	82,56	10.864.312.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	-	80	82		84		85		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)													
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	79	80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					108.696.480.683,000		121.991.712.000,000		126.762.358.000,000		130.577.844.000,000		130.737.771.000,000	
Meningkatnya realisasi target penerimaan dana perimbangan dan dana transfer daerah pada tahun berkenaan	Optimalisasi penerimaan dana perimbangan dan Dana Transfer Daerah (%)	97,53	97,68	97,83	51.560.000,000	97,98	61.872.000,000	98,13	74.246.000,000	98,28	89.095.000,000	98,43	106.914.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (%)	-	95	96	108.644.920.683,000	97	121.929.840.000,000	98	126.688.112.000,000	100	130.488.749.000,000	100	130.630.857.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					422.934.800,000		1.415.890.000,000		1.458.365.000,000		1.502.112.000,000		1.502.112.000,000	
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (%)	-	85	88	422.934.800,000	93	1.415.890.000,000	98	1.458.365.000,000	100	1.502.112.000,000	100	1.502.112.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					731.209.800,000		895.336.000,000		1.017.875.000,000		1.167.255.000,000		1.351.546.000,000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	-0,85	5,50	1,63	731.209.800,000	3,14	895.336.000,000	3,17	1.017.875.000,000	3,21	1.167.255.000,000	3,24	1.351.546.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.009.686.782,040		15.673.650.000,000		14.467.930.000,000		14.050.750.000,000		14.358.750.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.106.251.0 74,040		9.987.65 0.000,00 0		8.575.75 0.000,00 0		8.230.75 0.000,00 0		8.380.750.0 00,000	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	70	80,15	80,15	7.106.251.0 74,040	80,93	9.987.65 0.000,00 0	81,20	8.575.75 0.000,00 0	81,87	8.230.75 0.000,00 0	82,56	8.380.750.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		81	82	83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian		
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		81	82	83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian		
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100	100	100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100	100	100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					903.435.708 ,000		5.686.00 0.000,00 0		5.892.18 0.000,00 0		5.820.00 0.000,00 0		5.978.000.0 00,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik (%)	-	-	82	517.935.708 ,000	83	2.786.00 0.000,00 0	84	2.853.00 0.000,00 0	85	2.920.00 0.000,00 0	85	2.978.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (%)	-	-	82		83	84	85	85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian				
	Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan (%)	-	-	84		86	88	90	91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian				
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)	-	-	90	385.500.000 ,000	91	2.900.00 0.000,00 0	92	3.039.18 0.000,00 0	93	2.900.00 0.000,00 0	94	3.000.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					183.477.000 ,000		4.875.00 0.000,00 0		4.975.00 0.000,00 0		5.075.00 0.000,00 0		5.100.000.0 00,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					183.477.000 ,000		4.875.00 0.000,00 0		4.975.00 0.000,00 0		5.075.00 0.000,00 0		5.100.000.0 00,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (%)	49	51	52	183.477.000 ,000	53	4.875.00 0.000,00 0	54	4.975.00 0.000,00 0	55	5.075.00 0.000,00 0	60	5.100.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					72.695.500. 000		1.282.99 5.000,00 0		1.119.60 7.000,00 0		1.287.08 7.000,00 0		1.449.692.0 00,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					72.695.500. 000		432.995. 000,000		119.607. 000,000		137.087. 000,000		149.692.000 ,000	
Meningkatnya fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	0	10	72.695.500. 000	20	432.995. 000,000	30	119.607. 000,000	40	137.087. 000,000	50	149.692.000 ,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,000		850.000. 000,000		1.000.00 0.000,00 0		1.150.00 0.000,00 0		1.300.000.0 00,000	
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah (%)	0	0	10	0,000	20	850.000. 000,000	30	1.000.00 0.000,00 0	40	1.150.00 0.000,00 0	50	1.300.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					11.133.715. 742,000		16.163.0 71.000,0 00		25.402.5 19.000,0 00		20.999.3 26.000,0 00		21.737.554. 000,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.709.070. 186,000		15.023.0 71.000,0 00		24.417.5 19.000,0 00		20.014.3 26.000,0 00		20.752.554. 000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	90,91	90,91	90,91	10.709.070. 186,000	90,92	15.023.0 71.000,0 00	90,93	24.417.5 19.000,0 00	90,94	20.014.3 26.000,0 00	90,95	20.752.554. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	71		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					244.062.580,000		705.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan /Pemeriksaan pada wilayah Irban I (%)	31,41	80	82	244.062.580,000	85	705.000.000,000	87	550.000.000,000	90	550.000.000,000	95	550.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan /Pemeriksaan pada wilayah Irban II (%)	31,41	80	82		85		87		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan /Pemeriksaan pada wilayah Irban III (%)	31,41	80	82		85		87		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan /Pemeriksaan pada wilayah Irban Pencegahan dan Investigasi (%)	31,41	80	82		85		87		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					180.582.976,000		435.000.000,000		435.000.000,000		435.000.000,000		435.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Jumlah Pelayanan Consulting yang diberikan dibidang pengawasan pada wilayah Irban I (%)	-	100	100	180.582.976,000	100	435.000.000,000	100	435.000.000,000	100	435.000.000,000	100	435.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Pelayanan Consulting yang diberikan dibidang pengawasan pada wilayah Irban II (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Jumlah Pelayanan Consulting yang diberikan dibidang pengawasan pada wilayah Irban III (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Jumlah Pelayanan Consulting yang diberikan dibidang pengawasan pada wilayah Irbn Pencegahan dan Investigasi (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					30.618.891.394,410		48.312.883.000,00		38.190.106.000,00		39.343.977.000,00		40.475.927.000,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.822.913.289,410		40.293.231.000,00		30.076.155.000,00		31.071.687.000,00		32.182.100.000,000	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	78,06	77	80,15	12.053.417.611,730	80,93	13.787.134.000,00	81,2	13.934.634.000,00	81,87	14.784.384.000,00	82,56	15.446.284.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	75		75		77		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	75		75		77		78		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75	75	80,15	3.271.855.699,000	80,93	3.536.550.000,00	81,2	4.128.550.000,00	81,87	4.386.050.000,00	82,56	4.432.050.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	72		78		78		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	70	72		78		78		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	-	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75,44	79,8	80,15	3.311.331.387,000	80,93	3.776.203.000,000	81,20	4.246.506.000,000	81,87	4.087.870.000,000	82,56	4.581.863.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	85		87		89		91		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	80		82		84		86		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75,44	79,8	80,15	3.133.467.360,000	80,93	8.915.040.000,000	81,20	3.201.706.000,000	81,87	3.352.244.000,000	82,56	3.546.134.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	70		73		75		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	72		75		76		78		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah sesuai ketentuan (%)													
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	75,44	79,8	80,15	3.052.841.231,680	80,93	10.278.304.000,000	81,20	4.564.759.000,000	81,87	4.461.139.000,000	82,56	4.175.769.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	77		78	80	82	84	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	71		72	73	74	75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.330.025.000,000		1.330.025.000,000		1.330.025.000,000		1.330.025.000,000		1.330.025.000,000	
Penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	100	1.330.025.000,000	100	1.330.025.000,000	100	1.330.025.000,000	100	1.330.025.000,000	100	1.330.025.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.813.917.505,000		3.632.467.000,000		3.650.823.000,000		3.725.337.000,000		3.689.559.000,000	
Meningkatnya masyarakat yang lebih berdaya	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	100	100	94.860.000,000	100	299.934.000,000	100	281.916.000,000	100	309.933.000,000	100	309.933.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya masyarakat yang lebih berdaya	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	90	-	90	121.205.000,000	90	155.000.000,000	90	172.500.000,000	90	175.500.000,000	90	172.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya masyarakat yang lebih berdaya	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	-	100	232.483.000,000	100	281.840.000,000	100	282.000.000,000	100	302.000.000,000	100	302.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya masyarakat yang lebih berdaya	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	72	72	72	171.680.005,000	75	116.193.000,000	77	122.907.000,000	80	130.404.000,000	82	135.126.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya masyarakat yang lebih berdaya	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	-	-	100	2.193.689.500,000	100	2.779.500.000,000	100	2.791.500.000,000	100	2.807.500.000,000	100	2.770.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					15.346.000,000		76.600.000,000		76.125.000,000		79.600.000,000		80.175.000,000	
Meningkatnya koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada wiayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	-	-	100	2.050.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada wiayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	-	-	100	4.100.000,000	100	11.100.000,000	100	8.100.000,000	100	11.100.000,000	100	8.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada wilayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	-	-	100	2.636.000,000	100	15.000.000,000	100	17.000.000,000	100	17.000.000,000	100	20.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada wilayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	-	-	100	3.280.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada wilayah kecamatan	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)	-	-	100	3.280.000,000	100	10.500.000,000	100	11.025.000,000	100	11.500.000,000	100	12.075.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.468.006.800,000		2.639.503.000,000		2.675.852.000,000		2.703.996.000,000		2.726.970.000,000	
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum secara Efektif dan Efisien	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	274.757.500,000	100	620.000.000,000	100	620.000.000,000	100	620.000.000,000	100	620.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum secara Efektif dan Efisien	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	345.626.000,000	100	435.000.000,000	100	435.000.000,000	100	435.000.000,000	100	435.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum secara Efektif dan Efisien	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	217.264.300,000	100	317.003.000,000	100	332.852.000,000	100	349.496.000,000	100	366.970.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya koordinasi, pembinaan, dan fasilitas urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	-	-	100	307.168.000,000	100	926.500.000,000	100	947.000.000,000	100	953.500.000,000	100	959.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan fasilitas urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	-	-	100	323.191.000,000	100	341.000.000,000	100	341.000.000,000	100	346.000.000,000	100	346.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					168.682.800,000		341.057.000,000		381.126.000,000		433.332.000,000		467.098.000,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa taat administrasi (%)	100	100	100	35.284.000,000	100	110.000.000,000	100	135.000.000,000	100	205.000.000,000	100	225.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa taat administrasi (%)	100	100	100	30.812.000,000	100	48.950.000,000	100	49.500.000,000	100	50.000.000,000	100	50.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa taat administrasi (%)	100	100	100	26.040.800,000	100	29.107.000,000	100	31.626.000,000	100	25.332.000,000	100	26.598.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa taat administrasi (%)	100	100	100	38.346.000,000	100	108.000.000,000	100	108.000.000,000	100	108.000.000,000	100	108.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa taat administrasi (%)	100	100	100	38.200.000,000	100	45.000.000,000	100	57.000.000,000	100	45.000.000,000	100	57.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.968.631.205,000		16.459.400.000,000		17.232.900.000,000		17.992.400.000,000		19.229.850.000,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					4.159.641.805,000		9.003.900.000,000		9.591.300.000,000		10.169.300.000,000		11.277.200.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	82,62	82,62	83	4.159.641.805,000	85	9.003.900.000,000	87	9.591.300.000,000	88	10.169.300.000,000	90	11.277.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik				
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik				
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik				
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik				
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					700.283.400,000		2.225.000.000,000		2.271.000.000,000		2.315.500.000,000		2.362.700.000,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	100	100	100	700.283.400,000	100	2.225.000.000,000	100	2.271.000.000,000	100	2.315.500.000,000	100	2.362.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.668.727.500,000		1.857.000.000,000		1.882.100.000,000		1.912.100.000,000		1.942.100.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	99,87	100	100	1.668.727.500,000	100	1.857.000.000,000	100	1.882.100.000,000	100	1.912.100.000,000	100	1.942.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					53.757.000,000		114.500.000,000		114.500.000,000		114.500.000,000		114.500.000,000	
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terawasi (%)	0	100	100	53.757.000,000	100	114.500.000,000	100	114.500.000,000	100	114.500.000,000	100	114.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					293.480.000,000		1.564.000.000,000		1.592.000.000,000		1.627.500.000,000		1.660.600.000,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	81,85	83	84	293.480.000,000	88	1.564.000.000,000	92	1.592.000.000,000	96	1.627.500.000,000	100	1.660.600.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					92.741.500,000		1.695.000.000,000		1.782.000.000,000		1.853.500.000,000		1.872.750.000,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang tertangani	Persentase konflik sosial yang tertangani (%)	92,87	100	100	92.741.500,000	100	1.695.000.000,000	100	1.782.000.000,000	100	1.853.500.000,000	100	1.872.750.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.101.883.254.456,400		1.775.202.959.000,000		1.779.079.104.000,000		1.616.694.428.000,000		1.681.335.911.000,000	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, serta manfaat dan/atau dampak. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcomes* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan memenuhi kriteria *specific* (kekhususan), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (rasional), *time bond* (batas waktu pencapaian) dan *continuously improve* (bersifat terus menerus meningkatkan kualitas kinerja). Selain untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, indikator kinerja juga merupakan instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penetapan indikator dan target kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Belitung yang terpilih pada periode tersebut. Penetapan indikator disini juga disertai dengan proyeksi dan perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan di tahun baseline yaitu tahun 2024. Terdapat indikator kinerja utama yang didasarkan pada tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Belitung 2025-2029, serta indikator kinerja daerah berdasarkan masing-masing urusan yang diampu oleh para perangkat daerah di Kabupaten Belitung.

4.2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai pada hasil turunan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 di Kabupaten Belitung dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Belitung. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.2.2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode perencanaan, yang dijabarkan melalui target-target pencapaian setiap



tahunnya. Indikator Kinerja Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 terdiri dari 4 (empat), yaitu:

1. Tujuan 1: Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia. Tujuan 1 ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Modal Manusia dan Tingkat Kemiskinan
2. Tujuan 2: Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial. Tujuan ini memiliki indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi
3. Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Tujuan ini memiliki indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi
4. Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Penurunan Intensitas Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Indeks modal manusia	Nilai	n/a	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	
		Tingkat kemiskinan	%	6,11	5,20	4,91	4,62	3,75	3,06	2,59	
2.	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	1,84	2,11	2,93	3,72	4,23	5,80	6,46	
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	79,74 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	82,00 (A)	83,00 (A)	84,00 (A)	85,00 (A)	
4.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	n/a	85,35 (Baik)	89,25 (Sangat Baik)	90,96 (Sangat Baik)	91,12 (Sangat Baik)	92,25 (Sangat Baik)	93,63 (Sangat Baik)	
		Penurunan intensitas emisi GRK	%	54,40	54,55	56,75	58,95	61,14	63,34	65,54	

4.2.2.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Sasaran merupakan bentuk rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Oleh karena itu sasaran menjadi sangat penting untuk bisa diukur, dengan indikator dan target-target yang tepat. Ke-empat tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut dalam 13 (tiga belas) sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pendidikan. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kesehatan. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Usia Harapan Hidup.
3. Sasaran 3: Menurunnya prevalensi stunting. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Prevalensi Stunting.
4. Sasaran 4: Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat. Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator didalamnya, yaitu Pengeluaran Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini.
5. Sasaran 5: Meningkatnya investasi daerah. Sasaran ini memiliki indikator yaitu Nilai Investasi (PMDN dan PMA).
6. Sasaran 6: Meningkatnya pertumbuhan sektor prima. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Pertumbuhan Sektor Prima.
7. Sasaran 7: Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kota.
8. Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital. Sasaran ini memiliki 4 (empat) indikator yang meliputi Indeks Pemerintah Digital, Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pelayanan Publik, dan Tingkat Maturitas SPIP.
9. Sasaran 9: Terwujudnya Profesionalitas ASN. Sasaran ini memiliki indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN.
10. Sasaran 10: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Rasio Kemandirian Fiskal.
11. Sasaran 11: Tersedianya infrastruktur yang inklusif dan berkualitas. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Infrastruktur.
12. Sasaran 12: Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah Indeks Kesulitan Geografis.
13. Sasaran 13: Meningkatnya kelestarian lingkungan. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2030

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,05	9,16	9,27	9,37	9,48	9,59	9,70	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09	12,42	12,58	12,74	12,90	13,06	13,22	
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,76	74,15	74,49	74,83	75,16	75,50	75,84	
3.	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi Stunting	%	18,1	16,94	15,85	14,76	13,27	12,55	11,78	
4.	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	14.449.000	14.651.000	14.854.000	15.057.000	15.259.000	15.462.000	15.664.605	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,88	3,74	3,51	3,34	3,16	2,95	2,82	
		Indeks Gini	Nilai	0,248	0,241	0,237	0,224	0,220	0,215	0,210	
5.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi	Rp Juta	1.116.727	1.200.000	1.300.000	1.450.000	1.650.000	1.900.000	2.200.000	
6.	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan Sektor Prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan)	%	3,78	3,80	3,97	4,11	4,26	4,35	4,41	
7.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan Kepariwisataa n Kabupaten Kota	Nilai	3,28	3,80	4,19	4,58	4,81	5,03	5,39	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	1,72	1,80	1,90	1,90	2,00	2,00	2,20	
		Nilai SAKIP	Nilai	64,68	65,84 (B)	67,00 (B)	68,16 (B)	69,32 (B)	70,48 (BB)	71,64 (BB)	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74,7644	76,8121	77,2130	78,9114	80,2365	81,1197	82,5071	
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	n/a	4,10	4,15	4,20	4,25	4,3	4,35	
		Tingkat Maturitas SPIP	Angka	Level 3 (3,540)	Level 3 (3,541)	Level 3 (3,542)	Level 3 (3,543)	Level 3 (3,544)	Level 3 (3,545)	Level 3 (3,546)	
9.	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,58	79,80	80,15	80,93	81,20	81,87	82,56	
10.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	23,67	23,94	24,21	24,83	25,14	25,72	26,10	
11.	Tersedianya infrastruktur yang inklusif dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	65,01	67,28	77,56	85,09	92,06	100	107,97	
12.	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	32,72	32,52	32,43	32,35	32,26	32,18	32,09	
13.	Meningkatnya kelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,84	76,81	76,98	77,15	77,32	77,49	77,66	
		Indeks Risiko Bencana	Nilai	143,71	117,14	116,05	114,96	113,87	112,80	111,71	

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui perolehan target indikator kinerja yang ditetapkan sebagai representasi hasil akhir visi, misi, dan program yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Pengukuran IKD ditujukan untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kemajuan pembangunan yang dihasilkan oleh pengimplementasian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode pemerintahannya yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Dalam perspektif evaluasi, indikator-indikator tersebut berperan sebagai landasan yang digunakan untuk menganalisa ketercapaian atau ketidaktercapaian pembangunan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Evaluasi perencanaan pembangunan ditujukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, RPJMD sebagai dokumen yang memuat agenda-agenda pembangunan Bupati dan Wakil Bupati harus memuat IKD sebagai target rencana pembangunan yang kemudian dijadikan ukuran untuk mengevaluasi hasil pembangunan. Penetapan indikator kinerja adalah syarat mutlak dalam menerapkan rencana kinerja sebagai penjabaran RPJMD yang dimana rencana kerja merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teknis, IKD disusun dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). IKD dibagi menjadi lima aspek yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan indikator kinerja kunci. Adapun aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Kemudian, aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Lalu, aspek daya saing daerah yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Selain penetapan indikator yang merepresentasikan capaian visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan target indikator kinerja setiap tahun dalam satu periode. Target tersebut dapat diperoleh dengan melaksanakan peramalan (*forecasting*) yang merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui situasi di masa yang akan datang dengan menggunakan data dari masa lampau. Melalui peramalan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan target yang rasional sehingga terhindar dari ketimpangan yang terlalu jauh antara besaran target dengan potensi ketercapaian indikator. Berikut merupakan penetapan IKD dan target IKD Kabupaten Belitung dalam periode 2025-2030.

Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	Aspek Geografi dan Demografi										
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	n/a	11,94	11,21	10,48	9,74	9,01	8,41		
2	Konsumsi Listrik per kapita	kwh	n/a	1.477	1.627	1.778	1.928	2.078	2.154		
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,88	6,12	9,59	13,06	16,53	20,00	20,51		
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	n/a	92,03	95,36	99,24	100	100	100		
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	0,6	1,13	0,65	1,42	0,72	1,23		
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1,84*	2,11	2,93	3,72	4,23	5,80	6,46		
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,11	5,2	4,91	4,62	3,75	3,06	2,59		
3	PDRB Perkapita	Rp Juta Per Tahun	73.933.000	77.290.086	80.597.694	83.905.303	87.212.912	90.520.521	93.828.130		
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,88	3,74	3,51	3,34	3,16	2,95	2,82		
5	Indeks Gini	Nilai	0,248	0,241	0,237	0,224	0,220	0,215	0,210		
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,96	75,52	76,46	76,75	77,69	77,85	77,98		
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,76	74,15	74,49	74,83	75,16	75,50	75,84		
8	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,50		
9	Prevalensi Stunting	%	18,1	16,94	15,85	14,76	13,27	12,55	11,78		
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,05	9,16	9,27	9,37	9,48	9,59	9,70		
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09	12,42	12,58	12,74	12,90	13,06	13,22		
12. a	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca										
	- SD	%	78,85	79,00	79,15	79,30	79,45	79,60	79,75		
	- SMP	%	89,54	89,64	89,74	89,84	89,94	90,04	90,14		

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12. b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi									
	- SD	%	72,07	72,22	72,37	72,52	72,67	72,82	72,87	
	- SMP	%	81,87	81,97	82,07	82,17	82,27	82,37	82,47	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	80,47	80,75	81,75	82,75	83,75	84,75	85,75	
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	36,95	38,05	40,11	41,39	43,72	45,65	47,23	
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	n/a	76,66	77,10	77,54	77,98	78,42	78,77	
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	54,37	54,87	55,37	55,87	56,37	56,87	57,37	
17	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	64,90	65,00	65,70	66,00	67,10	67,50	67,75	
18	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,361	0,275	0,264	0,255	0,247	0,241	0,232	
19	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	n/a	60,00	61,98	63,45	65,70	66,98	68,55	
III Aspek Daya Saing Daerah										
1	Angka Ketergantungan	%	43,55	44,02	43,91	43,80	43,35	43,26	43,18	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	12,67	12,73	12,78	12,92	13,11	13,14	13,25	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,22	4,54	4,67	4,73	4,85	5,22	5,30	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	34,26	35,17	35,18	35,20	35,21	35,23	35,34	
5	Rasio Kewirausahaan	%	1,25 (2023)	5,94	6,24	6,54	6,85	7,46	7,76	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,18	68,97	70,11	70,64	71,05	71,92	72,17	
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	35,81	40,07	41,87	43,21	44,37	45,05	46,11	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	n/a	70,45	71,67	72,89	74,10	75,32	76,29	
9	Indeks Ekonomi Biru	Nilai	n/a	25,89	26,03	26,17	26,31	26,60	26,74	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Nilai	6,06	6,15	6,28	6,40	6,53	6,66	6,78	
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp Miliar	3.640,69	3.824,02	4.007,34	4.190,67	4.373,99	4.468,12	4.557,32	
12	Ekspor Barang dan Jasa	Rp Miliar	1.213,30	1.521,71	1.810,24	2.098,78	2.387,32	2.496,70	2.675,86	
13	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	72,85 (2023)	75,00	77,5	80,00	82,50	85,00	86,00	
14	Persentase Desa Mandiri	%	54,76	47,62	54,76	61,90	69,05	76,19	83,33	
15	Rasio Pajak Terhadap PDRB	%	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	
16	Tingkat Inflasi	%	1,68	2,84	2,70	2,55	2,41	2,27	2,15	
IV Aspek Pelayanan Umum										
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,84	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	
2	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	1,72	1,80	1,90	1,90	2,00	2,00	2,20	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	n/a	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	
4	Indeks Integritas	Nilai	76,55	78,00	78,70	79,40	80,10	80,80	81,36	
5	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	72,72	75,00	78,00	83,00	88,00	93,00	95,00	
6	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	92,8	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Level	n/a	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
8	Indeks Rasa Aman (Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya)	%	n/a	65,91	66,98	68,08	69,16	70,26	71,34	
9	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72	3,73	
A	Pendidikan									
1	Angka Putus Sekolah	%	n/a	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,59	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Capaian SPM Pendidikan	%	79,17	100	100	100	100	100	100	
B	Kesehatan									
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,50	
2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	%	47,7	40	35	30	28	25	20	
3	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	%	98,67	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	50,38	65,00	66,10	67,90	69,70	80,00	80,50	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	%	45,34	44,73	53,02	55,31	57,68	60,32	62,78	
2	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	%	26,17	41,96	50,38	51,83	53,21	54,94	56,45	
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Indeks Infrastruktur Permukiman	%	64,52	55,85	63,58	69,26	75,55	81,84	88,07	
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	72,72	75	78	83	88	93	95	
3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	
4	Persentase Penanggulangan Bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
F	Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	n/a	0,59	0,63	0,67	0,72	0,76	0,8	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	%	97,62	97,65	97,70	97,75	97,80	97,85	97,90	
G	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	78,18	79,21	80,25	81,30	82,34	83,39	84,43	
2	Persentase penyerapan tenaga kerja daerah	%	51,2	52,17	52,20	52,21	52,22	52,23	52,24	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	89,70	89,80	89,90	90,00	90,10	90,20	90,30	
2	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Pratama (501)	Pratama (535)	Pratama (575)	Pratama (600)	Madya (625)	Madya (650)	Madya (675)	
3	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya (610)	Madya (620)	Madya (630)	Madya (640)	Madya (650)	Madya (660)	Madya (670)	
I	Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	62,34	62,64	62,94	63,23	63,53	63,83	64,13	
2	Ketersediaan Energi per Kapita	Kkal/Kapita/Hari	2.597	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
K	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,57	77,99	78,19	78,39	78,59	78,79	78,99	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,52	82,49	82,69	82,89	83,09	83,29	83,49	
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Indeks	47,12	64,28	64,35	64,41	64,48	64,55	64,62	
4	Indeks Pencemaran Air	Indeks	n/a	3,00	2,93	2,86	2,79	2,72	2,65	
5	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	n/a	40	39	38	37	36	35	
6	Persentase Tutupan Lahan	%	n/a	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	
7	Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	%	17,15	17,30	17,45	17,55	17,65	17,75	17,85	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72	
2	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	77,18	96,90	97,08	97,26	97,44	97,63	97,81	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Desa dengan Status Indeks Desa Mandiri	Desa	23	20	23	26	29	32	35	
2	Persentase Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	%	97,532	81,59	82,61	86,19	89,76	93,36	99,04	
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	64,90	65,00	65,70	66,00	67,10	67,50	67,75	
2	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	
O	Perhubungan									
1	Rasio Konektivitas	Indeks	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	
2	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Indeks	0,50	0,51	0,63	0,76	0,88	1,00	1,00	
3	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Indeks	0,77	0,77	0,87	0,90	0,93	1,00	1,00	
4	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	0,67	0,69	0,72	0,79	0,86	0,93	1,00	
P	Komunikasi dan Informatika									
1	Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Predikat	n/a	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	
2	Nilai Teknologi Digital	Nilai	n/a	1	1	2	2	3	3	
3	Nilai Kapabilitas dan Budaya Digital	Nilai	n/a	1	1	2	2	3	3	
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	76,76	78	79	80	81	82	83	
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Rupiah	167.801.337.933	103.531.577.394	109.475.348.535	115.419.091.266	121.362.799.275	127.306.466.249	133.250.085.880	
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	%	0,21	7,07	7,54	8,02	8,61	9,18	9,64	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	2,3	2,32	2,40	2,49	2,56	2,62	2,68	
4	Persentase Koperasi Aktif	%	73,00	73,13	73,27	73,40	73,53	73,66	73,79	
R	Penanaman Modal									
1	Persentase Peningkatan Investasi	%	n/a	7,46	8,33	11,54	13,79	15,15	15,79	
2	Jumlah Proyek Investasi/kegiatan investasi	Proyek	n/a	300	310	320	330	340	350	
3	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,72	3,74	3,76	3,78	3,80	3,82	3,84	
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional	Prestasi	3	4	4	5	5	6	6	
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	%	n/a	1	1	1,50	2	2,5	3	
3	Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Daerah	%	n/a	1	1	1,50	2	2,5	3	
T	Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,6	2,72	2,92	3,22	3,42	3,72	4,02	
U	Persandian									
1	Nilai Keamanan Siber	Nilai	n/a	1	1	2	2	3	3	
V	Kebudayaan									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	54,37	54,87	55,37	55,87	56,37	56,87	57,37	
2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	36,25	40,36	42,77	45,18	47,59	50,00	51,50	
W	Perpustakaan									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	80,47	80,75	81,75	82,75	83,75	84,75	85,75	
2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKMM)	Nilai	74,14	76,64	79,14	81,64	84,14	86,64	89,14	
X	Kearsipan									
1	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	81,6	82,85	84,35	85,85	87,35	88,85	90,35	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Ketentuan	%	54,84	61,29	67,74	74,19	80,64	87,09	93,55	
Y	Kelautan dan Perikanan									
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	109,83	110	111	112	113	114	115	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Nilai	105,56	106	106,5	107	107,5	108	108,5	
3	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	n/a	0,31	0,55	0,80	1,04	1,29	1,53	
4	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	n/a	5,76	11,61	17,46	23,31	29,40	35,25	
Z	Pariwisata									
1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata	%	13,24	13,49	13,74	13,99	14,24	14,49	14,74	
2	<i>Spending of Money</i> (dalam juta)	Rupiah	n/a	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	
3	Omzet Pelaku Kuliner (dalam miliar)	Rupiah	n/a	121	123	125	127	130	133	
A.1	Pertanian									
1	Rata-Rata Peningkatan Produksi Pertanian Tahunan	%	2,22	10,05	10,61	10,78	8,95	7,89	7,19	
2	Rata-Rata Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	-9,12	13,22	2,88	2,86	2,83	2,80	2,78	
A2	Kehutanan									
1	Tingkat Efektifitas Pengelolaan Tahura	%	20	20	25	27	30	32	35	
A.3	Perdagangan									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,31	10,54	10,81	11,05	11,38	11,69	11,92	
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
A.3	Perindustrian									
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12,67	12,70	12,80	12,90	13,00	13,20	13,50	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.4	Perencanaan									
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	91,61	92,41	93,21	94,01	94,81	95,61	96,41	
2	Persentase dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan	%	99,07	100	100	100	100	100	100	
A.5	Keuangan									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Tingkat Kesesuaian Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah terhadap Ketentuan yang Berlaku	%	87	90	92	95	98	100	100	
3	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	18,93	20,43	20,44	20,61	20,78	20,98	21,18	
4	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-0,85	5,50	1,63	3,14	3,17	3,21	3,24	
5	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Transfer Keuangan Daerah	%	97,53	97,68	97,83	97,98	98,13	98,28	98,43	
A.6	Kepegawaian									
1	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai	88,28	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
2	Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi	%	100	88	89	90	91	92	93	
A.7	Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun	%	48,59	51	52	53	54	55	56	
A.8	Penelitian dan Pengembangan									
1	Jumlah riset dan inovasi daerah ditindaklanjuti	Angka	6	7	8	9	10	11	12	
2	Jumlah Riset dan Inovasi Daerah	Angka	11	27	31	34	36	37	38	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.9	Penunjang Pemerintahan Umum (Sekretariat DPRD)									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	n/a	80	81	82	83	84	85	
2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	%	91,50	92	93	94	95	96	97	
A.10	Penunjang Pemerintahan Umum (Sekretariat Daerah)									
1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	n/a	2,65 (sedang)	2,75 (sedang)	2,85 (Sedang)	2,95 (Sedang)	3,20 (Sedang)	3,41 (Sedang)	
2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	%	n/a	75 (Efektif)	75 (Efektif)	80 (Efektif)	82 (Efektif)	83 (Efektif)	85 (Efektif)	
3	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Efektif	%	n/a	75 (Efektif)	75 (Efektif)	80 (Efektif)	82 (Efektif)	83 (Efektif)	85 (Efektif)	
4	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang Efektif	%	n/a	75 (Efektif)	75 (Efektif)	80 (Efektif)	82 (Efektif)	83 (Efektif)	85 (Efektif)	
A.11	Pengawasan (Inspektorat)									
1	Nilai Penjamin Kualitas SPIP	Nilai	4,148	4,148	4,149	4,150	4,151	4,152	4,153	
2	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
A.12	Penunjang (Pemerintahan Umum)									
1	Persentase Penurunan Insiden Konflik Sosial dan Potensi Konflik yang Teratasi	%	0	0	100	100	100	100	100	
2	Persentase Potensi Konflik yang berhasil diselesaikan	%	0	0	100	100	100	100	100	
A.13	Kewilayahan									
	Kecamatan Tanjungpandan									
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,59	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	3,70	
2	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	n/a	40	42	44	46	48	50	
3	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	n/a	70	75	80	85	90	95	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Realisasi Usulan dalam Hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk Musrenbang Kabupaten	%	n/a	54	55	56	57	58	59	
5	Persentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
Kecamatan Badau										
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,70	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	
2	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	n/a	70	72	74	76	78	80	
3	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	77	78	80	82	84	86	
4	Persentase Realisasi Usulan dalam Hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk Musrenbang Kabupaten	%	n/a	55	60	65	70	75	80	
5	Persentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
Kecamatan Sijuk										
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,55	3,55	3,60	3,63	3,65	3,67	3,67	
2	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	n/a	29	30	50	55	60	65	
3	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	n/a	90	90	90	90	90	90	
4	Persentase Realisasi Usulan dalam Hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk Musrenbang Kabupaten	%	n/a	52	52	53	53	54	55	
5	Persentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
Kecamatan Membalong										
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,61	3,48	3,53	3,58	3,63	3,68	3,73	
2	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	n/a	40	42	44	46	48	50	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	75	76	77	78	79	80	
4	Persentase Realisasi Usulan dalam Hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk Musrenbang Kabupaten	%	n/a	50	55	60	65	70	75	
5	Persentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
Kecamatan Selat Nasik										
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,40	3,42	3,45	3,46	3,47	3,49	3,50	
2	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	n/a	57	58	60	62	67	70	
3	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	n/a	70	72	75	77	80	82	
4	Persentase Realisasi Usulan dalam Hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk Musrenbang Kabupaten	%	n/a	65	67	70	72	73	75	
5	Persentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.4 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	%	97,79	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,72	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	76,86	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	42,12	100	100	100	100	100	100	
B	Kesehatan									
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota	Rasio	n/a	1.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83,24	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,98	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	101,43	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		92,50	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,35	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	82,63	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,5	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76,10	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	106,67	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	112,69	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	143,56	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	98,37	100	100	100	100	100	100	
C	Pekerjaan Umum									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	63,66	63,94	64,15	64,53	64,67	64,90	65,27	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	0	0	2,59	2,62	2,67	2,70	2,78	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	52,46	52,75	53,05	53,46	53,67	53,96	54,11	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	79,59	80,21	80,97	81,18	81,91	82,56	83,04	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70,11	70,27	70,53	70,77	70,91	71,25	71,73	
6	Mengukur Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	88,85	89,31	89,57	90,32	90,61	91,03	91,46	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		48,88	52,99	57,05	61,81	65,33	69,36	73,78	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	19,23	100	100	100	100	100	100	
D	Perumahan									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	%	0	0	11,11	33,33	55,56	77,78	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	25	50	75	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	0	2,55	7,64	11,77	21,96	32,14	41,72	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	18,59	17,26	17,19	17,11	17,03	16,95	16,88	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	32,57	35,03	44,52	45,86	49,83	50,91	55,78	
E	Ketentraman									
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	72,72	75	78	83	88	93	95	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83,33	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	16,9	15	15	15	15	15	15	
F	Sosial									
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
G	Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	5,88	5,92	6,10	6,25	6,37	6,53	6,79	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,49	2,78	2,89	3,22	3,45	3,67	3,89	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	78,18	79,21	80,25	81,30	82,34	83,39	84,43	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	65,8	65,8	66,50	67,21	67,91	68,62	69,33	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	64	64,35	64,40	64,45	64,50	64,55	64,60	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	44,11	45,39	46,31	47,58	48,96	49,67	50,19	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	96,15	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	23,28	22,97	22,46	21,83	21,35	20,72	20,15	
I	Pangan									
1	Persentase Cadangan Pangan	%	91,01	141,91	129,41	129,41	129,41	135,66	141,91	
J	Pertanahan									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	5	10	15	20	25	30	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	-	5	10	15	20	25	30	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	-	5	10	15	20	25	30	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	5	10	15	20	25	30	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	5	10	15	20	25	30	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	100	100	100	100	100	100	
K	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	69,84	76,81	76,98	77,15	77,32	77,49	77,67	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	%	61,07	65	68	72	76	79	85	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	56,25	56,25	52,5	58,93	57,14	55,36	53,73	
L	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
1	Perekaman KTP Elektronik	%	98,99	99	99,05	99,10	99,15	99,20	99,25	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	63,08	65	67	69	71	73	75	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,18	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	99,65	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	74,19	100	100	100	100	100	100	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	-	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	-	100	100	100	100	100	100	
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,85	77,90	78,00	78,10	78,20	78,29	78,35	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7,10	7,08	7,06	7,04	7,02	7,01	7,00	
O	Perhubungan									
1	Rasio konektivitas	Indeks	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	Angka	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	
P	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	71,33	72,33	73,33	74,33	75,33	76,33	77,33	
Q	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	35,61	36,05	37,76	38,78	39,80	40,82	41,84	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	45,59	46,11	46,61	47,11	47,59	48,07	48,54	
R	Penanaman Modal									
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	2,27	7,46	8,33	11,54	13,79	15,15	15,79	
S	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,72	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	75,44	76	76	76,25	76,50	77	77	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	3	3	3	4	4	5	5	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T	Statistik									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
U	Persandian									
1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	%	68,68	70,23	72,17	74,44	76,35	78,28	80,61	
V	Kebudayaan									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	21,05	28,95	31,58	34,21	34,21	36,84	36,84	
W	Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,14	74,64	79,14	81,64	84,14	86,64	89,64	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	80,47	80,75	81,75	82,75	83,75	84,75	85,75	
X	Kearsipan									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) tentang kearsipan	Persentase (%)	66,15	69,65	73,15	76,65	80,15	83,65	87,15	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase (%)	58,91	60,05	61,19	62,33	63,47	64,61	65,75	
Y	Kelautan dan Perikanan									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Ton	41.202	41.352	41.477	41.602	41.727	41.853	41.978	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Z	Pariwisata									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	1,02	2,34	2,74	3,11	3,45	3,75	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	0	0,63	0,72	1,07	1,41	1,74	2,74	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	24,91	25,00	27,50	30,00	35,00	40,00	45,00	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0	4,72	4,97	5,22	5,47	5,72	5,97	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,24	13,49	13,74	13,99	14,24	14,49	14,74	
AA	Pertanian									
1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun									
1.a	Padi	ton/ha	2,612	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	
1.b	Cabai	ton/ha	3,56	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	
1.c	Lada (Lada Kering)	ton/ha	0,97	1,13	1,19	1,25	1,31	1,38	1,49	
1.d	Sawit (TBS)	ton/ha	12,61	13,24	13,90	14,60	15,33	16,10	16,90	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-37,89	2	2	2	2	2	2	
AB	Perdagangan									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	83,27	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	82,31	82,50	82,75	83,00	83,25	83,50	83,75	
AC	Perindustrian									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	2,33	2,35	2,37	2,40	2,42	2,45	2,50	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	0	0	50	60	70	80	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	75	80	85	90	95	100	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75	77	79	81	83	85	90	
AC Perencanaan dan Keuangan										
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	17,33	17,15	17,15	17,00	16,45	16,30	16,15	
2	Rasio PAD	%	18,93	20,43	20,44	20,61	20,78	20,98	21,18	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	78,72	78,50	78,25	78,00	77,50	77,25	76,50	
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
7	Akses Publik terhadap Infomrasi Keuangan Daerah (<i>Public acces to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
AD	Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	n/a	77,85	77,85	80	85	96,07	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	n/a	71,47	71,47	80,46	85	90	100	
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	%	28,23	30	30	32	35	40	45	
AE	Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82,69	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	83,00	
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,87	28,95	29,00	29,05	29,10	29,15	29,20	
3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	59,006	59,05	59,10	59,15	59,20	59,25	59,30	
AF	Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)									
1.	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,7	7,5	7,2	7,0	6,8	6,7	6,5	
2.	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	19,52	5,65	5,59	5,53	5,48	5,42	5,36	
3.	<i>Assets Management</i>	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	15,06	15	14,5	14	13,5	13	12,5	
AF	Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)									
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92	93	94	95	96	97	98	
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 (data diolah)

4.2.5 Indikator Utama Pembangunan

Tabel 4.6 Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TRANSFORMASI SOSIAL									
IE 1	KESEHATAN UNTUK SEMUA									
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	72,76	74,15	74,49	74,83	75,16	75,50	75,77	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:									
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	129,9	146	138	130	122	114	107	
2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	16,3	18,30	17,50	16,70	15,90	15,10	14,46	
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):									
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	n/a	66	67,81	69,63	71,44	73,25	74,70	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	n/a	91,43	91,84	92,25	92,66	93,07	93,40	
4	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
IE 2	PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA									
5	Hasil Pembelajaran:									
5.a.i	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca									
	- SD	%	78,85	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50	
	- SMP	%	89,54	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50	
5.a.ii	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi									
	- SD	%	72,27	62,54	63,04	63,54	64,04	64,54	65,04	
	- SMP	%	81,87	75,59	76,09	76,59	77,09	77,59	78,09	
5.b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,05	9,02	9,16	9,31	9,45	9,59	9,70	
5.c	Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	12,09	12,42	12,58	12,74	12,90	13,06	13,19	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	n/a	8,73	8,79	8,84	8,90	8,95	8,99	
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Perusahaan	%	n/a	21	24	27	29	32	34	
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif									
8	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,11	5,20	4,91	4,62	3,75	3,06	2,59	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	%	n/a	35,53	38,06	40,59	43,12	45,65	47,67	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	n/a	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	42,60	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TRANSFORMASI EKONOMI									
IE4	IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi									
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	n/a	12,83	12,75	12,67	12,59	12,51	12,46	
12	Pengembangan Pariwisata									
12.a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	n/a	4,54	4,71	4,88	5,05	5,22	5,34	
12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	Ribu Orang	7,21	7,55	8,11	8,68	9,24	9,80	10,78	
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap PDRB Kabupaten (%)	%	n/a	34,48	34,67	34,86	35,04	35,23	35,36	
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD		n/a							
14.a.i	Proporsi jumlah usaha mikro non pertanian pada level Kabupaten (%)	%	n/a	78,16	78,23	78,30	78,36	78,43	78,48	
14.a.ii	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Kabupaten (%)	%	n/a	99,70	99,66	99,62	99,58	99,54	99,53	
14.b	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	n/a	5,94	6,32	6,70	7,08	7,46	7,76	
14.c	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	%	n/a	0,72	0,81	0,89	0,98	1,06	1,14	
14.d	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	n/a	1,86	1,96	2,06	2,15	2,25	2,33	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik									
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,88	3,74	3,51	3,34	3,16	2,95	2,82	
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	n/a	50,00	52,78	55,56	58,33	61,11	63,33	
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	n/a	50,79	51,51	52,22	52,94	53,65	54,22	
17	Indeks Kapabilitas Inovasi	Nilai	n/a	2,07	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08	
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau									
18	Tingkat Penerapan ekonomi hijau									
18.a	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Nilai	n/a	70,45	71,67	72,89	74,10	75,32	76,29	
IE6	Transformasi Digital									
19	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Nilai	n/a	5,90	5,99	6,08	6,16	6,25	6,32	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	n/a	22,29	22,28	22,27	22,25	22,24	22,23	
21	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	%	n/a	14,17	14,18	14,20	14,21	14,22	14,23	
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
22	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan :									
22.a	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	72,85 (2023)	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	86,00	
22.b	Persentase Desa Mandiri	%	n/a	59,52	68,45	77,38	86,31	95,24	96,19	
TRANSFORMASI TATA KELOLA										
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif									
23	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,84	70	71	73	74	75	76	
24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,35	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	
25	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,3	4,10	4,15	4,20	4,25	4,3	4,35	
26	Indeks Integritas	Nilai	76,55	78,00	78,70	79,40	80,10	80,80	81,36	
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH										
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansi									
27.a	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	72,72	70,00	71,88	73,75	75,63	77,5	79,00	
27.b	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	92,8	80,00	80,63	81,25	81,88	82,5	83,00	
28	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	n/a	65,91	67,00	68,09	69,17	70,26	71,13	
29	Indeks Demokrasi Indonesia	Level	n/a	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
IE 11	STABILITAS EKONOMI MAKRO									
30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%):	%	n/a	0,72	0,70	0,68	0,66	0,64	0,63	
31	Tingkat Inflasi (%)	%	n/a	2,84	2,70	2,56	2,41	2,27	2,15	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan									
32.a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	n/a	26,78	28,73	30,67	32,62	34,56	36,12	
32.b	Total Kredit/PDRB (%)	%	n/a	16,50	18,60	20,69	22,79	24,88	26,55	
33	Kontribusi PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	%	2,47	2,48	2,49	2,50	2,51	2,52	2,54	
IE12	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN BERDAYA GENTAR KAWASAN									
34	Jumlah Kerjasama Kabupaten	Jumlah	17	17	18	18	19	20	20	
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
35.a	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagae budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	21,05	26,32	31,58	36,85	42,11	47,37	52,63	
35b.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	2,06	9,03	10,06	11,09	12,11	13,14	17,14	
36.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	n/a	76,66	77,10	77,54	77,98	78,42	78,77	
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif									
37	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	65,32	69,56	69,90	70,24	70,57	70,91	71,21	
38	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	n/a	0,275	0,268	0,261	0,254	0,247	0,236	
IE15	LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS									
39	Jumlah Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat yang dapat mengakses pemanfaatan keanekaragaman hayati secara partisipatif di hutan dan lahan; perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat (Kumulatif)	Jumlah	n/a	6	0	8	9	10	11	
40	Kualitas Lingkungan Hidup									
40 a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	n/a	76,81	76,98	77,15	77,32	77,49	77,66	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
40.b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	0,88	6,12	9,59	13,06	16,53	20,00	22,00	
40.c	Pengolahan Sampah									
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	n/a	8,00	12,50	17,00	21,50	26,00	29,60	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	%	n/a	40,00	43,25	46,50	49,75	53,00	55,60	
IE16	BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN									
41.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan									
41.a	Ketahanan Energi									
	- Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	n/a	1.477	1.627	1.778	1.928	2.078	2.154	
41.b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment (%)</i>)	%	n/a	11,94	11,21	10,48	9,74	9,01	8,41	
41.c	Ketahanan Air									
	Kapasitas Air Baku (M3/detik)	M3/detik	0,44	0,55	0,69	0,83	0,96	1,10	1,21	
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum perpipaan (%)	%	n/a	30,97	35,29	39,60	43,92	48,23	51,68	
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
42.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	n/a	117,14	116,06	114,97	113,89	112,80	111,93	
43.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)									
43a.	Kumulatif	%	n/a	17,93	19,16	20,39	21,61	22,84	23,82	

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (diolah)

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk satu periode atau lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan dokumen pendukung lainnya guna menghasilkan substansi yang komprehensif. Selain itu, dokumen terkait juga telah mengintegrasikan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta memanfaatkan hasil evaluasi capaian pembangunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024. Secara substansial, dokumen perencanaan tersebut telah memuat keadaan *existing* yang mencakup kondisi aspek geografi dan demografi, kondisi aspek kesejahteraan masyarakat, kondisi aspek daya saing daerah, kondisi aspek pelayanan umum, kondisi keuangan daerah, dan isu strategis Kabupaten Belitung. Kondisi capaian-capaian tersebut digunakan sebagai landasan dalam merumuskan perencanaan pembangunan sehingga dokumen terkait juga sudah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan.

Secara keseluruhan, penyusunan RPJMD di atas telah mengupayakan kesinambungan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam hal kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang setiap tahunnya ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja, Perangkat Daerah (PD) melakukan pengendalian pelaksanaan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang dimana melalui tahap tersebut juga akan ditemukan aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Berdasarkan proses dan hasil penyusunan RPJMD di atas, Pemerintah Kabupaten Belitung diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun atas **Visi dan Misi Bupati Terpilih Djoni Alamsyah**

Hidayat, S.Sos dan Wakil Bupati Terpilih Syamsir, S.Kom, yang dilantik pada Tanggal 20 Februari 2025. RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Raya dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 pasca penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 ini;
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029; dan
8. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang



menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Belitung dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Belitung dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung bersama dengan DPRD Kabupaten Belitung berkomitmen serta bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Belitung ini dan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025 hingga tahun 2029 termasuk mengawal Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN **2025**
BELITUNG **2029**